



Laporan Penelitian

Komunitas Lereng Merapi

Serta Respon Terhadap Erupsi Merapi 2010



Laboratorium Antropologi
Untuk Riset dan Aksi
Universitas Gadjah Mada



AUSTRALIA - INDONESIA
FACILITY FOR
DISASTER REDUCTION

KATA PENGANTAR

Bencana alam erupsi Gunung Merapi 2010 merupakan salah satu dari berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia yang silih berganti pada awal abad 21. Oleh karena itu, bencana alam menjadi perhatian semua pihak, guna mengkaji sebab dan dampak serta bagaimana menanggulangnya. Selama lebih dari tiga dasawarsa, para ahli antropologi di lingkungan UGM sebenarnya telah menaruh perhatian terhadap keberadaan Gunung Merapi yang aktif mengeluarkan erupsi sehingga berdampak pada sistem adaptasi orang Jawa terhadap lingkungan fisik dan sosial. Hasil studi para antropolog telah memberikan sumbangan yang berharga bagi pemerintah dan semua pihak dalam rangka melakukan program penanggulangan bencana erupsi Merapi. Namun demikian, dengan erupsi Merapi 2010 yang begitu dahsyat, berbagai pihak mendesak perlu dilakukan studi yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai watak komunitas di lereng Merapi dan responnya terhadap bencana alam agar dihasilkan strategi penanggulangan bencana dan sekaligus pemberdayaan para korban.

LAURA (Laboratorium Antropologi untuk Riset dan Aksi) Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya UGM merupakan salah satu lembaga penelitian yang ikut terlibat dalam agenda penelitian tentang bencana. LAURA dapat mewujudkan studi yang bisa menghasilkan skema strategi penanggulangan dan pemberdayaan dengan memakai pendekatan budaya. Selama satu tahun LAURA melakukan studi komunitas Lereng Merapi di tiga puluh dusun, dan hasil studi ini terwujud dalam tiga laporan. Pertama adalah laporan yang disajikan dalam bentuk laporan induk ini, laporan tentang masalah gender, dan ketiga dalam bentuk film etnografi.

Laporan induk penelitian komunitas Merapi ini terlaksana berkat dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menghaturkan terma kasih yang amat mendalam kepada para pihak tersebut.

1. AusAID-AIFDR (*Australia- Indonesia Facility For Disaster Reduction*) sebagai lembaga donor yang mensponsori seluruh kegiatan penelitian.

Pihak LAURA sangat difasilitasi oleh ko-direktur AIFDR, yakni Dr. Matt Hayne (AusAID) dan Wisnu Widjaja (BNPB); Rina Amalia, Tini Astuti, Dimas Purnama, dan para staff AIFDR telah memberikan dukungan hingga berakhirnya penelitian ini; Wita Katoppo telah sejak awal menjembatani AIFDR dengan LAURA. Mereka telah memberikan masukan yang berharga guna meningkatkan kualitas penelitian dari segi perumusan masalah penelitian sampai dengan proses pengumpulan dan analisis data.

2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memberikan masukan yang tepat mengenai metodologi riset dan berbagai topik bahasan yang perlu diangkat melalui penelitian kualitatif.
3. Pimpinan UGM, khususnya Prof. Dr. Ainun Na'im yang ketika penelitian ini dimulai menjabat sebagai wakil rektor senior dan telah memfasilitasi terbangunnya kerjasama UGM dengan AusAID-AIFDR dalam rangka program penanggulangan bencana erupsi 2010.
4. Pusat Studi Asia Pasifik – Universitas Gadjah Mada selaku mitra kerja LAURA dalam melakukan kegiatan penelitian khususnya dalam rangka menyelenggarakan kegiatan FGD dan sosialisasi hasil penelitian kepada mitra di daerah.
5. Dr. Poppy Ismalina dari UGM yang telah memfasilitasi kerjasama LAURA dengan AusAUD- AIFDR serta membantu koordinasi kelembagaan di UGM.
6. Prof. Dr. Susetiawan dari Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan – Universitas Gadjah Mada, dan Drs. Bambang Hendarto Suta Purwana yang menjalankan evaluasi dan monitoring penelitian.
7. Prof. Dr. P.M laksono, Prof. Dr. Hari Purwanto, dan Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra selalu konsultan penelitian. Mereka dapat mencurahkan perhatian untuk memberikan masukan yang krusial bagi peningkatan kualitas laporan.

8. Dekan Fakultas Ilmu Budaya UGM, Dr. Ida Rochani Adi, S.U, yang memberikan fasilitas infrastruktur dalam kampus untuk mendukung penyelenggaraan penelitian ini.
9. Para dosen senior di jurusan antropologi seperti Dr. Pujo Semedi; Dr. G.R. Lono LastoroSimatupang, MA; Dr. Anna Marie Wattie; Dr. Atik Tri Ratnawati; dan Dra. Tuti Gandarsih yang memberikan masukan dalam penyusunan laporan.
10. Para mitra kerja penelitian di lapangan seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten beserta jajarannya yang telah memberikan ijin dan mendukung pelaksanaan FGD, sosialisasi dan penelitian di lapangan.
11. Para kepala desa, kepala dusun serta para asisten lokal yang berasal dari setiap dusun lokasi penelitian. Mereka ini memberikan informasi dan kemudahan dalam melakukan aktivitas pengumpulan data.
12. Para asisten peneliti dari kalangan mahasiswa dan para sarjana antropologi. Mereka ini telah bertindak sebagai enumerator sehingga terkumpul data penelitian.
13. Berbagai media seperti KR dan organisasi masyarakat sipil khususnya LSM seperti pasak Merapi yang ikut memberikan data yang berharga dalam kegiatan workshop, *Focus Group Discussion* (FGD) dan diskusi hasil studi.

Yogyakarta, 13 Agustus 2012

Koordinator Peneliti,
Bambang Hidayana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SKEMA	xix
DAFTAR GRAFIK	xx
DAFTAR FOTO	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	4
1.3 Tinjauan Pustaka	5
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Hasil Penelitian	10
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Metode Penelitian	13
1.8 Lokasi Penelitian	15
1.9 Sistematika Penulisan	15
BAB II GUNUNG MERAPI	18
2.1 Identifikasi dan Sejarah Pembentukan Gunung Merapi	18
2.1.1 Identifikasi Merapi	18

2.1.2	Sejarah Pembentukan Gunung Merapi	19
2.2	Sejarah Erupsi Gunung Merapi	22
2.3	Dampak Aktivitas Merapi Tahun 2010	35
2.3.1	Korban Jiwa Erupsi Gunung Merapi 2010	35
2.3.2	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Erupsi Merapi 2010	37
2.3.2.1	Sektor Ekonomi Produktif	38
2.3.2.2	Sektor Infrastruktur	39
2.3.2.3	Sektor Permukiman	42
2.3.2.4	Sektor Sosial	44
2.3.2.5	Lintas Sektor	46
2.4	Dampak Erupsi, Respon Pemerintah dan Masyarakat	47
2.4.1	Respon Pemerintah dan Masyarakat Luas	50
2.5	Kesimpulan	59
BAB III	PROFIL DUSUN DI LERENG MERAPI	62
3.1	Lokasi Dusun dan Posisinya dalam KRB	62
3.2	Sejarah Perkembangan Dusun	66
3.3	Dusun dalam Pemerintahan Desa	70
3.4	Demografi	73
3.4.1	Jumlah dan Kepadatan Penduduk	73
3.4.2	Penduduk Menurut Pekerjaan	76
3.4.4	Penduduk Menurut Pendidikan	78
3.4.5	Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	79
3.5	Infrastruktur Dusun	81

3.5.1	Rumah dan Listrik _____	82
3.5.2	Jalan _____	84
3.5.3	Air Bersih dan MCK _____	86
3.5.4	Sarana Ibadah _____	87
3.6	Rangkuman _____	88
BAB IV ADAPTASI EKOLOGI DAN EKONOMI _____		89
4.1	Pendahuluan _____	89
4.2	Trend Perubahan Pola Adaptasi Ekologi dan Ekonomi _____	90
4.2.1	Pergeseran dari Tanaman Pangan ke Rumput dan Peternakan Sapi _____	91
4.2.2	Pergeseran dari Tanaman Pangan ke Sayuran _____	94
4.2.3	Pergeseran dari Tanaman Pangan ke Salak _____	95
4.2.4	Pergeseran dari Tanaman Jagung ke Tembakau dan Lainnya _____	97
4.3	Pertanian Pangan _____	98
4.3.1	Petani Produsen Jagung _____	98
4.3.2	Strategi Produksi Budidaya Jagung _____	102
4.3.3	Peran Jagung dalam Ekonomi Rumah Tangga dan Komunitas _____	105
4.4	Pertanian Salak; Menjamin “Penghidupan” dan “Menghidupi Merapi” _____	107
4.4.1	Luas Lahan Salak Terdampak Erupsi Merapi 2010 _____	109
4.4.2	Potensi Ekologis Merapi terhadap Perkembangan Pertanian Salak _____	111
4.4.3	Sejarah Perkembangan Pertanian Salak _____	112

4.4.4	Erupsi Merapi 2010 _____	117
4.4.5	Pemulihan Tanaman Salak Pasca Erupsi _____	117
4.4.6	Salak sebagai Jaminan Penghidupan: Pola Kepemilikan, Pengelolaan, dan Kesejahteraan. _____	119
4.4.7	Merawat Salak; Menumbuhkan dan Memahami Lingkungan _____	123
4.4.8	Mengerem Ekspansi Monokropping Salak menuju Kearifan Ekologis Pasca Erupsi Merapi 2010 _____	130
4.5	Ekonomi Tembakau _____	132
4.5.1	Pendahuluan _____	132
4.5.2	Produksi _____	133
4.5.3	Budidaya Tembakau dan Adapatasi Ekologi _____	137
4.5.4	Tembakau dan Peternakan Sapi _____	143
4.5.5	Perdagangan Tembakau _____	144
4.5.6	Kesejahteraan Petani Tembakau _____	148
4.5.7	Keberlanjutan Pertanian Tembakau _____	151
4.6	Pertanian Sayur _____	152
4.6.1	Sejarah Perkembangan Usaha Tani Sayuran _____	152
4.6.2	Pemanfaatan Lahan _____	155
4.6.3	Jenis-Jenis Tanaman Sayuran Utama dan Perawatannya _____	157
4.6.4	Budidaya Sayuran Masa Kini _____	161
4.6.5	Pengadaan Modal Usaha Tani Sayuran _____	166
4.6.6	Petani Sayur Pasca Letusan Tahun 2010 _____	170
4.7	Peternakan Sapi _____	173

4.7.1	Sejarah Perkembangan dan Pola Usaha Peternakan Sapi	174
4.7.2	Pengelolaan Usaha Peternakan Sapi	181
4.7.2.1	Kepemilikan dan Pengadaan Bibit dan Induk Sapi	181
4.7.2.2	Skala Usaha	184
4.7.2.3	Kandang	186
4.7.3	Kontribusi Peternakan Sapi terhadap Agroekologi di Pedesaan Merapi	188
4.7.4	Kontribusi Usaha Peternakan Sapi terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga	191
4.7.5	Pengungsian dan Penyelamatan Ternak Era dan Pasca Erupsi 2011	198
4.8	Penambang Pasir dan Batu	202
4.8.1	Siklus Produksi Penambangan Pasir dan Batu	204
4.8.2	Organisasi Penambangan Pasir dan Batu	207
4.8.3	Teknologi dan Organisasi Kerja	211
4.8.4	Distribusi dan Pemasaran Pasir	217
4.8.5	Peran Stakeholder dalam Ekonomi Penambangan Pasir.	221
4.8.6	Penggilingan Batu.	227
4.8.7	Ekonomi Pasir dan Batu bagi Kesejahteraan Rumah Tangga di Merapi	229
4.8.8	Bencana, Penanggulangannya, dan Penambang Pasir/Batu	233
4.9	Trend Kemakmuran	236
BAB V	SISTEM SOSIAL DALAM KOMUNITAS DUSUN	242

5.1	Relevansi Organisasi Keekerabatan dalam Memahami Relasi Sosial Komunitas _____	242
5.1.1	Identifikasi Hubungan Keekerabatan _____	243
5.1.1.1	Sistem perkawinan dan garis keturunan _____	243
5.1.1.2	Konsep tentang Keluarga: Keluarga Batih dan Keluarga Luas _____	245
5.1.1.3	Konsep tentang Rumah Tangga _____	247
5.1.2	Fungsi Organisasi Keekerabatan _____	248
5.1.2.1	Ekonomi _____	248
5.1.2.2	Sosial _____	249
5.1.3	Komunitas dan Keekerabatan _____	250
5.1.4	Fungsi Keekerabatan dalam konteks kebencanaan _____	254
5.1.5	Rangkuman _____	260
5.2	Struktur Sosial _____	261
5.2.1	Kelas Sosial Ekonomi _____	261
5.2.1.1	Lapisan Elit _____	263
5.2.1.2	Golongan Menengah _____	266
5.2.1.3	Golongan Bawah dan Miskin _____	269
5.2.1.4	Konsekuensi Sosial dan Ekonomi Dalam Konteks Kebencanaan _____	272
5.2.2	Golongan Tua dan Muda _____	276
5.2.2.1	Golongan Tua dan Muda Dalam Kehidupan Sosial Budaya _____	277
5.2.2.2	Golongan Tua dan Muda Dalam Kehidupan Ekonomi _____	281

5.2.3	Golongan Tua dan Muda dalam konteks kebencanaan	282
5.2.4	Kesimpulan	286
5.3	Kepemimpinan	287
5.3.1	Pemimpin Komunitas	290
5.3.2	Pemimpin Sektoral	296
5.3.2.1	Pemimpin Keagamaan	296
5.3.2.2	Pemimpin Selamatan	298
5.3.2.3	Pemimpin Kelompok Tani dan Kelompok Peternak	299
5.3.2.4	Pemimpin Perkumpulan LINMAS dan SAR	300
5.3.3	Suksesi Kepemimpinan: Kontestasi Internal dan Eksternal	302
5.3.4	Peran Pemimpin dalam Penanggulangan Bencana Alam	310
5.4	Solidaritas Sosial	315
5.4.1	Gotong-royong	316
5.4.2	Sumbang Menyumbang dalam Hajatan dan Musibah	319
5.4.3	Kerja Bakti	322
5.4.4	Kegiatan Selamatan Kampung dan Kenduri Keluarga	324
5.4.5	Harmoni dan Konflik Sosial	328
5.4.6	Rangkuman	334
5.5	Relasi Gender	335
5.5.2	Penguasaan Aset dan Pendapatan	335
5.5.3	Alokasi Waktu Perempuan dan Laki-laki	345
5.5.4	Perempuan dalam Kegiatan Kemasyarakatan	353

5.5.5	Relevansi Kesetaraan Gender dalam Penanggulangan Bencana	357
<hr/>		
BAB VI	SISTEM KEPERCAYAAN DAN RITUAL WARGA MERAPI	358
<hr/>		
6.1	Pendahuluan	358
6.2	Bentang Kepercayaan Lokal Merapi	360
6.2.1	Mitos Lokal Mengenai Empu Permadi dan Empu Rama	360
6.2.2	Mitos Lokal Mengenai Mbah Petruk	362
6.2.3	Mitos Lokal Mengenai Kyai Sapu Jagad	364
6.2.4	Mitos lokal mengenai Nyai Gadung Melati	365
6.2.5	Mitos Juru Kunci Merapi: Mbah Maridjan dan Labuhan	366
6.3	Pepundhen, Petilasan dan Tempat-Tempat Wingit	371
6.4	Selamatan: Stabelan Sebuah Titik Masuk	374
6.4.1	Selamatan Gunung	380
6.4.2	Selamatan Dusun	382
6.4.2.1	Suran, Saparan, Mulud (Sekaten) Rajaban, Ruwahan (Nyadran)	383
6.4.2.2	Memerti Kali dan Tuk	387
6.4.3	Selamatan Daur Hidup	390
6.4.4	Selamatan Daur Pertanian dan Peternakan	391
6.5	Potensi Mitigasi Melalui Ritual	392
6.6	Penutup: Ritual untuk WargaMerapi	395
BAB VII	PARTISIPASI WARGA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ERUPSI MERAPI 2010	401

7.1	Mitigasi Bencana Alam	401
7.1.1	Peningkatan Kepekaan Batin (Eling lan Waspada)	402
7.1.2	Ritual Keagamaan	407
7.1.3	Pengaturan Tata Ruang dan Penerapan Teknologi Tepat Guna	411
7.1.3.1	Tata ruang	411
7.1.3.2	Pembangunan Basecamp dan Gardu Pandang	412
7.1.4	Respon Warga terhadap Mitra: Program Pemerintah dan LSM	414
7.1.4.1	Program pemerintah	414
7.1.4.2	Program LSM	419
7.1.5	Rangkuman	422
7.2	Evakuasi	423
7.2.1	Pola Pengungsian Masa Lalu dan Masa Kini	423
7.2.2	Evakuasi Mandiri	425
7.2.2.1	Evakuasi Mandiri secara Individual	428
7.2.2.2	Evakuasi Mandiri Berbasis Keluarga	431
7.2.2.3	Evakuasi Mandiri Berbasis Komunitas Dusun	433
7.2.3	Pengungsian Berbasis Mobilisasi Pihak Luar	437
7.2.4	Rangkuman	438
7.3	Pengungsian	440
7.3.1	Jumlah Pengungsi dan Lokasi Pengungsian	440
7.3.2	Pemberitaan Media tentang Pengungsian	446
7.3.3	Perilaku Pengungsi di Lokasi Pengungsian	448

7.3.4	Respon Pemangku Kepentingan Terhadap Pengungsi dan Pengungsian _____	451
7.3.5	Rangkuman _____	455
7.4	Huntara (Hunian Sementara) _____	456
7.4.1	Pendahuluan _____	456
7.4.1	Konsep Huntara _____	458
7.4.3	Kondisi Eksisting Huntara: Plosokerep dan Kuwang _____	461
7.4.4	Respon Masyarakat Terhadap Huntara _____	465
7.4.4.1	Menempati Hunian _____	465
7.4.4.2	Aktivitas ekonomi _____	468
7.4.4.3	Aktivitas Sosial Kultural _____	470
7.4.5	Partisipasi Komunitas dan Warga Dalam Mengelola Hunian Sementara _____	472
7.4.6	Keputusan Untuk Tetap Tinggal Di Hunian Sementara Atau Kembali Ke Kampung _____	475
7.5	Rehabilitasi dan Rekontruksi _____	478
7.5.1	Rekonstruksi Sektor Perumahan dan Pemukiman _____	478
7.5.2	Relokasi _____	480
7.5.2.1	Dilema dan Ketidakjelasan Proses Relokasi dan Rekontruksi _____	482
7.5.2.2	Respon Warga Terhadap Program Relokasi dari Pemerintah _____	484
7.5.2.3	Hidup dan Penghidupan _____	488
7.5.2.4	Program Rekontruksi Dari LSM dan Swasta _____	489

7.5.2.5	Gotong Royong dan Rekontruksi Mandiri Warga	490
7.5.2.6	Relokasi: Strategi, Syarat, dan Taktik	492
7.6	Rekontruksi Sektor Infrastruktur	494
7.7	Rehabilitasi (Pemulihan)	496
7.7.1	Pemulihan Sosial	496
7.7.1.1	Ekonomi Produksi	496
7.7.1.2	Usaha Kecil dan Menengah	498
7.7.1.3	Dinas Sosial: Kredit Usaha Bersama (KUBE)	599
7.7.1.4	Kerajinan	501
7.7.1.5	Perikanan	502
7.7.1.6	Pariwisata	504
7.7.2	Pemulihan Psikologis	505
7.7.2.1	Pendidikan	507
7.7.2.2	Kesehatan	507
BAB VIII PEMBAHASAN: MENUJU PENANGGULANGAN BENCANA ALAM SECARA PARTISIPATIF DAN PERAN KONSTRUKTIF NEGARA		
		509
8.1	Butir-Butir Temuan Studi	510
8.2	Penanggulangan Bencana Erupsi Merapi dalam Sistem Adaptasi Masyarakat Lokal.	516
8.2.1	Mitigasi	518
8.2.2	Evakuasi dan Pengungsian	520
8.2.3	Rekonstruksi dan Rehabilitasi	522
8.3	Penanggulangan Bencana Berbasis pada Partisipasi Masyarakat Lokal	525

8.3.1	Partisiapi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	525
8.3.1.1	Keluarga Batih dan Jaringan Kekerabatan	525
8.3.1.2	Organisasi Komunitas Dusun	526
8.3.1.3	Kepemimpinan	528
8.3.1.4	Solidaritas horizontal	531
8.3.1.5	Kesetaraan Gender	531
8.3.2	Pengembangan Konsep Partisipasi Masyarakat	532
BAB IX	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	536
9.1	Kesimpulan	536
9.2	Rekomendasi	541
DAFTAR PUSTAKA		545

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Dusun dalam Desa Sampling _____	15
Tabel 2.1	Jarak Luncur Awan Panas dari Tahun 1822-2010 _____	34
Tabel 2.2	Data Korban di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah _____	34
Tabel 2.3	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah _____	34
Tabel 2.4	Nilai Kerugian Beberapa Komoditas di D.I. Yogyakarta _____	39
Tabel 2.5	Kerusakan Jalan Desa dan Kabupaten di Kabupaten Sleman ____	41
Tabel 2.6	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Perumahan dalam Rupiah _____	43
Tabel 2.7	Nilai Kerusakan dan Kerugian Dalam Sektor Sosial di Provinsi Jawa Tengah dan DIY _____	45
Tabel 2.8	Data Pengungsi Erupsi Gunung Merapi Per Tanggal 10 Juni 2006 _____	50
Tabel 3.1	Distribusi Nama Dusun Sampel Penelitian di Empat Kabupaten Menurut KRB _____	63
Tabel 3.2	Distribusi Penduduk di Lereng Merpai Menurut KRB Tahun 2011 _____	75
Tabel 3.3	Distribusi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Lereng Merapi Menurut KRB Tahun 2011 _____	76
Tabel 3.4	Distribusi Pekerjaan Penduduk di Kabupaten Lereng Merapi Menurut KRB Tahun 2010 _____	77
Tabel 3.5	Distribusi Penduduk Dusun di Lereng Merapi di Tiga KRB Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011 _____	79
Tabel 3.6	Penduduk Dusun di Lereng Merapi di Tiga KRB Menurut Tingkat Pendidikan _____	80
Tabel 4.1	Komposisi Penggunaan Lahan di Lereng Merapi _____	91

Tabel 4.2	Luas Areal Tanaman, Jumlah dan Luas Garapan Petani Jagung di Tujuh Dusun _____	100
Tabel 4.3	Luas Lahan, dan Tanaman serta Produksi Salak Pondoh Per Kabupaten _____	108
Tabel 4.4	Kerusakan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dampak Erupsi Merapi 2010 _____	109
Tabel 4.5	Analisis Usaha Tani Salak Per 10 hektar selama Lima Tahun ____	116
Tabel 4.6	Jenis Usaha Tani dalam Relung Kearifan Ekologis di Lereng Merapi _____	129
Tabel 4.7	Persentase Lahan Untuk Budidaya Tembakau Terhadap Lahan Pertanian di Boyolali, Klaten dan Magelang 2012 _____	135
Tabel 4.8	Jumlah Petani dan Jumlah Kepala Keluarga Peternak Sapi _____	144
Tabel 4.9	Nama Pabrik Rokok dan Dusun Suplayer Tembakau di Lereng Merapi _____	145
Tabel 4.10	Jumlah Ternak di Turgo _____	177
Tabel 4.11	Penghasilan Rumah Tangga Petani-Peternak Sapi 2003 dan 2010 _____	197
Tabel 7.1	Nama LSM Penyelenggara Pelatihan Penanggulangan Bencana Erupsi Merapi 2009-2010 _____	421
Tabel 7.2	Tempat Pengungsian yang Terdata dari Media _____	447
Tabel 7.3	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Perumahan dalam Rupiah _____	480
Tabel 7.4	Tingkat Kerusakan Rumah Warga Tertinggi Dari 30 Dusun Dari Lokasi Penelitian _____	481
Tabel 7.5	Peran Negara Dalam Pemulihan Ekonomi di Kinahrejo, Cangkringan, Sleman _____	500

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Gunung Merapi dan Sekitarnya _____	19
Gambar 2.2	Peta Endapan Awan Panas _____	34
Gambar 3.1	Peta Jumlah Penduduk Gunungapi Merapi _____	74
Gambar 4.1	Peta Dusun Kaliurang Utara _____	125
Gambar 5.1	Pola alokasi waktu suami _____	347
Gambar 5.2	Pola alokasi waktu istri _____	347
Gambar 7.1	Peta Lokasi Rencana Huntara Pengungsi Gunung Merapi _____	461
Gambar 7.2	Jamu Instan Produksi Warga Jamuran _____	502

DAFTAR SKEMA

Skema 2.1	Pola Arah dan Jarak Luncur ALiran Piroklastik (Awan Panas Merapi dari Tahun1930 Sampai 1994 _____	35
Skema 4.1	Alur Distribusi Sederhana Pasir dan Batu _____	217
Skema 7.1	Strategi Mitigasi Orang Lereng Merapi terhadap Ancaman Bencana _____	404
Skema 7.2	Peran Tim SAR Dusun dalam Persiapan dan Evakuasi _____	417
Skema 7.3	Menuju Proses Pemulihan Bencana Merapi _____	458

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Jumlah Penduduk di Wilayah Kabupaten Sleman, D.I.Y yang Berada dalam Kawasan Rawan Bencana II dan III _____	36
Grafik 2.2	Kerusakan dan Kerugian Erupsi Merapi 2010 _____	38
Grafik 2.3	Nilai Kerugian Beberapa Komoditas di D.I. Yogyakarta _____	39
Grafik 2.4	Nilai Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur _____	39
Grafik 2.5	Persentase Nilai Kerusakan dan Kerugian Sektor Perumahan di D.I. Yogyakarta _____	43
Grafik 2.6	Persentase Nilai Kerusakan dan Kerugian Sektor Sosial di D.I. Yogyakarta _____	46

DAFTAR FOTO

Foto 2.1	Pintu Halaman Candi Sambisari yang Ditutup dengan Tatanan Batu	51
Foto 2.2	Prasasti Pananggaran, salah satu prasasti yang ditemukan di depan Candi Kedulan	52
Foto 4.1	Penambang Bekerja dalam Kelompok yang Terdiri dari 4-5 Orang	210
Foto 4.2	Dam yang Dibangun Tahun 1993 Membatasi Desa Kendahari (Kaligentong) dengan Desa Sidorejo	215
Foto 4.3	Dam Kedua yang Dibangun Tahun 2008	215
Foto 4.4	Akses Jalan Setapak Ke Kali Woro dari Kaligentong	217
Foto 5.1	Mbah Kakung Mengasuh Cucunya	246
Foto 6.1	Mbah Petruk	363
Foto 6.2	Sesajen <i>Wajaran</i>	384
Foto 7.1	Korban Erupsi Merapi	432

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gunung Merapi adalah salah satu gunung paling aktif di dunia. Siklus erupsi Merapi umumnya terjadi setiap 4-5 tahun sekali dan dalam beberapa siklus erupsinya telah menelan korban jiwa yang tidak sedikit dari warga di lereng gunung di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Propinsi Jateng.

Catatan dari para arkeolog dan geolog bahkan mengungkapkan erupsi Merapi telah menghancurkan Kerajaan Mataram pada abad ke-10 M dan memaksa pusat kerajaan DIY dan Jateng pindah ke Jawa Timur.

Erupsi Merapi pada jaman Hindia Belanda hingga jaman kemerdekaan juga menelan korban ribuan jiwa dan menghancurkan beberapa desa di lereng gunung ini. Akibatnya pemerintah membuat kebijakan untuk menghindari korban jiwa yang besar dengan mencanangkan program transmigrasi dan relokasi. Program ini relatif tidak berhasil karena merupakan gagasan yang tidak populer untuk diterima masyarakat.

Erupsi tahun 2010 menjadi perhatian publik yang luar biasa karena di tengah negara telah memiliki undang-undang tentang bencana alam, dan meningkatnya kinerja pemerintah dalam melakukan mitigasi ternyata masih begitu banyak korban berjatuhan. Tidak kurang 2.000 orang meninggal dunia, 23 dusun hancur, dan lebih dari 350.000 orang mengungsi tanpa persiapan yang matang baik dari pihak warga, aparat, maupun para relawan.

Banyak cerita mengenai kegagalan, sekalipun juga muncul pelajaran yang berharga dalam penanganan bencana erupsi Merapi pada tahun 2010. Kegagalan tersebut dalam arti bahwa bencana ternyata tidak juga teratasi dengan baik melalui pengembangan sistem mitigasi, evakuasi dan rekonstruksi. Kegagalan itu terlihat pada banyaknya jumlah korban relatif besar, banyaknya penduduk yang kehilangan harta benda, rusaknya infrastruktur yang seharusnya tidak terkena dampak, ketidaksiapan warga melakukan evakuasi, dan tidak terkelolanya bantuan sosial secara adil, merata dan berhasil guna. Kegagalan itu tidak bisa semata

dibebankan kepada pemerintah karena pengelolaan mitigasi, evakuasi dan rekonstruksi pun bergantung pada masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan. Sementara itu, keberhasilan yang menonjol bukan terletak pada pengelolaan atau manajemen bencana alam dari pemerintah, tetapi justru munculnya solidaritas sosial masyarakat sipil yang tinggi secara spontanitas guna membantu korban, khususnya pada masa tanggap darurat.

Munculnya partisipasi masyarakat sipil yang tinggi dalam evakuasi dan rekonstruksi memunculkan wacana tentang: apakah sebaiknya peran masyarakat ditingkatkan dalam sistem dan sebaliknya peran pemerintah dikurangi, dan sejauh mana gagasan itu relevan dengan gagasan mengenai negara kesejahteraan (*welfare state*) yang kuat atau masyarakat sipil yang kuat. Wacana itu misalnya muncul dalam seminar tentang “*Living in Harmony and Prosperity with Merapi*” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) dan Laboratorium Antropologi untuk Riset dan Aksi (LAURA), Universitas Gadjah Mada (UGM) pada bulan November 2010.

Kenyataan ini menegaskan bahwa Merapi secara antropologis bukan merupakan pengetahuan yang tunggal bagi setiap masyarakat yang tinggal di sekitar lereng Gunung Merapi. Masing-masing memiliki sistem pengetahuan, pandangan kosmologis, mitologi, dan struktur sosial yang berbeda sehingga menimbulkan strategi adaptasi ekologi budaya yang beragam. Karakter sosiologis dan antropologis manusia sekitar Merapi yang berada di Kabupaten Boyolali, misalnya, berbeda dengan mereka yang berada di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Sleman. Dengan demikian, respon mereka terhadap Merapi sebagai sebuah ekosistem dan ancaman bencana pun ditandai dengan variasi pengetahuan tersebut. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan kebencanaan dan rekonstruksi pasca-bencana sulit untuk berjalan dengan efektif jika pemerintah dan berbagai pihak yang terkait, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat, tidak memiliki sensitifitas terhadap variasi-variasi tersebut. Pada satu sisi, penyeragaman kebijakan publik diasumsikan dapat menjamin efisiensi pembiayaan dan mobilisasi sumber daya. Pada sisi lain, hal ini justru berpotensi mengakibatkan berbagai niat baik demi

pemulihan masyarakat pasca-bencana berbenturan dengan keragaman pengetahuan lokal. Lebih jauh, kondisi ini akan sulit untuk memobilisasi partisipasi masyarakat lokal untuk terlibat secara aktif dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Pada akhirnya, tujuan efisiensi dan efektifitas dari pengambil kebijakan justru akan sulit untuk tercapai. Bahkan lebih jauh akan bermuara pada penggunaan dana publik dan mobilisasi sumber daya secara tidak tepat-guna.

Penghargaan terhadap variasi pengetahuan lokal bisa membantu pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan tepat guna, karenanya dapat membantu mengefisienkan dana dan sumber daya. Faktor ini dapat menjamin partisipasi aktif masyarakat sekitar Merapi untuk terlibat dalam upaya-upaya pemulihan sosial dan ekonomi pasca bencana. Keragaman kebijakan publik yang berbasis pada variasi pengetahuan lokal tidak hanya menjadikan upaya-upaya pemulihan dan rekonstruksi sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat setempat. Namun lebih jauh, penghargaan terhadap pengetahuan lokal yang spesifik dapat menjadi sebuah langkah untuk melibatkan masyarakat setempat dalam setiap kebijakan yang berpengaruh terhadap masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, proses pemulihan dan rekonstruksi menjadi upaya kebijakan yang memanusiakan masyarakat di sekitar lereng Merapi. Memanusiakan masyarakat terdampak tidak hanya dapat menjamin partisipasi aktif, namun juga memberikan martabat bagi mereka. Di sini, masyarakat menjadi subyek bagi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Kegagalan dan keberhasilan penanganan bencana alam Merapi pada tahun 2010 perlu dikaji secara mendalam agar selanjutnya pemerintah, donor dan pihak masyarakat mampu mengembangkan sistem mitigasi, evakuasi, rekonstruksi dan pemulihan bencana alam secara lebih berhasil-guna. Kajian itu diharapkan mampu menggali potensi dan masalah sosial budaya dalam masyarakat demi mengidentifikasi kekuatannya untuk mewujudkan strategi penanggulangan bencana alam secara partisipatif.

1.2 Permasalahan

Isu-isu strategis mengenai potensi dan masalah sosial-budaya dalam penanganan bencana alam 2010 dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian sesuai dengan alur penanganan bencana alam. Dengan kata lain, isu strategi itu terkait dengan tiga hal yaitu (1) pola mitigasi), (2) pola evakuasi dan pengungsian, dan (3) pola rekonstruksi dan pemulihan sosial-ekonomi.

- Isu-isu strategis pada masa mitigasi adalah:
 - a. Bagaimana masyarakat mengembangkan kearifan lokal dan kepercayaan yang secara sosial budaya dan religi dapat berfungsi sebagai bentuk mitigasi terhadap bencana erupsi Merapi?
 - b. Bagaimana peran publik seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi agenda mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat?
- Isu strategi pada masa evakuasi dan pengungsian adalah:
 - a. Bagaimana komunitas melakukan evakuasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna melakukan evakuasi?
 - b. Bagaimana peran publik, LSM, media massa, pemerintah pusat dan daerah serta donor memfasilitasi agenda evakuasi yang dilakukan oleh komunitas?
- Isu-isu strategi masa pengungsian adalah:
 - a. Bagaimana konsep masyarakat dalam merumuskan keputusan untuk melakukan pengungsian sementara atau permanen, atau pun relokasi?
 - b. Bagaimana warga merumuskan keputusan untuk kembali ke kampung halaman atau terus tinggal di pengungsian atau relokasi?
 - c. Bagaimana peran semua pihak untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengungsian dan aktivitasnya?
- Isu strategis rekonstruksi dan pemulihan adalah:
 - a. Bagaimana warga menggali sumberdaya ekonomi, sosial, budaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur desa, pemukiman, dan ekonomi ?
 - b. Bagaimana konsep dan strategi serta aktivitas masyarakat dalam melakukan pemulihan ekonomi?

- c. Bagaimana mereka meningkatkan pemulihan ekonomi yang responsif dengan kebutuhan untuk menghindari ancaman bencana lagi ?
- d. Bagaimana masyarakat merespon program pemulihan ekonomi dari para pemangku kepentingan?
- e. Bagaimana masyarakat membangun partisipasi dalam melakukan aktivitas pemulihan ekonomi.

Tiga kelompok isu strategis di atas menjadi pertanyaan penelitian yang bermanfaat untuk memahami penanggulangan bencana alam berbasis pada kekuatan sosial-budaya dan partisipasi masyarakat. Tiga pertanyaan penelitian ini bisa dieksplorasi di lapangan melalui kajian antropologis.

1.3 Tinjauan Pustaka

Munculnya studi tentang Merapi di kalangan para antropolog UGM tidak lepas dari adanya dinamika ekologis, sosial-budaya dan politik yang terjadi ketika terjadi erupsi Gunung Merapi. Hal itu terlihat dalam catatan para peneliti bahwa erupsi Merapi pada jaman Hindia Belanda telah mendorong pemerintah melakukan program pemukiman kembali (*resettlement*) terhadap penduduk lereng Merapi yang telah dan potensial menjadi korbannya. Pada masa pemerintahan pasca kolonial di bawah Presiden Sukarno ancaman erupsi Merapi direspon dengan mendorong penduduk desa untuk transmigrasi secara bedol desa. Pemerintah Orde Baru meneruskan kebijakan bedol desa tersebut. Namun, studi antropologi menunjukkan bahwa program tersebut bukan merupakan suatu kebijakan penanggulangan bencana yang berhasil guna karena penduduk pada dasarnya melakukan resistensi.

Studi Masri Singarimbun (1980) mengungkapkan bahwa manusia lereng Merapi yang terkena erupsi pada dekade 1960, enggan bertransmigrasi karena mengetahui bahwa tanah seberang (Sumatra) dipandang tidak subur. Di mata mereka, kawasan lereng Merapi jauh lebih subur. Erupsi Merapi selama berabad-abad memang bisa menjadi penyebab kualitas tanah di lereng Merapi subur sehingga resistensi mereka itu memiliki rasionalitas empirik yang kuat. Studi P.M Laksono (1985) juga mengungkapkan sikap resistensi orang Merapi untuk

bertransmigrasi. Hal ini karena mereka pada dasarnya memiliki konsepsi mengenai ancaman bencana letusan Merapi, dan sistem kepercayaan yang menjadi acuan bagi mereka untuk mengenali aktivitas Merapi dan cara beradaptasi.

Studi mengenai Merapi mulai berkembang pada tahun 1980an ketika Michael R. Dove (1985-2005) mengembangkan kajian ekologi tentang adaptasi manusia terhadap Gunung Merapi. Dove meneliti tentang keberadaan alang-alang dalam sistem adaptasi ekologi Merapi. Hasil studinya bersama Handoyo Adi Pranowo mengungkapkan bahwa alang-alang merupakan tanaman yang berguna bagi kelangsungan hidup orang Merapi melalui usaha peternakan. Alang-alang itu juga berkembangbiak sebagai dampak dari erupsi Merapi. Setiap erupsi akan membakar vegetasi dan dalam proses suksesi vegetasi, tanaman yang paling mampu bertahan dan semakin baik pertumbuhannya adalah alang-alang yang menjadi pakan sapi.

Studi Handoyo Adi Pranowo (1985) bahkan menemukan bahwa pada dasarnya manusia Merapi pada mulanya mengembangkan sistem pertanian perladangan mirip seperti perladangan berpindah (*slash-and-burn cultivation*) di Kalimantan. Perladangan dipraktikkan sebagai suatu bentuk adaptasi terhadap Gunung Merapi yang setiap periode tertentu erupsi. Erupsi tersebut membakar ladang dan pembakaran ini menyuburkan lahan kembali. Pola tersebut ditiru oleh penduduk setempat dalam rangka menyuburkan kembali lahan setelah ditumbuhi vegetasi pepohonan.

Studi Bambang Hidayana (1987) juga menambahkan bahwa strategi adaptasi ekologi orang Merapi memungkinkan mereka bisa hidup di daerah rawan bencana. Hal ini disebabkan karena masyarakat pada dasarnya mengembangkan pertanian *multicropping* dengan diversifikasi tanaman dan tumbuhan yang relatif tinggi. Agroekologi *multicropping* ini dimungkinkan karena secara ekologis setiap kondisi tanah menghasilkan potensi untuk budidaya tanaman yang beragam karakter biologis dan fungsi sosial ekonominya.

Studi Hidayana diikuti dengan Lucas Sasongko Triyoga (1988) yang menggambarkan bahwa dalam rangka melakukan mitigasi dan hidup secara

harmonis dengan alam Merapi, masyarakat mengembangkan kepercayaan tradisional. Secara psikologis dan ideologis kepercayaan tradisional ini sebagai legitimasi bahwa Merapi merupakan alam yang memberikan berkah daripada sekedar bencana. Di samping itu, Merapi merupakan sesuatu yang bernilai dalam kosmologi orang Jawa.

Walaupun pada periode 1980an tidak terjadi bencana erupsi yang berarti, pemerintah terus mempromosikan program transmigrasi dan mendorong penduduk untuk bedol desa. Desa-desa di lereng Merapi dijadikan sebagai kawasan terlarang yang masuk ke dalam kelompok KRB III yang harus dikosongkan. Kebijakan ini membuat masyarakat tidak tenteram karena mereka selalu didesak untuk meninggalkan kampungnya. Padahal, pada saat yang sama, mereka telah mampu beradaptasi dengan lingkungan yang rawan bencana tanpa ketakutan yang berlebihan.

Pada bulan November 1994, bencana Merapi meletus dengan menelan korban penduduk sebanyak 60 orang lebih dan merusak pemukiman di Turgo. Bencana ini mengundang simpati publik karena gencarnya media dalam melakukan pemberitaan. Pemerintah membantu penduduk dalam melakukan evakuasi, dan mendorong mereka untuk transmigrasi. Tidak banyak orang yang mau transmigrasi. Langkah yang dilakukan pemerintah kemudian adalah merelokasi penduduk Turgo dengan tetap mengusasi lahannya. Namun demikian, hanya sekitar 40 persen dari sebanyak 120 KK yang mau direlokasi di Desa Sidumoro yang jaraknya sekitar 10 Km dari Turgo.

Munculnya bencana tahun 1994 mengundang perhatian peneliti antropologi di lingkungan UGM. Pada Dies Natalis Jurusan Antropologi ke-40, sebuah seminar diselenggarakan dengan tema bencana alam Merapi. Makalah Heddy Shri Ahimsa-Putra menyimak tentang pentingnya kearifan lokal sebagai unsur penting dalam mitigasi kebencanaan. Ahimsa-Putra masih optimis bahwa masyarakat lereng Merapi akan bisa memanfaatkan kearifan lokalnya. Indikasi adanya kearifan lokal itu dieksplorasi oleh Ahimsa-Putra dari pemberitaan dalam media massa yang mengungkapkan adanya nalar warga untuk memanfaatkan perilaku alam sebagai media untuk melakukan mitigasi. Sementara itu, makalah

Lucas Sasongko Triyogo menegaskan kembali bahwa kepercayaan tradisional juga bisa digunakan sebagai sarana mitigasi. Adapun paranormal Permadi menggunakan cerita erupsi Merapi tahun 1994 yang bergerak ke arah selatan sebagai tanda bergantinya jaman, kembalinya jaman kejayaan Majapahit dan runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Cara pandang Permadi tersebut menggambarkan adanya ideologi dan kepercayaan di Jawa bahwa dinamika politik di Jawa sangat dipengaruhi oleh meletusnya gunung. Letusan Merapi menjadi sebuah pertanda adanya pergolakan politik.

Bencana alam Merapi yang berlangsung 1994 dan beberapa kejadian berikutnya hingga tahun 2003 mengundang perhatian Dove dan Hudayana untuk menelaah kembali sistem adaptasi orang Merapi terhadap lingkungannya yang rawan bencana. Hasil studi menunjukkan bahwa masyarakat memang memiliki sistem mitigasi dan adaptasi ekologis yang dapat mengurangi kerentanan. Sementara itu pemerintah dengan menggunakan birokrasi dan teknologi modern memiliki cara pandang yang dapat menegasikannya. Akan tetapi, adaptasi ekologis orang Merapi menunjukkan dinamika tersebut sebagai implikasi munculnya erupsi, dan munculnya politisasi bencana yang meremehkan eksistensi mereka di lereng Merapi. Kajian Dove dan Hudayana menegaskan bahwa pada dasarnya orang Merapi bisa hidup lebih baik pasca erupsi karena mereka juga bisa memanfaatkan sumber daya alam baru di wilayahnya dengan mengembangkan ternak sapi sebagai peluang ekonomi yang lebih baik daripada bercocok tanam tanaman tradisional.

Pengetahuan lokal bukan semata menjelaskan sistem kognitif yang tipikal dari suatu masyarakat terhadap gejala-gejala yang ada dalam lingkungan ekologisnya. Sistem ini juga menjadi sumber bagi konstruksi identitas sosial dan kultural sebuah masyarakat. Pengabaian terhadap sistem ini, oleh karenanya, dapat bermakna pengabaian terhadap eksistensi sebuah masyarakat. Kajian-kajian dalam ilmu sosial pada umumnya sejak dekade 1960an telah memberi perhatian terhadap gejala yang disebut dengan “gerakan sosial baru” (*new social movement*) sebagai inisiatif masyarakat dalam menghadapi dirinya dengan negara (Habermas 1981, Singh 2001, Touraine 1984). Gerakan-gerakan ini

mengeksplorasi identitas sebagai basis untuk menegaskan eksistensinya saat negara, atau pemegang kekuasaan yang lebih besar, atau pengambil kebijakan mengabaikan sistem pengetahuan dan identitas yang dimiliki masyarakat yang menjadi obyek kekuasaan. Adalah khas bagi gerakan dan inisiatif seperti ini untuk menegaskan jaraknya dari negara. Setiap intervensi dari jaring kekuasaan dalam berbagai manifestasinya dianggap hanya akan mengganggu keseimbangan dan keteraturan yang ada dalam sebuah kelompok sosial. Dalam konteks ekologi, intervensi kekuasaan melalui pengetahuan dominan yang berpretensi saintifik dapat juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada dan telah terstruktur melalui sistem pengetahuan lokal. Respon-respon yang beragam dari masyarakat di lereng Merapi dapat pula dilihat sebagai bentuk dari gerakan sosial yang berbasis pada identitas kultural ini. Pada kenyataannya, gerakan-gerakan seperti inilah yang dimanifestasikan melalui ritual-ritual religi, mata pencaharian, pelebagaan relasi dan struktur sosial yang khas yang telah menciptakan sistem keteraturan pada masyarakat-masyarakat lokal. Dari perspektif negara, adalah menjadi hal yang kontra produktif jika intervensi melalui kebijakan publik, dalam hal ini berkenaan dengan pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, mengganggu keteraturan dan keajegan sosial dan kultural yang telah ada selama ini dalam setiap lokalitas di lereng Merapi. Wacana mengenai “gerakan sosial baru”, dengan demikian, mengimplisitkan peran aktif negara justru untuk menjamin dan memfasilitasi eksistensi masyarakat lokal dengan memberikan pengakuan terhadap identitas sosial dan budaya mereka. Kegagalan negara dalam mengelola kompleksitas dan mengakui identitas lokal seperti ini justru akan berpotensi mentransformasikan perbedaan sistem pengetahuan yang dimiliki manusia-manusia setempat menjadi resistensi yang tidak proporsional terhadap negara sendiri. Hal ini justru akan semakin menyulitkan upaya kebijakan pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana Merapi lebih lanjut.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi sistem adaptasi masyarakat lokal dan respon terhadap bencana alam erupsi Merapi.

2. Mengidentifikasi pola partisipasi masyarakat lokal dalam penanggulangan bencana alam letusan Gunung Merapi.
3. Mengidentifikasi responsifitas pemerintah dan OMS dalam melakukan aktivitas penanggulangan bencana alam bersama masyarakat lokal.
4. Merumuskan strategi penanggulangan bencana alam erupsi Merapi secara partisipatif.
5. Merumuskan usulan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana alam Merapi berbasis pada kekuatan ekonomi dan sosial budaya, partisipasi masyarakat lokal dan kemitraan.

1.5 Hasil Penelitian

1. Ditemukannya pola keragaman sistem adaptasi masyarakat lokal dan responnya terhadap bencana alam erupsi Merapi.
2. Ditemukannya pola keanekaragaman potensi sosial-budaya dan masyarakat lokal dalam penanggulangan bencana alam erupsi Merapi.
3. Ditemukannya pola peran pemerintah, dan OMS dalam penanggulangan bencana alam erupsi Merapi.
4. Ditemukannya pola strategi penanggulangan bencana alam berbasis pada kekuatan sosial budaya partisipatif masyarakat.
5. Tersusunnya rekomendasi kebijakan pemerintah khususnya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan bencana alam secara partisipatif dan kemitraan berbasis pada pelajaran dari kasus Merapi.

1.6 Kerangka Pemikiran

Studi antropologi telah berhasil menghimpun berbagai kearifan ekologi komunitas lokal, tidak terkecuali kearifan ekologi terhadap lingkungan rawan bencana. Kemampuan komunitas lokal beradaptasi itu merupakan konsekuensi dari proses interaksi jangka panjang terhadap lingkungannya, sehingga mereka menemukan potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan menyiasati

berbagai resiko yang timbul secara alami atau sebagai akibat dari aktivitas produksi dan sosial budayanya.

Dalam memahami perilaku ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dalam beradaptasi dengan Gunung Merapi, maka strategi yang ditempuh adalah melakukan studi antropologi dengan menggunakan pendekatan etnoekologi dan politik ekologi (*political ecology*).

Dengan menggunakan etnoekologi, berbagai konsep lokal mengenai lingkungan dan bencana alam dieksplorasi dan dianalisis guna memahami praktik masyarakat lokal dalam melakukan mitigasi, evakuasi dan pengungsian, rekonstruksi dan pemulihan ekonomi pasca bencana erupsi Merapi berlangsung. Hasil analisis akan menemukan tema budaya yang dapat menerangkan makna dari strategi adaptasi masyarakat lokal, keputusan ekonomi, sosial dan politik untuk memaknai erupsi Merapi dan dampak yang ditimbulkan.

Tema budaya adaptasi masyarakat lokal terhadap Merapi itu juga dapat memahami persoalan ekonomi politik mengapa mereka tetap bertahan dengan lingkungannya yang dalam kacamata orang luar disebut berbahaya. Dengan menggunakan perspektif politik ekologi, maka akan semakin jelas persoalan ekonomi politik tersebut, yaitu Merapi menjadi arena persaingan kepentingan berbagai pihak. Mereka memperebutkan sumber daya Merapi termasuk dampak erupsi yang menyediakan kesuburan tanah, pasir batu dan dana penanganan korban baik dari negara, donor dan masyarakat luas.

Dengan memakai kacamata politik ekologi, maka dapat diterangkan bahwa pengetahuan dan praktik adaptasi ekologis masyarakat lokal merupakan strategi untuk melindungi sumberdaya yang secara tradisional menjadi miliknya. Oleh karena itu, mereka tidak serta merta bisa menerima pengetahuan dan praktik adaptasi baru yang menghilangkan akses dan kontrol atas sumber daya lokal. Mereka juga akan menolak daerahnya dijadikan kawasan tidak aman karena konsep itu akan mengancam eksistensi mereka menguasai wilayahnya yang subur dan mendapatkan keuntungan material seperti pasir dan batu setiap kali terjadi erupsi Merapi.

Dengan menggunakan politik ekologi, maka terlihat bahwa selalu terjadi politisasi tentang status Merapi bukan sekedar sebagai suatu gejala alam, melainkan sebagai suatu tindakan politik untuk menguasai penanganan korban, dan penggunaan bantuan. Politisasi ini memaksa masyarakat lokal untuk memilih pada pilihan yang tepat agar tidak menjadi korban.

Masalah yang muncul dalam studi politik ekologi dalam kasus erupsi Merapi adalah semakin meningkatnya kontestasi antar pihak untuk memperebutkan sumber daya. Mereka itu adalah masyarakat lokal, masyarakat luar, pengusaha, pemerintah, dan OMS. Sumber daya yang dimaksud bukan semata tanah, batu, pasir, dan material lainnya, tetap juga anggaran penanganan bencana dari negara, lembaga internasional dan dana sosial yang jumlahnya bisa sangat fantastis. Perebutan akses atas sumber daya itu mendorong masing-masing pihak mengembangkan dan melibatkan diri secara maksimal dalam aktivitas penanggulangan bencana yang sebenarnya dalam pelaksanaannya terkandung kepentingan ekonomi dan politik masing-masing pihak tersebut.

Kontestasi penanggulangan bencana di atas dapat membuat posisi masyarakat lokal melemah. Hal ini karena mereka berhadapan dengan negara, media, LSM, dan swasta yang kuat dalam melakukan tekanan dan hegemoni dengan mereproduksi berbagai ancaman bahaya erupsi dan rekayasa penanggulangan dan bantuan ke korban. Melemahnya posisi masyarakat lokal itu menyebabkan urusan penanggulangan bencana berada dalam kontrol negara dan swasta yang belum tentu dapat menyelamatkan masyarakat lokal untuk hidup lebih aman dan sejahtera. Apa yang terjadi bisa menunjukkan bahwa dana publik untuk penanggulangan bencana sangat besar, tetapi kurang menetes ke bawah dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat karena tidak sesuai dengan kepentingannya.

Oleh karena itu, pendekatan yang tepat dalam melakukan penanggulangan bencana adalah pendekatan yang emansipatif dengan mempromosikan strategi yang berbasis pada kekuatan masyarakat. Dengan strategi ini, penanggulangan bencana lebih membuka akses dan kontrol masyarakat dalam mengatasi masalah

bencana, sumber daya baru dari letusan Merapi, dan dana bantuan sosial yang menjadi haknya.

Pendekatan emansipatif itu sesuai dengan tradisi sosial budaya dalam masyarakat bahwa pada dasarnya urusan kebencanaan dan potensi ekologis yang dihasilkan oleh erupsi Merapi merupakan urusan lokal. Dengan demikian, pemerintah, dan OMS sebagai fasilitator pemberdayaan yang bisa membantu mereka dalam mengembangkan adaptasi ekologi dan pemulihan ekonomi secara lebih partisipatif.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini akan mengeksplorasi data etnoekologi dalam konteks penanggulangan bencana erupsi Merapi 2010 di tiga puluh sampel dusun yang terkena dampak. Dusun tersebut tersebar di tiga wilayah, yaitu wilayah pada KRB III (20 dusun), KRB II (8 dusun), dan KRB I (2 dusun). Secara topografis, dusun yang dipilih adalah yang telah terkena dampak erupsi Merapi 2010. Dusun sampel tersebut berada di wilayah administratif Kabupaten Sleman DIY, Klaten, Boyolali, dan Magelang, Jateng.

Secara antropologis, kajian tentang Merapi menggunakan unit analisis dusun karena mudah diobservasi dan secara empirik masyarakat hidup dalam komunitas dusun daripada desa. Adapun nama-nama dusun yang dipilih ada kaitannya dengan banyaknya korban jiwa, korban harta benda, hewan ternak, pengungsi, dan program-program penanggulangan bencana dari tahap mitigasi, evakuasi sampai rencana rekonstruksi.

Data etnoekologi meliputi sistem pengetahuan lokal dan tekno-lingkungan yang dipakai masyarakat dalam melakukan penanggulangan bencana alam. Data etnoekologi digali dengan mendeskripsikan perilaku masyarakat ketika melakukan mitigasi, evakuasi, sampai dengan pemulihan ekonomi dan dilanjutkan dengan menyimak acuan sosial budaya yang mereka gunakan dalam menghasilkan tingkah laku dan memaknai pengalamannya.

Untuk mengeksplorasi data itu dipilih sejumlah informan kunci dan beberapa kasus agar mereka dapat mendeskripsikan perilaku dan pengalamannya

secara utuh. Direncanakan bahwa dalam setiap desa, dipilih minimum 15 informan kunci untuk diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara.

Data etnoekologi akan dianalisis secara deskriptif interpretatif guna menemukan strategi adaptasi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya dalam menghadapi bencana alam erupsi Merapi, dan menemukan kepentingan politik ekonomi yang melandasinya. Data etnoekologi juga dianalisis untuk memahami konsep partisipasi dan responsifitas dalam masyarakat lokal terhadap campur tangan, fasilitasi dan advokasi dari para pihak dalam penanggulangan bencana.

Selain data etnoekologi, penelitian juga mengeksplorasi kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah dan peran dari LSM, media, swasta dan organisasi sosial politik dalam melakukan penanggulangan bencana. Data ini dieksplorasi melalui studi dokumen, wacana dalam media, dan berbagai informasi lisan dari para birokrat, relawan, orang media dan para aktivis orsospol.

1.8 Lokasi Penelitian

Tabel 1.1
Daftar Dusun dalam Desa Sampling

No	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	Kopeng	Kepuharjo	Cangkringan	Sleman
2	Bendosari	Umbulharjo	Cangkringan	Sleman
3	Kinarejo	Umbulharjo	Cangkringan	Sleman
4	Krajan	Wukirsari	Cangkringan	Sleman
5	Candi Morangan	Sindumartani	Ngemplak	Sleman
6	Pakisaji	Candibinangun	Pakem	Sleman
7	Kemiricilik	Purwobinangun	Pakem	Sleman
8	Turgotegal	Purwobinangun	Pakem	Sleman
9	Sempu	Wonokerto	Turi	Sleman
10	Bronggang	Argomulyo	Cangkringan	Sleman
11	Gondorarm	Wonokerto	Turi	Sleman
12	Grogol	Mangunsoko	Dukun	Magelang
13	Trono	Krinjing	Dukun	Magelang
14	BabadanBawah	Paten	Dukun	Magelang
15	Candipos	Sengi	Dukun	Magelang
16	Gowoksabrang	Sengi	Dukun	Magelang
17	Kaliurang Utara	Kaliurang	Srumbung	Magelang
18	JamburejoDua	Kemiren	Srumbung	Magelang
19	Cabe Lor	Srumbung	Srumbung	Magelang
20	Sambungrejo	Balerante	Kemalang	Klaten
21	Segadung	Sidorejo	Kemalang	Klaten
22	Malangsari	Kendalsari	Kemalang	Klaten
23	Kaligentong	Kendalsari	Kemalang	Klaten
24	Jamuran	Tegalmulyo	Kemalang	Klaten
25	Panggung	Panggung	Kemalang	Klaten
26	Karangsari	Gedangan	Cepogo	Boyolali
27	Kujon	Wonodoyo	Cepogo	Boyolali
28	Ngablak	Samiran	Selo	Boyolali
29	Klakah Tengah	Tlogolele	Selo	Boyolali
30	Stabelan	Tlogolele	Selo	Boyolali

1.9 Sistematika Penulisan

Laporan ini terdiri dari Sembilan bab. Bab I mengantarkan pentingnya penelitian etnografi Merapi agar ditemukan adanya kekuatan komunitas dalam beradaptasi dengan lingkungan yang rawan bencana, dan terumuskan kebijakan yang lebih mampu memahami kekuatan dan masalah sosial budaya pada komunitas tersebut dalam menghadapi bencana erupsi Merapi. Bab I menggarisbawahi adanya sistem adaptasi dan responsifitas terhadap erupsi Merapi sehingga orang Merapi tidak mudah mau diajak untuk relokasi atau transmigrasi.

Bab II memberikan pemahaman tentang sejarah erupsi Merapi dan responsifitas pemerintah dari setiap zaman terhadap bencana. Deskripsi menggambarkan bahwa Merapi selalu aktif mengeluarkan erupsi yang berdampak besar sampai kecil terhadap masyarakat khususnya yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu, masyarakat lokal pasti telah mengembangkan sistem adaptasi ekologi, ekonomi, sosial dan bahkan sistem penanggulangan bencana. Oleh karena itu, riset etnografi ini menjadi penting untuk membedah sistem adaptasi orang Merapi tersebut guna memahami masalah keengganan orang Merapi direlokasi.

Bab III memberikan deskripsi mengenai profil komunitas dari segi geografis, demografis, sejarah serta infrastruktur fisik. Dengan menyimak bab ini akan ditarik kesimpulan bahwa dusun merupakan komunitas kecil di lereng Merapi yang berfungsi sebagai unit sosial dalam beradaptasi. Dusun menjadi sesuatu yang bernilai karena dibangun oleh warganya dengan kekuatan swadaya.

Bab IV memberikan deskripsi adaptasi ekologi dan ekonomi. Temuan studi mencatat bahwa masyarakat merapi mampu beradaptasi terhadap dinamika ekologi dan ekonomi sehingga memecahkan masalah tekanan penduduk atas tanah, dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memajukan ekonomi, dan menghadapi erupsi. Bahkan orang Merapi mampu mengembangkan usaha peternakan sapi dapat mendukung keberlanjutan ekosistem dan ekonomi salak, tembakau, dan sayuran

Bab V memberikan deskripsi tentang kehidupan sosial dalam komunitas. Nampak bahwa komunitas telah mengembangkan kehidupan sosial berasaskan harmoni yang mendorong munculnya kerjasama komunitas untuk mempererat tali persaudaraan dan solidaritas sosial dan kesejahteraan bersama. Deskripsi akan menunjukkan bahwa harmoni telah dipakai sebagai instrumen untuk meningkatkan adaptabilitas di lereng Merapi, sehingga membuat orang Merapi lebih loyal terhadap kampung halamannya.

Bab VI memberikan deskripsi tentang sistem religi dan ritual dalam komunitas-komunitas di lereng Merapi. Nampak bahwa orang Merapi memiliki sistem religi, dan ritual yang memperkuat kehidupan sosialnya yang berorientasi

pada harmoni sekaligus memberikan kontribusi pada terbangunnya kesadaran kolektif untuk mewaspadaai bahaya, ketidakamanan dan ancaman erupsi Merapi. Keragaman dunia mistis dan aktivitas ritual muncul di komunitas-komunitas tetapi memperkuat adanya identitas diri pada masing-masing komunitas.

Bab VII memberikan deskripsi tentang pola penanggulangan bencana erupsi Merapi dalam jagad pandangan dan pengalaman empiris pada orang Merapi. Bab ini menunjukkan bahwa orang Merapi mempunyai konsep mitigasi, evakuasi, pengungsian dan rekonstruksi dan rehabilitasi yang tipikal. Pertama, orang Merapi mempunyai sistem pengetahuan lokal yang membuat mereka bisa lebih responsif dalam menghadapi ancaman erupsi. Kedua, mereka mempunyai kekuatan kemandirian guna menggalang program penanggulangan bencana.

Bab VII memberikan pelajaran bahwa pemerintah, dan swasta serta OMS telah memberikan kontribusi bagi penanggulangan bencana berbasis pada kekuatan pada masyarakat lokal tersebut, tetapi perlu dicatat bahwa peran mereka itu bisa mempengaruhi kekuatan pada masyarakat lokal. Bab VIII memberikan bahasan yang lebih terfokus tentang bagaimana sistem pengetahuan lokal masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial, bagaimana mereka membangun partisipasi, dan bagaimana para pemangku kepentingan terlibat dalam penanggulangan bencana. Pembahasan menegaskan tentang temuan studi yang menunjukkan adanya kekuatan masyarakat lokal dalam mengembangkan penanggulangan bencana berbasis pada kemandirian masyarakat. Bab IX menyetengahkan kesimpulan yang menegaskan tentang tema kehidupan komunitas di lereng Merapi dan adaptabilitasnya terhadap bencana alam. Tema tersebut menegaskan bahwa mendayagunakan kekuatan kolektif dan sentimen kemasyarakatan untuk lebih *survive* dan mempertahankan sumber daya alam dan ekonomi yang sudah dikuasai. Bab ini juga menyetengahkan rekomendasi agar penanggulangan bencana ke depan semakin memperkuat kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, rekomendasi yang diketengahkan juga mengarahkan agar program lebih partisipatif dan memperkuat adaptabilitas masyarakat lokal.

BAB II

GUNUNG MERAPI

2.1 Identifikasi dan Sejarah Pembentukan Gunung Merapi

2.1.1 Identifikasi Merapi

Gunung Merapi secara administratif terletak di Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tepatnya berada di empat kabupaten, yaitu : Kabupaten Sleman, Magelang, Klaten, Boyolali. Secara geografis terletak pada *latitude* 7° 32' 5" S; *longitude* 110° 26' 5" E. Gunung Merapi memiliki dimensi tinggi sekitar 2978 m dengan diameter 28 km, luas cakupan wilayahnya 300-400 km², serta mempunyai volume 150 km³.

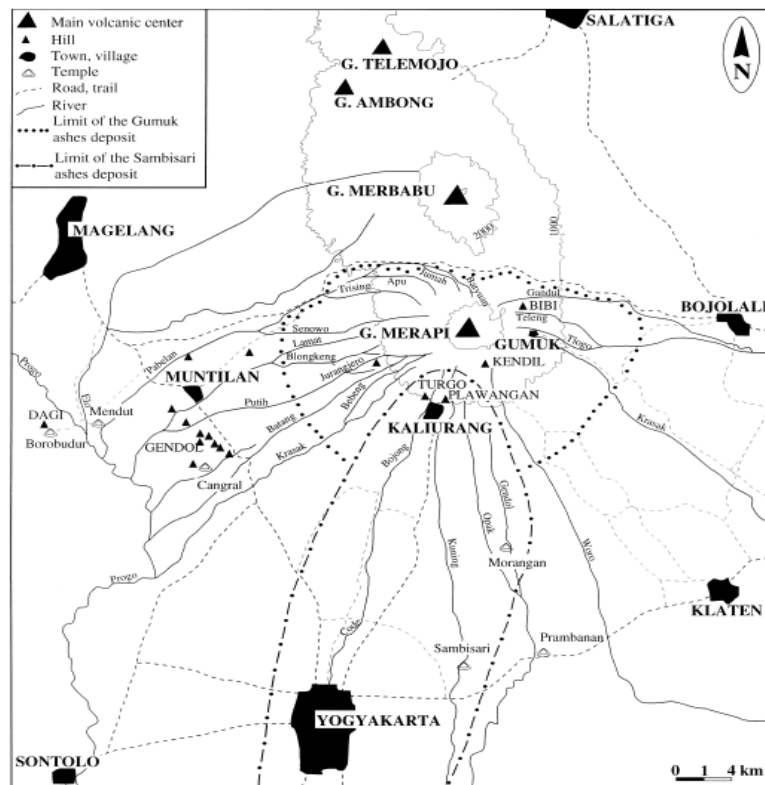
Walaupun di Indonesia memiliki sekitar 129 gunung api, Gunung Merapi menempati posisi istimewa dalam kegunungapian Indonesia, Merapi dipandang sebagai salah satu gunung api yang paling aktif, dengan erupsi yang terkesan berlangsung secara terus menerus (Interval erupsi dalam 100 tahun terakhir rata-rata 2-5 tahun). Berdasarkan sejarah letusannya, Merapi hanya mengalami masa istirahat (tidak aktif) yang pendek. Para pakar gunung api menghitung masa istirahat Merapi berlangsung selama 7-8 tahun dan yang terpendek hanya 3 tahun (Ratdomopurbo dan Adreastuti, t.t.).

Gunung Merapi digolongkan dalam tipe vulkanian, yang dicirikan dengan produk erupsinya yang berupa aliran piroklastik. Aliran piroklastik yang khas yang meluncur dari Gunung Merapi dikenal dengan nama awan panas, *nuee ardente*, *block and ash flow*, *glowing cloud*, dan *glowing avalanche*, atau dengan nama lokal "wedus gembel". Awan panas adalah aliran masa dalam bentuk padat dan gas, serta mungkin sebagian berupa lelehan (karena bersuhu tinggi 300-700° C) bergerak lateral menuruni lerang gunung api dengan kecepatan tinggi antara 60-100 km/jam (Bronto, Sayudi, dan Hartono 2003). Awan panas Gunung Merapi memiliki dua jenis, yaitu awan panas guguran dan awan panas letusan. Arah luncuran awan panas tidak selalu sama tetapi berubah-ubah, kebanyakan

mengarah ke barat, barat daya, atau barat laut. Selain bentuk aliran piroklastik yang sangat khas, awan panas tersebut secara empirik telah banyak menelan korban penduduk lereng Gunung Merapi.

Ciri utama letusan Gunung Merapi berada pada peranan kubah lava yang sangat menonjol. Setiap kali erupsi selalu diikuti oleh pembentukan kubah lava. Letusan Merapi sebenarnya tidak begitu eksplosif, akan tetapi pada setiap letusannya hampir selalu menimbulkan aliran piroklastik. Kubah lava Merapi menentukan arah dan volume aliran awan panas yang dihasilkan. Arah letusan, baik vertikal maupun horisontal, ditentukan oleh orientasi kubah lava, sedangkan volume aliran awan panas ditentukan oleh seberapa besar kubah lava terbentuk.

Gambar 2.1
Peta Gunung Merapi dan Sekitarnya



Sumber: Camus, et al. 2000: 14

2.1.2 Sejarah Pembentukan Gunung Merapi

Para pakar kegunungapian sepakat bahwa sejarah terbentuknya Gunung Merapi sangat kompleks. Menurut Wirakusumah (1989) sejarah pembentukan

Gunung Merapi dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Merapi Muda dan Merapi Tua. Adapun pakar lain (Berthomier, 1990; Newhall & Bronto, 1995; Newhall et. al, 2000) menemukan bahwa unit-unit stratigrafi di Gunung Merapi dapat dilihat dalam skala yang lebih detil. Berthommier (1990) yang mendasarkan penelitiannya pada kajian stratigrafi, menemukan bahwa sejarah Merapi dapat dibagi atas 4 periodisasi pembentukan:

Pra Merapi (+ 400.000 tahun lalu)

Disebut sebagai Gunung Bibi dengan magma andesit-basaltik berumur \pm 700.000 tahun terletak di lereng timur Merapi termasuk Kabupaten Boyolali. Batuan gunung Bibi bersifat andesit-basaltik namun tidak mengandung *orthopyroxen*. Puncak Bibi mempunyai ketinggian sekitar 2050 m di atas muka laut dengan jarak datar antara puncak Bibi dan puncak Merapi sekarang sekitar 2,5 km. Karena umurnya yang sangat tua Gunung Bibi mengalami alterasi yang kuat sehingga contoh batuan segar sulit ditemukan.

Merapi Tua (60.000 - 8000 tahun lalu)

Pada masa ini mulai lahir yang dikenal sebagai Gunung Merapi yang merupakan fase awal dari pembentukannya dengan kerucut belum sempurna. Ekstrusi awalnya berupa lava basaltik yang membentuk Gunung Turgo dan Plawangan berumur sekitar 40.000 tahun. Produk aktivitasnya terdiri dari bantuan dengan komposisi andesit *basaltic* dari awan panas, breksiasi lava dan lahar.

Merapi Pertengahan (8000 - 2000 tahun lalu)

Terjadi beberapa lelehan lava andesitik yang menyusun bukit Batulawang dan Gajahmungkur, yang saat ini nampak di lereng utara Merapi. Batuannya terdiri dari aliran lava, breksiasi lava dan awan panas. Aktivitas Merapi dicirikan dengan letusan efusif (lelehan) dan eksplosif. Diperkirakan juga terjadi letusan eksplosif dengan "*debris-avalanche*" ke arah barat yang meninggalkan morfologi tapal kuda dengan panjang tujuh km, lebar 1-2 km dengan beberapa bukit di lereng barat. Pada periode ini terbentuk Kawah Pasarbubar.

Merapi Baru (2000 tahun lalu - sekarang)

Dalam kawah Pasarubur terbentuk kerucut puncak Merapi yang saat ini disebut sebagai Gunung Anyar. Aktivitas Merapi terdiri dari aliran basalt dan andesit lava, awan panas serta letusan magmatik dan phreatomagmatik. Kubah lava menjadi pusat aktivitas Gunung Merapi saat ini. (Ratdomopurbo dan Andreastuti, t.t.:4-5).

Gunung Merapi yang sekarang ini merupakan gunung api muda. Beberapa uraian sebelumnya menyebutkan bahwa sebelum Merapi saat ini terbentuk, Gunung Bibi (2025m) telah ada sebelumnya di lereng timur laut gunung Merapi. Gunung Bibi kemudian tertimbun sebagian dan yang terlihat saat ini hanyalah sebagian dari puncaknya. Pertumbuhan pada periode berikutnya adalah pembentukan bukit Turgo dan Plawangan sebagai awal lahirnya gunung Merapi yang diperkirakan berumur sekitar maksimal 60.000 tahun. Kedua bukit tersebut mendominasi morfologi lereng selatan gunung Merapi. Pembentukan lereng atas Gunung Merapi terjadi paling lama pada 6700 tahun yang lalu, yaitu bukit Gajahmungkur, Pusunglondon dan Batulawang yang terdapat di lereng bagian atas dari tubuh Merapi. Dengan demikian, struktur tubuh gunung Merapi bagian atas baru terbentuk dalam orde ribuan tahun yang lalu. Kawah aktif yang menjadi pusat aktivitas Merapi pada saat itu adalah Kawah Pasarubur. Pada 2000 tahun yang lalu baru terbentuk bagian puncak Merapi di atas kawah Pasarubur.

Tubuh gunung Merapi mengalami pertumbuhan yang semakin lama semakin tinggi yang terjadi dalam beberapa ribu tahun yang lalu. Tubuh puncak gunung Merapi saat ini merupakan bagian yang paling muda dari proses pembentukan Gunung Merapi. Kawah aktif yang ada saat ini berada pada morfologi ini. Dari pengamatan pembentukan proses Gunung Merapi, terlihat bahwa bukaan kawah yang terjadi pernah mengambil arah berbeda-beda dengan arah letusan yang bervariasi. Nampak pula bahwa sebagian letusan bergantian mengarah ke selatan, barat sampai utara. Perubahan arah letusan ini berkorelasi dengan pertumbuhan kubah lava. Pertumbuhan kubah lava diawali dengan letusan atau dapat pula terjadi sesudah letusan. Apabila letusan mengakibatkan kubah lama hancur, maka biasanya akan dimulai lagi pembentukan kubah lava baru.

Namun, dapat pula terjadi pertumbuhan kubah baru di atas atau di samping kubah lama. Hal ini lah yang membuat letusan atau guguran kubah lava berubah-ubah arahnya dan lokasinya.

Di samping itu, penambahan material baru di daerah puncak akibat dari pertumbuhan kubah lava akan menyebabkan penambahan ketinggian puncak Merapi. Proses perubahan kubah lava dan letusan di masa lalu telah menyebabkan perubahan morfologi puncak. Contoh proses perubahan nampak pada letusan periode 1822-1823 yang menghasilkan kawah berdiameter 600m, periode 1846-1848 (berdiameter 200m), periode 1849 (berdiameter 250-400m), periode 1865-1871 (berdiameter 250m), 1872-1873 (berdiameter 480-600m), 1930, dan 1961. (Sumber: http://www.merapi.bgl.esdm.go.id/informasi_merapi)

2.2 Sejarah Erupsi Gunung Merapi

Uraian sejarah letusan Gunung Merapi di bawah ini didasarkan dari beberapa sumber yang kemudian dikompilasikan oleh B. Voight, E.K. Constantine, S. Siswamidjono, dan R. Torley (2000).

Deskripsi sejarah letusan oleh Voight dan kawan-kawan dimulai dari tahun 1768 sampai 1998. Letusan-letusan setelah tahun 1998 akan ditambahkan berdasarkan sumber lain, terutama dalam Ratdomopurbo et al. (2006). Awal pendeskripsian sejarah letusan dimulai dari tahun 1768, bukan berarti bahwa sebelum tahun tersebut tidak ada letusan yang terjadi tetapi hal ini hanya dikarenakan catatan atau berita tertulis tentang letusan Gunung Merapi mulai dibuat orang pada tahun tersebut. Walaupun sebenarnya para peneliti lain menuliskan terjadinya letusan Merapi pada tahun 1560, 1664, 1678, 1768, dan 1846-1847. Bahkan, disebutkan juga pada tahun 1006 juga pernah meletus, tetapi bukti-buktinya kurang meyakinkan.

Berikut ini ringkasan sejarah letusan berdasarkan tahun terjadinya letusan:

- 1768** : Letusan yang diiringi dengan keluarnya lahar dan guguran lahar.
- 1791** : Terjadi letusan yang membentuk kawah. Kubah terbentuk di sisi selatan, barat daya, dan sebelah barat kawah.
- 1807** : Letusan kemungkinan terjadi, tidak ada catatan tentang kerusakan.

- 1822-1823** : Letusan terjadi pada tanggal 27 Desember 1822 dan bertambah hebat pada tanggal 29 dan 30 Desember serta berlangsung sampai tanggal 10 Januari 1823. Hujan kerikil dan abu mencapai daerah Boyolali, Muntilan, dan Yogyakarta. Aliran lahar di Sungai batang mencapai jarak 20 km dari puncak Merapi. Akibat letusan tersebut, 50 jiwa melayang dan 8 desa rusak parah.
- 1832-1836** : Pada tengah malam tanggal 25 Desember 1832 Merapi meletus secara mendadak. Awan panas turun melalui Sungai Blongkeng dan lembah Lamat, menewaskan 32 orang.
- 1837-1838** : Kejadian letusan mirip dengan yang terjadi pada tahun 1832-1836.
- 1840** : Setelah terjadi gempa besar pada tanggal 4 Januari 1840, Merapi terus mengeluarkan asap.
- 1846-1848** : Letusan dimulai sejak 1-2 September 1846 dan kemungkinan berakhir pada bulan Oktober 1847. Namun sampai Januari 1848 masih terdengar suara runtunan. Awan panas terbesar yang pernah tercatat sampai tahun ini meluncur ke arah Sungai Woro dan Gendol.
- 1849** : Letusan besar terjadi dan dimulai pada 14-15 September serta berakhir pada tanggal 24 September 1849. Akibat letusan tersebut kota Muntilan terkena hujan pasir setebal tiga cm, kota Magelang terkena hujan kerikil setebal satu cm, kota Solo dan Yogyakarta terkena abu setebal 1,7 cm. Selain itu, 800 rumah dan 500.000 pohon kopi rusak.
- 1861** : Tercatat Merapi kembali meletus.
- 1862-1864** : Merapi kembali meletus, dimulai dengan terbukanya lubang kawah pada 26 Mei 1862. Pada 23 dan 28 Juli 1863 terjadi letusan besar. Kubah lava terus terbentuk sampai tahun 1964.
- 1865-1871** : Letusan yang berlangsung cukup lama yang disertai dengan pembentukan kubah lava baru terjadi di tahun-tahun ini. Pada bulan Oktober 1867 terjadi letusan dan hujan abu yang cukup tebal.

Letusan tahun 1865 ini sempat diabadikan oleh Raden Saleh dalam dua buah lukisannya.

- 1872-1873** : Letusan terjadi sejak tanggal 15 April 1872. Awan panas turun ke arah Sungai Apu, Trising, Senowo, Blongkeng, Batang, Woro dan Gendol. Kawah Masji dan lama terbentuk. Letusan berlangsung selama lima hari dan digolongkan dalam kelas D. Suara letusan terdengar sampai Kerawang, Madura dan Bawean. Awan panas dan material produk letusan menghancurkan seluruh desa-desa yang berada di atas elevasi 1.000 m. Pada tanggal tiga dan empat November 1872 letusan terjadi lagi. Letusan tahun 1872 ini dianggap sebagai letusan terakhir dan terbesar pada abad 19 dan 20.
- 1878-1879** : Terjadi letusan-letusan kecil.
- 1883-1884** : Pembentukan sebuah kubah baru.
- 1885-1887** : Letusan dan runtuhannya kecil tercatat pada tahun 1885 dan 1886-1887 terjadi letusan kecil diikuti pembentukan kubah kecil.
- 1888** : Sejak bulan Maret sudah terjadi letusan dan runtuhannya kecil. Tanggal 31 Agustus awan panas meluncur ke arah Sungai Senowo dan Desa Jrasah. Beberapa korban terluka, Desa Jrasah dikosongkan dan ternak diungsikan. Desa yang paling terancam sebenarnya adalah Desa Genjikan, tetapi penduduk desa tidak bersedia mengungsi. Penduduk hanya mengungsikan ternaknya saja sedangkan sebagian penduduk pulang ke desanya esok harinya. Pada tanggal 22 September terjadi luncuran awan panas yang menerjang ke arah Sungai Blongkeng sejauh enam km dan ke arah Sungai Senowo dan Trising sejauh 7,5 km. Di samping itu terjadi pula aliran lahar dingin di Sungai Trising. Desa Genjikan yang terletak di pinggir sungai ternyata lolos dari ancaman bencana.
- 1889** : Letusan kecil terjadi

- 1891-1894** : Pembentukan kubah terus terjadi dan pada bulan Agustus Merapi mengeluarkan asap tebal, sedangkan pada bulan Oktober penduduk melaporkan adanya suara runtuh dan pijaran api di puncak Merapi.
- 1897** : Beberapa letusan terjadi pada tahun ini.
- 1902-1904** : Dalam periode ini letusan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, berganti antara letusan kecil dan besar. Letusan yang cukup merusak dimulai awal tahun 1904, pada tanggal 22-23 Januari 1904 letusan mengakibatkan hujan batu dan guguran batu terdengar sangat keras. Tanggal 30 Januari letusan mengakibatkan luncuran awan panas di kali Woro sejauh enam km dan hujan abu di daerah Boyolali. Letusan mereda pada bulan Juni. Korban letusan sebanyak 16 jiwa meninggal dan 20 orang luka. Kerusakan juga menimpa perkebunan dan permukiman.
- 1905-1906** : Letusan lebih kecil terjadi pada periode ini, awan panas menerjang Kali Woro sejauh empat km.
- 1907-1908** : Penduduk lokal menceritakan bahwa pada tahun-tahun ini terjadi letusan-letusan kecil yang membawa hujan abu. Namun, seorang peneliti, Hartmann menyatakan bahwa tahun 1907-1908 merupakan periode istirahat Gunung Merapi.
- 1909-1913** : Letusan-letusan kecil terjadi diiringi dengan pembentukan kubah lava baru. Beberapa awan panas muncul tetapi tidak begitu merusak.
- 1915** : Letusan terjadi dari tanggal 28 Maret sampai 15 Mei, hanya berupa letusan kecil yang tidak begitu merusak. Letusan diikuti oleh pembentukan kubah baru.
- 1920-1923** : Pada tanggal 25 Juli 1920 dimulai letusan lagi, pada awalnya hanya letusan kecil yang mengeluarkan asap yang terjadi selama berbulan-bulan diakhiri dengan pembentukan kubah. Pada tanggal 12 Oktober 1920 penduduk sekitar kali Blongkeng dan Senowo dilanda awan panas, membawa korban 35 jiwa. Penduduk di sekitar

Deles sempat naik ke atas dan menyaksikan angin panas menerjang padang dan menewaskan ternak. Seorang peneliti, Kemmerling melakukan penelitian aliran piroklastik Merapi untuk yang pertama kalinya dan mengemukakan sebagai gejala sekunder dari letusan Merapi. Tahun 1922-1923 letusan kecil terus terjadi, diselingi dengan runtuh kubah.

- 1924** : Merapi mengeluarkan gas lebih banyak dari tahun 1922. Pada bulan Februari tahun ini di Pos Maron dipasang alat Omori Tremometer (seismograph) yang dibeli dari Jepang dan pada tahun ini juga mulai dilakukan pengukuran suhu terhadap rekahan-rekahan di puncak Merapi.
- 1925-1929** : Periode istirahat yang paling panjang, hampir sama dengan periode 1935-1939, 1962-1966, dan 1987-1992.
- 1930-1931** : Setelah masa istirahat berhenti, pada tahun 1930 terjadilah letusan Merapi yang besar, baik dalam bentuk letusannya maupun kerusakan yang dihasilkannya. Gempa tremor sudah dirasakan sejak Januari 1930 dan semakin meningkat pada tanggal 25 November. Pengukuran suhu rekahan di puncak Merapi dilakukan untuk mengantisipasi letusan. Namun, pada tanggal 28 Desember 1930 terjadi runtuh blok lava dan mengakibatkan awan panas yang menerjang Kali Blongkeng, dan juga Senowo dan Batang walau dalam skala yang lebih kecil. Awan panas yang menyusur Kali Blongkeng mencapai jarak enam km dan 11 km pada hari pertama. Di hari kedua luncuran awan panas mencapai jarak 12 km. Luas wilayah yang terdampak bencana letusan 1930 ini seluas 20 km², 13 desa musnah dan 23 desa rusak sebagian; 1.369 jiwa melayang dan 2.100 ternak mati. Banjir lahar dingin mencapai kota Yogyakarta. Volume material yang dikeluarkan diperkirakan 26 juta m³.
- 1933-1934** : Letusan dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1933 dan pada 30 November letusan cukup besar melontarkan batu bom di bagian

hulu sungai Trising dan Senowo. Letusan yang hampir sama terjadi pada tanggal 12 Desember, suara letusan terdengar selama 3-4 menit dan diikuti oleh suara gemuruh longsoran material selama 5-6 menit. Kemudian setelah itu pada bulan Februari dan April 1934 terjadi pula letusan-letusan lagi. Antara bulan Juli sampai September terjadi pembentukan kubah lava baru, namun pada bulan November terjadi runtuhnya kubah lava yang menyebabkan awan panas turun melalui Sungai Senowo sejauh tujuh km.

- 1935-1939** : Merapi mengeluarkan gas dan hujan kerikil dilaporkan terjadi. Pada tahun 1935 dipasang sirine peringatan bahaya di salah satu pos pengamatan.
- 1939-1941** : Letusan pertama terjadi pada tanggal 13 Desember 1939 yang menghasilkan awan panas yang mengalir ke arah barat, selatan, dan tenggara. Letusan kedua dan ketiga terjadi pada 23 Desember dan 24 Januari 1940. Pada tahun 1941 dikeluarkan program penanggulangan bencana dengan membuat kawasan bencana secara konsentris yang dibagi secara radial dalam beberapa sektor. Mulai dikenalkan pula istilah kawasan bahaya yang dikenal dengan sebutan kawasan terlarang, bahaya dari awan panas dan lahar, dan daerah bahaya dua yang terancam oleh letusan besar.
- 1942-1945** : Pada dasarnya letusan yang terjadi pada periode 1942-1945 berupa efusi gas tanpa adanya lahar kental. Kerusakan yang diakibatkan sangat terbatas. Dalam kurun waktu tersebut, letusan yang relatif paling besar terjadi pada tahun 1943. Aktivitas terbesar terjadi pada tanggal 20 Maret dan 12 April. Untuk pertama kalinya tercatat tentang evakuasi pengungsi. Sebagian penduduk di Batang atas menolak dievakuasi, tetapi kemudian terpaksa dievakuasi secara paksa oleh polisi. Pada letusan 12 April terjadi 52 kali awan panas dan sampai ke desa-desa yang dievakuasi. Penduduk mengungsi selama tiga minggu untuk kemudian pulang dan memperbaiki kerusakan.

- 1948** : Letusan terjadi pada tanggal 29 September 1948 yang mengakibatkan hujan “batu menyala”. Selama bulan November dan Desember terjadi 25 kali hujan batu.
- 1953–1956** : Tanda-tanda letusan terlihat pada tanggal 2 Maret 1953 berupa awan tebal di atas puncak Merapi dan disertai dengan hujan abu. Letusan dengan awan panas terjadi pada 18 Januari 1954. Kubah lava yang terbentuk pada tahun 1953 runtuh dan terbawa ke bawah sejumlah 3.000.000 m³. Luncuran awan panas mencapai jarak lima km di lembah Kali Apu, menewaskan 64 orang: 30 orang meninggal di tempat dan 34 orang meninggal di rumah sakit, menghancurkan tiga desa dan memporak porandakan 90 rumah. Letusan terjadi lagi pada tanggal 20 Januari 1954 dan dilanjutkan lagi pada pertengahan bulan Juni yang disertai hujan abu. Awal Januari 1956 terjadi letusan yang berbeda dengan sebelumnya, runtuhannya terdengar pada jam tiga pagi dan Pos Babadan mencatat getaran yang sangat kuat. Pada jam lima tanda bahaya dibunyikan dan satu jam kemudian penduduk diminta untuk mengungsi yang dapat diselesaikan pada jam delapan pagi. Luncuran material Merapi terjadi pada sekitar tengah hari dan mencapai enam km dari puncak gunung. Hujan abu setebal lima cm mengakibatkan banyak rumah runtuh dan banjir lahar dingin di Kali Senowo.
- 1957-1960** : Tahun 1957 lahar keluar ke arah hulu Kali Batang dan awan panas mencapai jarak empat km. Dalam tahun 1957 dan 1958 hujan batu terjadi di Kali Sat dan Kali Senowo berlangsung sampai Desember 1958. Pada tahun 1958 ini untuk pertama kalinya setelah tahun 1943 diselesaikan survei topografi puncak Merapi. Sebuah seismograf mekanis Weichert dipasang di tahun 1959 dan ditahun berikutnya dilakukan survei puncak Merapi. Pada tahun 1960 ini juga diusulkan kepada pemerintah untuk memperluas daerah bahaya karena adanya kecenderungan berpindahannya aliran material ke arah barat daya.

- 1961** : Letusan terjadi pada tanggal 18 April dan luncuran awan panas mencapai jarak 6,5 km di Kali Batang. Tanggal 20 April 1961 meletus lagi, walaupun letusan menimbulkan asap ke atas hanya setinggi satu km tetapi awan panas menghancurkan Desa Gendeng dan hujan abu sampai di Muntilan. Pada tanggal 7 Mei terjadi letusan-letusan kecil yang berkesinambungan. Luncuran awan panas sejauh 3.5 km memasuki hulu Senowo, Gendol, dan Woro. Puncak letusan terjadi pada 18 Mei 1961 menjelang sore hari diikuti dengan luncuran awan panas sejauh 12 km di Kali Batang mendekati Pos Pengamatan Ngepos pada jarak satu km. Penduduk sudah diungsikan sebelumnya, tetapi beberapa penduduk kembali ke lokasi. Akibatnya 12 orang terjebak dan enam orang di antara meninggal dan sisanya terluka parah.
- 1962-1966** : Banjir lahar dingin akibat hujan deras terjadi pada tahun 1962 membawa material hasil letusan 1961. Di Kali Bebeng banjir lahar tersebut menyapu lima desa dan membawa korban dua jiwa dan lima orang terluka. Penduduk lainnya terselamatkan berkat alarm peringatan bahaya yang dibunyikan. Pada bulan Desember tahun 1963 muntahan banjir lahar dingin Kali Blongkeng menerjang jalur kereta api Magelang-Yogyakarta di dekat Muntilan. Pada tahun 1962 telah dilakukan pembuatan peta topografi puncak Merapi.
- 1967-1969** : Periode letusan dimulai lagi sejak tanggal 12 Januari 1967. Pada tanggal 7-9 Oktober terjadi luncuran awan panas, dengan jarak terpanjang mencapai tujuh km di Kali Batang. Hujan abu sampai di Wonosobo dan Parakan. Letusan besar terjadi lagi pada awal Januari tahun 1969. Letusan yang disertai luncuran awan panas terjadi di beberapa sungai, di sungai Batang, Blongkeng, dan Krasak mencapai jarak sembilan km, sedangkan jarak luncuran yang paling jauh terjadi di Kali Batang sejauh 13,5 km. Bencana ini mengakibatkan hujan abu di Sleman, Muntilan, dan sebagian Magelang serta beberapa desa terbakar, terutama Desa Nganggrung

yang hancur total. Namun penduduk sudah diungsikan terlebih dahulu, sehingga hanya memakan korban satu orang saja. Lahar dingin yang terjadi pada akhir tahun 1969 juga membawa kerusakan di 23 desa dan 742 rumah, serta beberapa memakan beberapa korban.

- 1970-1971** : Terjadi beberapa runtuh.
- 1972-1974** : Dalam periode ini letusan terbesar terjadi pada 19 Desember 1973 yang menyebabkan luncuran awan panas mengalir sejauh tujuh km di Kali Bebeng dan 5,5 km di Kali Batang. Banjir lahar dingin juga terjadi dalam periode ini.
- 1976-1979** : Dalam periode letusan ini, puncak letusan terjadi pada bulan Agustus 1978, jarak luncuran lahar panas sejauh enam km.
- 1980-1983** : Letusan di mulai bulan Mei 1980. Namun, letusan yang besar terjadi pada bulan Februari 1983 yang mengakibatkan hujan abu yang deras di wilayah Boyolali dan kerusakan tanaman.
- 1984** : Pada 15 Juni 1984 juga terjadi letusan besar dengan aliran awan panas sejauh 5-7 km di lembah sungai Batang, Bebeng, Putih, dan Krasak. Letusan disertai dengan runtuh kubah, luncuran awan panas, dan pembentuk kubah lava baru.
- 1986** : Tanggal 10 Oktober 1986 Merapi meletus dan menciptakan 16 kali awan panas yang mengarah ke baratdaya.
- 1992-1993** : Letusan-letusan terjadi tetapi dalam skala kecil
- 1994** : Pada 22 November 1994 salah satu kubah lava runtuh dan meluncur ke arah selatan, dan barat daya sejauh 6,5 km. Di kali Boyong luncuran ini membawa korban sebanyak 64 jiwa dan puluhan korban terbakar. Lebih dari 6.000 orang diungsikan dan sekitar 2.700 orang direlokasi oleh pemerintah ke lokasi yang lebih rendah.
- 1997** : Pada tanggal 14 dan 17 Januari 1997 terjadi lagi letusan. Awan panas meluncur ke arah Sungai Krasak (enam km), Bebeng, dan sebagian Boyong (lima km).

- 1998** : Pada bulan Juli terjadi letusan yang menghasilkan endapan piroklastik yang cukup besar. Awan panas meluncur ke arah hulu Sat, Senowo dan Blongkeng, dengan jarak terjauh enam km. Kerusakan yang ditimbulkannya tidak begitu besar, hanya pohon-pohon pinus yang berada di sisi kanan kiri yang dilewati awan panas.
- 2001** : Awal tahun 2001 sudah mulai terlihat adanya guguran dan pada 10 Januari status Merapi ditingkatkan dari Waspada menjadi Siaga. Awan panas muncul pada tanggal 9 Februari berlangsung selama 17 menit. Kemudian awan panas besar terjadi sehari sesudahnya selama dua jam pada awalnya, yang kemudian disusul dengan munculnya awan panas secara berkesinambungan ke arah hulu Kali Bebeng, Sat, Lamat, dan Senowo. Status Merapi pada saat itu sudah dinaikkan menjadi Awasi.
- 2006** : Gejala meningkatnya aktivitas Merapi telah dirasakan sejak Juli tahun 2005. Pada awal tahun 2006 terjadi peningkatan aktivitas yang didasarkan atas data seismik, deformasi, dan geokimia. Oleh karena itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mulai melaksanakan persiapan-persiapan untuk menghadapi bencana erupsi dengan melakukan tindakan mitigasi bencana, antara lain rekomendasi peringatan dini, penyusunan peta prakiraan bahaya, dan melakukan penyuluhan-penyuluhan di daerah rawan bencana. Letusan yang disertai awan panas besar terjadi pada tanggal 14 Juni 2006. Awan panas meluncur sepanjang tujuh km dari puncak ke arah Kali Gendol. Letusan ini memakan korban dua orang. Kerusakan yang ditimbulkan adalah terkuburnya daerah wisata Kaliadem beserta dengan enam buah kios, mushola, pemancar sirene, dan fasilitas umum. Dua jembatan di desa Jambu dan Dusun Petung tertutup abu vulkanik. Jumlah pengungsi yang dievakuasi sejumlah 22.250 jiwa.

2010 : Tanda-tanda meletusnya Merapi mulai terlihat pada tanggal 20 September 2010 dengan dinaikkannya status aktivitas Gunung Merapi dari tingkat Normal ke tingkat Waspada. Perubahan Status tersebut terus meningkat dengan dinaikkannya status Waspada menjadi Siaga pada tanggal 21 Oktober 2010. Tingkat Awas ditetapkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melalui Kepala BPPTK pada tanggal 25 Oktober 2010. Keesokan harinya Merapi meletus sebanyak tiga kali dan semburan material vulkaniknya setinggi 1,5 km. Awan panas menerjang Kaliadem, Desa Kepuharjo. Jumlah korban sebanyak 43 orang. Puncak letusan terjadi pada tanggal 5 November 2010 setelah sejak satu hari sebelumnya juga sudah meletus dengan semburan setinggi empat km dan menyebarkan awan panas ke arah Kali Bebeng sejauh 11,5 km, kali Boyong (10 km), kali Putih (11 km), Kali Gendol (9,5 km), Kali Senowo dan Kali Trising (3,5 km), serta Kali Apu (1,5 km). Pada puncak letusannya (tanggal 5 November), erupsi didahului dan disertai dengan suara gemuruh yang bisa didengar dari Kota Yogyakarta. Awan panas meluncur ke arah Kali Gendol dalam jarak yang belum pernah tercatat, yaitu 15 km dari puncak Merapi. Sebelum letusan, daerah bahaya sudah diperluas dengan radius 20 km dari puncak. Pada tanggal 15 November 2010 batas radius bahaya untuk Kabupaten Magelang dikurangi menjadi 15 km dan untuk dua kabupaten Jawa Tengah lainnya menjadi 10 km. Kab. Sleman masih tetap memberlakukan radius bahaya 20 km. pada tanggal 3 Desember 2010 status aktivitas Gunung Merapi diturunkan dari tingkat Awas ke tingkat Siaga dengan ketentuan tidak ada kegiatan dalam radius 2,5 km dari puncak dan wilayah bahaya lahar berada pada jarak 300 m dari bibir sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi.

Catatan sejarah erupsi Gunung Merapi di atas mulai ditulis sejak tahun 1768 dan catatan yang lebih rinci lagi baru muncul pada akhir abad 19. Dari

catatan sejarah tersebut seolah-olah dapat disimpulkan bahwa kecenderungan letusan pada abad 20 lebih sering dibanding pada abad 19. Bronto, Sayudi, dan Hartono (2003) menghitung jumlah kegiatan Merapi antara tahun 1548-1996 dan menyimpulkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah kegiatan vulkanik Merapi.

Kegiatan Gunung Merapi semakin sering atau memiliki kecenderungan semakin tinggi frekuensinya. Demikian pula masa istirahat Gunung Merapi juga semakin memendek. Kecenderungan di atas memang sangat jelas sekali, tetapi perlu dicermati lebih jauh lagi bahwa terdapat pengaruh kelengkapan pencatatan peristiwa kejadian. Mulai awal abad 20 ada kecenderungan orang melakukan pencatatan yang lebih detail terhadap kejadian-kejadian Merapi.

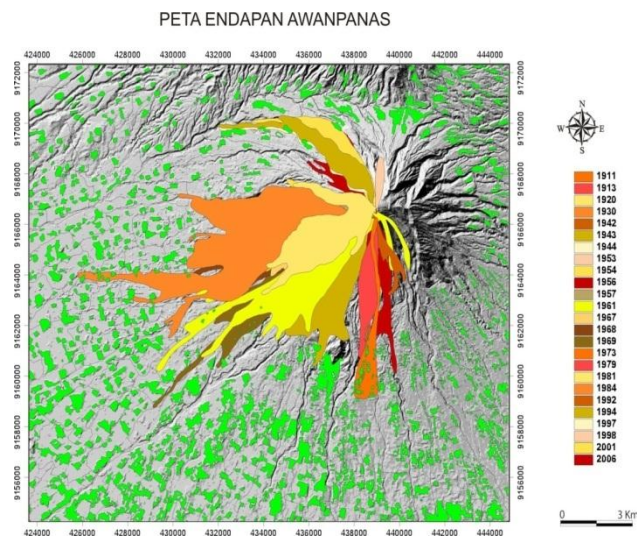
Berbeda dengan kecenderungan di atas, penelitian Newhall et. al (2000) berdasarkan kajian pertanggalan stratigrafi vulkanis menyimpulkan bahwa beberapa erupsi sejak abad tujuh sampai 19 AD relatif lebih merusak, jauh lebih besar daripada letusan di abad 20 AD. Bahkan, dalam beberapa kasus, letusan menghancurkan lebih banyak desa dan luncuran awanpanas mencapai sejauh 22 km dari puncak Merapi. Lebih jauh lagi Newhall et. al (2000) mengemukakan bahwa terdapat kecenderungan terjadinya letusan besar sekali dalam satu abad. Apabila letusan 1930 dapat dianggap sebagai letusan besar di abad 20, diprediksikan bahwa pada abad 21 akan terjadi juga letusan besar (Voight, Constantine, Siswamidjojo, dan Torley 2000).

Hal lain yang menarik dari sejarah letusan Gunung Merapi adalah luncuran awan panas. Luncuran awanpanas Gunung Merapi, baik besar maupun kecil, mempunyai kecenderungan semakin meningkat jumlah kejadiannya. Tabel di bawah ini menunjukkan jarak luncur terpanjang di sungai pada setiap letusan pada tahun 1768-2010.

Tabel 2.1
Jarak Luncur Awan Panas dari Tahun 1822 - 2010

Tahun	Jarak Luncur Terpanjang (Km)	Sungai
2010	15	Gendol
2006	7	Gendol
2001	6	Sat
1998	7	Sat dan Putih
1997	6	Krasak
1994	6	Boyong
1992	4,5	Sat
1984	7	Putih
1967-1969	9	Krasak, Batang, Bebeng
1961	12	Batang
1957	4	Batang
1954	6	Apu
1934	7	Senowo
1930	12	Blongkeng
1920	-	Senowo, Blongkeng
1905	4	Woro
1904	6	Woro
1888	7,5	Trising
1848	-	Woro, Gendol
1822	20	Batang

Gambar 2.2

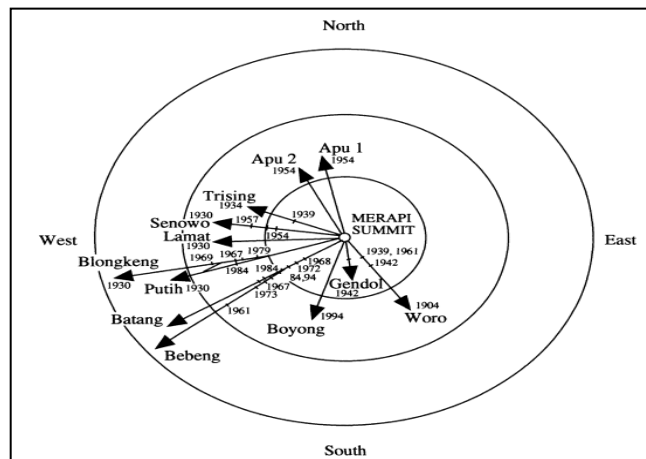


Sumber: <http://www.merapi.bgl.esdm.go.id/>

Dari tabel dan peta di atas terlihat bahwa jarak luncur maupun lokasi luncur berubah-ubah, tidak menunjukkan pola yang signifikan, kecuali bahwa lokasi luncur berada di sungai-sungai yang mengalir di utara, barat, dan selatan. Luncuran awan panas terpanjang yang tercatat sampai saat ini adalah sepanjang

20 km yang terjadi pada tahun 1822. Amatan Purbo-Hadiwijoyo dan Suryo, (1980) selama 70 tahun terakhir ini terhadap perubahan arah luncuran dan jarak luncur juga menegaskan hal tersebut:

Skema 2.1
Pola Arah dan Jarak Luncur Aliran Piroklastik (Awan Panas) Merapi
dari Tahun 1930 Sampai 1994.

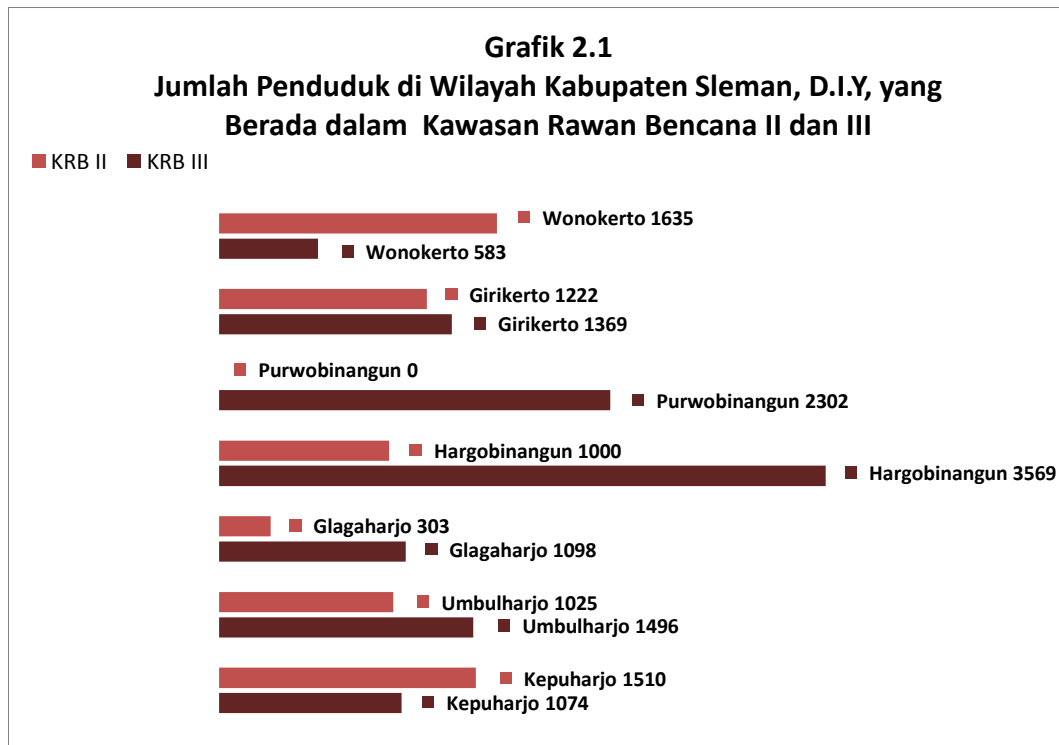


Sumber: Thouret et all, 2000

2.3 Dampak Aktivitas Merapi Tahun 2010

2.3.1 Korban Jiwa Erupsi Gunung Merapi 2010

Kawasan lereng Gunung Merapi merupakan sebuah kawasan hunian yang cukup padat dibandingkan dengan pemukiman di lereng-lereng gunung berapi lainnya di Indonesia. Banyak penduduk tersebut bermukim pada daerah yang dikategorikan sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) II dan III. Misalnya saja di wilayah Kabupaten Sleman, setidaknya tujuh desa di kecamatan Cangkringan (Desa Kepuharjo, Umbulharjo, Glagaharjo) Pakem (desa Hargobinangun dan Purwobinangun), dan Turi (Desa Girikerto dan Wonokerto) yang berjumlah sekitar 18.000 jiwa bertempat tinggal dalam kawasan-kawasan tersebut. Enam puluh tiga persen dari jumlah tersebut justru bermukim di wilayah KRB III. Proporsi penduduk yang tinggal di kedua kawasan tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Sumber: Kompas, 26 Oktober 2010 berdasarkan data BPPTK Yogyakarta, Posko Merapi Pakem Sleman.

Kepadatan penduduk di Kawasan Rawan Bencana III di atas kemungkinan besar menjadi penyebab banyaknya korban jiwa pada letusan Merapi 2010. Berdasarkan data Bappenas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Maret 2011, bencana erupsi Gunung Merapi 2010 telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 386 orang meninggal, terdiri 277 jiwa di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 109 orang meninggal di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah jiwa yang mengungsi akibat bencana tersebut sebanyak 15.366 jiwa yang terdiri dari 12.839 jiwa di Provinsi D.I. Yogyakarta dan 2.527 jiwa di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.2
Data Korban di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

Lokasi	Meninggal	Pengungsi
Provinsi D.I. Yogyakarta	277	12.839
Provinsi Jawa Tengah	109	2.527
Total D.I. Yogyakarta & Jateng	386	15.366

Sumber: Bappenas dan BNPB, 2011.

2.3.2 Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Erupsi Merapi 2010

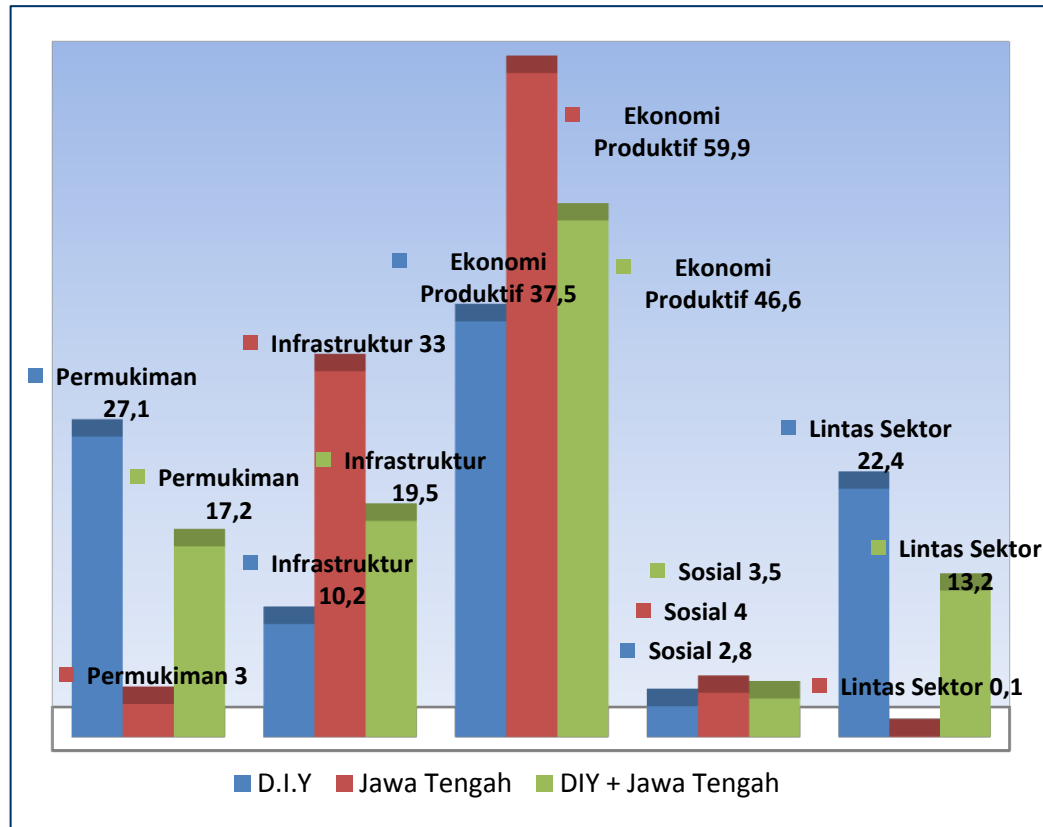
Badan Perencana Pembangunan Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Bappenas dan BNPB 2011) telah menghimpun data dan menilai kerusakan dan kerugian yang diakibatkan erupsi Gunung Merapi 2010, yaitu sebesar Rp 3.628.710.610.000,00. Kerusakan dan kerugian terbesar terjadi pada sektor ekonomi produktif dengan perkiraan mencapai Rp 1.692.511.170.000,00 (46,6% dari total nilai kerusakan dan kerugian), kemudian diikuti sektor infrastruktur sebesar Rp 707.472.100.000,00 (19,50%), sektor permukiman Rp 626.651.140.000,00 (17,27%), lintas sektor Rp 479.604.000.000,00 (13,22%), dan sektor sosial Rp 122.472.200.000,00 (3,38%).

Tabel 2.3
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah

Sektor	Total Kerusakan dan Kerugian		Jumlah
	Provinsi D.I. Yogyakarta	Provinsi Jawa Tengah	
Permukiman	580.820.540.000,00	45.830.600.000,00	626.651.140.000,00
Infrastruktur	216.292.790.000,00	491.179.310.000,00	707.472.100.000,00
Ekonomi Produktif	803.551.990.000,00	888.959.180.000,00	1.692.511.170.000,00
Sosial	61.243.610.000,00	61.228.590.000,00	122.472.200.000,00
Lintas Sektor	479.529.000.000,00	75.000.000,00	479.604.000.000,00
Jumlah	2.141.437.930.000,00	1.487.272.680.000,00	3.628.710.610.000,00

Sumber: Bappenas dan BNPB, 2011.

Grafik 2.2
Kerusakan dan Kerugian Erupsi Merapi 2010

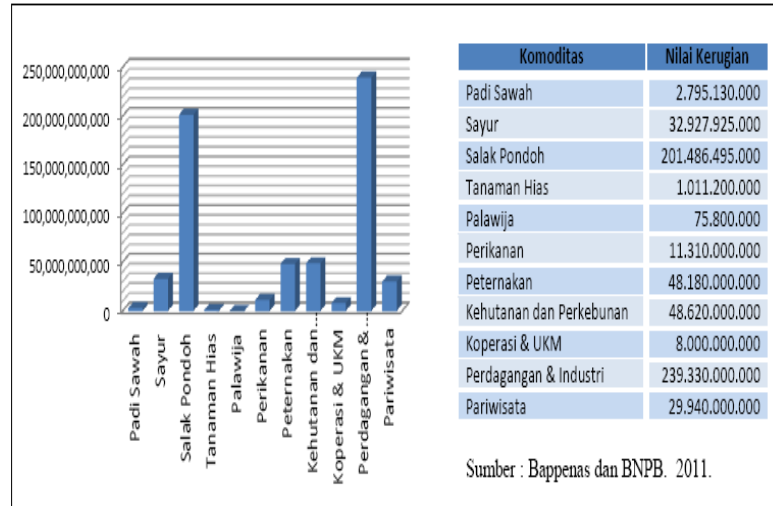


Sumber: Bappenas dan BNPB, 2011.

2.3.2.1 Sektor Ekonomi Produktif

Kecenderungan kerusakan dan kerugian terbesar terjadi dalam sektor ekonomi produktif yang berlaku baik di DIY maupun Jawa Tengah. Di kedua wilayah tersebut tidak begitu besar perbedaan nilai kerusakan dan kerugiannya, sebesar 47,48% di wilayah DIY dan sebesar 52,52% di wilayah Jawa Tengah. Kabupaten yang mengalami kerusakan dan kerugian dalam sektor ini adalah kabupaten Sleman, disusul kemudian oleh Kabupaten Magelang. Di Kabupaten Sleman sendiri perbandingan kerusakan dan kerugian dan sub-sub sektornya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

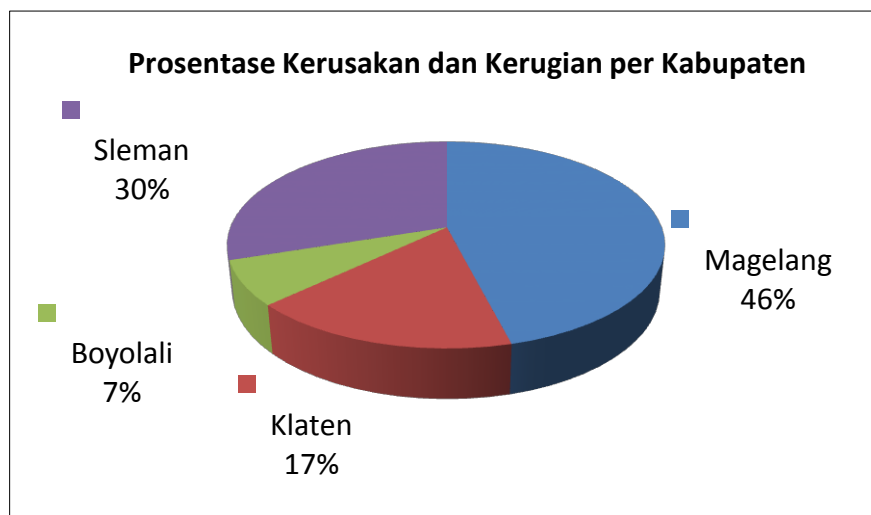
Grafik 2.3 dan Tabel 2.4
Nilai Kerugian Beberapa Komoditas di D.I. Yogyakarta



2.3.2.2 Sektor Infrastruktur

Sektor Infrastruktur menempati posisi kedua yang menderita kerusakan dan kerugian besar. Wilayah Kabupaten Magelang terkena dampak yang paling besar (46%), disusul oleh Sleman (30%), Klaten (17%) dan Boyolali (7%).

Grafik 2.5
Nilai Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur



Kabupaten	Kerusakan	Kerugian	Kerusakan dan Kerugian
Magelang	315.256.840.000	7.455.000.000	322.711.840.000
Klaten	40.236.680.000	78.321.960.000	118.558.640.000
Boyolali	33.759.170.000	16.149.660.000	49.908.830.000
Sleman	192.281.440.000	24.011.350.000	216.292.790.000

Sumber: Bappenas dan BNPB 2011

Infrastruktur yang paling parah terdampak adalah infrastruktur jalan. Kerusakan jalan diakibatkan dua faktor utama, yakni akibat luncuran awan panas secara langsung dan terjangan lahar dingin yang terjadi setelah letusan Merapi. Di Kabupaten Magelang, kerusakan jalan terutama diakibatkan oleh terjangan lahar dingin, seperti yang terjadi di Kali Putih di ruas jalan Magelang-Yogyakarta. Lain halnya di Kabupaten Sleman, kerusakan jalan diperparah dengan adanya luncuran awan panas, bahkan selain merusak infrastruktur jalan juga menghancurkan beberapa dam dan jembatan. Kerusakan jalan dan jembatan banyak menyebabkan beberapa desa menjadi terisolir.

Di wilayah Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, mengalami kerusakan ruas jalan yang paling banyak dibanding dengan kecamatan yang lain, karena Cangkringan merupakan satu kecamatan yang langsung terdampak atas terjadinya erupsi Merapi. Kerusakan jalan terjadi pada ruas jalan desa maupun jalan kabupaten, kerusakan jalan desa khusus untuk wilayah Kecamatan Cangkringan sepanjang 93,24 km. Kerusakan jalan kabupaten yang terjadi adalah sepanjang 47 kilometer yang tersebar di 3 kecamatan Cangkringan, Pakem dan Turi. Detail kerusakan jalan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Kerusakan Jalan Desa dan Kabupaten di Kabupaten Sleman

Jenis Jalan	Lokasi	Rusak (km.)		
		Berat	Sedang	Ringan
Jalan Desa	Glagaharjo	15.9	-	-
	Argomulyo	16.94	-	-
	Umbulharjo	16.52	-	-
	Kepuharjo	18.5	-	-
	Wukirsari	25.38	-	-
Jalan Kabupaten	Bedoyo-Kaliadem	5	-	-
	Ngrangkah-Kaliadem	2	-	-
	Tangkisan-Kopeng	3	-	-
	Geblok-Kaliadem	4	5	-
	Sidorejo-Glagaharjo	-	-	-
	Bronggang-Klangon	7	-	-
	Pantiasih-Wara	-	3	-
	Ngandong-Tritis	-	5	-
	Pulowatu-Turgo	-	5	-
	Tunggularum-Sedogan	-	-	2
	Ngepring-Kemirikebo	-	-	3
	Nangsri-Tritis	-	3	-

Sumber: Bappenas dan BNPB 2011.

Dalam sektor infrastruktur air bersih terjadi kerusakan yang sangat mengganggu kehidupan keseharian masyarakat lereng Merapi. Baik di wilayah Jawa Tengah maupun Yogyakarta terjadi kerusakan parah pada sumber air dan saluran air. Jaringan saluran-saluran air bersih dari sumber air ke rumah-rumah penduduk kebanyakan dikelola sendiri oleh warga masyarakat setempat. Saluran atau pipa-pipa air ini lah yang banyak mengalami kerusakan sehingga untuk waktu yang cukup lama setelah letusan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Di wilayah Kabupaten Sleman kerusakan jaringan pipa air terjadi di kecamatan Cangkringan, Pakem, dan Turi. Kerusakan yang lebih berat terjadi pada sumber air yang hilang atau mati akibat tertimbun material letusan. Sumber-

sumber air tersebut merupakan sumber air bersih tidak saja untuk wilayah atau kawasan lereng Merapi bagian atas, tetapi juga untuk wilayah-wilayah di bagian bawah. Sumber-sumber air di Kecamatan Cangkringan adalah sumber air bagi kawasan-kawasan di selatan Gunung Merapi, sampai di kota Yogyakarta dan bahkan di kabupaten Bantul. Sumber air di Kecamatan Cangkringan yang tertimbun material adalah Umbul Wadon dan Umbul Bebeng. Selain sumber air tertutup material vulkanik, instalasi air pun juga rusak, seperti yang terjadi pada instalasi air Plunyon, Kali Kuning yang diterjang lahar dingin sehingga 6.000 pelanggan tidak memperoleh air bersih. Pelanggan PDAM tersebut tersebar di wilayah kecamatan Pakem, Ngemplak, Kota Sleman, Depok, Kalasan, dan sebagian Ngaglik (Kompas, Jumat 5 November 2010). Nilai kerusakan yang dapat diperkirakan di sektor air bersih di wilayah Kabupaten Sleman saja mencapai Rp 14.300.000.000,00 yang terdiri dari kerusakan sumber air bersih, sistem dan jaringannya. Sedangkan perkiraan kerugiannya terhitung sebesar Rp 300.000.000,00.

2.3.2.3 Sektor Permukiman

Dalam sektor permukiman terjadi perbedaan yang signifikan, persentase nilai kerusakan dan kerugian di DIY (27,1%) jauh lebih tinggi di bandingkan di Jawa Tengah (3%). Hal ini terjadi karena luncuran awan panas yang terbesar menerjang sungai Gendol yang berada di wilayah DIY. Secara detail kerusakan dan kerugian dalam sektor permukiman dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Perumahan dalam Rupiah

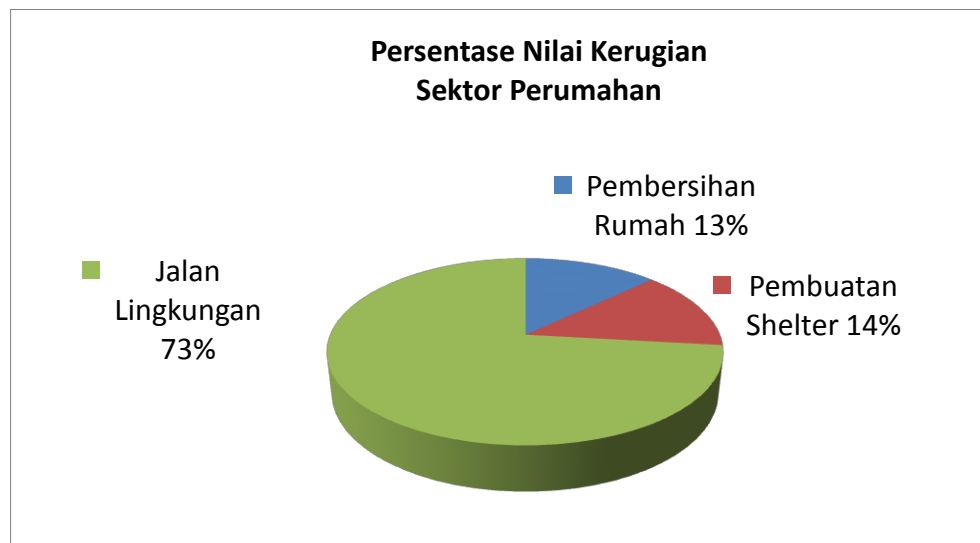
Sektor	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
Rusak berat/total	402.584.910.000	-	402.584.910.000
Rusak sedang	14.420.952.000	-	14.420.952.000
Rusak ringan	29.211.672.000	-	29.211.672.000
Pembersihan Rumah	-	17.528.396.000	17.528.396.000
Pembuatan Selter	-	18.552.300.000	18.552.300.000
Jalan Lingkungan	-	98.522.310.000	98.522.310.000
Jumlah	544.739.844.000	134.603.006.000	671.342.850.000

Sumber: Bappenas dan BNPB. 2011.

Grafik 2.5

Persentase Nilai Kerusakan dan Kerugian Sektor Perumahan di D.I. Yogyakarta





Sumber: Bappenas dan BNPB 2011.

Dari kedua bagan tersebut di atas terlihat bahwa terdapat lebih banyak kerusakan berat/total terjadi pada rumah-rumah yang terdampak erupsi dan nilai kerugian terbesar justru terjadi pada jalan lingkungan perumahan. Apabila dihitung dalam jumlah unit rumah yang terdampak, di wilayah DIY tercatat sejumlah 3.424 rumah yang mengalami kerusakan dampak erupsi Gunung Merapi, terdiri dari 2.636 unit rumah rusak berat dan tidak layak huni, 156 rumah rusak sedang, dan 632 rumah rusak ringan. Sedangkan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdapat sejumlah 3.705 rumah yang mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Merapi yang terdiri dari 551 rumah rusak berat, 950 rumah rusak sedang, dan 2.204 rumah rusak ringan (Bappenas dan BNPB 2011). Kerusakan berat banyak terjadi di wilayah Kecamatan Cangkringan yang disebabkan karena terjangan awan panas di sepanjang sungai Gendol sejauh 15 km. Sedang di kecamatan lain, kerusakan yang dialami lebih banyak kerusakan sedang sampai ringan. Kerusakan sedang dan ringan tersebut diakibatkan oleh hujan kerikil dan abu tebal. Kerugian yang dihasilkan oleh tumpukan abu tebal cukup besar nilainya. Perhitungan biaya pembersihan rumah sebanyak 40.634 unit rumah tersebut adalah sebesar Rp 25.000.000.000,00.

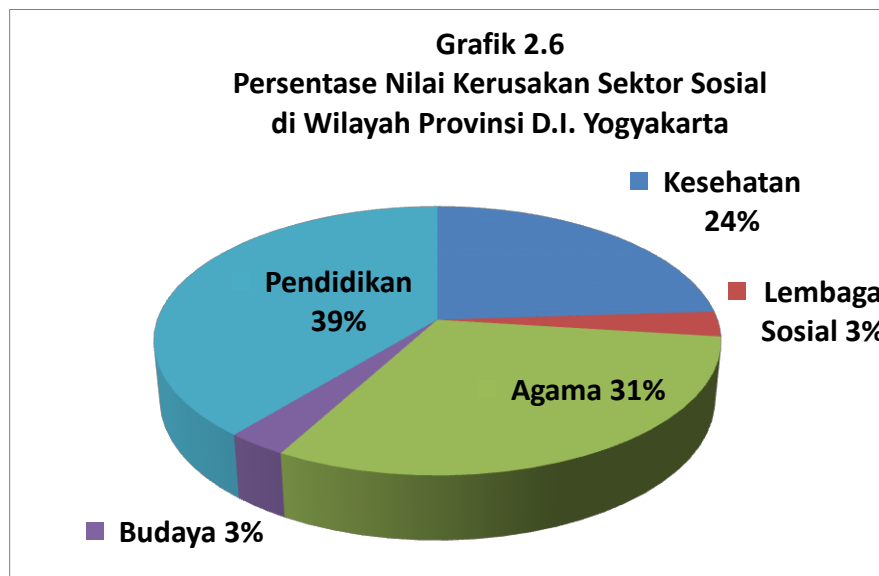
2.3.2.4 Sektor Sosial

Dampak dari erupsi Merapi dalam sektor sosial terjadi terhadap aktivitas masyarakat di bidang sosial yang meliputi sub sektor kesehatan, lembaga sosial, agama, budaya dan pendidikan. Letusan Gunung Merapi telah menghancurkan serta melumpuhkan beberapa fasilitas sosial seperti Puskesmas, tempat ibadah, sekolah, gedung pertemuan serta lembaga sosial budaya lainnya. Dampak langsung hancurnya sarana dan prasarana sosial adalah terganggunya dan terhentinya aktivitas-aktivitas sosial yang menggunakan fasilitas tersebut. Penilaian kerusakan dan kerugian yang didata setelah bencana tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Nilai Kerusakan dan Kerugian Dalam Sektor Sosial
di Provinsi Jawa Tengah dan DIY

Kabupaten	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
Magelang	19.712.740.000	4.505.920.000	24.218.660.000
Klaten	25.139.250.000	3.115.150.000	28.254.400.000
Boyolali	5.652.450.000	3.103.080.000	8.755.530.000
Sleman	38.923.490.000	22.320.120.000	61.243.610.000
Jumlah	89.427.930.000	33.044.270.000	122.472.200.000

Sumber: Bappenas dan BNPB 2011.



Sumber: Bappenas dan BNPB 2011.

Dari bagan di atas terlihat bahwa terdapat tiga sub sektor dalam sektor sosial yang mendapatkan kerusakan paling besar, yakni sub sektor pendidikan (39%), agama (31%), dan kesehatan (24%). Besarnya kerusakan pada ketiga sub sektor tersebut disebabkan oleh hancurnya fasilitas-fasilitas pendukung sub-sub sektor tersebut.

2.3.2.5 Lintas Sektor

Sektor lain-lain yang terdampak letusan Merapi 2010 dikelompokkan dalam bidang lintas sektor. Perhitungan atas nilai kerusakan dan kerugian dalam lintas sektor ini dilakukan terhadap sub-sektor pemerintahan, lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban, keuangan dan perbankan.

Dari keempat sub-sektor ini, total nilai kerusakan dan kerugian di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY terhitung sebesar lebih dari 479,52 milyar. Nilai kerugian dan kerusakan di wilayah DIY jauh melampaui nilai kerusakan dan kerugian di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah hanya terdampak sebesar Rp 75.000.000,00 pada nilai kerusakannya dan Rp 300.000.000,00 untuk nilai kerugiannya. Untuk lintas sektor di Jawa Tengah kerusakan memang hanya terjadi di daerah Boyolali dan terjadi hanya pada fasilitas pemerintahan saja.

2.4 Dampak Erupsi, Respon Pemerintah dan Masyarakat

Bencana alam gunung api telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. A.B. Lopian (1987) mengemukakan pengaruh erupsi gunung berapi terhadap masyarakat yang hidup di sekitarnya. Pengaruh yang diberikan tidak saja terjadi dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi, tetapi juga dalam bidang politik. Beberapa contoh kejadian dampak letusan gunung api disajikan oleh A.B. Lopian dalam tulisannya. Erupsi Gunung Tambora pada tahun 1815 telah menewaskan sekitar 11.000 orang dan Pulau Sumbawa kehilangan 85.000 penduduknya yang kebanyakan mengungsi ke luar Pulau Sumbawa setelah letusan besar terjadi. Empat dari enam kerajaan terhapus dari Pulau Sumbawa, bahkan negeri Tambora musnah ditelan laut. Pada bulan Agustus 1883 Gunung Krakatau meletus hebat. Letusan besar tersebut menewaskan sekitar 40.000 orang, 165 desa musnah, dan 132 desa rusak berat. Wilayah pantai Banten menderita paling parah. Pusat *afdeling* Anyer terpaksa dipindahkan ke Cilegon. Menurut sumber lokal, dipercaya bahwa bencana alam tersebut diakibatkan oleh ulah manusia yang menghuni wilayah tersebut. Kedua letusan itu dihubungkan dengan tingkah laku manusia di sekitarnya yang tidak benar dan terpuji.

Demikian pula halnya dengan letusan yang diakibatkan oleh Gunung Merapi, Erupsi berserta dengan material vulkanik yang dihasilkan menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi masyarakat lereng Gunung Merapi. Dari uraian sejarah letusan, terlihat bahwa letusan Merapi beserta dengan luncuran awan panasnya mengakibatkan korban jiwa, menghancurkan pemukiman desa, sumber daya pertanian, dan fasilitas umum. Berikut ini ringkasan kerusakan yang tercatat yang ditampilkan dalam bentuk tabel.

Tabel 2.8
Kerusakan dan Kerugian Akibat Letusan 1672– 2010

Tahun Letusan	Korban Jiwa	Luka-luka	Kerusakan
2010	386		Pengungsi berjumlah 15.366, total kerusakan Rp 2.141.437,93, dan total kerugian Rp 1.487.272,68
2006	2		Sebagian Desa Kaliadem tertutup lahar, 6 buah kios, mushola, pemancar sirene, dan fasilitas umum. Jumlah pengungsi 20.073 jiwa.
1994	66		Pengungsi berjumlah sekitar 20 ribu jiwa, khususnya penduduk di Dusun Turgo, kerusakan bangunan rumah satu RT, dan kerugian sekitar Rp 250.000.000,00.
1986	1		Puluhan rumah rusak berat terterjang lahar dingin di sepanjang sungai Krasak
1976	26		Puluhan rumah rusak berat terterjang lahar dingin.
1969	1		Pengungsi sekitar 4 desa, kerusakan sepanjang bataran sungai krasak.
1961	6		8 desa rusak berat, 1 desa rusak sebagian kecil
1954	64	57	2 desa rusak berat, 1 desa rusak sebagian kecil
1930	1.369		13 desa rusak berat, 29 desa rusak sebagian kecil
1920	35		44 desa rusak parah
1904	16		-
1888		beberapa	Penduduk Ds. Jarakah diungsikan
1872			Menghancurkan desa-desa di atas elevasi 1.000 km.
1849			800 rumah rusak, 500.000 pohon kopi rusak
1832	32		-
1822	100		8 desa rusak
1672	3000		Banyak desa rusak dan terkubur

Dari sejarah meletusnya Gunung Merapi, ada catatan menarik pada letusannya di tahun 1930. Pada saat itu, dunia tengah menghadapi zaman krisis yang kerap disebut zaman malaise. P. Swantoro dalam bukunya *Dari Buku ke Buku Sambung Menyambung Menjadi Satu* menuturkan berdasarkan laporan G. Vriens berjudul “*De Merapi*” dalam majalah *Claverbond* tahun ke-43, 1931:

“Pada awal masa malaise itu, pada 18 Desember 1930, terjadilah suatu bencana besar di Jawa Tengah: Gunung Merapi meletus! Tidak kurang dari 1.500 orang tewas dan 2.500 hewan mati. Berhektar-hektar sawah serta ladang hancur, dan ratusan rumah terbakar atau roboh” (Swantoro 2002: 36).

Dampak letusan Gunung dari masa ke masa selalu menimbulkan beban yang berat bagi masyarakat yang menghuni lereng Merapi. Salah satu contoh yang dapat disajikan di sini adalah letusan yang terjadi pada tahun 2006. Dampak

letusan Gunung Merapi tahun 2006 terlihat jelas pada sektor pertanian, infrastruktur, dan sosial. Sektor pertanian mendapatkan dampak yang paling parah dibandingkan sektor lain. Dampak pada sektor pertanian sangat bervariasi, terutama tergantung pada jenis tanaman dan ketebalan abu. Di beberapa tempat kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan mencapai 100%, tetapi di lokasi lain dijumpai ketahanan yang lebih tinggi. Menurut laporan Wilson, Kaye, Stewart, dan Cole (2007) terhadap survei yang dilakukan setelah kejadian letusan 2006, tingkat ketahanan jenis tanaman terhadap abu vulkanik berbeda-beda. Dalam sub sektor perternakan dampak kerugian yang dialami adalah menurunnya berat badan dan produksi susu karena ternak sapi terpaksa diberi pakan yang tercemar abu vulkanik.

Infrastruktur yang terdampak letusan 2006, kecuali di Desa Kaliadem, tidak begitu banyak karena ketebalan abu vulkanik letusan 2006 tidak begitu tinggi. Kerusakan daerah wisata Kaliadem berupa terkuburnya lokasi wisata beserta dengan 6 buah kios, mushola, pemancar sirene, dan fasilitas umum. Dua jembatan di desa Jambu dan Dusun Petung tertutup abu vulkanik. Di samping itu, ketersediaan air bersih sulit karena sumber air tertutup material awan panas dan pipa saluran air putus terterjang material letusan.

Korban jiwa letusan berjumlah dua orang relawan. Mereka meninggal dunia ketika berusaha menyelamatkan diri dari awan panas dengan berlindung di dalam *bunker*. Peristiwa ini menyadarkan orang bahwa *bunker* yang dibangun selama ini belum memadai sebagai tempat perlindungan ketika bencana datang.

Penduduk yang diungsikan pada tahun 2006 tersebut lebih dari 20.000 jiwa. Dibandingkan dengan wilayah DIY, warga yang mengungsi lebih banyak yang berasal dari desa-desa di wilayah Jawa Tengah. Perbedaan itu dapat dikaitkan dengan tingkat ancaman erupsi, atau pun kebiasaan masyarakat untuk melakukan pengungsian ketika Merapi aktif.

Tabel 2.8
Data Pengungsi Erupsi Gunung Merapi Per Tanggal 10 Juni 2006

Propinsi	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah		
			Per Kec.	Per Kab.	Per Prop.
Jawa Tengah	Magelang	Muntilan	1.621	12.675	16.238
		Salam	5.122		
		Srumbung	3.299		
		Dukun	2.439		
		Sawangan	180		
		RSU Magelang	14		
	Klaten	Kemalang	3065	3.563	
		Manisrenggo	498		
	Boyolali			0	
D.I. Yogyakarta	Sleman	Tempel	0	3.835	3.835
		Turi	538		
		Pakem	510		
		Cangkringan	2.787		

Sumber : Berbagai media dengan direvisi

Dari uraian di atas dan dalam sub bab sebelumnya terlihat bahwa dampak erupsi Gunung Merapi menimpa berbagai aspek, yaitu lingkungan alam, infrastruktur, dan sosial ekonomi masyarakat terdampak. Namun, pada dasarnya bahwa semua aspek terdampak tersebut bermuara pada manusia yang hidup di kawasan terdampak letusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kerusakan-kerusakan dan kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh letusan Gunung Merapi akan langsung berdampak pada kehidupan manusia penghuni daerah terdampak.

2.4.1 Respon Pemerintah dan Masyarakat Luas

Aktivitas Merapi merupakan kejadian yang berlangsung terus menerus, dimulai pada saat pembentukan yang pertama kali sampai saat ini. Salah satu aktivitas Merapi yang paling menonjol adalah aktivitas erupsi. Erupsi Merapi yang sudah berlangsung sejak jaman kerajaan Mataram Kuno sampai dengan pada masa kini khususnya tahun 2010 telah menimbulkan respon yang tipikal pada kerajaan atau pemerintah dan masyarakat luas. Sub bab ini akan membicarakan respon pemerintah dan masyarakat secara umum terutama respon sebelum letusan

tahun 2010. Adapun respon tipikal pada masyarakat lereng Merapi terhadap letusan 2010 akan dibahas tersendiri sebagai bagian utama dari penelitian ini.

Sesuai dengan catatan sejarah yang diteliti oleh para arkeolog dan sejarawan, pemerintah pada masa kerajaan Mataram Kuno tidak tinggal diam dalam menghadapi aktivitas gunung berapi, termasuk Gunung Merapi di wilayah yang saat ini dikenal secara administrasi dengan DIY dan Jawa Tengah.

Erupsi Merapi telah disadari sebagai ancaman bagi masyarakat dan bahkan kerajaan, sehingga pihak penguasa nampaknya mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Di wilayah lereng Merapi banyak ditemukan tinggalan dari masa lalu yang terkubur oleh letusan gunung Merapi. Penelitian-penelitian terhadap beberapa candi di lereng Merapi, seperti candi Morangan, Kedulan, Sambisari, dan Kedulan memperlihatkan bahwa dampak letusan Merapi telah mengubur candi-candi tersebut (Suwarso Alip Nugroho 2000; Kartikaningtyas 2009; Petrasawacana 2010; Rovicky 2006; Newhall 2000). Mitigasi dan penanggulangan bencana akibat letusan Merapi oleh kerajaan dapat dibuktikan dari beberapa temuan arkeologi di wilayah Prambanan. Bukti arkeologis di Kompleks Candi Sambisari menunjukkan adanya upaya pihak yang berwenang dalam menanggulangi kerusakan kompleks candi dari luapan lahar dingin. Pintu pagar halaman candi Sambisari di sisi utara dan barat dengan sengaja ditutup oleh tatanan batu yang kuat dalam rangka untuk menahan luapan lahar dingin masuk ke halaman candi.

Foto 2.1
Pintu Halaman Candi Sambisari yang Ditutup dengan Tatanan Batu



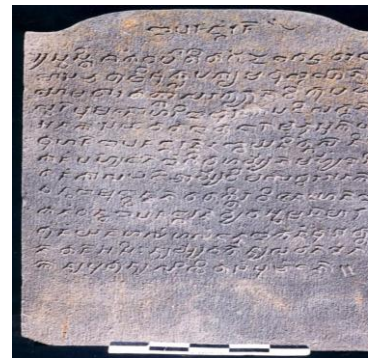
Sumber: Suwarso Alip Nugroho, 2000

Penanggulangan bencana lahar dingin di wilayah Kalasan juga ditunjukkan oleh temuan prasasti di depan Candi Kedulan. Pada tahun 2002 pada saat dilakukan ekskavasi penelitian di kompleks candi tersebut telah ditemukan dua buah prasasti, yaitu Prasasti Sumundul dan Pananggaran yang bertanggal 15 Agustus 869 Masehi. Prasasti ini berisi tentang penetapan perdikan bendungan di desa Sumundul dan Pananggaran (Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta, 2007). Dari berita prasasti tersebut dapat diinterpretasikan bahwa bendungan atau tanggul yang dibangun tersebut

kemungkinan ditujukan pada upaya penanggulangan lahar dingin yang mengancam candi tersebut. Penelitian stratigrafi di kompleks candi ini memang menunjukkan bahwa pada akhirnya candi tersebut tertimbun oleh luapan lahar dingin (Suwarso Alip Nugroho, 2000). Peneguhan prasasti tersebut dilaksanakan atas perintah seorang pejabat Rakryan Wiku Padang Lepar yang bernama mpu Manoha. Interpretasi lebih jauh dari hasil pembacaan prasasti ini adalah bahwa pihak penguasa (dalam hal ini diwakili oleh Rakryan Wiku padang Lepar) sangat memperhatikan keamanan candi dan lingkungannya dari bencana lahar dingin. Dengan kata lain, pemerintahan kerajaan pada masa itu berinisiatif melakukan tindakan mitigasi dan penanggulangan bencana akibat letusan Gunung Merapi.

Catatan sejarah masa Mataram Kuno membuktikan bahwa erupsi Merapi telah mendorong pemerintah melakukan program penanggulangan bencana alam. Demikian pula pada masa Kerajaan Mataram Islam, pemerintah juga membuktikan diri sebagai agen yang berkehendak untuk menyelamatkan warga dari erupsi Merapi dengan mengeluarkan mitos tentang kekuasaan Panembahan Sutawijaya yang bersahabat dengan penguasa Laut Selatan dan Gunung Merapi. Dalam Babad Tanah Jawi diceritakan pada tahun 1587 pasukan Kasultanan Pajang yang dipimpin langsung oleh Sultan Hadiwijaya menyerbu ke Mataram.

Foto 2.2
Prasasti Pananggaran, salah
satu prasasti yang
ditemukan di depan Candi
Kedulan



Sumber: Dokumentasi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta.

Ketika mereka bermarkas di Prambanan, Merapi meletus dan memporakporandakan pasukan Pajang. Letusan yang disertai dengan gempa bumi dan hujan abu ini dikisahkan sebagai petanda bahwa pasukan Pajang tidak boleh menyerang Mataram.

Cerita yang sama juga dikisahkan dalam Babad Panembahan Senopati koleksi Perpustakaan Pura Pakualaman. Babad lain yang bercerita tentang letusan Merapi adalah Babad Ngayogyakarta. Babad Ngayogyakarta berisi sejarah dalam bentuk sastra dari masa kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono II hingga HB V. Tiga bait tembang dalam babad tersebut mengkisahkan letusan gunung Merapi yang terjadi pada tahun 1822. Letusan yang terjadi berbulan-bulan tersebut kemudian disusul juga dengan letusan gunung Bromo, Kelud, Slamet dan Guntur. Letusan yang beruntun tersebut dibaca sebagai akan terjadinya kerusakan negara dan yang kemudian diikuti perang besar di Pulau Jawa. Perang besar memang kemudian terjadi pada tahun 1825-1830 yang terkenal sebagai perang Diponegoro (<http://regional.kompas.com/read/2010/11/19/13225985/Tembang.Merapi.Masa.Lalu>).

Baru sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana erupsi Merapi dapat disimak secara lebih jelas. Ketika Merapi meletus pada tahun 1888, pemerintah Kolonial Belanda melakukan upaya pengungsian warga penduduk Desa Jrasah dan Genjikan. Penduduk Jrasah berhasil diungsikan, namun penduduk Genjikan bersikeras untuk tidak meninggalkan desanya. Ketika terjadi letusan susulan, ternyata awan panas meluncur ke arah Sungai Blongkeng dan bukannya menuju desa Genjikan sehingga seluruh Desa Genjikan selamat. Pada tahun 1930 terlihat pula upaya pemerintah Kolonial Belanda melakukan penelitian untuk mempekirakan besar guguran dan luncuran awan panas.

Pada tahun 1935 pemerintah Hindia Belanda melancarkan program mitigasi dengan melakukan pemasangan sirene peringatan. Pada tahun 1941 dikeluarkan program penanggulangan bencana dengan membuat kawasan bencana secara konsentris yang dibagi secara radial dalam beberapa sektor. Mulai dikenalkan pula istilah kawasan bahaya yang dikenal dengan sebutan kawasan

terlarang, bahaya dari awan panas dan lahar, dan daerah bahaya 2 yang terancam oleh letusan besar. Pada letusan tahun 1943 untuk pertama kalinya tercatat tentang evakuasi pengungsi yang lebih sistematis oleh pemerintahan penjajahan. Sebagian penduduk di Batang atas menolak dievakuasi, tetapi kemudian terpaksa dievakuasi secara paksa oleh polisi. Selanjutnya setelah tahun-tahun tersebut peralatan pemantauan Gunung Merapi terus dilengkapi.

Program pemerintah Hindia Belanda itu diteruskan oleh pemerintah Indonesia. Erupsi yang terjadi pada tahun 1961 direspon oleh pemerintah dengan mencanangkan program *bedol desa*, dan salah satunya adalah memindahkan penduduk desa di lereng barat ke Wonosobo dan transmigrasi ke Lampung Sumatra. Pemerintah Orde Baru melanjutkan program transmigrasi pemerintah Orde Lama dengan menjaring korban bencana Merapi sebagai kelompok sasarannya. Korban erupsi Merapi 1969 di wilayah Kemiren Kabupaten Magelang, misalnya didorong untuk ikut program transmigrasi *bedol desa* ke wilayah Lampung. Desa Jamburejo II dikosongkan oleh pemerintah karena dinyatakan bahwa penduduknya ikut program *bedol desa*. Selain mencanangkan transmigrasi *bedol desa*, pemerintah juga mencanangkan program transmigrasi konvensional. Rumah tangga miskin di lereng Merapi dibujuk untuk ikut program transmigrasi. Orang-orang yang tinggal di daerah terlarang, yaitu yang berada di bagian puncak Merapi juga didorong untuk ikut transmigrasi.

Program transmigrasi *bedol desa* tidak menarik warga. Mereka baru terpaksa ikut program ketika mengalami bencana yang secara nyata akan menghancurkan kampungnya seperti yang dialami orang Desa Jrasah. Program transmigrasi konvensional juga tidak menarik perhatian penduduk lereng Merapi. Mereka yang sudah transmigrasi tidak sedikit yang balik ke kampungnya. Sekalipun relatif miskin karena tanah garapannya sempit penduduk lebih suka tinggal di lereng Merapi daripada tinggal di Lampung karena tanah di sana kurang subur dan hasil bumi kurang laku di pasar.

Pada waktu erupsi 1994 yang telah menelan korban orang Turgo dan sekitarnya, pemerintah juga menggalakkan program transmigrasi. Di samping itu dilakukan juga relokasi para korban di Dusun Sidomoro. Sesungguhnya,

pemerintah berkehendak agar seluruh penduduk di Turgo dan sebagian di lereng Merapi bagian atas mengikuti program transmigrasi dan bekerja di PIR (Perkebunan Inti Rakyat) di luar Jawa. Suara Pembaharuan tanggal 26 Desember 1994 memberitakan bahwa Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Siswono Yudohusodo melaporkan kepada presiden bahwa sudah 103 KK korban Gunung Merapi ditransmigrasikan ke Sumatera Selatan dan Jambi. Mereka itu adalah penduduk yang tinggal di daerah bahaya I yang tempat tinggalnya tidak mungkin ditempati lagi. Menteri mengatakan bahwa mereka yang direncanakan ditransmigrasikan akibat letusan Gunung Merapi tersebut sebanyak 624 KK atau 2.500 jiwa lebih. Bagi yang belum ditransmigrasikan telah disiapkan juga lokasi di Bengkulu untuk 70 KK, di Sumsel 30 KK, Jambi 44 KK dan Riau 50 KK. (<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1995/01/02/0009.html>).

Program transmigrasi itu ditolak dengan tegas oleh masyarakat. Warga curiga bahwa kalau mereka meninggalkan kampung, maka tanahnya akan diserobot oleh investor dan akan dijadikan lokasi villa. Mereka curiga juga mengapa pemerintah membangun jalan padahal kampungnya akan ditinggalkan. Akhirnya program kemudian ditolak sekalipun pemerintah melakukan intimidasi. Dari 7.962 KK warga Turgo yang diwawancarai tentang minat untuk mengikuti transmigrasi, kurang dari 1% yang merasa tertarik untuk bertransmigrasi (Dove 2008).

Selain melakukan pencegahan dengan menggunakan pendekatan relokasi dan mencanangkan program transmigrasi, pemerintah juga mencanangkan program pembangunan sabo dam dan penguatan bantaran sungai yang membawa material Merapi. Presiden Soeharto misalnya mencanangkan pembangunan sabo di wilayah Babatan dan Kemiren sehingga lahar bisa tertampung cukup lama dalam sabo tersebut dan meluncur ke bawah melalui sungai-sungai yang sudah diperkeras tanggulnya.

Selain pembangunan sabo pemerintah juga mengatur kelembagaan penanggulangan bencana agar bisa bekerja seefektif mungkin untuk menyelamatkan korban. Pada masa Orde Baru dengan sistemnya yang sentralistik dan otoriter, penanganan bencana pada waktu situasi darurat ditangani oleh

pemerintah daerah dengan melibatkan TNI (ketika itu ABRI) yang memiliki peran yang besar. Hal itu tampak ketika erupsi 1994. Ketika pemerintah menetapkan orang Turgo dan sekitarnya harus mengungsi, dan desa mereka harus dikosongkan, maka pemerintah daerah dibantu oleh ABRI melakukan pengamanan ketat, dan segala urusan logistik diurus sepenuhnya oleh pemerintah daerah dibawah supervisi pemerintah pusat. Semua program dan aktivitas penanggulangan bencana kemudian diorganisir oleh pemerintah daerah. Media dan masyarakat sipil melakukan program kemanusiaan dengan menggalang dana publik dan menyantuni para korban, tetapi segala aktivitas mereka harus sesuai dengan arahan pemerintah, dan pelaksana teknis di lapangan tetap berada di tangan pejabat pemerintah daerah sampai dengan desa.

Sekalipun program penanggulangan bencana erupsi dapat berjalan berkat adanya kelembagaan yang sangat dikendalikan oleh pihak pemerintah daerah, tetapi program tersebut mengabaikan peran aktif masyarakat luas dan media massa. Nampak bahwa pihak media dan masyarakat juga cenderung mengikuti wacana yang dikeluarkan oleh pemerintah daripada pihak lain seperti akademisi yang lebih kritis (Hudayana, 2012). Akibatnya, program penanggulangan bencana erupsi itu kurang populis karena ujungnya adalah mengendalikan korban agar ikut program transmigrasi, bukan membangun kembali ekonomi lokal melalui program pemulihan yang partisipatif.

Sejak era reformasi, pelibatan pemerintah dalam penanggulangan bencana alam Merapi lebih aspiratif, dalam arti pemerintah tidak lagi menjadikan penduduk Merapi sebagai kelompok sasaran program transmigrasi yang mengakibatkan munculnya perasaan terancam harus meninggalkan kampungnya. Namun demikian, pemerintah pusat mengeluarkan program yang secara tidak langsung juga mengancam tempat tinggal permanen mereka di lereng Merapi. Hal ini karena adanya program pembangunan Taman Nasional Gunung Merapi yang menuntut lereng Merapi bagian atas dipakai sebagai kawasan yang steril dari aktivitas ekonomi masyarakat Merapi.

Secara tradisional orang Merapi biasa memanfaatkan lahan di lereng bagian atas untuk kebutuhan subsistensinya tanpa merusak ekosistem yang

diciptakan oleh Merapi. Pertama, orang Merapi biasa mencari kayu bakar dari ranting atau kayu kering bukan melakukan penebangan hutan sebagai bentuk pencurian. Memang, selalu ada saja oknum yang mencuri, tetapi itu bukan berarti seluruh warga melakukan hal yang sama. Seluruh warga justru menjaga kelestarian hutan. Mereka misalnya sudah terbiasa melakukan gotong-royong dan kesiapsiagaan memadamkan kebakaran hutan. Ketika Merapi tebakar pada tahun 2000 misalnya, sebagai akibat dari ulah para wisatawan, orang Merapi kemudian secara kompak melakukan pemadaman, sehingga peran pemerintah justru dimudahkan dalam menjaga kelestarian alam. Kedua, secara tradisional masyarakat selalu memanfaatkan ilalang untuk pakan ternaknya. Peternakan sapi menjadi strategi subsistensi yang penting di Merapi karena didukung oleh adanya suplai pakan ilalang. Tumbuhan ini hidup dengan sendirinya karena adanya erupsi yang membakar lereng Merapi. Setiap kali erupsi Merapi, maka ilalang tua terbakar api, tetapi akan muncul tunas baru yang subur karena ditunjang oleh adanya abu bekas terbakarnya ilalang dan rumput tua di sekitarnya.

Program Taman Nasional Gunung Merapi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 134/MENHUT-II/2004 tanggal 4 Mei 2004 sudah berjalan hampir selama 10 tahun (<http://dinhut.jatengprov.go.id>). Program TNGM ini memuat beberapa kontradiksi, antara lain dalam masalah dampak yang diakibatkan dengan penetapan TNGM. Akses masyarakat terhadap sumberdaya alam lereng Merapi terkalahkan dengan kekuatan yang lebih besar yang masih akan memperoleh akses ekonomi setelah penetapan TNGM (Kuswijayanti dkk, 2007). Sementara itu, warga dengan dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil melakukan perlawanan secara persuasif dengan mengingatkan bahwa warga bukan merusak tetapi tetap melestarikan vegetasi di lereng Merapi. Program ini secara tidak langsung mendorong warga agar mengurangi aktivitas merumput di lereng Merapi. Warga keberatan jika mereka pindah keluar desanya.

Pada waktu erupsi 2010, warga di beberapa wilayah juga diajak untuk melaksanakan relokasi dan diminta kesediaannya untuk menjual tanahnya agar dijadikan taman nasional. Namun, warga di Glagaharjo, Kali Tengah, dan

Sambungrejo menolak dan mulai muncul kecurigaan bahwa bencana erupsi 2010 itu dijadikan alasan utama untuk merelokasi warga demi pembangunan tanaman nasional daripada sebagai upaya penyelamatan dari dampak bencana alam.

Dalam rangka program penanggulangan bencana, kebijakan pemerintah pada era reformasi mengalami perubahan yang menonjol. Pada tahun 2006, PEMDA mencanangkan kebijakan bahwa yang harus diungsikan lebih dahulu adalah ternak sapi dan baru kemudian petani-peternaknya. Namun, pada erupsi 2010 kebijakan berubah karena pemerintah lebih mendukung pengungsian manusianya lebih dahulu daripada ternaknya. Adapun dalam kasus erupsi 2006, kebijakan pemerintah untuk mengungsikan warga juga terkendala oleh munculnya semacam “perlawanan” dari Mbah Marijan, seorang guru kunci Keraton Kasultanan Yogyakarta. Drama penolakan ini menjadi konsumsi media dan dijadikan berita yang atraktif. Sekalipun pelaksanaan pengungsian berjalan, tetapi karena erupsi itu tidak langsung menerjang kampung mereka maka kemudian kebijakan pengungsian tidak populer. Di samping itu, kejadian erupsi 2006 ini hampir bersamaan dengan kejadian gempa 2006 yang menelan korban lebih banyak yang membuat dampak bencana Merapi tertutup olehnya.

Setelah erupsi 2006, pemerintah mulai menerapkan UU 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. UU ini mengamanatkan bahwa tanggung jawab penanggulangan bencana berada di pundak BNPB dan BPBD. Oleh karena itu dalam merespon bencana erupsi Merapi, pemerintah mengacu pada undang-undang tersebut beserta dengan regulasi yang menyertainya.

Erupsi 2010 yang sangat dasyat dan mirip dengan erupsi tahun 1870 mendorong pemerintah melakukan langkah strategis guna meminimalisasi korban. Langkah itu adalah sbb:

1. Penetapan kendali operasi tanggap darurat di tangan kepala BNPB yang akan dibantu oleh Gubernur DIY, Gubernur Jawa Tengah, Panglima Kodam IV Diponegoro, Kepala Kepolisian daerah Jawa Tengah, dan Kepala Kepolisian Daerah DIY.

2. Mendorong unsur pemerintah pusat berada di garis depan. Presiden menugaskan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono untuk mengkoordinir bantuan pemerintah.
3. TNI supaya mengerahkan satu brigade penanggulangan bencana.
4. POLRI mengerahkan satuan tugas kepolisian untuk pengamanan.
5. Pemerintah akan membeli sapi-sapi ternak milik penduduk yang terkena dampak letusan dengan harga yang pantas (Kompas, 6 November 2010 dan <http://jogjaprovo.go.id>).

Rencana Relokasi juga diperkuat oleh instruksi Sri Sultan Hamengkubuwono X sekaligus sebagai Gubernur Provinsi D.I.Y untuk merelokasi permukiman warga dari daerah terdampak Merapi. Pasca erupsi 2010, pemerintah melakukan kebijakan rekonstruksi dan rehabilitasi melalui proses memukimkan warga korban yang rumahnya rusak berat dan hancur dengan menyediakan hunian, dan merelokasi pemukiman agar menjauh dari kawasan yang dianggap rawan bencana ke depan. Kebijakan itu belum terevaluasi dan melalui studi ini diharapkan akan tergambar responsifitas masyarakat.

2.5 Kesimpulan

Deskripsi sejarah gunung Merapi dalam rentang waktu yang panjang dari masa Hindu sampai dengan masa kini mengungkapkan bahwa gunung Merapi telah menjadi bagian habitat kehidupan masyarakat Jawa. Dengan kata lain, orang Jawa telah beradaptasi dengan ekologi yang rentan menghadapi bencana sehingga mereka tidak mungkin memandang Merapi sebagai ancaman tetapi pasti juga sebagai sumberdaya yang bernilai bagi kehidupannya. Mereka memanfaatkan kekayaan alam yang dilimpahkan oleh Merapi tetapi juga berusaha beradaptasi terhadap resiko menghadapi bencana.

Oleh karena Merapi sudah menjadi habitat orang Jawa yang keberadaannya dihuni oleh komunitas yang relatif padat, pemerintah dari masa kerajaan Hindu sampai dengan masa kini tidak tinggal diam. Mereka melakukan upaya penanggulangan bencana dengan menggunakan kapasitas dan mengikuti budaya politik yang berlaku pada zamannya. Apa yang dilakukan pemerintah

pada dasarnya adalah menyelamatkan penduduk dari resiko bencana dan menyantuni penduduk yang telah menjadi korban. Nampak bahwa sejak pemerintahan Hindia Belanda hingga masa reformasi, perhatian pemerintah terhadap program penanggulangan bencana semakin meningkat. Teknologi kebencanaan juga dikembangkan untuk mengantisipasi munculnya banyak korban. Dengan demikian, resiko banyaknya korban bencana dapat dikurangi.

Sekalipun telah dikembangkan perangkat teknologi beserta serangkaian kebijakan yang bersifat teknokratis, bencana erupsi Merapi justru terletak pada masalah sosialnya. Data kebencanaan erupsi tahun 2010 menunjukkan bahwa kerugian dan kerusakan sosial dan ekonomi cukup besar. Meskipun belum diuraikan secara mendalam pada bagian ini, tetapi bagian ini sudah memberikan gambaran yang kuat bahwa sekalipun erupsi senantiasa terjadi, penduduk di lereng Merapi tetap saja padat. Mereka berupaya melakukan evakuasi secara tepat agar dapat selamat dan dapat kembali memulihkan kehidupannya. Apa yang terjadi adalah secara umum terhadap orang lereng Merapi adalah mereka memang meninggalkan kampung halaman mereka ketika terlanda erupsi Merapi, tetapi kemudian pada umumnya mereka kembali pulang ke kampungnya paska bencana.

Deskripsi di atas mengungkapkan tiga pola permasalahan sosial yang muncul di lereng Merapi. Pertama, ada yang meninggalkan kampung mereka secara permanen karena mendapat tekanan untuk ikut program transmigrasi pada masa Orde Baru. Di antara warga yang ikut program transmigrasi tersebut, sebagian balik kembali karena menghadapi kenyataan bahwa kehidupan di tanah seberang tidak sebaik di lereng Merapi. Kedua, ada warga korban yang bersedia melakukan relokasi sesuai dengan arahan pemerintah ataupun secara swakarsa. Ketiga, warga melakukan relokasi sementara dan kemudian balik kembali ketika erupsi berhenti dan kampungnya sudah aman. Pada saat terjadi bencana erupsi mereka melakukan semacam ritus penyelamatan yaitu evakuasi, menetap sementara di pengungsian dan balik kembali untuk membangun komunitasnya lagi.

Karakteristik orang Merapi yang enggan meninggalkan kampung secara permanen dan menjadikan kampung sebagai komunitas yang bermakna bagi

kehidupannya menjadi relevan untuk ditangkap sebagai pertanyaan penelitian selanjutnya dalam bab selanjutnya. Bab III akan memberikan suatu deskripsi tentang karakteristik dusun secara fisik dan administratif guna memahami bagaimana orang lereng Merapi menyiapkan komunitasnya.

BAB III

PROFIL DUSUN DI LERENG MERAPI

Dusun merupakan unit komunitas kecil di dalam masyarakat desa di Jawa. Setiap dusun merupakan organisasi sosial yang memiliki teritori yang cukup memadai untuk pemukiman dan sumber penghidupan warganya. Dusun menjadi sebuah komunitas yang penting di Jawa karena secara tradisional habitat sosial orang Jawa adalah dusun (Hidayana. 2002). Orang Jawa tumbuh dan mendalami budaya mereka melalui komunitas dusun, sehingga dalam mempelajari komunitas di lereng Merapi, maka studi ini menempatkan dusun menjadi suatu unit analisis penelitian yang penting.

Bab ini merupakan pengantar untuk memahami keragaman komunitas lereng Merapi, dengan menyimak karakteristik dusun dari sisi fisik, yaitu aspek geografis dan demografis yang relevan dengan aspek sosial-ekonominya. Aspek geografi yang diperhatikan dalam bab ini meliputi letak, kemiringan dan luas, dan kondisi demografi seperti jumlah kepadatan dan distribusi penduduk.

3.1 Lokasi Dusun dan Posisinya dalam KRB

Kebutuhan untuk menggambarkan keragaman komunitas Merapi mendorong LAURA memilih dusun-dusun di empat Kabupaten sebagai lokasi penelitian. Selain itu, penelitian ini fokus pada dusun yang berada di KRB III sehingga jumlah dusun di KRB III lebih banyak daripada di KRB II dan I.

Banyaknya dusun KRB III yang menjadi lokasi penelitian dipilih berdasarkan beberapa alasan. Pertama, konsep lokal mengenai orang Merapi identik dengan mereka yang menempati dusun-dusun teratas Merapi yang merupakan dusun KRB III dan II, sehingga jumlah dusun yang diangkat sebagai lokasi penelitian ini lebih banyak. Dalam sistem klasifikasi lokal, orang yang tinggal di KRB I dianggap orang *ngarai* atau *ngisor* (bawah) yang identik dengan dataran rendah atau daerah persawahan. Candi Morangan di wilayah Sleman pun termasuk daerah *ngarai*, tetapi karena daerah ini dekat dengan sungai Gendol

yang menjadi jalur material erupsi Merapi, maka pemerintah memasukkan dusun ini ke dalam KRB II.

Dua puluh dusun di wilayah KRB III merupakan dusun yang lokasinya sekitar tiga sampai enam kilometer dari puncak Merapi. Dusun-dusun ini terkena dampak langsung erupsi Merapi dalam bentuk hujan abu yang pekat, sehingga mengancam kesehatan manusia dan ternaknya. Bahkan banyak tanaman yang layu dan roboh akibat hujan debu.

Beberapa dusun di KRB III juga terkena awan panas, antara lain dusun Kopeng, Kinahrejo dan Bronggang di Kabupaten Sleman yang memakan korban jiwa dan ternak. Di Kabupaten Klaten, dusun yang terkena adalah Sambungrejo sekalipun tidak menelan korban jiwa dan ternak tetapi awan panas telah merusak bangunan rumah, khususnya bagian genting dan atap.

Tabel 3.1
Distribusi Nama Dusun Sampel Penelitian di Empat Kabupaten Menurut KRB

Nama kabupaten	KRB III	KRB II	KRB I
Sleman	Kopeng, Kinahrejo, Turgotegal, Kemiricilik, Bronggang	Bendosari, Gondoarum, Krajan, Candi Morangan	Sempu, Pakisaji
Magelang	Kaliurang Utara, Cabe Lor, Candipos, Grogol, Trono, Babadan Bawah,	Jamburejo Dua, Gowoksabrang	
Boyolali	Stabelan, Klakah Tengah, Kujon	Karangsari, Ngablak	
Klaten	Jamuran, Malangsari, Panggang, Segadung, Sambungrejo, Kaligentong		
Jumlah	20	8	2

Sumber: Data Primer 2011.

Secara historis hampir semua dusun di KRB III rawan ancaman erupsi. Dusun Kinahrejo dan Sambungrejo, misalnya terkena awan panas dan muntahan lahar pada tahun 2006. Meski dusun-dusun di wilayah Magelang belum terkena awan panas, pada erupsi tahun 2001 juga tertutup abu pekat sehingga

penduduknya harus mengungsi. Orang Turgo dan sebagian penduduk dusun di bawahnya juga harus mengungsi pada tahun 1994 karena serangan awan panas telah menewaskan 60 orang di Turgo. Adapun wilayah Boyolali hampir tidak pernah terkena erupsi langsung. Namun berdasarkan cerita warga yang masih hidup di Boyolali, awan panas pernah masuk ke beberapa dusun di wilayah ini pada erupsi tahun 1950an, sehingga beberapa dusun kemudian yang terkena seperti dusun Jrasah pernah dikosongkan dan Dusun Pencar di atas Dusun Stabelan Desa Tlogolele hilang musnah. Kini masyarakat generasi tua di Boyolali masih mempunyai ingatan atas musibah tersebut dan bagi mereka ancaman Merapi yang paling menakutkan adalah awan panas.

Dusun di KRB II juga pernah mengalami ancaman langsung erupsi, dan paling tidak ancaman lahar dingin. Jamburejo II di Kemiren Magelang, misalnya, pernah dilanda erupsi pada tahun 1970, dan selanjutnya ancaman lahar dingin, terutama sebelum pemerintah membangun sabo tahun 1980an. Karena adanya erupsi tahun 1970 itu, PEMDA menyatakan Jamburejo II harus ditutup sebagai desa dan pemukiman. Namun demikian, sebagian kecil penduduk bertahan dan enggan meninggalkan desanya untuk ikut program transmigrasi.

Sekalipun termasuk KRB III dan II, penduduk di masing-masing dusun mempunyai konsepsi yang berbeda mengenai kerentanan kampungnya. Mereka merasa bahwa tinggal di lereng Merapi atas memang beresiko terkena erupsi, tetapi mereka bisa selamat kalau bersedia mengungsi. Selain itu, tidak semua wilayah dusun tempat tinggal mereka yang rawan terkena awan panas. Orang di dusun Kinaherjo dan sekitarnya, misalnya, berujar bahwa hanya orang yang tinggal di pinggir sungai yang berpotensi menjadi korban ketika erupsi terjadi. Orang Turgo juga mempunyai pandangan yang sama. Hanya penduduk yang tinggal di pinggir sungai Boyong yang paling rawan, sehingga mereka harus mengungsi lebih dahulu apabila terjadi erupsi.

Sementara itu, orang Bendosari Cangkringan biasanya justru bisa jadi penonton pergerakan erupsi yang masuk ke sungai Kuning setiap kali Merapi meletus. Tindakan itu dilakukan karena mereka merasa tidak pernah terancam

meski berada di pinggir sungai. Hanya pada erupsi Merapi yang besar seperti yang terjadi 2010 mereka merasa terancam dan memutuskan mengungsi.

Dusun di lereng Merapi juga memiliki tingkat kerawanan yang berbeda-beda menurut lokasinya. Orang di wilayah Sleman Yogyakarta merasa dusun-dusunnya relatif aman karena dalam sejarah erupsi, dusun mereka jarang terkena awan panas maupun lahar. Umumnya lahar dan lahar dingin masuk ke wilayah sungai Krasak. Sikap merasa aman itu muncul karena erupsi yang turun ke arah selatan relatif kecil sehingga membuat orang dusun di Sleman agak tenang dan tidak gampang terprovokasi untuk ikut program relokasi atau transmigrasi. Bahkan orang di Turgo dan Kemiri Cilik pun merasa aman karena adanya gunung Turgo dan Plawangan. Secara fisik gunung Turgo dan Plawangan bisa menghalangi luncuran material dari puncak.

Pandangan bahwa dusun aman dari erupsi terdapat juga dalam pikiran orang Kaligentong dan Sambungrejo. Pola bentuk dan arah jurang atau sungai Gendol bukan membujur dari puncak ke timur tetapi belok ke selatan sehingga arus erupsi akan ke selatan daripada ke timur. Oleh karena itu, orang Sambungrejo dan Kaligentong di Klaten merasa aman berada di kampungnya. Sementara itu, orang Sambungrejo yang tinggal berbatasan dengan sungai Gendol pun merasa aman karena adanya bukit kecil yang menjadi tameng luncuran erupsi dari puncak ke bawah.

Orang Merapi di lereng Barat merasa terancam manakala erupsi turun, tetapi mereka mengetahui bahwa erupsi hanya akan menerjang sungai-sungai yang memang menjadi jalur jelajah material Merapi. Dusun yang potensial terkena erupsi adalah yang berada di pinggir sungai Krasak atau Kuning, tetapi material yang turun adalah berupa lahar dingin, sehingga mereka yang tinggal di sepanjang sungai seperti yang tinggal di dusun Cabe Lor dan Jamburejo II pun bisa melakukan evakuasi untuk menghindari erupsi.

Ditinjau dari posisi dusun, dan erupsi yang masuk serta bagian yang terkena erupsi, maka masuk akal kalau Orang Merapi di KRB III tidak serta merta bersedia ditransmigrasikan atau direlokasi. Mereka telah lama beradaptasi dari generasi ke generasi tinggal di kampung yang relatif rawan ancaman bencana.

Sikap mereka bukan membandel tetapi bentuk keyakinannya setelah belajar dari watak Merapi sekalipun ada yang kemudian menjadi korban karena lalai dan mengabaikan nalurinya.

Salah satu cerita yang menggambarkan kedekatan orang Merapi dengan suasana Merapi yang rawan bencana dapat disimak dari kehidupan sehari-hari peternak sapi. Setiap hari pada musim kemarau peternak naik gunung untuk mencari rumput. Mereka sering melewati bukit kecil dan jurang. Kadang peternak mendengar suara erupsi dan bahkan dentuman dari dalam perut Merapi. Tidak ada perasaan takut pada mereka tetapi hanya waspada. Sikap warga berbeda dengan pendatang atau pendaki dari luar yang akan lari terbirit-birit begitu mendengar gemuruh Merapi.

Diskusi tentang lokasi dan kerentanan erupsi Merapi di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya orang Merapi menyadari ancaman bahaya erupsi masif yang memaksa mereka harus mengungsi. Orang Merapi memahami bahwa dusunnya pernah terancam dan atau dilanda bencana, tetapi mereka juga melihat bahwa ancaman itu tidak berlangsung terus-menerus. Periode erupsi yang berkala, membuat orang Merapi merasa tidak harus meninggalkan kampung halaman secara permanen. Sikap mempertahankan kampung halaman itu mengandung muatan ekonomi politik. Hal ini semakin terlihat ketika menyimak sejarah perkembangan dusun.

3.2 Sejarah Perkembangan Dusun

Berdasarkan perkembangan dusun, orang Merapi dapat memberikan petunjuk tentang kepentingan ekonomi politik mereka sampai dengan pengambilan keputusan tinggal di daerah yang dalam kacamata para ahli berada di daerah yang rawan bencana. Pertama-tama sejarah dusun di lereng Merapi menggambarkan adanya ikatan warga dengan tanah tumpah darahnya dan ikatan antar dusun. Pertanyaan pertama adalah sejak kapan kira-kira dusun-dusun di lereng Merapi tumbuh dan berkembang sehingga mempengaruhi pola ekonomi politik orang dusun pada masa kini.

Secara historis Merapi telah menjadi sebuah kawasan pemukiman seiring dengan sejarah peradaban di Jawa. Demikian juga fakta bahwa Merapi selalu aktif sepanjang abad, dan pada waktu yang sama, maka pemukiman itu bukan hilang tetapi terus tumbuh. Memang ada beberapa dusun yang hilang, misalnya Dusun Ngori di Kecamatan Turi Sleman dan Dusun Pencar di Kecamatan Selo karena terterjang erupsi tahun 1960, tetapi penduduk kemudian keluar, ada yang ikut transmigrasi, tetapi ada beberapa puluh warga yang membentuk pemukiman baru di sekitar Ngori yang dianggap aman.

Keberadaan dusun di lereng Merapi nampaknya terekam dalam alam pikiran orang Jawa sebagaimana nampak dalam dunia mitos. Dalam mitos di era kerajaan Hindu misalnya Merapi merupakan sebuah gunung yang sangat penting di Jawa karena dianggap sebagai gunung yang menjaga kestabilan tanah Jawa. Konon pulau Jawa selalu terombang-ambing di samudra sekalipun sudah banyak berdiri gunung yang ditancapkan ke tanah. Oleh para dewa, setelah Merapi dibuat dan ditancapkan, pulau Jawa menjadi stabil. Cerita lain menggambarkan Merapi dipakai sebagai lokasi kerja para empu dalam membuat keris, pusaka yang sangat bernilai dalam budaya Jawa. Dalam memanaskan bahan metal, para empu sakti ini menggunakan panas dari lava Merapi.

Di luar cerita rakyat itu, Merapi sudah dihuni oleh masyarakat Jawa dan masuk dalam lingkaran tradisi besar. Di lereng Merapi berdiri candi-candi tempat para agamawan dan cerdik pandai membangun komunitas intelektual dan religius. Dalam tulisan terbaru disebutkan bahwa Merapi dan Merbabu menjadi lokasi ajar para cerdik pandai pasca masa Hindu dan juga masa Mataram Islam. Sementara itu, dalam cerita rakyat, Merapi menjadi lokasi pelarian para tokoh yang berseberangan dengan penguasa.

Di Turgo misalnya ada tokoh bernama Sheik Jumadil Kubro teman Sultan Agung yang memilih menyepi daripada menjadi bagian dari kekuasaan Mataram atau kerajaan Islam. Pada masa Perang Diponegoro, kampung Turgo ditempati oleh para gerilyawan Pangeran Diponegoro dan di dusun Stabelan bahkan ada makam Kyai Bagor yang menjadi salah satu prajurit Pangeran Diponegoro. Makam ini telah dikeramatkan dan menjadi pepunden dusun.

Karena gunung dianggap suci dalam mitologi Jawa dan lokasinya jauh dari pusat kekuasaan, maka gunung juga menjadi tempat pelarian orang-orang yang berseberangan dengan penguasa. Oleh karena itu, masuk akal kalau gunung kemudian menjadi persembunyian para gerilyawan perang Diponegoro dan para keturunannya.

Mitos tentang asal-usul dusun-dusun di Merapi yang sarat dengan tokoh pahlawan atau orang besar sebagai cikal bakal atau pengayom terus hidup pada masa kini. Orang Merapi mengkramatkan pahlawan-pahlawan budaya tersebut. Bahkan orang Merapi pada masa kini ada yang masih rajin membangun genealogi sejarah leluhurnya. Beberapa cerita muncul, misalnya mengenai warga yang mencari makam yang dianggap leluhur atau pepunden dusun dan setelah ditemukan dipelihara dan dipakai sebagai pijakan asal-usul desanya dijadikan bukti bahwa mereka memiliki sejarah yang baik.

Dengan adanya sejarah yang jelas atas asal-usul leluhur maka hal itu menjadi modal identitas yang penting bagi orang Merapi karena mereka merasa memiliki hak waris atas kampungnya dari generasi tua mereka yang sakti dan bahkan bersejarah dalam masyarakat Jawa seperti tokoh Jumadil Kubro di Turgo dan Sunan atau Kyai Bagor di Stabelan. Oleh karena itu, sekalipun kampung mereka itu dikatakan rawan bencana oleh orang-orang dari luar dan pemerintah, tetapi mereka ini memandang kampungnya tetap layak untuk dibangun sebagai amanah leluhurnya.

Orang Merapi memang tidak mau meninggalkan sejarah. Unit-unit dusun saling berhubungan, terutama yang berdekatan. Setiap pemukiman lama dan baru akan ditandai dengan nama atau cerita yang disampaikan dari generasi ke generasi. Sebagai contoh sebuah dusun mekar menjadi dua, maka akan dibagi menjadi dusun induk dan anakan. Dusun induk, misalnya Turgo Ndeso, sedangkan dusun anakan adalah Turgo Tegal yang lahir karena pemekaran Turgo Ndeso sudah padat. Di Kaliurang juga ada nama dua dusun yaitu Kaliurang Deso dan Kaliurang Tegal, yang pertama dusun induk, sedangkan yang kedua dusun anakan.

Pola perkembangan dusun-dusun di lereng Merapi tercatat dalam studi Handoyo (2005) dan sedikit studi Hudayana (1987) di mana dulu kampung dibangun di bagian atas karena penduduk bisa memiliki lahan yang luas untuk berladang. Mereka berasal dari dusun di bagian bawah, dan mereka berminat untuk mengembangkan pertanian dengan lahan di bagian atas yang relatif luas. Namun karena ada erupsi mereka kemudian turun sehingga Merapi bagian paling atas tidak dihuni tetapi dipakai sebagai tempat mencari rumput. Dulu, misalnya ada kampung Mbangkong di atas dusun Turgo, tetapi kampung ini kemudian tidak dihuni karena penduduknya turun ke wilayah Turgo yang dianggap lebih aman.

Dusun-dusun bertebaran di lereng Merapi seiring dengan pertumbuhan penduduk. Menurut Jan Palte (1980) perkembangan lahan kering di pegunungan terjadi pada abad 19 karena adanya tekanan penduduk atas tanah. Di Merapi, tekanan penduduk atas tanah juga mendorong pertanian di lereng atas meningkat dan diikuti dengan perkembangan pemukiman. Misalnya jika dusun orang yang tinggal di kampung kemudian menempati lahan tegalan sehingga muncul dusun dengan nama “tegal”, misalnya Turgo Tegal, Kaliurang Tegal dan sebagainya.

Perkembangan pemukiman di lereng Merapi itu terjadi sejak abad 19. Hal itu nampak dari munculnya nama-nama dusun yang merupakan pemecahan dari dusun lama. Dusun Klakah misalnya kemudian mekar menjadi Jrasah Atas, Tengah dan Bawah, sedangkan Dusun Babadan juga mekar menjadi Babadan atas dan Bawah.

Pada abad dua puluhan, Merapi menjadi kawasan pedusunan yang sudah mantap terbentuk dengan organisasi desa-desanya. Umumnya desa-desa di Merapi di wilayah Jawa Tengah berukuran kecil, dalam arti hanya terdiri atas satu sampai tiga dusun. Dusun-dusun ini mempunyai ikatan genealogis yang kuat. Di wilayah Yogyakarta, desa memiliki pola yang sama, tetapi pada tahun 1946 Sultan HB X mengeluarkan maklumat yang meminta desa-desa kecil yang terdiri atas 4 unit bergabung menjadi satu sehingga dalam satu desa bisa memiliki 15-18 dusun (Suhartono, 2001).

Kuatnya ikatan genealogis itu menjadi ciri dari dusun di Lereng Merapi dan berpengaruh terhadap pola solidaritas sosial sebagaimana yang akan dibahas

di bagian belakang. Sementara itu, orang Merapi juga memiliki ikatan teritorial yang kuat. Dengan membangun sejarah keberadaan leluhur dan para tokoh sakti yang bersemayam di kampungnya orang Merapi membangun kecintaan dan kepemilikan teritorialnya. Sejarah dusun menjadi penting untuk menunjukkan ke masyarakat luas bahwa mereka mempunyai kewajiban moral untuk menjaga tanah leluhur, dan karena itu tidak selayaknya meninggalkan secara permanen.

3.3 Dusun dalam Pemerintahan Desa

Secara administrasi penduduk kawasan Merapi terbagi dalam empat kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Boyolali, Magelang dan Klaten Propinsi Jawa Tengah. Secara administratif, mereka tinggal di desa yang terbagi ke dalam beberapa dusun. Secara tradisional, orang Merapi lebih suka mengidentifikasi diri sebagai orang dusun. Apabila warga mendapat pertanyaan “Bapak dari mana asalnya?” maka mereka akan menjawab “dari Babadan Bawah” atau “Babadan Atas” atau dari “Trono”. Nama itu merujuk pada dusunnya, kecuali kalau warga secara khusus ditanya dari desa mana mereka berasal, mereka akan menyebut nama desanya.

Di Jawa Tengah, desa-desa memiliki antara dua sampai enam dusun, sehingga tergolong desa kecil, sedangkan di Yogyakarta desa memiliki 15-20 dusun sehingga merupakan desa besar. Perbedaan itu terjadi karena pada tahun 1946 Sultan HB IX mengeluarkan kebijakan penggabungan desa-desa kecil sehingga menjadi desa besar.

Di bawah pemerintahan desa, dusun merupakan suatu unit teritorial yang dipimpin oleh kepala dusun atau bayan. Di Yogyakarta dikenal dengan sebutan kepala dusun, sedangkan di Jawa Tengah disebut bayan. Sesungguhnya kata bayan itu artinya *bebaya* atau bahaya sehingga fungsi kepala dusun pada jaman dahulu adalah menjaga keamanan dari ancaman bahaya. Di Yogyakarta, istilah lama sering juga merujuk *jagabaya* untuk jabatan kepala keagamaan desa artinya menjaga dari ancaman bahaya.

Secara tradisional, kepala dusun memang mempunyai tugas melindungi warganya. Dengan adanya perluasan fungsi dan administrasi pemerintahan, yang

dimulai sejak jaman Belada dan terutama pada masa Orde Baru, tugas kepala dusun membantu kepala desa dalam melakukan pelayanan publik, menarik pajak dan memimpin warganya dalam menyelenggarakan urusan komunitas.

Dusun di dalam desa bisa terdiri atas satu unit pemukiman dengan kepala dusun yang secara langsung memimpin warganya, tetapi juga bisa terdiri atas beberapa unit pemukiman yang disebut *dukuh* sehingga seluruh *dukuh* yang ada disebut *pedukuhan*. Di Yogyakarta misalnya Pedukuhan Turgo terbagi atas dusun Turgo Ndeso, Turgo Tegal, Tritis, dan Mbangkong. Di luar, istilah Turgo dikenal dengan nama Turgo Ndeso, sedangkan di Turgo disebut Turgo saja.

Nama pedukuhan atau *kebayanan* paling tua sering menjadi nama rujukan dan lebih akrab dibanding nama dusun yang dibentuk pemerintah. Untuk alasan ini beberapa wilayah penelitian ini mengambil wilayah pedukuhan atau kebayanan, misalnya, *pedukuhan* Sambungrejo yang lebih terkenal dibandingkan dengan Dusun I Desa Balerante, dan kampung Bendosari dusun Gambretan desa Umbulharjo Cangkringan. *Kebayanan* Ngablak adalah bagian dari dusun II desa Samiran, Panggang Dusun I Desa Panggang Kemalang, Dukuh Jamuran Dusun III Desa Tegalmulyo Kemalang. Penting untuk dicatat, ada perbedaan penyebutan untuk *pedukuhan* dan *kebayanan* ini. Ada warga yang menyebut *pedukuhan* dan *kebayanan* dengan RT atau RW atau kampung. Kesatuan warga paling kecil menurut warga berbeda dengan tingkatan administrasi terendah pemerintah yaitu dusun.

Umumnya kepala dusun dan pejabat pemerintahan tingkat desa adalah penduduk setempat. Sesuai dengan UU 32 tahun 2004, khususnya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, dan Peraturan Daerah yang menindaklanjuti, para kepala dusun itu tidak diangkat oleh kepala desa tetapi dipilih langsung oleh warganya. Namun demikian, khusus untuk wilayah Boyolali dan Klaten, kepala dusun ada yang diangkat oleh PEMDA.

Kepala dusun mempunyai tugas mengurus aktivitas pemerintahan dusun di wilayahnya. Ia menjadi pembantu kepala desa tetapi ruang kerjanya adalah di komunitasnya. Ia bukan hanya membantu pemerintah desa dalam melakukan pelayanan seperti memfasilitasi warga mendapatkan KTP, kartu keluarga dan

perijinan, saksi dalam transaksi pertanahan, saksi dalam urusan pernikahan, dan akses bantuan dari pemerintah seperti raskin, BLT dan lainnya. Dengan posisi sebagai bagian dari pemerintah, kepala dusun bisa menjadi patron warga yang baik, tetapi juga bisa menjadi birokrat yang mengatur warganya.

Kepala dusun juga bertindak sebagai ketua komunitas warga sehingga ia mengurus urusan sosial, misalnya, memimpin warga dalam menyelenggarakan hajatan keluarga, dan menjadi tuan rumah berbagai hajatan kampung seperti *selamatan*, *ruwahan*, bersih dusun dan sebagainya. Dalam menjalankan urusan komunitas itu, kepala dusun dibantu oleh kepala RT/RW di wilayahnya.

Umumnya kepala dusun merupakan kerabat atau keturunan langsung kepala dusun sebelumnya dan merupakan seseorang yang dipercaya warga, akan tetapi ada beberapa kepala dusun, seperti seorang kepala dusun di desa Purbowinangun, yang sibuk dengan aktivitas pribadi sehingga kurang aktif melayani warganya.

Secara administratif, keberadaan RT/RW diakui oleh negara dan PEMDA. RT dan RW dibentuk oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1984, dan keberadaannya menjadi organisasi komunitas terendah di bawah rukun kampung di perkotaan atau dusun di pedesaan. Dengan adanya RT itu maka kepala dusun lebih berfungsi mengkoordinasi seluruh kegiatan di komunitasnya, dan pelaksana lapangan adalah ketua RT atau RW.

Di dusun, pemerintah juga memperkenalkan berbagai organisasi atau lembaga pemerintahan yang fungsinya melayani warga. Di banyak dusun, misalnya terdapat Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD), PKK Desa (organisasi perempuan dibawah kontrol pemerintah), POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu), POSDAYA, juga kelompok tani seperti di Ngablak dan kelompok kerajinan batik di Sambungrejo. Organisasi-organisasi ini berada dalam koordinasi kepala dusun sehingga keberadaan kepala dusun sangat penting dalam melayani berbagai urusan yang luas dalam komunitasnya.

Di dusun-dusun yang masuk wilayah KRB III, organisasi seperti RT, PAUD, dan POSYANDU kurang hidup dan berfungsi. Di Stabelan, Boyolali atau Babadan, Magelang, misalnya, peran kepala dusun lebih efektif dibanding RT.

PAUD, dan Posyandu juga tidak bekerja efektif. Hal ini dikarenakan mereka relatif jauh dari pusat pemerintahan sehingga kurang mendapat pembinaan dari dinas pendidikan atau kesehatan.

Sejalan dengan agenda penanggulangan bencana, di dusun-dusun juga terdapat LINMAS (Perlindungan Masyarakat) yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban warga, dan beberapa dusun ada yang sudah memiliki Tim SAR. Lembaga ini berada dibawah lini organisasi di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Bila disimak lebih seksama, tampaknya organisasi SAR lebih hidup di daerah KRB III daripada KRB II dan I. Hal ini karena daerah KRB II secara nyata pernah mengalami ancaman, bahkan pernah dilanda bencana. Misalnya di dusun Turgo, LINMAS dan SAR sudah terbentuk dan bekerja efektif dalam bencana 2010, tetapi di Dusun Kemiri Cilik, SAR tidak berjalan. Walaupun demikian, seluruh anggota LINMAS berfungsi menjadi SAR ketika bencana erupsi 2010 berlangsung.

Seluruh organisasi sosial di tingkat komunitas itu bisa melakukan kerjasama dalam rangka menghadapi bencana, khususnya ketika masa tanggap darurat. Mereka bisa berkoordinasi dan bekerja di bawah tim SAR di tingkat dusun melakukan upaya evakuasi serta bekerja sama dengan pihak luar seperti pemerintah desa, LSM, terutama PASAG Merapi dan SIBAT Merapi. Peran organisasi sosial dalam masa erupsi itu akan dibahas dalam bab berikut.

3.4 Demografi

3.4.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Gambaran distribusi dan jumlah penduduk di kawasan lingkaran Merapi bisa dilihat pada peta jumlah penduduk gunung Merapi yang dikeluarkan BNPB yang bersumber pada PODES 2008. Menurut wilayah KRB, total penduduk yang tinggal di seluruh wilayah KRB ini berjumlah sekitar 94.225 jiwa.

Jumlah penduduk 30 dusun yang menjadi lokasi penelitian pasca erupsi Merapi berjumlah 17.798 jiwa yang terdiri dari 1.897 KK atau sekitar sembilan

persen jumlah penduduk yang tinggal di KRB Merapi 2010. Secara umum penduduk Merapi tergolong usia muda (15 sampai 30 tahun). Pada situasi normal, penduduk Merapi juga memiliki angka harapan hidup yang tinggi dengan rasio manula (usia di atas 65 tahun) yang tinggi dibandingkan dengan total penduduk dusun .

Sebaran penduduk di wilayah KRB Merapi tersebar dalam sektor-sektor yaitu 51.228 jiwa menempati sektor Selatan, 40.209 jiwa di sektor Barat, 1419 di sektor Utara dan 1.369 di sektor Timur (Kepala BPPT Kegununganapi Syamsu Rizal 2001 melalui Petrasa Wacana 2011). Adapun sebaran penduduk di lokasi penelitian disajikan pada tabel 3.2.

Gambar 3.1



Sumber: BNPB

Karena sampel yang diambil tidak proporsional, maka distribusi penduduk yang disajikan dalam tabel 3.2. hanya memberikan gambaran deskriptif sederhana. Nampak bahwa sebagian besar penduduk yang diobservasi dalam penelitian ini berada di KRB III dan KRB II. Informasi ini memberikan gambaran bahwa yang diperhatikan dalam studi ini terutama adalah penduduk lereng Merapi bukan daerah dataran rendah (*ngarai*) atau kaki Merapi bawah.

Dari sebaran KK di atas menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk terbanyak terletak di KRB II. Jumlah KK di KRB I menunjukkan angka yang kecil karena hanya dua dusun KRB I yang menjadi lokasi penelitian, yaitu dusun Pakisaji, Candibinangun, Pakem, Sleman dan dusun Sempu, Wonokerto, Turi Sleman. Dusun dengan kepadatan penduduk terbesar adalah dusun Sempu dan

Candi Morangan, Ngemplak, Sleman dengan kepadatan pada kisaran 4.000 orang per kilometer persegi, sedang dusun dengan kepadatan terendah adalah dusun Jamburejo II Srumbung, Magelang yang hanya memiliki kepadatan penduduk 179 orang per kilometer persegi. Angka kepadatan ini diperoleh setelah erupsi terjadi. Tidak ada perubahan angka kepadatan yang berarti pra dan pasca erupsi, kecuali dusun Kinahrejo dan Bronggang karena korban erupsi Merapi 2010 terbanyak berasal dari dua dusun ini yaitu masing-masing 34 dan 40 korban jiwa.

Tabel 3.2.
Distribusi Penduduk di Lereng Merapi Menurut KRB Tahun 2011

Nama kabupaten	KRB I	KRB II	KRB III
Sleman	1.366	2.701	2.583
Magelang	-	1.019	1.985
Boyolali	-	2.053	2.349
Klaten	-	-	5.905
Total	1.366	5.773	12.822

Sumber: Data primer 2011

Dilihat dari angka kepadatan penduduk, meski Merapi seringkali erupsi, tidak berarti penduduk di wilayah yang paling rawan terkena dampak erupsi menjadi jauh lebih sedikit dibanding dengan penduduk dusun-dusun di wilayah yang lebih aman. Pada tabel 2.3 tampak bahwa kepadatan penduduk dusun bervariasi menurut kabupaten. Di Sleman, kepadatan penduduk dusun di KRB III mencapai sekitar 716 jiwa, sedangkan di KRB II 1.354 jiwa dan KRB I 2.930 jiwa per kilometer persegi. Dengan demikian, semakin ke puncak kepadatan penduduknya semakin rendah. Adapun di Magelang, kepadatan penduduk di KRB III lebih tinggi daripada di KRB II. Hal ini karena pemerintah telah memasukkan dusun-dusun di Magelang di lereng bawah yang sebenarnya bisa masuk KRB II kemudian masuk ke dalam kategori KRB III. Adapun kepadatan penduduk dusun di Boyolali dan Klaten, pola kepadatan penduduk mirip dengan di Yogyakarta.

Dari sisi kepadatan penduduk, secara empirik sebenarnya orang Jawa sudah menghitung resiko. Semakin ke puncak, maka semakin tinggi resikonya sehingga dusun di puncak kurang padat dibandingkan di bagian bawah. Di

Magelang, dusun padat tetapi karena hampir semua dusun di Magelang berada di pinggir sungai Krasak, dan Putih, maka dimasukkan ke wilayah KRB.

Dengan kepadatan penduduk yang rendah orang Merapi di wilayah puncak dipastikan memiliki sumberdaya tanah yang relatif lebih luas daripada orang Merapi di wilayah bawah. Mereka bisa menguasai tanah yang relatif luas. Di Turgo misalnya petani bisa memiliki tanah tegal tidak kurang dari 0.5 hektar per KK, sedangkan di Jrasah tidak kurang dari 0.3 hektar per KK. Selain sumberdaya alam yang berupa tanah *tegalan*, orang Merapi di puncak memiliki lahan yang termasuk dalam kategori komunal yang biasanya berupa lahan rumput alang-alang dan jurang yang memiliki deposit pasir.

Tabel 3.3.
Distribusi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Lereng Merapi Menurut KRB Tahun 2011

Nama kabupaten	KRB I	KRB II	KRB III
Sleman	2.930	1.354	716
Magelang	NA	566	1.062
Boyolali	NA	2.955	728
Klaten	NA	NA	337
Total Kepadatan Penduduk di Setiap KRB	2.930	1.625	710

Sumber: Data Primer 2011

3.4.2 Penduduk Menurut Pekerjaan

Sebagian besar penduduk Merapi bekerja di sektor pertanian (usaha tani dan peternakan atau kedua-duanya). Bila disimak lebih rinci nampak bahwa semakin ke bawah, semakin jumlah dan persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian berkurang tetapi yang bekerja di sektor *non-farm* semakin banyak. Tabel 3.4 memberikan gambaran yang rinci di setiap kabupaten. Nampak misalnya di Sleman, penduduk dusun di KRB III yang bekerja di pertanian mencapai 796 orang, sedangkan di *non-farm* 524 orang, tetapi di KRB II yang bekerja di sektor *farm* lebih rendah, dan di KRB I lebih tinggi karena studi ini mengambil wilayah Pakisaji yang secara tipikal merupakan daerah pertanian sawah padi.

Khusus untuk dusun di Jawa Tengah, nampaknya perkembangan *non-farm* belum sepesat di Yogyakarta sehingga penduduk yang bekerja di sektor ini tidak begitu menonjol. Di Magelang misalnya, penduduk di KRB II masih terkonsentrasi di sektor pertanian. Oleh karena itu, sesungguhnya Merapi lebih berarti bagi penduduk di wilayah Magelang, Klaten dan Boyolali karena umumnya mereka bekerja di sektor pertanian sekalipun lokasi dusun berada di wilayah KRB II.

Tabel 3.4
Distribusi Pekerjaan Penduduk di Kabupaten Lereng Merapi Menurut KRB Tahun 2010

Nama kabupaten	KRB III		KRB II		KRB I	
	Farm	Non-Farm	Farm	Non-Farm	Farm	Non-Farm
Sleman	796	524	791	938	538	223
Magelang	985	158	608	33	-	-
Boyolali	1539	156	799	544	-	-
Klaten	2750	161	-	-	-	-
Total	6.070	999	2.198	1.515	538	223
TOTAL FARM DAN NON FARM	7.069		3.713		761	

Sumber: Data Primer 2010

Observasi di lapangan juga menunjukkan betapa pentingnya sektor pertanian bagi orang dusun di Magelang, Boyolali dan Klaten daripada penduduk di Sleman. Tidak ada aktivitas *non-farm* di desa kecuali perdagangan hasil bumi dan kios-kios yang menjanjakan bahan kelontong. Adapun aktivitas *non-farm* yang menonjol adalah penggalian pasir, dan dari penggalian pasir ini muncul warung-warung kecil yang menjajakan makanan kepada penambang.

Ekologi Merapi telah berdampak terhadap sumber penghidupan penduduk. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor *farm*, jenis usaha di sektor ini dipengaruhi oleh dinamika erupsi, iklim, kemiringan tanah dan banyak-sedikitnya deposit pasir dan batu di lahan dan jurang. Seperti yang akan dibahas lebih mendalam di bab-bab selanjutnya, erupsi Merapi yang terjadi secara berkala telah membuat kawasan Merapi lereng atas menjadi jalur peluncuran lava dan awan panas. Di bagian atas ini tanah dikosongkan dan menjadi tempat tanaman liar,

khususnya rumput alang-alang tumbuh subur. Oleh karena itu, petani lahan atas memilih profesi sebagai petani dan peternak karena ibaratnya mereka memperoleh deposit alang-alang dan rumput liar secara gratis.

Kondisi iklim yang sejuk dan relatif dingin di bagian puncak juga memberikan kontribusi bagi warga untuk bercocok tanam sayur. Petani di Magelang dan Boyolali memilih usaha pertanian sayur karena didukung iklim dan tekanan penduduk atas tanah. Mereka tidak lagi menanam jagung sebagai tanaman pokok. Sementara itu, orang Klaten mempertahankan komoditas tembakau karena tanaman ini bisa hidup baik di lahan Merapi yang kurang subur.

Orang Merapi juga memiliki sumber penghidupan dari usaha penggalian pasir dan batu. Setiap kali erupsi, Merapi sepertinya memberikan berkah bagi penduduknya. Deposit pasir yang turun di jurang bisa menjadi sumber penghidupan sebagian kecil penduduk terutama yang tidak memiliki tanah yang cukup untuk hidup atau memiliki ternak. Bahkan hampir setiap tanah di Merapi memiliki deposit pasir yang sewaktu-waktu bisa dijual kalau terpaksa harus dilakukan demi menjamin keamanan subsistensi. Di Kaligentong, Sambungrejo, dan Candi Morangan misalnya petani bisa menggali pasir di kebunnya dengan cara tanah dibalik dan diambil pasirnya. Pengambilan pasir bisa dilakukan petani sendiri dan kemudian menghubungi pembeli, atau ditebaskan. Meskipun merusak kontur tanah, tetapi penambangan dilakukan guna mengatasi kesulitan ekonomi pada masa pasca-erupsi.

3.4.4 Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di lereng Merapi relatif rendah, tetapi jika dibandingkan dengan penduduk di pedesaan terpencil di Indonesia relatif lebih tinggi. Umumnya penduduk tamat SD, sedangkan di Sleman cukup banyak yang tamat SLTP. Beberapa komunitas nampaknya memiliki perhatian terhadap pendidikan. Di Trono, misalnya penduduk memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi. Umumnya tamat SLTP dan banyak yang tamat SLTA. Bahkan ada beberapa orang yang tamat perguruan tinggi.

Kemajuan pendidikan di lereng Merapi terasa meningkat sejak reformasi bergulir. Seiring dengan adanya pembangunan jalan aspal ke dusun-dusun, anak-anak bisa pergi ke sekolah dengan sepeda motor ke ibukota kecamatan. Mereka tidak perlu berjalan kaki lagi yang dulu menjadi penghalang anak-anak melanjutkan studi ke SLTP dan SMA.

Tabel.3.5.
Distribusi Penduduk Dusun Di Lereng Merapi di Tiga KRB Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011

TINGKAT PENDIDIKAN	Sleman		Magelang		Boyolali		Klaten	
	KRB III	KRB II dan I	KRB III	KRB II dan I	KRB III	KRB II dan I	KRB III	KRB II dan I
Tidak Pernah Sekolah	131	189	346	144	88	215	1044	-
Tidak tamat SD	138	82	7	8	143	4	190	-
Tamat SD	593	786	587	598	383	819	2901	-
Tidak Tamat SMP/MTs	52	41	6	4	25	99	1	-
Tamat SMP/MTs	280	401	266	63	48	323	561	-
Tidak Tamat SMU/SMK/MA	16	14	4	0	0	123	0	-
Tamat SMU/SMK/MA	543	836	151	37	19	79	322	-
Tidak Tamat DI/DII	0	1	0	0	0		0	-
Tamat DI/DII	4	19	1	0	4	14	5	-
Tidak Tamat DIII	0	0	0	0	0		0	-
Tamat DIII	16	70	3	0	3	1	8	-
Tidak Tamat Perguruan Tinggi	0	2	2	1	2		0	-
Tamat Perguruan Tinggi	45	96	4	0	9	11	11	-
TOTAL	1818	2537	1377	855	724	1688	5043	-
TOTAL PER KABUPATEN	4355		2232		2412		5043	

Sumber: Data Primer 2011

3.4.5 Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Sebagian besar penduduk subyek penelitian beragama Islam. Walaupun demikian secara tipikal penduduk di lereng Merapi lebih pluralis. Hal ini karena

ada beberapa dusun yang penduduknya menganut agama yang relatif beragam dengan komposisi non-muslim cukup banyak. Katolik dan Protestan yang cukup tinggi (Kaligentong-Klaten, Sempu, Gondoarum, Turgo Tegal-Sleman, Grogol-Magelang, dan Klakah Tengah-Boyolali). Jumlah penghayat kepercayaan tercatat hanya di dusun Grogol-Magelang.

Di tingkat dusun keberagaman agama melahirkan toleransi antar umat beragama, bukan permusuhan. Orang Turgo, misalnya terbagi ke dalam dua kelompok besar yaitu Islam, Katholik dan disusul protestan. Komposisi agama yang beragam nampaknya tidak hanya nampak pada tingkat desa tetapi juga pada tingkat kelaurga. Di Turgo, misalnya, sebuah keluarga bisa memiliki anggota yang berbeda agama.

Tabel 3.6
Penduduk Dusun di Lereng Merapi di Tiga KRB Menurut Tingkat Pendidikan

Nama Kabupaten	Sleman		Klaten		Magelang		Boyolali	
	KRB III	KRB I dan II	KRB III	KRB I dan II	KRB III	KRB I dan II	KRB III	KRB I dan II
Islam	2262	3370	5732	-	2102	883	1713	2071
Protestan	3	10	5	-	0	17	24	0
Katolik	194	249	170	-	7	159	0	0
Hindu	0	0	2	-	0	0	0	0
Budha	0	0	0	-	0	0	0	0
Kepercayaan	1	0	2	-	0	20	0	0
Total	2460	3629	5911	-	2109	1079	1737	2071
TOTAL PER KABUPATEN	6089		5911		3188		3808	

Sumber: Data Primer 2011

Pluralitas agama juga nampak di Dusun Grogol Magelang. Penduduk terdiri atas penganut agama Katholik, dan Islam. Di kalangan umat Islam terbagi menjadi kelompok Muhammadiyah dan NU dan kelompok NU merupakan golongan mayoritas yang mewarnai tradisi keagamaan di desa. Sementara itu, ada juga golongan aliran kebatinan “*memayu-hayuning bawana*” yang dianut oleh beberapa puluh keluarga. Mereka ini memiliki sanggar ibadah yang diakui dan dilindungi oleh masyarakat setempat. Di lereng Merapi, kelompok kebatinan tidak

memiliki identitas resmi dalam KTP, tetapi mereka ini sering memakai KTP dengan identitas Islam.

Keberagaman agama menjadi ciri dan kekuatan sosial budaya orang Merapi. Mereka menjadikan agama sebagai sarana membangun persaudaraan dengan masyarakat luar tanpa harus menghancurkan ikatan komunitas dan keluarga yang kuat. Mereka menjadi Muslim karena iman dan didekati oleh umat Muslim dari luar, dan persaudaraan dengan umat muslim dari luar menjadi penting untuk menambah kawan. Sebaliknya, orang Merapi juga menerima Katholik, Kristen atau aliran kepercayaan karena di samping dapat mengimani agama ini, mereka akan mendapatkan kawan yang banyak dari luar.

Di Merapi, ekspresi keagamaan bukan nampak secara menonjol pada ritual agama besarnya tetapi pada tradisi Jawa yang mengedepankan praktik *selamatan* (Koentjaraningrat, 1985). Dengan kata lain, kesibukan orang Merapi di masjid, mushola, atau kapel tidak begitu nampak menonjol meski setiap hari orang berkunjung ke masjid dan melakukan pengajian secara rutin. Namun demikian, ritual selamatan sebagai tradisi agama di kalangan orang Jawa lebih menonjol. Selamatan ini bisa dalam bentuk ritual dengan menyediakan tumpengan atau membaca dan merapal doa-doa *tadarusan*. Ritual ini lazim dilakukan di rumah-rumah, daripada di masjid-masjid. Orang lebih suka melakukan kegiatan ini secara rutin dengan saling berkunjung ke rumah teman atau saudara daripada memusatkan kegiatan di masjid atau mushola. Mereka baru menggunakan masjid kalau menyelenggarakan peringatan hari besar Islam misalnya Maulid Nabi Muhammad, dan peringatan hari raya Haji.

Kegiatan ritual keagamaan yang menonjol secara Islami atau Kristiani dengan mengambil pusat kegiatan di masjid atau gerejanya pada hari suci agama ini, misalnya Islam pada hari Jumat dan Katholik atau Protestan pada hari Minggu. Adapun kegiatan ritual Kristiani juga dilakukan di luar dusun atau desa. Misalnya orang Kristiani di Turgo, Kemiri Cilik atau di Kinahrejo pergi ke Pakem untuk beribadah di gerejanya.

3.5 Infrastruktur Dusun

Dusun sebagai suatu pemukiman dan sumber penghidupan bagi warganya memiliki infrastruktur yang hampir seluruhnya dibangun oleh warga dengan menggunakan kekuatan mereka dalam bentuk dana swadaya dan gotong royong. Infrastruktur di dusun meliputi infrastruktur pemukiman seperti rumah, MCK, listrik, pos ronda, infrastruktur sosial seperti PAUD, masjid, mushola dan gereja atau kapel (pepantan), dan infrastruktur ekonomi seperti pasar, warung, kandang kelompok dan pos penampungan susu.

3.5.1 Rumah dan Listrik

Rumah orang di lereng Merapi dibangun dengan memanfaatkan sumberdaya lokal terutama batu dan pasir serta kayu yang diambil dari kebun mereka, terutama kayu nangka. Keluarga miskin biasanya membangun rumahnya dengan bahan bambu dan bahan ini hampir sepenuhnya diambilkan dari kebun miliknya.

Ada pola yang tipikal antar letak rumah-rumah di dusun yang masuk wilayah Yogyakarta dan Jawa tengah. Di DIY, rumah-rumah tersebar di pekarangan-pekarangan yang merupakan kebun milik masing-masing keluarga sehingga terkesan rumah-rumah saling terpencar. Hanya karena kepadatan penduduk, maka rumah-rumah itu kemudian saling berdekatan, tetapi tidak berhimpitan. Sebaliknya, di wilayah Jawa Tengah, lokasi pekarangan antar rumah berhimpitan sehingga membentuk satu pemukiman yang padat. Hampir tidak ada jalan gang antar rumah-rumah, dan karena sempitnya tanah pekarangan maka rumah-rumah tersebut pun berukuran relatif kecil.

Perbedaan pola pengelompokan rumah di dusun Yogyakarta dan Jawa tengah merupakan fenomena yang memiliki penjelasan yang berbeda. Di Jawa Tengah, penduduk tinggal jauh dari sungai atau sumber air dan mereka secara bersama-sama mencari air dari mata air yang sama kemudian dialirkan ke tengah pemukiman. Adapun di Yogyakarta, warga bukan mengalirkan air dari luar ke kampung, tetapi warga pergi ke sungai untuk membawa air dan dibawa pulang ke rumah masing-masing. Jika enggan mencari air, keluarga-keluarga biasanya menampung air hujan.

Kecenderungan orang Yogyakarta tinggal terpencar dimungkinkan oleh adanya sistem kepemilikan tanah pada masa kerajaan, yaitu semua tanah merupakan milik raja dan warga hanya memiliki status sebagai penggaduh. *Land reform* 1918 memberikan hak kepada warga untuk memiliki secara penuh (Soemardjan, 1985). Warga kemudian mendapatkan persil-persil tanah kebun, dan mereka ini kemudian membangun rumah di kebun tersebut sehingga rumah mereka saling berjauhan.

Secara tradisional rumah-rumah dibangun dengan menggunakan mode atau gaya rumah kampung atau limasan, sedangkan yang kaya dan menjadi pemimpin sering memakai model Joglo atau rumah tembok. Rumah difungsikan sebagai tempat tinggal dan ruang pertemuan keluarga dan sanak saudaranya serta menyimpan dan mengolah hasil bumi. Rumah dilengkapi dengan kandang sapi atau kambing, ayam atau unggas. Sebagian ruang dalam rumah dipakai sebagai gudang, dan khusus di bagian atap dapur dibangun *pogo* atau *para* yaitu tempat menyimpan jagung. Selain itu, secara tipikal rumah-rumah di lereng Merapi khususnya yang berada di Yogyakarta menyebar, dan memiliki pekarangan yang luas yang dipakai untuk halaman rumah yang berfungsi sebagai tempat menjemur pakaian dan hasil bumi.

Secara tradisi, penduduk lereng Merapi membangun rumah dengan bergotong-royong. Sebelum diadakan gotong-royong pembangunan rumah, sang pemilik hajat akan mengadakan selamatan dan mengundang warga untuk ikut berdoa dan memberkatinya. Pada saat itulah, *sambatan* rumah diumumkan. Tiap rumah akan mengirim seseorang untuk membantu tetangga yang sedang membangun atau memperbaiki rumah. Para ibu juga membantu dengan membantu menyediakan makanan dan minuman para pria.

Belakangan ini, karena merosotnya tradisi gotong-royong sebagai dampak dari komersialisasi ekonomi, umumnya rumah dibangun dengan menggunakan tenaga upahan. Walaupun demikian, masyarakat pada dasarnya masih memiliki tradisi gotong royong yang relatif kuat. Tenaga gotong-royong terutama dipakai untuk mengangkut material dari jalan ke pekarangan atau lokasi pembangunan rumah, dan pemasangan genting rumah.

Rumah-rumah di Merapi juga sudah memiliki penerangan listrik, yang kebanyakan pemasangan instalasinya berlangsung sejak tahun 1990an. Beberapa dusun terpaksa harus menggalang dana swadaya murni agar mereka bisa memiliki sarana listrik dengan iuran untuk membeli tiang listrik karena pihak PLN keberatan membiayai mengingat lokasinya agak jauh dari jalan raya.

Penduduk memang sangat antusias untuk memiliki listrik. Mereka mencari jalan keluar agar bisa memasang listrik yang biayanya bisa mencapai Rp 250.000,00 pada tahun 1990an. Orang Turgo menjadi contoh nyata bahwa mereka bisa memasang listrik. Pada tahun 1995 mereka bergotong-royong membangun jalan dari dusun ke jurang Boyong. Setelah jalan bisa terbangun maka warga bisa melakukan penambangan pasir dan setiap truk yang masuk dikenakan retribusi sebesar Rp 3.000,00 per unit. Dalam satu hari dusun bisa memperoleh pemasukan sebesar Rp 3.000,00 ribu per truk, dan dalam satu tahun dusun bisa memperoleh anggaran tidak kurang dari Rp 80.000.000,00 yang bisa dipakai untuk pembangunan instalasi listrik dan MCK.

3.5.2 Jalan

Semua dusun-dusun lokasi penelitian bisa dijangkau dengan kendaraan bermotor, bahkan sampai ke wilayah-wilayah KRB III dan berjarak kurang dari 4 kilo dari puncak Merapi. Masyarakat Merapi memang sangat berkepentingan membangun jalan dan mereka berani mengeluarkan swadaya dan tenaga gotong-royong yang besar di tengah mereka sebenarnya sangat mengharapkan adanya bantuan penuh dari pemerintah. Apa yang terjadi adalah adanya dana dari pemerintah amat rendah, sehingga merekalah yang dapat dikatakan membiayai seluruh ongkos pembangunan jalan.

Ada dua macam jalan di wilayah KRB, yaitu jalan aspal dan jalan konblok atau cor. Pada mulanya jalan berupa jalan tanam tetapi PEMDA memberikan bantuan stimulan swadaya dan gotong royong. Stimulan itu berupa aspal atau semen. Warga kemudian mengeluarkan dana swadaya dan gotong royong untuk menambah aspal atau semen dan terutama untuk menyediakan batu, kerikil dan pasir.

Pembangunan jalan aspal atau konblok di lereng Merapi berlangsung pada masa reformasi. Hal ini karena pada masa reformasi warga bisa lebih bebas untuk merancang pembangunan, dan berani mengajukan proposal ke PEMDA. Adapun dampak dari desentralisasi adalah munculnya inisiatif PEMDA untuk memperoleh kepercayaan dengan mencanangkan program yang lebih populis di akar rumput.

Orang Kemiri Cilik misalnya, sudah lama mempunyai niat untuk membangun kampungnya tetapi baru tahun 1998 mereka bisa mewujudkan niatnya setelah PEMDA mengeluarkan kebijakan mengizinkan warga untuk mengaspal jalan desa. Warga lalu mengajukan proposal ke PEMDA agar dusunnya mendapat bantuan aspal dan dari sejumlah 20 drum aspal warga lalu bergotong royong siang dan malam mencari batu, pasir dan kerikil di Sungai Boyong. Kerja keras warga berbuah karena jalan kemudian teraspal sepanjang kurang lebih satu km dengan lebar sekitar tiga meter. Sementara itu, orang Kaligentong baru mempunyai jalan cor semen sekitar tiga tahun yang lalu. Hal ini karena warga sudah memiliki dana swadaya yang memdai dan pemerintah Kabupaten Klaten juga mengeluarkan kebijakan program bantuan swadaya masyarakat dan gotong royong. Bukan hanya jalan utama di dusun, jalan-jalan antar gang juga berhasil di konblok oleh warga dengan dana swadaya murni.

Program PNPM mandiri juga ikut menunjang agenda orang Merapi untuk memiliki jalan aspal atau konblok. Beberapa dusun seperti dusun Jrasah satu tahun terakhir ini sibuk membangun jalan konblok di dusunnya. Memang ada jalan aspal yang menghubungkan Jrasah dengan jalan raya Magelang-Boyolali, tetapi di dalam pemukiman dusun mereka belum ada jalan aspal atau konblok. PEMDA dan desa mendukung program PNPM mandiri untuk pembangunan jalan, tetapi Jrasah baru mendapat jatah bantuan pada tahun 2011.

Pembangunan jalan dengan mengandalkan pada swadaya dan gotong-royong berimbas pada kuatnya perasaan memiliki atas infrastruktur dusun. Warga sangat berkepentingan untuk menjaga jalan jangan sampai rusak. Kalau ada kerusakan mereka mencari solusinya. Salah satu contoh adalah warga mengeluarkan dana retribusi terhadap setiap truk yang keluar masuk mengangkut barang atau pasir dan batu. Retribusi ini dipakai untuk dana pemeliharaan jalan dan infrastruktur lainnya.

3.5.3 Air Bersih dan MCK

Air merupakan sumber daya yang langka di lereng Merapi, khususnya di KRB III. Orang Merapi selalu menghadapi ketidakstabilan sumberdaya air karena setiap kali erupsi, maka kemungkinan besar sumber mata air rusak, berpindah atau berkurang debit airnya.

Biasanya kampung-kampung dibangun oleh orang Merapi di lokasi yang tidak jauh dari sumber mata air tetapi tidak dekat sekali karena sumber itu berada di lokasi yang agak rawan dari erupsi khususnya banjir lahar dingin. Infrastruktur di wilayah lokasi penelitian terutama yang berupa jalan dan saluran air secara kuantitatif lebih banyak dilakukan oleh warga.

Pada tahun 1970an sampai dengan 1980an, muncul inisiatif dari LSM Dian Desa untuk memfasilitasi warga dalam membangun pipa saluran air bersih dari sumber mata air ke kampung dan membangun MCK di setiap unit pemukiman. Program itu, misalnya, mengambil lokasi di daerah Kinahrejo. Program itu membuat warga tidak perlu mencari air ke jurang, tetapi cukup di MCK kampungnya. Apresiasi warga sangat tinggi sehingga nama Dian Desa pun menjadi buah bibir di desa.

Setelah Dian Desa, muncul inisiatif lokal untuk membuat pipa saluran air bersih dari mata air ke kampung. Warga mengeluarkan dana swadaya dan gotong royong. Orang Ngepring dan Kemiri Cilik, melakukan pembangunan saluran air dengan cara swadaya. Bahkan beberapa kampung bisa membuat saluran air secara lebih merata ke rumah-rumah warga. Di Jamburejo II, misalnya warga membuat saluran air dari sumber mata air ke bak penampungan pertama, keluarga-keluarga lalu membuat saluran ke rumah masing-masing dengan dana sendiri dan gotong-royong.

Di beberapa dusun yang tidak memiliki sumber mata air dan sungai, warga mengembangkan bak penampungan air hujan. Kekurangan air hujan lalu diatasi dengan mencari air di sungai-sungai yang bisa dijangkau. Sementara itu, keluarga-keluarga yang cukup mampu membeli air bersih dari luar yang dijajakan oleh pedagang.

Di dusun KRB II, air relatif memadai karena adanya sumber mata air yang ada dusun. Oleh karena itu, warga sudah terbiasa membangun saluran air dengan pipa pralon ke rumah masing-masing. Di beberapa dusun, air bersih bahkan cukup melimpah, khususnya pada musim hujan sehingga dipakai untuk mengairi kolam ikan. Selain air bersih, orang Merapi juga berupaya memiliki MCK di kampungnya. Umumnya MCK dibangun relatif sederhana dan dalam satu unit RT disediakan satu unit MCK. Akan tetapi ketika air melimpah warga pun membangun MCK di rumah untuk keluarganya masing-masing.

3.5.4 Sarana Ibadah

Setiap dusun, kecuali Candi Pos dan Kaligentong miliki sarana ibadah, berupa mushola. Khusus untuk Dusun Grogol memiliki gereja karena dusun ini menjadi salah satu pusat kegiatan ibadah umat Katholik di Kecamatan Talun. Semua sarana ibadah dibangun atas dana swadaya, dan gotong-royong. Bangunan didirikan secara bertahap sesuai dengan dana yang terkumpul. Sejak 10 tahun terakhir ini warga mempunyai akses untuk mendapatkan bantuan dari luar, seperti dari PEMDA, ormas, partai politik dan dermawan. Hal itu mendorong sebagian dari orang Merapi kemudian memanfaatkan dana bantuan tersebut. Bahkan tanpa meminta bantuan, para agen dari luar, terutama ormas menawarkan bantuan fisik, misalnya, masjid atau sarana air bersih. Bantuan mengalir terutama pada masa erupsi dan para penyumbang mudah sekali tertarik untuk memberikan dananya bagi pembangunan tempat ibadah.

Masuknya sarana ibadah dari luar juga menggambarkan tentang adanya politik warga untuk menancapkan eksistensi desanya dalam wilayah Merapi yang rentan menghadapi bencana. Dengan berdiri bangunan masjid atau tempat ibadah di dusun, maka secara tidak langsung keberadaan orang Merapi, di dusunnya yang dianggap rawan bencana telah diakui publik. Dengan adanya dusun tempat ibadah maka status lokasi dusunnya menjadi sah atau resmi sehingga tidak perlu dipersoalkan oleh semua pihak. Karena itu, mereka bisa menerima adanya bantuan gedung masjid atau mushola sekalipun dalam kenyataannya tidak digunakan secara optimal seperti masjid di daerah *ngarai*.

Dengan adanya bantuan dari luar, maka tidak mengherankan bahwa selama 10 tahun terakhir ini beberapa dusun memiliki bangunan masjid atau mushola baru yang relatif megah. Salah satu contoh adalah masjid di Kinahrejo yang nampak megah di kejauhan. Masjid ini bukan buatan dan inisiatif warga tetapi para agamawan yang mempersepsikan warga sangat membutuhkan masjid. Kini masjid itu rusak berat karena terterjang awan panas.

3.6 Rangkuman

Secara visual dan fisik, dusun-dusun di lereng Merapi pada masa kini merupakan komunitas yang sudah mapan karena memiliki sarana pemukiman dan sumber penghidupan bagi warganya. Dusun menjadi unit komunitas yang berdaptasi dengan kawasan rawan bencana sehingga warga dusun pun berani mengambil habitat di bagian atas yang sekarang disebut KRB III.

Adaptibilitas warga terhadap Merapi dilakukan terus-menerus tetapi menunjukkan adanya suatu pola yang relatif stabil. Pertama, orang Merapi menempati lokasi yang tidak terlalu jauh dari sumber mata air tetapi juga tidak dekat dengan sumber mata air yang dekat dari daerah yang rawan bencana. Mereka berada di posisi tengah sekalipun harus mencari air dari sumber atau sungai. Kedua, mereka membangun nafkah dari sumber daya alam yang tersedia dan dikondisikan oleh iklim, dan erupsi. Ketiga, mereka membangun infrastruktur komunitas agar menjadi komunitas yang sejahtera dan mandiri dengan mengandalkan kekuatan swadaya daripada bergantung pada bantuan dari luar.

BAB IV

ADAPTASI EKOLOGI DAN EKONOMI

4.1 Pendahuluan

Bab ini akan menggambarkan secara tematis berbagai basis dan dinamika adaptasi ekologi dan ekonomi orang Merapi. Umumnya basis adaptasi orang Merapi bergantung pada sektor primer yaitu pertanian, peternakan dan pertambangan. Pertanian itu secara umum merupakan pertanian multikroping di lahan kering (tegalan) dataran tinggi (*upland*). Sebagian kecil penduduk lereng Merapi bercocoktanam di sawah, terutama sawah padi, yaitu mereka yang kebanyakan tinggal di wilayah KRB I. Akan tetapi, dalam pandangan orang lereng Merapi, wilayah KRB I yang berada sekitar 15-20 Km dari puncak Merapi sudah bukan wilayah Merapi. Sebaliknya, orang di KRB I juga enggan mengidentifikasi diri sebagai orang Merapi. Mereka juga memiliki basis ekonomi yang berbeda yaitu terutama pada usaha tani sawah padi dan masuk ke dalam sektor *nonfarm*. Mengingat secara ekologis wilayah KRB I berada di luar ekosistem pertanian di dalam wilayah Merapi, maka diskusi adaptasi ekologi dan ekonomi di sini akan difokuskan pada pertanian lahan kering, atau pertanian yang berada di wilayah KRB III dan KRB II yang berada di lereng atas.

Selama 30 tahun terakhir ini, pertanian multikroping itu berkembang di lereng Merapi ke dalam tiga pola. Pola pertama adalah menitikberatkan pada pertanian pangan, misalnya Dusun Sambungrejo dan Gowoksabrang dengan fokus pada tanaman pangan jagung. Pola kedua pada tanaman komoditas misalnya orang Stabelan dan Grogol dengan fokus pada tanaman sayuran, Dusun Kaliurang Utara dengan fokus pada tanaman salak, dan orang Jamuran dengan fokus pada tanaman tembakau. Pola ketiga pada peternakan, misalnya Dusun Turgo dan Kinahrejo di Sleman, dan pola keempat adalah menitikberatkan pada bidang penambangan pasir sebagai salah satu sumber penghidupan yang cukup penting misalnya dusun Kaligentong. Sebenarnya hampir semua dusun yang berada di

pinggir jurang selalu terjun dari ekonomi pasir sehingga sebagian besar dusun sampel penelitian memiliki sejumlah warga yang bergantung pada ekonomi ini.

Bab ini akan menggambarkan adaptasi ekologi dan ekonomi dengan menyimak pola pertanian multikroping dan pertambangan di Merapi. Deskripsi akan memfokuskan pada strategi orang Merapi mendayagunakan lingkungan agar menghasilkan produksi yang berguna bagi kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Dalam deskripsi ini akan disimak berbagai perubahan yang terjadi di Merapi sebagai akibat dari faktor internal, misalnya adanya tekanan penduduk atas tanah, dan perkembangan kapasitas dan inovasi lokal, dan dari faktor eksternal misalnya perubahan lingkungan fisik, dampak erupsi, dan tekanan pasar.

Deskripsi adaptasi ekologi dan ekonomi ini menyimak pola adaptabilitas ekologi dan ekonomi, kemakmuran dan tantangan ke depan. Deskripsi itu disajikan untuk memikirkan tentang program apa yang sesuai untuk pembangunan di Merapi yang kiranya relevan untuk memberdayakan para korban yang baru saja terkena dampak erupsi Merapi 2010.

4.2 Trend Perubahan Pola Adaptasi Ekologi dan Ekonomi

Dinamika adaptasi ekologi dan ekonomi orang Merapi selama 30 tahun terakhir ini mengarah pada semakin bergesernya pertanian pangan ke arah non-pangan, dan semakin pentingnya aktivitas penggalian pasir (termasuk batu) di Merapi pasca erupsi. Trend tersebut muncul dalam kaitannya dengan dinamika ekologi dan pasar sehingga strategi penanganan bencana juga harus memperhatikan tren tersebut dengan latarbelakang dan implikasinya.

Pada masa 10 tahun terakhir ini, lahan di lereng Merapi masih cenderung dipakai untuk pertanian, dan karena merupakan dataran tinggi, maka sebagian besar merupakan lahan kering daripada sawah. Menurut Podes 2001 BPS, dari 314,7 km² total lahan di 11 kecamatan yang tersebar di 4 kabupaten sekitar 204,5 km² berupa lahan pertanian. Komposisi penggunaan lahan pertanian ini di dominasi oleh pertanian bukan sawah seluas 137,5 km², sementara pertanian sawah hanya 67 km² (PODES 2001, BPS).

Table 4.1
Komposisi Penggunaan Lahan di Lereng Merapi

Komposisi Penggunaan Lahan							
Kecamatan	Kabupaten	Sawah (Km2)			Pertanian Bukan Sawah	Non Pertanian	Total area (Km ²)
		Pengairan Teknis	Pengairan Non teknis	Tidak Pengairan			
Srumbung	Magelang	0.3	7.9	2.6	8.4	4.4	23.6
Dukun	Magelang	10.6	0.8	1.9	10.2	3.3	26.9
Sawangan	Magelang	0	0	0	11.5	1.5	13.0
Selo	Boyolali	0	0	0	13.5	22.0	35.6
Cepogo	Boyolali	0	0	0	9.1	4.3	13.4
Musuk	Boyolali	0	0	0	11.8	7.6	19.4
Kemalang	Klaten	0	0	0	21.6	17.3	38.9
Ngemplak	Sleman	7.2	5.3	0.2	3.4	7.5	23.5
Turi	Sleman	0	0.6	0	17.9	10.2	28.7
Pakem	Sleman	8.4	8.7	0	9.2	17.6	43.8
Cangkringan	Sleman	7.8	2.7	2.0	21.0	14.5	48.0
TOTAL		34.3	26.0	6.7	137.5	110.3	314.7

Sumber: PODES 2008, Biro Pusat Statistik

Semakin ke arah puncak Merapi atau masuk ke wilayah KRB III, maka secara visual akan nampak bahwa lahan non sawah dalam hal ini tegalan atau pekarangan semakin luas. Sebaliknya semakin ke bawah atau dalam istilah lokal ke arah ngarai maka semakin luas lahan sawahnya. Dengan demikian sistem adaptasi ekologi orang merapi pada dasarnya berujung pada sistem tegalan yang mereka gunakan untuk berbagai macam kebutuhan dan komoditas yang dianggap sesuai dengan pengetahuan tentang lingkungan dan pasar.

4.2.1 Pergeseran dari Tanaman Pangan ke Rumput dan Peternakan Sapi

Pergeseran usaha tani dari tanaman pangan ke tanaman rumput dan peternakan sapi muncul di beberapa dusun di kabupaten Sleman seperti Turgo, Kemiri Cilik, Kopeng dan Bendosari. Pada awalnya petani mengutamakan tanaman jagung tetapi kemudian mengganti lahannya untuk tanaman rumput guna menyediakan pakan sapi perah. Gejala itu mengungkapkan bahwa sesungguhnya petani melakukan rasionalisasi produksi terkait dengan munculnya prospek ekonomi. Misalnya orang Turgo mengatakan rugi jika tetap menanam jagung karena kalau tanah ditanami rumput mereka bisa memperoleh susu sapi, dan uang hasil penjualan susu sapi dan *pedhet* dapat dipakai untuk mendapatkan jagung atau beras dalam jumlah yang lebih banyak.

Berdasarkan kalkulasi ekonomi, usaha ternak sapi dengan mengorbankan tanah guna ditanami rumput memang lebih untung dibandingkan dengan bercocok tanam jagung semata. Dengan menanam rumput, petani peternak bisa memelihara lebih dari dua ekor induk dan bahkan jika tetap mencari rumput di hutan bisa memelihara 3 hingga 4 ekor per rumah tangga. Walaupun demikian, petani biasanya baru meninggalkan jagung setelah mereka menghadapi erupsi Merapi.

Pada tahun 1994, erupsi memicu orang Turgo meninggalkan tanaman jagung. Pada mulanya orang Turgo harus mengungsi selama 3 bulan lebih. Tanah terbengkelai sehingga *diberokan*. Rumput tumbuh lebat di tanah *bero* tersebut tetapi justru petani menyukainya karena mereka bisa memperoleh suplai pakan dari kebunnya dalam volume yang memadai. Mereka membutuhkan rumput dari kebun dalam jumlah lebih banyak mengingat cadangan rumput di gunung berkurang akibat terbakar oleh awan panas. Dengan tidak memiliki panen jagung pasca mengungsi, petani kekurangan cadangan makanan pokok, dan kekurangan seperti itu diatasi dengan membeli beras dari hasil usaha ternak sapi perah. Oleh karena itu, petani pun kemudian memilih mengintensifkan usaha sapi perah. Mereka terus meninggalkan jagung pada musim tanam berikutnya, dan mengganti dengan rumput. Selama 3-4 bulan rumput yang ditanam di tengah petak tegalan jagung tumbuh lebat guna mendukung suplai pakan sapi pada musim kemarau tahun 1995. Setelah itu petani praktis meninggalkan jagung dan makan nasi beras.

Erupsi 2006 juga memicu petani di beberapa dusun meninggalkan tanaman jagung. Hal ini karena erusi diikuti dengan munculnya hujan abu yang mempengaruhi kerentanan tanaman dan keberhasilan petani dalam bercocoktanam. Pandangan masyarakat Merapi menyatakan bahwa abu bisa menjadi pupuk tetapi dalam jangka pendek selama satu tahun abu erupsi bisa bermasalah jika tidak dikelola dengan baik, misalnya ditanamkan ke dalam tanah. Pembenanaman abu ke dalam tanah itu memerlukan waktu dan tenaga, sehingga membuat petani meninggalkan jagung dan pindah non jagung. Hal ini mereka lakukan ketika erupsi 2000, 2006 dan bahkan 2010. Sebagian kecil petani di Babadan, dan Stabelan misalnya, mulai meninggalkan jagung ketika mereka

terlambat tanam karena harus mengungsi, tetapi sepulang mengungsi lahannya masing dan dipadati abu. Sementara itu, hujan abu yang menyelimuti tegalan telah membuat pohon jagung dan lainnya mati atau tidak berkembang. Oleh karena itu, dalam satu musim para petani tidak menanam tanaman jagung, atau panen jagung secara normal.

Pada erupsi 2010, beberapa dusun kemudian juga meninggalkan jagung karena hama tanaman seperti kera dan celeng kehilangan cadangan pakannya di hutan dan kemudian masuk ke tanaman jagung. Hal itu dialami petani di Kaligentong yang meninggalkan tanaman jagung pada pasca erupsi Merapi 2010. Hal ini karena sejak pasca erupsi itu tersebut, serangan hama kera meluas ke tanah tegalan sehingga untuk menghindari kerugian penduduk enggan menanam tanaman ini. Dengan demikian merosotnya usaha tani tanaman jagung sangat dikondisikan oleh gejala ekologis yang dipicu oleh aktivitas Merapi. Warga menghadapi meluasnya ancaman serangan hama pasca erupsi Merapi karena habitat mereka terbakar dan masuklah ke habitatnya.

Erupsi yang diikuti dengan banjir lahar dingin pada musim hujan juga membuat areal tanaman padi dan jagung rusak terterjang. Lahan jagung dan padi di sepanjang Sungai Krasak, misalnya rusak karena terjadinya banjir lahar yang meluap ke bantaran sungai. Petani kemudian mengantisipasi dengan merubah lahan tanaman jagung untuk tanaman salak, kayu atau rumput yang tidak perlu diolah secara intensif. Petani kemudian mencari sumber pemasukan yang lebih cepat diuangkan hasilnya, guna menutupi kebutuhan akan jagung dan beras padi yang diperoleh di pasar dengan harga yang relatif stabil. Bahkan rumput dan susu sapi bisa menjadi sarana untuk mendapatkan uang lebih cepat daripada menanam jagung.

Erupsi yang diikuti dengan banjir lahar dingin juga sering merusak saluran irigasi, sehingga dalam beberapa musim petani meninggalkan pertanian sawah padi, dan beralih ke non padi yang tidak begitu membutuhkan air. Hal ini terlihat secara nyata pada tahun 2010, lahan-lahan diberokan oleh sebagian petani di Bantaran sungai-sungai yang berasal dari Merapi. Di Dusun Bronggang, misalnya

seluruh saluran irigasi rusak sehingga lahan diberokan. Pilihan yang akan diambil petani adalah kelak lahan akan dipakai untuk tanaman nonpadi agar cepat dapat dimanfaatkan.

4.2.2 Pergeseran dari Tanaman Pangan ke Sayuran

Pergeseran dari tanaman pangan ke sayuran terjadi di beberapa dusun di wilayah Magelang seperti Grogol, dan Klakah di Boyolali. Perubahan itu berlangsung secara masif di dudun-dusun di dua kabupaten itu pada tahun 1980an tetapi puncaknya pada tahun 1990an. Pergeseran tersebut terjadi karena meluasnya komersialisasi pertanian dan sempitnya lahan pertanian.

Menanam sayuran berdampingan dan menjadi tanaman sela pasca menanam jagung atau padi atau tembakau merupakan kebiasaan petani di lereng Merapi. Namun demikian kebiasaan itu berubah, petani lebih memrioritaskan aneka tanaman sayuran seperti kobis, brokoli, kentang, sawi, tomat, dan lainnya yang ditanaman secara tumpangsari. Bahkan tanaman jagung atau padi ditinggalkan sehingga selama satu tahun petani terus menanam berbagai tanaman sayuran. Ada beberapa alasan mengapa petani kemudian meninggalkan jagung atau padi.

Pertama, petani merasakan adanya prospek usaha tani sayuran lebih memberikan pendapatan yang lebih besar daripada usaha tani jagung atau padi sekalipun harga produk sayuran agak lebih fluktuatif. Bagi petani dengan menanam sayuran mereka bisa memperoleh keuntungan ganda, yaitu memiliki uang karena sayuran merupakan komoditas yang *marketable*. Dengan uang tersebut mereka bisa membeli beras yang harganya relatif murah, dan mudah diolah untuk secepatnya menjadi nasi, dan mereka bisa membeli berbagai barang kebutuhan yang terus harus dipenuhi setiap bulannya. Dalam logika petani adalah kalau menanam jagung maka tidak mungkin jagung dijual karena jagung biasanya untuk kebutuhan makanan pokok keluarga.

Kedua, petani hanya memiliki lahan yang sempit sehingga dengan menanam sayuran mereka bisa melakukan penanaman berbagai jenis tanaman secara tumpangsari. Jagung tidak bisa ditumpangsarikan dengan tanaman

lainnya. Sebaliknya, cabe dapat ditanam berdampingan dengan loncang, sawi atau tomat dan lainnya dengan waktu tanam berurutan atau secara estafet, sehingga dalam satu tahun petani bisa panen berkali-kali dan dampaknya adalah petani memperoleh pemasukan setiap bulan.

Ketiga, selama dua puluh tahun terakhir, permintaan sayuran di kota-kota besar terus meningkat sekalipun harga sayuran sering fluktuatif. Petani merasakan bahwa hasil panen tidak perlu dijual ke pasar, cukup di kebun atau di rumah. Para pedagang perantara masuk ke dusun mereka dan mengambilnya. Bahkan tidak sedikit para pedagang sayur memerankan sebagai pelepas uang sehingga para petani memperoleh patron baru yang dapat mengamankan ekonomi rumah tangganya.

4.2.3 Pergeseran dari Tanaman Pangan ke Salak

Pada 1980an, petani di Kecamatan Turi Sleman tertarik untuk mengembangkan tanaman salak, terutama sejak ditemukannya varitas salak pondoh yang memiliki buah dengan rasa khas yaitu masir tanpa rasa getir (*sepet*). Salak pondok ini hasil inovasi petani lokal yang mengkawinkan antar varitas salak dan bisa terus dikembangkan tanpa berubah cita rasanya.

Komoditas salak pondoh sangat marketable, sehingga banyak petani yang berusaha mengembangkan tanaman ini di kebun-kebunnya yang semula merupakan lahan tanaman jagung. Kebutuhan bibit pun disuplai oleh petani lokal sehingga semakin cepat persebaran lahan tanaman salak di wilayah Turgo dan menjalar ke wilayah Pakem, serta wilayah Kemiren Magelang.

Salak pondok juga diminati para petani sawah padi. Mereka mengkonversi lahan tanaman padi menjadi lahan salak, terutama untuk sawah tadah hujan. Daripada kekurangan air, sawah tadah hujan itu dalam kacamata petani lebih baik ditanami salak. Akibatnya hampir semua lahan di Turgo bagian atas dipadati salak, dan kesejahteraan petani meroket karena keuntungan dari usaha tani salak bisa 3 kali lipat dari padi atau 4 kali lipat dari jagung. Menurut cerita petani, hasil usaha tani padi pada tahun 1990an sangat minim. Untuk satu hektar sawah hanya bisa panen 10 ton setahunnya dengan hasil bersih sekitar 6 ton, dan kalau

dikonversi uang setara Rp. 3 juta. Namun dengan salak petani bisa panen 30 ton dengan pendapatan bersih setara 20 ton dengan harga sebesar Rp. 10 juta. Pada masa kini hasil bersih usaha tani padi 1 hektar bisa mencapai sekitar Rp. 18 juta, sedangkan salak pondoh Rp. 30 juta.

Karena usaha tanaman salak memberikan keuntungan yang fantastis, pemerintah daerah Sleman juga menggalakkan pengembangan tanaman salak di kalangan petani di luar kecamatan Turi pada tahun 1990an. Di kecamatan Pakem misalnya pemda mencanangkan program pembagian bibit salak kepada petani yang sebelumnya fokus pada tanaman padi. Akan tetapi, petani tidak bisa berharap dari salak, karena produksi salak tidak sebegus di dusun-dusun di lereng Merapi yang berada di atas. Faktor suhu, dan ketersediaan air, dan ketinggian permukaan tanah dari alir laut mempengaruhi produktivitas. Dengan demikian dusun-dusun yang menghasikan salak di wilayah Merapi berada di KRB II dan I.

Prospek usaha tani salak mendorong masuknya para pengusaha ke dusun-dusun di lereng Merapi, dan kebanyakan pengusaha ini berasal dari kalangan petani menengah ke atas dan dari keluarga yang memiliki latar belakang sebagai pedagang, pegawai atau PNS. Mereka memiliki modal yang kuat sehingga bisa memperluas lahan salak serta mempertahankannya. Petani kecil dengan luas tanaman 1.000 m² ke bawah bisa dicaplok oleh petani menengah ke atas manakala mereka terjerat hutang atau membutuhkan uang cash yang besar untuk menutup biaya perawatan kesehatan, pendidikan anaknya atau kebutuhan lainnya.

Selama 20 tahun terakhir terlihat bahwa tanah salak di desa-desa pun tidak sepenuhnya milik petani lokal, dan sebagian milik petani dari luar. Lahan salak itu digarap petani lokal atau buruh lokal. Bahkan dan para petani salak baik lelaki atau pun perempuan menjadi buruh. Harga komoditas salak juga mengalami kemerosotan karena banyaknya petani salak di wilayah Sleman dan Magelang. Bahkan tanaman ini sudah tersebar di berbagai daerah seperti Banjarnegara sehingga persaingan usaha semakin ketat. Pada saat ini misalnya harga salak sekitar Rp 3.000,00 per kilogram pada musim panen raya sehingga petani

hanya mendapatkan margin keuntungan yang kecil yaitu sekitar Rp 500,00 per kilogram salak.

Kecilnya margin keuntungan itu memicu petani berusaha meningkatkan hasil dengan cara memperkenalkan salak pondoh organik. Keuntungan usaha memang meningkat, karena harga salak pondoh organik sekitar Rp 10.000,00 per kilogram, sedangkan salak non-organik Rp 5.000,00 per kilogram. Walaupun hasilnya lebih bagus, umumnya petani masih bertahan dengan salak non-organik. Hal ini karena tidak membutuhkan modal dan daya beli masyarakat masih mengutamakan salak yang harganya murah.

4.2.4 Pergeseran dari Tanaman Jagung ke Tembakau dan Lainnya

Pergeseran tanaman jagung ke tembakau terjadi di dusun lereng Merapi wilayah Kabupaten Klaten. Di hampir semua dusun di lereng, petani menanam jagung dan tembakau. Jagung ditanam musim hujan, sedangkan tembakau ditanam pada musim kemarau. Lambat laun petani meninggalkan tembakau karena tembakau kurang marketable dan beralih ke tanaman sayuran, salak atau pun rumput. Hanya beberapa dusun saja yang kemudian mempertahankan tembakau. Namun demikian, selama 20 tahun terakhir ini nampak bahwa tanaman tembakau tetap dipertahankan dan bahkan lebih diutamakan oleh petani di wilayah Klaten. Petani ini justru mengabaikan jagung sebagai tanaman subsisten. Mereka bisa berharap agar mendapatkan penghasilan lebih besar dari tembakau sehingga mereka bisa menutup kebutuhan beras.

Setiap rumah tangga hampir selalu menanam tembakau pada musim kemarau. Tembakau memang lebih cocok ditanam pada musim ini, dan tanah di Jamuran pun hanya akan menghasilkan panen yang bagus kalau ditanami tembakau. Pada musim hujan petani menanam jagung dan bersama tanaman sayuran dan palawija sebagai tumpangsarinya. Mereka tidak tertarik untuk keluar dari ekonomi tembakau karena mereka memiliki jaringan pasar yang luas di wilayah Klaten. Hal ini berbeda dengan dusun di Boyolali dan Magelang yang lemah jaringan pasarnya sehingga warga lebih memilih sayuran untuk membuka akses pada ekonomi uang. Pengalamann juga membuktikan bahwa produsen

tembakau di wilayah Magelang, Temanggung dan Wonosobo adalah dusun-dusun yang memiliki jaringan pasar yang luas dan kompetitif sehingga petani selalu tergiur untuk mempertahankan tanaman tembakau sekalipun membutuhkan modal yang lebih tinggi daripada jagung.

Selain akses pasar, tembakau sangat berarti bagi masyarakat Jamuran dan dusun di Klaten pada umumnya. Pada masa silam, tembakau telah membawa kemajuan ekonomi rumah tangga. Ketika musim panen bagus dan harga meroket, panen satu hektar salak bisa setara dengan panen 10 hektar tanaman jagung. Oleh karena itu petani bisa bersuka cita untuk memeriahkan musim panen. Sebagian petani kemudian ikut terbawa arus perjudian karena memiliki uang yang banyak.

Selain tembakau, beberapa petani di lereng Merapi juga mencari terobosan untuk meraih hasil panen yang besar dengan komoditas baru. Akhirnya mereka menemukan tanaman sengon. Kayu sengon menjadi bahan industri kehutanan yang sangat laku di pasar. Banyak bibit sengon tersedia di pasar dan para penebas sengon selalu berkeliling dari desa ke desa dan bahkan di setiap desa pun muncul pedagang baru. Oleh karena itu, sebagian kecil orang Jamuran yang memiliki tanah luas tertarik untuk mengembangkan tanaman sengon. Tanaman ini terutama ditanam di wilayah hutan rakyat sehingga tidak mengganggu tanaman komoditas musiman.

4.3 Pertanian Pangan

4.3.1 Petani Produsen Jagung

Pada masa kini tinggal 5 dari 30 komunitas dusun saja yang mempertahankan jagung sebagai tanaman pokok pada musim hujan (lihat tabel 1). Masih ada dua dusun yang menanam jagung, tetapi umumnya panen tidak dipakai untuk konsumsi subsisten atau kalau sampai dipakai, hal tersebut dilakukan karena sedang menghadapi kesulitan mendapatkan uang dari komoditas unggulannya.

Pertama-tama yang perlu dijelaskan adalah mengapa orang Stabelan menanam dan terus mempertahankan jagung. Di Stabelan, jagung dipertahankan

karena akses mereka tidak begitu fokus pada tanaman sayuran seperti petani Grogol. Mereka sudah mengenal berbagai macam sayuran tetapi tidak ditanam seintensif di Grogol. Masih jarang misalnya petani menggunakan plastik mulsa untuk menutup lahan sayuran agar tidak ditumbuhi gulma. Bagi petani jagung menjadi prioritas usaha tani, sehingga pemupukan tanah dilakukan pada waktu akan tanam jagung. Sayuran dan tembakau mendapatkan nutrisi yang tersisa dari tanaman jagung.

Pola usaha tani berbasis jagung di Stabelan itu terjadi karena hampir setiap rumah tangga memiliki tanah yang memadai dalam arti bisa menghasilkan jagung tanpa harus membeli beras. Rata-rata setiap rumah tangga memiliki tanah seluas 0.5 hektar dan dari tanah ini mereka bisa panen jagung sekali untuk hidup setahun. Selain itu, untuk menekan biaya hidup, mereka juga rela membeli jagung lokal daripada beras karena harga jagung lokal tidak lebih dari separo harga beras.

Selain alasan ekonomi, orang Stabelan dan orang Merapi pada umumnya mempunyai alasan kultural tetap mempertahankan tanaman jagung. Mereka memelihara jagung untuk menjamin agar bisa menyelenggarakan upacara ritual keagamaan dengan mudah karena salah satu menu sesaji adalah nasi jagung. Mereka percaya bahwa penguasa Merapi akan menerima sesaji mereka kalau sesuai dengan keinginan mereka. Banyak upacara dilakukan oleh warga komunitas Stabelan sehingga perlu memiliki cadangan jagung .

Berbeda dengan orang Stabelan, orang Kujon dan Gowoksabrang mempertahankan jagung sebagai tanaman utama di tegalan dan bahkan di pekarangan karena mereka tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menjamin keamanan subsisten. Tanah mereka sangat sempit dan karena itu pekarangan pun dimanfaatkan untuk menghasilkan makanan pokok. Memang tidak semua orang Kujon menanam jagung karena sempitnya lahan sehingga persentase petani yang menanam tidak lebih dari 65 persen.

Tabel 4.2
Luas Areal Tanaman, Jumlah dan Luas Garapan Petani Jagung di Tujuh Dusun

Nama Dusun	Luas Tanaman	Jumlah KK Petani	Jumlah KK penanam jagung
Makanan Pokok			
1. Stabelan Selo, Boyolali	15	110	110 (100 %)
2. Kujon Cepogo Boyolali	2	308	202 (65 %)
3. Gowoksabrang, Dukun Magelang	8	178	178 (100 %)
4. Babadan Bawah Dukun Magelang	15	199	199 (100 %)
5. Sambungrejo Kemalang Klaten	11	470	184 (40 %)
6. Klakah Tengah, Selo Boyolali	6	310	78 (21 %)
7. Karang Sari, Cepogo, Boyolali	11	320	80 (20 %)

Catatan : Khusus untuk Sambungrejo atas, maka hampir 100 persen petani menanam jagung sebelum erupsi 2010.

Secara visual kelangkaan tanah memang terlihat di dusun Kujon. Lahan pertanian begitu sempit sehingga mereka tidak memiliki hutan atau lahan untuk kayu-kayuan sebanyak petani lain di lereng Merapi. Mereka telah lama mengalami apa yang disebut sebagai lapar tanah tetapi tidak ada solusi melalui ekstensifikasi pertanian. Sebagai gantinya mereka melakukan penanaman jagung di pekarangan sekalipun relatif kurang baik karena lahan pekarangan sering disambangi ayam yang bisa mengancam tanaman jagung.

Kelangkaan tanah membuat orang Kujon pun responsif untuk menerima kebijakan dan program relokasi yang ditawarkan pemda. Mereka akan menempati pekarangan baru yang dianggap lebih aman dari erupsi, dan sekaligus mereka masih bisa memanfaatkan pekarangan lama untuk dikembangkan sebagai tempat pertanian atau pekarangan.

Sama seperti orang Kujon, orang Guwosabrang miskin tanah. Luas tanaman jagung sekitar 8 hektar tetapi petani yang membutuhkan jagung hamper 100 KK sehingga rata-rata luas tanaman jagung adalah sekitar 80 m² per KK. Panen seluas 80 m² itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi karena hanya bisa menopang sekitar 3 bulan. Oleh karena itu petani mencari

sumber penghasilan lain dengan menanam tanaman sayuran pada musim kemarau dan berbagai pekerjaan sebagai buruh tani.

Sama seperti orang Stabelan di Boyolali, orang Babadan di Magelang juga tetap mempertahankan jagung di tengah kampungnya dikelilingi dusun yang sebagian besar telah pindah ke tanaman sayuran, cabe atau pun tembakau. Orang Babadan sangat sulit mempertaruhkan keamanan subsistensinya dengan meninggalkan jagung karena mereka tidak memiliki lahan yang luas. Umumnya lahan mereka relatif sempit dan karena itu mereka mengatasi kekurangan pangan bukan membeli seluruh kebutuhan pangan, tetapi menambah kegiatan baru guna meningkatkan akses mendapatkan uang. Pertama, strategi yang dilakukan adalah mereka tetap menjaga tanah pemukimannya tidak melebar sekalipun padat agar tidak menerjang lahan jagung yang dianggap sangat terbatas arealnya. Kedua, sebagian besar lahan ditanami jagung dan sebagian kecil lahan untuk tanaman sayuran. Bagi mereka jagung tetap untuk menjamin keamanan subsistensinya. Akan tetapi setiap tahun dengan lahan yang relatif sempit, panen jagung hampir tidak akan mencukupi konsumsi kebanyakan keluarga, dan untuk mengatasinya keluarga ini kemudian membeli beras di pasar dengan menggunakan uang hasil penjualan ubi, cabe, sayuran atau peternakan.

Mirip dengan orang Babatan, orang Sambungrejo juga membutuhkan tersedianya lahan untuk tanaman jagung guna menjamin keamanan subsistensi. Orang Sambungrejo berada di bagian puncak Merapi yang sempit, dan berbatasan langsung dengan jalur hulu kawah Merapi. Dulu kala nenek moyang mereka pindah atau masuk ke Sambungrejo agar bisa mendapatkan lahan sekalipun terbatas. Mereka bergantung sekali pada jagung ubi-ubian untuk menjamin keamanan pangannya. Dari generasi ke generasi penduduk bergantung pada panen jagung yang sangat terbatas, dan baru pada masa Orde Baru mereka mulai bergantung pada pasir. Sekarang ini mereka lebih tertarik mencari uang dengan menggali pasir atau menjual tanaman kayu sedangkan jagung untuk keamanan pangan. Namun demikian, karena lahan terbatas, tanaman kayu di Sambungrejo tidak sepadat seperti pada orang Kaligentong tetangganya, atau orang Turgo. Kepemilihan lahan untuk tanaman jagung per rumah tangga tidak lebih dari 0.25

hektar, dan karena itu porsi tanaman sayuran dan kayu di lahan tersebutnya untuk selang seling saja.

Dengan adanya sumber pendapatan dari pasir, orang Sambungrejo bukan meninggalkan jagung tetapi semakin mantap untuk meneruskan kebiasaan bahwa tanahnya adalah untuk jagung sebagai tanaman subsisten. Hanya keluarga kaya saja yang kemudian memanfaatkan tanahnya sebagian untuk tanaman keras, sayuran atau bahkan sekarang ini rumput. Namun demikian, karena rumput gerpak juga tersedia melimpah di hutan, mereka pun enggan menanam lebih banyak seperti yang dilakukan oleh orang Kinahrejo, tetangganya atau Turgo sebelah baratnya.

4.3.2 Strategi Produksi Budidaya Jagung

Di Dusun Babatan, Kaligentong dan Kujon, jagung sebagai tanaman pokok ditanam setiap tahun sekali pada musim hujan. Mereka menanam jagung local yang termasuk jagung pendek usianya (*genjah*) agar bisa segera dipanen, dan kemudian lahannya dipakai untuk ubi-ubian utamanya ketela rambat dan sayuran. Ubi-ubian itu dipakai sebagai cadangan pangan, menambah ketersediaan bahan konsumsi karbohidrat. Di luar itu semua, baik jagung maupun ubi-ubian diharapkan menghasilkan daun yang dipakai sebagai cadangan pakan.

Di Babadan hanya dua pertiga tanah yang ditanami jagung untuk musim hujan, dan sisanya sepertiga dipakai untuk sayuran. Keluarga berharap bahwa lahan sayuran akan menghasilkan uang sepanjang musim karena ditanami berbagai sayuran secara tumpangsari. Mereka mempertaruhkan nasibnya dari sayuran agar bisa memenuhi berbagai kebutuhan akan uang. Oleh karena itu, pasca jagung dipanen, mereka juga segera menanam tanaman sayuran.

Pola usaha tani jagung di Babadan itu mirip dengan Sambungrejo. Bedanya, di Sambungrejo petani berusaha untuk menanam tanaman jagung seluas mungkin. Orang Sambungrejo lebih suka memiliki tanah untuk jagung dan sebagian untuk kayu-kayuan dan areal sayuran tidak ada yang disediakan secara khusus seperti di Babadan. Untuk mengantisipasi kekurangan pangan, orang

Sambungrejo mengandalkan pada hasil penggalian pasir, tanaman ubi-ubian, khususnya ubi jalar dan hasil beternak sapi.

Berbeda dengan orang Sambungrejo, karena sangat lapar tanah, orang Kujon memanfaatkan lahannya terutama untuk jagung daripada sayuran di musim hujan. Mereka bahkan menanam di tanah pekarangan karena terbatasnya lahan tegalan. Kalau menanam sayuran proporsinya sangat terbatas, kecuali jika menanam sayuran pada musim kemarau karena lahan memang diperuntukkan untuk sayuran bukan jagung.

Berbeda dengan di Kujon, di Kaligontong, tegalan dibagi dua satu sisi untuk tanaman keras dan sisi lain untuk tanaman jagung. Pola tanam jagung di Kaligontong mengindikasikan bahwa mereka tidak begitu miskin tanah untuk menjamin keamanan subsistensi. Ada pola bahwa petani yang menanam jagung adalah dari golongan petani kecil dan gurem. Golongan petani menengah dan kaya cenderung menanam tegalan dengan tanaman keras, dan untuk memenuhi kebutuhan nasi mereka lebih suka membeli beras. Hal itu bisa dilihat dari hamparan tanah pekarangan dan tegalan di Kaligontong. Memasuki dusun ini, orang akan melihat adanya pohon sagon yang ditanam di sepanjang jalan atau di kanan kiri rumah.

Dalam memastikan jagung agar berbuah dan aman dari serangan hama, orang Merapi memiliki pola tanam yang relatif adaptif dengan lingkungannya. Umumnya mereka menanam jagung di luar tanah pemukiman, kecuali orang Kujon karena lahan mereka terbatas sehingga banyak tanah pekarangan yang ditanami jagung. Dengan cara seperti itu, jagung terhindar dari serangan ayam kampung. Kalau terpaksa ditanam di dalam pekarangan pun biasanya petani membuat pagar agar ketika musim tanam ayam tidak menjerahnya.

Jagung juga tidak ditanam di dekat hutan atau lokasi yang jauh dari rumah. Hal ini karena jagung kurang dapat diawasi dan dikawatirkan kalau ditanam di tempat tersebut akan dijarah oleh babi hutan atau kera dan burung. Strategi itu membuat lokasi hamparan jagung berada di kebun sekitar rumah sehingga lahan, lahan yang terletak di perbukitan bagian atas bukan untuk jagung tetapi tanaman keras atau rumput.

Dalam menjamin jagung bisa ditanam tanpa kendala tenaga kerja orang Merapi telah mentradisikan gotong royong dalam urusan tanaman ini. Tradisi ini hampir tidak berlaku untuk bercocoktanam sayuran atau tanaman lainnya yang dianggap warga sebagai tanaman komoditas. Karena merupakan tanaman subsisten yang langsung dikonsumsi, dipakai untuk hidangan makan keluarga, maka orang merasa tidak tereksplotasi secara langsung kalau membantu tetangganya yang akan menanam atau memanen. Mereka merasa sebagai bagian dari komunitas sehingga tidak ada beban untuk bekerja gotong royong atau sambatan dalam mengurus tanaman ini.

Walaupun memanfaatkan tenaga sambatan, tetapi ada pola bahwa keluarga lebih suka menggantungkan tenaga kerja dari lingkungan tetangga terdekat atau sanak saudara. Para tetangga dan sanak saudara inilah yang sering berbagi sehingga penggunaan tenaga kerja di lingkungan mereka merupakan suatu bentuk saling berbagi penghasilan dan *sambatan*.

Walaupun mengandalkan tenaga *sambatan*, pengerahan tenaga kerja bercocoktanam jagung semakin dikerjakan oleh individual keluarga. Gejala itu terlihat dari kecenderungan perempuan ikut bekerja mencangkul dan mengangkut panen. Mereka enggan menggunakan tenaga sambatan karena terasa berat harus menyediakan jatah makan. Para petani lebih suka pekerjaan diurus anggota-anggota dalam keluarga secara bertahap walaupun memakan waktu relatif lama karena dengan cara tersebut akan menekan biaya.

Jelas bahwa kecenderungan keluarga membatasi tenaga kerja gotong royong itu merupakan fenomena umum yang terjadi di Jawa. Resiprositas ternyata menyebabkan ekonomi biaya tinggi khususnya untuk dana konsumsi dan tolong-menolong baik bagi keluarga kelas atas maupun bawah, dan karena itu keluarga kemudian melakukan rasionalisasi (Hayami dan Kikuchi, 1983). Strategi rasionalisasi adalah membatasi penggunaan tenaga gotong royong sehingga tidak perlu mengeluarkan dana konsumsi. Dalam kasus pertanian padi, tenaga gotong royong diganti dengan tenaga upahan atau sistem tebasan (Hayami dan Kikuchi, 1983), sedangkan dalam pertanian jagung diganti dengan tenaga kerja keluarga

secara lebih maksimal dan membatasi tenaga gotongroyong dari dalam lingkungan rukun tetangga atau sanak saudara.

Dengan mengintensifkan tenaga kerja keluarga, maka hampir seluruh proses kegiatan bercocok tanam dilakukan oleh tenaga keluarga, sedangkan tenaga tetangga atau kerabat hanya menemani atau melengkapi. Dengan demikian, hampir setiap hari keluarga, khususnya pihak perempuan memusatkan pertanian untuk menyiapkan sampai mengolah tanaman jagung. Lelaki biasanya memberikan tenaganya pada penyiapan penanaman seperti pencangkulan dan pengangkutan hasil panen, sedangkan perempuan pada penyiangan, penjagaan, pengangkutan, pengolahan hasil panen dan penyajian hasil panen untuk konsumsi rumah tangga sampai dengan kulit jagung untuk pakan ternak. Semua kegiatan itu melibatkan seluruh anggota keluarga dari anak-anak sampai orang tua yang sudah manula sekalipun.

4.3.3 Peran Jagung dalam Ekonomi Rumah Tangga dan Komunitas

Peran jagung dalam ekonomi rumah tangga dan komunitas di komunitas Merapi yang menempatkan jagung sebagai makanan pokok dapat menggambarkan ketahanan versus kerentanan pangan. Di tiga dusun, posisi jagung sebagai makanan pokok masih sangat kuat sekalipun warga semakin seiring makan nasi beras terutama ketika mengadakan hajatan keluarga. Walaupun tren makan nasi meningkat, studi ini masih bisa melihat sisi keberlanjutan dan perubahan fungsi jagung dalam ekonomi rumah tangga di Merapi.

Sisi keberlanjutan jagung sebagai makanan pokok memperlihatkan bahwa jagung dapat berfungsi sebagai alat bagi orang Merapi untuk mengurangi kerentanan ekonomi. Dengan tetap menanam jagung, maka keluarga petani lapisan bawah bisa menjaga ketahanan pangannya. Moral mereka adalah bukan bergantung pada pasar. Baru kalau kurang, maka membeli beras atau jagung di pasar. Mereka tidak pernah juga menjual hasil panen jagung. Jagung hasil panen selalu disimpan di *pogo*, agar kering dan terhindar dari serangan kutu. *Pogo* itu diletakkan di atas perapian dapur dan setiap hari terasapi agar jagung cepat mengering dan tidak dimakan kutu. Jagung kemudian dikonsumsi sesuai kebutuhan sehari-hari

Peran Jagung di Merapi pada masa kini sebenarnya lebih berfungsi sebagai suatu alat untuk tidak bergantung pada pasar walaupun rumah tangga petani tidak bisa mencapai swasembada. Paling tidak, dengan tetap memelihara jagung, hasil kerja keras mencari uang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lainnya. Dengan demikian, jagung menjadi alat bagi keluarga petani untuk menekan konsumsi produk pasar sehingga keluarga bisa lebih baik dalam menghadapi masalah kerentanan pangan. Orang Merapi mengatakan bahwa sekalipun makan jagung merepotkan pada masa kini, yaitu harus menggunakan tungku kayu bakar untuk menanakinya, dan melakukan pemrosesan yang panjang didahului dari melepas biji dari tongkol (*janggal*), menumbuk biji menjadi butiran kecil, dan merendam semalaman, baru kemudian dikukus. Dalam pandangan orang Merapi dikatakan bahwa dulu beras murah sekarang semakin mahal sehingga jagung menjadi bermakna penting bagi keamanan pangan.

Keberadaan jagung dalaam komunitas di Merapi juga mempunyai fungsi sosial religius dan fungsi ini menyatukan keluarga dan komunitas. Fungsi sosial tersebut adalah memenuhi fungsi berbagi, dan senasib sepenanggungan antar anggota keluarga. Jagung ditanam di tanah leluhur atau warisan orang tua sehingga jagung hadir sebagai barang yang patut mempunyai fungsi sosial. Orang tua dan anak serta kerabat ikut melakukan kegiatan menanam, memanen dan menyimpan ke *pogo*. Kegiatan ini menjadi ajang bagi mereka untuk mensyukuri atas warisan dan memupuk persaudaran. Jagung hasil panen pun dibagikan kepada anggota kerabat yang ikut menanam sampai dengan memanen.

Selain fungsi sosial, jagung mempunyai fungsi religi. Jagung merupakan produk dari tanah Merapi dan karena itu keberhasilan panen sangat ditentukan oleh kebaikan para pihak yang menguasai kawasan Merapi. Orang Turgo tempo dulu menyebut Kaki Smarabumi dan Nini Smarabumi, yaitu semacam “dewa” yang menjaga kesuburan tanah (Hudayana, 1987:127). Mereka juga menyebut bahwa jagung hadir dalam kehidupan mereka berkat kebaikan Mbok Sri yaitu dewi kesuburan yang menjelma menjadi benih jagung.

Di Merapi, kepercayaan atas kesuburan tanah itu berporos pada penguasa gaib Merapi. Hal ini nampak dalam upacara panen (*wiwit*). Mereka

menyampaikan doa syukuran, dan permohonan kepada penguasa (Tuhan) *semoga* rejeki yang diterima bisa membawa berkah dalam kehidupan sosial-ekonomi, dan itu dimulai dari lancarnya hajatan panen. Dalam upacara tersebut jagung digunakan sebagai sesaji atau hidangan makan bersama antara warga yang hadir dalam upacara. Hidangan itu setelah diberi doa lalu disantap bersama sebagai lambang bahwa berkah yang mereka terima akan meresap ke dalam kalbu.

Hampir semua komunitas lereng Merapi masih menggunakan kepercayaan asli yang menempatkan nasi jagung sebagai bagian dari sesaji. Orang Stabelan mengatakan tidak lengkap dan benar jika sesaji meninggalkan nasi jagung karena itu merupakan permintaan para penguasa Merapi. Sekalipun sudah tidak dipakai untuk makan sehari-hari, orang Merapi seperti stabelan menanam jagung tidak lain untuk memenuhi kebutuhan ritual dan kebutuhan ritual ini secara tidak langsung juga merupakan hajatan komunitas. Sebuah hajatan untuk membangun agenda-agenda bersama dalam komunitas seperti menyelenggarakan pesta perkawinan, pembangunan rumah, dan melakukan pengungsian dan rekonstruksi.

4.4 Pertanian Salak: Menjamin Penghidupan Orang Merapi

Pertanian salak pondoh adalah salah satu jenis pertanian yang cukup dominan dan khas di wilayah lereng Barat Merapi, di sekitar aliran sungai Krasak yang masuk wilayah Magelang dan Yogyakarta, serta di wilayah barat daya yang masuk wilayah kecamatan Turi. Wilayah ini dianggap sebagai habitat asli dari varietas salak yang disebut oleh orang Sleman (Yogyakarta) sebagai “Salak Pondoh”, atau oleh orang Magelang disebut sebagai “Salak Nglumut”.

Sleman dan Magelang adalah dua kabupaten yang termasuk penghasil Salak Pondoh terbesar di Jawa tengah selain Banjarnegara. Meski salak pondoh dipercaya sebagai ‘temuan’ petani salak di Turi, Sleman, namun dari segi luas lahan, jumlah rumpun produktif, dan jumlah produksi pertahun, Kabupaten Magelang lebih unggul dari Sleman. Di Magelang Tanaman salak pondoh ini terkonsentrasi di kecamatan Srumbung, dan Kemiren. Studi ini akan

memfokuskan perkembangan tanaman salak di Dusun Kaliurang Utara, Kemiren untuk menggambarkan ekonomi salak pada umumnya.

Tabel 4.3
Luas Lahan, dan Tanaman serta Produksi Salak Pondoh Per Kabupaten

Kabupaten	Luas Lahan	Rumpun	Produksi
Magelang	2.298 Ha	5.745.078	57.491 ton
Sleman	1.760 Ha	4.395.266	43.951 ton

Sumber: “Kawasan Sentra Salak”, Kelompok Tani Ngudi Luhur, Desa Kaliurang Utara, Srumbung, Magelang.

Di dusun penelitian pertanian salak terkosestrasi di Dusun Kaliurang Utara, Srumbung, Dusun Sempu, dan Gondoarum dan di Kemiri Cilik Pakem. Ketiga wilayah itu termasuk di wilayah KRB III, walaupun secara topografis berada di bagian tengah lereng Merapi. Secara ekologi salak memang tidak bisa berkembang menghasilkan biji yang banyak bila ditanam di lereng atas.

Salak menjadi komoditas yang sangat penting di Merapi. Hal ini dapat disimak dari total pendapatan petani di dusun Kaliurang Utara dengan luas lahan sekitar 27 hektar. Pendapatan ini adalah produk salak yang diekspor ke negeri Cina dan Malaysia.

Jumlah salak yang disetor di gapoktan untuk diekspor: 30 krat per minggu. Setiap krat mempunyai berat 42 kg. Harga salak paling rendah Rp 5000,00 per kg satu krat salak milik tiga hingga lima orang. Dengan demikian pendapatan per rumah tangga per bulan (dengan asumsi satu krat milik lima orang): $30 \text{ krat} \times 42 \text{ kg} \times \text{Rp } 5.100 \times 4 \text{ minggu} \times 1/5 = \text{Rp } 5.140.000$. Jadi pendapatan rata-rata per rumah tangga antara Rp 5.140.000,00 - Rp 5.500.000,00 Dengan demikian pendapatan seluruh Kaliurang Utara per tahun Rp 5.859.600.000-Rp 6.270.000.000.

Di lereng Merapi, pertanian salak pondoh merupakan jenis pertanian yang mampu mendatangkan keuntungan yang besar dibandingkan dengan pertanian lain, karena harga salak pondoh yang relatif tinggi sementara biaya pemeliharaan yang relatif rendah, juga tidak menyita banyak waktu dan tenaga. Tidak mengherankan apabila menurut perhitungan BNPB, kerugian di bidang pertanian

tanaman pangan dan hortikultura akibat erupsi Merapi 2010 didominasi oleh kerugian di komoditas salak pondoh dengan nilai kerusakan sebesar Rp 11.4999.500.000,00 dan nilai kerugian Rp 201.486.495.000,00. Perhitungan ini dinilai dari sekitar Rp 4.392.919,00 rumpun pohon salak yang hancur akibat terjangan abu dan lahar dingin. Nilai kerugian ini sekitar 84 persen dari total kerugian di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang mencapai nilai Rp 238.296.550.000,00.

Dari 30 dusun di 4 kabupaten yang menjadi wilayah penelitian, tercatat 7 dusun yang perekonomiannya ditunjang budidaya tanaman salak, yaitu: Gondoarum (Turi, Sleman), Sempu (Turi, Sleman), Kaliurang Utara (Srumbung, Magelang), Cabe Lor (Srumbung, Magelang), dan Jamburejo Dua (Kemiren, Magelang), dan Kemiri Cilik (Pakem).

Kerusakan tanaman salak di enam dusun ini, kecuali di Kemiri Cilik bisa dimasukkan kedalam kategori terparah dan berpengaruh pada penurunan penghasilan warga dusun.

Tabel 4.4
Kerusakan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dampak Erupsi Merapi 2010

Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Komoditas	Luas/rumpun/batang	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian
1	Padi Sawah	238 Ha	11.499.500.000	2.795.130.000
2	Sayur	765 Ha		32.927.925.000
3	Salak Pondoh	4.392.919 Rumpun		201.486.495.000
4	Tan Hias	209.365 Btg		1.011.200.000
5	Palawija	35 Ha		75.800.000
Total			11.499.500.000	238.296.550.000

4.4.1 Luas Lahan Salak Terdampak Erupsi Merapi 2010

Dari ke lima dusun penelitian, Dusun Gondo Arum (Turi, Sleman) dan Kaliurang Utara (Srumbung, Magelang) tercatat sebagai dua dusun yang kurang lebih sebagian besar lahan salaknya mengalami kerusakan (sekitar 80 persen dari luas seluruh luas lahan salak). Tingkat dan jenis kerusakannya berbeda-beda; pohon salak roboh karena tak mampu menahan abu yang menempel di daun

dahan dan tidak bisa diselamatkan, atau daun, dahan, bunga, dan buah salak tertutup abu sehingga membuat bunga dan buah salak mati yang mengakibatkan gagal panen. Sebagian besar petani di dua Dusun ini memperkirakan kondisi tanaman salak akan pulih paling tidak selama 2 tahun.

Dusun Kaliurang Utara adalah salah satu dusun yang sebagian besar lahan pertaniannya ditanami “salak pondoh super” atau disebut oleh orang Kaliurang Utara dan sekitarnya sebagai “salak nglumut”. Dari luas wilayah dusun sekitar 72 hektar, sekitar 22 hektarnya ditanami salak nglumut.

Dengan jarak sekitar 8 km saja dari puncak Merapi dan karena diapit oleh dua sungai; Bebeng (sebelah Timur) dan Krasak (Sebelah Barat), dusun teratas dari desa Kaliurang ini dimasukkan ke dalam kategori Kawasan Rawan Bencana III (KRB III). Artinya, dusun ini termasuk kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering atau bisa terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu, dan hujan abu lebat. Karena tingkat kerawanan yang tinggi ini, pemerintah tidak memperkenankan kawasan ini untuk dijadikan hunian tetap. Pada letusan Merapi tahun 2010, kawasan ini terkena terjangan hujan abu lebat dan luapan lahar dari sungai Bebeng, yang membuat hampir 80 persen tanaman salak di dusun ini rusak.

Tidak mengherankan apabila pada tahun sekitar tahun 1979, pasca erupsi Merapi saat itu, Warga Desa Gimbal dan Brubuhan yang berada di atas Kaliurang Utara ditransmigrasikan ke Sumatera Selatan, Lampung, dan Palembang. Pada saat itu, Dusun Kaliurang Utara sebenarnya termasuk dusun yang harus dikosongkan juga, namun warga dan kepala desa Kaliurang waktu itu menolak untuk ditransmigrasikan. Sebagian besar warga Gimbal pun ada yang kembali dari transmigrasi dan menetap di sebelah timur dusun Kaliurang Utara, dimasukkan ke dalam satu dusun yang disebut dusun Sumberrejo. Saat ini, otomatis dusun Kaliurang Utara menjadi dusun yang paling atas dan paling dekat dengan puncak Merapi. Adapun wilayah bekas Desa Gimbal dan Brubuhan saat ini menjadi hutan dan tegalan yang dimiliki oleh warga desa Kaliurang.

Warga Kaliurang Utara dan sekitarnya mengingat bahwa sejak tahun 90-an hingga sebelum erupsi tahun 2010, mereka merasakan penghasilan mereka

meningkat dan bisa hidup berkecukupan karena usaha pertanian salak nglumut. Maka bukan suatu yang aneh, apabila warga Kaliurang Utara hingga saat ini masih tetap hidup dan menghidupi tanah mereka, dan tidak mau dipindahkan.

Tulisan ini akan menggambarkan dan mengungkap bagaimana menanam, menumbuhkan, dan merawat salak nglumut sebagai strategi adaptasi ekologi dan ekonomi utama orang Kaliurang Utara. Dalam hal ini salak bukan hanya sebagai sumber penghidupan (penghasilan ekonomi). Dengan kata lain, melalui pengamatan dan penyelidikan terhadap proses menanam dan merawat salak Nglumut, etnografi ini ingin mengungkap persepsi dan pengetahuan orang Kaliurang Utara terhadap lingkungannya, dalam hal ini adalah Merapi. Sebab apa yang mereka persepsi, tiada lain adalah apa yang mereka raih melalui aktivitas yang tengah dilakukan. Pengetahuan dan Makna muncul dari keterlibatan produktif seperti menanam dan merawat salak ini. (Ingold: 2011:11).

4.4.2 Potensi Ekologis Merapi terhadap Perkembangan Pertanian Salak

Dari hasil analisis gabungan kelompok tani (gapoktan) desa Kaliurang Utara ditemukan bahwa salak pondoh super atau salak nglumut bisa tumbuh dengan baik di wilayah Kaliurang karena beberapa faktor:

Pertama, Jenis Tanah: Endapan vulkanik (tanah campur pasir) yang sangat subur, dengan porositas yang tinggi (meresap air dengan cepat). Kedua, ketersediaan air: Sepanjang tahun dari sumber sungai Bebeng. Ketiga, cuaca: Tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Kondisi ini dimungkinkan oleh posisi Kaliurang Utara yang berada di lereng gunung Merapi dan berada di dekat dua aliran sungai.

Faktor-faktor ekologis ini, selain bisa menjamin tanaman salak tumbuh dengan baik, juga menentukan karakteristik dan kualitas salak yang di tanam di daerah Kaliurang Utara. Salak nglumut dari daerah ini memiliki karakteristik sebagai berikut: buah yang sudah dipetik lebih tahan lama, sekitar 20 hari sebelum ia membusuk. Karakteristik ini membuat salak nglumut dari Kaliurang Utara lebih prospektif untuk diekspor ke luar negeri. Selain itu, ukuran buah salak dari

Kaliurang Utara lebih besar dibanding dari tempat lain, rasanya lebih manis dan sedikit asam tanpa rasa sepet. Dan, yang sangat penting, masa panennya panjang, bisa sepanjang tahun, dengan masa panen raya 3 kali dalam satu tahun pada bulan; Desember, Januari, Februari. Panen raya pada bulan-bulan ini terjadi ketika salak di wilayah lain, seperti di Turi, Sleman, justru sedang tidak panen raya, sehingga salak pondoh/nglumut di pasaran langka. Kondisi ini membuat harga salak nglumut dari Kaliurang harganya tinggi. Hingga pernah mencapai Rp 11.000,00 per kg pada sekitar tahun 1994-1995.

4.4.3 Sejarah Perkembangan Pertanian Salak

Sekitar tahun 1986, seorang pemuda Kaliurang Utara bernama Hadiyanto dan beberapa kawannya bekerja menjual dan mengantarkan pupuk kandang dari sapi milik orang tua mereka ke wilayah Turi, Sleman. Pada saat itu, di wilayah Turi pertanian salak pondoh mulai berkembang dan membutuhkan pupuk kandang yang banyak yang tidak bisa dicukupi sendiri oleh peternakan sapi yang ada di Turi. Melihat prospek pohon salak yang bisa menguntungkan, Hadiyanto berinisiatif untuk membeli bibit salak pondoh dengan cara menukar satu colt (mobil pick-up berukuran sedang) pupuk kandang dengan 15 bibit pohon salak. Saat itu, harga 1 bibit pohon salak adalah Rp 5.000,00. Harga itu setara dengan $\frac{1}{4}$ rit pupuk kandang 2 gram emas 24 karat. Sahuri, kawan Hadiyanto, bahkan menjual emasnya untuk membeli 200 bibit salak. Harga yang mahal untuk orang Kaliurang Utara. Namun, harga jual salak yang mencapai 7000 rupiah per kilogram lebih menggiurkan mereka. Salak pondoh adalah “emas” itu sendiri.

Sebelumnya, ketika ia meminta izin pada ibunya untuk mengganti tanaman kopi yang ada di halaman rumahnya dengan salak. Ibunya menjawab: “*Barang Ming Garek Ngemplok Njagakke Sing Urung Kethok (Barang yang tinggal makan kok malah mengharapkan yang belum keihatan)*”. Orang Kaliurang Utara pada saat itu menanam beragam tanaman dari mulai kopi, ketela pohon, pandan, dan buah-buahan (jambu, nanas, nangka).

Hadiyanto mencoba merayu ibunya dengan mengatakan bahwa hasil panen salak akan lebih menguntungkan dari kopi dan hasil dari panen pertama akan ia serahkan semuanya kepada ibunya. Rupanya ibunya mulai luluh dan bahkan memberikan uang sebesar Rp 150.000,00 rupiah untuk membeli bibit salak lagi. Uang sebanyak itu didapat dari penjualan sapi seharga Rp 400.000,00 rupiah.

Setelah bibit tersedia, Hadiyanto mulai mengolah tanah di halaman rumahnya. Diawali dengan menggemburkan tanah, karena tanah itu agak miring maka kemudian dia menata batu di bagian bawah untuk menahan tanah agar tidak tergerus air. Awalnya ia adalah petani yang sangat tekun, membuat lobang berukuran 50 kali 50 centimeter untuk nantinya tempat bibit salak itu di tanam.

Lubang itu kemudian dipenuhi dengan *lemi* (pupuk kandang) sambil menunggu musim hujan tiba. Setelah musim hujan datang kemudian ia mencampur *lemi* (pupuk kandang) tersebut dengan tanah agar lebih cepat menjadi kompos dan mudah di serap oleh tumbuhan. Barulah *galuran* di buat untuk meninggikan tanah, kemudian barulah bibit tersebut *diceblokkkan* (ditanam) ke masing-masing lobang. Perawatan awal itupun tekun di lakoninya, setiap hari ia mengontrol tanamannya. Setelah tumbuhan itu *nglilir* (*tumbuh.*) barulah ia yakin bahwa salak yang ia tanam dapat tumbuh dengan bagus. Tak terhitung berapa keranjang pupuk yang ia taburkan dan berapa kali ia mengairi lahannya untuk menjaga agar tanaman salak awal itu tumbuh dengan baik. Berkat usahanya yang tekun tanaman pun tumbuh dengan baik, banyak *anakan* salak yang tumbuh kemudian ia cangkok dan tangkarkan menjadi benih salak. Benih-benih itu kemudian ia tanam di sekitar tanaman salak awal agar jarak tanam menjadi lebih rapat.

Sekitar tahun 1988, panen awalpun ia dapatkan, dengan berbekal sepeda onthel ia mengayuhnya menuju ke pasar Ngablak, waktu itu sudah ada pengepul salak di daerah itu walau omsetnya masih sedikit. Dengan membawa 5 kilogram salak ia mendapatkan uang Rp 25.000,00 dengan sumringah ia mengayuh sepedanya menuju ke rumahnya. Uang Rp 25.000,00 yang ia dapatkan dari hasil

panen pertama kemudian dengan bangga diserahkan semuanya kepada ibunya. *“ya uwis kuwi tanduran kopi ngarepan kuwi diganti wae karo salak, nggo rak luwih hasil”* demikian ungkap ibunya ketika dia menerima uang hasil penjualan panen salak pertama kali. Akhirnya setelah ijin diberikan, semua halaman rumahnya di ganti dengan bibit salak yang ia dapatkan dari cangkokan anakan tanaman salak pertamanya. Dari 15 pohon pertamanya itu kini ia menikmati hasilnya, hampir 2/3 dari lahan yang di miliki ditanami salak.

Sebenarnya, sebelum mengenal salak nglumut, orang Kaliurang Utara sudah terlebih dahulu mengenal Salak Jawa. Namun, karena harga jualnya yang jauh lebih rendah dari salak nglumut, salak Jawa kemudian ditinggalkan. Kalaupun masih ada hingga saat ini, pohon salak Jawa lebih difungsikan sebagai pagar untuk melindungi tanaman salak Nglumut, agar tidak terlalu kentara dan terhindar dari pencurian.

Sekitar tahun 1990-an, Hadiyanto mulai mencangkok tanaman salak nglumutnya dan menghasilkan bibit sekitar 200 batang. Bibit-bibit itu kali ini, tidak dia gunakan sendiri, 100 batang ia jual ke warga sekitar dengan harga sekitar Rp 3.000,00 – Rp 3.500,00. Namun, saat itu masih belum banyak warga Kaliurang Utara yang ikut menanam salak Nglumut.

Pada tahun 1994, Merapi meletus. Wilayah Kaliurang Utara diguyur hujan abu tipis. Warga Kaliurang hanya mengungsi di kantor Balai Desa Kaliurang dan Sekolahan di dekat balai desa. Erupsi kali ini terjadi di musim kemarau. Menurut Pak Hadiyanto, Pak ranto, Pak Ponilan, Pak Agus, dan beberapa petani salak lainnya, jika hujan abu tidak tebal dan tidak disertai hujan, maka abu Merapi tidak akan lengket di daun dan pohon salak. Ia akan turun ke bumi dan menyentuh tanah. Abu seperti ini membuat tanah menjadi lebih subur. Maka tidak mengherankan, apabila pada tahun 1994-1995, ketika Hadiyanto dan Sahuri panen mereka mendapatkan buah yang baik dan dengan harga yang baik pula, sekitar Rp 9.000,00 – Rp 11.000,00 per kilogram. Saat itu harga satu kilogram beras, seharga Rp 5.500,00. Jadi satu kilogram salak bisa untuk membeli 20 kg beras. Warga juga sering membandingkan tingginya harga salak dengan harga bahan bangunan. Karena orientasi mereka ketika mendapatkan penghasilan salah satunya

adalah memperbaiki rumah. Sekitar tahun 90-an ini, menurut beberapa warga satu kilogram salak bisa buat membeli dua sak semen, batu kali 2 truk, besi beton 4 buah besi beton. Harga salak yang setinggi itu membuat semakin banyak orang Kaliurang Utara beralih menanam salak nglumut.

Peralihan besar-besaran dari tanaman pangan ke salak nglumut di desa Kaliurang dan dusun Kaliurang Utara, terjadi pada tahun 1998 ketika Departemen Pertanian menjalankan Proyek Pengembangan Agrobisnis dan Holtikultura (P2AH). Proyek ini dicanangkan sebagai respon untuk mengatasi “krisis moneter“. Melalui proyek ini pemerintah memberikan bantuan bibit salak dan pendampingan. Melalui proyek ini sekitar 18 hektar lahan di desa Kaliurang sebagian berupa sawah, berubah menjadi lahan salak. Dari 18 hektar tersebut, terbagi ke 3 wilayah dusun: Jrasah (5 Ha), dan sisanya (12 Ha) masuk ke kawasan dusun Kaliurang Utara dan Sumberrejo. Melalui proyek ini petani diminta menyediakan lahannya, Dinas Pertanian sebagai pengelola proyek menunjuk pihak ketiga sebagai penyelia, pemberian bantuan bibit, pembentukan kelompok tani dan pendampingan.

Tahun 2001 dan 2006 ketika terjadi erupsi Merapi, Dusun Kaliurang Utara diguyur hujan abu. Kali ini hujan abu lebih besar dari erupsi tahun 1994. Pohon salak tertutup abu dan dahannya merunduk, tetapi tidak rusak. Dalam waktu 3 bulan kemudian, tanah semakin subur, dan daun salak berubah menjadi hijau tua. Panen tetap terjaga seperti ketika tahun 1995.

Tahun 2009, termasuk menjadi salah satu tahun terpenting dalam perkembangan salak di Kaliurang Utara khususnya, dan Srumbung pada umumnya. Pada tahun ini program registrasi kebun salak untuk sertifikasi mengikuti patokan SOP GAP (Standart Operasional Procedure Good Agricultural Practice) dan ekspor Salak ke Cina dimulai. Proses ekspor ini dijalankan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngudi Luhur Desa Kaliurang Utara bekerja sama dengan eksportir: PT Agung Mustika Selaras. Harga salak untuk diekspor ini rata-rata lebih tinggi hanyanya sekitar Rp 500,00 – Rp 1.500,00 per kilogram dari pasar lokal. Sementara harga pasar lokal terendah: Rp 2000,00 per kilogram, tertinggi bisa mencapai Rp 10.000,00 per kg,

dan harga rata-rata sepanjang tahun Rp 3000,00 per kilogram. Meskipun, secara umum, sebelum terjadi erupsi Merapi, 60-70 persen salak dari Desa Kaliurang masih diserap oleh pasar Jabotabek dan sekitar, dan 30-40 persen pasar lokal dan ekspor.

Total pendapatan masyarakat di dusun Kaliurang Utara saja selama satu tahun dari salak bisa mencapai Rp 5.859.600.000,00 hingga Rp 6.270.000.000,00. Maka tidak mengherankan jika para petani salak dan pejabat desa Kaliurang, sering kali berkata bahwa desa Kaliurang khususnya dan Kecamatan Srumbung pada umumnya, adalah kecamatan paling kaya di kabupaten Magelang.

Table 4.5
Analisis Usaha Tani Salak Per 10 hektar selama Lima Tahun

URAIAN	TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
A. Potensi produksi					
Produksi buah salak (kg)	-	60.000	120.000	200.000	300.000
Produksi Bibit Salak (batang)	60.000	40.000	20.000	15.000	10.000
Produksi Kacang Tanah (kg)	15.000	7.500	-	-	-
Produksi Kayu Sengon (kubik)	-	-	625	-	1.250
B. Potensi Pendapatan					
Buah Salak @ Rp2500 per kg	-	150.000.000	300.000.000	500.000.000	750.000.000
Bibit Salak @ Rp2500 per Batang	150.000.000	100.000.000	50.000.000	37.500.000	25.000.000
Kacang Tanah @ Rp3000 per kg	45.000.000	22.500.000	-	-	-
Kayu Sengon @ Rp 100000 per kubik	-	-	62500000	-	125.000.000
C. Total Pendapatan	195.000.000	272.500.000	412500000	537.500.000	900.000.000
D. Biaya Usaha Tani Per Tahun (Pengeluaran)	324.238.750	195.992.500	208.477.500	207.762.500	243.292.500
E. Selisih Pendapatan & Pengeluaran (bersih)	129.238.750	76.507.500	204.022.500	329.737.500	656.707.500
F. Rata-rata Pengeluaran Per Bulan	27.019.896	16.332.708	17.373.125	17.313.542	20.274.375
G. Rata-rata Pendapatan Per Bulan (bersih)	10.769.896	6.375.625	17.001.875	27.478.125	54.725.625

4.4.4 Erupsi Merapi 2010

Erupsi Merapi tahun 2010, Kaliurang Utara diterjang hujan abu yang sangat lebat disertai hujan. Akibatnya abu vulkanik menempel di daun, batang, dan buah salak. Pohon salak merunduk atau rubuh, buah dan bunganya membusuk. Hampir 80 persen tanaman salak di dusun Kaliurang Utara rusak. Petani tidak bisa panen. *‘Ekonomi kami sekarang nol’*, kata-kata itu sering diucapkan oleh hampir setiap orang Kaliurang Utara yang kami temui. *“Paling tidak kami harus menunggu 2 hingga 3 tahun lagi menunggu panen lagi..”*. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, banyak warga Kaliurang Utara yang bekerja mencari pasir dan batu di Kali Bebeng. Pekerjaan yang biasanya hanya dikerjakan oleh sebagian kecil warga Kaliurang Utara yang memiliki lahan terbatas dan orang dari luar Kaliurang. *“Sekarang baik orang kaya atau miskin semua turun ke sungai”* kata itu juga yang sering keluar dari orang-orang Kaliurang Utara untuk menggambarkan kondisi mereka.

4.4.5 Pemulihan Tanaman Salak Pasca Erupsi

Ada dua cara pemulihan tanaman salak pasca erupsi 2010; pohon salak yang ada di tegalan dipangkas habis atau bahkan dicabut, sementara yang berada di dekat atau halaman rumah dibiarkan atau dirubuhkan ke tanah. Kini salak yang dipangkas daunnya telah tumbuh tetapi tidak bagus, dahan baru mulai bertambah, walaupun sudah muncul *congok* (tangkai bakal buah) itupun kecil dan pendek. Sementara pohon salak yang dahannya tidak dipangkas, saat ini sudah mulai berbuah. Beberapa petani mulai panen meski hanya tiga sampai lima kilogram. Sementara tanaman yang dirubuhkan mulai muncul daun dan *congok* baru.

Pak Ponilan, salah satu petani salak di Kaliurang Utara, mengaku bahwa sebenarnya penanganan pohon salak pasca erupsi itu masih coba-coba. Uji coba yang lain adalah memangkas habis dahan dengan menyisakan beberapa dahan yang masih bagus. Bagi lokasi yang dahannya dipangkas habis, lahan antara pohon salak kemudian bisa ditanami tumpang sari, untuk menanam sayuran atau palawija (jagung). Sementara yang tidak dipangkas habis tidak bisa di tanami tumpang sari. Penjelasan dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pun tidak

menyelesaikan masalah mereka. Para PPL menganjurkan untuk menggunakan pupuk kimia untuk memacu pertumbuhan dahan, dengan takaran 1 Kilogram untuk satu dapur. Himbauan untuk memberikan Phonskha ke tanaman salak dengan ukuran 1 kilogram untuk satu rumpun sering tidak ditaati karena mahalnnya harga pupuk kimia tersebut. Anjuran penggunaan pupuk kandang pun diharuskan untuk menggunakan pupuk kandang yang sudah diolah agar lebih cepat diserap oleh pohon salak. Namun petani tetap berkeyakinan jika pupuk kandang tanpa diolahpun sudah bagus untuk tanaman salak mereka.

Petani salak lain berpendapat bahwa pulihnya salak dari kerusakan karena hujan abu sangat tergantung usia pohon salak itu. Pohon salak muda akan lebih mudah untuk mulai berbunga kembali sementara salak yang tua akan lebih lama karena banyak pelepah yang dipangkas lantaran patah terkena abu dan pasir Merapi.

Usia salak ditentukan dari jumlah pelepah yang di miliki. Salak usia tiga tahun sudah mulai berbuah namun itu juga ditentukan oleh lokasi tanaman. Jika di tanah yang basah, atau sering terkena aliran air maka akan cepat berbuah sementara di tanah yang kering atau gersang maka salak akan lebih lama berbuah.

Salah satu hal yang dipelajari para petani salak di Kaliurang Utara dari erupsi Merapi, adalah pemahaman mereka tentang jenis-jenis Abu. Pak Ranto, salah satu petani salak yang punya lahan paling banyak di Kaliurang utara, menyebutkan sambil menunjukkan kalau tanah di lahannya setelah erupsi 2010 kebanyakan ‘bledug’ (abu). Ia berwarna putih agak kecoklatan dan sangat halus. Jika dibiarkan abu akan mengeras dan membentuk lempengan. Abu itu banyak mengandung ‘asam karat’ katanya. Bisa membuat salah jadi busuk. Bahkan membuat alat-alat dari besi bisa karatan. *“Tapi lama kelamaan ia bisa membuat tanah jadi lebih subur”*. Agar abu ini tidak merusak, pak Ranto *mencangkul tanahnya dan mencampurnya dengan tanah yang berada di bawahnya”*.

Pak Ranto juga menyebutkan bahwa “Bledug” atau abu vulkanik dari Merapi mudah menyerap air. Salak yang tanahnya ditutupi banyak bledug akan lebih basah dari pada yang hanya ditutupi pasir. Bledug bisa menyimpan air tiga sampai empat hari. Sementara pasir hanya satu hari saja, ia sudah kering. Oleh

karena pohon salak pada intinya harus cukup mendapat pengairan dan selalu basah, maka *bledug* membuat tanaman salak tumbuh lebih baik.

Terkait pemulihan tanaman pertanian, pemerintah melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan berupa alat-alat pertanian, pupuk dan bibit sayuran saja sedangkan bantuan secara khusus untuk kegiatan revitalisasi salak belum ada sampai saat ini. Terkait dengan salak, dusun ini malah mendapatkan bantuan dana untuk irigasi dari perusahaan Shimitsu.

4.4.6 Salak sebagai Jaminan Penghidupan: Pola Kepemilikan, Pengelolaan, dan Kesejahteraan.

Secara ekonomis, menanam, merawat, dan menjual salak nglumut mendatangkan keuntungan yang besar bagi orang Kaliurang Utara. Pola umum penanaman salak nglumut di Kaliurang Utara adalah setiap 1000 m² ditanami sekitar 500 pohon salak.

Dari luas lahan dan jumlah kepemilikan pohon salak, terdapat 5 jenis pola kepemilikan, pengelolaan, dan tingkat kesejahteraan di dusun Kaliurang Utara: Pertama, adalah orang yang memiliki lahan kurang lebih 4.000 m² dengan jumlah pohon salak yang dikelola sekitar 2000 pohon. Setiap bulan sekitar 2/3 dari jumlah pohon menghasilkan salak yang bisa dipanen. Setiap pohon menghasilkan rata-rata 1,5 kg. Apabila harga rata-rata satu kilogram salak adalah Rp 3.000,00, maka penghasilan orang tersebut sekitar Rp 5.400.000,00 perbulan. Petani salak dengan kepemilikan lahan dan jumlah pohon sebanyak ini biasanya paling tidak dibantu oleh satu orang buruh tetap, yang bekerja selama setahun, dan tinggal di rumah si pemilik lahan. Si pemilik lahan biasanya ikut bekerja, terutama pada proses “ngembang”: menaburkan serbuk sari dari bunga salak “jantan” ke bunga salak “betina”. Proses “ngembang” ini biasanya dilakukan setiap hari, dilakukan secara bergelirian setiap baris. Hal ini dilakukan agar salak tidak berbuah secara serentak. Sehingga salak bisa dipanen setiap bulan secara bergilir dari setiap rumpun, dan salak tidak membanjiri pasar yang menyebabkan harganya menjadi jatuh.

Tipe orang dengan kepemilikan lahan seperti ini juga biasanya masih punya lahan lain yang ditanami tanaman yang hasilnya lebih bersifat jangka

panjang seperti kayu, kopi, kelapa, vanilla, dan tanaman untuk kebutuhan sehari-hari seperti: sayuran, tanaman untuk bumbu sehari-hari, dan rumput untuk pakan sapi.

Untuk memenuhi kebutuhan pupuk kandang bagi tanaman salaknya, ia paling tidak harus memiliki minimal 2 ekor sapi. Sapi ini juga berfungsi sebagai tabungan, biasanya dijual untuk keperluan yang cukup membutuhkan dana, seperti membangun atau memperbaiki rumah.

Keuntungan yang diperoleh dari salak, selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biasanya dibelikan emas dan tanah, sebagai “investasi”, dan yang paling umum adalah membangun atau memperbaiki rumah. Rumah yang dibangun biasanya cukup luas, terutama ruang tamunya, dengan furniture (sofa dan kursi) yang berukuran besar, penuh ukiran, dan dari bahan kayu jati. Selain, tentu saja, rumah itu dibalut dengan keramik dengan warna mencolok. Selain itu, keuntungan dari salak juga seringkali digunakan untuk membeli motor, sehingga kadang motor itu dilabeli dengan sebutan sebagai “*motor hasil panen tahun....*”.

Kedua, orang yang mungkin bisa disebut sebagai ‘pengusaha salak’. Ia memfokuskan semua waktunya untuk menanam dan memelihara salak, mengalihkan hampir semua lahannya untuk salak, juga mengelola salak milik orang lain. Luas lahan salak yang dia kelola minimal 8000 m² dengan jumlah pohon sekitar 4.000 pohon. Dengan perhitungan yang hampir sama; 2/3 pohon salak setiap bulan bisa dipanen, dengan hasil sekitar 1,5 kg per pohon, dan harga rata-rata Rp 3000,00 per kilogram, maka ia mendapatkan penghasilan sekitar Rp 10.800.000,00 per bulan.

Sang ‘pengusaha salak’ biasanya memiliki minimal 1 pegawai tetap yang bertugas untuk memupuk, membalik tanah, membersihkan tanah dari rumput, dan memangkas dahan. Si ‘pengusaha salak’ setiap hari akan berkeliling mengontrol semua pohon dan ‘ngembang’ bunga-bunga salak betina dengan serbuk sari dari bunga ‘jantan’. Setiap hari ia bisa menghabiskan waktu untuk itu sekitar dua sampai tiga jam.

Bagi dia, salak adalah komoditas yang harus cepat dipanen dan jumlahnya banyak. Untuk itu, ia akan secara maksimal melakukan pengairan dan pemupukan, tidak hanya dengan pupuk kandang, tetapi juga dengan menggunakan pupuk kimia. *“Salak dengan pupuk kandang memang buahnya bisa lebih tahan lama, tetapi kalau saya yang penting ia cepat berbuah dan banyak...”*. Oleh karena itu, menurut perhitungan dia, lebih efisien apabila tidak memelihara sapi sendiri untuk menyediakan pupuk kandang, dan membeli pupuk kandang dan kimia ke pedagang pupuk. Setiap hari, untuk meningkatkan hasil, dan termasuk memulihkan kondisi tanaman salak pasca erupsi, ia selalu meneliti tanaman salaknya untuk menemukan inovasi agar pohon salaknya bisa berbuah cepat dan banyak.

Keuntungan yang diperoleh dari usaha salak setelah dipakai untuk kebutuhan konsumsi dan membangun rumah dan pendidikan anak biasanya digunakan untuk membeli tanah untuk ditanami salak lagi, dan investasi di ‘bisnis’ lain, seperti membeli lahan sawit dan karet di Sumatera. Selain itu ia menggunakan uangnya untuk membuat dan memperbaiki rumah. Seperti halnya tipe pemilik lahan yang pertama, “pengusaha salak” ini mempunyai rumah yang besar, dengan ruang tamu yang luas, dan furniture yang ‘gigantik’ dari jati. Namun, ia tidak mau membelanjakan uangnya untuk membeli mobil, karena menurutnya tidak ekonomis. Ia hanya menggunakan motor untuk pergi ke kebun dan bepergian.

Ketiga, bisa disebut sebagai ‘petani kecil’. Ia memiliki lahan sekitar 1.000 m² dan ditanami sekitar 500 pohon salak. Kadang ia menyewakan pohon salaknya ke orang lain jika ia sedang membutuhkan uang yang cukup besar dan mendadak. Jangka waktu sewa tanaman salak ini bisa sangat panjang sampai 10 atau 13 tahun dengan harga sewa sekitar Rp 5.000.000,00an saja untuk seratus pohon. Sementara penghasilan per bulan dari pohon salak yang ia miliki sekitar Rp 1.215.000,00.

Untuk memelihara tanaman salaknya ia dibantu oleh istri, karena tidak punya pekerja. Setiap hari menghabiskan waktu sekitar dua jam untuk memelihara salak. Sisa waktu yang ia miliki digunakan untuk mencari penghasilan lain dengan

mencari pasir atau batu dengan penghasilan sekitar Rp 40.000,00 sampai Rp 60.000,00 per hari. Namun, kadang penghasilan dari mencari pasir dan batu, tidak tetap, dan sulit dijadikan sandaran, sehingga mencari pasir dianggap sebagai pekerjaan sampingan saja.

Sang petani kecil biasanya juga memelihara satu hingga dua ekor sapi, tetapi biasanya bukan milik sendiri. Setiap hari ia harus mencari rumput dan memberi makan sapi tersebut. Dari sapi yang ia pelihara ia mendapatkan pupuk kandang untuk tanaman salaknya. Dari penjualan sapi, ia biasanya dapat bagian, tetapi jika dipotong dengan tenaga yang dia habiskan untuk mencari rumput, bisa dikatakan ia merugi. Keuntungan yang dia peroleh dari salak digunakan untuk memperbaiki rumahnya secara bertahap. Sehingga sebagian rumah bisa bertegel, sebagian lagi masih tanah, sebagian sudah ditembok, sebagian masih dinding batu bata.

Keempat, tipe yang bisa disebut 'buruh'. Pekerjaan utama mencari pasir atau batu dan menjadi buruh bangunan atau tani, sementara penghasilan dari salak hanya dijadikan sebagai tambahan. Dengan jumlah pohon salak yang dimiliki kurang dari 500 pohon, penghasilan maksimal dari salak sekitar Rp 400.000,00 per bulan. Pekerjaan merawat salak biasanya dilakukan oleh istri. Untuk itu sang istri bekerja sekitar empat jam per hari termasuk mencari rumput dan merawat sapi milik orang lain. Sementara sang suami bekerja sekitar 6 jam sehari; mencari pasir atau batu, atau menjadi buruh bangunan.

Penghasilan dari menjadi buruh dan menanam salak, ditambah tambahan lain, biasanya digunakan untuk membeli material; semen, batu, pasir, dan lain lain untuk membangun rumah tidak permanen menjadi permanen, sedikit demi sedikit.

Kelima, tipe ini mungkin tidak terlalu umum, tetapi penting untuk diungkap, yaitu: perempuan kelapa rumah tangga yang mengelola salak. Di Kaliurang Utara diwakili oleh sosok Bu Mujirah yang memiliki 10 kapling salak di beberapa 'wilayah' Kaliurang Utara dan memiliki empat sapi. Sepuluh kapling dengan luas per kampling sekitar 150 m², maka ia memiliki lahan salak sekitar 1500 m². Dengan perhitungan pola umum, berarti dia memiliki sekitar 750 pohon salak. Melalui perhitungan rata-rata panen perbulan dari 500 pohon, setiap

pohon menghasilkan 1,5 kg salak, dengan harga rata-rata Rp 3000,00 maka penghasilan Bu Mujirah setiap bulan kurang lebih Rp 2.250.000,00.

Hingga saat ini Bu Mujirah mampu membuat 3 rumah permanen dengan keramik dengan furnitur yang baik. Setiap hari dia merawat salak di 4 tempat yang berbeda yang tersebar di wilayah Kaliurang Utara; ngembang, memangkas dahan, membersihkan rumput. Selain itu dia juga harus mencari rumput dan memberi makan sapi. Sehari, dengan dibantu menantu-nya atau anggota keluarga lain, ia bisa bekerja kurang lebih 6 hingga 7 jam.

Dari kelima ‘tipe’ kepemilikan dan pengelolaan salak, juga penghasilan yang diperoleh, secara umum orang Kaliurang Utara menghitung bahwa tingkat kesejahteraan mereka meningkat, terutama ketika ‘masa kejayaan salak’ dari pertengahan tahun 1990-an sampai awal 2000-an. Sementara dari awal tahun 2000-an sampai erupsi tahun 2010 penghasilan mereka tidak terus meningkat, tetapi relatif stabil. Hingga erupsi 2010 menghancurkan tanaman salak mereka.

Ada beberapa cerita yang mengungkapkan dampak dari erupsi terhadap pendapatan dari usaha tani salak. Hadiyanto, kepala dusun Kaliurang Utara menceritakan “*sampai sebelum erupsi (tahun 2010), setiap panen kita bisa menyisihkan uang untuk zakat mal, dikumpulkan untuk membantu keluarga miskin. Sekarang, bisa dikatakan jumlah keluarga miskin sudah berkurang, dari 92 jadi 20 KK.* Selain itu muncul pernyataan dari Dono, seorang petani “*Masa kejayaan salak mbiyen kui mau nguliahke anak, tuku motor bisa..*”. Dono menandai kesejahteraan dari salak dengan kemampuan menyekolahkan anak dan membeli kendaraan bermotor, selain tentu saja membangun dan memperbaiki rumah. “*Dulu ketika belum menanam salak, kita tidak mau pindah dari sini, apalagi sekarang kita dapat untung banyak dari nanam salak*” tambah Hadiyanto.

4.4.7 Merawat Salak; Menumbuhkan dan Memahami Lingkungan

Dari paparan sebelumnya, tergambar bagaimana salak menjadi ‘jaminan’ penghidupan (penghasilan) orang Kaliurang Utara. Namun, lebih dari itu, seperti sebagian telah diungkap di atas, menanam salak menjadi praktik yang mensyaratkan pengetahuan tentang kondisi lingkungan (tanah, air, dan cuaca),

juga pada saat bersamaan memunculkan pengetahuan baru; seperti pengetahuan tentang ‘bledug’ atau ‘abu vulkanik’ Merapi.

Orang Kaliurang Utara menyebut praktik yang mereka lakukan dengan tanaman salak sebagai: “*ngrumat salak*” (merawat salak). Dalam hal ini, secara praktis memang mereka menanam pohon salak, selanjutnya “tinggal merawat” dengan melakukan: penggemburan atau penyiangan tanah, penjarangan pohon, penjarangan buah, pemupukan dua kali: satu kali pupuk kandang satu kali pupuk ponska dan organik, pemangkasan, penyerbukan: ini inti dari budidaya salak jika terlewat sudah tidak bisa berbuah ya tidak ada hasil. Proses perawatan ini dalam sehari menghabiskan waktu sekitar dua hingga tiga jam saja, dan pohon salak bisa bertahan hingga puluhan tahun.

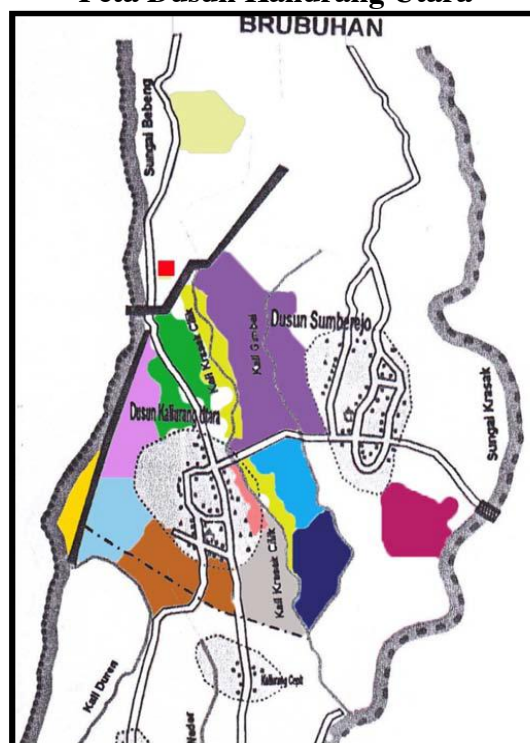
Menurut Pak Ponilan, yang bisa dikategorikan sebagai ‘petani salak kecil’, banyak warga memilih menanam salak karena tenaga yang dibutuhkan untuk perawatan lebih sedikit dibandingkan mereka kerja di sawah. Penyerbukan bisa dilakukan oleh keluarga, istri biasanya membantunya dalam penyerbukan, pemangkasan dan pemanenan. Ketika pekerjaan itu bisa dilakukan bergiliran. Sementara pencangkulan sebelum pemupukan dilakukan oleh lelaki. Penyerbukan 500 rumpun itupun dalam sehari membutuhkan waktu kurang lebih dua jam, karena tidak semua pohon memerlukan penyerbukan. Pemangkasanpun bisa dilakukan sambil penyerbukan maupun saat panen.

“Semua tergantung perawatannya!” itu jawaban dari banyak orang Kaliurang Utara jika ditanyakan seberapa besar hasil panen yang mereka dapatkan. *“Tapi jika tidak dirawat pun, salak masih bisa berbuah...makanya beberapa orang yang butuh uang harian dan tidak mempunyai lahan yang cukup luas dan pohon salak yang banyak, mereka lebih memilih mencari pasir untuk dapat uang harian...dan salaknya tidak terlalu dirawat, tapi masih bisa panen sedikit-sedikit”* kata Pak Ranto, yang sering disebut sebagai ‘pengusaha salak professional’ oleh orang Kaliurang, karena dia hanya bekerja merawat salak dan termasuk orang paling kaya di Kaliurang Utara.



Pak Ponilan menambahkan bahwa: cara seseorang merawat pohon salak bermacam-macam, sesuai dengan “keyakinannya”. Dan keyakinan itu jarang sekali bisa berubah. Misalnya, dia menyakini bahwa pohon salak tidak perlu

diberi pupuk sekaligus, tetapi bergiliran, juga pemangkasan dahan juga bisa dilakukan bergiliran jadi lebih efisien, dan hasilnya juga sama. Atau dalam hal cara pemupukan, kalau Pak Ponilan percaya bahwa pupuk kandang cukup disimpan begitu saja di bawah phon salak, tidak perlu dicangkulin. Pupuk akan tersebar karena misalkan diinjak injak ayam. Itu lebih baik, karena kemudian akar pohon salak akan semakin menjalar kuat karena aktif mencari makanan. Sementara kalau pas pemupukan dicangkul, justru akan membuat buahnya jadi kecil, karena akarnya ikut terpotong.

Gambar 4.1
Peta Dusun Kaliurang Utara



Sumber : Data Primer Laura

	Ngarep Deso		Kebon
	Tanggulangsi		Ledok / Dok Gimbal
	Kidul / Dul Omah		Ledok / Dok Krasak
	Cepit / ponteng		Mburi Deso
	Tlataran		Tanah Tegong
	Tegal Permen		Tegal Weru
	Tegal		

Selain itu, lokasi dan jenis tanah juga menentukan cara perawatan tanaman salak. Orang Kaliurang Utara memiliki pengetahuan mengenai kondisi tanah tiap lokasi dan bagaimana cara perawatan salak di lokasi tersebut.

Lahan atau lokasi yang paling luas dan paling banyak ditanami salak di dusun Kaliurang Utara disebut wilayah: “*Ngarep Deso (Dul Omah)*”. Wilayah ini dibagi menjadi dua berdasarkan potensi yang menentukan besar kecilnya pajak tanah yang harus di tanggung oleh pemilik lahan. Pembagian ini tidak lepas dari sejarah pemanfaatan lahan *ngarep deso* yang dulunya adalah lahan sawah. Sebelum di tanami salak, *tanah ngarep deso* adalah persawahan yang di tanami padi dua kali setahun, dan jagung serta palawijo. Ada dua pembagian kelas untuk lahan Ngarep deso, satu lahan yang persawahan masuk di tanah kelas satu, karena pengairan yang bagus, sehingga salak tumbuh dengan baik. Sementara lokasi yang tidak terjangkau irigasi dan hanya mengandalkan tadah hujan. Lokasi tanah kelas dua ini berada di sisi sebelah barat. Lahan *ngarep deso* mulai berubah menjadi lahan salak ketika ada program Program Pengembangan Agrobisnis dan Holtikultura (P2AH). Sementara lokasi tanah yang dianggap kelas dua (walau kini sudah bisa dialiri air irigasi dari Bebung) ditanami tanaman beragam antara lain: salak, cabe rawit, jagung, tembakau, loncang, tomat, pisang, kelapa.

Lahan lain yang banyak ditanami salak adalah lahan di wilayah “*ledok Krasak Cilik*”. Sesuai dengan namanya, lahan ini berada di pinggir sungai Krasak Cilik (Krasak Kecil). Selain tanaman salak, di sini juga ditanami sedikit rumpun bambu, kelapa, dan sengon. Pohon salak bisa tumbuh bagus di lahan ini karena lahan ini, dalam istilah lokal: “*mangku banyu*” (menampung air), sehingga tanaman salak bisa setiap saat bisa diberi air jika membutuhkan. Namun, lahan ini jarang diberi pupuk kandang, karena jalan yang harus ditempuh naik-turun sehingga membutuhkan tenaga ekstra untuk mengangkut pupuk-nya. Sebagian besar orang yang memiliki lahan di sini memupuk salak mereka hanya satu tahun sekali.

“*Nduwur deso*” (*atas desa*), adalah lokasi lain yang banyak ditanami salak yang ditumpangsati dengan cabe dan sayuran. Lokasi ini berada di atas dusun Kaliurang Utara (sebelah utara). Beberapa pohon kelapa juga tumbuh di lokasi ini. Pengairan cukup terjamin karena di sisi kanan dan kiri lahan ada aliran irigasi. Kondisi lahan yang hampir mirip dengan “*nduwur deso*” adalah ‘*tlataran*’. Lokasi lahan ini berada di sebelah barat dusun Kaliurang Utara, lokasi ini kebanyakan ditanami salak yang juga tumpang sari dengan sayuran dan cabe.

Salak juga banyak ditanam di wilayah “*Tegalan*”. Lahan ini berada di sisi timur dusun Kaliurang Utara, sebelah atas dari kali Krasak Gimbal. Lahan ini merupakan lahan yang sebelumnya banyak dimanfaatkan untuk tanaman keras, walaupun kini hampir separuh dari luasan lahan tegalan ini ditanami salak. Tanaman Kayu keras di tanam di lahan ini semisal pohon nangka, sonokeling, mindi, sengon dan mahoni. Melihat dari kondisi lahan sebenarnya tanaman mahoni cocok di tanam di lahan ini, ditemukan satu pohon mahoni diameter 1,25 meter di lahan tersebut. Bambu Petung juga merupakan tanaman yang sangat subur bahkan diameter bambu mencapai 20 centimeter. Selain tanaman salak, tanaman musiman lainnya juga di tanam di lahan ini seperti tanaman kopi, ketela pohon (*jendal*), cabe, tomat dan jagung.

Wilayah lain yang banyak ditanami salak adalah: *ponteng*, *tanah tegong*, dan *tanggul lengsi*. *Ponteng* berada di utara dusun cepit, kebanyakan lahan di lokasi ini ditanami salak program Program Pengembangan Agrobisnis dan Hortikultura (P2AH). *Tanah tegong* berada di sebelah barat laut dusun Kaliurang Utara. Setelah talud yang membatasi antara dusun Kaliurang dengan kali Bebeng. Sebelum terkena lahar lokasi ini ditanami salak dan juga di gunakan untuk tanaman padi. *Tanggul lengsi*. berada di pojok barat daya dusun Kaliurang Utara, berbatasan dengan Kaliurang Selatan. Lahan ini banyak digunakan penduduk untuk lahan sawah. Ditanami sayuran dan juga pohon salak.

Lokasi lainnya, seperti: *ledok Gimbal*, Brubuhan, Tegal Permen, dan Tegal Weru, adalah lokasi yang hanya sedikit ditanami salak. *Ledok Gimbal*, sesuai dengan namanya, tanah ini berada di ledok sungai Krasak - Gimbal. Tumbuhan

yang ada di lokasi ini kebanyakan adalah bambu, sedikit lahan salak, tanaman keras seperti mahoni, nangka dan sengon. Lahan Brubuhan berada di atas dusun Kaliurang utara dan dusun Sumberejo, bekas dari lokasi desa rubuhan. Lahan di kapling-kapling dan dijual ke penduduk di desa Kaliurang. Di lahan ini tumbuh subur Kaliandra, Bambu dan rumput untuk pakan ternak. Persentase ketiganya menempati lahan yang paling besar di lahan bekas Brubuhan. Selain itu ada juga beberapa pemilik lahan yang kesemuanya warga desa aliurang yang mencoba menanam lahan Brubuhan Sengon, Mahoni, Jati, serta tanaman komoditas seperti Kopi dan Vanili. Sedikit pula daerah ini ditanami salak karena tidak adanya pengairan yang maksimal. Berdasar keterangan beberapa warga, tanah di daerah bekas Brubuhan ini sebenarnya sangat subur, tanaman apapun bisa tumbuh dengan baik jika ada pengairan yang baik pula. Karena tidak ada air yang menyuplai daerah ini maka ketika akan ngoncori lahan di air harus diambil dengan 2 diesel yang memompa air dari sungai bebeng. Ada beberapa program yang masuk di daerah ini, antara lain penanaman di DAS kali krasak dan kali Bebeng, penghijauan dan beberapa program pemerintah yang lain yang terkait dengan penghijauan.

Sementara itu, lahan *tegal permen* berada di selatan dusun Sumberejo, lokasi lahan ini tidak mendapatkan irigasi sehingga hanya ditanami tanaman keras seperti mahoni, sengon, nangka. Di lahan ini hanya bisa tumbuh rumput untuk pakan ternak penduduk. Sedangkan Tegal Weru berada di sebelah utara dusun Kaliurang Utara, sebelum Brubuhan, di antara “watu gede” (sebuah batu besar yang berada di ujung dusun dan oleh sebagian orang dikeramatkan) sampai sabodam 2. Lokasi ini bekas dari pasar Tegal Weru. Banyak tumbuh Kaliandra, rumput untuk pakan ternak, Salak, Jagung, Cabe dan sengon. Lokasi ini ada saluran airnya namun tertutup sejak jebolnya dam 2 dan salurannya tidak berfungsi lagi.

Dari paparan sebelumnya, kita bisa menafsirkan bahwa “merawat salak” adalah praktik yang disebut oleh ahli antropologi ekologi, Tim Ingold (2000:77), sebagai “menumbuhkan”, yang bisa dikontraskan dengan praktik lainnya seperti “memproduksi” dan “mencari”. Dalam hal ini, kerja petani salak bukanlah “memproduksi” buah salak, dalam pengertian menggunakan teknologi (mekanik

dan kimiawi) dan melibatkan kerja dan pengetahuan yang intensif untuk ‘mengeksplorasi’ alam, akan tetapi “mengabdikan” untuk mengatur kondisi alam tertentu (jenis tanah, ketersediaan air, cuaca) bagi perkembangan tanaman salak dalam bentuknya yang khusus dan karakteristik yang khas. Dalam hal ini, ‘merawat salak’ mirip dengan praktik mengasuh anak.

Tabel 4.6
Jenis Usaha Tani dalam Relung Kearifan Ekologis di Lereng Merapi

Penghidupan	Praktik	Persepsi/pengetahuan terhadap lingkungan	Hubungan dengan Merapi
Menanam dan Merawat Salak	Menumbuhkan	Manusia, tanaman, dan lingkungan harus selaras dan saling ketergantungan	Merapi menyediakan jenis tanah yang cocok, iklim, dan air.
Memelihara Sapi	Menumbuhkan	Manusia, hewan, dan tanaman, lingkungan hidup selaras.	Merapi menyediakan lahan untuk pakan ternak
Menambang Pasir	Mencari	Alam menghasilkan sumberdaya yang berlimpah dan ‘seolah tak bertuan’ (milik publik), manusia tinggal mencarinya tetapi harus bersaing dengan yang lain. Bisa terjadi konflik dan kerusakan lingkungan.	Merapi menyediakan pasir yang berlimpah.
Menanam Sayur	Memproduksi	Alam/lingkungan adalah bahan baku yang harus diolah dengan teknik dan teknologi tertentu yang kadang sangat intensif untuk menghasilkan hasil yang optimal	Iklim pegunungan cocok untuk tanaman Sayuran, tetapi tidak khas Merapi.

Dengan kata lain, ketika orang Kaliurang Utara “merawat salak”, ia tengah mengikuti kondisi tertentu: jenis tanah, ketersediaan air, lokasi, dan lain lain. Upaya atau input lain berupa; tenaga, waktu, teknologi, teknik penanaman, pupuk dan obat-obatan tidak dilakukan secara intensif, karena tanaman salak ‘bisa tetap tumbuh dan berbuah’. Perawatan “hanya” untuk menjamin kualitas dan kuantitas buah salak. Merawat salak menjadi lebih tergantung pada kondisi alam daripada “input” dari manusia dan teknologi. Orang Kaliurang Utara bisa memanfaatkan “input” yang tersedia di rumah tangga dan sekitarnya, seperti: tenaga kerja bisa dipenuhi oleh anggota keluarga dan pupuk bisa dipenuhi sendiri

atau dengan membeli dari wilayah sekitar Merapi yang memelihara banyak sapi, seperti: Turgo, sehingga membangun “jaringan antar desa atau dusun di Merapi”.

Dengan kata lain, merawat salak bias menjamin kelangsungan penghidupan atau penghasilan orang Kaliurang Utara, dan sekaligus secara “ekologis” membuat orang Kaliurang Utara ‘tergantung’ pada lingkungan sekitar Merapi. Untuk bisa hidup dengan layak, mereka harus hidup dan “menghidupi” lereng Merapi dengan menanam salak.

“Menghidupi”, atau “dwelling” mengacu pada perspektif yang dipakai oleh Tim Ingold (2000a dan 2010:10) adalah bagaimana bentuk-bentuk kehidupan yang dibangun manusia, baik itu di atas bumi (misalnya: menanam salak) atau imajinasi (mitos, cerita, dll) berkembang bersama-sama dengan kondisi kekinian dari aktivitas yang digeluti dalam konteks relasional yang khusus dengan lingkungan sekitar mereka, dalam hal ini, lereng Merapi.

4.4.8 Mengerem Ekspansi Monokropping Salak menuju Kearifan Ekologis Pasca Erupsi Merapi 2010

Salak telah menjadi bagian sentral dalam kehidupan petani di lereng barat dan barat daya Merapi. Tanpa salak orang Merapi terasa hidup dalam kemiskinan. Akibatnya begitu banyak orang beralih dari tanaman pangan ke salak dan gejala itu tidak hanya terjadi di lereng Merapi tetapi di beberapa wilayah seperti di Banjarnegara. Namun demikian, ekspansi usaha tani salak itu justru memerosotkan supremasi usaha tani ini sendiri. Orang Kaliurang merasakan adanya gejala tersebut karena harga salak terus merosot. Sementara itu mereka merasakan bahwa salak ternyata merupakan tanaman yang rentan dari bahaya erupsi Merapi. Ketika abu dari erupsi Merapi tahun 2010 merusak hampir seluruh tanaman salak, orang Kaliurang Utara mulai kembali belajar dan memahami bahwa mengganti sebagian besar tanaman menjadi salak membuat kehidupan mereka di lereng Merapi lebih rentan dan terancam.

Pak Dono, memberikan istilah bahwa setelah erupsi Merapi 2010, salak telah jadi ‘kanibalis’; ia memakan yang ‘manusia telah menanam dan merawatnya’ dalam pengertian sebagai berikut:

Pertama, ketika terjadi erupsi yang menghancurkan hampir seluruh tanaman salak, orang Kaliurang tidak memiliki cadangan tanaman lain, baik untuk dikonsumsi atau dibudidayakan. Mereka saat ini mulai menandai tanaman lain yang bisa ditanam di lahan salak untuk melindungi terjangan abu; seperti pohon manggis dan umbi-umbian. Mereka mulai sadar untuk tidak menjadikan seluruh lahan mereka menjadi kebun salak, paling tidak sepertiganya untuk budidaya tanaman lain.

Kedua, salak rakus terhadap air, sehingga mematikan sumber-sumber mata air. Ke depan mereka akan menghadapi ancaman kekeringan. Ketiga, Anak-anak muda menjadi tidak lagi tahu jenis-jenis tanaman lain, terutama tanaman lokal, karena semua sudah diganti salak. Mereka juga jadi tidak mempunyai kemampuan bertani, karena menanam dan merawat salak tidak terlalu mensyaratkan kemampuan bertani yang maksimal. Selain itu, anak-anak muda yang lahir pada masa kejayaan salak (tahun 90an) malas bekerja, karena mereka biasa mendapatkan uang dan fasilitas dari orang tuanya dari hasil salak.

Keempat, karena inflasi, harga salak tidak setinggi dulu, karena biaya hidup meningkat. Meskipun menanam salak masih menguntungkan, tetapi penghasilan mereka tidak sebesar dulu. Dengan demikian, bisa disimpulkan, untuk bisa mendapatkan penghidupan dari salak dan bisa tetap ‘menghidupi’ wilayah lereng Merapi, orang-orang Kaliurang Utara mulai kembali menyadari pentingnya menyelaraskan “meningkatkan penghidupan” dengan memelihara kehidupan (tanaman, hewan, dan air) yang ‘tersedia’ di lereng Merapi, sehingga mereka bisa terus ‘menghidupi’ Merapi.

Perubahan strategi monokroping salak menjadi multikroping salak di atas terjadi karena adanya konsep keseimbangan lingkungan. Diversifikasi tanaman menjadi strategi yang jitu untuk menjamin keamanan subsistensi dan ekologis. Hal ini sudah dipraktekkan oleh orang Merapi generasi tua. Dengan demikian, erupsi Merapi memberikan pembelajaran bagi orang Kaliurang Utara dan para petani untuk tidak tergiur oleh permintaan pasar saja tetapi juga harus mempertimbangkan keseimbangan ekologis agar usaha taninya justru lebih berkelanjutan.

4.5 Ekonomi Tembakau

4.5.1 Pendahuluan

Kawasan Rawan Bencana (KRB) III dan II yang secara topografis berada di dataran tinggi sekitar Gunung Merapi merupakan daerah di mana tanaman tembakau (*Nicotiana tabacum*) dibudidayakan. Dengan curah hujan rata-rata di atas 2500 mm/tahun, Kabupaten Klaten (Kecamatan Kemalang), Kabupaten Boyolali (Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Selo), dan Kabupaten Magelang (Kecamatan Dukun) menjadi lahan yang cocok untuk tanaman yang membutuhkan hujan rata-rata 1.500-3.500 mm/tahun ini. Kondisi ini menjadi ideal karena tanaman tembakau pada umumnya tidak menghendaki iklim yang kering ataupun iklim yang sangat basah. Angin kencang yang sering melanda lokasi tanaman tembakau dapat merobohkan tanaman dan juga berpengaruh terhadap mengering dan mengerasnya tanah yang dapat menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen di dalam tanah.

Dengan persentase penggunaan lahan yang signifikan terhadap keseluruhan lahan pertanian, nampak bahwa tembakau menempati nilai penting untuk masyarakat di mana tanaman ini dibudidayakan. Beberapa dusun di Boyolali dan Klaten bahkan menunjukkan angka di atas 90 persen rumah tangga yang terlibat dalam ekonomi tembakau. Tidak mengherankan jika setiap Agustus hingga September adalah masa di mana tanaman tembakau dengan daunnya yang berukuran lebar yang siap dipanen menghampar di hampir seluruh lanskap dusun-dusun ini. Namun demikian, di samping impresi yang optimistik tersebut, tanaman tembakau tidak serta-merta memberikan keuntungan yang dominan bagi perekonomian masyarakat setempat dibandingkan dengan komoditas pertanian ataupun ekonomi lainnya. Sebaliknya, adalah para perantara perdagangan tembakau yang membentang dari petani hingga pabrik rokok menjadi aktor utama dalam meraih keuntungan dari budidaya tanaman ini. Kebertahanan petani pada tembakau sebenarnya menunjukkan strategi adaptasi masyarakat lokal dalam memanfaatkan berbagai pilihan ekonomi dan sumber daya yang tersedia demi mempertahankan eksistensi mereka dalam ekologi Merapi yang rentan terhadap

proses kebencanaan. Ekonomi tembakau, oleh karenanya, merupakan respon rasional terhadap kondisi ekologi yang tidak memberikan keleluasaan dalam memilih hanya satu sektor ekonomi yang benar-benar dapat menjamin pemenuhan subsistensi dan menopang gaya hidup masa kini.

Bagian ini akan membahas proses budidaya tembakau mulai dari tahap produksi hingga tahap perdagangan untuk memberikan gambaran mengenai proses adaptasi ekologi dan seberapa besar upaya yang dilakukan petani. Dari situ pula maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana keuntungan ekonomi yang diperoleh petani jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh aktor non-petani dalam mata rantai perdagangan tembakau. Pola konsumsi dalam pemanfaatan keuntungan dari komoditas ini juga akan diperhatikan untuk memberikan gambaran dampak sosio-kultural yang ditimbulkan oleh tembakau. Dampak inilah yang diharapkan mampu menjelaskan budidaya ini sebagai salah satu pilihan strategis penduduk di seputar lereng Merapi meskipun secara finansial mereka bukanlah penerima manfaat terbesar dari keseluruhan aktivitas perekonomian tembakau.

4.5.2 Produksi

Dalam istilah agrobotani, tembakau termasuk tumbuhan atau tanaman semusim (*annual plant*), yang diartikan sebagai tumbuhan yang dapat dipanen hasilnya dalam satu musim tanam atau tumbuhan yang menyelesaikan seluruh siklus hidupnya dalam rentang setahun. Dengan siklus tanam yang tidak melebihi enam bulan antara Februari atau Maret hingga Agustus atau September setiap tahunnya, saat curah hujan berkurang dan cenderung kering, budidaya tembakau tidak membutuhkan lahan yang sepenuhnya diperuntukkan untuk tanaman ini sepanjang tahun. Setelah panen, saat memasuki musim penghujan, petani dimungkinkan untuk membudidayakan tanaman lain serupa jagung dan sayur-sayuran yang biasanya membutuhkan banyak air demi menambah nilai ekonomis lahan.

Dengan sistem pertanian bergilir seperti ini, maka tidak dapat dikatakan bahwa persentase pemanfaatan lahan untuk budidaya tembakau tetap sepanjang

tahun. Bahkan saat musim tanam tembakau, masih pula dimungkinkan untuk menanam secara tumpang sari (misalnya, sayuran loncang) sepanjang tidak menghalangi tembakau memperoleh sinar matahari yang cukup.

Tabel 4.7
Persentase Lahan Untuk Budidaya Tembakau
Terhadap Lahan Pertanian di Boyolali, Klaten, dan Magelang 2012

Dusun	Kecamatan	Kabupaten	Luas Lahan Tembakau (Ha)	Luas Keseluruhan Lahan (Ha)	Persen (%)
Karangsari	Cepogo	Boyolali	11	22	50
Kujon	Cepogo	Boyolali	90,2	210	42,95
Klakah Tengah	Selo	Boyolali	42	93	45,16
Ngablak	Selo	Boyolali	20	26	76,9
Jamuran	Kemalang	Klaten	32	105	30,47
Malangsari	Kemalang	Klaten	8	88	9,09
Panggang	Kemalang	Klaten	4	40	10
Kaligentong	Kemalang	Klaten	7	70	10
Segadung	Kemalang	Klaten	19,5	130	15
Babadan Bawah	Dukun	Magelang	15	65	23,07

Sumber: Data Primer 2012

Secara umum, luas lahan budidaya tembakau pada musim tanam dibandingkan dengan luas keseluruhan pertanian di kesepuluh dusun bersangkutan berada pada kisaran antara 10 persen hingga 76 persen. Persentase tertinggi ditemukan di Kecamatan Selo dengan Dusun Ngablak (76,9 persen) dan Klakah Tengah (45,16 persen) serta Kecamatan Cepogo dengan Dusun Karangsari (50 persen). Baik Selo maupun Cepogo merupakan dua kecamatan terpenting di Kabupaten Boyolali dalam produksi komoditas ini. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa Kecamatan Selo menempati peringkat pertama dengan 1.514.700 kg, sementara Kecamatan Cepogo berada pada urutan ketiga dengan 578.850 kg dalam produksi tembakau pada 2010.

PRODUKSI TEMBAKAU DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2010

Kecamatan (1)	Tembakau	
	Luas (Ha) (8)	Produksi (Kg) (9)
01. Selo	1.836	1.514.700
02. Ampel	830	435.750
03. Cepogo	1.135	576.850
04. Musuk	380	361.000
05. Boyolali	75	58.500
06. Mojosongo	77	71.480
07. Teras	120	172.800
08. Sawit	484	609.840
09. Banyudono	124	141.360
10. Sambri	-	-
11. Ngemplak	-	-
12. Nogosari	-	-
13. Simo	-	-
14. Karanggede	-	-
15. Klego	-	-
16. Andong	-	-
17. Kemusu	-	-
18. Wonosegoro	-	-
19. Juwangi	135	40.500
Jumlah	5.196	3.984.780
2009	2.673,50	4.031.484
2008	2.215,10	1.808.380
2007	2.345,00	1.989.960
2006	1.026,50	1.039.540
2005	2.884,20	1.819.299

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Boyolali

Ujud Produksi Tembakau, Kencur : Rimpang Basah, Jahe : Rimpang Basah

Sementara, Dusun Jamuran di Kecamatan Kemalang menjadi dusun dengan pemanfaatan lahan untuk budidaya tembakau terbesar dibanding dusun Klaten lainnya yang diteliti. Menurut pengakuan kepala dusun setempat, setiap keluarga mengalokasikan rata-rata $\frac{1}{4}$ hektar dari luas lahan mereka yang berkisar antara setengah hingga satu hektar. Di sini tembakau umumnya ditanam di pekarangan di sekitar rumah. Ini menjadi bagian dari signifikansi tembakau di Kabupaten Klaten yang dikenal dengan label sebagai barometer perkebunan tembakau di Jawa Tengah karena mampu memproduksi lima jenis tembakau yang tidak semuanya dapat dibudidayakan di daerah lain (Klatenonline.com, 2009). Bertemunya iklim yang ideal dengan kondisi tanah yang gembur dianggap menjadi kondisi yang memungkinkannya.

4.5.3 Budidaya Tembakau dan Adaptasi Ekologi

Petani menggunakan kalender Gregorian, dan bukan perhitungan Jawa yang disebut *mangsa*, untuk menentukan saat dimulainya musim tanam. Masa antara tanggal 25 Februari sampai akhir Maret merupakan musim tanam tembakau yang paling baik di Klaten. Penentuan masa tanam merupakan siasat petani untuk mengatasi keterbatasan persediaan air lokal dengan memanfaatkan siklus hujan untuk mengairi tanaman. Curah hujan yang masih relatif tinggi pada masa ini dianggap baik untuk memenuhi kebutuhan tembakau pada masa awal tumbuh yang memang memerlukan cukup air. Adaptasi terhadap siklus hujan ini pula yang menyebabkan tembakau di daerah ini hanya ditanam satu kali dalam satu tahun. Masa antara Februari dan Maret tersebut harus sudah termasuk *nyulami*, yakni mengganti bibit-bibit yang gagal tumbuh atau mati karena faktor kualitas bibit dan tanah. Di samping itu, masa tanam juga disesuaikan dengan pasar tembakau. Dengan masa tanam seperti ini, tembakau Kemalang akan memasuki masa panen pada bulan Agustus, yang dikenal dengan *mangsa karo*. Tembakau yang ditanam lebih dari bulan Maret akan dianggap “ketinggalan pasar” karena belum tua. Hasil panen yang dijual pada sebelum maupun sesudah Agustus biasanya kurang laku. Sebagai perbandingan, di daerah Manisrenggo dan

sekitarnya, tembakau laku di pasaran pada bulan September, sebulan setelah masa panen di kawasan Dusun III. Masa panen di Manisrenggo adalah *mangsa kapat*.

Pengolahan lahan yang paling baik di daerah Jamuran adalah tanah dicangkul terlebih dahulu sebelum dibuat berlarik (*dikentheng*) agar membentuk garis lurus dan rapi. Di atas lahan yang telah dilarik kemudian dibuatkan lubang (*dicemplong*) dengan cangkul untuk penanaman bibit yang berjarak antara 80 cm hingga satu meter. Larik (*kentheng*) dilakukan sedikitnya oleh dua orang; satu bertugas mengukur dan yang lain menandai tanah yang akan dilubangi. Sebelum dilakukan penanaman bibit, pemupukan dengan pupuk kandang dilakukan pada lubang-lubang yang telah jadi. Setiap satu pokok (bibit) akan menerima kira-kira sebanyak setengah sampai satu raupan tangan pupuk kandang, tergantung ketersediaan pupuk yang dimiliki petani berdasarkan kepemilikan sapi. Setelah diberi pupuk, lubang ditutup dan dibiarkan kurang lebih selama tiga hari sebelum siap untuk ditanami bibit.

Penyiraman dilakukan sepuluh (10) hari setelah penanaman saat bibit menyesuaikan dengan kondisi tanah. Pada usia ini, bibit tembakau yang baik akan tumbuh dan yang tidak baik akan mati. Jika terkena sinar matahari pada masa penyesuaian, bibit akan layu dan mati. Penyiraman dilakukan sekaligus dengan mencampur pupuk buatan yang dilarutkan dalam air. Urine sapi yang dicampur dengan tetes tebu juga dapat dijadikan pupuk organik sebagai pengganti pupuk buatan. Penyiraman menggunakan urine sapi campuran dilakukan pada saat umur tembakau memasuki hari ketujuh. Percampurannya adalah satu liter tetes tebu berbanding 20 liter urine sapi, yang kemudian disimpan selama dua minggu dalam jerigen tertutup. Setiap tiga hari sekali tutup jerigen dibuka untuk menghilangkan gas yang dihasilkan dari larutan tadi untuk menghindari tekanan gas yang dapat meledakkan jerigen. Itu sebabnya membuka tutup jerigen harus dilakukan dengan perlahan agar larutan tidak muncrat. Setelah dua minggu larutan sudah dapat digunakan untuk memupuk. Untuk pemupukan, setiap satu liter larutan yang dihasilkan dicampur dengan 20 liter air. Petani dapat membeli tetes tebu di toko-toko pertanian dengan harga Rp 5.000,00 per liter. Namun demikian, pupuk campuran dari urine ini belum banyak dilakukan oleh para petani. Pak Mul

Srikoyo adalah salah satu dari sedikit yang telah mempraktekkannya. Setelah 1,5-2 bulan usia tanam, proses selanjutnya adalah menggemburkan tanah (*dangir*) dan pemupukan dengan pupuk kandang yang diberikan melingkari batang tembakau. Selama dua bulan sejak penanaman, tanaman diairi setiap satu minggu sekali. Setelah masa dua bulan, tembakau dianggap telah cukup kuat untuk mendapatkan banyak sinar matahari. Tembakau yang ditanam di musim hujan justru tidak akan tumbuh dengan maksimal. Tembakau hanya membutuhkan air pada awal masa tumbuh saja. Ketidacukupan pemenuhan air pada awal masa tumbuh menyebabkan daun tembakau dianggap kurang sehat karena memiliki bobot yang rendah (*enteng*).

Dengan kondisi yang rawan air bersih seperti yang ada di Dusun III, maka ketika kemarau panjang banyak petani yang tidak dapat memenuhi delapan kali penyiraman. Untuk menyiasati kekurangan air pada saat kemarau panjang sementara kualitas daun tetap baik, umumnya petani memperbanyak penggunaan pupuk urea. Selain itu, kotoran ayam juga dapat digunakan sebagai pupuk. Kotoran ayam yang dibeli dari peternak ayam tidak lagi murni alami akibat makanan yang dikonsumsi ayam peternak juga mengandung bahan-bahan kimia. Tanah yang dipupuk dengan kotoran ayam akan menghasilkan tanaman tembakau yang subur. Namun, sebaliknya, tanahnya menjadi keras, tidak subur, dan sulit ditanami lagi. Tanah yang demikian dinamakan “tanah mati”. Keadaan demikian diperburuk lagi dengan urea dalam jumlah banyak. Petani memiliki pengetahuan bahwa tanah dianggap “mati” setelah tiga kali masa tanam.

Untuk memulihkan kualitas tanah yang berkurang, petani menanam tanaman keras sebagai tanama sela (tumpang sari) seperti akasia (*Acacia villosa*) atau ubi jalar (*Ipomea batatas*) sekurangnya selama dua tahun. Dengan ubi jalar, lahan tidak dapat ditanami tembakau minimal selama dua tahun masa pemulihan. Umur tumbuh ubi jalar umumnya adalah satu tahun. Setelah itu pola penanaman menggunakan tanaman tumpang sari, khususnya jagung (*Zea mays*). Ubi jalar diyakini merupakan tanaman yang paling baik untuk pemulihan kualitas tanah yang mati. Hal ini karena ubi jalar mempunyai batang yang menjalar atau merambat di permukaan tanah dan karena itu daun dan batangnya menutupi

seluruh permukaan tanah tempat ia berkembang. Akibatnya tanah tidak akan ditumbuhi rumput liar yang lebat dan sering menyedot nutrisi tanah sehingga tanah mati atau kehilangan kesuburannya.

Sementara, pemulihan kualitas tanah dengan akasia memakan waktu lebih lama yakni setidaknya lima tahun. Penggunaan lahan dilakukan silih berganti. Misalnya, lahan yang ditanami akasia (*pedhut*) juga ditanami rumput-rumput kecil seperti rumput *grepak* (*Polytoca bracteata*). Rumput yang tumbuh di bawah tanaman akasia tidak dapat tumbuh maksimal karena tidak mendapatkan cukup sinar matahari. Namun tanah justru menjadi subur dan gembur. Sesudah akasia ditebang lahan sudah siap ditanami tembakau kembali tanpa perlu dicangkuli terlebih dahulu. Lahan hanya perlu dibersihkan dari rumput dan dibuat berlajur sebelum diberi pupuk. Tanah yang terbentuk dengan cara ini dilihat lebih subur walaupun tidak dicangkul karena tanah tidak terkontaminasi pupuk buatan.

Pupuk buatan atau pupuk kimia yang berlebihan diyakini petani dapat merusak kondisi tanah. Hal ini karena pupuk ini sifatnya tidak memelihara dan mereproduksi hara tanah sebagaimana dilakukan oleh pupuk organik. Sebaliknya pupuk buatan justru hanya menyedot hara tanah semaksimal mungkin. Pak Suwarno, seorang petani berusia separuh baya di Dusun Jamuran (Kemalang, Klaten) mengatakan, “*Siti teng mriki niki nek kekathahan pupuk pabrik, sitine pejah. Tiyang mriki niki pupuk pabrik ming dingo syarat.*” Pupuk kimia buatan pabrik hanya sedikit diberikan pada tanaman tembakau. “*Umpamane janjane pupuk e pabrik ki 10 gram, mriki namung nganggo 2 gram. Mung sa prolimane,*” tambahnya. Pupuk kimia yang biasanya dibeli warga adalah jenis urea, ZA, dan Phonskha. Urea lebih sering dipakai dibanding dua pupuk lainnya karena harganya yang paling murah.

Upaya memperbaiki kualitas tanaman dilakukan dengan mengaplikasikan teknologi pertanian lainnya. Petani Dusun Jamuran, misalnya, baru pada tahun 2011 menggunakan bibit tembakau yang dikemas dalam *polybag* karena bibit sebelumnya diserang oleh hama keong kecil (*janggal*) yang memakan daun-daun tembakau. Pilihan ini diambil petani sekalipun harga eceran satu bibit dalam *polybag* yang dibeli dari pedagang (*bakul*) keliling mencapai Rp75,00. Selain itu,

untuk mengatasi hama keong, masyarakat menggunakan Lanet, yakni obat bubuk yang pemberiannya dicampur dengan nasi. Campuran ini diletakkan di atas pelepah pisang yang masih basah dan kemudian ditangkupkan. Nasi yang sudah tercampur bahan kimia ini lalu diletakkan pada salah satu pohon tembakau yang dihinggapi paling banyak keong. Keong yang keracunan campuran ini akan mati kering. Sementara, untuk membasmi hama *walang*, petani menggunakan insektisida dengan merek *Urakron* dan *Deaxenon*. Khusus untuk mengatasi hama ulat, petani memiliki pengetahuan dengan menggunakan bahan-bahan alami dari daun *mind* (*Melia azedarach*), *sorotan*, *jipang* (*Sechium edule*), dan *jenu* (*Derris elliptica (roxb.)*) yang dihaluskan dan dicampur dengan sedikit air untuk kemudian diendapkan terlebih dahulu selama satu hari. Aplikasi dilakukan dengan mencampur ramuan dengan air sebelum disiramkan pada tanaman. Sekalipun ramuan ini efektif mengusir *walang* dan ulat, namun petani merasa pembuatannya tidak praktis. Ramuan pembasmi hama ini disemprotkan pada tanaman yang telah melampaui usia dua bulan. Sedangkan untuk menangkal jamur putih yang sering menyerang daun tembakau petani memakai sari parutan lengkuas (*Alpinia galanga*) yang dicampur dengan air. Sebenarnya campuran sari lengkuas dengan air disemprotkan pada setiap lembar daun sebelum hama jamur menyerang. Namun, upaya pencegahan jarang dilakukan petani. Pengakuan sebagian petani adalah: “*Obat wereng kui yo nek wis ono werenge, hla nek ngene iki ngobati apa?*” (“Obat hama wereng itu ya diberikan ketika ada werengnya, kalau tidak ada werengnya lantas mau mengobati apa?”).

Setelah pemupukan dan penyiraman, masa selanjutnya adalah menunggu daun-daun menua. *Ngrempel* adalah membuang tunas-tunas daun (*cekle*) yang tumbuh di sela-sela daun utama dan mengurangi bobot serta kesuburan daun utama. Hal yang dilakukan setiap sepuluh hari sekali ini dilakukan agar daun utama dapat tumbuh besar dan lebar. Selain itu, ada pula pekerjaan *munggel*, yakni memangkas bagian atas batang pohon tembakau yang sudah berbunga dan membuang empat daun di bawah bunga agar lebar daun pada setiap pohon rata-rata berukuran sama. Jika *munggel* hanya dilakukan dengan membuang bunga

(*pendul*) saja, maka daun bagian atas akan tumbuh lebih kecil dari daun-daun di bawahnya. Satu pohon dengan ukuran rata-rata daun yang lebar dianggap sebagai tembakau yang sehat. *Munggel* juga dilakukan ketika tembakau belum berbunga demi mempercepat penuaan. Biasanya ini dilakukan jika petani ingin segera memanen tembakaunya. Hasilnya adalah jumlah lembaran daun tembakau lebih sedikit dibandingkan dengan *munggel* ketika sudah tumbuh bunga. Tahap memangkas bunga dan daun ini hanya khas ditemukan pada budidaya tembakau di dataran tinggi seperti di KRB II dan III, dan bukan di dataran rendah seperti di Kecamatan Manisrenggo (Klaten) dan sekitarnya.

Saat masa panen, tidak semua lembar daun tembakau dipetik dalam waktu yang bersamaan. Tiga hingga empat daun terbawah (*gewol*) akan lebih dulu dipanen. *Gewol* dipanen ketika sudah ada pembeli yang berkeliling kampung mencari daun tembakau dengan kualitas rendah ini. *Gewol* dipanen saat tembakau berusia setidaknya dua bulan. Tiga hingga empat lembar daun di atasnya disebut berkualitas “BK”. Daun dengan kualitas BK adalah daun yang tidak terpapar langsung dengan tanah. Sementara, sisa daun paling atas setelah pemangkasan (*munggel*) yang disebut *rampasan* dianggap memiliki kualitas unggul. Satu batang tanaman tembakau biasanya menghasilkan rata-rata 10-14 lembar daun *rampasan*. Banyaknya daun sangat tergantung dengan tindakan *munggel*. Kualitas tanah dan banyaknya sinar matahari juga berpengaruh. Tanaman tembakau yang baik adalah jika terpapar banyak pada sinar matahari. Petani biasanya tidak menanam tanaman keras lain yang berpotensi menghalangi sinar matahari jatuh ke lahan tembakau. Tembakau dianggap memiliki kualitas “super” jika berdaun lebar namun berbatang kecil. Jenis tembakau yang dikenal dengan sebutan *gumleng* biasanya lebih disukai petani karena memiliki bobot yang berat. Daun tembakau dianggap siap panen saat usia tanam kurang lebih mencapai lima bulan. Dalam satu petak lahan, daun tembakau tidak mengalami penuaan secara bersamaan. Tembakau yang tumbuh pada bagian tanah yang subur dan cukup sinar matahari akan lebih dulu menua dan menguning (*blorok*).

4.5.4 Tembakau dan Peternakan Sapi

Ada hubungan simbiotik antara budidaya tembakau di lereng Merapi dengan peternakan sapi. Peter Bombard (1994) mencatat bahwa penggunaan pupuk kandang di Jawa ada kaitannya dengan meluasnya tanaman tembakau, dan pada abad 18 orang pegunungan di daerah Wonosobo memanfaatkan kotoran sapi untuk pupuk tembau. Di Gunung Merapi gejala serupa bisa disimak dari adanya hubungan antara produsen tembakau dengan peternak sapi. Di hampir semua desa umumnya kalau petani bercocok tanam tembakau maka mereka berusaha untuk memelihara ternak sapi. Hal ini karena sapi diharapkan bisa berfungsi ganda. Pertama sebagai ternak untuk menarik bajak, dan kedua menghasilkan kotoran untuk pupuk organik. Penggunaan pupuk kandang dipahami oleh petani sebagai syarat mutlak agar tanaman tumbuh subur secara organik, dan menjawab kondisi lahan yang sebenarnya dalam kacamata petani tidak subur. Mereka menanam tembakau karena tembakau masih mau tumbuh di lahan kering yang tidak subur sama sekali dan agar bisa memperoleh nutrisi tambahan maka dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang.

Pada waktu tanaman tembakau tumbuh yang jatuh pada musim kemarau, petani bekerja ekstra, di satu sisi membersihkan rumput di kebun agar tidak ada gulma, dan rumput ini dipakai untuk pakan ternak, di sisi lain petani mencarikan pakan rumput di kebun atau hutan karena cadangan rumput liar di kebun tidak tersedia. Baru pada musim hujan petani kelebihan pakan dan pada musim inilah petani sepertinya memestakan sapinya.

Dengan memperoleh pakan yang melimpah pada musim hujan, diharapkan sapi juga menghasilkan pupuk yang banyak. Agar menjadi pupuk yang baik, kotoran sapi diproses dikandang dengan cara ditumpuk, dibalik berulang ulang selama beberapa bulan kemudian dikeringkan. Setelah kering lalu ditabur ke kebun sebelum tembakau ditanam. Dalam kacamata petani, idealnya setiap kali musim tanam dilakukan penaburan pupuk, tetapi rata-rata petani hanya memberikan satu kali selama dua tahun karena kekurangan tenaga kerja dan ternak. Oleh karena ternak begitu penting menjamin kesuksesan usaha tani tembakau, petani akan berusaha untuk menggaduh ternak kawan, tetangga atau

orang kaya. Penggaduhan juga sebagai cara agar mereka kelak mempunyai sapi dari bagi hasilnya.

Tabel 4.8
Jumlah Petani dan Jumlah Kepala Keluarga Peternak Sapi

Dusun	Kecamatan	Kabupaten	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah KK Petani Tembakau (KK)	Jumlah KK Peternak Sapi
Karangsari	Cepogo	Boyolali	320	320	320
Kujon	Cepogo	Boyolali	308	308	308
Klakah Tengah	Selo	Boyolali	310	155	202
Ngablak	Selo	Boyolali	247	183	247
Jamuran	Kemalang	Klaten	231	231	231
Malangsari	Kemalang	Klaten	345	NA	345
Panggung	Kemalang	Klaten	191	NA	191
Kaligentong	Kemalang	Klaten	463	NA	463
Segadung	Kemalang	Klaten	418	63	378
Babadan Bawah	Dukun	Magelang	199	120	139

Sumber: Data Primer 2011

4.5.5 Perdagangan Tembakau

Tembakau Merapi ternyata sangat dicari oleh produsen rokok kretek. Meskipun bukan tembakau nomor satu seperti tembakau di daerah Temanggung dan Wonsobo, tembakau Merapi sudah memenuhi selera pasar. Hal ini terbukti dari munculnya beberapa perusahaan rokok yang mengambil produk tembakau dari berbagai dusun di Merapi. Perusahaan rokok itu tidak langsung membeli produk dari petani, melainkan melalui pedagang perantara yang ditunjuk atau yang dipercaya sebagai jaringannya.

Para pedagang perantara ini dikenal dengan juragan dan mereka pun melakukan jejaring dengan pedagang lokal yang sering disebut makelar agar mudah untuk menghimpun informasi di lapangan dan mencari kelompok sasaran. Disebut makelar karena mereka ini tidak bermodal tetapi lebih berfungsi sebagai negosiator dan mediator antara penjual dengan pembeli.

Tabel 4.9
Nama Pabrik Rokok dan Dusun Suplayer Tembakau di Lereng Merapi

Pabrik Rokok	Nama Dusun Suplayer
PT. Gudang Garam Kediri	Klakah Tengah; Ngablak; Jamuran
PT. Sampoerna Swadaya	Klakah Tengah
PT. Jarum Kudus	Klakah Tengah; Ngablak; Jamuran
PT. Cengkeh 555 Magelang	Klakah Tengah
Perusahaan rokok di Kudus	Klakah Tengah
Perusahaan rokok lainnya	Babatan; Njrakah, Stabelan, Cepogo

Sumber: Data Primer 2011

Perdagangan tembakau di Dusun Jamuran (Kemalang, Klaten) dilakukan para juragan dari Parakan yang datang sendiri untuk membeli tembakau dari petani. Komoditas yang dibeli dari petani biasanya diangkut ke Parakan sore hari, sementara pembayaran biasanya dijanjikan dilakukan pada keesokan harinya. Tembakau dari petani dibawa ke para perajang tembakau di Parakan. Namun, kerap terjadi di mana pembayaran tidak kunjung dilakukan pada waktu yang dijanjikan dengan berbagai alasan. Biasanya, alasan yang diberikan pedagang pada petani adalah mengenai uang yang belum dibayar oleh perusahaan, dikenal dengan “PT” yang menyerap tembakau lokal ini. Petani yang tertipu lebih memilih diam, *nrimo*. Beberapa petani memang ada yang mencoba mendatangi juragan di Parakan dengan maksud ingin menagih bayaran namun tidak membuahkan hasil. Sikap *pekewuh* juga menjadi kendala petani untuk menagih uang tersebut. Bahkan, ketika juragan yang masih menunggak datang kembali ke dusun, petani tidak kuasa menolak untuk tetap menyerahkan panennya pada mereka. “*Dadi akhire kathah sing kapusan. Dugi mrika gih mboten diparingi,*” demikian pengakuan dari seorang warga yang mencoba mengingat perubahan model perdagangan tembakau di dusun ini. Warga kini memilih berdagang dengan makelar yang menjadi kepanjangan tangan para juragan. Makelar lebih dapat diterima karena umumnya mereka adalah warga setempat.

“*Nek riyin mlaku. Ning nek simbah-simbah loh, nek kula gih dereng nate. Sakniki lak nek saking petani dewe pokoke juragan teko, nek ora gawa duit ora*

diladeni. Nek kala rumiyin niku gih saking petani apa ya kena dipercaya tenan. Terus kathah sing ketipu gih.“ Ada pula pandangan yang menegaskan bahwa penggunaan makelar merupakan suatu yang sudah mentradisi. Bedanya sekarang orang menuntut agar produksi dibeli langsung tunai ini karena juragan tidak bisa dipercaya lagi karena sering menipu.

Pembeli tembakau dari Parakan memesan tembakau melalui makelarnya masing-masing yang telah diberikan uang untuk membeli komoditas dari petani. Dengan cara ini petani tetap menaruh kepercayaan pada makelar dan menjadi pelanggan. Saat ini, petani tidak lagi melepas tembakau-tembakau mereka tanpa pembayaran tunai. Sebaliknya, makelar tidak berani membeli tembakau dari petani tanpa membawa uang.

Saat musim panen, makelar membeli tembakau basah dari petani seharga Rp 7.000,00 setiap kilonya dan menjual pada pembeli di Parakan seharga Rp 8.500,00. Petani memetik sendiri daun tembakau kemudian ditimbang pada makelar. Namun, makelar, yang biasanya merupakan satu kelompok dari empat sampai enam orang, pun dapat sekaligus menjadi tenaga pemetik untuk petani. Untuk satu lahan (*seguthik*) dengan 600 batang pohon tembakau, petani memberi upah Rp 100.000,00 untuk biaya pemetikan. Di Dusun Jamuran, kelompok makelar Citro, Priyo, Lasono, Medi, dan Juwanto mendominasi pembelian tembakau dari petani. Tempat penimbangan tembakau senantiasa berpindah, tergantung pada lokasi panen. Biasanya dipilih tempat atau rumah yang dekat dengan lahan panen. Yang bertugas menimbang adalah salah seorang anggota kelompok makelar tersebut. Setelah tembakau ditimbang lalu dicatat untuk setiap hasil penimbangan.

Makelar memperoleh premi dari selisih harga jual pada pedagang dengan harga beli dari petani. Masa operasi makelar hanya terbatas pada musim panen saja. Pekerjaan ini relatif menguntungkan karena mereka hanya bermodalkan timbangan, tali rafia untuk mengikat daun-daun tembakau, buku, dan pena untuk mencatat setiap hasil penimbangan. Satu ikat daun tembakau kira-kira berbobot 2,5 kilogram. Sementara, armada untuk pengangkutan dapat berupa milik makelar sendiri maupun disediakan pihak pembeli di Parakan. Terkadang tidak

jarang pula makelar harus menyewa alat transportasi seharga Rp 600.000,00 untuk sekali kirim ke Parakan. Biaya tambahan lainnya adalah tambah uang makan dan rokok pada pengemudi dan tenaga pengangkut selama di jalan sebesar Rp 100.000,00. Kapasitas satu kali pengiriman ke Parakan bisa mencapai 1,5 sampai 2 ton. Makelar biasa mengirim tembakau sebelum pukul lima sore. Perjalanan malam ke Parakan menempuh waktu delapan jam dan kembali lagi kira-kira pukul empat pagi.

Ada juga makelar dari Tlogowatu yang punya kelompok perajang dari Boyolali. Tahun 2001/2002 tembakau Boyolali mengalami kebangkrutan, namun tahun 2004 sudah kembali merajang tembakau lagi. Kejayaan Boyolali adalah saat di mana uang sejumlah Rp 4.000.000,00 bisa untuk membeli empat *rit* tembakau seberat delapan 8 ton. Saat itu harga tembakau baru Rp 600.000,00 per kilogram. Sekali panen di daerah Sangup Boyolali, bisa mencapai Rp 40.000.000,00 karena luas lahan dan pengelolaan petani sudah maju. Jarak tanam dibuat lebih rapat. Kualitas daun besar dan bobotnya lebih berat dari tembakau Dusun III. Saat penanaman di daerah Sangup dilakukan serentak. Bila sudah ditentukan tanggalnya maka semua petani akan serentak menanam.

Di Klakah Tengah, perdagangan tembakau juga dikuasai oleh para tengkulak yang berasal dari Kota Parakan, Temanggung, Boyolali, Muntilan, Ngablak dan Klaten. Menurut para pedagang tembakau yang membeli tembakau di dusun ini, kualitas tembakau sangat baik karena dipengaruhi oleh ketinggian wilayah, hawa dan cuaca. Tidak banyak petani menjual hasil panen tembakau sendiri, mereka lebih senang menjual di tempat, tetapi bagi petani yang mempunyai mobil pribadi akan lebih sering menjual dan menyetorkan hasil panen tembakaunya langsung ke pedagang besar bahkan ke gudang tembakau di daerah Parakan, Magelang dan Muntilan karena hanya lebih tinggi sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Di Ngablak, pedagang yang masuk adalah dari Cepogo dibawa ke Kudus atau Semarang atau ada juga pedagang dari Muntilan dan dibawa ke Kudus itu yang dibuat untuk rokok pabrik namun ada juga yang diambil pedagang Solo untuk dibuat rokok *tingwe* (melinting sendiri).

4.5.6 Kesejahteraan Petani Tembakau

Tembakau telah membentuk pola perekonomian di beberapa dusun di lereng Merapi selama berabad-abad. Sekalipun ada kecenderungan jumlah dusun dan petani yang menanam tembakau berkurang, tetapi dusun-dusun yang kini bertahan dengan tembakau memperlihatkan pentingnya tanaman ini bagi kesejahteraan warganya.

Tembakau harganya fluktuatif sesuai dengan permintaan pasar dan permainan para pengusaha dengan tengkulak. Akan tetapi ketika muncul panen bagus sekitar tiga atau lima tahun sekali, dusun mengalami masa cerah karena uang sepertinya melimpah, yang bisa dipakai oleh petani untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dari membayar hutang, merenovasi rumah, membeli ternak, sampai dengan berpesta pora dengan menyelenggarakan hajatan yang besar atau dipakai untuk berjudi.

Hutang selalu dialami oleh orang desa di wilayah ekonomi tembakau yang fluktuatif. Hutang terjadi karena adanya berbagai kebutuhan yang tidak serta merta bisa ditutup dari tabungan, karena sudah habis dan harus menanti panen raya tiba. Hutang yang sering muncul adalah ketika keluarga harus melakukan tradisi sumbang menyumbang hajatan perkawinan. Dalam satu tahun bisa mengeluarkan uang yang banyak karena paling tidak satu keluarga harus mengeluarkan uang Rp. 50.000,00, dua kg gula pasir dan satu pak teh per keluarga yang menyelenggarakan hajatan. Padahal dalam satu bulan, warga biasa menyumbang sebanyak lima kali. Bahkan pada bulan Rejeb hingga Dzulhijah, dalam satu bulan akan ada belasan sumbangan. Untuk memenuhi kebutuhan menyumbang tersebut, warga akan berhutang uang, gula pasir, juga teh ke para pedagang sembako di pasar. Kemudahan untuk berhutang dimanfaatkan baik oleh warga. Sebagian besar warga kemudian akan berhutang tidak hanya untuk kebutuhan menyumbang tetapi juga untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Hutang-hutang yang sudah menumpuk di toko sembako akan dilunasi jika masa panen tembakau tiba. Ibu-ibu akan melaporkan besar hutang kepada suaminya. Suami kemudian akan memberikan uang hasil panen tembakau yang dia pegang kepada istrinya.

Keluarga-keluarga biasanya menjaga agar uang bisa dipakai untuk menopang kebutuhan konsumsi keluarga pada musim hujan sesuai panen tembakau. Mereka menanam uangnya dalam bentuk ternak. Pada musim hujan ternak akan mendapat pakan yang melimpah, tetapi pada musim kemarau berkurang sehingga ternak tambahan itu mereka jual.

Beberapa lelaki telah terbawa pada sub-kultur judi. Lelaki yang berkuasa atas uang hasil budidaya tembakau menggunakan uang untuk berjudi sehingga mereka juga terjerat hutang. Judi akan marak pada saat musim panen tembakau tiba. Suami yang memegang uang akan mendatangi rumah-rumah judi. Rumah Pak Tukinu di Grintingan merupakan salah satu rumah warga yang dijadikan tempat judi. Pemilik rumah akan mendapat *cuk*, sebagai pengganti biaya tempat. Besar *cuk* tidak ditentukan, ini hanya semacam ucapan terima kasih saja.

Bila disimak lebih lanjut, ekonomi tembakau telah membentuk pola survivalitas dan ekspansi ekonomi di Merapi. Pada keluarga petani kecil karena memiliki lahan yang sempit dan tidak memiliki ternak maka tembakau sangat penting untuk menjamin keamanan subsistensi. Rumah tangga ini biasanya hanya menanam tembakau sebanyak kurang dari 1000 batang dari tanah seluas sekitar 2.000 m². Hasil dari panen ini tidak mungkin cukup untuk menutup biaya hidup keluarga dalam satu tahun. Dengan 1000 batang pohon tembakau, jika panen berhasil hanya akan menerima uang kurang lebih Rp 2.500.000,00. Dengan uang sebanyak ini, mereka harus bisa mengatur agar bisa menopang ekonomi rumah tangganya yang bersifat subsisten. Meskipun kecil, tetapi secara kualitatif petani menghayatinya sebagai pemasukan yang terbesar dalam rumah tangganya. Tidak mungkin petani memperoleh penghasilan sebanyak itu kalau menanam tanaman pangan. Bahkan usaha ternak tidak akan mendapatkan keuntungan sebanyak itu.

Pada musim hujan rumah tangga berganti menanam tanaman sayuran atau jagung. Mereka bisa mendapat penghasilan lebih kecil lagi. Di Jarakah, misalnya petani bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 300.000,00 per bulan dari pola tanam tumpang-sari. Oleh karena hidup dalam subsistensi, keluarga petani yang tanahnya sempit cenderung mengerahkan tenaga keluarga saja guna menekan

pengeluaran dalam bercocoktanam tembakau atau sayuran. Sebaliknya, agar bisa *survive* mereka berusaha untuk ikut sebagai buruh (*glidhik*) pada keluarga pemilik lahan yang luas dengan upah Rp. 30.000,00 per hari).

Bapak Dipo Wiyono (45 tahun) adalah ilustrasi bagi profil rumah tangga yang masuk dalam kategori ini. Ia memiliki satu ekor sapi dan empat ekor kambing. Rumah tangga ini menanam sekitar 1.000 pohon tembakau dengan hasil panen tiga kwintal. Untuk menutup biaya pendidikan anaknya, kadang Pak Dipo glidik mencari pasir atau batu. Karena tidak lancar maka ia mencari sumber penghasilan yang cepat mendapatkan uang seperti glidik mengolah kotoran sapi dengan Rp. 30.000,00 per hari.

Ekonomi tembakau lebih menjamin keamanan subsistansi pada petani menengah. Mereka ini merupakan kelompok yang dominan di Dusun jamuran dan bahkan di beberapa dusun lainnya. Di jamuran mereka ini memiliki tanah sekitar 0,2 hingga 0,3 hektar dengan luas tanaman sekitar 2.000 batang tembakau. Karena masih rawan menghadapi hutang, pengolahan lahan akan dikerjakan oleh anggota rumah tangga mereka sendiri dari mencangkul hingga proses memanen.

Pada musim panen tembakau, petani menengah akan mendapatkan uang dari hasil tembakau sekitar empat juta rupiah. Menurut mereka, hasil dari tembakau tidak mampu menutup biaya hidup mereka selama setahun ke depan. Oleh karena itu, maka mereka melakukan kerja ekstra seperti juga petani kecil.

Walaupun demikian dengan pendapatan sekitar Rp 4.000.000,00 keluarga menengah sudah relatif aman dari ancaman kelaparan atau kemiskinan. Mereka ini bisa menyelenggarakan berbagai tradisi sehingga dalam istilah lokal disebutkan bahwa mereka ini bersikap *lumrah* (wajar) di masyarakat. *Lumrah* untuk tetap bisa menyumbang (uang, beras, gula, juga teh) jika ada tetangga yang mempunyai hajat. Mereka akan meminjam uang (*ngutang*) atau *ngebon* sembako di pasar. Hutang-hutang mereka akan diakumulasi selama satu tahun. Bila musim panen tembakau tiba, petani akan membayar hutang-hutang tersebut.

Berbeda dengan keluarga menengah, keluarga kaya dengan luas tanah sekitar 0,5 hingga 1 hektar paling menikmati usaha tani tembakau. Mereka bisa menanam sekitar 4.000 batang dengan penghasilan Rp 7.000.000,00. Pendapatan

bisa melejit sampai dua kali lipat ketika harga tembakau meroket di pasaran. Pengolahan lahan yang luas pada rumah tangga ini dilakukan dengan memakai tenaga *glidik*.

Petani kaya itu bisa mencapai keamanan subsistensi dari hasil produksi jagung dan sayuran ada musim hujan. Hasil usaha tembakau bisa untuk meningkatkan kualitas konsumsi, investasi di pendidikan, peternakan dan bangunan rumah. Di kebanyakan desa, keluarga ini sering menginvestasikan kekayaannya pada ternak sapi dan kambing. Sebagian ternak mereka digaduhkan sehingga menolong ekonomi tetangga yang miskin atau kawannya yang dipercaya. Mereka ini juga memiliki aset yang penting di desa dari sepeda motor sampai mobil yang bisa memperlancar mobilitas warga di desa ke kota dengan tarif murah, dan bangunan rumah yang relatif luas sehingga bisa menjadi tempat berkumpul dalam acara pertemuan keluarga. Oleh karena itu, keberadaan mereka dalam komunitas menjadi lebih disegani dan diperhitungkan sebagai tokoh masyarakat. Walau rumah tangga ini tidak selalu menduduki jabatan-jabatan administrasi di Dusun III, namun suara mereka selalu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan- keputusan penting dalam masyarakat.

4.5.7 Keberlanjutan Pertanian Tembakau

Telah berabad-abad orang Merapi menanam tembakau dan kini jumlah dusun dan petani yang menanam tembakau berkurang karena harga tembakau yang sering merosot dan tidak stabil. Kini hanya beberapa dusun saja yang menanam tembakau, dan karena berkurangnya produksi maka harga tembakau pun bisa dijaga, paling tidak harga tembakau masih memberikan peluang bagi petani untuk memperoleh keuntungan.

Lereng Merapi menjadi kawasan produsen tembakau karena petani berhasil merubah kelemahan menjadi kekuatan. Lahan kritis, tidak subur dan kering pada musim kemarau dapat disulap menjadi lahan yang produktif dan menghasilkan tembakau yang marketabel sehingga dalam bahasa lokal Merapi menjadi berkah bagi masyarakat desa. Bahkan tanaman tembakau itu sekalipun

arealnya sempit bisa menghidupi petani kecil dan miskin sehingga usaha tani tembakau bernilai bagi kehidupan mereka.

Produksi tembakau sangat tergantung dari sapi yang menghasilkan kotoran dan pupuk kadang. Oleh karena itu tembakau terintegrasi dengan usaha ternak sapi dan keberlanjutan dari ekonomi tembakau sebenarnya ditopang oleh ekonomi ternak. Ketika Merapi mengalami erupsi, maka yang harus diselamatkan adalah ternak sapi agar nantinya pemulihan ekonomi tembakau bisa berjalan secara lebih mandiri. Ketersediaan sumber daya pakan ternak ini di lereng Merapi menjadi sangat penting untuk menjamin kelangsungan usaha tembakau dan peternakan. Studi tentang komunitas peternak sapi di bagian belakang memperjelas fungsi Merapi bagi keberlanjutan usaha peternakan melalui potensi ekologi dan pengaturan sumberdaya pakan secara individual dan komunal.

4.6 Pertanian Sayur

Pertanian Sayur merupakan salah satu tanaman andalan sebagian besar masyarakat lereng Merapi, terutama di wilayah Kabupaten Magelang dan Boyolali. Dalam bagian ini akan dideskripsikan tentang sekilas sejarah, tata kelola produksi, akses warga dalam mendapatkan alat produksi, distribusi, konsumsi dan persaingan, serta kemampuan warga dalam memanfaatkan dan mendayagunakan protensi alam Merapi yang beragam. Deskripsi membuktikan bahwa masyarakat Merapi mempunyai kepentingan untuk menguasai sumberdaya alam dan memberikan kontribusi pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

4.6.1 Sejarah Perkembangan Usaha Tani Sayuran

Pada awalnya pertanian sayur di lereng Merapi merupakan bentuk pertanian sampingan di samping pertanian tanaman pangan lainnya. Pertanian dengan cara seperti ini biasanya hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pemikiran untuk memaksimalkan lahan pertanian relatif disesuaikan dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, surplus yang dihasilkan lebih diarahkan pada persediaan bahan makanan untuk kehidupan mereka selanjutnya, bukan untuk kebutuhan pasar. Keseimbangan ekologi sangat dijaga khususnya keseimbangan

antara tanaman sayur, tanaman pangan, tanaman kayu, dan penggunaan pupuk, baik pupuk kandang maupun pupuk alami dari daun. Masa *bero* (tidak menanam) juga sangat diperhitungkan dalam pola pertanian untuk menjaga keseimbangan alam dengan cara-cara lokal. Cara-cara penanamannya pun juga dilakukan secara turun temurun, misalnya orang tuanya menanam kobis maka pola pertanian tersebut akan diteruskan oleh anak keturunannya. Namun terkait dengan perkembangan waktu, beberapa petani di lereng Merapi juga mulai mengkhususkan diri pada tanaman sayur untuk menghasilkan surplus untuk kebutuhan pasar. Tanaman sayur yang ditanam pun juga disesuaikan dengan perkembangan permintaan pasar di sekitar wilayah mereka.

Tanaman yang sudah lama ada di wilayah Ngablak dan beberapa tempat lainnya adalah Kobis Jawa. Tanaman ini sudah ada sejak tahun 1940-an namun sekarang sudah tidak bisa dijumpai lagi karena untuk kebutuhan pasar kalah bersaing dengan tanaman kobis jenis baru (Kobis Jonggrong) yang masa tanamnya lebih pendek dan lebih cepat dapat diterima oleh pasar. Nilai ekonomis menjadi pertimbangan untuk berganti ke Kobis Jonggrong karena Kobis Jawa agak kurang produktif dari sisi hasilnya, besar ukurannya tetapi timbangannya tidak terlalu berat. Para petani di wilayah Ngablak dan sekitarnya, misalnya, saat ini juga mengembangkan jenis tanaman Kobis Bunga dan Brokoli yang masuk ke wilayah ini sekitar tahun 2000-an. Kedua jenis tanaman ini diduga berasal dari Eropa dan pertama kali ditemukan di Cyprus, Italia Selatan dan Mediterania. Beberapa spesies Kobis Bunga telah tumbuh di Mediterania selama lebih dari 2000 tahun, dan selama beberapa ratus tahun terakhir banyak terjadi perbaikan warna maupun ukuran bunga terutama di Denmark. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa seorang ahli benih dari Perancis yaitu Wilmorin, menemukan tanaman Kobis Bunga yang gagal membentuk masa bunga, sehingga ukurannya hanya sebesar kelereng. Dalam perkembangan selanjutnya, melalui pemilihan varietas dan pembudidayaan yang terus menerus, diperoleh suatu varietas yang berbunga putih dan kompak.

Sekitar tahun 1660, di Erfurt (Jerman) ditemukan sejenis Kobis Bunga kuno yang disebut “erfurt”. Kobis Bunga ini ukurannya sama dengan yang

ditemukan di Mediterania, yaitu berdaun kecil, pendek, masa bunga kecil dan berwarna hijau. Di samping itu, ditemukan pula Kobis Bunga dengan bunga kecil-kecil yang sudah sejak lama tumbuh di India. Pada tahun 1866, Mc. Mahon seorang ahli benih dari Amerika mencatat bahwa jenis-jenis Kobis Bunga sangat beragam; ada yang masa bunganya berwarna ungu, putih, hijau, dan merah kehitam-hitaman. Sejak saat itulah berkembang adanya kubis bunga putih, hijau dan ungu, yang kemudian menyebar luas ke seluruh dunia, terutama negara-negara yang telah dikenal daerah pertaniannya.

Mengenai masuknya kubis bunga ke Indonesia tidak terdapat keterangan yang pasti, diduga terjadi pada abad ke XIX, yang varietasnya berasal dari India (Rukmana, 1994: 12). Di Ngablak sendiri masuknya tanaman Brokoli baru masuk Dusun Ngablak sekitar tahun 1965. Brokoli ada yang hijau dan ada yang putih. Brokoli termasuk tanaman yang sulit dibuat bibitnya sehingga para petani harus beli. Karena di dalam kemasan brokoli pabrik tertulis milky maka para Petani Ngablak menyebutnya milky untuk brokoli yang berbunga putih.

Sawi juga termasuk tanaman yang sudah ada di wilayah Ngablak sejak tahun 1940. Namun varietas Sawi Box atau Sawi Import baru masuk wilayah Ngablak sekitar tahun 1980-an. Terdapat jenis sawi daun kecil dan sawi besar, untuk jenis sawi daun kecil sering digunakan untuk campuran bakso maka para petani Ngablak menyebutnya Sawi Bakso. Sedang tanaman kentang dulu sempat menjadi favorit para petani Ngablak sebelum tahun 1984. Namun setelah ada semacam penyakit yang membuat batangnya menghitam dan daunnya layu, maka tanaman tersebut menjadi terganggu pertumbuhannya dan akhirnya mati. Padahal kentang termasuk jenis tanaman yang memerlukan modal besar. Kegagalan panen karena penyakit ini dan resiko terhadap biaya tanam yang tinggi telah membuat petani kentang menjadi terpuruk, sehingga setelah tahun 1984 relatif jarang petani wilayah Ngablak yang menanam kentang lagi. Berbeda dengan tanaman wortel yang dari dulu sampai sekarang masih terus dapat bertahan dan cukup banyak ditanam di wilayah ini, hanya saja dulu menggunakan bibit lokal tetapi sekarang menggunakan bibit kalengan agar hasilnya dapat sesuai dengan perkembangan pasar.

4.6.2 Pemanfaatan Lahan

Sebagian besar petani sayur di wilayah Kabupaten Boyolali dan Magelang telah melakukan sistem tumpang sari. Sistem tumpang sari mempunyai beberapa manfaat bagi para petani sayur, seperti mereka dapat mengatur masa tanam secara bergantian sesuai dengan waktu panen setiap tanaman yang berbeda-beda, mereka dapat memperoleh penghasilan secara kontinyu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, dan mereka dapat bertahan hidup ketika terjadi fluktuasi harga yang tidak menentu di pasar dengan menerapkan subsidi silang, misalnya pada saat cabe mahal dan sawi murah maka subsidi silang baik untuk menutup modal yang sudah dikeluarkan maupun kebutuhan hidup sehari-hari. Para petani sayur harus pandai-pandai mengatur bagaimana menanamnya, bagaimana mengatur penggunaan hasil panen tanaman yang satu untuk modal bagi tanaman yang lain, bagaimana memilih tanaman yang cocok agar masa panen dapat berlangsung secara kontinyu. Masa panen yang tidak sama antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain justru dipetakan secara jelas dan dibuat secara keberlanjutan untuk dapat bertahan dari kegagalan panen, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari maupun permainan harga di pasar yang memang tidak dalam kuasa para petani sayur tersebut. Istilah panen raya justru dihindari oleh para petani karena ketika terjadi panen raya atau panen serempak, maka harga sayuran yang sedang dalam masa panen justru cenderung menjadi rendah atau murah.

Untuk wilayah perbukitan, seperti Dusun Ngablak, Kujon, Tlogolele, dan Babadan, sebagian besar penduduknya memanfaatkan tanah perbukitan di luar wilayah pemukimannya sebagai areal pertanian sayur mereka. Di areal perbukitan tersebut banyak warga yang menerapkan pola pertanian tumpang sari. Untuk musim kemarau, di bagian pinggir tanah garapannya ditanami rumput kolonjono untuk makanan ternak mereka. Beberapa tegalan sering juga ditanami jenis tanaman keras di bagian pinggirnya, seperti akasia dan cemara. Di lereng yang sangat curam yang tidak mungkin dijangkau manusia banyak ditanam pohon Jambu atau tanaman keras lainnya. Lahan perbukitan di wilayah-wilayah tersebut saat ini banyak ditanami sayuran, paling banyak adalah wortel dan

brokoli di wilayah Boyolali serta cabai dan sawi di wilayah Magelang. Cukup banyak variasi jenis tanaman yang di tanam dalam sistem tumpang sari, misalnya di wilayah Ngablak dapat dijumpai bedengan-bedengan yang ditanami wortel sedang di kalenan yang dibuat lurus berjajar ditanami brokoli. Ada juga di bedengan yang sudah dibuat ditanami wortel dan di galengannya ditanami tanaman adas. Di wilayah Grogol misalnya, banyak bedengan yang ditanami cabai, sedang di pinggirnya ditanami timun atau gambas. Banyak variasi yang dilakukan oleh petani tumpang sari di lahannya namun pola umum yang ditanam di bagian tengah adalah tanaman sayuran andalan mereka sedang di bagian pinggir adalah tanaman sayuran penopang yang bisa dipanen setiap saat secara bergantian.

Untuk lereng-lereng atas yang mendekati puncak bukit banyak lahan milik warga yang ditanami jenis tanaman keras dan tidak dimanfaatkan sebagai lahan tanaman sayur karena di wilayah-wilayah tersebut banyak gangguan dari binatang-binatang yang ada di lereng Merapi, seperti kera. Banyak warga membiarkan lahan di daerah atas yang dekat puncak untuk tetap ditanami jenis tanaman keras. Saat ini, petani sayur di wilayah Boyolali pada umumnya menanam jenis sayuran seperti wortel dan brokoli sebagai jenis tanaman andalan karena dirasa lebih menguntungkan daripada tanaman yang lain. Meskipun harga sayur tidak tetap harganya, kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun harganya, seperti wortel kadang-kadang harganya Rp 2.000,00 per kilogram dan kadang-kadang bisa naik mencapai Rp 2.500,00 per kilogram. Sedangkan jenis brokoli paling rendah harganya bisa mencapai Rp 1.500,00 per kilogram dan harga paling mahal yang pernah dicapai adalah Rp 5.000,00 per kilogramnya dari petani. Selain itu tanah di wilayah lereng Merapi sering dikatakan paling cocok ditanami wortel. Berbeda dengan petani sayur di wilayah Grogol, mereka lebih banyak menanam cabai di lahannya. Menanam jenis sayur brokoli justru kurang diminati di wilayah ini.

4.6.3 Jenis-Jenis Tanaman Sayuran Utama dan Perawatannya

Jenis tanaman utama sistem tumpang sari di masing-masing wilayah relatif berbeda. Para petani mempunyai pengalaman yang relatif berbeda dalam melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis tanaman sayuran serta disesuaikan dengan permintaan pasar di wilayahnya masing-masing. Namun dapat dicatat bahwa jenis-jenis sayuran utama yang biasanya ditanam secara tumpang sari di lereng Merapi adalah wortel, brokoli, loncang, cabai, ketimun, gambas, waluh, kacang panjang, tomat, seledri, buncis, kobis, kol dan juga rumput kolonjono untuk makanan ternak mereka. Beberapa petani sayur juga sudah mulai kembali ke penggunaan pupuk organik agar kesuburan tanaman tetap terjaga, yaitu dengan memperbanyak pupuk kandang dan meminimalisir pupuk kimia agar tidak muncul penyakit. Pak Singat (Dusun Ngablak) yang mempunyai lahan yang relatif terpisah-pisah seluas kurang lebih 3500 meter persegi merupakan contoh petani sayur yang berusaha memaksimalkan penggunaan pupuk organik. Dia memanfaatkan sekitar 1.500 meter persegi dari lahan yang dimilikinya untuk menanam sayuran. Tanah seluas itu ditanami jenis sayuran wortel dan brokoli sebagai tanaman utama dan ditanam secara tumpang sari dengan jenis sayuran yang lain. Pertama-tama yang ditebar adalah biji wortel dan selang beberapa minggu baru bibit brokoli yang sudah tumbuh daunnya. Sedang di bagian pinggir lahannya ditanami rumput kolonjono untuk memberi makan keempat ekor sapi.

Agar tanah tetap terjaga kesuburannya lahan seluas 1.500 meter persegi tersebut diberi pupuk kandang berupa kotoran sapi sebanyak 3 kol atau jika digunakan karung satu kolnya memuat 40 karung jadi jika 3 kol berarti kotoran sapi sebanyak 120 karung. Untuk kotoran ayamnya diberi sebanyak 10 karung. Untuk memupuk lahannya masing-masing petani berbeda dalam menentukan takaran pupuk kandang untuk lahannya. Strategi Pak Sumarto Gimin agak berbeda dengan yang dilakukan oleh Pak Singat, kebiasaan Pak Sumarto untuk menjaga lahan tetap subur adalah dengan mengistirahatkan sementara lahan (*bero*). Setelah lahan tersebut ditumbuhi *orok-orok* dan *lipi* kemudian dicangkul (*didangir*) dan tanaman liar seperti *orok-orok* dan *lipi* tersebut digunakan sebagai pupuk (*rabuk*).

Para petani di lereng Merapi yang mempunyai tanah lebih dari 1 hektar sudah dianggap sebagai petani yang kaya. Mereka yang memiliki tanah dan tidak punya pekerjaan lain biasanya mengerjakan sendiri lahan pertanian mereka. Namun mereka yang punya pekerjaan lain seperti misalnya Pak Muji yang berprofesi sebagai Kadus Ngablak dan istrinya memiliki usaha toko biasanya *mburuhke* lahannya dari masa tanam sampai panen. Begitu pula Pak Singat sebagai Ketua Kelompok Tani dan sebagai petugas pos pengamatan Babadan dia tidak punya cukup waktu untuk menggarap lahannya sehingga orang lain yang mengerjakan lahannya. Berbeda dengan Pak Bambang, Pak Sukarjo, dan Pak Harjo Samingun yang juga mempunyai tanah lebih dari 1 hektar, namun mereka mengolah sendiri lahannya.

Berdasarkan keterangan Pak Harjo pola umum yang dilakukan di wilayah Ngablak dalam menanam wortel adalah, setelah masa tanam kemudian 1 bulan atau 1,5 bulan kemudian tanaman tersebut disiangi dengan membersihkan rumput dan gulma penggangguannya. Setelah wortel berumur 2 bulan maka dibuatkan parit atau galengan di kanan kiri bedengan. Bedengan ini biasanya tidak hanya ditanami satu jenis tanaman sayuran. Satu bedeng ditanami tanaman wortel dan bedengan satunya ditanami brokoli, perbandingan wortel dan brokoli 1:1. Jadi praktis masa bertani petani Ngablak hanya 8 bulan untuk menanam sayuran karena 4 bulan sisanya sudah memasuki musim kemarau dan beberapa petani sayur sengaja mengistirahatkan lahannya (*bero*).

Penyakit jenis sawi-sawian yang sekarang muncul dan sulit ditangani adalah jenis penyakit *bendol akar*. Jika akarnya sudah bendol kemudian tanaman akan layu dan mati. Penyakit ini banyak dialami oleh petani sayur lereng Merapi. Namun penyakit ini kadang-kadang setelah muncul di musim tanam pertama, di musim tanam kedua tidak muncul. Pak Harjo dan anaknya berhasil mengatasi penyakit ini dengan cara tidak melakukan penyiangan (*pendangiran*). Sebelum ditanam tanah diberi kapur dan bakteri pembusuk dari Jogja dan ternyata berhasil tanpa ada tanaman yang terkena penyakit bendol akar tersebut. Tentu saja keberhasilan ini juga dilakukan tanpa penyiangan. Namun tanaman kalau *didangir*

malah hancur. Begitu pengalaman Pak Harjo dan anaknya dalam menghadapi penyakit *bendol akar*.

Untuk menjaga keamanan tanaman dari serangan hama seperti ulat para petani sebelum menebar benih diberi obat anti ulat dan setelah daunnya tumbuh bulan ke dua diberi fungisida satu kali. Hama yang banyak adalah ulat dan yang dekat dengan hutan hamanya adalah kera. Hama lain yang dianggap mengganggu pertumbuhan tanaman wortel adalah tanaman *tuwuk*, *krokot*, dan *suket abang*. Tanaman ini dalam waktu sebulan sudah tumbuh lebat dan harus disiangi atau orang sini melakukan kegiatan *matun* untuk menghilangkan tanaman pengganggu tersebut. Menurut keterangan para petani seperti Bu Minem, tanaman *tuwuk* ini enak kalau dimasak dan dibuat *oseng-oseng*. Sebenarnya kalau bisa memanfaatkan beberapa jenis tanaman tersebut tidak ada yang dibuang.

Strategi adaptasi petani dengan lingkungan Merapi dilakukan dengan berbagai cara. Ketika air yang mengalir dari mata air tidak banyak maka warga menyadari bahwa air hanya digunakan untuk keperluan rumah. Mata air hanya ada di lereng atas sehingga seringkali warga menggunakan selang dan bak penampungan air untuk mendistribusikan air dari mata air secara merata. Konflik masalah distribusi air merupakan hal yang wajar dan masih bisa diatasi secara internal. Menyadari pertanian di lereng Merapi seringkali hanya mengandalkan air hujan sebagai penyiram tanaman maka masyarakat mempunyai pola dua macam tanaman. Tanaman musim kemarau adalah jagung atau dibiarkan *bero*, sedangkan musim penghujan adalah sayuran. Hal ini agak berbeda dengan wilayah-wilayah pertanian di beberapa dusun di bagian bawah yang mempunyai mata air yang cukup, mereka biasanya tetap menanam sayur walaupun di musim kemarau.

Dulu para petani lereng Merapi masih menanam jagung untuk kebutuhan makanan pokok mereka dan jagung tersebut dibuat nasi jagung. Makanan pokok warga lereng Merapi di wilayah Boyolali dan Magelang dulu adalah nasi jagung. Namun setelah dibangunnya jalan tembus dari Boyolali-Magelang yang diresmikan oleh Pak Harto tahun 1974, maka petani mulai memfokuskan pada tanaman sayur. Sejak saat itu wilayah tersebut mulai terbuka sehingga hasil pertanian, terutama sayur mulai laku dipasarkan. Hal ini berarti peningkatan

ekonomi masyarakat mulai berjalan dan warga masyarakat lereng Merapi bagian Utara sangat menghargai jasa Pak Harto dalam membuka jalan tembus sisi Utara tersebut. Tidak hanya pembangunan prasarana jalan, pada saat itu ketika terjadi musim kering panjang atau masa paceklik, maka pemerintahan masa Suharto memberikan program padat karya dan memberi jatah beras pada warga yang membutuhkan. Bukti nyata sebagai balas jasa terhadap Presiden Suharto dapat dilihat dari data pemilihan umum tahun 1977, yaitu warga satu kecamatan 100 persen memilih Golkar.

Pada umumnya, musim kemarau merupakan musim yang sulit air namun untuk sebagian masyarakat lereng Merapi sisi Utara dan Barat belum pernah sampai kering dan mata air tidak mengalir sama sekali, kecuali ketika terjadi erupsi tahun 2010 yang meskipun kecil aliran air tetap mengalir. Kerentanan pangan jarang terjadi sebab jika musim kemarau masih ada tanaman tembakau yang laku dijual dan hasilnya dibelikan untuk makanan pokok seperti beras.

Namun masih ada juga petani yang menanam jagung dan ketela rambat untuk persediaan makan di musim sulit beras. Jika sampai gagal panen seperti ketika erupsi Merapi tahun 2010, mereka masih mempunyai simpanan jagung kering yang biasanya diletakkan di atas tungku untuk dibuat nasi jagung. Ada juga yang menanam jagung di sela-sela tanaman wortel atau brokoli dengan sistem tumpangsari. Sehingga selain menanam sayuran untuk dijual dan menambah penghasilan ekonomi keluarga, mereka juga masih mempunyai tanaman pangan yang disimpan dan dijadikan cadangan makanan.

Untuk memaksimalkan penghasilan petani dengan sempitnya lahan dilakukan dengan menerapkan sistem tumpangsari. Agar hasil yang dihasilkan maksimal dan bagus para petani harus paham musim (*mongso*) yang tepat untuk menanam sayuran sebab jika keliru bisa menimbulkan gagal panen. Pada umumnya, petani di lereng Merapi hanya memiliki lahan pertanian kurang dari satu hektar.

4.6.4 Budidaya Sayuran Masa Kini

Pola tanam sayuran di dusun-dusun lereng Merapi biasanya diawali dengan melakukan penggemburan tanah atau pencangkulan, pemberian pupuk kandang dan obat hama dasar anti ulat. Setelah tanah digemburkan, maka mulailah dibuat bedeng-bedeng dan galengan di pinggirnya. Kemudian tahap pemberian pupuk dari kotoran sapi dan kotoran ayam ditanah yang sudah gembur tersebut. Fungsi kotoran sapi adalah untuk menyuburkan tanah, sedangkan kotoran ayam adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan menggemukkan tanaman. Setelah pupuk ditebar, kemudian di atasnya ditaburi tanah tipis. Setelah tahap ini, pola perawatannya sangat tergantung dari jenis benih tanaman yang akan disemai. Benih wortel misalnya, dilakukan dengan cara menyemai atau disebar (*dipyur-pyurke*) di atas bedengan secara merata. Dalam tahap berikutnya, benih yang sudah disemai tersebut diberi obat dasar anti ulat.

Setelah 35 hari (*selapan*), maka daun-daun wortel mulai tumbuh bersamaan dengan rumput-rumput liar dan tanaman liar lainnya. Setelah satu bulan bedengan tersebut perlu disiangi (*dipantun*) atau dibersihkan dari rumput dan tanaman liar pengganggu agar tanaman wortel dapat tumbuh dengan baik. Cara menyiangi rumput adalah dengan mencabuti melalui galengan di samping bedengan. Dari samping kanan kita disiangi separuh lalu gantian dari samping kiri kita dengan berjalan mundur sehingga satu deret di sisi kanan dan kiri kita sudah disiangi rumputnya separuh gundukan. Lalu dilanjutkan di galengan sebelah bedengan yang satunya sehingga gundukan yang satu bisa tersiangi semua rumputnya sedangkan di sisi yang lain disiangi separuh gundukan. Setelah selesai menyiangi, maka mulai dengan pemupukan, yaitu dengan menebari pupuk ZA di atas gundukan tanah. Untuk pemupukan tanaman sayur pada masa sekarang lebih banyak menggunakan pupuk campuran yaitu pupuk kandang dari kotoran sapi dan kotoran ayam serta diberi pupuk kimia tambahan dari pabrik berupa Urea dan ZA. Untuk pupuk dari kotoran sapi biasanya mereka tidak membeli tetapi memanfaatkan kotoran sapi yang mereka miliki, namun untuk pupuk dari kotoran ayam biasanya mereka harus membeli dari pemasok luar seharga Rp 7.000,00

sampai Rp 15.000,00 per karung. Biaya terbesar yang dikeluarkan untuk perawatan sayuran adalah untuk pupuk.

Pada masa 35 hari kedua (dua lapan), tanaman wortel disiangi (*dipatun*) lagi untuk yang kedua kalinya. Pada saat menyiangi ini, tanah dalam bedengan sekalian digemburkan dengan gejrosan besi agar tidak merusak tanaman wortel. Selain membersihkan dari rumput dan tanaman yang dianggap mengganggu, dalam tahapan ini tanah bedengan juga digemburkan agar kepadatannya dapat terjaga dan memudahkan untuk pemupukan. Pada masa ini juga dilakukan pemupukan dengan pupuk urea. Setelah proses ini, petani tinggal menunggu selama 35 hari lagi (*lapan* ketiga) untuk memasuki masa panen dan kalau diperlukan tanaman tersebut juga akan disemprot pestisida untuk menghindari hama.

Untuk pengendalian hama, para petani tidak pernah menggunakan pestisida dan insektisida kecuali serangan ulat atau hama yang lain mewabah. Tetapi ketika hama ulat tidak terlalu banyak, biasanya para petani menghindari penggunaan cairan tersebut. Serangan binatang atau hama yang dianggap petani sangat mengganggu adalah kera, khususnya di daerah atas yang berdekatan dengan puncak bukit. Dengan demikian lahan yang berada di dekat bukit atau lereng Merapi seringkali tidak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian oleh masyarakat sekitarnya.

Pertanian sayur pada saat ini sebagian besar masih menggunakan pupuk kimia, sehingga hal ini berpengaruh pada kerusakan tanah. Misalnya ada Kasus salah seorang warga di Selo yang mempunyai lahan 1.000 meter persegi. Tahun ini diberi pupuk urea sebanyak 2 sak, tahun berikutnya harus diberi lebih banyak pupuk urea agar hasilnya maksimal, walau persoalan kerusakan tanah sudah disadari. Sebenarnya beberapa petani di wilayah Selo sudah menggunakan dan mempraktikkan pertanian sistem organik. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan struktur tanah. Pengetahuan tentang pertanian organik didapatkan dari para pemandu lapangan dinas pertanian. Namun sebagian besar masih mengandalkan pupuk kimia dalam mengelola dan merawat tanaman sayuran mereka atau minimal menggunakan pupuk organik dan pupuk kimia sekaligus.

Tanaman sayuran dengan menggunakan pupuk kimia biasanya dipandang lebih cepat tumbuh dan panennya akan lebih berhasil baik dibandingkan dengan pertanian dengan sistem organik. Beberapa tanaman sayuran yang paling minimal dalam penggunaan pupuk kimia adalah wortel dan brokoli sedikit (10 banding 90 persen). Untuk pertanian dengan sistem organik sebenarnya perawatan lebih murah dan pupuknya bisa didapatkan di sekitar mereka, seperti pupuk kandang, urin tenak dan sebagainya.

Petani sayur di wilayah Stabelan dan Tlogolele sudah melakukan pertanian dengan sistem organik tetapi jumlahnya masih relatif kecil, sedangkan di Ngablak, pertanian organiknya sudah cukup banyak. Sebagian besar petani sayur di Ngablak menerapkan pertanian organik di sebagian kecil lahannya. Hasil pertanian organik ini biasanya dikonsumsi sendiri, sedang yang dijual masih tetap menggunakan pupuk kimia. Persoalannya apabila lahan pertanian organik bersebelahan dengan lahan pertanian dengan menggunakan pupuk kimia maka pertanian dengan sistem organik akan rentan terhadap serangan hama penyakit apabila dibandingkan dengan lahan dengan menggunakan pupuk kimia. Menurut salah seorang warga Dusun Grogol, pada masa lalu pertanian di wilayahnya tidak mengenal pupuk kimia, namun masa pemerintahan Pak Harto telah mengenalkan pupuk kimia kepada para petani dan mulai saat itulah para petani di dusun Grogol menggunakan pupuk kimia bahkan ada yang sangat fanatik untuk menggunakan pupuk tersebut secara berlebihan. Pola pertanian yang dilakukan seperti sekarang ini dianggap sangat dipaksakan, hasilnya tidak sebanding dengan hasil tanaman sebelum menggunakan pupuk kimia. "*Beras ketan mbiyen ki empuk-empuk kok Mas, nek saiki rak atos*" (Beras ketan jaman dulu lebih empuk Mas, kalau sekarang kan keras), kata seorang warga Grogol tersebut.

Bibit tanaman sayuran mempunyai macam kategori, yaitu bibit yang bisa dibuat sendiri dan bibit yang harus dibeli karena memang diproduksi oleh pabrik. Bibit yang bisa dibuat sendiri adalah tanaman wortel, loncang dan kentang, sedangkan tanaman sayur yang lain bibitnya harus beli. Meskipun ada bibit wortel buatan pabrik dan harus beli, namun para petani cenderung menggunakan bibit wortel lokal karena penggunaan bibit wortel lokal dianggap lebih menguntungkan.

Menurut keterangan beberapa petani yang pernah menanam bibit wortel kalengan dan menanam bibit wortel yang dibuat sendiri, keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan bibit kaleng adalah hasil panennya mempunyai umbi lebih besar dan lebih merah, hanya kelemahannya setelah dipetik tidak tahan lama dan apabila lebih dari satu hari mulai membusuk. Sedangkan bibit yang dibuat sendiri hasil panennya mempunyai umbi tidak sebesar dan semerah daripada bibit wortel yang kalengan, namun lebih tahan lama karena setelah dipetik bisa tahan disimpan sampai seminggu. Bibit buatan sendiri juga lebih tahan terhadap segala penyakit yang menyerang tanaman wortel. Selain menggantungkan pada abu, petani sendiri sudah terbiasa menggunakan pupuk kandang dan pupuk kimiawi untuk budidaya sayuran. Dengan adanya pupuk kandang maka usaha tanaman sayuran bisa berkembang di lereng Merapi.

Pembibitan wortel dilakukan dengan cara sederhana oleh petani sendiri. Mereka mengambil bunga wortel lalu dikeringkan. Setelah kering diambil bijinya lalu siap ditebar di tegalan dengan cara ditabur. Sedangkan bibit wortel buatan pabrik berupa biji diproduksi secara kalengan oleh perusahaan Takii and Co., Ltd., Kyoto, Japan. Selain bibit kalengan, ada juga bibit yang dibungkus plastik seperti milky atau brokoli putih dan brokoli hijau. Sedang tanaman sawi bibitnya juga dibungkus plastik berupa biji bibit sawi.

Usaha pembibitan sayur dilakukan oleh warga sendiri dengan cara-cara yang relatif masih sederhana. Bahkan pembibitan sayur juga sudah menjadi semacam profesi beberapa warga dusun lereng Merapi. Sebagai contoh adalah Pak Ahmad dari dusun Grogol, seorang laki-laki yang berumur 60-an tahun yang berprofesi sebagai pembibit tanaman. Ditemani istrinya, setiap hari membuat bibit tanaman cabai, tomat, tembakau, sawi, gambas, dan sebagainya. Prosesnya dimulai dengan mencari tanah sawah yang nanti dicampurkan dengan kotoran kambing (*Indus—inthil wedhus*). Campuran tanah dan kotoran kambing tersebut kemudian dijadikan tempat atau media untuk menyebar benih-benih tanaman sayur. Proses untuk tumbuhnya bibit memakan waktu sekitar satu sampai satu setengah bulan, tergantung pada kondisi cuacanya. Biasanya kalau cuaca cenderung panas maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Ketika bibit yang tumbuh setinggi kurang lebih tiga sampai lima cm, kemudian satu persatu bibit tersebut dipisahkan dari bibit yang lain dengan diberi media tanah yang dibikin bulat (*dikepeli*) dan kemudian diberi tatakan alas dari bambu. Setiap tatakan berisi sekitar 800 hingga 1000 bibit. Untuk satu biji bibit, dijual seharga Rp 25,00 (ini lebih murah dari pada harga di pasaran yang harganya paling murah antara Rp 35,00 sampai Rp 50,00) dan untuk pembelian sejumlah 1000 bibit akan mendapatkan bonus 100 bibit tambahan. Benih yang digunakan untuk pembibitan didapatkan dari hasil panen tanaman sayur atau membeli dari hasil panen tanaman sayur tetangganya. Hal ini relatif lebih murah daripada harus membeli benih dari produk pabrik. Harga benih dari pabrik berkisar antara Rp 35.000,00 sampai Rp 50.000,00 per bungkus dengan isi sekitar 1.000 -1.500 biji.

Pak Ahmad sengaja memberikan harga yang sangat murah sebagai strategi penjualan, ketika harga di bawah pasaran, maka para pelanggan setia akan memesan dan membeli dari produksi bibitnya. Rata rata para pelanggan pak Ahmad berada di wilayah lereng Merapi bagian atas, seperti Babadan, Dadapan, Krinjing, Tlogolele, dan sebagainya. *Nggih sak cukupe mawon, sing penting angsal arto sekedhik-sekedhik nggo nyangoni anak sekolah* (ya secukupnya saja, yang penting dapat uang sedikit-sedikit untuk memberi uang saku anak sekolah). Memang Pak Ahmad hidup dalam kesederhanaan dan kemiskinan, rumahnya terbuat dari *gedhek* (dinding anyaman bambu) dan berlantai tanah, sementara ruang tamunya tidak ada kursi ataupun meja, yang dipunyai hanyalah *amben*¹ panjang. Keluarga ini hanya mempunyai satu anak perempuan yang sedang sekolah di SMA I Blabak. Karena jaraknya yang jauh, maka anak tersebut ditampung oleh kepala sekolahnya untuk mondok/kos di rumahnya dengan membayar semampunya.

¹ Amben adalah papan besar terbuat dari kayu dan bambu yang berbentuk bujur sangkar, biasanya menggunakan tikar pandan.

Saat masih muda dan kuat, pak Ahmad bekerja sebagai buruh tani, ia tidak mempunyai lahan sawah untuk digarap. Kini pada usia yang cukup tua, ia memilih bekerja sebagai pembuat bibit untuk menyambung ekonomi keluarganya. Awalnya Pak Ahmad bekerja sebagai buruh di tempat pembibitan sayur. Ilmu “membibit” tanaman sayur yang didapat semasa menjadi buruh kemudian dipraktekkan semenjak empat tahun terakhir ini dalam usaha pembibitan sayur di dusunnya. Di dusun Gogol sekarang ini sudah ada empat orang lagi yang juga membuat bibit tanaman sayur, namun Pak Ahmad tidak khawatir dengan adanya saingan dari tetangganya sendiri (belum lagi dengan para pembuat bibit yang sudah menjamur dan bermodal besar lainnya). *Rejeki pun onten sing ngatur piyambak, ndherek kersaning sing Ndamel urip mawon²* (rejeki sudah ada yang mengatur sendiri, ikut kehendak Yang membuat hidup saja).

Dengan lahan pekarangan di depan dan di samping rumahnya, Pak Ahmad dan istrinya mengolah tanah dan bibit dengan membuat bedengan dari bambu setinggi sat sampai satu setengah meter dengan lebar satu meter. Bedengan inilah yang menjadi tempat untuk menyemai dan menampung bibit-bibit yang sudah *dikepeli*. Dengan tiga petak bedeng inilah, Pak Ahmad menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kehidupan keluarga Pak Ahmad ini merupakan cerminan warga yang berprofesi sebagai pembibit tanaman sayur di dusun Grogol.

4.6.5 Pengadaan Modal Usaha Tani Sayuran

Pada masa lalu, lahan pertanian dikerjakan secara bersama dengan mengundang beberapa orang dan kerabat yang bergotong royong atau sambatan, terutama pada masa awal tanam dan pada masa panen. Namun kebiasaan tersebut lama-kelamaan memudar dan hampir hilang. Di beberapa dusun masih mempertahankan model kerja sama tersebut, namun sebagian dusun di lereng

² Begitu “pasrahnya” dan merasa sebagai orang kecil, pak Ahmad hanya “manut” dengan orang orang dusun, seperti, pada saat adanya bantuan pasca erupsi kemarin, ia tidak pernah meminta bantuan, diberi ya syukur kalau tidak diberi ya diam saja. Bahkan bantuan berupa ternak dari pemerintah dan LSM sendiri ia juga tidak ikut, karena tidak ada yang ”nari” (menawari).

Merapi sudah menerapkan sistem upah kepada tenaga kerja yang diminta untuk membantu pengolahan lahan pertanian mereka. Sebagian besar pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian ketika menggunakan atau melibatkan orang luar harus menggunakan tenaga bayaran (*mbayar wong*) atau istilahnya: *mburuhke*. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga buruh ini relatif berbeda-beda antara dusun yang satu dengan yang lainnya, tetapi rata-rata berkisar antara Rp 20.000,00 sampai Rp 30.000,00 per hari. Ketika uang menjadi sarana utama dalam kehidupan warga dusun, maka tidak bisa dipungkiri bahwa semangat gotong royong di bidang pertanian di beberapa dusun lereng Merapi cenderung relatif menurun. Banyak warga yang lebih senang uang secara *cash* dalam bentuk bayaran terhadap kerja mereka daripada dibayar dengan bentuk tenaga ketika nanti mendapatkan giliran dalam pengerjaan lahan mereka. Dengan kondisi seperti ini, masing-masing keluarga yang mempunyai lahan garapan cenderung mengerjakan lahan mereka secara sendiri-sendiri walaupun terdapat anggota kerabat lain yang bisa diminta bantuan untuk ikut terlibat dalam pengolahan lahan mereka. Saat ini, orang yang berada di luar anggota keluarga cenderung dihitung sebagai tenaga buruh apabila diminta untuk membantu dalam pengerjaan lahan mereka.

Di hampir semua dusun lereng Merapi saat ini terdapat kelompok tani yang dibentuk atas dasar keinginan untuk bekerja sama dalam mengatasi persoalan-persoalan bersama pertanian mereka. Biasanya kelompok ini muncul karena ada program dari pemerintah maupun LSM yang ingin membantu pengembangan ekonomi warga dusun atau memang ada juga yang atas dasar inisiatif petani yang tempat tinggalnya relatif berdekatan. Sebagai contoh adalah kelompok tani Mulyo Sari di dusun Ngablak yang dibentuk tahun 2006. Ide munculnya kelompok ini atas dasar inisiatif dari para petani yang berdekatan tempat tinggalnya. Waktu itu para petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk kimia, walaupun ada harganya cukup mahal dan persediaan tidak mencukupi sehingga pembagiannya pun tidak merata. Persaingan antar individu untuk mendapatkan pupuk saat itu cukup terlihat secara jelas. Padahal pemerintah hanya memberikan bantuan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani bukan kepada

individu petani. Untuk mengatasi persoalan ini, maka dibentuklah kelompok tani di wilayah ini agar semua petani mendapat bagian pupuk kimia bersubsidi, khususnya Urea dan ZA.

Kegiatan kelompok tani ini salah satunya adalah mengadakan pertemuan rutin sebulan sekali yaitu tiap tanggal 10 malam setelah magrib (sekitar jam 19.30 WIB). Dalam pertemuan kelompok tersebut dibahas tentang bagaimana pengolahan tanah supaya hasilnya maksimal di musim penghujan. Dulunya juga ada arisan dan simpan pinjam namun karena ada beberapa anggota yang meminjam ke kelompok tetapi pengembaliannya seret maka hal tersebut mempengaruhi kondisi kas kelompok yang akhirnya anggota yang lain tidak mendapatkan guliran meminjam. Padahal dalam kelompok simpan pinjam ini, para pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara) tidak diberi uang lelah atau honor apapun dan bekerja untuk kemajuan kelompok. Kegiatan yang lain dalam pertemuan tersebut adalah mengundang Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) bidang pertanian untuk membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani di wilayah tersebut.

Terdapat pola yang hampir berlaku umum terkait dengan pengelolaan keuangan rumah tangga masyarakat dusun di lereng Merapi, yaitu ada hak uang atau modal laki-laki dan uang perempuan. Hak laki-laki adalah uang hasil penjualan ternak sapi dan di wilayah dusun lereng Utara Merapi juga hasil penjualan tembakau. Sedangkan hak perempuan adalah uang hasil penjualan sayuran. Rumah tangga cenderung dapat berjalan dengan baik apabila antara suami dan isteri menyadari hak dan kewajiban masing-masing. Dalam konteks keuangan, mereka harus menyadari dan memahami hak masing-masing. Apabila laki-laki menjual sapi dan tembakau, maka pihak istri biasanya tidak akan bertanya hasilnya berapa dan demikian juga sebaliknya apabila perempuan menjual sayur, maka laki-laki cenderung untuk tidak bertanya sayurannya laku berapa. Namun apabila uang laki-laki kurang untuk membeli apa yang diangankan maka biasanya sang istri akan menambahi. Para istri akan menyisihkan uang modal untuk tanaman sayur musim berikutnya sehingga laki-laki tidak perlu memikirkan persoalan modal tanaman sayur yang akan mereka

kelola bersama pada musim berikutnya. Begitu pula sebaliknya untuk pengelolaan tanaman tembakau dan sapi merupakan tanggung jawab pihak suami dalam penyediaan dan pengelolaannya dan pihak istri tidak perlu memikirkan lagi modal untuk sapi dan tembakau. Istilah setempat untuk laki-laki yang sukanya mengurus wilayah keuangan perempuan disebut dengan *lelaki kethuk* atau lelaki yang tidak punya malu. Kalau untuk uang hasil sayuran kebanyakan yang mengelola perempuan. Hasil dari sayuran ini juga dipakai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tanaman sayuran dalam prakteknya memang dalam kuasa kaum hawa. Hasil dari tanaman sayuran memang relatif kecil, namun bisa menghasilkan secara terus menerus. Cara penanaman dan perawatan tanaman sayuran biasanya menerapkan ilmu kira-kira.

Berbeda lagi dengan mereka yang masih bujang, mereka mengelola modal usaha untuk peternakan maupun pertaniannya secara mandiri. Ketika lahannya pada musim yang lalu ditanami tembakau dan pada musim berikutnya akan ditanami sayuran, seperti brokoli dan wortel, maka mereka yang masih bujang mempunyai hak penuh atas penyediaan dan pengelolaan modal usahanya. Kasus yang dilakukan Bambang yang tinggal di salah satu dusun bagian Utara Merapi memberikan gambaran cara pengelolaan keuangan secara mandiri. Bambang memelihara seekor Sapi Metal selama masa tanam sayuran yang nanti ketika musim tanam tembakau akan dijual untuk modal menanam tembakau sekaligus biaya perawatannya. Setelah panen tembakau sebagian uang hasil penjualannya disimpan dan sebagian lagi digunakan untuk membeli seekor sapi. Strategi yang dilakukannya adalah tetap memegang prinsip bahwa modal sayuran tetap akan digunakan untuk sayuran, sedangkan modal sapi dan tembakau tetap digunakan secara selang-seling untuk kedua jenis usaha tersebut.

Pemberian atau bantuan modal dari luar untuk bidang pertanian bisa dikatakan relatif sedikit. Terdapat program-program percontohan yang dilakukan oleh para PPL di beberapa wilayah dusun lereng Merapi. Dalam konteks PPL di wilayah Ngablak, lahan percontohan tanaman strawberry dikembangkan sebagai tanaman yang alternatif di wilayah tersebut. Demplot (Demonstrasi dan Percontohan) ini berupa *green house* untuk menanam *strawberry*. Namun,

menurut beberapa petani di wilayah tersebut, program percontohan tanaman *strawberry* tersebut dianggap kurang mengenai sasaran atau justru ada beberapa petani yang mengatakan gagal karena antara modal yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan tidak seimbang. Penanaman dengan cara seperti itu akan mengeluarkan banyak modal sementara hasilnya tidak seberapa, sehingga malah berakibat banyak ruginya.

4.6.6 Petani Sayur Pasca Letusan Tahun 2010

Pertanian sayur juga telah membuka peluang ekonomi bagi pihak lain, seperti penyedia bibit, buruh upah, penyedia pupuk kotoran sapi, dan kotoran ayam. Penyedia bibit lokal dan buruh upah biasanya dilakukan oleh warga dusun lereng Merapi sendiri, sedangkan pupuk kotoran ayam dan bibit import biasanya harus didapatkan dari para penyalur dari luar. Para pedagang sayuran di wilayah Ngablak seringkali juga berprofesi sebagai distributor bibit kalengan atau import. Pak Triyoko sebagai penjual pupuk kotoran ayam yang tinggal di Ngablak, ternyata harus mengambil kotoran ayam yang dijualnya dari beberapa tempat, seperti Catur, Sambu, dan Simo. Pupuk kotoran ayam ini kemudian dijual dengan harga Rp 7.000,00 per karung kepada konsumennya.

Pada waktu erupsi tahun 2010 yang lalu, beberapa tanaman sayur yang bisa bertahan hidup di lereng Utara Merapi hanya loncang dan wortel yang umbinya sudah besar. Loncang bisa bertahan hidup karena abu Merapi tidak bisa menempel di daun loncang, namun dalam kondisi seperti ini loncang pun tetap tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Sedangkan tanaman wortel bisa selamat karena di atas umbinya tertutup tanaman tumpang sari dan daun-daun tanaman sayur lain yang mati sehingga umbinya masih utuh dan masih bisa dijual meskipun tidak maksimal. Sedangkan jenis tanaman sayuran yang lain hampir semua mati dan tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Tanaman yang bisa bertahan hidup pasca letusan Merapi tahun 2010 di wilayah Selo kebanyakan adalah loncang. Karena daunnya ada lilinnya. Jadi abu meleset. Sedang tanaman sayur di Tlogolele hampir semuanya langsung mati karena abu cukup tebal dan merata. Tanaman yang hidup pasca letusan tahun 2010 sangat tergantung pada jenis

tanaman dan ketebalan abu di masing-masing wilayah. Pada saat Merapi meletus tahun 2010 lalu cukup banyak masyarakat Selo yang sedang menanam wortel. Selain kematian pada tanaman sayur, hambatan yang lain pasca letusan Merapi adalah kondisi lahan pertanian yang tertutup abu tebal. Para petani harus berusaha keras untuk menggali dan mencangkul tanah lebih dalam lagi. Di Stabelan pada saat itu lebih tebal abunya sehingga gagal panen.

Setelah erupsi, ketebalan abu rata-rata bisa mencapai 2 sampai 3 cm, bahkan di Dusun Ngablak mencapai 4 cm, dusun Stabelan mencapai 25 cm, dan dusun Klakah sampai tidak terlihat tanaman sayurannya khususnya ketika saat terjadi letusan. Pada saat letusan Merapi tahun 2010, kondisi umur tanaman sayur relatif berbeda-beda, seperti ada yang baru panen, ada yang baru melakukan tumpang sari, bahkan ada yang baru menanam. Tanaman sayuran banyak yang mati dan tertimbun abu. Abu yang berada di halaman rumah dan jalan apabila diguyur hujan dapat cepat hilang, namun abu yang berada di lahan pertanian agak susah untuk hilang walaupun lahannya miring sehingga mengganggu tanaman sayur yang sedang tumbuh. Ketika lahannya masih banyak abunya, maka lahan tersebut akan sulit untuk diolah kembali. Gumpalan-gumpalan abu harus dicangkul dan kemudian harus dilumatkan dulu dengan tangan (*diremet*) agar pecah menjadi abu halus. Setelah itu baru dicampur dengan tanah lama sehingga bisa dibuat bedeng-bedeng dan galengan agar bisa ditanami dengan baik.

Masyarakat dusun Tlogolele banyak yang mengatakan bahwa pasca letusan Merapi tahun 2010 siklus tanaman jadi tidak menentu dan lebih sulit hidupnya. Biasanya jenis-jenis tanaman sayur tertentu dapat panen dalam 25 hari, tetapi sekarang ini, misalnya jenis tanaman loncang, cabai dan sebagainya memerlukan waktu lebih dari sebulan baru bisa panen. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat dusun Stabelan harus mencari cara tersendiri untuk dapat bangkit mengolah tanahnya kembali tanpa mengharapkan bantuan dari luar. Beberapa wilayah dusun di lereng Merapi lainnya mendapatkan bantuan untuk bidang tanaman sayur pasca letusan tahun 2010, misalnya di wilayah Selo berupa pemberian bibit tanaman, seperti cabai dan tomat. Tetapi persoalannya, tomat dan cabai yang dibagikan adalah tanaman untuk ditanam dataran rendah, sehingga

apabila bibit tanaman tersebut ditanam didaerah tinggi menjadi kurang maksimal hasilnya. Bibit tanaman sawi yang disalurkan lewat Gapoktan (Gabungan Kelompok Kerja Tani) juga dibagikan secara merata kepada seluruh petani di desa sehingga saat itu para petani secara serempak menanam sawi pada saat yang sama. Dengan demikian, masa panen tanaman tersebut otomatis menjadi bersamaan lantaran masa tanam sayuran bantuan tersebut juga sama, sehingga harga jual pada masa panen cenderung menjadi murah. Bahkan tomat hanya dihargai Rp 100,00 perkilogram. Harga sayuran jenis sawi dan ketimun juga pernah anjlok menjadi Rp 100,00 perkilogram. Ketika jembatan yang menghubungkan dusun mereka dengan pasar terputus akibat banjir lahar dingin, maka ongkos angkutan ke pasar menjadi sangat tinggi dan tidak sebanding dengan harga sayuran yang dijual. Lain lagi dengan kasus bantuan pemerintah terhadap petani sayur di Dusun Babadan. Pasca letusan Merapi tahun 2010 diadakan program polibekisasi, yaitu usaha menanam sayur dengan kantong-kantong plastik di sekitar rumah para warga. Namun program ini kurang berhasil karena tanaman sayur yang baru tumbuh sebagian besar dimakan ayam. Justru gerakan ibu-ibu di dusun Babadan secara mandiri dengan menyewa tanah kas desa untuk menanam sayur secara bersama dianggap berhasil oleh warga setempat.

Hadirnya tanaman sayuran di lereng Merapi ternyata dapat memenuhi kebutuhan banyak pihak, seperti petani sendiri, pedagang dan konsumen yang kebanyakan orang perkotaan. Hasil pertanian sayur di dusun-dusun lereng Merapi biasanya dijual melalui beberapa cara, seperti didatangi langsung oleh pedagang-pedagang keliling (*bakul*), dijual langsung ke pedagang kecil di pasar-pasar tingkat kecamatan, atau dipasarkan kepada pedagang besar di pasar-pasar yang relatif besar. Di setiap wilayah sebenarnya ada *bakul-bakul* yang mendatangi langsung hasil pertanian sayur dengan harga yang sedikit lebih murah daripada harga jual di pasar. Beberapa petani sudah punya *langganan* menjual hasilnya kepada beberapa bakul. Para petani sayur juga bisa menjual langsung hasil pertanian sayur mereka kepada para pedagang kecil di pasar.

Para petani sayur di Dusun Grogol misalnya, mereka menjual hasil panen sayurnya dalam dua cara, yaitu dengan menjual langsung ke Pasar Soka (untuk

dusun Grogol dan Candi Pos). Cara ini lebih menguntungkan karena penjualannya tanpa perantara dan harga juga menjadi lebih tinggi walaupun ada kendala lain yaitu alat angkut untuk membawa hasil panen (kendala transportasi). Cara kedua adalah dengan menjual kepada para *bakul* keliling. Keuntungan dengan cara ini adalah petani tidak menjadi repot lagi dalam menyediakan alat angkutan dalam membawa hasil panennya ke pasar, namun kerugiannya adalah harganya menjadi lebih rendah. Rantai pemasaran yang terjadi biasanya adalah petani menjual pada *bakul* kecil, kemudian para *bakul* kecil menjualnya kepada pedagang yang lebih besar, kemudian dipasarkan ke pasar-pasar sekitar lereng Merapi yang lebih besar atau ke luar daerah. Pada umumnya, hasil pertanian sayuran juga bisa dijual ke Pasar Cepogo, Boyolali untuk pedagang kecil dan bisa dijual ke Pasar Talun, Muntilan untuk pedagang besar.

4.7 Peternakan Sapi

Bahasan peternakan sapi ini akan menyajikan tentang adaptasi ekologi dan ekonomi orang Merapi dengan menyimak sisi sejarah perkembangan peternakan, pola pengelolaan ekosistem, pengelolaan bisnis, dan penanganan sapi pada masa aman dan darurat bencana alam. Orang Merapi dikenal sebagai peternak sapi, dan sebutan ini tidak salah karena ternak ini jumlahnya relatif banyak, dan ketika terjadi erupsi 2010 sebanyak 2.513 ekor lebih sapi mati, dan menjadi berita yang sangat menonjol di berbagai media massa sehingga mengundang program penggantian sapi mati oleh pemerintah. Jumlah sapi yang banyak di lereng Merapi itu bukan bersifat kebetulan. Sapi menjadi elemen penting dalam strategi adaptasi dan sekaligus sebagai sumber penghidupan orang Lereng Merapi.

Sebagai alat adaptasi orang Merapi dengan lingkungannya sapi merupakan bagian dari ekosistem. Sapi memerlukan rumput dan petani-peternak Merapi menyediakan rumput dari hasil budidaya maupun dari berkah alam Merapi yang menyediakan bahan pakan yang relatif memadai. Sapi kemudian mengeluarkan tenaga untuk dimanfaatkan sebagai penarik bajak dan kotorannya sebagai bahan pupuk kompos guna menghidupi tanaman di tanah pekarangan yang kemudian dimanfaatkan untuk bahan konsumsi dan kebutuhan hidup orang Merapi.

Sementara itu, sapi juga memberikan penghasilan kepada petani-peternak dalam berupa peningkatan produksi daging, anak hasil pengembangbiakan dan pemerahan susu. Usaha peternakan sapi sangat beragam di Merapi dari pengembangbiakan, penggemukan sampai dengan pemerahan susu dan keragaman ini mempengaruhi pula pola pemanfaatan lingkungan.

4.7.1 Sejarah Perkembangan dan Pola Usaha Peternakan Sapi

Keberadaan sapi di lereng Merapi merupakan bagian dari sejarah peternakan di Jawa tetapi lereng Merapi memiliki kekhasan sendiri dalam membentuk pola adaptasi ekologi dan ekonomi. Di Jawa pada umumnya pola adaptasi masyarakat berorientasi pada agroekologi sawah (Geertz, 1976), dan kemudian dalam rangka untuk mengatasi tekanan penduduk atas tanah, petani mengembangkan agroekologi tegalan (Palte, 1982). Walaupun dua macam agroekologi itu menonjol di pedesaan Jawa, kehadiran sapi dan kerbau sangat penting bagi keberhasilan bercocoktanam. Sapi dan kerbau menjadi kendaraan penarik bajak yang membantu petani dalam menyiapkan lahan sebelum ditanami padi atau jagung.

Sejarah sapi dan kerbau di Jawa kiranya terkait dengan upaya untuk mengganti tenaga manusia dalam penyiapan lahan sawah dan tegalan. Karena itu populasi kerbau atau sapi sangat besar di tanah Jawa pada masa silam. Statistik mengungkapkan jumlah ternak di Jawa tidak kalah dengan di Inggris dan Belanda pada dekade tahun 1940an (Hudayana 1996).

Di lereng Merapi, populasi ternak mula-mula didominasi oleh kerbau, tetapi lambat laun dengan meluasnya pertanian tegalan, populasi sapi meningkat sedangkan kerbau merosot. Sapi tidak begitu bergantung pada air, dan tahan bekerja di tanah tegalan yang kering, sedangkan kerbau lebih cocok di sawah basah.

Semakin ke atas, lahan pertanian di lereng Merapi merupakan lahan kering tegalan, dan menurut sejarahnya sebelum menjadi tegalan merupakan lahan hutan. Petani mula-mula membabat hutan untuk dirombak menjadi tanah tegalan, dan perombakan ini mengandalkan pada tenaga manusia dan sapi. Tenaga manusia

untuk membuat petak-petak tanah tegalan dengan cara menyingkirkan batu-batu ke pinggir secara rapi sekaligus dipakai sebagai pondasi dan tebing pematang. Setelah itu petak tanah diolah dengan menggunakan cangkul dan bajak sapi agar gembur dan siap ditanami jagung.

Menurut cerita rakyat, pengadaan sapi untuk membajak tegalan di lereng Merapi itu didukung oleh tersedianya pakan ternak yang berasal dari rumput terutama jenis alang-alang dan rumput yang tumbuh di sekitar 1 hingga 2 km dari puncak gunung. Wilayah tersebut merupakan kawasan hutan lindung yang secara tradisional merupakan padang rumput milik komunal. Dengan kata lain, wilayah tersebut menjadi sumber pakan komunal walaupun diklaim sebagai milik pemerintah. Rumput alang-alang dan gerpak tumbuh subur, dan biasanya justru semakin subur pasca erupsi. Dalam pandangan masyarakat, setiap kali erupsi maka alang-alang dan gerpak terbakar, tetapi setelah itu tunas baru tumbuh lebih cepat dari pada tanaman lainnya sehingga membentuk padang rumput yang cukup luas. Dengan demikian, erupsi bukan sebuah ancaman yang serius, tetapi sebagai suatu mekanisme untuk memulihkan keseimbangan ekologis rumput dan alang-alang yang menjadi pakan ternak sapi.

Petani-peternak memperoleh rumput alang-alang dan gerpak yang hijau sepanjang musim, sehingga mereka tidak akan mengalami kekurangan pakan pada musim kemarau sekalipun. Bagi peternak yang tidak memiliki lahan yang memadai, mereka bisa mengandalkan pakan dari wilayah padang rumput tersebut. Pada masa silam sebelum populasi sapi begitu banyak, seorang peternak dapat merumput setiap hari untuk memenuhi kebutuhan satu sampai dua ekor sapi tanpa harus menanam rumput di kebunnya.

Populasi sapi di lereng Merapi bagian atas didukung pula oleh adanya lahan milik komunal yang sering disebut sebagai kawasan jurang atau wedhi kengser. Di kawasan ini, rumput tumbuh dan bisa diperebutkan para peternak secara bebas atau diserahkan kepada komunitas dusun yang dialokasikan sebagai sumber pendapatan. Di Stabelan, Babadan, Jamburejo, Kaliurang Utara, Turgo, Kemiri Cilik, misalnya, lokasi tanah komunal itu di tebing dan bantaran Sungai. Di Stabelan, tanah komunal lazim disebut kawasan hutan yang ditumbuhi rumput,

dan rumput tersebut kadang diambil rumputnya ketika musim kemarau tiba. Di Turgo, tanah komunal sudah dikapling-kapling oleh generasi tua, sedangkan di Kemiri Cilik tanah komunal baru akan dikapling tahun 2010 tetapi kemudian terlanjur terkena erupsi. Di Sambungrejo, tanah milik negara dipahami oleh warga sebagai milik komunal dan pengelolaannya dilakukan oleh organisasi komunitas dusun. Pihak dusun lalu menyewakan tanah tersebut ke warga dan uangnya dipakai sebagai dana pembangunan RT.

Dengan didukung oleh ekosistem Merapi dan tersedianya tanah komunal itu, para peternak di hampir semua dusun mempunyai akses untuk meningkatkan jumlah binatang piaraannya. Hal ini dapat dibuktikan dari perkembangan ternak di Turgo. Jumlah sapi terus meningkat sejak tahun 1980 hingga tahun 2010. Mula-mula peternak Turgo mencari gaduhan dari peternak di Kaliurang yang jumlah ternaknya banyak dan kekurangan pakan. Ketika sapi banyak, peternak Turgo juga menggaduhkan ternaknya ke tetangga dan kerabatnya. Dengan cara seperti itu, maka jumlah ternak naik. Pada tahun 1985 penduduk Turgo sekitar 90 KK memiliki piaraan sapi sekitar 194 ekor dan sebagian besar merupakan sapi gaduhan dari orang milik Kaliurang. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Turgo mencapai sekitar 180 KK dengan jumlah sapi sekitar 365 ekor, dan sebagian besar sapi milik warga.

Tabel 4.10
Jumlah Ternak di Turgo

Tahun	Sapi Jawa	Sapi Perah	Jumlah
1980	107	-	107
1985	67	127	194
1988	50	145	195
1990	27	210	237
1992	13	225	238
1994	10	242	242
1995	-	123	123
1996	2	162	164
1998	-	183	183
1999	-	220	220
2000	-	251	251
2001	-	278	278
2002	-	316	316
2003	1	314	305
2010	1	364	365

Keterangan: Lihat Hidayana dan Dove (1996), sedangkan data tahun 2010 hasil studi lapangan.

Upaya meningkatkan jumlah sapi bukan hanya dilakukan orang Turgo. Di semua komunitas lereng Merapi atas, sebagian besar penduduk memiliki minat untuk beternak sapi karena didukung oleh adanya ekosistem Merapi yang menyediakan padang rumput dan tanah komunal yang menjadi penyangga tersedianya pakan. Dengan ternak sapi mereka bisa mengatasi keterbatasan lahan karena sapi akan menghasilkan pupuk yang nantinya bisa menyuburkan lahan guna ditanami jagung atau tanaman lainnya secara lebih intensif. Namun demikian, upaya petani lereng Merapi bagian atas itu tidak bisa diikuti petani di lereng bawah. Oleh karena itu, rata-rata jumlah ternak di lereng atas relatif banyak, mencapai sekitar satu sampai dua ekor per rumah tangga, sedangkan di

lereng bawah lebih kecil. Adapun yang berada di lereng bawah meliputi sebagian KRB II dan I, jumlahnya relatif lebih kecil, sekitar satu ekor per rumah tangga. Bahkan di Dusun Bronggang, hampir tidak ada rumah tangga yang memelihara sapi. Sedikitnya jumlah sapi di lereng bawah ini dipastikan karena tidak memiliki sumber pakan dari padang alang-alang dan rumput gerpak. Keterbatasan pakan itu membuat petani di dusun-dusun lereng bawah membiasakan diri bergantung pada budidaya tanaman pangan dan tanaman komoditas seperti sayuran dan salak.

Ada tiga pola usaha peternakan sapi di Merapi, yaitu pola pengembangbiakan, perah dan potong. Pengembangbiakan sapi merupakan pola yang paling awal dan relatif menonjol di lereng Merapi pada masa kini khususnya di wilayah Magelang dan Klaten. Dalam pola ini, sapi yang dipelihara adalah betina agar setelah dikawinkan akan melahirkan anak (*pedet*). Setelah cukup umur sekitar empat bulan, *pedet* disapih dan induk dikawinkan lagi agar melahirkan keturunan lagi.

Dalam sejarahnya, pengembangbiakan sapi itu disertai dengan pemanfaatan sapi untuk binatang penarik bajak, dan penggemukan sapi. Ketika usia dewasa, sapi dilatih untuk menarik bajak. Keterampilan menarik bajak akan mengangkat harga sapi tersebut. Biasanya sapi yang dipakai untuk menarik bajak adalah sapi jantan, tetapi tidak tertutup kemungkinan sapi betina. Kini jarang petani yang melatih ternaknya untuk menarik bajak, sebab semakin sedikit petani yang menanam jagung. Bajak diperlukan untuk pengolahan tanah yang luas untuk areal jagung karena bajak itu mampu menggemburkan dan membalikkan tanah lebih cepat daripada tenaga manusia.

Pedet jantan biasanya dijual setelah disapih, kalau tidak *pedet* itu digemukkan. Kini jenis sapi yang dikembangbiakan bukan lagi sapi Jawa tetapi sapi unggul seperti keturunan limosin dan simental dan paling tidak ongole (keturunan sapi India pada jaman penjajahan). Mereka juga bisa mendapatkan keuntungan lebih besar karena sapi ini lebih cepat tumbuh dan dagingnya lebih banyak daripada sapi Jawa.

Perubahan dari sapi Jawa ke sapi simetal atau limosin berlangsung sejak masa Orde Baru. Kini hanya beberapa gelintir saja yang masih mempertahankan

sapi Jawa. Di Turgo, misalnya pada tahun 1985, jumlah sapi Jawa masih sekitar 94 ekor tetapi kini hanya satu ekor saja dan peternak beralih ke sapi perah. Di beberapa dusun dalam wilayah Kabupaten Magelang, masih ada petani yang memelihara sapi Jawa karena mereka ini mempunyai harapan bisa menjual sapi tsb dengan harga yang tinggi pada masa hari raya haji.

Pola kedua adalah usaha peternakan sapi perah. Pemerintah pernah mengembangkan peternakan sapi perah di wilayah Boyolali dan Kaliurang sehingga desa di lereng Merapi yang masuk wilayah kabupaten Boyolali dan Sleman mengenal sapi perah. Di Sleman, sapi perah tersebar di beberapa dusun khususnya yang berada di sekitar 10 km ke atas. Hal tersebut terjadi karena peternak beranggapan bahwa udara di dusun tersebut relatif dingin sehingga cocok dengan habitat asli sapi perah. Selain itu, secara faktual dapat dijelaskan bahwa pada mulanya sapi perah tersebar dari Kaliurang lalu dan menyebar ke dusun tetangganya.

Sementara didukung oleh kondisi iklim, secara faktual persebaran sapi perah di wilayah Sleman didukung pula oleh terbentuk suatu kelompok koperasi di tingkat dusun, dan koperasi memiliki jaringan pemasaran langsung dengan perusahaan susu bubuk seperti SGM. Di wilayah Klaten dan Magelang tidak ada jaringan pemasaran susu sebaik di Sleman itu, sehingga inisiatif warga untuk memelihara sapi perah terkendala pemasarannya. Peternak di Stabelan juga tidak memelihara sapi perah. Sekalipun Stabelan masuk wilayah Boyolali sebagai sentra sapi perah di Jawa Tengah karena tidak ada jaringan distribusi susu.

Perkembangan usaha sapi perah di wilayah Sleman berlangsung sejak tahun 1980an. Hal tersebut dapat disimak dari kasus peternakan di Desa Hargobinangun dan Purwobinangun Kecamatan Pakem. Pada mulanya orang Turgo dan Kemiricilik di Desa Purwobinangun beternak sapi Jawa. Mereka kemudian mengikuti orang Kaliurang Hargobinangun yang mengembangkan ternak sapi perah sesuai dengan program pmda. Para peternak di Kaliurang yang kelebihan piaraan seperti memiliki ternak lebih dari 10 ekor, sering membeli rumput orang Turgo. Orang Turgo dapat dengan mudah menyediakan pakan dengan cara mencari rumput di gunung. Orang Turgo lalu tidak mau kalah.

Mereka tidak hanya menjual rumput tetapi juga berusaha untuk bisa menggaduh. Akibatnya, jumlah ternak gaduhan di Turgo lambat laun meningkat tahun 1980an-1990an.

Kejujuran dan ketekunan orang Turgo menjadi penggaduh meningkatkan kredibilitasnya, dan banyak pemilik ternak masuk dari pihak perorangan, pemerintah daerah, LSM dan lembaga sosial-keagamaan. Sapi perah kemudian menjadi andalan usaha peternakan di Turgo. Jika tahun 1980 umumnya populasi sapi masih varitas Jawa, mulai tahun 1985 terbalik dan populasi sapi Jawa merosot sehingga sekarang umumnya adalah sapi perah. Orang Turgo memilih sapi perah agar bisa memperoleh penghasilan setiap bulan. Alasan lainnya adalah susu sapi juga mudah dipasarkan karena terbentuk koperasi di desa yang bertindak memasarkan susu ke perusahaan terutama SGM.

Selain keuntungan ekonomi dari pemerahan susu, petani-peternak juga berharap dapat memperoleh keuntungan dari pengembangbiakan. Sapi yang sudah melahirkan *pedet* biasanya bisa diperah sampai sapi tersebut bunting kembali. Kelak setelah melahirkan anak sapi akan diperah susunya kembali. *Pedet* akan dipelihara sampai usia dewasa lebih, dan kemudian dijual atau dipakai sebagai bakal induk.

Pola ketiga adalah usaha ternak sapi potong, artinya petani-peternak memelihara ternak sapi jantan untuk dibesarkan dalam waktu singkat yakni sekitar 2 hingga 6 bulan agar siap dijual dan atau dipotong oleh pembelinya. Trend pemeliharaan sapi potong berlangsung sekitar 10 tahun terakhir ini tetapi belum membudaya di Merapi. Usaha ini dilakukan oleh penduduk di lereng Merapi bawah. Mereka berani memelihara sapi karena sumber pakannya terutama adalah konsentrat yang dibeli di pasar. Konsentrat merupakan pakan yang secara biologis mempercepat penggemukan sehingga usaha sapi potong bersifat komersial.

Kebanyakan usaha sapi potong memang dilakukan oleh peternak yang memiliki modal dan biasanya mereka memelihara milik sendiri. Mereka enggan menggaduhkan karena margin keuntungan sangat rendah dan resiko rugi sangat tinggi. Hal ini karena sekali penggaduh lengah dalam memberikan pakan,

misalnya tidak menyediakan konsentrat beberapa hari, sapi akan kurus dan sulit dipulihkan kembali.

Di Merapi, ada beberapa peternak kaya yang memelihara sekitar 10-30 ekor ternak sapi dengan memperkerjakan buruh sebanyak satu sampai 2 orang. Namun demikian, mereka ini adalah pendatang atau pengusaha yang menanamkan bisnisnya di lereng Merapi. Namun demikian, orang Merapi asli jarang yang berani mengembangkan ternak potong dalam jumlah yang banyak sekalipun memiliki modal. Mereka lebih memilih ternak sapi perah daripada sapi potong karena usaha sapi perah memberikan penghasilan yang relatif stabil dan besar, terutama dari susu dan bahkan anakan, dan modal untuk membeli konsentrat dapat diambilkan dari hasil penjualan susu.

4.7.2 Pengelolaan Usaha Peternakan Sapi

Sama seperti di pedesaan Jawa, peternakan sapi di Merapi merupakan usaha keluarga dalam arti semua urusan pemeliharaan dikelola oleh seluruh anggota keluarga, dan modal usaha peternakan tersebut tidak dipisahkan dengan harta keluarga. Keluarga merupakan unit produksi yang menyelenggarakan berbagai kegiatan ekonomi produktif, dan peternakan menjadi salah satu kegiatan. Dalam ekonomi keluarga, kehadiran sapi menjadi sumberdaya yang dapat memiliki banyak fungsi seperti sebagai modal usaha, investasi, sumber pendapatan, tabungan kekayaan, dan atau status sosial. Kompleksnya fungsi ternak itu membentuk pola usaha peternakan dalam keluarga berbeda dengan bisnis kapitalis.

4.7.2.1 Kepemilikan dan Pengadaan Bibit dan Induk Sapi

Posisi sapi sebagai harta milik keluarga menyebabkan sapi tidak hanya dimiliki oleh kepala keluarga tetapi juga semua pihak yang memberikan kontribusi pada kehadirannya di kandang. Dengan demikian, sapi merupakan harta suami istri ditambah anak jika anaknya sudah dewasa dan memberikan kontribusi yang besar dalam pencarian rumput liar di hutan. Sistem kepemilikan ternak seperti itu menjadi alasan mengapa hubungan gender di lereng Merapi relatif setara; dan hubungan anak dengan orang tua juga relatif seimbang

mengingat mereka sudah terbiasa mengembangkan kerjasama dengan saling menghargai kontribusinya.

Konsep bahwa sapi merupakan harta milik keluarga itu terlihat sejak awal mereka mulai memelihara. Umumnya orang Merapi mengatakan bahwa dalam mengembangkan usaha peternakan sapi dari nol, artinya dari modal tenaga kerja saja, dan bibit diperoleh dengan cara menggaduh. Dengan sapi gaduhan, para anggota keluarga petani ikut meliharanya. Baik suami atau pun istri dan anak saling bergantian mencarikan rumput, memberi minum, pakan atau memindahkan kotoran. Kerjasama itu membuat suami atau istri tidak bisa mengklaim bahwa sapi yang dipelihara adalah bagiannya.

Dalam rumah tangga petani-peternak, sapi yang dipelihara oleh anak dewasa status kepemilikannya hampir mirip dengan sapi gaduhan. Ini artinya ketika dijual dan harganya meningkat dari harga sebelumnya anak akan mendapat bagian. Demikian pula jika sapi itu melahirkan *pedet*, maka anak akan menerima imbalan atas jerih payahnya dalam mencarikan rumput setiap harinya. Dengan demikian, pola kepemilikan sapi sangat menghargai konsep kesetaraan berdasarkan peran dan kontribusinya dalam pemeliharaan ternak tersebut.

Dalam rumah tangga petani-peternak, orang tua yang sudah jompo sering mewariskan ternaknya kepada anak-anaknya sebagai suatu “imbalan” kepada anak-anaknya yang akan memeliharanya. Ngatimin di Turgo Tegal, misalnya pernah memiliki empat ekor, tetapi sekarang diwariskan ke anaknya. Ia sudah tidak bisa merumput. Ia tidak mau menggaduhkan ternaknya ke orang lain, karena lebih beresiko untuk diandalkan bagi sumber pemasukan dan tanggungan di hari tuanya. Pilihan yang masuk akal adalah diserahkan anaknya sebagai modal bagi anaknya dalam mengurus dirinya yang sudah jompo.

Karena merupakan harta milik bersama, maka ketika akan dijual biasanya suami dan istri dan anak yang dewasa melakukan perundingan dan mempunyai agenda bersama untuk memanfaatkan hasil penjualan itu apakah untuk dibelikan ternak baru atau dipakai untuk membeli barang dan membangun rumah. Lelaki tidak bisa sewenang-wenang menjual ternak dan memanfaatkan hasil penjualan tanpa konsultasi dengan istri atau anak.

Sebagai raja kaya yang secara harafiah harta raja, atau harta yang berharga, ternak diwariskan kepada anak lelaki atau perempuan. Apabila diwariskan kepada dua orang anak, maka salah satu biasanya diminta membelinya sehingga dalam keluarga besar masih ada salah satu pihak yang mewarisi usaha. Prinsip itu memungkinkan ternak tetap menjadi bagian penting dalam keluarga, dan prinsip itu juga memungkinkan keluarga tetap memiliki cadangan pupuk yang digunakan untuk kebutuhan bercocok tanam.

Dalam kondisi tidak memiliki harta warisan, keluarga biasanya menyiapkan modal dalam bentuk bibit, dengan cara menggaduh. Jarang sekali keluarga muda langsung membeli ternak di pasar. Mereka lebih suka menggaduh lebih dahulu sebagai kegiatan belajar dan mengurangi resiko. Dengan menggaduh mereka tidak perlu mengeluarkan modal, tetapi mereka dapat belajar tentang bagaimana memelihara ternak milik orang lain yang biasanya berkualitas. Mereka akan dengan sabar dan telaten memeliharanya agar bisa berkembangbiak dan anaknya bisa dibesarkan, kemudian dijual, dan hasilnya dibagi dua antara mereka dengan pemilik. Setelah itu mulai berusaha memelihara sapi bagiannya, dan terus dipelihara sebagai modal dan diupayakan untuk ditingkatkan menjadi dua ekor.

Selama 15 tahun terakhir ini beberapa keluarga besar menggalang pengadaan modal dengan cara *sharing* modal antar anggotanya. Hal ini dilakukan karena dua alasan. Pertama, mereka tidak sabar menunggu masuknya sapi gaduhan, dan lebih untung memelihara sapi milik sendiri. Karena itu petani-peternak yang masih sekerabat menjalin kepercayaan untuk melakukan *sharing* modal guna membeli bibit sapi atau induk sapi siap bunting. Kedua, mereka memandang bahwa investasi di bidang peternakan menguntungkan sehingga tabungan keluarga diinvestasikan ke sapi daripada ke tanah atau investasi ke tanaman misalnya salak atau sengon. Salah satu contoh misalnya keluarga besar kasus Turgo. Dua anak Sutirejo, mantan kepala dusun, bekerja di luar desa pada tahun 2004, dan mereka ini mempunyai tabungan. Mereka ini *sharing* modal dengan ibunya untuk membeli satu ekor sapi yang dipelihara oleh adiknya yang tinggal di desa. Dengan adanya gejala *sharing* modal itu, maka membuktikan

bahwa orang Merapi mulai mengembangkan bisnis sapi secara korporasi dan dapat mengurangi masuknya modal dari luar.

4.7.2.2 Skala Usaha

Secara umum usaha peternakan sapi di desa di Jawa sering disebut usaha skala kecil karena keluarga mempunyai kecenderungan untuk memelihara ternak dalam jumlah yang kecil antara satu sampai lima ekor. Kalau lebih dari lima ekor petani-peternak mengatakan banyak dan repot artinya memaksa mereka mencurahkan tenaga kerja secara maksimal sehingga dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial lainnya. Mereka memandang bahwa memelihara sapi dengan jumlah empat ekor merupakan jumlah yang ideal artinya usaha peternakan memberikan arti yang cukup besar bagi pendapatan keluarga, tetapi mereka masih bisa mencari nafkah di usaha tani atau kegiatan ekonomi non farm. Dengan demikian, peternakan merupakan bentuk usaha sambilan tetapi harus dikelola secara serius agar bisa mendatangkan keuntungan dan peningkatan pendapatan keluarga.

Dengan jumlah anggota keluarga dua sampai empat orang, dan kesibukan di berbagai bidang kegiatan ekonomi dan sosial, keluarga petani-peternak memang harus memelihara ternak dalam jumlah yang sedikit. Mereka harus mencurahkan waktu yang cukup lama untuk mengurus ternak setiap harinya. Di Turgo, misalnya, satu ekor sapi dewasa membutuhkan satu ikat rumput dengan berat sekitar 30 kg; dan satu ikat ini membutuhkan intensitas kerja sekitar 3 jam guna melakukan perjalanan menuju lokasi dan meramunya di tanah tegalan atau hutan, dan mengangkutnya ke kandang. Untuk rumput liar khususnya yang berada di padang rumput, peternak harus mengalokasikan waktu sekitar 4 jam, sedangkan untuk rumput tanaman sekitar 2 jam. Dengan demikian, kalau memelihara tiga ekor harus mengeluarkan waktu 9 jam, sehingga rumah tangga peternak harus mengalokasikan dua orang pekerja agar masing-masing bisa menuntaskan pekerjaan lainnya di pertanian atau rumah tangga.

Dalam pandangan petani peternak, alokasi tenaga terbanyak adalah kegiatan merumput, dan kegiatan ini penting karena tanpa rumput yang memadai,

usaha peternakan akan gagal, sebab sapi akan kurus. Umumnya petani-peternak berpandangan bahwa kalau diimbangi dengan menambah konsentrat, maka diperlukan biaya sehingga lebih baik diperbanyak rumputnya yang diperoleh dengan cara meramu, bukan membeli. Konsentrat merupakan pakan binaan pabrik yang harus dibeli jika petani enggan merumput.

Karena strategi usaha yang ditempuh adalah mengandalkan pada pakan rumput, maka keluarga banyak mencurahkan tenaganya dalam kegiatan pencarian rumput. Petani-peternak harus bolak-balik dari rumah ke kebun atau hutan guna mendapatkan rumput untuk dua ekor atau lebih sapi. Satu ikat rumput memakan waktu sekitar 3 jam, sehingga harus bolak balik tiga kali kalau sampai memelihara dua ekor lebih. Untuk mengantisipasi panjangnya jam kerja itu petani-peternak kemudian menanam rumput di kebunnya, sehingga tidak harus mencari rumput di hutan, atau mereka bisa memelihara lebih dari dua ekor.

Strategi petani-peternak dengan memelihara jumlah satu sampai lima ekor sapi merupakan implikasi dari keterbatasan lahan yang mereka miliki. Dengan lahan yang sempit semakin sulit meningkatkan jumlah ternak. Untuk mengatasinya maka peternak menghadapi pilihan yaitu mengurangi mengutamakan tanaman pangan atau tanaman pangan dan kayu-kayuan. Pilihan itu direspon berbeda-beda antara petani-peternak di lereng Merapi. Pilihan pertama diambil oleh orang Turgo dan sebagian orang Kinahrejo, dan orang Kemiri Cilik serta Kaliurang. Mereka meninggalkan tanaman jagung dan beralih ke tanaman rumput. Mereka mengenal berbagai jenis rumput yang produktif.

Rumput ditanam di seluruh areal tanah dan diselingi dengan tanaman keras. Bila mereka membutuhkan tanah untuk tanaman sayuran, mereka hanya mengambil sebagian kecil petak sawah, agar cadangan rumput melimpah, baik musim hujan maupun musim kemarau. Pakan yang berasal dari alang-alang dan rumput liar yang tumbuh di hutan tetap diambil guna memperkuat cadangan pakan. Akan tetapi, mereka bisa mengurangi ketergantungan. Hanya pada musim kemarau panjang mereka akan sering merumput ke hutan tersebut.

Pilihan kedua diambil oleh orang Stabelan, Babadan, dan Kaligentong dan Sambungrejo serta Trono. Mereka sangat menggantungkan pangan jagung demi

menjamin keamanan subsistensi. Dengan sapi pengembelian, mereka tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal bila mengganti jagung dengan rumput. Kekurangan pakan diambilkan dari daun jagung (*tebon*) sekalipun proporsinya tidak sebanyak kalau tanah ditanami rumput saja. Dengan memprioritaskan pada tanaman jagung seperti itu, maka petani harus membatasi jumlah ternak yang dipelihara. Rata-rata mereka lebih suka memelihara sekitar satu hingga dua ekor, berbeda dengan orang Turgo yang berani memelihara antara tiga hingga lima ekor.

4.7.2.3 Kandang

Kandang menjadi elemen penting dalam pemanfaatan ternak bagi ekosistem pertanian dan penyelamatan sapi pada masa bencana alam. Menurut sejarahnya, ternak pada mulanya digembalakan di lahan, tetapi lambat laun karena alasan keamanan dan keterbatasan lahan, serta upaya untuk meningkatkan pemeliharaan, sapi kemudian di kandang (Hudayana, 1987). Umumnya petani-peternak membangun kandang di sebelah kiri atau belakang rumah. Secara simbolik, Kiri dalam pandang orang Merapi seperti Jawa pada umumnya bermakna kotor dan kanan bersih sehingga lokasinya ditempatkan di sebelah kiri rumah. Kandang dibuat dari kayu tetapi belakangan sekitar 10 tahun yang lalu, warga mulai mengembangkan kandang permanen dari beton cor. Pembangunan kandang permanen ini dimaksudkan agar bangunan lebih kuat, awet dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tempat pembuangan kotoran dan sisa makanan serta pembuangan air.

Di beberapa dusun seperti di daerah Stabelan, dan Babadan, dan Trono, karena lahan pekarangan terbatas, maka sapi tinggal serumah dengan manusia. Mereka menempati sisi kiri atau bagian belakang. Bangunan kandang terdiri atas tiga bagian yaitu: tempat gudang pakan, tempat ternak makan, dan minum, tempat tidur, dan pembuangan kotoran dan pakan kering yang tidak termakan. Pada bagian lantai diperkeras dan dibuatkan saluran pembuangan air. Khusus untuk sapi perah, kadang disiapkan tempat pemerahan susu di luar kandang tidur agar proses pemerahan dapat dengan kondisi ruang yang lebih bersih.

Lima tahun terakhir ini para peternak di beberapa dusun yang sapinya serumah dengan manusia, mulai menerima tawaran pemerintah daerah untuk mendirikan kandang kelompok sehingga di beberapa dusun, sapi yang tinggal rumah dipindah ke kandang kelompok. Salah satu contoh adalah kandang kelompok di Kemiri Cilik. Tujuan awal pemindahan adalah untuk kesehatan manusia di rumah tetapi tujuan selanjutnya adalah mengakses bantuan pemerintah dan pelayanan kesehatan ternak, dan meningkatkan akses kelompok pada pemasaran kotoran ternak.

Walaupun kandang kelompok diterima oleh petani-peternak yang pekarangannya sempit, petani-peternak yang pekarangannya luas menolak. Mereka lebih suka memelihara ternak di dalam pekarangan. Alasan utama adalah mudah mengurus ternak setiap hari, dan tidak perlu ronda dan kewajiban lain dalam kelompok.

Selama tiga tahun terakhir ini sebagian kecil warga mulai memikirkan pengembangan kandang di pekarangan sebagai penghasil pupuk yang berkualitas dan biogas. Mereka mulai mencoba membuat pupuk kompos dengan menggunakan teknik efisien, seperti menyediakan tempat untuk membolak-balik kotoran dan menambah campuran material agar cepat terproses dan menjadi pupuk yang baik. Selain itu, dua hingga lima petani-peternak dalam setiap dusun di Sleman telah membangun instalasi biogas dan hasilnya menarik minat komunitas untuk mengikuti.

Kecenderungan petani memiliki kandang individual di perorangan daripada kandang kelompok membuat mereka tidak mudah ikut program relokasi pemerintah daerah pasca erupsi 2010. Bagi mereka memelihara sapi di kandang sendiri tidak sekedar memiliki alasan praktis dan ekonomis tetapi psikologis, dan kekeluargaan. Khusus alasan kekeluargaan sangat penting karena sebagaimana disimak di muka, sapi merupakan ternak milik keluarga yang menyatukan anggota keluarga saling bekerjasama untuk merawatnya.

4.7.3 Kontribusi Peternakan Sapi terhadap Agroekologi di Pedesaan Merapi

Ternak sapi di Merapi menjadi bagian integral dari sistem tegalan yang menghasilkan aneka tanaman dari tanaman pangan, sayuran, salak dan kayu-kayuan. Tanpa hadirnya sapi, ekosistem tegalan di Merapi tidak akan berfungsi menghasilkan produk tanaman tersebut secara keberlanjutan dan petani terjebak pada sistem pertanian anorganik yang memaksa mereka harus mengeluarkan modal guna membeli pupuk pabrikan.

Peternakan sapi di Merapi menjaga keselarasan alam, membantu proses daur hidup di dalam perputaran energi. Sapi bisa membuat padang ilalang dan rumput di puncak Merapi bermanfaat. Hal ini karena ilalang dan rumput itu kemudian menjadi pakan ternak khususnya ternak sapi yang berada di dusun-dusun atas. Dengan menjadi pakan, maka kemudian rumput tersebut berubah menjadi residu dalam bentuk kotoran yang menjadi bahan pupuk kandang yang berguna sebagai nutrisi tanah di lereng Merapi bagian bawah. Kalaupun tidak dari padang ilalang, kehadiran sapi di Merapi pada umumnya menjaga daur kehidupan yang sangat positif. Rumput liar dan sisa hasil berocoktanam seperti daun-daunan bisa terolah kembali menjadi nutrisi tanaman komoditas dan pangan yang berguna bagi kehidupan petani-peternak. Dengan kata lain, petani-peternak memberikan sumbangan yang penting bagi kestabilan ekosistem tegalan. Lahan Merapi tidak cukup subur jika dieksploitasi terus menerus sepanjang tahun tanpa diperbaiki kualitasnya. Akan tetapi, petani-peternak memperbaikinya dengan menyediakan pupuk kandang yang bahannya berasal dari kotoran sapi bercampur dengan daun dan rumput yang membusuk di kandang.

Pada mulanya, orang Merapi mengenal pupuk kandang dari pengalaman empirik mereka bercocoktanam, yaitu tanah yang habis dibuka dari hutan menjadi ladang selalu subur karena memiliki humus yang tebal. Humus itu dari daun-daunan, dan mereka yakin bahwa kotoran sapi adalah bentuk lain dari daun yang membusuk dan mengering sehingga siap dipakai untuk menyuburkan tanah (Hidayana dan Dove, 2004). Pengalaman orang Turgo mengenai pupuk kandang merupakan warisan generasi tua yang menjadi cikal bakal desanya. Susah

dilacak apakah mereka langsung mengenal secara alami atautkah belajar dari penduduk di desa lain. Etnobotani orang Merapi yang merupakan endapan pengalaman bertani menegaskan pentingnya menjaga kualitas tanah untuk menjamin kesuburan tanaman. Tanah yang diolah terus menerus dikatakan akan rusak, oleh karena itu dalam sistem bertani tempo dulu, seperti dalam perladangan, sistem *bero* dianggap terbaik (Handjojo, 1985). Kini *bero* diartikan sebagai upaya untuk memelihara rumput. Dalam konsepsi etnobotani, orang Turgo menilai bahwa tanah yang subur adalah yang rumputnya juga tumbuh subur. Lebih lanjut rumput yang subur biasanya pada tanah yang dibuangi pupuk. Seorang warga mengatakan bahwa aneka jenis rumput baru sering muncul pada tanah yang ditebahi oleh pupuk kandang. Pengalaman itu merupakan sebuah warisan masa lalu bahwa ketika kotoran domba atau sapi dibuang ke kebun maka dengan cepat tumbuh rumput dan lahan itu pun menjadi baik untuk tanaman jagung atau tanaman lainnya.

Mula-mula penggunaan pupuk kandang dipakai untuk tanaman jagung, sayuran dan tembakau tetapi kemudian petani menggunakan untuk segala macam tanaman tidak terkecuali rumput. Setiap tahun, minimal satu petak lahan perlu satu kali pemupukan sehingga kebutuhan pupuk cukup tinggi. Menurut sistem agroekologi di Turgo, produksi pupuk per ekor sapi adalah sekitar Rp 2.400,00 per kilogram per tahunnya atau sekitar empat truk (16 kubik). Pupuk sebanyak itu bisa memenuhi kebutuhan pemupukan untuk tanah 2.000 m². Dengan kata lain, 1,2 kilogram pupuk kering untuk satu meter persegi. Kalau dihitung per hektar maka diperlukan paling tidak lima ekor sapi agar seluruh lahan bisa mendapatkan pupuk. Dengan menggunakan perhitungan yang berbasis pada agroekologi orang Turgo, maka dapat diperkirakan kebutuhan pupuk di lereng Merapi, dan sumbangan petani- peternak untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Secara umum wilayah lereng atas Merapi mengalami surplus pupuk karena petani dengan lahan sekitar 0,5 hektar, dan rata-rata memiliki sapi sebanyak tiga ekor, sedangkan di lereng bawah ternak sapi per rumah tangga petani hanya satu ekor. Dengan memiliki tiga ekor sapi, itu petani hanya membutuhkan separoh hasil produksinya dan sisanya bisa dijual. Memang umumnya petani-peternak

lereng bagian atas sering menjual pupuk ke luar dusun bahkan sampai ke luar dari desanya. Apalagi ketika mereka tidak lagi menanam jagung seperti orang Turgo, maka kebutuhan pupuk kandang berkurang drastis dan menghasilkan surplus pupuk yang bisa dijual kepada petani salak, cabe atau sayuran. Para petani tersebut memang terkenal sebagai pembeli pupuk para petani-peternak di lereng atas. Hal ini tergambar dalam realitas empiris bahwa hampir setiap hari selalu datang truk dari daerah pertanian salak ke Turgo untuk membeli pupuk kandang. Banyak peternak di Turgo yang belum siap menyediakan pupuk dalam volume satu truk, tetapi pembeli mau mengambil pupuk mereka sekalipun masih satu kubik. Pembeli lalu mengumpulkan pupuk per kubik dari rumah ke rumah di Turgo untuk memenuhi pesanan pupuk dari petani salak atau cabe.

Orang Merapi memiliki pengetahuan tentang bagaimana mengatur hubungan antara ternak, manusia dan sumber daya. Ketika sapi diposisikan sebagai sumber penghasilan, maka mereka harus menyediakan dan mencari rumput dan ketika rumput liar atau tanah komunal terbatas, mereka melembagakan praktik jual-beli rumput. Rumput menjadi komoditas dan bersamaan dengan itu pupuk kandang pun menjadi komoditas yang berguna untuk dipakai sebagai bahan guna membeli rumput. Di lereng Merapi, komoditisasi rumput dan pakan berlangsung marak, dan gejala ini justru memudahkan petani untuk mengembangkan tanaman yang lebih cocok dengan kondisi ekologisnya. Untuk tanah-tanah yang tidak produktif, berada di tebing dan pematang, maka tanah tersebut dimanfaatkan untuk rumput agar bisa berfungsi untuk mencegah erosi dan sekaligus memberikan keuntungan ekonomi. Petani yang tidak memiliki sapi bisa menjual rumput kepada rekannya yang membutuhkannya. Sebaliknya, petani yang surplus pupuk dapat menjual pupuknya kepada petani non-peternak. Hubungan simbiotik antara peternak dengan petani itu berlangsung di level antar dusun dan antar desa sehingga memungkinkan produksi pertanian di lereng Merapi relatif stabil.

4.7.4 Kontribusi Usaha Peternakan Sapi terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga

Peternakan sapi bukan hanya memberikan kontribusi keseimbangan ekologis dan bertahannya pertanian organik di lereng Merapi tetapi juga pendapatan keluarga. Pendapatan ini diterima oleh 1) pemilik sapi dan penggaduh, (2) petani-peternak, (3) supir truk/pedagang pupuk, (4) petani-peternak produsen rumput, (5), mantri hewan, (6) pengelola koperasi susu, dan (7) pedagang sapi (*blantik*).

Dalam sistem penggaduhan, para pihak yang terlibat adalah pemilik sapi dengan penggaduh. Secara tradisional, pemilik sapi menerima 50 persen, dan ia hanya mengeluarkan modal dalam bentuk bibit atau induk sapi untuk dipelihara. Selama lima tahun terakhir ini, pola bagi hasil di beberapa dusun berubah, pihak pemilik modal menerima 40 persen sedangkan pemelihara 60 persen. Hal ini terjadi karena minat pemodal meningkat jumlahnya sedangkan penggaduh merosot. Para penggaduh juga merasakan semakin langkanya rumput liar, dan mereka cenderung menggunakan rumput tanaman miliknya.

Dalam sistem penggaduhan, rata-rata petani penggaduh bisa memperoleh keuntungan kotor senilai Rp 1.800.000,00 dari satu ekor induk. Keuntungan itu terdiri atas 80 persen hasil penggemukan atau pengembangbiakan, dan 20 persen dari pupuk. Namun demikian, jika bernasil baik, karena sapi induk melahirkan *pedet* yang bagus, keuntungan bisa diraih menjadi Rp 2.800,00 Dengan mengikat pinggang, petani-peternak bisa membeli sapi sendiri setelah menggaduh dua sampai tiga kali, dan mereka merintis dengan cara memelihara *pedet* atau bakal indukan.

Kedua adalah petani-peternak mandiri. Mereka dapat memperoleh semua jenis keuntungan, dari hasil pengembangbiakan, penggemukan dan pemerahan susu serta produksi pupuk kandang. Studi ini mencermati bahwa petani-peternak tersebut terdiri atas tiga kelas sesuai dengan jumlah ternak, yaitu kelas bawah, menengah dan atas. Petani-peternak kelas bawah adalah yang piaraannya antara satu sampai dua ekor induk, kelas menengah antara tiga sampai empat ekor induk, dan kelas atas antara lima sampai enam ekor induk.

Berdasarkan diskusi mendalam dengan para petani-peternak, khususnya di daerah Turgo dan Jamburejo, penghasilan bersih petani-peternak kelas bawah adalah sekitar Rp 8.500.000,00 per tahun, kelas menengah sekitar Rp 20.000.000,00 dan kelas atas Rp 25.000.000,00 per tahun. Dengan ternak tiga sampai empat ekor induk, keluarga tidak perlu menggunakan buruh atau membeli pakan guna memelihara sapi induk tersebut ditambah dengan anak-anaknya baik yang masih *pedet* atau sudah dewasa, sehingga keuntungan dari usaha ternak bisa maksimal. Adapun, dengan ternak lima sampai enam ekor induk dan ditambah *pedet* dan sapi dewasa keluarga biasanya memerlukan tenaga tambahan, dana untuk secara rutin untuk membeli pakan konsentrat dan pakan pada musim kemarau.

Penghasilan petani-peternak lebih rendah pada peternak sapi kembangbiakan dibandingkan sapi perah. Pendapatan bersih sapi perah bisa mencapai Rp 11.000,00 untuk usaha satu sampai dua ekor induk; Rp 23.000.000,00 untuk ternak tiga sampai empat ekor induk; dan Rp 30.000,00 untuk lima sampai enam ekor induk. Penghasilan petani-peternak sapi perah lebih tinggi dibandingkan usaha sapi biasa karena adanya keuntungan dari susu. Satu ekor sapi bisa mengeluarkan susu selama delapan bulan dengan volume lima sampai enam liter per hari dan harga sekitar Rp 3.000,00 per liter belum termasuk biaya untuk menyediakan pakan konsentrat.

Penerima keuntungan ketiga adalah pedagang pupuk kandang. Harga pupuk kandang per truk bervariasi dari Rp 100.000,00 sampai dengan Rp 300.000,00 tergantung dari kualitas dan jarak tempat pengambilan pupuk itu dari jalan yang bisa dilalui angkutan truk dan colt. Setiap tahun petani-peternak yang memelihara satu sampai dua ekor masih mengalami devisa, tetapi kadang menjual pupuk kandangnya demi memenuhi kebutuhan ekonomi yang amat mendesak. Khusus untuk petani peternak menengah dan atas mereka cenderung memiliki surplus setiap tahunnya. Menurut informan paling tidak mereka biasa menjual satu sampai dua truk pupuk setiap tahunnya dengan harga antara Rp 100.000,00-Rp 300.000,00 per rit.

Di setiap desa biasanya ada satu sampai dua orang yang berprofesi sebagai supir truk, dan 5-10 orang yang berprofesi sebagai supir colt. Mereka inilah yang menikmati bisnis pupuk, selain itu juga supir dari luar yang justru sering datang karena memperoleh pesanan dari petani salak, sengan, sayuran dari berbagai desa. Menurut seorang supir *colt* di dusun penelitian, paling tidak dalam satu tahun ia bisa melayani penanggulangan pupuk sebanyak 40 kali. Adapun seorang supir truk bisa membawa keluar pupuk sebanyak 25 kali.

Survei perdagangan pupuk di Turgo bisa memberikan ilustrasi banyaknya pupuk yang keluar Turgo selama tahun 2009-2010 sebelum erupsi Merapi berlangsung. Di setiap RT selalu ada lima orang yang menjual pupuk setiap bulannya, sehingga dalam tempo satu bulan ada 20 orang, dan dalam satu tahun ada 240 orang dengan volume pupuk sebanyak 240 bak truk. Pupuk itu dijual ke berbagai desa di lereng Merapi di wilayah Sleman dan Magelang. Di Sleman, pupuk dijual untuk melayani konsumen di Kecamatan Pakem dan Turi yang bercocoktanam salak dan cabe, dan Kecamatan Srumbung yang bercocoktanam sayuran. Supir dari luar dusun lah yang paling sering mendapat pesanan pupuk dari Turgo. Mereka sudah mempunyai langganan dari tetangga yang memerlukan pupuk pada musim tanam.

Kelompok empat adalah petani rumput. Umumnya yang menanam rumput adalah peternak. Mereka berkepentingan agar kalau rumput tidak laku dijual, maka akan dipakai sendiri. Ada dua pola penjualan rumput, yaitu sistem tebasan per petak dan penjualan per unting besar. Dalam kasus pola pertama, para peternak yang kekurangan rumput biasanya akan mencari petani yang surplus dan akan menebas sebagian dari lahan rumputnya untuk satu kali potong serempak. Harga rumput biasanya ditentukan dari hasil tawar menawar, tetapi ada pola bahwa satu petak seluas 100 m² harganya sekitar Rp 400.000,00 dengan demikian per meter persegi harganya sekitar Rp 4.000,00. Dalam kenyataannya, harga rumput sangat bervariasi antar dusun. Di Turgo, misalnya, harga jauh lebih mahal dibandingkan di Kemiri Cilik karena kepadatan ternak di Turgo sangat tinggi. Sementara itu, semakin ke lereng bawah, misalnya, di wilayah KRB I, harga semakin mahal pula karena semakin sulit bagi peternak untuk mengatasi

kekurangan rumput mengingat umumnya lahan untuk tanaman pangan, bukan rumput.

Pola kedua adalah peternak mendatangi pemilik rumput dan menyatakan ingin menebas satu unting besar. Penebasan seperti ini dilakukan untuk mengatasi kebutuhan rumput satu sampai dua hari, dan dilakukan antar orang yang masih sedusun. Niat jual-beli lebih bersifat tolong menolong. Tetangga yang kekurangan rumput ditolong tetapi dengan harga yang standar. Di Turgo harga satu ikat rumput berkisar Rp 20.000,00 yang bisa dipakai untuk memberi pakan dua ekor sapi sehari. Adapun di Kemiri Cilik harga Rp 15.000,00 tetapi ikatannya lebih kecil.

Kelompok petani di desa lainnya yang menikmati ekonomi peternakan adalah pengelola koperasi susu. Mereka sering mengatakan tugasnya hanya mencatat susu yang ditampung di koperasi, tetapi sebenarnya mereka juga mendapat hasil dari kegiatan tersebut dan imbalan yang diterima setiap bulannya sekitar Rp 200.000,00-Rp 300.000,00 sesuai dengan volume dan frekuensi pemerahan susu. Di Kaliurang dan beberapa dusun di Cangkringan susu diperah dua kali sedangkan di Turgo dan beberapa dusun di Klaten diperah satu kali saja karena petani enggan memberikan pakan konsentrat demi menghemat pengeluaran.

Kelompok empat adalah mantri ternak. Mereka ini semakin laku karena semua proses perkawinan sapi hampir seluruhnya dilakukan dengan memakai inseminasi buatan. Petani percaya bahwa beberapa mantri bisa menangani dengan baik. Setiap hari mantri berkeliling dari dusun ke dusun, bahkan dalam satu hari ia bisa memberikan layanan lima kali. Satu kali suntik harganya sekitar Rp 30.000,00 dan bisa bervariasi antar dusun tergantung dekat tidaknya dusun tersebut dengan rumah mantri. Khusus untuk sapi perah ongkos per suntik bisa mencapai Rp 40.000,00. Mantri memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp 20.000,00 per suntikan.

Cerita yang beredar di masyarakat mengatakan bahwa mantri suntik itu kaya, tidak kalah dengan dokter hewan atau dokter manusia. Kalau mantri dalam sehari bisa melayani 10 ekor sebagaimana biasanya dilakukan, maka bisa meraih

pendapatan sekitar Rp 200.000,00 per hari, belum lagi mantri masih mendapat pemasukan dari layanan kesehatan ternak lainnya. Pendek kata mantri sebenarnya yang paling menikmati keuntungan dari peternakan sapi.

Kelompok terakhir adalah *blantik* yaitu pedagang sapi. Blantik sering berperan ganda di satu sisi sebagai penolong dan di sisi lain sebagai pemeras. Peternak sering menghadapi kekurangan modal, tetapi kemudian ditolong *blantik* untuk mendapatkan sapi yang murah harganya. Namun seringkali peternak dijerat oleh *blantik*, sapinya ditawar murah, dan bahkan dibayar tidak penuh baru penuh ketika ia sudah untung dari bisnis sapi dengan pihak lainnya. Oleh karena itu, ada upaya kerjasama antara peternak dengan *blantik*. Peternak akan mencari *blantik* yang baik, dan sebaliknya *blantik* menjaga kepercayaan.

Penghasilan *blantik* sangat bervariasi, dan tidak sedikit yang gulung tikar karena harga sapi juga naik-turun di pasar. Umumnya *blantik* menargetkan dapat untung sebanyak Rp 100.000,00 per ekor sapi untuk satu kali transaksi per harinya. Tuntutan yang ideal menurut par *blantik* adalah mendapat keuntungan sebanyak Rp 300.000,00 tetapi sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan sebesar itu, karena petani biasanya membawa sapinya kepada dua orang *blantik* untuk memperoleh harga yang wajar dan maksimal.

Di setiap desa biasanya ada sekitar satu sampai tiga orang *blantik*. Kalau sampai tidak ada *blantik* di sebuah dusun, biasanya ada satu sampai tiga orang anak buah *blantik* yang tugasnya melakukan aksi *glembuk* (rayuan) kepada peternak agar peternak mau menjual sapi lewat dirinya. Dengan berperan sebagai kaki tangan, mereka bisa mendapat keuntungan antara Rp 25.000,00 sampai dengan Rp 10.000,00 tergantung keuntungan yang diperoleh.

Para *stakeholder* atas usaha peternakan sapi sangat menentukan kesejahteraan peternak sapi di Merapi. Pemerintah, misalnya sangat diuntungkan dari adanya usaha peternakan sapi perah di Kaliurang, maupun sapi potong. Merosotnya harga di pasar karena impor sapi besar-besaran pada tahun 2010, yakni sekitar Rp 650.000,00 per ekor misalnya membuat keprihatinan semua pihak tetapi yang paling rugi adalah petani-peternak. Namun

karena usaha peternakan sudah menjadi bagian dari adaptasi dan kehidupan, maka petani tetap mempertahankannya.

Kalau disimak lebih lanjut besarnya sumbangan ternak terhadap ekonomi rumah tangga petani-peternak, maka tidak diragukan bahwa usaha pengembangbiakan atau pemerahan susu memberikan pendapatan yang bisa membuat petani dapat hidup kecukupan di lereng Merapi. Pendapatan dari ternak sapi biasa membuat keluarga keluar dari sangkar kemiskinan.

Sumbangan ternak terhadap ekonomi rumah tangga bervariasi menurut jumlah ternak yang dipelihara, dan posisi peternakan dalam agroekologi. Bila ternak menjadi strategi adaptasi utama seperti di Turgo, maka sumbangan peternakan sangat besar, tetapi bila hanya untuk melengkapi agroekologi salak seperti di Kalurang Utara, atau pangan seperti di Sambungrejo maka sumbangannya lebih kecil.

Studi di Turgo tahun 2003 dan tahun 2009 menemukan bahwa rata-rata petani menggarap tegalan seluas 0.5 hektar dan sapi sebanyak 3 ekor. Hasil analisis tahun 2003 mendapatkan temuan bahwa ternak memberikan sumbangan sekitar 45 persen dari total pendapatan rumah tangga (Hidayana dan Dove, 2006). Sumbangan pendapatan ini merosot pada tahun 2010 menjadi 35 persen karena harga ternak jatuh, dan harga susu juga tidak naik setinggi seperti pada harga produk pertanian.

Dalam studi tahun 2003, Hidayana dan Dove mendapatkan temuan bahwa pendapatan peternak kotor adalah sekitar Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada tahun 2010 menjadi Rp 12.000.000,00. Pendapatan terbanyak adalah dari pengembangbiakan dan pemerahan susu yang memberikan sumbangan sekitar 70 persen, sedangkan sisanya dari hasil menjual rumput, dan pupuk kandang. Pendapatan yang berupa uang *cash* adalah pada penjualan susu yang bisa mencapai Rp 5.200.000,00.

Tabel 4.11
Penghasilan Rumah Tangga Petani-Peternak Sapi 2003 dan 2010

Sumber Penghasilan	Jumlah Panenan bersih	Penghasilan Tahun 2003	Penghasilan Tahun 2010 (Pra erupsi)
Usaha Tani			
Tanaman Kayu- kayuan	35 bongkok kayu dan 1 pohon	375.000	650.000
Hasil ikutan tanaman kayu-kayuan	20 bongkok <i>ramban</i>	160.000	400.000
Tanaman ubi-ubian	50 kg	50.000	100.000
Tanaman sayuran	50 unit	50.000	50.000
Tanaman buah-buahan	30 buah	320.000	640.000
Usaha Peternakan			
Penggemukan 3 ekor (1 pedet; 2 induk)		400.000	200.000
Produksi susu (setelah dikurangi konsentrat)	2 ekor induk	3.500.000	6.000.000
Pengembangbiakan	<i>Pedet</i> (4 bulan)	1.500.000	3.000.000
Penjualan pupuk kandang		900.000	1.500.000
Penjualan Rumput			400.000
		8.500.000	12.000.000

Keterangan: Data Tahun 2003 Diambil dari Hasil Studi Hidayana (2004), sedangkan Data Tahun 2010 Hasil Studi Ini

Dengan pendapatan senilai Rp 12.000.000,00 per tahun, rumah tangga petani-peternak sebenarnya menikmati pendapatan yang kecil karena rata-rata per orang hanya mendapatkan penghasilan dari ternak sekitar Rp. 500.000,00 per bulan. Walaupun demikian, penghasilan itu hanya sebagian dari penerimaan langsung atau tidak langsung yang diterima rumah tangga. Penerimaan lainnya yang ditunjang oleh peternakan adalah hasil budidaya tanaman pangan ubi-ubian, kayu dan bambu yang memberikan penghasilan cukup besar pula.

Dengan adanya kombinasi sumber penghasilan itu ternyata ekonomi petani-peternak bisa bergerak maju, mengangkat kesejahteraan bersamaan di lereng Merapi. Salah satu penjelasan yang masuk akal adalah karena pendapatan ternak oleh rumah tangga lebih diposisikan sebagai tabungan manakala rumah tangga masih mempunyai sumber pendapatan lainnya yang bisa dimanfaatkan setiap hari untuk menopang konsumsi pangan.

Wawancara mendalam dengan para petani-peternak mengungkapkan bahwa selama 20 tahun terakhir ini mereka bisa bangkit dari kemiskinan. Mereka bisa makan setiap hari walaupun produksi jagung kurang dan bahkan tidak mau menanam lagi karena lebih untung menanam rumput. Kini mereka bisa membeli nasi dari sebagian hasil pemerah susu dan bisa menabung dari hasil menggemukkan atau mengembangbiakkan induknya. Tabungan itu bisa dipakai untuk biaya pendidikan, kesehatan dan kalau kebutuhan tersebut sudah terlewati, maka uangnya dapat dipakai untuk membangun rumah. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa rumah-rumah di Turgo bisa berubah total dari bangunan *gedhek* (anyaman bambu) pada tahun 1980 kemudian menjadi bangunan tembok. Demikian pula ketika bencana Merapi 1994, hanya ada 27 buah sepeda motor yang dimiliki orang Turgo tetapi kemudian kini mencapai 128 buah.

Masa depan peternak sapi yang dulunya dipahami sebagai kelompok marginal (*wong ngarit; wong angon*) menjadi terbalik dengan sebutan *wong ayem, wong kepenak* (orang tenteram dan orang enak). Orang Turgo sendiri menyebut bahwa mereka hidup ayam-tentrem dan enak. Pernyataan mereka itu dapat dipahami karena peternakan yang semakin membutuhkan lahan untuk rumput sekalipun tetap memberikan ruang bagi produsen skala kecil ini untuk menyediakan produk yang semakin dibutuhkan oleh pasar. Masalahnya adalah pemerintah justru mengabaikan peran para peternak sapi dalam penguatan ekonomi kerakyatan sehingga mereka merosot usahanya karena masuknya sapi dan susu impor secara berlebihan. Pemerintah juga tidak mendorong kenaikan harga susu sehingga para petani kurang bergairah meningkatkan jumlah ternaknya.

4.7.5 Pengungsian dan Penyelamatan Ternak Era dan Pasca Erupsi 2011

Salah satu wacana yang merebak dalam agenda pengungsian atas dampak erupsi 2010 adalah penyelamatan ternak. Salah satu isu yang dilontaran *stakeholder* seperti pemerintah, kampus, media, dan bahkan LSM adalah warga enggan mengungsi sebelum sapihnya diungsikan. Dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa sebenarnya prioritas warga adalah menyelamatkan ternak,

baru kemudian manusianya. Memang kebijakan pemda pada erupsi 2006 dulu berangkat dari asumsi itu, sehingga agenda aksi yang ditempuh adalah melakukan evakuasi ternak dulu. Asumsi para pemangku kepentingan tersebut kiranya kurang tepat. Melalui observasi di lapangan ternyata pokok persoalannya adalah sangat kompleks.

Pertama, petani-peternak sangat berharap bahwa mereka harus menyelamatkan ternaknya agar kelak mereka bisa hidup tanpa bergantung kepada para pihak. Dengan ternak itulah mereka akan bangkit dari dampak erupsi Merapi 2010. Oleh karena itu, penyelamatan ternak penting, bukan berarti mereka rela mati bersama ternaknya.

Kedua, petani-peternak berharap bahwa dalam melakukan pengungsian mereka harus tetap bersatu dengan ternaknya, paling tidak mereka menempati lokasi yang berdekatan, sehingga bisa tetap memeliharanya sehingga keputusan untuk segera mengungsi atau meninggalkan ternaknya perlu dipikir masak-masak agar tidak rugi di kemudian hari.

Ketiga, mereka akan mengungsikan ternaknya dengan melibatkan diri dalam pengangkutan sebab merekalah yang mengetahui tentang karakter ternaknya dan memastikan kemana ternaknya akan dibawa sehingga tidak begitu tertarik untuk menyerahkan ternaknya kepada petugas yang belum berpengalaman mengangkut dan membawa ternak.

Ketiga nalar orang Merapi di atas dapat ditemukan dari berbagai perilaku peternak di berbagai dusun di lereng Merapi. Pertama, sebenarnya warga baru mau mengungsikan setelah pasti ternaknya aman. Di Turgo misalnya, warga melakukan pengungsian mandiri (swadaya) dan pengungsian ini dilakukan sebelum Merapi menelan korban Mbah Marijan. Warga mengatakan mereka langsung mengungsi, dan meninggalkan ternaknya, tetapi mereka berharap setiap hari masih bisa mengunjungi ternaknya untuk memberi pakan. Perilaku warga seperti itu juga dilakukan oleh orang Kemiri Cilik. Mereka turun ke kantor desa tetapi ternaknya tetap ditinggal agar bisa mendapatkan akses pakan dengan mudah.

Baru ketika erupsi Merapi tetap berlangsung dan terus meningkat, warga melakukan evakuasi ternak. Tim SAR desa melakukan evakuasi ternak dengan mengandalkan empat buah truk, satu truk dari dusun dan tiga dari luar, guna mengangkut sapi sebanyak 360 ekor. Sapi dibawa ke Dusun Sidumoro, lokasi dusun Turgo relokasi 1994. Di dusun tersebut sapi diselamatkan dan warga bisa memberi pakan. Ketika erupsi semakin kencang, terpaksa mereka diungsikan ke daerah yang aman lagi, yaitu di kampus UPN sehingga mereka semakin jauh dari kandang. Sejak hari itu, mereka semakin kesulitan untuk memberi pakan, dan banyak sapi yang stress kemudian kurus. Petani khawatir sapi mereka mati dan tidak tertolong sehingga dijual dengan harga sangat murah. Sapi seharga Rp 9.000.000,00 dijual dengan harga Rp 4.000.000,00- Rp 5.000.000,00. Para mafia bermain sehingga harga sapi jatuh sehingga petani sangat menyesali.

Penderitaan petani diperparah karena pengungsian sapi sangat membutuhkan bantuan medis untuk menjaga kesehatan dan pakan. Bantuan yang memadai adalah terutama untuk evakuasi, dan kesehatan, sedangkan bantuan pakan ternak sangat minim. Akibatnya, sapi tetap kurus dan terancam merosot kesehatannya. Peternak tidak tega melihat sapi mereka sakit kelaparan sehingga jalan keluarnya adalah dijual sekalipun dengan harga yang merosot tajam.

Karena minimnya bantuan dan adanya kepastian bahwa Merapi turun statusnya dari awas ke waspada, petani mengambil inisiatif untuk memulangkan sapi ke kampung halaman. Inisiatif ini membuat mereka juga harus mengeluarkan anggaran sendiri karena pemerintah kurang responsif karena khawatir kalau nanti Merapi aktif lagi. Dengan demikian, petani mengeluarkan dana ekstra yang berlebihan, satu sisi mereka harus mengevakuasi, menjual agar tidak kesulitan dalam memelihara, dan di sisi lain mereka harus menyelamatkan keluarganya dan harta bendanya yang tersisa di kampung.

Selama kurang lebih 40 hari petani tinggal di pengungsian, dan mereka balik ke rumah ketika status Merapi telah diturunkan ke kondisi siaga. Pada minggu pertama sampai setengah bulan kondisi siaga, mereka masih kesulitan menyediakan pakan. Namun petani mempunyai keyakinan pakan akan diperoleh lagi dengan mudah karena akan terus menerus turun hujan di bulan Februari 2011.

Erupsi telah membuat rumput tertimbun dan terkontaminasi oleh abu Merapi sehingga tidak siap untuk pakan, dan harus dibersihkan. Memasuki bulan Februari 2010, Merapi memasuki puncak musim hujan sehingga ternak bisa mendapatkan rumput.

Nasib petani-peternak di KRB III atas seperti Turgo, Kemiri Cilik, Babatan, Trono dan lainnya memang sangat memprihatinkan ketika peternak harus mengungsikan ternak tanpa bantuan yang memadai. Kerugian juga dialami oleh peternak di KRB II dan I tetapi tidak separah yang dialami oleh peternak di KRB III atas. Hal ini karena kebanyakan ternak di KRB II itu tetap di kandang di dusunnya. Sapi memang stres dan kursus tetapi masih bisa mendapatkan pakan seadanya di pekarangan.

Pada tahun 2011 petani mulai memulihkan usaha peternakan. Dalam menghadapi kekurangan pakan, petani mempunyai beberapa strategi. Petani di Stabelan, misalnya, memakai *debog* (batang pisang) guna mengganti rumput yang berdebu karena tertimbun abu. Sebagian besar peternak berusaha mengembangkan ternaknya lagi. Mereka mendapatkan rumput yang bersih setelah beberapa minggu tanah diguyur hujan.

Sebagian besar peternak membesarkan hati sendiri bahwa mereka akan bangkit lagi dengan sapi seadanya karena belajar dari pengalaman bahwa umumnya peternak di dusun pun berangkat dari nol, tetapi kemudian bisa bangkit mandiri. Kini mereka pun menyadari bahwa strategi ekonomi dengan mengelola sapi jauh lebih aman. Ketika tanaman pangan rusak diterjang erupsi dan hujan abu, sebagian sapi tetap bisa diselamatkan, atau dilipat menjadi uang. Filosofi Jawa "*untung ora entek kabeh*" hidup dalam kesadaran orang Merapi dalam menghadapi erupsi sehingga mereka pun berusaha bangkit dengan sapi seadanya, tanpa bantuan pemerintah, kecuali bagi yang kampungnya hancur diterjang lahar.

Dalam mengantisipasi resiko bencana ke depan, orang Merapi sudah memiliki resepnya. Pertama, mereka cenderung berlawanan dengan pemikiran pemerintah dan bahkan NGO bahwa kampung harus dikosongkan, dan penduduk dan ternaknya harus direlokasi. Kedua, kampung lama ditinggalkan dan penduduk

direlokasi ke dalam pemukiman baru, sedangkan ternak dibikinkan kandang kelompok agar mudah dirawat dan dipindahkan.

Dua gagasan itu dianggap oleh orang Merapi akan mengancam akses mereka terhadap sumberdaya Merapi dan keberlanjutan usaha tani maupun peternakannya. Strategi yang mereka tawarkan adalah membuat titik kumpul sapi pada masa darurat. Titik kumpul ditempatkan di pinggir dusun atau dekat dengan jalan sehingga mudah dipindahkan ke tempat pengungsian. Kedua, di pengungsian tersedia sarana kandang dan penyelamatan ternak sehingga peternak akan dengan suka mengevakuasi karena sapinya bakal terurus dengan baik.

Dengan adanya pandangan yang berseberangan antara pemerintah versus masyarakat Merapi, maka penangan bencana alam ke depan harus diformat secara arif. Relokasi bagi orang Merapi bukan hanya mengancam sumber penghasilan tetapi sejarah dan penguasaan atas sumberdaya alam, khususnya rumput yang berguna bagi peternakan, dan pentingnya peternakan bagi kelangsungan usaha tani melalui tersedianya pupuk kandang. Relokasi yang ditawarkan pemerintah tujuannya adalah mencegah jangan sampai terjadi korban dan akibatnya adalah yang rugi tidak hanya warga tetapi juga pemerintah.

Jalan keluar yang bijak adalah memberikan skema relokasi secara partisipatif dan membuka ruang bagi golongan masyarakat yang tidak beternak karena mereka ini tidak mempunyai kepentingan langsung untuk menguasai atau mengakses sumberdaya rumput di lahan komunal. Pemerintah juga memberikan insentif kepada warga yang memelihara ternak agar mau turun ke bawah dan membuat *rance* ternak kelompok di lereng bawah bukan di rumah tempat tinggalnya. Dengan cara seperti itu, peternak akan terbiasa mengelola usaha ternak secara kelompok, dan kelak jika terjadi bencana, maka ternak mudah dievakuasi karena berada di jalur jalan aspal dan mudah diangkut dengan truk.

4.8 Penambang Pasir dan Batu

Penambangan di Klakah Tengah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali sudah berlangsung kurang lebih sepuluh tahun sebelum erupsi Merapi tahun 2010. Sejak dibangunnya jembatan dan jalan yang memudahkan akses ke Kali Apu,

warga mempunyai akses untuk menambang dan menjual kepada supir truk pengangkut pasir. Sebelum erupsi 2010 sesungguhnya cadangan pasir sudah hampir habis. Persediaan pasir kembali bertambah besar pasca erupsi 2010. Namun banjir lahar dingin pasca erupsi ini merusakkan jembatan sehingga aktivitas penambangan berhenti. Kini penambangan pasir hanya menjadi pekerjaan darurat untuk warga setempat.

Ilustrasi dari catatan lapangan di atas menunjukkan sekelumit dinamika aktivitas penambangan pasir dan batu di salah satu wilayah di seputar lereng Merapi. Bagi warga yang tinggal di kawasan lereng, bahaya yang dibawa oleh erupsi Merapi, baik secara primer maupun sekunder, bisa jadi bernilai setara dengan berkah yang dijanjikan salah satu gunung vulkanik teraktif di Pulau Jawa ini. Hal ini terutama jika dikaitkan dengan keberlimpahan pasir dan batu akibat erupsi yang memberikan peluang ekonomi ekstraktif yang dapat dinikmati oleh masyarakat hampir sepanjang waktu. Ditambah dengan absennya aktivitas budidaya seperti yang dijumpai dalam pertanian dan peternakan, penambangan pasir dan batu (biasa disingkat *sirtu*) menjadi pilihan hidup bagi masyarakat yang menempati KRB III dan KRB II. Setiap tempat memiliki alasan yang berbeda dengan tempat lain untuk berkembangnya ekonomi pertambangan pasir dan batu yang secara resmi diklasifikasikan oleh Negara sebagai Sektor Pertambangan Galian C. Kondisi tanah berpasir yang tidak memungkinkan untuk aktivitas pertanian, atau keterbatasan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga kesempatan menghasilkan keuntungan finansial secara instan akibat meningkatnya permintaan atas material vulkanik, adalah beberapa faktor di antaranya.

Hampir semua dusun yang tercakup dalam penelitian ini mencatat beragam intensitas dalam keterlibatan rumah tangga yang ada atas penambangan pasir dan batu. Tercatat hanya tujuh dusun di mana selama penelitian tidak ditemukan data kuantitatif yang dapat mengindikasikan kehadiran ekonomi ekstraktif ini. Perbedaan intensitas pada tempat-tempat di mana ditemukan aktivitas penambangan dapat muncul berupa dinamika dalam persentase rumah tangga yang terlibat, hingga perubahan dinamika jumlah penambang di beberapa

dusun pada periode sebelum dan sesudah erupsi. Di samping itu, keragaman juga terrekam dalam nilai finansial dari ekonomi pertambangan yang dihasilkan oleh rumah tangga penambang di masing-masing dusun.

Bagian ini akan membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan ekonomi penambangan pasir dan batu di beberapa dusun yang berada di sepanjang aliran sungai tempat mengalirnya material akibat erupsi Merapi, yakni Kali Woro dan Kali Gendol. Di antaranya adalah kondisi ekologi di mana aktivitas penambangan berlangsung, organisasi produksi penambangan, mobilisasi tenaga kerja, distribusi komoditas dan jaringannya, dan intervensi Negara, serta fluktuasi produksi akibat kondisi alam dan pasar. Dengan melihat beberapa aspek tersebut, bagian ini juga mencoba mengaitkannya dengan seberapa besar penambang lokal dapat memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi ini dan sejauh mana keuntungan tersebut dapat menopang konsumsi masyarakat setempat. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran tentang proses adaptasi dan keterikatan masyarakat terhadap ekologi Merapi yang mungkin dapat menjawab pertanyaan mengapa usaha pemisahan, atau pembatasan, warga dari sumber daya alam ini tidak jarang menerima penolakan warga setempat. Termasuk juga dapat mengungkapkan mengapa penambangan pasir dan batu, yang kerap memaksa penambang mempertaruhkan nyawanya, tetap merupakan pilihan strategis bagi warga meskipun secara finansial mereka bukanlah penerima manfaat terbesar dari perdagangan komoditas ini.

4.8.1 Siklus Produksi Penambangan Pasir dan Batu

Signifikansi penambangan pasir dan batu pertama kali dapat dilihat dari mobilisasi tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Namun demikian, jumlah penambang senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada periode pra-erupsi 2010, delapan dusun tercatat memiliki lebih dari separuh jumlah rumah tangganya yang menjadi penambang, yakni Dusun Kopeng (51,72 persen) di Kecamatan Cangkringan, Sleman; Dusun Klakah Tengah (67,74 persen) di Kecamatan Selo, Boyolali; Dusun Candipos (81,48 persen) dan Dusun Grogol (59,57 persen) yang keduanya berada di Kecamatan Dukun, Magelang; serta

Dusun Malangsari (80 persen), Dusun Segadung (76,55 persen), Dusun Sambungrejo (55,40 persen), dan Dusun Kaligentong (86,39 persen) yang kesemuanya berada di Kecamatan Kemalang, Klaten.

Pada periode pasca-erupsi 2010, Candipos merupakan satu-satunya dari kedelapan dusun ini yang mengalami peningkatan rumah tangga penambang menjadi sebesar 87,04 persen, sedangkan Grogol tidak mengalami perubahan. Sebaliknya, sementara Kaligentong mengalami penurunan hingga hanya mencapai 64,79 persen, Dusun Kopeng, Dusun Malangsari, Dusun Segadung, dan Dusun Sambungrejo bahkan tidak lagi mencapai separuh dari seluruh rumah tangga yang ada di dusun tersebut. Di samping itu, dua dusun di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, yakni Kaliurang Utara dan Cabe Lor adalah dusun di mana rumah tangga yang melakukan aktivitas penambangan mengalami lonjakan signifikan sebelum dan sesudah erupsi 2010. Dusun Kaliurang Utara mencatat kenaikan dari 10,53 persen menjadi 73,68 persen dan Dusun Cabe Lor dari 40,43 persen menjadi 91,49 persen.

Siklus produksi biasanya dimulai dengan erupsi Merapi yang menyebabkan keberlimpahan pasokan pasir. Setelah cadangan pasir mulai berkurang penambang berganti menggali batu kecil dan seterusnya menambang batu besar. Terlepas dari siklus produksi yang terkait dengan aktivitas Merapi, kondisi produksi di masing-masing wilayah dapat memiliki perbedaan satu dengan lainnya. Bekerja sebagai penambang tidak mengenal musim hujan maupun kemarau. Hampir setiap hari warga di Grogol (Dukun, Magelang), Candi Morangan (Ngemplak, Sleman), serta Kaligentong dan Malangsari (Kemalang, Klaten), menambang pasir dan batu. Di Kaligentong, dengan jenis tanah berpadas yang hampir tidak memungkinkan untuk diolah, penggalian pasir dan batu menjadi satu-satunya pilihan ekonomi warga. Di samping itu, keterbatasan pasokan air menambah kesulitan untuk menjadikan pertanian sebagai penopang utama subsistensi. Kemarau panjang hampir sepanjang 2011 menjadikan tanaman sulit tumbuh dan rumput untuk pakan ternak harus dibeli. Seorang penambang yang juga bertani mengungkapkan krisis pertanian pada tahun 2011 ini berbeda dengan masa paceklik sebelumnya:

“Sak enenge uwong kok kabeh do sambat loh mba. Kamongko ora ming siji loro, rata-rata do sambat, kabeh, ki gek do kepiye. Saiki ki pada karo ditekak no nek uwong wilayah, hla saiki arep nyambut gawe apa wis, tegalan keadaane kaya ngono kui, arep diapak ke, dikelola apane. Keneng musim kemarau kuwi arep diapak ke meneh, enenge ming bleduk.”

Ditambah lagi dengan kera-kera gunung yang turun bergerombol dalam jumlah banyak ke pemukiman dan merusak tanaman seperti singkong atau jagung. Erupsi Merapi yang tidak membakar habitat kera-kera menyebabkan mereka ini merambah pemukiman manusia. Dengan demikian, penambangan menjadi katup pengaman ekonomi setempat sekalipun pembeli pasir berkurang akibat pasokan yang melimpah di kawasan-kawasan lain yang lebih rendah dan jauh dari puncak Merapi setelah erupsi 2010. Ketiadaan pilihan inilah yang membuat penambang senantiasa mempertaruhkan nyawa mereka di lokasi penambangan di sepanjang aliran sungai yang jika musim hujan tiba banjir lahar dingin menjadi ancaman bagi keselamatan hidup mereka. Musim hujan memudahkan penambang mendapatkan pasir dibandingkan dengan musim kemarau.

Siklus produksi penambangan juga sangat bergantung pada siklus anggaran pemerintah daerah. Para penambang di wilayah Kecamatan Kemalang (Klaten) mengaku bahwa bulan-bulan di awal tahun adalah saat di mana permintaan pasar atas pasir dan batu berkurang drastis. Menurut warga, hampir tidak ada proyek pembangunan infrastruktur dari pemerintah yang bergerak pada masa-masa ini. Namun, aktivitas akan kembali menggeliat menjelang bulan April sejalan dengan dimulainya tahun anggaran. Saat itulah, hingga menjelang akhir tahun, masyarakat menyebutnya dengan “musim pasir” di mana permintaan pasar meningkat demi menggerakkan proyek-proyek pemerintah berupa jalan, jalan tol, jembatan, bangunan atau gedung, irigasi, dan yang lainnya.

Di semua dusun di mana aktivitas penambangan ditemukan, setiap warga juga terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi lainnya, terutama pertanian dan peternakan, untuk menopang subsistensi. Pada umumnya setiap rumah tangga melakukan pertanian padi, seperti di Candi Morangan (Ngemplak, Sleman) dan Grogol (Dukun, Magelang), serta pertanian sayur, seperti di Klakah Tengah (Selo,

Boyolali) dan Kaligentong (Kemalang, Klaten). Pekerjaan sampingan bertani ini, namun demikian, memiliki produktivitas yang rendah untuk menopang subsistensi warga. Sementara, peternakan sapi dan kambing dilakukan oleh masyarakat di Sleman (Candi Morangan dan Grogol) dan Klaten (Kaligentong). Di Malang Sari, misalnya, saat aktivitas penggalian sedang sepi di Kali Woro warga hanya menambang hingga pukul 11.00 atau 12.00 siang. Sebelum pulang rumah mereka terlebih dahulu mencari rumput (*ngarit*) untuk pakan ternak. Menjelang sore warga memberi makan ternaknya. Beberapa warga di Kaligentong bahkan memiliki ketrampilan sebagai tukang batu dan bekerja di luar kecamatan atau kabupaten pada saat permintaan pasir sedang lesu.

4.8.2 Organisasi Penambangan Pasir dan Batu

Penambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh masyarakat setempat pada umumnya memberlakukan sistem organisasi produksi yang tidak terlalu kaku dalam penentuan pembagian lahan. Para penambang di hampir semua lokasi penambangan mengakui bahwa mereka tidak mengenal praktek penguasaan lahan oleh kelompok tertentu (*kapling*). Penambang yang biasanya bekerja secara berkelompok akan memulai aktivitas dengan memilih lahan yang belum dimanfaatkan oleh penambang lainnya. Berlimpahnya persediaan pasir dan batu memungkinkan tidak adanya persaingan berarti antara penambang.

Bagi penambang dari Dusun Segadung (Kemalang, Klaten) di Kali Woro, titik lokasi penambangan dibuka berdekatan dengan jalur truk pengangkut yang membeli pasir dan batu. Masing-masing kelompok penambang biasanya secara konsensual membuka lahannya secara berurutan sepanjang jalur ini. Di bagian lain dari Kali Woro, yakni di wilayah Dusun Kaligentong (Kemalang, Klaten), pembagian lahan ditetapkan berdasarkan arah mata angin. Kelompok penambang permulaan berhak membuka lahan pada satu titik mata angin sesuai pilihannya sendiri. Kelompok berikutnya membuka lahan baru pada titik mata angin lainnya. Satu-satunya ketentuan yang berlaku bagi warga dusun ini adalah bahwa setiap kelompok tidak dibolehkan membuka lahan yang mengganggu jalur lintasan truk pengangkut. Ketiadaan monopoli lahan penambangan juga berlaku di Kali Gendol seperti yang dijalankan warga Dusun Candi Morangan, Kecamatan Ngemplak,

Kabupaten Sleman. Termasuk pula di Kali Kuning dengan penambang manual dari Dusun Bendosari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, sebelum erupsi 2010 yang tidak memiliki peraturan ketat dalam pembagian lahan dan wilayah penambangan dipilih hanya berdasarkan kebiasaan saja. Namun demikian, berbeda dengan di Kali Woro di mana penambangan dilakukan di tengah kali, penambangan di Kali Gendol tidak secara intensif dilakukan di badan sungai. Kegiatan penggalian dan hasil galian biasanya dikumpulkan di tepi sungai.

Pasokan pasir dan batu yang melimpah menyebabkan tidak ada titik penambangan tertentu yang lebih menguntungkan sehingga layak untuk diperebutkan. Keberhasilan penambang justru ditentukan dari kemampuan mereka membangun hubungan yang baik dengan pengemudi truk pengangkut. Penambang di Kali Woro yakin bahwa rasa saling percaya dengan pengemudi truk dibangun biasanya dengan menunjukkan kesiapan penambang untuk senantiasa siap melayani permintaan hasil galian. Seorang penambang dari Dusun Kaligentong mengungkapkan, “Jawaban ‘tidak ada barang’ atau ‘barang belum siap’ akan membuat sopir truk kehilangan kepercayaan pada penambang dan selanjutnya beralih ke yang lain.” Hal ini sering berbuah keributan antara penambang dengan pengemudi truk angkut karena pengemudi dengan mudah beralih pada penambang lain yang sudah siap memasok galian. Para kelompok penambang biasanya sudah menjadi langganan dari pengemudi truk angkutan tertentu. Dengan demikian, pengemudi truk dengan sendirinya akan mengarahkan truknya ke lokasi tambang yang dikerjakan oleh penambang langganannya.

Namun demikian, penggalian pasir dan batu dapat pula memiliki persoalan kelangkaan. Kali Apu yang melintas Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali adalah contoh sungai yang memiliki deposit pasir yang sangat terbatas untuk dapat menghidupi lebih dari separuh rumah tangga di salah satu dusun, yakni Dusun Klakah Tengah. Dalam kondisi demikian, maka pengaturan atas aktivitas penggalian menjadi kebutuhan bagi seluruh penambang. Penggalian dan pengangkutan dilakukan secara bergiliran di mana setiap kelompok hanya mendapat akses dua hingga tiga hari per minggu. Warga berinisiatif untuk mendirikan Perkumpulan Penambangan yang berfungsi mengatur agar tidak

terjadi kepadatan aktivitas penggalian di lokasi Kali Apu yang melintasi dusun ini. Sebelum erupsi 2010 para pembeli pasir dapat membawa truk pengangkut langsung menuju dasar sungai. Selain penggunaan tenaga manusia di sungai ini juga terdapat beberapa alat berat berupa *backhoe* untuk mengangkat pasir, kerikil, dan batu dari dasar sungai. Namun demikian, perkumpulan ini tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya akibat kerusakan jalan dan jembatan yang diakibatkan oleh hancurnya dam atau sabo Kali Apu pada erupsi 2010. Kerusakan ini menyebabkan pasir, batu, dan kerikil mengalir ke daerah yang lebih rendah di wilayah Kabupaten Magelang serta jalan menuju dasar sungai terputus.

Organisasi-organisasi tidak resmi sejenis yang secara alamiah muncul baik untuk menetapkan aturan main dalam pengelolaan wilayah tambang maupun sekedar perkumpulan paguyuban juga lazim ditemukan di tempat-tempat lain. Di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, misalnya, pernah didirikan Debu Merapi, yakni kelompok pengamanan kawasan penggalian yang menaungi penambang setempat. Namun, keberadaan kelompok ini menjadi hilang seiring dengan berdirinya otoritas pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang membatasi akses warga beberapa situs penambangan. Selain itu, organisasi pada tingkatan masyarakat dalam kaitan dengan pengaturan penggalian pasir dapat ditemukan pula di Grogol, Dukun, Magelang, pada masa-masa pasca-erupsi atau pasca-banjir lahar. Lazim ditemukan di mana aktivitas penambangan pasir dan batu berpindah ke lahan atau sawah yang terkena banjir lahar. Penambang yang mencari pasir di lahan milik orang dikenakan *tarikan* untuk “retribusi jalan” (*tebasan jalan*) sebesar Rp 20.000,00 yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Organisasi penambangan di situs penggalian biasanya terdiri atas penambang, yakni orang yang menggali pasir dan batu; pengangkut atau pemuat, yakni mereka yang menaikkan sirtu ke atas truk; *cokeran*, yakni mereka yang meratakan pasir di atas truk, terutama jika pengangkutan ke atas truk dilakukan dengan menggunakan *backhoe*; dan pemborong/pembeli pasir, yang biasanya adalah pemilik depo pasir. Para penambang manual bekerja secara berkelompok. Penambang baru yang belum berpengalaman sama sekali biasanya ikut bekerja dalam kelompok penambang lama yang ada. Di Dusun Kaligentong (Kemalang,

Klaten) terdapat tujuh kelompok penambang yang masing-masing terdiri empat hingga lima orang yang umumnya masih memiliki ikatan keluarga. Anak kecil yang dimiliki oleh sepasang suami istri yang bekerja sebagai penambang dapat dititipkan pada salah satu keluarga yang tinggal tidak jauh dari sungai. Imbalan yang diberikan bagi penjaga anak sekitar Rp 7.000,00 dari pagi hingga siang pukul 14.00. Kelompok penambang dengan jumlah yang sama, terikat dalam satu kekerabatan, dan ditemukan pasangan suami istri juga terdapat di Dusun Segadung (Kemalang, Klaten). Para penambang di Segadung ini sebelumnya adalah penambang maupun *coker* di lahan pekarangan di sekitar dusun. Mereka kemudian beralih menjadi penambang di Kali Woro menggantikan penambang bermodal besar yang *tersingkir* setelah adanya larangan penggunaan *backhoe* dalam penambangan pasir. Di Klakah Tengah (Selo, Boyolali) di mana truk pengangkut tidak dapat masuk ke lokasi penambangan akibat infrastruktur yang kurang memadai, tenaga tambahan sebanyak dua hingga empat orang dibutuhkan sebagai tenaga pengangkut. Tenaga tambahan ini diperlukan agar proses pemindahan pasir dari situs penggalian ke atas truk pengangkut dalam satu kali angkutan (*rit*) menjadi lebih cepat. Tenaga kerja pengangkut ini biasanya disediakan oleh masyarakat dusun demi memperluas kesempatan warga untuk memperoleh penghasilan.

Foto 4.1
Penambang Bekerja dalam Kelompok yang Terdiri dari 4-5 Orang



Perubahan struktur ketenagakerjaan lokal dalam sektor penambangan dapat juga terkait dengan persaingan dengan pelaku penambangan besar dan

ketiadaan kebijakan pemerintah setempat untuk melindungi penambang kecil. Pasca erupsi 2010, saat pasokan material Merapi kembali melimpah di Kali Kuning, para penambang manual dari Dusun Bendosari (Cangkringan, Sleman) justru mengaku kehilangan pekerjaan. Para pedagang (*bakul*) pasir yang melihat peluang ekonomi yang ada mendatangkan alat berat (*backhoe*) untuk meningkatkan kapasitas produksi penambangan secara lebih mudah, murah, efisien, dan cepat. Ekspansi produksi dengan mesin ini mengakibatkan para penambang tradisional menggangu dan terpaksa beralih profesi sebagai buruh tukang di desa lain atau menjadi buruh tani. Sementara, mereka yang tidak mempunyai keahlian lain sebagai penambang tetap memaksakan menggali pasir di sungai dengan pendapatan yang semakin berkurang. Tidak sedikit pula dari mereka berpindah menambang pasir di Kali Boyong yang berjarak sekitar enam hingga delapan kilometer dari rumah tinggalnya. Para penambang yang sebelum erupsi 2010 biasa memiliki penghasilan bersih antara Rp 50.000,00 hingga Rp 80.000,00 per hari, kini hanya bisa “bersyukur”, seperti yang mereka akui, membawa pulang penghasilan sebesar Rp 15.000,00 hingga Rp 25.000,00. Jumlah penambang dari dusun ini, seperti yang tercatat dalam tabel, pun berkurang cukup drastis.

4.8.3 Teknologi dan Organisasi Kerja

Aplikasi teknologi dalam penggalian pasir dan batu juga dapat menentukan organisasi kerja. Organisasi kerja penambangan secara manual yang dilakukan secara berkelompok biasanya ditandai dengan kepemilikan alat kerja bersama yang dibeli secara bersama-sama (iuran) dengan menetapkan potongan dari hasil usaha penambangan milik kelompok. Namun, tidak tertutup kemungkinan ada beberapa alat yang dimiliki secara perseorangan. Model seperti ini setidaknya ditemukan di Dusun Malangsari, Dusun Kaligentong, dan Dusun Segadung di Kecamatan Kemalang, Klaten—kawasan di mana penggunaan alat berat tidak dimungkinkan-- Dusun Grogol (Dukun, Magelang), Dusun Candi Morangan (Ngemplak, Sleman).

Termasuk dalam ekonomi penambangan pasir dan batu adalah organisasi kerja penggilingan batu, atau dikenal dengan *bantak*, yang disebut *basecamp* yang juga menyerap tenaga kerja setempat dan, bahkan, beberapa di antaranya dimiliki oleh warga dusun. Di sepanjang Jalan Raya Deles, Klaten, dan di dusun-dusun di Kecamatan Kemalang dan sekitarnya mudah sekali ditemukan usaha *basecamp* dengan skala yang beragam jika dilihat dari luas tempat usaha. Penggilingan batu, seperti yang diungkapkan beberapa informan dari dusun-dusun di Kecamatan Kemalang (Klaten), membutuhkan investasi berkali lipat dari penambangan pasir dan batu secara manual yang biasanya hanya membutuhkan alat-alat sederhana, seperti sekop, ember, *linggis*, dandang, tatah pendek (*paju*), tatah panjang (*cuplik*), *bodem*, garuk, ayakan (*irig*), palu, dan cangkul (*pacul*). Pada umumnya, pemilik penggilingan batu dari dusun setempat memberikan taksiran Rp 70.000.000,00 sebagai modal usaha untuk memulai *basecamp*. Di samping alat kerja ringan yang ditemukan pada penggalian secara manual, terdapat pula *slenggrong* dan drum. Di samping, dibutuhkan alat-alat lainya seperti mesin giling (dengan harga sekitar Rp 6.700.000,00), gilingan (berkisar Rp 44.000.000,00), pembelah batu (*blender*), mesin las, dinamo, dan elpiji. Untuk menggiling satu rit *bantak* dibutuhkan solar sebanyak empat liter untuk menghidupkan mesin giling. Termasuk pula di dalamnya kebutuhan gudang sebagai tempat penyimpanan alat-alat kerja.

Di Kecamatan Ngeplak dan Kecamatan Cangkringan di Sleman, Kecamatan Dukun di Magelang, dan Kecamatan Selo di Boyolali dapat ditemukan alat berat berupa *backhoe* yang dioperasikan oleh penambang besar untuk mengeruk pasir dan menaikkannya ke atas truk pengangkut. Teknologi ini dianggap lebih menguntungkan pedagang pasir karena biaya pengambilan dan pembelian pasir menjadi lebih mudah, murah dan cepat. Bagi pengemudi truk pengangkut, masuknya alat berat ini menyebabkan durasi penggalian dan pemuatan pasir ke atas truk menjadi lebih cepat sehingga memungkinkan mereka untuk mengangkut material beberapa kali dalam sehari dibanding jika penggalian dilakukan secara manual dengan tenaga manusia saja. Pemanfaat *backhoe* untuk penambangan harus memiliki izin sampai tingkat propinsi. Banyak alat berat yang

hanya berizin sampai tingkat kabupaten kemudian tidak diperbolehkan lagi beroperasi atau ditahan.

Di kawasan Klaten, *backhoe* hanya diperbolehkan beroperasi di atas lahan, dan bukan di sungai. Di Dusun Malangsari, Desa Kendalsari (Kemalang, Klaten), misalnya, tiga orang warga lokal, Pak Mardi, Pak Sugeng Tombro, dan seorang lainnya, mengambil kredit uang di bank untuk membeli *backhoe*. Harga satu unit alat berat ini pada tahun 2007 kurang lebih Rp 1.300.000.000,00 dengan besar angsuran pengembalian setiap bulan pada bank adalah sebesar Rp 30.000.000,00. Kebutuhan angsuran tersebut dapat tertutupi mengingat penghasilan dari aktivitas penambangan dengan menggunakan *backhoe* dapat mencapai Rp 6.000.000,00 –Rp 7.000.000,00 per hari. Menurut pengakuan Pak Sugeng, hutang kredit mereka pada bank sudah lunas terbayar dalam kurun waktu kurang dari lima tahun.

Namun, di Dusun Bendosari (Sleman), beberapa warga melihat bahwa masuknya alat berat untuk mengambil pasir di Kali Kuning menyebabkan tenaga kerja penggali di dusun ini kehilangan pekerjaan sehingga mengurangi penghasilan warga. Mereka bahkan menunjuk alat berat ini sebagai penyebab rendahnya asupan gizi serta menurunnya tingkat kesejahteraan warga akhir-akhir ini. Lebih jauh, warga setempat menyatakan bahwa penggunaan *backhoe* masih dapat diterima pada saat ketersediaan material pasir, kerikil, dan batu dari Kali Kuning melimpah akibat banjir lahar pada erupsi 2010. Penggalan dengan skala besar dapat membantu mengurangi material di dasar sungai untuk memberi jalan bagi aliran lahar pada masa mendatang. Namun, eksploitasi intensif dengan peralatan modern dapat berisiko berupa menipisnya persediaan material di sungai justru akan membahayakan secara ekologis.

Munculnya kegiatan warga di sektor pertambangan merupakan gejala yang lazim di hampir semua komunitas yang berada di pinggir bantaran sungai. Mereka memanfaatkan pasir yang melimpah di tengah tingginya permintaan pasir dari luar yang datang ke sungainya. Adapun proses warga mengenal dunia ekonomi pasir bervariasi antar daerah. Di Kaligentong, masuknya warga di sektor pertambangan didorong oleh kelangkaan tanah. Di dusun ini mayoritas

penduduknya bermata pencaharian menambang pasir dari Kali Woro secara manual. Pekerjaan ini dilakukan oleh anggota keluarga yang sudah dewasa, baik suami maupun istri, dan termasuk anak-anak mereka. Di dusun ini, tidak sedikit anak-anak yang berusia 14 atau 15 tahun sudah mulai mengikuti orang tuanya menambang pasir.

Pada mulanya warga mengawali kegiatan penggalian ini dengan hanya mengambil dan memecah batu. Minat pemanfaatan batu secara ekonomis semakin gencar dilakukan setelah hadirnya orang-orang dari wilayah Prambanan, Klaten yang datang ke Kali Woro. Para pendatang ini mengambil batu sungai untuk digunakan sebagai bahan pembuatan nisan (*kijing*) dan pemugaran Candi Prambanan. Dahulu pembelian batu dibayarkan seminggu sekali, sementara pasir belum dianggap mengandung nilai jual bagi kebutuhan ekonomi keluarga. Usaha penambangan pasir mulai laku dijual tahun 1986 untuk keperluan bahan pembangunan perumahan di Klaten dan sekitarnya. Penambangan pasir awalnya dilakukan di daerah Prambanan. Seorang informan menuturkan, "*Riyin saking Prambanan terus munggah-munggah-munggah.*" Berkurangnya cadangan pasir di wilayah Prambanan kala itu mendorong para penambang bergerak ke arah atas (hulu) mengikuti aliran sungai Woro. Penambangan yang dilakukan di wilayah Kaligentong pada tahun 80an mencatat harga pasir baru sekitar Rp 2.500,00 per rit. Dalam satu kelompok penambang yang terdiri dari empat orang mampu menghasilkan lima hingga enam rit per hari, dan mulai banyak kaum perempuan terlibat dalam penggalian. Pada tahun-tahun tersebut satu rit pasir hanya empat meter kubik, sementara saat ini setara dengan delapan meter kubik pasir. Terjadi perbedaan pengisian pasir pada bak truk. Semula truk pengangkut hanya diisi separuh bak, yakni empat kubik, namun saat ini bak truk diisi penuh sebanyak delapan kubik. Sekarang, jangkauan distribusi penjualan pasir dari Kali Woro merambah ke wilayah Semarang, Solo, Sukoharjo, Sragen, dan daerah lain.

Kali Woro terletak kurang lebih berjarak 300 meter sebelah barat kampung Kali Gentong dengan kecuraman tebing antara 70 sampai 100 meter dan lebar badan sungai antara 120 sampai 150-an meter. Pada saat erupsi besar Gunung Merapi kedalamannya hanya mencapai 50 sampai 60 meter akibat luapan lahar

dingin. Di wilayah Dusun Kali Gentong terdapat dua buah dam penanggul banjir yang berjarak sekitar 1,5 km. Dam yang pertama terletak di sebelah utara dibangun tahun 1993 dan sekaligus menjadi pembatas dengan berbatasan dengan Desa Sidorejo, Kemalang. Sedangkan dam kedua yang dibangun pada 2008 berada di sebelah selatan dibangun tahun 2008 dan dapat dilalui truk melalui pembukaan jalan swadaya ke arah Trayu, Desa Kendal Sari. Namun, sejak erupsi 2010 lalu badan jalan ini terputus akibat hancur diterjang material Merapi. Sejak saat itu, setiap truk yang menuruni Kali Woro untuk mengangkut pasir atau batu harus berputar melewati Dusun Balerante yang letaknya di sebelah barat sungai. Kerusakan infrastruktur jalan ini berdampak besar bagi ekonomi penambangan Kali Gentong karena biaya transportasi menjadi lebih besar.

Foto 4.2

Dam yang Dibangun Tahun 1993 Membatasi Desa Kendalsari (Kaligentong) dengan Desa Sidorejo



Foto 4.3

Dam Kedua yang Dibangun Tahun 2008



Lapisan atas Sungai Woro menjadi sangat keras dan sulit untuk ditambang secara manual. Warga yang menambang harus ekstra kerja dan lebih memilih lokasi-lokasi yang tidak terlalu keras. Warga lebih senang menambang pada musim kemarau. Pada musim hujan warga tetap melakukan penambangan walaupun siang hari selepas jam 12 mereka sudah was-was. Jika sudah banjir, warga yang menambang juga truk-truk yang berada di dasar Sungai Woro segera menepi. Truk-truk dari Salatiga dan Klaten sering sampai ke dasar Sungai Woro di Kaligentong ini. Akses yang bisa dilalui truk untuk sampai ke dasar Sungai Woro berada di bagian utara. Pasca erupsi jalan menuju dasar Sungai Woro di daerah Kaligentong hanya dapat diakses dari arah Balerante. Truk-truk harus segera menepi karena jika sewaktu-waktu banjir lahar dingin datang mereka harus melawan arus yang lebih besar.

Foto 4.4

Akses Jalan Setapak Ke Kali Woro dari Kaligentong



Jalan Menuju Dasar Sungai Woro dari Arah Balerante

Akses jalan menuju Kali Woro di Desa Kendal Sari sebenarnya memberi banyak manfaat perekonomian. Tingginya mobilitas truk pengangkut menjadikan aktivitas penambangan menjadi sangat ramai hampir 24 jam sehari. Di samping juga pemasukan kas dusun melalui pemasangan pintu portal di Kampung Trayu di mana setiap truk yang melewati dikenai pungutan, yang besarnya dulu Rp 5.000,00 dan kini hanya Rp 2.000,00 per kendaraan. Penjagaan pintu portal dilakukan secara bergilir. Pada masa sebelum erupsi Merapi 2010, dalam sehari saat ramai penambangan uang yang diperoleh dari portal dapat mencapai Rp

500.000,00 lebih, di mana kemudian secara kumulatif uang itu oleh Kadus III dibagikan untuk kas seluruh RT secara merata. Uang yang telah terkumpul kemudian digunakan untuk membangun jalan di lingkungan Dusun III Kendalsari.

Sepanjang Sungai Woro dapat dijadikan titik lokasi penambangan. Penambangan pasir Sungai Woro di wilayah Kaligentong hanya dikerjakan oleh enam kelompok penambang. Anggota kelompok penambang tersebut tidak hanya dari daerah Kaligentong saja walaupun lokasi tambang berada di Kaligentong. Pak Suranto, seorang informan, mengatakan : “*Saking ngandhap rika gih onten, terus saking Kembangbener onten, saking kulon kali gih onten.*“ Kelompok penambang bebas menentukan titik yang akan ditambang selama bukan menjadi titik yang sedang dikerjakan oleh kelompok lain.

4.8.4 Distribusi dan Pemasaran Pasir

Penambangan pasir dan batu membentuk mata rantai yang kompleks yang menjadikan para penambang menjadi bukan satu-satunya aktor utama dalam ekonomi ini. Lebih jauh, para penggali memiliki kontribusi yang kecil dalam hal distribusi komoditi dan penentuan harga. Pada umumnya para penggali menjual hasil galiannya pada pemilik truk yang mendatangi mereka di titik-titik penggalian. Truk-truk pengangkut pasir inilah yang menjadi perantara para penggali dengan pasar konsumen pengguna *sirtu* (lihat diagram alur).

Skema 4.1

Alur Distribusi Sederhana Pasir dan Batu



Para pengemudi truk dapat mengajukan permintaan jenis pasir tertentu, seperti jenis pasir yang sudah dihaluskan (*diayak*). “*Aku gelem jukuk angger pasire tok irik,*“ demikian seorang penambang di Kali Woro yang menirukan permintaan pengemudi truk. Untuk memenuhi permintaan tersebut, penambang mengayak pasir di dasar Sungai Woro dengan ayakan yang umumnya berukuran

2 meter kali 2 meter. Harga pasir hasil ayakan bernilai lebih tinggi Rp 10.000 per rit dari pasir yang belum diayak. Seorang penambang dari Kaligentong yang menambang di Kali Woro mengatakan bahwa kualitas pasir dari Kali Woro lebih baik karena merupakan pasir lahar dingin yang lebih kuat jika digunakan untuk bahan bangunan. Sementara, pasir dari Kali Gendol tidak terlalu baik karena merupakan hasil bakaran dari lahar panas dan berwarna kehitaman.

Setiap kawasan penggalian memasok wilayah pasar yang berbeda berdasarkan kedekatan geografis. Truk pengangkut yang mengambil bahan galian dari Candi Morangan di Ngemplak, Sleman, mengantar galian untuk memasok kebutuhan pasir dan batu di wilayah Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pati, Kawasan Solo, dan Semarang. Sementara, titik lainnya di Kabupaten Sleman, yakni di Dusun Bendosari, Kecamatan Cangkringan, memasok kebutuhan di wilayah sekitarnya dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul). Selain itu, tidak jarang pula kebutuhan beberapa kabupaten di Jawa Tengah, seperti Sragen, Semarang, Kudus, Demak, Pati, Purwodadi, dan Blora terpenuhi dari penggalian pasir di Kali Kuning seperti yang ditambang penambang dari Dusun Bendosari. Wilayah pasar terjauh dari penggalian di Kali Kuning ini, menurut para pengemudi truk pengangkut, adalah di Kabupaten Ngawi, di Propinsi Jawa Timur. Di kawasan lain, yakni di Dusun Segadung (Kemalang, Klaten), pasir atau batu didistribusikan di Kota Klaten, Kabupaten Boyolali, wilayah Solo, dan Kabupaten Sukoharjo. Sementara, pasir dan batu yang diambil dari kawasan sekitar Dusun Klakah Tengah (Selo, Boyolali) memasok kebutuhan untuk wilayah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, Kabupaten Salatiga, dan sekitar Semarang.

Menurut pengakuan seorang penambang di Kali Woro, Kemalang, Klaten, harga pasir yang dikirim ke Solo berkisar antara Rp 625.000,00 hingga Rp 750.000,00 "*Rata-rata kui mau nggowone 7 kubik, 6 setengah,*" imbuhnya. Harga pasir dari penambang pada kira-kira pertengahan tahun 2011 berada pada kisaran Rp 110.000,00-Rp 120.000,00. Biaya bahan bakar (solar) sampai ke Solo sekitar 25 liter. Untuk satu kali pengiriman, seorang sopir harus menyetorkan uang ke pemilik truk sebesar Rp 150.000,00 per rit. Upah pengemudi truk

tergantung pada kepandaiannya sendiri dalam menawarkan harga jual pasir. “*Sopire yo pandai-pandaine dewe lah, yo kui mau kelong solar, kelong nggo setor 150 kui mau turahane sopir, karo uang makane sopir,*” cerita di penggali. Dalam sehari seorang sopir rata-rata dapat memperoleh upah sekitar Rp 200.000,00-Rp 300.000,00 untuk sekali angkut. Tidak mengherankan jika pengemudi truk dan pemilik truk sebenarnya adalah pihak yang paling diuntungkan dari penambangan pasir ini.

Semakin jauh jalur distribusi maka harga per *rit* per truk akan semakin tinggi. Harga beli pasir per rit di lokasi penambangan di Bendosari misalnya, berkisar antara Rp 110.000,00 hingga Rp 125.000. Sementara di Candi Morangan, harga beli dari penambang adalah Rp 90.000,00-Rp.100.000,00 jika penambangan dilakukan secara manual, dan Rp 120.000,00-Rp 150.000,00 jika penambangan dan pemuatan ke dalam truk dilakukan dengan menggunakan alat berat. Besaran harga jual dapat mencapai kisaran Rp 1.100.000,00 hingga Rp 1.200.000,00 untuk pemasaran di wilayah Semarang dan sekitarnya.

Harga jual pada konsumen yang besarnya berkali lipat dari uang yang dibayarkan pemilik truk pada penggali di kawasan penggalian dapat terjadi akibat proses distribusi melalui mata rantai yang bervariasi dari alur sederhana seperti yang tergambar pada diagram di atas. Di Dusun Grogol, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dapat ditemukan alur distribusi yang jauh lebih sederhana di mana konsumen yang membutuhkan langsung menemui penggali untuk membeli material *sirtu* tanpa melalui perantara. Namun, pada banyak kasus lainnya, umum ditemukan rantai distribusi yang lebih panjang dan rumit, dengan melibatkan aktor yang lebih banyak. Para penambang di Grogol, misalnya, mengakui bahwa tidak selamanya truk pengangkut menyalurkan langsung pada konsumen akhir. Jamak pula ditemukan di mana truk pengangkut mengantarkan galian ke *pengepul* pasir yang mengumpulkan pasir di *depo* sebelum diantarkan ke konsumen yang membutuhkan.

Di tempat lain seperti di Kecamatan Kemalang, Klaten, para penambang setempat menyebutkan bahwa jalur distribusi pasir khususnya untuk di Solo dan Sukoharjo, peran makelar atau semacam juragan terlihat dalam memonopoli akses

penjualan ke pasar. Para juragan biasanya dapat ditemukan di Macanan (Klaten) dan atau di Pasar Legi (Solo) dan Solo Baru (Solo). Melalui merekalah biasanya kebutuhan permintaan pasir dan batu dari toko bahan bangunan atau toko material dan konsumen individual terpenuhi. Para penggali di Dusun Kaligentong (Kemalang, Klaten) juga menceritakan bahwa pasir dan batu yang mereka gali juga dimanfaatkan oleh para pemborong yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah setempat. Pada praktek di lapangan, para juragan menugaskan sopir pengganti untuk mengambil alih truk pengangkut dari sopir yang membawa pasir dari situs penggalian. Sopir pengganti inilah yang membawa bahan galian pada konsumen. Dengan demikian, pengemudi truk pengangkut, apalagi penambang, tidak mempunyai akses sama sekali dengan konsumen untuk melakukan tawar-menawar harga. Tidak berlebihan jika para penambang setempat menyebutkan bahwa penguasa penambangan pasir di Kali Woro adalah para makelar.

Keberadaan aktor-aktor dalam mata rantai distribusi semakin menegaskan kecilnya peran dan keuntungan yang diraih penambang lokal dalam ekonomi penggalian pasir ini. Sekalipun demikian, hampir tidak ditemukan kasus di berbagai tempat tentang konflik antara penambang setempat dengan para aktor yang mendominasi distribusi bahan galian. Persaingan justru muncul antar penambang yang memperebutkan akses pada truk pengangkut. Di Kaligentong (Kemalang, Klaten) misalnya, di jalan-jalan yang strategis yang dilewati truk pengangkut, para wakil kelompok-kelompok penambang saling berebut berdiri, atau yang mereka sebut *ngadang* atau *nyegat*, untuk mencegat pengemudi truk dan menawarkan pasir galian masing-masing kelompok. Tidak jarang para pencegat memiliki bahasa tubuhnya masing-masing untuk berkomunikasi dengan para pengemudi mengenai tawaran-tawaran yang dirahasiakan dari pencegat lainnya. Seorang informan dari dusun ini mengisahkan bahwa pada praktek sebelumnya para penambang berebut mendekati truk dengan saling dorong demi untuk masuk ke dalam kabin truk dan duduk di sebelah pengemudi untuk mengajukan tawaran. "*Pokoke angger truk ditarik, ayo jukuk pasir neng kono ngoten,*" aku seorang penambang. Hal ini terjadi biasanya terjadi pada penambang

yang belum memiliki langganan. Hal ini terjadi terutama pada masa-masa pasca-erupsi saat Kali Woro memiliki deposit pasir melimpah sehingga didatangi oleh banyak truk pengangkut pasir. Dengan persaingan antar penambang dalam memperebutkan akses pada truk pengangkut, pengemudi truk berperan menentukan harga. Seorang penambang mengeluh, “*Sak iki sopire ngene, yo kudu dilakoni, mung ngoten.*”

4.8.5 Peran Stakeholder dalam Ekonomi Penambangan Pasir.

Diskripsi di atas menggambarkan bahwa dunia penambangan pasir sarat dengan masuknya intervensi dari para *stakeholder* orang Merapi dan bisa mengancam akses mereka terhadap pasir di wilayahnya. Ketegangan dapat muncul antara penggali pasir dengan pemilik alat berat. Persaingan terjadi karena penggali manual tidak dapat bersaing dengan alat berat serupa *backhoe* yang memiliki kapasitas penggalian yang sangat besar dan efisien.

Hal ini setidaknya dirasakan oleh penambang di sekitar Kaligentong dan Malangsari di Kemalang (Klaten), serta Grogol di Dukun (Magelang) yang melihat kehadiran *backhoe* sebagai ancaman. Sementara itu, seorang informan dari Kaligentong memiliki alasan lain untuk penolakan terhadap alat ini. Salah satu prosedur penggalian pasir dengan *backhoe*, menurutnya, adalah dengan mengupas lapisan batu pada tanah dengan cara menghantamkan lapisan tersebut dengan batu yang lebih besar. Proses ini menimbulkan getaran yang sangat kuat sehingga mengakibatkan rumah-rumah yang ada di dekat operasi kerja alat berat mengalami retak ringan. Reaksi masyarakat seperti yang ditemukan di Kaligentong, salah satunya, adalah dengan melemparkan bom molotov saat *backhoe* sedang beroperasi.

Ancaman lain dengan hadirnya *backhoe* adalah ketakutan akan berkurangnya debit pasir di lokasi penggalian, terutama di aliran kali. Hal ini berujung pada persaingan antar penambang sendiri. Di wilayah Kali Gendol Kabupaten Sleman, misalnya, terungkap bahwa penambang manual dari Sleman cenderung menolak kehadiran penambang manual dari luar Kabupaten Sleman. Praktek penambang setempat meminta penambang baru untuk menunjukkan

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat ditemukan di sini. Hal ini mengindikasikan bahwa para penambang setempat merasa bahwa mereka lebih berhak atas sumber daya alam yang tersedia di wilayah mereka.

Alasan yang beragam tersebut dapat menjelaskan keberadaan *backhoe* di Grogol, Malangsari, dan Kaligentong yang kini hampir tidak dapat ditemukan lagi sekalipun tidak ada peraturan tertulis yang secara eksplisit melarangnya. Para informan di Kaligentong, baik dari warga maupun aparat dusun, menyatakan bahwa belum ada peraturan di tingkat desa (Perdes) yang dikeluarkan untuk mengatur hal ini.

Aparat setempat seperti kepada dusun dan kepala Rukun Tetangga (RT) menjelaskan bahwa belum adanya surat keputusan (SK) dari pemerintah kabupaten membuat peraturan formal pada tingkat desa belum dapat diterbitkan. Satu-satunya ketentuan formal yang ada yang mengatur tata kelola penambangan pasir adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang tertuang dalam Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) yang diberikan pada perusahaan yang mengajukan ijin penambangan pasir (Lihat Lampiran). Dalam contoh surat tersebut ditemukan klausul yang memungkinkan penggunaan ekskavator atau *backhoe*. Alasan lain mengapa pelarangan pada tingkat desa tidak pernah eksplisit dan formal adalah karena santer terdengar di masyarakat di Kaligentong bahwa beberapa perangkat desa atau aparat pemerintahan adalah pelaku usaha penambangan dengan alat berat juga.

BOX 2. SEKILAS TENTANG MAFIA PASIR

Pengiriman pasir ternyata melibatkan calo. Tempat berkumpulnya para calo pasir adalah di daerah Solo Baru, Surakarta. Pasir-pasir yang akan dikirim ke konsumen harus melewati daerah ini. Sopir truk pasir kemudian akan menjual pasir-pasir mereka ke para calo. Setelah transaksi pembayaran selesai, jumlah pasir dalam bak truk yang dibawa oleh sopir (kurang lebih 7/8 kubik) dikurangi dua kubik untuk diturunkan di depo. Ada petugas khusus yang bertugas mengurangi muatan pasir. Tukang bongkar muatan juga adalah pengemudi truk yang akan membawa pasir ke pembeli. Sopir truk yang membawa truk dari lokasi penambangan tidak boleh membawa sendiri pasirnya ke pembeli. Alur distribusi ini sudah diatur dengan rapi dan secara tidak resmi disetujui oleh semua pihak-pihak yang terlibat. Pengemudi truk dari situs penambangan harus menunggu di Solo Baru sementara tugasnya digantikan tukang bongkar. Setelah pasir diantar ke pembeli yang sesungguhnya, truk akan dikembalikan lagi ke pengemudi awal yang sudah menunggu di tempat semula. Jika ada pengemudi yang melanggar dengan mencoba mengantar sendiri pasir ke konsumen, maka ia akan dipukuli karena dianggap mencuri konsumen. Calo atau mafia pasir tersebut menjadi semacam penguasa pasar. Para pengemudi truk menjadi tergantung dengan calo. Tanpa calo maka pasir yang mereka angkut tidak akan cepat terjual. Sekurangnya terdapat 15 orang calo yang beroperasi di Solo Baru. Harga jual pasir ke konsumen jika tanpa calo adalah Rp 600.000 dengan ukuran 7/8 kubik. Sedangkan harga jual pasir lewat calo adalah Rp 530.000 dengan ukuran 5/6 kubik setelah pengurangan.

Di wilayah Dusun Kaligentong, Desa Kendalsari (Kemalang, Klaten), pernah catat beberapa firma penambangan yang juga mengoperasikan *backhoe*. Di antaranya adalah C.V Sukma Mitra dari Kalasan yang diatas namakan Heru, C.V Sinergi Mitra Sejahtera dengan penanggungjawab seorang staf Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan yang dimiliki oleh Bambang Lesmanto dari Putran. Pasca erupsi 2010 beberapa warga di Dusun Kaligentong juga mengajukan ijin menambang, yaitu Sardiman Budianto yang bekerja sama dengan Yuly, Sekretaris Desa Kendalsari. Pak Yuly yang juga memiliki pengalaman mengurus perizinan menceritakan bahwa ia sudah menyetor (*nitip*) uang sebesar Rp 100.000.000,00 pada Dinas Pertambangan. Pada pertengahan November 2011 ia dihubungi pihak Dinas Pertambangan untuk segera membayar kekurangan kelengkapan administrasi perizinan sebesar Rp 100.000.000,00. Dengan demikian, total biaya mengurus perizinan adalah kurang lebih Rp 200.000.000,00 untuk masa operasi dua tahun.

Sementara ini, setidaknya, warga di Grogol, Malangsari, dan Kaligentong hanya dapat mengatakan bahwa penggunaan alat berat sudah dilarang. Di Kecamatan Kemalang, Klaten, misalnya, *backhoe* tidak lagi ditemukan beroperasi di daerah aliran sungai/kali. Alat berat ini hanya digunakan menambang pasir di atas lahan pekarangan milik masyarakat. Sekalipun demikian, dengan kontroversi yang ada, alat berat tetap dapat memberikan kesempatan kerja pada warga setempat untuk menjadi *coker* yang bertugas meratakan pasir yang dimuat oleh *backhoe* ke dalam bak truk. Sementara, dalam penambangan manual, penggali juga mengerjakan fungsi memuat pasir, sekaligus meratakannya, ke atas truk. Seiring dengan pelarangan ini, maka tidak ada lagi warga yang bekerja sebagai *coker*, setidaknya untuk situs penggalian pasir di kali.

Dengan potensi ketegangan yang ada, beserta argumen konservasi lingkungan, tidak mengherankan jika dibutuhkan regulasi yang mengatur aktivitas penambangan pasir dan batu di sekitar kawasan Merapi. Namun demikian, tidak semua regulasi memberikan kepuasan kepada semua pihak, termasuk masyarakat setempat. Berdasarkan regulasi yang ada, penambangan pasir dan batu masuk dalam kategori Eksplotasi Bahan Galian Pasir dan Batu, yang kerap disebut

Galian C. Penambang berskala menengah dan atas memerlukan perijinan khusus dari pemerintah propinsi untuk memulai aktivitas penggalian. Penggalian di Kali Woro, Klaten, misalnya, memerlukan perijinan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang berpusat di Semarang. Ijin yang dikeluarkan oleh otoritas terkait akan menetapkan skala penambangan berdasar luas wilayah galian, durasi penambangan, dan ketentuan lainnya demi menjaga keberlangsungan lingkungan dan kondisi alam.

Pengurusan ijin dilakukan secara berjenjang dari bawah di tingkat kelurahan hingga ke pemerintah propinsi. Sementara, pemerintah desa juga dapat mengeluarkan aturannya sendiri, yang selain berlaku untuk penambang menengah ke atas, juga menjadi ketentuan bagi penambang kecil dan manual. Penetapan mengenai larangan untuk menambang dalam radius delapan hingga sepuluh kilometer dari dam, misalnya, berlaku di Candi Morangan (Ngemplak, Sleman) melalui Peraturan Desa (Perdes). Aparat desa pernah memasang patok pada batas delapan kilometer, namun penambang setempat mencabutnya karena dianggap merugikan warga karena menutup kesempatan menggali pasir dan batu di dekat wilayah dusun. Warga keberatan harus berjalan jauh dari kawasan pemukimannya untuk menambang. Kisah serupa juga terjadi di Grogol (Dukun, Magelang) terutama pada masa sebelum erupsi 2010 di mana warga dilarang menambang di sekitar dam. Saat terjadi erupsi yang mengalirkan banjir lahar sehingga membuat dam jebol, warga menganggap aturan tersebut tidak lagi berlaku.

Ancaman yang paling mengkhawatirkan bagi warga Merapi adalah peran negara yang tidak menjadi regulator yang adil dalam ekonomi penambangan. Negara justru mengambil bagian untuk mendapatkan keuntungan dengan memainkan regulasi. Hal ini nampak dari kasus penambangan pasir pasca berakhirnya erupsi 2010. Dalam menghadapi intervensi pemerintah, masyarakat lokal melakukan perlawanan.

Hampir tiga minggu setelah erupsi Merapi 2010, saat status Merapi belum diturunkan, hampir semua warga Dusun Kaligentong (Kemalang, Klaten) sudah kembali menambang ke Sungai Woro bahkan saat mereka masih tinggal di

pengungsian. Hal ini menciptakan ketegangan dengan aparat keamanan karena warga tidak menghiraukan larangan pemerintah untuk menambang mengingat status Merapi yang masih aktif. Sekalipun akses masuk kampung ditutup dan dijaga aparat kepolisian, warga berkeras masuk ke kampung mereka melalui jalan lain. Sementara polisi hanya menjaga jalan yang beraspal, masyarakat lebih mengenal jalan menuju jurang mana yang dapat dipakai untuk menembus penjagaan polisi. Mereka juga yang mengantar dan mengawal kedatangan truk pengangkut pasir ke jalur yang bebas dari pengawalan aparat keamanan. Pak Bayan selaku kepala dusun juga *kewalahan* melarang warganya untuk tidak menambang sehingga ia kerap ditegur aparat karena dianggap tidak dapat mengatur warganya. Kemudian Pak Bayan meminta para ketua RT untuk memperingati warganya. Pak Marinu, sebagai Ketua RT Kaligentong menyarankan agar penjagaan aparat diperketat dan jalan menuju lokasi penambangan diberi garis polisi. *“Le mutuske ki gampang, dalane kono kon garis polisi dipalang dijogo, leren kui, nek kon goleki wonge repot soale gununge suarane koyo ngono wonge do neng kali, gen leren.”*

Tindakan nekat warga untuk menambang adalah karena pada saat Merapi masih dalam status bahaya harga satu rit pasir saat itu mencapai Rp 1.000.000,00. Dalam sehari, sekali menambang seorang warga bisa mendapat hasil Rp 400.000,00. *“Kui nganti aparat pak polisi dithungi senjata- Kowe gelem leren opo ora- ngoten niku nekat kok.”* demikian Pak Marinu. Seorang warga sampai nekat memotong garis larangan polisi agar tetap bisa menambang. Orang ini akhirnya tertangkap oleh warga yang lain.

“Pokoke ojo dilaporke, sing jelas iki dimaklumi ning sing nduduk karo sing lewat kene leren. Nek kui diseret malah awak dewe sing kelangan warga, kula ngoten kalih Pak Bayan,”

lanjut Pak Marinu. Sore hari setelah tertangkapnya warga tersebut, banjir lahar dingin melanda Sungai Woro. Setelah kejadian ini, semua warga kemudian menyudahi penambangan sambil menunggu status Merapi turun dan dinyatakan aman kembali untuk menambang.

4.8.6 Penggilingan Batu

Sebelum erupsi 2010, dalam sehari setoran batu kasar atau *bantak* dari Kali Woro ke *basecamp* maksimum mencapai empat kali. Pak Marinu, seorang tokoh masyarakat di Dusun Kaligentong, Desa Kendalsari (Kemalang, Klaten), adalah contoh dari pemilik usaha ini di mana ia mempekerjakan 12 orang pekerja. Mereka dibayar dengan hitungan per rit. Upah menggiling *bantak* satu rit atau sebesar empat kubik adalah sebesar Rp. 50.000,00 dengan durasi waktu yang dibutuhkan selama satu jam. Dengan demikian, upah yang diterima masing-masing pekerja adalah Rp 50.000,00 dibagi 12 pekerja. Sementara, biaya untuk menaikkan batu olahan ke bak truk adalah Rp 5.000,00 per kubik yang juga dibagi untuk 12 orang. Rata-rata satu bak truk berisi tujuh kubik pasir batu pecahan/gilingan, atau dikenal dengan *split*. Dengan upah yang tidak besar ini, terutama saat pasar sedang lesu, maka biasanya pekerja di *basecamp* adalah perempuan. Sementara, para lelaki lebih memilih menggali pasir di Kali Woro karena penghasilan yang lebih besar.

Pada akhir 2011 terdapat sekurangnya 51 *basecamp* di wilayah Kecamatan Kemalang. Terdapat penambahan 25 *basecamp* baru pasca erupsi 2010 dan delapan di antaranya terdapat di wilayah Desa Kendalsari. Dengan 51 usaha penggilingan baru ini, lapangan pekerjaan tersedia secara luas bagi para ibu rumah tangga dan perempuan. “*Ora ketang sedino ki 25 utawa 20 ewu eneng pemasukane,*” seru seorang ibu. Setiap hari penggilingan batu ini rata-rata melakukan penggilingan sebanyak tiga rit sehingga seluruh *basecamp* sekurangnya menggiling batu sebanyak 150 rit per hari. Harga *bantak* dari penambang sekitar Rp 40.000,00 per rit. Pemilik *basecamp* biasanya menyewa truk pengangkut untuk membawa batu dari sungai ke penggilingan. Namun, tidak sedikit pula pengemudi truk yang langsung menjual batunya ke pasar. Pak Suranto adalah satu-satunya pemilik truk di Kaligentong yang juga memiliki *basecamp*. Pasca erupsi ia lebih sering ke lokasi *backhoe* di Desa Sidorejo untuk mengambil *bantak* yang akan digiling di *basecamp* miliknya. Pengemudi truk yang mengangkut batu ke *basecamp* biasanya dibayar Rp. 10.000,00 per rit. Biaya ini lebih murah karena jarak tempuh ke *basecamp* lebih dekat daripada

pengiriman pasir di mana pengemudi truk dibayar Rp 50.000,00. Dalam satu hari, pengemudi dapat mengangkut batu ke *basecamp* antara empat hingga lima. Untuk pengiriman pasir ke Solo dan Sukoharjo biasanya truk hanya dapat mengangkut satu kali dalam sehari.

Bantak yang digiling dapat menghasilkan batu *split* ukuran 3-5, *split* ukuran 2-3, *split* ukuran 1-2, *split* ukuran 0-5, dan abu batu. Batu *split* ukuran 0-5 adalah jenis yang paling mahal namun biasanya lama terjualnya karena penggunaannya yang jarang. Batu giling jenis ini umum digunakan untuk pengaspalan jalan. Tidak jarang selama beberapa bulan batu *split* dengan ukuran 0-5 ini belum laku dan hanya ditimbun di *basecamp*. Sementara, abu batu digunakan untuk pembuatan *resplang*, gorong-gorong, campuran pembuatan batako, atau untuk campuran membuat dinding. Abu batu dijual dengan hitungan per kubik dengan harga Rp 50.000,00. Pasca erupsi Merapi, Pak Marinu hanya menjualnya dengan harga Rp 20.000,00 per kubik karena pasokan pasir yang berlimpah di berbagai tempat.

Pak Marinu menyewa lahan untuk dijadikan *basecamp* seharga Rp 110.000,00 per tahun. Ia membayar pula pungutan ganti rugi kerusakan jalan sebesar Rp 210.000,00 per bulan. Semua pengeluaran ini dapat ditutup dari penjualan *split*. Per kubik *split* ukuran 1-2, misalnya, adalah seharga Rp 80.000,00 sehingga satu kali penggilingan sebanyak tiga kubik menghasilkan sekitar Rp 240.000,00. Dari penghasilan ini, pemilik *basecamp* harus membayar biaya tenaga penggiling Rp 50.000,00 biaya bahan baku bantak Rp 115.000,00 biaya pengisian ke bak truk Rp 15.000,00-Rp 20.000,00 dan biaya pengawas Rp 20.000,00 per hari. Namun, menjelang akhir 2011 harga jual turun menjadi Rp 70.000,00 per rit. Untuk mengurangi kerugian, Pak Marinu sementara menghentikan aktivitas produksi di *basecamp*. “*Sing digiling kui gen payu disik, ndelok dalam perkembangan.*” Pada awal 2012, Pak Marinu sedang mempersiapkan lahan miliknya yang bersebelahan dengan rumah tinggalnya untuk dijadikan *basecamp* demi menghindari biaya sewa lahan.

Sebelum banyak *basecamp* baru bermunculan, pengusaha sering kewalahan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. “*Ben dino kudu padu mba,*

marakke opo, wis pesen ninggali duit eneng sing 10 juta, 12 juta utawa 7 juta, arep dijupuk ora oman, hla kan dadi rame ngoten niku,” demikian pengakuan Pak Marinu. Jika ada proyek besar seperti pembangunan tol Solo-Semarang seperti yang ditemui pada akhir 2011, pimpinan proyek infrastruktur akan bekerja sama dengan pemilik basecamp untuk memasok bahan bakunya. Program PNPM yang ada juga turut meramaikan industri penggilingan batu. Semua kegiatan PNPM yang berkaitan dengan pembangunan sarana atau prasarana memerlukan batu-batu split. Hampir semua perangkat pemerintahan Desa Kendalsari (Kemalang, Klaten), termasuk lurah, carik, dan kepala urusan sosial (modin) mendirikan basecamp di atas tanah pelungguh mereka yang berdekatan dengan jembatan dam Sungai Woro.

4.8.7 Ekonomi Pasir dan Batu bagi Kesejahteraan Rumah Tangga di Merapi

Sekalipun cadangan pasir dan batu nampak melimpah, terutama untuk lokasi penggalian di sepanjang aliran kali, fluktuasi produksi tidak dapat terhindar dalam penambangan pasir dan batu. Pada saat penelitian dilakukan, yakni pada bulan-bulan menjelang akhir 2011, warga di Dusun Kaligentong, misalnya, mengaku bahwa mereka hanya melakukan penggalian selama setengah hari setiap harinya. Diakui bahwa harga satu rit pasir dengan ukuran delapan kubik pernah mencapai Rp 300.000,00 pada saat erupsi Merapi dan lahar dingin belum sampai ke daerah Kaligentong. Pada bulan pertama pasca erupsi, selama satu bulan penuh warga sempat menambang selama 24 jam penuh. Penambangan pasir saat itu dilakukan tanpa henti secara bergantian. *“Nggih mangkih onten sing mangkat jam siji ndalu, onten sing sak niki mangkate sore, onten sing mangkat esuk.”* Saat itu warga rela menambang hingga 24 jam karena harga pasir mencapai Rp 200.000,00 per rit. Di Grogol (Dukun, Magelang) pun warga mengakui bahwa pada masa pasca bencana, pertambangan merupakan usaha pertama dan paling banyak dikerjakan, terutama untuk pemulihan ekonomi keluarga secara cepat. Namun, setelah itu harga pasir di semua tempat mulai turun menjadi Rp 180.000,00 lalu Rp 160.000,00. Sekarang ini harga untuk satu rit pasir hanya Rp 100.000,00 hingga Rp 110.000,00. Kondisi produksi mulai terganggu saat

lahar dingin kembali mengalir ke Sungai Woro dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Aliran lahar dingin ini mengakibatkan jalan menuju dasar Sungai Woro yang dari arah Kendalsari mengalami rusak total sehingga terputus sama sekali. Sekarang satu-satunya akses adalah dari arah Balerante. *“Lebih tebih malih, terus hargane niku saya rendah.”*

Harga yang kurang lebih sama rendahnya itu juga dirasakan para penambang di Klakah Tengah (Selo, Boyolali). Para penggali mengungkapkan penghasilan mereka berkisar antara Rp 20.000,00-Rp 40.000,00 per hari dalam kondisi normal. Jumlah tersebut diperoleh setelah mereka membagi hasil pembayaran dari satu rit pengangkutan dengan jumlah anggota kelompok penggali yang berjumlah antara empat hingga enam orang. Secara umum, dengan harga yang ditentukan oleh kondisi infrastruktur, permintaan pasar, maupun ketersediaan pasokan, penambang sesungguhnya tidak dapat memiliki penghasilan tetap dari ekonomi pasir dan batu. Keadaan yang sedikit lebih baik dirasakan para penggali dari Grogol (Dukun, Magelang) yang pada saat yang sama masih menerima Rp 170.000,00 per rit. Namun, tidak semua uang penerimaan dari pengangkutan pasir dapat dinikmati penggali. Di Grogol, misalnya, penambang masih harus menanggung beban atas nama potongan jalan desa sebesar Rp 50.000,00 potongan muat potongn muat sebesar Rp 50.000,00 dan potongan depo atau lahan sebanyak Rp 20.000,00. Beruntung jumlah kelompok penggali di kawasan biasanya hanya dua orang sehingga masing-masing penggali dapat memperoleh Rp 25.000,00 dari satu kali pengangkutan. Dalam kondisi normal setiap kelompok di berbagai tempat dapat melayani dua kali pengangkutan dalam satu hari. Hanya pada “musim pasir” saja maka individu penggali dapat membawa pulang uang sebesar Rp 100.000,00-Rp 150.000,00. Penghasilan tersebut umumnya diperoleh melalui jam kerja yang panjang. Seorang penambang di Kemalang, Klaten, misalnya menyebutkan bahwa mereka bekerja sudah berangkat ke Kali Woro pukul 3.00 pagi dan baru merampungkan pekerjaannya pada pukul 17.00 sore. Lama waktu kerja tersebut sudah memungkinkan untuk sebuah truk pengangkut membawa hasil galian ke Solo sebanyak dua kali. Dalam bahasanya sang penggali menuturkan

“Star kono mau jam 3 bengi berangkat neng kali, tenagane kan kudu wis siap kui, mengko nganti sore perkiraan jam setengah 7 jam 7, kui yo rong rit, kene-Solo paling ora. Rong rit kui wis mentok, wis ora bali meneh.”

Namun demikian, warga tetap menambang di dasar Sungai Woro sekalipun tidak setiap hari galian mereka laku terjual. Saat ini banyak warga yang menganggur. Menambang hanya dilakukan setengah hari. Seorang penambang dari dusun setempat mengeluh:

“Ki mau mamake yo nambang, ning wis mulih, kan ora mesti mengko telung dina pisan ki payu. Dadi nduduk paling ora wong 6 kui telung dina durung karuan payu, ditumpuk sik. Hla mengko nek ono montor digoleki, diceluki kon isi pasir.”

Truk-truk calon pembeli datang untuk mengambil pasir di dasar sungai Woro dengan memberi kabar sebelumnya. Teknologi pesan pendek (sandek atau sms) menjadi sarana yang memudahkan komunikasi di antara mereka. Kalau pun tidak memberi kabar terlebih dahulu, para pengemudi truk pengangkut pasir akan bertanya pada penambang yang lain mengenai pemilik tumpukan pasir-pasir yang teronggok di tempat-tempat tertentu. Dalam kondisi sulit seperti ini, penjualan terjadi setelah penambangan dilakukan selama tiga hari. Dengan harga Rp 120.000,00 per rit maka setiap penambang dalam kelompok yang terdiri dari empat hingga enam orang mendapat penghasilan sekitar Rp 20.000,00 – Rp 30.000,00.” Padahal, sebelum erupsi atau atau minggu-minggu pasca erupsi, penggali dapat mengantongi setidaknya Rp 50.000,00 per hari. *“Nek mbiyen wong ngeduk pasir ki sedino ora lepas seko seket ewu,”* imbuh penambang lainnya. Sepinya penambangan pasir di dusun ini juga berakibat pada menurunnya pendapatan warga yang memiliki usaha warung, tambal ban, atau tukang las. Ini terjadi akibat berkurangnya armada-armada pengangkut pasir yang melintas di desa-desa di kawasan ini. Mereka yang tinggal di sepanjang jalur yang dilalui armada pangangkut pasir biasanya diuntungkan karena dalam sehari semalam truk-truk tersebut tidak henti-hentinya lewat dan memanfaatkan barang dan jasa yang mereka sediakan. Seorang Kepala RT dari Dusun Kaligentong menceritakan dilema yang dihadapi warga:

“Mbiyen ki sedino arep golek duit satus wae gampang, mergane sedino ki truk wis ora kendat. Mbiyen kan tambal ban, tukang las ki siap neng ndalan, nek saiki wis ra eneng, masalahe opo, hla ora eneng montor sing lewat neng ndalan ki njur piye? Mandang bar erosi Merapi kui, ambruke wong wilayah Kemalang, satu arah pertama pasir akeh dadi le arep adol kan murah, kabeh eneng pasir dadi kan montor ki ora ming satu arah mba, hla alat berat sing neng wilayah daerah kui yowis ora iso bergerak, marak ke wong pasir sing tanpa di-bego wae akeh kok arep mbego.”

Bahkan, tidak jarang pengemudi truk mengangkut pasir tanpa membayar tunai sehingga penggali tidak memperoleh penghasilan sama sekali. Seorang penambang menambah ironinya dengan menceritakan bahwa naiknya harga semen membuat proyek pembangunan konstruksi mengalami kelesuan sehingga mengurangi permintaan pasir. Pasir yang menjadi andalan selama ini tidak lagi laku seperti sebelum erupsi. Namun demikian, warga Kaligentong tetap menambang di dasar sungai Woro walaupun tidak setiap hari pasir-pasir yang telah mereka tambang laku terjual.

“Pasir eneng, pirang-pirang neng kulon kono, ning montor sing jupuk ora eneng, hla alasane sopir ki : ngopo kok montor do nganggur ora ge nyambut gawe? Sing disetori ki sapa, sebabe ki le setor ora bayar mas. igeh diutang. Gek iki wong sak harat-harat arep nyambut gawe kabeh. Ki gek piye, hayo?”

Selain penambang, ekonomi regional juga memperoleh pemasukan dari ekonomi penambangan pasir. Pemerintah Desa Kendalsari di Kemalang, Klaten, biasanya menugaskan seorang petugas, yang disebut petugas DO, yang membagikan semacam alat bukti pembayaran yang berwarna biru, putih, kuning, dan merah. Masing-masing lembaran ini diberikan berturut-turut pada operator *backhoe*, *coker*, pengemudi truk, dan pengelola lahan galian. Kebijakan ini terutama berlaku untuk penambangan di atas lahan tegalan milik warga. Besarnya pungutan dalam penambangan untuk satu rit pasir adalah Rp 110.000,00 untuk alat berat, Rp 30.000,00 untuk pemilik lahan, Rp 5.000,00 untuk *coker*, Rp 10.000,00 untuk kompensasi dana kas RT, Rp 10.000,00 untuk kompensasi jalan yang dilewati truk pengangkut barang tambang, dan Rp 220.000,00 untuk DO. Pada tahun 2009, misalnya, terdapat sebanyak 50 *backhoe* beroperasi di

Kecamatan Kemalang dan 15 di antaranya terdapat di wilayah Desa Kendalsari. Uang yang terkumpul dari penarikan retribusi ini kemudian disetor ke pemda sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 10.000,00 per rit. Namun, akibat tidak percaya pada pelaporan tentang banyaknya rit pasir yang dihasilkan setiap harinya, maka pihak pemda kemudian mengambil alih pengelolaannya. Saat ini terdapat tiga lokasi pembayaran retribusi Galian C untuk wilayah Kemalang, yaitu: Joton (utara Desa Tegalmas), Drajeg (di Desa Karangnongko), dan Mipitan. Di samping itu, Pada tahun 2009 desa ini menerima dana pengembalian dari kabupaten yang terkait dengan aktivitas penambangan pasir sebesar Rp 100.000.000,00.

4.8.8 Bencana, Penanggulangannya, dan Penambang Pasir atau Batu

Dalam rangka mengurangi dampak lahar dingin pada keselamatan warga, Pemerintah Kabupaten Klaten, misalnya, berinisiatif membangun dam kedua di Kali Woro pada tahun 2008. Pembangunan dam kedua ini menimbulkan reaksi dari warga Dusun Kaligentong (Kemalang, Klaten). Warga menganggap bahwa pembangunan dam merupakan proyek pemerintah dan pengerjaannya tidak melibatkan tenaga kerja lokal. Buruh bangunan yang mengerjakan dam berasal dari Magelang dan Blabak. Selain itu, warga lokal sendiri tidak senang jika bekerja di proyek-proyek pemerintah dan mereka lebih memilih kerja mandiri dengan menambang. Pembangunan dam kedua ini pada awalnya ditentang sebagian warga yang mengkhawatirkan berkurangnya aktivitas penambangan saat proyek dam berlangsung. Namun, setelah diajukan syarat kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Klaten agar dibangun akses jalan turun ke bawah menuju sungai akhirnya pembangunannya disetujui.

Pihak pelaksana proyek menggandeng sesepuh desa, Mbah Mitro agar mempermudah pelaksanaan. Mbah Mitro mengajukan permintaan untuk dibangun jalan menuju Sungai Woro yang dapat dilalui truk agar mempermudah distribusi pasir. Pada saat proyek pembangunan dam dilaksanakan, warga merasa takut dengan figur pemborong proyek yang berseragam hitam-putih, bersepatu lars, dan bersenjata. Warga khawatir sewaktu-waktu

dapat ditembak oleh pemborong jika tidak mempermudah proses pembangunan. *“Wong desa niku nek onten sing sepatunan, klambi putih ngoten, walah... semelang banget,”* papar Gunanto, salah seorang informan berusia 30an tahun. Akibatnya banyak penambang yang kemudian tidak lagi simpati dengan seseorang mereka itu. Mbah Mitro mendapatkan uang dari hasil pembangunan dam, sedangkan warga yang menambang di Sungai Woro sering diusir oleh pihak dam.

Keberatan lainnya dari masyarakat terhadap pembangunan karena dam dianggap justru akan menciptakan bencana bagi masyarakat di sekitarnya. Masyarakat mengambil contoh kondisi di Cangkringan, Sleman, di mana mereka melihat lahar meluber dari aliran sungai akibat pembangunan dam.

“Tapi pemerintah belum tahu, nek ono bencana sewaktu-waktu niku, kejadiane ngoten niku kan dereng ngerti. Wong gandheng kejadiane gih nembe tahun niki,” papar Gunanto, seorang tokoh pemuda yang saat itu berseberangan dengan Mbah Mitro.

Pada kenyataannya, pada erupsi Merapi 2010 warga secara mandiri melakukan pengamatan di Kali Woro yang pada saat itu telah dialiri lahar bercampur air hujan. Dam tidak secara otomatis menghindarkan masyarakat dari bencana. Pemantauan dilakukan dengan perangkat komunikasi seadanya, berupa telpon genggam dengan sinyal yang terhambat lebih-lebih pada saat lahar datang. Warga yang rumah tinggalnya berada di bagian utara dusun Kaligentong sudah berkumpul di tengah-tengah dusun atau di rumah-rumah yang memiliki kendaraan roda empat (mobil atau truk) untuk memudahkan antisipasi jika sewaktu-waktu bahaya yang lebih besar mengancam keselamatan. Suara-suara yang dihasilkan dari aktivitas Merapi pada saat itu mampu terdengar sampai Kaligentong. *“Nggih gembludhuk nika, tapi angler nika nek lahar dingin,”* tuturnya. Ini berbeda dengan saat Gunung Merapi masih hijau dan turunnya kera-kera sampai ke pemukiman manusia adalah tanda meningkatnya aktivitas Merapi. Sekarang indikasi yang demikian hampir sulit ditemui sehingga warga harus sukarela melakukan pemantauan visual di Kali Woro.

Sementara, di Klakah Tengah (Selo, Boyolali), warga sepenuhnya bergantung pada informasi dari pemerintah setempat melalui pos pengamatan di

Desa Jrasah Kecamatan Selo dan Pos Pengamatan Gunung Merapi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Selain senantiasa mendengar informasi dari dua pos pengamatan ini masyarakat dapat mengikuti perubahan status Merapi dari waktu ke waktu.

Warga sebenarnya menyadari bahwa wilayah pemukiman mereka hanya berjarak sekitar empat kilometer dari puncak Merapi dan merupakan jalur lava pijar serta awan panas. Untuk menyasiasi erupsi, maka jalan lingkungan mereka diperlebar dan *dicor* beton untuk memudahkan jalur evakuasi warga. Jalan beton juga mereka buat hingga ke tepian Sungai Apu dan Sungai Luweh agar jika sewaktu-waktu bencana Merapi mengancam, maka warga masyarakat yang beraktivitas di penambangan pasir di kedua sungai ini dapat segera melakukan evakuasi. Di samping itu, pengamanan pertambangan pasir di sungai dari bencana Merapi juga mengandalkan naluri dan Bantuan Komunikasi (Bankom) berupa *handy talkie*.

Secara umum, masyarakat setempat di semua dusun tempat penelitian ini dilakukan merasa sudah terbiasa dengan perilaku Merapi sehingga mereka tidak memiliki kekhawatiran atau kegelisahan secara berlebihan. Para informan mengungkapkan bahwa sudah sewajarnya jika manusia mengikuti saja pada kehendak alam. Mereka meyakini bahwa di samping Gunung Merapi menimbulkan bencana, gunung yang sama juga akan memberikan berkah tersendiri pada warganya.

4.9 Trend Kemakmuran

Orang Merapi selalu mempunyai ingatan atas sejarah dan perkembangan ekonomi dusunnya, karena mereka terus mengalami berbagai perubahan yang dipicu oleh dinamika erupsi Merapi, tragedi politik maupun pembangunan dan dinamika ekonomi. Ingatan mereka mengungkapkan tentang tren kemiskinan dan kemakmuran yang mereka alami serta kekuatan moral dan politik ekonomi yang menjadi motor penggerakannya.

Orang Merapi bisa mengatakan bahwa ekonomi para kakek dan nenek mereka yang hidup pada dekade pasca kemerdekaan serba cukup sekalipun bukan

kaya raya. Ketika itu petani bisa memenuhi kebutuhan subsisten dengan mengandalkan pada usaha tani jagung di tanah tegalan. Kata serba cukup dalam arti ada daya dukung lingkungan. Petani rata-rata memiliki tanah sekitar 1-2 hektar tanaman jagung dan masih juga memiliki tanaman lainnya seperti sayuran, buah-buahan dan kayu.

Ahmad, usia 70 tahun yang hidup sebagai warga Dusun Klakah Tengah menceritakan bahwa rata-rata orang Klakah pada tahun 1960an memiliki tanah dua hektar tetapi generasinya pada tahun 1970an hanya memiliki satu hektar. Ia sendiri mendapat watisan satu hektar dan kini tanah warisannya dibagikan ke empat orang anaknya dan masing-masing menerima sekitar 0,25 hektar. Sementara itu, cucunya hanya tinggal memiliki tanah sekitar 0,1 hektar.

Ada bukti bahwa orang Merapi yang hidup tahun 1970an semakin merasakan bahwa kebutuhan konsumsi pangan semakin sulit dipenuhi. Mereka membutuhkan paling tidak 2 hektar tanah tetapi yang dimiliki 1 hektar. Bahkan di beberapa dusun penguasaan tanah lebih sempit. Menurut Sutirejo, mantan kadus Turgo, penguasaan tanah per rumah tangga tinggal 0,75 hektar. Tanah seluas itu tidak banyak menghasilkan panen karena tanah kurang subur sebagai akibat masih sedikitnya jumlah sapi di dusun. Oleh karena itu dengan tanah seluas itu pun orang Turgo dan dusun di wilayah Sleman pada umumnya masih rawan mengalami kemiskinan.

Kerentanan ekonomi subsisten lambat laun berkurang karena adanya pembangunan pada era Orde Baru. Orang Merapi mulai beralih dari ekonomi subsisten ke ekonomi komersial dan sekalipun dengan menggarap tanah yang relatif sempit yaitu sekitar 0,5 hektar. Proses keluar dari ancaman kemiskinan mulai terjadi pada dekade 1980an.

Mula-mula ekonomi orang Merapi memperlihatkan bahwa mereka relatif tertinggal dibandingkan dengan petani sawah di daerah *ngarai* dan karena itu kelihatan miskin di mata orang luar. Petani di Merapi memang tertinggal dibandingkan dengan petani di dataran rendah yang lebih dahulu menikmati kue pembangunan melalui partisipasinya dalam pekerjaan non-farm di perkotaan. Orang di pinggir kota Yogyakarta seperti di Depok, dan Pakem misalnya sudah

menikmati pembangunan pada tahun 1970an. Keluarga petani di Depok bekerja di berbagai pekerjaan nonfarm sehingga kesejahteraannya meningkat, dan rumah mereka bisa direnovasi menjadi bangunan permanen dan penerangan listrik. Sementara itu, kebanyakan orang Merapi masih bercocoktanam subsisten, dan tinggal di rumah *gedheg* atau pun kayu.

Orang Merapi juga semakin merasa tertinggal juga dalam pembangunan infrastruktur kampung karena pada dekade 1980an, masih banyak jalan tanah, tidak memiliki tempat ibadah, MCK dan pos ronda yang menjadi atribut kemajuan kampung. Namun sejak 15 tahun terakhir ini kesejahteraan orang Merapi mengalami kemajuan yang luar biasa. Secara fisik rumah mereka berubah dari *gedheg* ke tembok, memiliki sarana listrik, air bersih dan MCK. Jalan menuju kampung teraspal dan setiap hari hilir mudik angkutan masuk membawa hasil bumi, pasir dan produk peternakan dari Merapi ke kota-kota kecil sampai dengan ke Yogyakarta, Klaten, Muntilan, Magelang dan Boyolali.

Kemajuan ekonomi orang Merapi mulai nampak pada tahun 1980an dan berubah sangat pesat pada tahun 2000an. Perubahan kesejahteraan sangat didukung oleh perubahan pola tanam dari tanaman pangan ke non-pangan terutama sayuran dan salak, peningkatan ternak sapi, komoditisasi kayu dan pasir. Semua dusun penelitian menunjukkan tren kemakmuran yang didukung oleh komoditas unggulan yang mempunyai kontribusi bagi perekonomian di daerah.

Kemakmuran orang Merapi menjadi sangat tipikal jika dibandingkan dengan orang dataran rendah (*ngarai*). Pertama, orang Merapi masih memiliki produk subsisten yang bisa diandalkan untuk menekan anggaran untuk pembelian energi. Umumnya mereka masih memakai kayu bakar hasil budidaya sendiri. Dengan memiliki kayu, rata-rata petani bisa menghemat Rp 700.000,00 setahunnya.

Kedua, peningkatan kesejahteraan juga didukung oleh adanya sumberdaya pasir dan batu guna dipakai sebagai bahan bangunan. Umumnya orang Merapi tidak perlu membeli batu atau pasir di tengah semakin mahalnya harga barang tersebut di pasar. Petani tinggal menggali batu dan pasir di pekarangan bila hendak membangun rumahnya. Ketika cadangan itu sudah tidak ada karena

pernah dijual, mereka bisa mencari di jurang. Kalau jaraknya jauh dari rumah mereka bisa membeli dengan harga murah. Karena memiliki kawasan penghasil batu dan pasir, maka banyak rumah di Merapi dibangun dengan menggunakan bahan tembok dari batu atau batako. Adanya sumberdaya tersebut membuat biaya pembangunan di Merapi lebih murah. Menjadi lebih murah lagi ketika orang Merapi mempunyai tradisi gotong royong yang kuat sehingga mereka bisa memiliki rumah yang luas.

Ketika hasil bumi semakin mahal karena dikomersialkan pada era Orde Baru, petani Merapi justru dapat mengerem pengeluaran untuk biaya konsumsi makan sehari-hari karena masih memiliki candangan pangan di kebun. Studi Hidayana (1987) menggambarkan kesejahteraan petani karena mereka memiliki semacam gudang tanaman yang siap diambil di kebun dari berbagai berbagai varitas. Orang Merapi bahkan memelihara keragaman itu agar bisa lebih terpenuhi kebutuhan konsumsi dan pakan ternak. Orang Merapi mengenal lebih dari 120 *spesies* tumbuhan dan puluhan *spesies* memiliki fungsi untuk memenuhi satu atau lebih unit kebutuhan konsumsi. Kini keanekaragaman tanaman berkurang tetapi pada prinsipnya petani selalu memiliki sayuran, buah-buahan, kayu dan rumput sehingga mereka tidak perlu membeli di pasar.

Ketiga, karena relatif tidak banyak mengeluarkan uang setiap harinya, atau paling banyak sekitar Rp 15.000,00 untuk kebutuhan konsumsi keluarga per hari, maka sebagian uang dari hasil bumi yang dijual ke pasar bisa dipakai untuk investasi di berbagai sektor mulai dari bangunan rumah, pendidikan, sapi, dan perluasan tanah. Tren yang berkembang di dalam komunitas Merapi adalah uang dipakai untuk membangun rumah. Rumah bukan hanya tempat tinggal tetapi juga indikator status sosial, dan orang ingin bergegas memiliki rumah guna memanfaatkan tenaga resiprositas. Membangun rumah boleh dibilang tidak begitu membutuhkan uang untuk tenaga karena tenaga diperlakukan sebagai tenaga gotong royong dan kalau ada yang diberi upah, besarnya upah di bawah harga pasar.

Kemajuan ekonomi orang Merapi di atas menggambarkan bahwa mereka memiliki orientasi bisnis bukan menyambung hidup semata. Mereka berusaha

meningkatkan akses pasar tetapi tetap memanfaatkan potensi lokal dalam bentuk sumberdaya alam, dan agroekologi yang mereka kuasai. Memang banyak orang Merapi yang masih kelihatan miskin, tetapi mereka yang miskin terus mengembangkan kemandirian dengan meningkatkan sumber penghasilan, tidak hanya dari tanaman pangan, tetapi tanaman komoditas dan ternak sampai dengan melibatkan diri dalam penggalian pasir (lihat kasus keluarga yang bangkit pada kasus peternakan sapi).

Salah satu potensi agroekologi yang dikuasai oleh orang Merapi adalah beternak sapi. Tren kedua adalah meningkatkan jumlah ternak bisa dimulai dari unggas, kambing sampai kemudian sapi. Dengan memiliki sapi maka uang tidak hilang dan merorot nilainya karena sapi beranak pinak. Strategi investasi di sapi ini sekaligus malah bisa meningkatkan penghasilan, dan kemakmuran di Merapi karena didukung oleh sumberdaya pakan yang memadai.

Orientasi bisnis diikuti juga dengan kesadaran untuk bisa mengontrol sumberdaya alam di Merapi, dan berupaya jangan sampai sumberdaya tersebut beralih tangan ke orang luar. Dengan memiliki ternak, maka banyak hal yang bisa diraih oleh orang Merapi. Umumnya petani berusaha untuk memperluas tanah garapan. Petani yang kelebihan uang berusaha memperluas tanah garapan dengan membeli tanah warga yang akan dijual, atau *nyusuki* tanah warisan sanak keluarga yang sempit atau tidak akan diolah karena tinggal di luar desa. Ada suatu moral dalam kehidupan petani, yaitu menjaga kehormatan keluarga besar dengan cara tidak menjual tanah keluar, apalagi tanah tersebut merupakan warisan orang tua. Karena itu keluarga yang mampu akan memanfaatkan kekayaannya guna membeli tanah kerabatnya yang terpaksa harus dijual karena sempit atau ditukar dengan tanah atau untuk modal usaha di luar.

Kemakmuran orang Merapi makin nyata sejak 15 tahun terakhir ini sebagai implikasi dari keberhasilan mereka melakukan adaptasi ulang (*re-adjustment*) terhadap kelangkaan sumberdaya dan respon terhadap pasar yang semakin meluas pengaruhnya di desa. Orang Merapi mendorong seluruh hasil buminya semakin berfungsi untuk menjadi komoditas yang amat laku di pasar. Sistem ekonomi sangat memungkinkan. Di tengah orang pindah ke gas sebagai

bahan bakar, kayu bakar justru laku keras di kota untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar bagi keluarga tidak mampu atau industri makanan tradisional yang membutuhkan kayu daripada gas, seperti misalnya gudeg. Orang Merapi juga menghasilkan buah nangka yang diburu oleh pedagang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gudeg di kota wisata Yogyakarta

Perkembangan kemakmuran orang Merapi 10 tahun terakhir ini nampaknya sangat terkait dengan pola adaptasinya yang menyandarkan pada pertanian multikroping dengan didukung oleh peternakan dan penambangan pasir. Ketika mereka dipaksa keluar dari pola adaptasi, maka akan mengalami pemiskinan dan ketidakberdayaan. Hal tersebut terlihat dari kebijakan pemerintah merelokasi orang Turgo tahun 1994. Orang Turgo dipaksa pindah ke Sidumoro tetapi hanya sekitar 60 KK saja yang tertarik dan separuhnya balik ke halaman meskipun dengan ancaman keras dari pemulihan dan pengucilan. Akan tetapi orang Turgo yang balik ke kampung justru lebih makmur hidupnya, bisa memiliki sapi kembali. Bahkan jumlah sapi meningkat drastis. Jika tahun 1994 sapi mereka sekitar 100 ekor, kemudian menjadi 365 ekor pada tahun 2010. Sebaliknya, orang Turgo di Dusun Sidumoro kemudian hidup dalam kerentanan. Kandang dan puluhan sapi bantuan pemerintah, swasta dan masyarakat tidak mengangkat kesejahteraan mereka. Bahkan sapi dijual dan kandang disewakan karena mereka tidak memiliki akses terhadap sumberdaya alam, khususnya tanah dan tanaman. Orang Turgo di Dusun Sidumoro menjadi lebih rentan dibandingkan dengan orang miskin di Merapi pada 10 tahun belakangan ini. Orang Turgo di Sidumoro tidak bisa masuk sektor nonfarm sebaik orang dataran rendah karena mereka kalah pengalaman. Sampai 10 tahun mereka tergantung dari kebaikan orang luar dan baru sekarang mereka terpaksa mandiri karena tidak ada bantuan lagi.

Orang Merapi terbiasa hidup dengan mendayagunakan lahan, ternak dan belakangan pasir sehingga dalam membangun kesejahteraan mereka menyadari pada sumberdaya tersebut. Selain itu mereka memiliki tradisi kerja keras sehingga dalam menghadapi kemiskinan dan ancaman erupsi sesungguhnya tidak bergantung pada pemerintah untuk mendapat santunan atau dukungan komunitas.

Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan ekonomi di Merapi akan lebih berhasil guna kalau solusinya adalah dengan membuka akses pengembangan pola adaptasi pertanian multikroping yang dikombinasikan dengan usaha peternakan. Pengembangan ini memerlukan pengadaan tanah yang memadai. Kebijakan relokasi yang menghilangkan akses pada tanah sama saja mendorong mereka hidup dalam kemiskinan.

Bencana erupsi 2010 telah menghancurkan ekonomi orang Merapi pada umumnya. Kebanyakan setiap rumah tangga kehilangan sekitar Rp 10.000.000,00 terdiri atas keharusan mengeluarkan biaya konsumsi tambahan sekitar Rp 4.000.000,00, kerugian ternak Rp 4.000.000,00 (tidak termasuk yang mati) dan kerusakan tanaman harta benda (tidak termasuk rumah) sekitar Rp 2.000.000,00. Kini orang Merapi sedang berusaha untuk bangkit, dan berbagai program donor, pemerintah atau pun NGO masuk ke Merapi. Pokok persoalan yang perlu dibahas adalah bagaimana program itu bekerja, dan bagaimana pengaruhnya, dan bagaimana sesungguhnya warga mengembangkan adaptabilitas guna mengantisipasi bencana yang sudah dan akan terjadi di kemudian hari.

BAB V

SISTEM SOSIAL DALAM KOMUNITAS DUSUN

Orang Merapi mempunyai sistem sosial yang tidak jauh berbeda dengan orang Jawa pada umumnya. Walaupun demikian, orang Merapi memiliki suatu karakteristik sistem sosial yang relatif tipikal karena adanya relasi sosial yang menekankan pada solidaritas horizontal yang kuat berbasis pada ikatan kekerabatan, komunitas, kepemimpinan serta relasi gender yang memberikan ruang bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam membangun keluarga dan komunitas. Kecenderungan komunitas Merapi yang relatif egalitarian itu nampaknya mempunyai kontribusi yang penting dalam menjaga keutuhan komunitas dan sumber daya baik yang bersifat material maupun non material serta melakukan adaptasi dengan Merapi yang di satu sisi memberikan sumber daya tetapi di sisi lain juga menimbulkan kerentanan.

Bab ini secara runtut akan menyimak kecenderungan yang khas dari komunitas di lereng Merapi, dimulai dari sistem kekerabatan, struktur sosial dan solidaritas kekerabatan sampai dengan kesetaraan gender. Akhirnya bab ini ditutup dengan rangkuman dan refleksi untuk menegaskan mengenai kekuatan dari komunitas Merapi dalam mewujudkan kemandirian sosial.

5.1 Relevansi Organisasi Kekerabatan dalam Memahami Relasi Sosial Komunitas

Tulisan ini akan menggambarkan bagaimana komunitas dusun lereng Merapi mengelola sistem kekerabatan untuk menata kehidupannya. Kekerabatan menjadi penting ketika relasi sosial terkait erat dengan aspek-aspek kehidupan yang lain, seperti konsep guyub rukun, kesejahteraan bersama maupun keamanan bersama. Dengan menguraikan asal-usul warga menurut garis kekerabatan akan dapat memperjelas tatanan sosial komunitas dengan berbagai macam pengetahuan yang terkandung di dalamnya terkait dengan keberadaan Gunung Merapi.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat di pedesaan, kekerabatan seringkali menjadi basis dari relasi sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Kekerabatan merupakan hubungan antar individu yang terjadi karena adanya hubungan darah dan perkawinan. Status dan peran yang dimiliki oleh seseorang sebagai akibat dari adanya hubungan perkawinan, hubungan darah serta garis keturunan turut membangun relasi sosial dalam masyarakat.

Komunitas antar dusun di lereng Merapi bukan sepenuhnya komunitas yang terpisah secara kekerabatan. Terindikasi adanya hubungan perkawinan antara beberapa warga dusun di lereng Merapi. Demikian juga terjalinnya hubungan kekerabatan antar warga dalam satu dusun berdasarkan perkawinan. Dari hubungan perkawinan muncul banyak keluarga inti atau keluarga batih yang tinggal dan bermukim di lereng Merapi.

5.1.1 Identifikasi Hubungan Kekerabatan

5.1.1.1 Sistem Perkawinan dan Garis Keturunan

Pola perkawinan yang dijumpai di lereng Merapi adalah endogami (kawin masuk) dan eksogami (kawin keluar). Perkawinan endogami memperbolehkan anggota komunitas untuk menikah sesama warga komunitas atau berasal dari satu dusun. Sementara untuk eksogami, perkawinan diperbolehkan antar individu yang tidak berasal dari komunitas yang sama. Implikasi dari aturan ini adalah menentukan pada siapa seseorang boleh atau tidak boleh menikah dan siapa yang akan diterima sebagai pasangan untuk menikah. Kedua jenis aturan ini bisa berlaku pada suatu komunitas. Namun demikian, pada umumnya warga yang bermukim di lereng Merapi, seperti di Pelemsari dan Bronggang, menganut sistem endogami. Hal ini dipertegas oleh Bu Darto salah seorang warga Pelemsari, “*Kathahe tasih sedherek, salong jodone tetanggane, anak kulo tangga, Ngrangkah angsal Kinah...*”(Sebagian besar masih saudara, sebagian jodohnya tetangganya, anak saya tetangga, Ngrangkah dapat Kinah....). Namun sebaliknya, pola perkawinan warga Dusun Pakisaji justru menunjukkan kecenderungan eksogami. Sebagian besar warga Pakisaji menikah dengan orang luar dusun. Ada

juga yang menikah dengan warga satu dusun, tapi tidak banyak hanya tiga orang yang menikah dengan warga dusun setempat. Konsep endogami dan eksogami ini tidak hanya mencakup batas wilayah tempat tinggal kelompok masyarakat saja, tetapi juga latar belakang religius suatu kelompok. Pada umumnya perkawinan dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama yang sama. Akan tetapi bila warga lelaki dan perempuan yang beda agama memutuskan kawin, biasanya salah satu akan mengalah. Pola perkawinan endogami yang dipadu dengan pola tempat tinggal baik virilokal maupun uxirilokal pada gilirannya dapat berpengaruh pada kepadatan penduduk.

Pola tempat tinggal berdasarkan kekerabatan yang dijumpai pada masyarakat lereng Merapi berupa virilokal yaitu perempuan meninggalkan keluarganya untuk tinggal dengan keluarga laki-laki, dan uxirilokal yaitu laki-laki meninggalkan keluarga asalnya untuk tinggal dengan keluarga perempuan setelah mereka menikah. Namun demikian, tipe virilokal lebih dominan ditemui daripada tipe uxirilokal. Kondisi ini terkait dengan latar belakang budaya Jawa yang cenderung patrilineal di mana anak laki-laki tetap tinggal di rumah, meneruskan garis keturunan, menjaga warisan keluarga dan juga orang tua mereka yang sudah tua.

Sementara mempelai perempuan akan dibawa dan tinggal di lingkungan keluarga suaminya. Jadi apabila sebuah keluarga mempunyai anak laki-laki maka dia akan “ditunggu” oleh anak dan menantunya. Berbeda dengan dengan keluarga yang hanya mempunyai anak perempuan, sepasang orang tua akan menghabiskan masa tuanya berdua saja tanpa ditemani oleh anak-anak maupun cucu di rumah. Misalnya saja Mbah Maryoto warga Dusun Kaliurang Utara, di usianya yang sudah menginjak 83 tahun, dia hanya tinggal berdua dengan istrinya di rumah. Ketiga anaknya adalah perempuan dan semua dibawa suaminya ke tempat keluarganya. Anaknya yang pertama tinggal di dusun yang sama, tetapi beda RT. Anaknya yang kedua tinggal di Sumberejo, dusun sebelah timur Kaliurang Utara. Anaknya yang terakhir tinggal di dekat kantor kelurahan Kaliurang. Meskipun tinggal hanya dengan istrinya, depan dan samping rumahnya adalah rumah kakak dan adiknya. Selain itu anak-anaknya juga sering

berkunjung. Bahkan anaknya yang tinggal terpisah hanya beberapa rumah dari rumahnya, untuk urusan ‘sapi bedhal’ pun meminta tolong ayahnya.

Selain itu ada kecenderungan masyarakat Kaliurang Utara menikah dengan orang satu dusun atau tetangga dusun sekitar. Dari 95 kepala keluarga ada sekitar 20-an pasangan yang melakukan pernikahan secara endogami. Menurut kepala dusun setempat, hal ini disebabkan oleh perjodohan yang dilakukan oleh para orang tua dulu. Meskipun sekarang ada kecenderungan generasi muda mencari jodohnya sendiri tetapi menikah dengan pasangan yang berasal dari satu dusun atau dusun sekitar masih menjadi pilihan.

Sudah menjadi hal yang lazim pada kehidupan masyarakat lereng Merapi bahwa dalam satu rumah tangga atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah somah tidak hanya terdiri atas keluarga inti atau keluarga batih. Dalam satu somah tidak hanya dijumpai ayah, ibu, dan anak, tetapi juga orang tua ayah atau ibu. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Mbah Arjo warga Pelemsari, *Setunggal griyo sok enten 2 keluarga, ning nek simbok sok dadi setunggal kalih anake, setunggal somah*. Demikian juga dengan yang dapat dijumpai dalam keluarga Bapak Hadi warga Kaliurang Utara, yang tinggal bersama istri dan empat anaknya dan juga bersama kedua orang tuanya. Ia tidak mengerti mengapa kedua orang tuanya lebih senang untuk tinggal bersamanya, padahal banyak saudara kandungnya yang mempunyai rumah tinggal cukup besar, layak, dan cukup mewah untuk ukuran warga di dusunnya. Namun yang jelas dia adalah termasuk anak yang bungsu. Ia mendapatkan bagian warisan berupa tanah dari orang tuanya, di tanah itulah kemudian dia mendirikan rumah tinggal dan yang saat ini ditinggali oleh keluarganya dan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya menyatakan senang untuk tinggal bersama anak bungsunya ini.

5.1.1.2 Konsep tentang Keluarga: Keluarga Batih dan Keluarga Luas

Keluarga adalah pengelompokan kerabat yang tak harus tinggal di satu tempat (*localized*). Dalam konsep keluarga, dikenal istilah keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Dalam budaya Jawa, keluarga inti yang terdiri dari orang tua (suami istri) dan anak dikenal dengan istilah keluarga

batih. Apabila salah satu orang tua tidak ada atau pasangan suami istri tidak memiliki anak, struktur keluarga semacam itu masih dikatakan sebagai keluarga inti. Keluarga inti akan berubah strukturnya ketika salah seorang orang tua tidak ada, atau anak meninggalkan keluarga karena meninggal atau menikah untuk membentuk keluarga inti yang baru. Perubahan struktur keluarga inti tampak di Pelemsari dan Bronggang. Jatuhnya korban yang merenggut anggota keluarga bahkan satu keluarga membuat struktur keluarga inti berubah bahkan hilang. Sejumlah perempuan tiba-tiba menjadi kepala keluarga karena suami meninggal pada saat erupsi Merapi 2010.

Keluarga luas atau *extended family* adalah keluarga yang tidak hanya terdiri atas orang tua dan anak saja tetapi juga *mbah* (kakek nenek dari anak), *bulik-paklik* (adik dari orang tua), bude pakde (kakak dari orang tua), anak dari saudara orang tua, menantu dan juga *putu* (cucu). Mereka biasanya tinggal berdekatan satu sama lain, bahkan ada yang tinggal dalam satu atap. Peran *extended family* dalam kehidupan sehari-hari tampak menonjol pada relasi sosial yang mengedepankan nilai kerukunan. Aktivitas berupa gotong-royong, *slametan*, dan *sambatan* merupakan wadah relasi antar anggota keluarga luas.

Foto 5.1
Mbah Kakung Mengasuh Cucunya



Berdasarkan identifikasi pola hunian di dusun beberapa dusun tampak bahwa rumah-rumah yang letaknya sangat berdekatan dan masih berada dalam

satu pekarangan dimiliki oleh warga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan cukup dekat misalnya hubungan darah/sekandung. Hal ini juga tampak dari pola hunian di huntara di mana rumah orang tua, anak, saudara orang tua saling berdekatan. Kedekatan rumah yang dimiliki oleh warga yang masih memiliki hubungan kekerabatan baik darah maupun perkawinan berfungsi untuk memperlancar kegiatan sehari-hari masyarakat. Misalnya dengan menitipkan pengasuhan cucu pada mbahnya atau keponakan pada budenya.

Setelah menikah, tidak semua pasangan memilih menetap di Dusun Pelemsari. Ada yang memilih tinggal di luar dusun dengan berbagai pertimbangan, misalnya ikut suami. Namun demikian, walaupun anggota keluarga sudah tidak berkumpul dalam satu dusun, hubungan antar keluarga baik di dalam maupun di luar dusun masih terjalin. Bentuk perhatian anak yang sudah menikah dan tinggal secara terpisah dengan orang tua dilakukan dalam bentuk kunjungan, terutama saat-saat tertentu khususnya Lebaran. Namun, di luar hari khusus tersebut, tidak jarang kunjungan terhadap orang tua dilakukan di hari biasa.

5.1.1.3 Konsep tentang Rumah Tangga

Istilah rumah tangga dalam masyarakat lereng Merapi seperti pada umumnya masyarakat Jawa disebut dengan istilah *somah*. Istilah *somah* bukan hanya merujuk pada bangunan tempat tinggal (*omah*) tetapi relasi antar anggota yang tinggal bersama pada satu rumah.

Rumah tangga adalah satuan sosial yang selalu reaktif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya, maka rumah tangga bukan sekedar satuan sosial yang berintikan pertalian darah dan perkawinan melainkan juga berorientasi pada tugas (*task*¹). Anggota rumah tangga tidak hanya terdiri atas keluarga inti melainkan keluarga luas yang berinteraksi satu sama lain berdasarkan tata aturan yang berlaku dalam rumah tangga.

¹ Saifuddin, Achmad Fedyani. 1999. Keluarga dan Rumah Tangga: Satuan Penelitian dalam Perubahan Masyarakat dalam ANTROPOLOGI INDONESIA 60. Jakarta: UI Press

Dalam mendefinisikan rumah tangga seringkali dengan menggunakan indikator dapur/tungku. Apabila dalam satu rumah terdapat dua dapur maka dikatakan di rumah tersebut terdapat dua rumah tangga. Dengan demikian aktivitas penunjang agar tungku di dapur dapat selalu mengeluarkan api menjadi hal yang krusial dalam pembahasan mengenai rumah tangga. Keluarga luas yang tinggal dalam satu atap dan memasak secara bersama-sama dikatakan sebagai satu rumah tangga. Kondisi ini banyak ditemukan dalam rumah tangga di beberapa dusun di lereng Merapi sebelum erupsi terjadi.

Setelah erupsi Merapi terjadi, ketika sebagian warga terpaksa tinggal di huntara dan tidak bisa kembali ke dusun lama, seperti di Pelemsari, konsep rumah tangga yang sama tetapi beda atap dan fungsi keluarga luas masih dilakukan walaupun setiap unit keluarga inti masing-masing sudah mendapatkan rumah hunian. Beberapa warga yang sudah usia lanjut dan berstatus janda atau duda mendapatkan jatah huntara karena mereka memiliki KK sendiri. Untuk kebutuhan makan sehari-hari mereka dimasakkan oleh anaknya yang tinggal didekatnya.

5.1.2 Fungsi Organisasi Keekerabatan

5.1.2.1 Ekonomi

Dalam mengkaji kekerabatan dan perkawinan seringkali terkait dengan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada suatu keluarga. Pada masyarakat pedesaan, rumah tangga tidak hanya berfungsi sebagai unit sosial tetapi juga unit ekonomi. Baik suami maupun istri berperan dalam aktivitas ekonomi. Anggota keluarga berperan menjadi tenaga kerja dalam aktivitas ekonomi tersebut. Contohnya pada keluarga yang berbasis ekonomi peternakan sapi perah, semua anggota keluarga dilibatkan dalam kegiatan mencari rumput. Sementara untuk kegiatan membersihkan kandang sapi, *ngombor*, *meres*, dan memindahkan kotoran dilakukan baik oleh suami maupun istri. Pada keluarga penambang pasir, tidak hanya suami istri yang mencari pasir, tetapi adakalanya anak juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Mereka mengambil dan memasukkan pasir ke dalam truk-truk yang ada. Sementara pada keluarga berbasis pertanian komoditas tembakau yang memerlukan banyak tenaga kerja dalam

proses pertaniannya tidak hanya melibatkan keluarga sebagai tenaga kerja tetapi juga dari luar keluarga yang bekerja dengan sistem upah. Pada keluarga berbasis tanaman sayuran ditemukan pola bahwa tenaga kerja keluarga atau dari lingkungan tetangga terdekat atau sanak famili lebih disukai dengan konsep berbagi atau saling membantu, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan tenaga kerja yang jauh secara sosial karena akan menyulitkan untuk membalas budi. Dengan demikian relasi antar anggota keluarga inti juga tampak dalam aktivitas ekonomi, selain tampak dalam hubungan antara suami dan istri, suami dengan anak laki-laki atau anak perempuan, istri dengan anak laki-laki atau anak perempuan, serta relasi antar-anak baik lintas gender maupun usia. Pembagian peran antara suami dan istri, anak laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak juga menjadi basis relasi dalam keluarga inti.

5.1.2.2 Sosial

Dalam kegiatan sosial, tidak hanya anggota keluarga batih yang berperan tetapi juga anggota keluarga luas bahkan tetangga yang tidak memiliki hubungan kerabat. Bentuk kegiatan sosial yang dimaksud di sini seperti gotong-royong, kenduren, dan sambatan. Sebagaimana pada umumnya, gotong-royong untuk keperluan pribadi suatu keluarga atau rumah tangga tampak dalam kegiatan membangun atau memperbaiki rumah. Ada kecenderungan bahwa awal berdirinya rumah-rumah warga dibangun dengan sistem gotong-royong. Biasanya tidak hanya saudara atau sanak famili yang dihubungi untuk terlibat dalam pembangunan rumah tetapi juga tetangga dekat baik secara tempat tinggal maupun kedekatan hubungan sosial. Laki-laki merencanakan dan bekerja dalam proses pembangunan rumah, sementara perempuan lebih banyak berperan dalam menyiapkan makanan bagi mereka yang bekerja. Selama proses membangun rumah, kegiatan ekonomi tetapi berjalan. Misalnya peternak sapi perah, pagi dini hari sudah beraktivitas untuk pemerah susu, sementara pekerjaan untuk *mugut* atau mencari rumput *disambatke* ke kerabat lain. Misalnya pembangunan rumah Pak Seto warga Babadan Bawah yang berada di Barat Rumah Induk memerlukan waktu satu bulan untuk *disambatkan*. Saat itu warga yang ikut *nyambat* kira-kira

50 orang. Pada saat menaikkan blandar atap diadakan ritual dengan dibuatkan *ingkung* (ayam utuh), tumpeng, dan mengundang Pak Sosro, kaum setempat yang biasanya membacakan doanya. Saat rumah sudah selesai, Pak Seto membeli daging kambing untuk syukuran. Jika kondisi dusun sedang banyak *sambatan* maka istri yang mengurus lahan.

Sebagai masyarakat yang memiliki latar belakang budaya Jawa, ritual hidup diperingati melalui serangkaian upacara. Salah satu bagian dari upacara ritual hidup adalah perkawinan. Menurut tradisi masyarakat Jawa di pedesaan, pernikahan memerlukan biaya dan juga sumber daya manusia dalam pelaksanaannya. Peran kerabat dalam pelaksanaan upacara perkawinan sangat penting. Sumbangan berupa sumber daya, baik tenaga dan material merupakan bentuk dari relasi sosial yang menjunjung nilai solidaritas dan sekaligus resiprositas. Sanak famili dan tetangga yang diundang untuk membantu selama hajatan berlangsung bisa dipastikan akan datang mengulurkan tangan.

Hubungan kerabat tampak nyata juga dalam kegiatan kenduren. Warga lereng Merapi yang berlatar belakang budaya Jawa masih menjalankan ritual yang salah satunya dalam bentuk kenduren. Banyak ritual dalam rumah tangga khususnya untuk siklus hidup yang dilakukan dengan kenduren, misalnya sebelum dan sesudah hajatan perkawinan, sebelum dan sesudah melahirkan, dan juga sesudah kematian. Selain itu juga dalam proses membangun dan menempati rumah baru. Peran anggota rumah tangga dan keluarga luas sangat penting pada kesuksesan penyelenggaraan acara ini.

5.1.3 Komunitas dan Kekerabatan

Orang-orang yang memiliki ikatan kekerabatan seperti membangun komunitas tersendiri yang relatif kompak tetapi bukan berarti komunitas-komunitas di lereng Merapi merupakan kumpulan dari jaringan kekerabatan. Apa yang nampak dan disajikan di sini adalah orang-orang yang memiliki ikatan kekerabatan ternyata membentuk suatu pola relasi sosial yang relatif intim dan keintiman ini menjadi modal sosial bagi mereka untuk hidup di tengah-tengah komunitas dusun yang berbasis pada ikatan teritorial.

Keintiman relasi sosial dalam hubungan kekerabatan tercermin dari pola tempat tinggal. Ada kecenderungan mereka yang sekerabat tinggal mengelompok dalam satu unit pekarangan yang luas bahkan dalam satu unit RT. Hal ini terkait dengan tradisi sosial di Merapi bahwa orang berusaha memiliki pekarangan yang luas, dan kelak pekarangan ini dipecah-pecah untuk anak keturunannya. Akibatnya dalam satu pekarangan dibangun tidak hanya satu rumah tetapi dua hingga tiga rumah. Rumah-rumah yang dibangun berdekatan dalam satu pekarangan biasanya dihuni oleh keluarga-keluarga yang masih memiliki hubungan darah kakak dan adik. Tetangga di dusun biasanya juga masih saling terkait hubungan kekerabatan atau dengan kata lain masih sanak famili. Dengan demikian kalau orang Merapi ditanya dimana kerabatmu tinggal, maka orang tersebut akan menyampaikan dengan mudah di sebelah kanan, kiri, belakang dan depan rumah.

Contohnya di Kemiricilik, Hadi bertetangga dekat dengan saudara- saudara dari ayahnya (paman) dan saudara sepupunya. Tetangga yang agak jauh juga ada yang bukan saudara dekat, melainkan saudara jauh, dan ada juga tetangga yang berasal kaum pendatang. Menurut Hadi, kebanyakan para pendatang ini menikah dengan penduduk asli di dusunnya. Dari 24 keluarga di dusunnya, orang yang masih sekerabat dengan dia berjumlah 12 keluarga lebih. Oleh karena itulah apabila ada acara kumpulan seperti arisan, kerja bakti gotong-royong, acara sosial lain dan ritual, maka acara ini ibarat sebagai perkumpulan orang-orang yang masih sekerabat.

Pekarangan yang luas menjadi sarana bagi orang Merapi untuk membangun jaringan kekerabatan yang penting bagi mereka bukan hanya untuk kepentingan ekonomi dan sosial semata tetapi juga keamanan. Dalam konteks produksi, orang yang sekerabat akan mudah melakukan koordinasi dalam kegiatan gotong-royong atau kegiatan sambatan di kebun-kebun mereka. Mereka juga bisa saling membantu untuk mengatasi masalah ekonomi dengan mudah, misalnya kekurangan rumput bisa mengambil rumput kakak adik atau sanak saudaranya dan kelak dikembalikan dengan mudah dan cepat. Mereka saling membantu untuk

mengawasi ternak dan hasil buminya di rumah. Oleh karena itu tidak menarik bagi mereka ikut kandang kelompok kalau pekarangan masih luas.

Ikatan kekerabatan antar keluarga yang masih dalam lingkup keluarga luas relatif dipelihara oleh orang-orang Merapi. Mereka sering bekerjasama dalam urusan produksi pertanian. Mereka menggarap tanah yang berhimpitan dalam satu sertifikat atau *letter C* karena belum dipecah dan diwariskan dari orang tua mereka. Bahkan ketika mereka belum memiliki rumah, beberapa keluarga batih tinggal serumah bersama orang tuanya. Saat salah satu anggota membangun rumah, maka yang lain membantu baik secara fisik maupun material dan moral.

Adanya pekarangan menjadi sarana bagi keluarga luas untuk mensosialisasikan hidup menuju kesejahteraan bersama. Hal ini dilakukan dengan melalui prosesi hidup berkeluarga dan menempati rumah baru. Pada umumnya pasangan pengantin baru masih tinggal dengan orang tua dari pihak laki-laki. Pasangan baru tersebut dibuatkan ruang khusus namun dapurnya masih menjadi satu dengan orang tua. Jika orang tua cukup kaya, anak yang telah menikah ini dibuatkan rumah yang tidak jauh dari tempat tinggal orang tuanya, atau dicarikan lahan tanah yang masih dimiliki orang tua. Pasangan tersebut tinggal dengan orang tua hingga mampu membuat rumah sendiri. Misalnya Mbah Mitro (sesepuh dan orang kaya di Kaligentong) dari beberapa anaknya yang sudah menikah, tiga orang di antaranya diberi tanah dan dibuatkan rumah dalam satu RT yang sama dengan beliau yang masing-masing berdiri terpisah, dengan jarak tak lebih dari 300 meter dari rumah Mbah Mitro. Hal ini terkait dengan pewarisan tanah. Tanah orang tua ada yang dibagi sebelum meninggal untuk anak-anak dan putu, dan ada yang dibagikan sesudah meninggal. Ada anak yang sudah punya rumah sendiri ada juga yang mendapat bagian dari orang tua. Setelah anak menikah ada yang masih bersama keluarga tetapi ada juga yang usaha sendiri, dan ada juga yang dibangun rumah oleh orang tuanya,

Mempelai perempuan akan tinggal satu dapur bersama mertuanya atau tinggal di rumah yang berdekatan dengan rumah mertuanya. Misalnya saja Purwo Sukarjo yang tinggal di kampung Suruh menikah dengan Supartini yang berasal dari kampung Bronggang. Suami istri ini tinggal di rumah yang berdekatan rumah

dengan mertua Supartini. Menurut Purwo Sukarjo memang kebiasaan seperti itu yang lazim digunakan oleh orang sini karena hidup istri adalah tanggungan dari suami beserta keluarganya. Memang tidak semua seperti itu, ada kasus-kasus tertentu laki-laki tinggal bersama keluarga istrinya. Misalnya saja suami istri Agus dan Wahyuni, Agus tinggal bersama keluarga istrinya karena dia mempunyai usaha jual pulsa di sini sedangkan keadaan ekonomi di tanah kelahirannya, Nusakambangan, cukup sulit. Selain itu menurutnya alasan masyarakat Bronggang mempunyai kecenderungan untuk endogami adalah telah mengenal baik calon besan dan calon menantunya, selain itu agar tidak terpisah jauh dengan anaknya apabila anaknya dibawa oleh keluarga menantunya.

Keluarga-keluarga batih di Merapi yang mandiri secara ekonomi tetap memiliki tanggung jawab sosial untuk terlibat dalam berbagai urusan kekerabatan seperti silaturahmi, tolong menolong, membawa nama baik keluarga luasnya, dan membantu anggota kerabat yang kesusahan atau yang akan mengembangkan usaha dan menyambung hidup. Hanya dalam kasus politik, keluarga tidak harus selalu mendukung seorang tokoh yang masih kerabat untuk menjadi kadus atau kepala desa. Akan tetapi dalam urusan sosial, orang Merapi sangat mengindahkan adanya solidaritas kekerabatan yang harus dipelihara. Gotong-royong, sambatan, *kesripahan*, dan hajatan merupakan aktivitas yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja oleh warga Merapi. Sementara kegiatan lain seperti arisan, pengajian, kumpulan dapat ditinggalkan dengan relatif tanpa beban oleh warga dibanding harus meninggalkan urusan sosial tersebut.

Dalam masyarakat Merapi seperti orang Jawa pada umumnya yang diorganisasikan secara bilateral, maka keluarga batih mempunyai tanggung jawab sosial kepada keluarga pihak suami atau istri. Dengan demikian mereka mempunyai tanggung jawab ganda, baik ke keluarga istri maupun suami. Namun demikian mereka juga mempunyai hak ganda. Ketika menghadapi masalah sosial, ekonomi, dan kekerabatan maka semua pihak keluarga baik dari kerabat istri maupun suami akan membantu memikirkan untuk mencari solusinya. Misalnya pada masa pasca erupsi, bantuan yang masuk ke Grogol pada umumnya didapat dari *link-link* keluarga yang juga dikelola pribadi (tidak lewat posko), termasuk

dari kerabat para warga setempat. Seperti yang diceritakan oleh Pri bahwa keluarganya pernah dikirim bantuan dari Salatiga (dari keluarga istrinya) berupa sembako. Namun bantuan tersebut tidak disimpan sendiri, melainkan dikumpulkan terlebih dahulu kemudian setelah terasa mencukupi baru dibagikan ke warga semuanya.

Di beberapa dusun, jaringan kekerabatan bahkan berkembang meluas menjadi suatu trah yang memiliki kegiatan yang relatif formal dan rutin misalnya silaturahmi, syawalan pada bulan syawal pasca hari raya Idul Fitri, dan saling membantu dan menolong ketika menghadapi musibah. Tanpa dengan adanya jaringan kekerabatan yang dekat, perasaan sekerabat sering muncul manakala orang Merapi menghadapi musibah. Kerabat jauh akan tergerak hatinya untuk datang. Salah satu contoh adalah musibah yang dialami orang-orang di bantaran sungai Krasak yang berhulu di Merapi. Ketika menghadapi erupsi tahun 1994, puluhan sanak famili yang tinggal di Lampung pun pulang untuk berbela sungkawa. Demikian pula ketika orang Turgo terkena awan panas tahun 1994, tanpa terduga selang beberapa hari ada orang dari Boyolali berkunjung ke desanya. Mereka tergetar hatinya untuk ikut merasakan penderitaan orang Turgo yang dikatakan oleh kepala dusun sebagai sanak saudara jauh.

Ketika erupsi Merapi 1994 di Turgo, beberapa orang kehilangan ayah ibu atau keduanya. Mereka kemudian dipelihara oleh kakak-kakaknya. Ada pula orang tua yang dirawat oleh anaknya. Torejo misalnya kehilangan istrinya. Ia kemudian ikut Sarjinah anaknya. Dalam tradisi di Turgo dan komunitas lereng Merapi lainnya, ada kecenderungan bahwa orang tua yang manula dipastikan ikut anak-anak mereka entah anak laki-laki atau perempuan. Biasanya mereka ikut anak yang diwarisi rumah tempat tinggalnya sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa mereka telah memberikan imbalan kepada anaknya dalam bentuk rumah tempat tinggalnya.

5.1.4 Fungsi Kekerabatan dalam konteks kebencanaan

Kerabat memang memiliki fungsi yang sangat penting kaitannya pada kebencanaan. Pertama, keluarga menjadi satuan sosial terkecil yang bisa secara

mandiri atau terorganisir dalam melakukan program penanggulangan bencana. Kedua, keluarga sebagai unit kelompok sasaran program. Data dari berbagai dusun menunjukkan adanya pola keterlibatan keluarga dalam penanggulangan bencana.

Pada tahap prabencana seperti tahap mitigasi, anggota keluarga biasanya diajak oleh komunitas untuk berpartisipasi dalam urusan selamatan, pembangunan sarana dan prasarana fisik sampai dengan pengamatan perkembangan erupsi Merapi. Semua anggota keluarga mempunyai peran. Perempuan mempunyai peran menyediakan makanan atau berkat atau tumpeng yang akan dipakai dalam acara selamatan. Pola seperti ini muncul di semua dusun karena perempuan mempunyai tradisi mengelola urusan konsumsi. Oleh karena itu, biasanya perempuan mengetahui dengan baik kalender waktu selamatan misalnya ruwahan, bersih desa dan sebagainya. Perempuan akan berkoordinasi dengan keluarga tetangga atau sanak saudara bila berhalangan atau tidak bisa memenuhi kewajiban sehingga bisa ditolong atau dimaafkan dalam forum. Sebaliknya, lelaki akan menjalankan peran dalam kegiatan upacara keagamaan sampai dengan pembangunan infrastruktur tersebut. Dusun mempunyai tradisi bahwa setiap kepala keluarga atau lelaki dewasa harus ikut sebagai tanggung jawab sosial membangun kebersamaan dan kerukunan.

Fungsi kekerabatan dalam kebencanaan salah satunya juga tampak sebagai sumber informasi. Kerabat yang berada di luar desa atau dusun menjadi sumber informasi untuk mempersiapkan kondisi darurat. Hal ini seperti yang dialami oleh salah seorang warga dari Dusun Pakisaji, Bu Marsudi. Kerabatnya yang di Bantul pada saat terjadi gempa tahun 2006 bergegas lari tanpa membawa suatu barang pun, termasuk uang. Akibatnya saat itu ketika anak kerabatnya ingin membeli minuman tidak mampu. Mendengar pengalaman tersebut, maka pada saat ada pengumuman untuk meningkatkan kewaspadaan berkaitan dengan erupsi Merapi, ia mempersiapkan barang-barang yang sekiranya penting untuk diselamatkan dan dibawa pada waktu mengungsi, termasuk uang.

Pada masa bencana, tidak sempat keluarga melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif baik dalam keluarga batih maupun keluarga luas. Hal

ini terjadi karena aktivitas Merapi 2010 dilihat sebagai peristiwa rutin yang biasa terjadi seperti tahun tahun sebelumnya. Ketika erupsi pertama terjadi, warga Pelemsari masih beraktivitas di dusunnya, kecuali lansia dan anak-anak yang sudah terlebih dahulu mengungsi seiring dengan meningkatnya status Merapi menjadi awas. Dari pengalaman warga Pelemsari, tampak bahwa perempuan-perempuan tidak sempat berkoordinasi dengan suaminya karena erupsi terjadi secara tiba-tiba. Sementara pada wilayah yang lain, misalnya di Pakisaji, proses pengungsian masih terkoordinasi relatif lebih baik dalam tingkat keluarga. Beberapa ibu warga Pakisaji masih sempat mempersiapkan barang-barang dan uang yang bisa dibawa untuk mengungsi. Bahkan mereka berkumpul menjadi satu di lokasi pengungsian.

Kerabat menjadi sangat penting dalam aktivitas evakuasi. Pada saat erupsi Merapi 2010 terjadi, warga yang bermukim di kawasan rawan bencana memerlukan tempat untuk mengungsi, seperti di barak-barak pengungsian yang ada. Namun bagi mereka yang memiliki kerabat yang tinggal di daerah lain, tidak sedikit yang memilih mengungsi sementara di rumah kerabat sembari menunggu keputusan pemerintah tentang status Merapi dan juga hunian sementara yang sudah disiapkan.

Dalam masa pengungsian, keluarga yang mengungsi secara terpisah melakukan komunikasi antar keluarga untuk mempertimbangkan apakah akan mengungsi atau tidak. Kalau pertimbangan bulat mengungsi, maka mereka berkoordinasi dengan sanak keluarga dan juga dalam keluarga batih yaitu suami dan istri berunding tentang bagaimana akan mengungsi apakah akan secara mandiri, atau bersama-sama dengan sanak saudara dan komunitas. Kondisi tersebut seperti yang dialami oleh Bu Parmi dari Bronggang. Menurutnya, sebagian besar warga Dusun Bronggang mengungsi ke Raden Ronggo yang selanjutnya pindah ke Bunder Wonosari. Sementara sebagian lainnya mengungsi di tempat kerabat. Ketika ada isu bahwa Merapi akan meletus hingga 60 km, Bu Parmi yang saat itu sudah di Raden Ronggo merasa tidak tenang dan membujuk suaminya, pak dukuh, untuk segera pindah tempat mengungsi ke Wonosari yang dinilai aman. Tapi oleh suaminya malah dijawab, *Bu sesuk esuk lungu yo karo Ika*

karo Jalu. Karepmu arep ngetuaaaaaaan opo ngulooooooon arep njujuk neng gone sopo sak karepmu (Bu, besok pagi pergilah dengan Ika dan Jalu, Terserah kamu akan ke timur apa ke barat, akan langsung menuju ke tempat siapa ya terserah kamu). Mendengar jawaban tersebut sontak Bu Parmi menangis karena merasa dibiarkan oleh suaminya. Tampak adanya perbedaan perasaan dan pandangan tentang lokasi yang aman antara suami dan istri. Lelaki cenderung mengungsi belakangan untuk mengamankan harta benda terutama sapi dan rumahnya.

Dalam sejarah letusan Gunung Merapi, keluarga yang bermukim di sana cenderung mengungsi secara utuh yaitu suami, istri dan anak. Ketika erupsi kecil, maka hanya istri dan anak yang diungsikan. Para suami memilih menjaga rumah selama ditinggalkan mengungsi. Namun demikian, ada juga manula yang tidak bersedia diungsikan, seperti yang ditemukan di Pelemsari dan Bronggang akibatnya mereka menjadi korban yang meninggal akibat lahar panas.

Orang Merapi yang bermukim di kawasan rawan bencana memerlukan tempat untuk mengungsi, seperti di barak-barak pengungsian yang ada. Namun bagi mereka yang memiliki kerabat yang tinggal di daerah lain, tidak sedikit yang memilih mengungsi sementara di rumah kerabat sembari menunggu keputusan pemerintah tentang status Merapi dan juga hunian sementara yang sudah disiapkan. Dalam proses pengungsian, banyak warga lereng merapi yang memilih mengungsi di rumah kerabat. Namun biasanya kalau hubungan kerabat tidak cukup dekat, maka mengungsi dalam waktu lama membuat warga yang tinggal di rumah kerabat menjadi tidak enak. Karena pengungsi yang tersebar di rumah penduduk pada umumnya tidak terakses oleh bantuan dan hal ini tentu saja menyulitkan si empunya rumah. Pada akhirnya sembari menunggu kondisi memungkinkan untuk kembali ke dusun asal, para pengungsi berangsur-angsur berkumpul dan tinggal bersama-sama di pengungsian yang ada.

Keluarga-keluarga yang mengungsi secara bersama dan menempati lokasi yang sama atau minimum berdekatan agar bisa tolong menolong. Oleh karena itu keluarga-keluarga yang sekerabat atau tetangga akan membangun kerjasama dalam proses evakuasi sampai dengan tinggal di pengungsian. Mereka perlu

kerjasama tersebut agar nanti bisa bahu-membahu dalam mengamankan rumah dan ternak yang ditinggalkannya selama mengungsi. Untuk itu mereka mengunjungi dusun tempat tinggalnya pada siang hari selama daerah dinyatakan masih belum aman untuk dihuni.

Dengan adanya pola solidaritas dan kerjasama antar keluarga tersebut, pihak pimpinan komunitas dalam hal ini kepala dusun biasanya menggelar musyawarah bersama warga yang dihadiri para kepala keluarga untuk menentukan program penanggulangan bencana khususnya ketika akan melakukan pengungsian. Musyawarah tersebut seperti yang dilakukan oleh warga Turgo untuk memutuskan cara pengungsian secara swakarsa. Sementara warga bakalan, melakukan musyawarah di rumah kepala dusun untuk memutuskan jam paling tepat untuk melakukan evakuasi di saat Merapi sedang aktif.

Peran kerabat dalam proses evakuasi di Pelemsari sangat penting. Ketika warga kebingungan mencari kendaraan untuk meninggalkan dusun dengan segera, para kerabat, dan anggota keluarga, mereka tetangga dan relawan yang memiliki kendaraan rela turun naik menjemput sanak saudara dan warga lainnya yang masih belum keluar dari dusun yang jauh letaknya dari dusun lereng Merapi. Besarnya peran para penjemput tidak sedikit dari mereka bahkan menjadi korban erupsi baik terluka maupun kehilangan nyawa.

Namun dalam kasus Pelemsari, jaringan kerabat tidak banyak berfungsi sesaat sebelum erupsi terjadi. Pada kejadian erupsi pertama yang menyebabkan puluhan korban jiwa di Kinahrejo, masyarakat mengaku tidak mengetahui informasi terkait dengan erupsi Merapi serta tidak mendapatkan tanda-tanda sebelumnya. Mereka melakukan evakuasi secara spontan dan dibantu oleh kerabat dan relawan setempat setelah mendengar sirine tanda bahaya dan listrik padam. Itu pun tidak semuanya langsung lari menyelamatkan diri, beberapa warga memilih tinggal di tempat bahkan ada yang mengunci pintu dari dalam. Berikut ini penuturan Bu Darto saat erupsi terjadi,

“Pas kejadian niku kulo sek masak ngge maem sonten niku mbak. Pas kulo ajeng ngangkat kethel maeman niku, trus kulo pun ditarik relawan saking wingking niko. Pak Puri, saking mbale

dusun mriki. Bu ayo mandhap... wonten nopo to pak?... nggih pokoke sakniki mandhap...(Mboten mireng nopo njenengan?) Mboten wonten tengoro nopo nopo (moso sih?) Estu, pas kejadian riyin ngerti-ngerti pun njebluk ageng. Peteng, listrik pun pejah sedoyo. Niku bar Magrib. Niku mbah Maridjan bar sembahyang teng masjid, kondur teng ndalem, pas sholat Isya, posisi teng ndalem. Niku pas posisi sujud. Mbah Maridjan diparani relawan mboten purun. Malah niku mobile relawan nggih kinging.... Pas niku kulo tasih sak keluarga teng nggriyo. Mbak Mur pun kulo ajak sareng teng mobile relawan niku, lha adine pun diajak mbakyune, kulo mboten ngertos. Kulo bingung piyambak...Madosi nopo to bu?... Anak kulo sing no 4 dereng katut niku pak?... Pun mangke gampang... Lha kulo lak tasik bingung to, ndang2 isih nang kamar mandi. Ndilalah pun dibeta mbakyune. Blas mboten wonten nopo nopo pas njebluk riyin piyambak niku. Ngertos ngertos pun njebluk ageng. Kulo noleh lor niku, kayu-kayu ageng pun kebakar. Posisine pun peteng. Pas kulo dugi pertigaan Ngrangkah kidul niku selo sakmenten-menten niku (kerikil) pun dhawah teng nginggil mobil. Thas... thas... benter..."

Peran kerabat dalam proses evakuasi di Pelemsari sangat penting. Ketika warga kebingungan mencari kendaraan untuk meninggalkan dusun dengan segera, para kerabat dan anggota keluarga dan juga tetangga bahkan relawan yang memiliki kendaraan rela turun naik untuk menjemput sanak saudara dan warga lainnya yang masih belum keluar dari dusun yang jauh dari dusun lereng merapi dalam proses mengungsi sangat besar. Bahkan para penjemput tersebut menjadi korban erupsi baik terluka maupun kehilangan nyawa.

Keberhasilan evakuasi sering dikaitkan dengan utuhnya jumlah dan bersatunya seluruh anggota keluarga. Di lokasi pengungsian, para relawan dan bahkan komunitas korban juga menyadari tentang dipenuhinya fungsi keluarga sehingga korban bisa kerasan dan bangkit dari keterpurukan. Pada erupsi 2010 misalnya, korban di tempatkan ke dalam bilik-bilik berdasarkan keluarganya masing-masing, dan bahkan muncul ide membuatkan bilik cinta agar keluarga bisa memenuhi hasrat seksualitasnya.

Isu dan masalah keluarga kemudian menjadi tidak begitu penting ketika masuk program tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Umumnya keluarga bekerjasama untuk melakukan program rekonstruksi seperti pembangunan rumah,

jalan, jembatan dan lainnya. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa konflik antar keluarga juga muncul karena adanya program yang justru memecah belah khususnya adanya program pembangunan yang tidak merata dan intervensi politis yang tinggi dari pemerintah sebagaimana akan disimak di bagian belakang. Namun demikian secara umum dapat dikatakan bahwa karena keluarga dengan segala fungsinya begitu kuat kehadirannya dalam kehidupan sosial ekonomi dan penyelamatan dari ancaman bencana, maka orang Merapi tidak mudah untuk meninggalkan Merapi pasca erupsi. Mereka bahkan sepertinya memperkuat kembali ikatan-ikatan sosial yang rapuh dan menemukan arena baru untuk saling tolong menolong. Di beberapa dusun tampak menguatnya ikatan sosial seperti di Kopeng, Kemiri Cilik, dan Pelemsari. Kerusakan pipa air minum mendorong warga Kopeng dan Kemiri Cilik untuk bergerak bersama memperbaikinya. Sementara di Pelemsari, kekerabatan semakin kuat karena perasaan senasib akibat ratanya pemukiman di sana dan juga meninggalnya sanak saudara mereka. Menguatnya ikatan sosial tidak hanya antar warga yang berada dalam satu dusun tetapi juga lintas dusun.

5.1.5 Rangkuman

Organisasi kekerabatan orang Merapi sama seperti orang Jawa, menekankan kemandirian keluarga kecil, ikatan yang intim antar warga dalam keluarga luas dan dalam lingkup sanak-saudara serta *trah*. Akan tetapi orang Merapi sepertinya masih memelihara ikatan yang kuat karena ditunjang oleh adanya nasib yang sama selaku orang yang hidup di lereng Merapi yang mengalami kerentanan atas munculnya erupsi dan dampak-dampaknya. Selain itu yang tidak kalah penting mereka telah membangun fondasi yang kuat dengan membangun pemukiman yang berbasis pada pertalian kekerabatan sehingga organisasi kekerabatan bisa bekerja efektif untuk memenuhi fungsi sosial dan ekonomi bahkan bisa membentuk komunitas yang sarat dengan pertalian hubungan darah.

Dengan menyimak kuatnya kekerabatan sebagai modal sosial warga dalam membangun kehidupan keluarga, ekonomi, dan sosial pada umumnya maka

urusan bencana alam pun tidak bisa mengabaikan adanya potensi modal sosial ini. Orang Merapi akan mudah didekati untuk memperbincangkan masalah erupsi mereka dengan menjamin adanya kesinambungan kebersamaan antar orang yang sekerabat. Dengan demikian pendekatannya adalah memelihara struktur dan kultur yang sudah ada dalam melakukan penanggulangan bencana daripada menghancurkan demi alasan keselamatan semata misalnya dipindahkan, direlokasi dan transmigrasikan sehingga mereka tercerai berai.

5.2 Struktur Sosial

5.2.1 Kelas Sosial Ekonomi

Penduduk Merapi merupakan masyarakat agraris sehingga sistem pelapisan sosialnya sangat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan tanah. Walaupun demikian, struktur sosial agraris agak memudar dan yang lebih menonjol adalah pelapisan berbasis pada kelas dalam ekonomi komersial. Pada masa kolonial struktur sosial orang Merapi memang sangat agraris walaupun secara umum kepemilikan tanah relatif merata. Pada masa tersebut orang kaya di desa adalah identik dengan petani menengah ke atas yang berasal dari golongan *kuli kenceng* dan cikal bakal desa. Lapisan kedua adalah *kuli kendo* dan golongan miskin adalah orang *ngindung* yang statusnya adalah menyakap tanah-tanah para petani kelas menengah dan cikal bakal desa. Golongan *kuli kenceng* ke atas memegang kekuasaan di desa. *Rembug* desa sebagai arena musyawarah dan kontestasi kekuasaan dipegang oleh para pemilik tanah, mereka bersama-sama dengan para pemimpinnya. Adapun *kuli kendo* dan orang *ngindung* hanya menjadi pengikut dan para *kuli kenceng* dan pemimpin desa menjadi patronnya.

Sejak Indonesia mencapai kemerdekaan 1945, berbagai dinamika sosial-politik dan ekonomi mempengaruhi perkembangan sistem pelapisan sosial. Posisi politik warga biasa meningkat sehingga tidak ada pembedaan hal politik antar golongan petani menengah ke atas dengan bawah. Bahkan di Yogyakarta, demokrasi dan otonomi desa yang dicanangkan Sultan HB IX mendobrak struktur

sosial feodalistik. Warga mempunyai hak untuk memilih pemimpin, dan dalam desa terdapat semacam DPR dan lembaga musyawarah desa.

Pembangunan ekonomi dan meluasnya pengaruh negara ke desa telah terasa sejak Orde Baru. Dengan kata lain, pelapisan sosial bergeser karena berkembangnya meluasnya pengaruh agribisnis, dan masuknya sektor *nonfarm* serta penyelenggaraan pemerintah sehingga golongan menengah ke atas di desa tidak hanya petani menengah ke atas tetapi juga orang kaya. Orang kaya ini adalah warga yang terjun di bidang agribisnis usaha tani salak dan sayuran. Banyak muncul orang kaya baru karena memiliki komoditas salak. Beberapa orang naik statusnya karena menjadi pedagang salak atau sayuran. Sementara itu beberapa warga juga melejit statusnya karena memiliki sepuluh ekor ternak ke atas baik dipelihara sendiri atau digaduhkan.

Selain usaha tanaman salak dan sapi perah, orang kaya di desa juga muncul di beberapa desa lereng Merapi karena mereka ini bekerja di sektor nonfarm. Mereka misalnya berdagang termasuk golongan ini. Sesungguhnya masuknya golongan ini dalam stratifikasi sosial sudah mengemuka pada masa kerajaan, tetapi hanya di perkotaan. Bahkan tidak hanya orang kaya, orang terpelajar juga bermunculan pada masa orde baru sehingga ikut mewarnai stratifikasi sosial pada masa kini. Mereka yang bisa sekolah dan menempati jabatan di pemerintahan masuk menjadi golongan menengah di desa. Di kalangan golongan menengah ke atas itu muncul kelompok elit yang hanya segelitir orang di dusun tetapi menjadi orang yang sangat berpengaruh karena memegang kekuasaan di desa.

Dewasa ini, umumnya pelapisan sosial yang berlaku di dusun-dusun di lereng Merapi berbasis pada kombinasi antara kekayaan dalam bentuk tanah dengan usaha peternakan, dagang dan pekerjaan non formal lainnya. Dengan berpijak pada basis ekonomi itu, pelapisan sosial di Merapi merujuk pada segregasi warga berdasarkan kelas kaya versus miskin. Segregasi ini bukan berimplikasi pada perbedaan hak dan tanggung jawab antara warga kaya dan miskin semata, namun antara keluarga kaya dan miskin bisa bersaing dan

bekerjasama. Di samping itu dalam kehidupan sosial keluarga kaya dan miskin dapat menjalin ikatan sosial yang memperkuat solidaritas komunitas.

Pembahasan tentang pelapisan sosial berikut ini akan menyimak karakteristik kelas sosial dan posisi dan peran masing-masing kelas dalam mengakses dan mengontrol sumber daya sumber daya di desa. Selain itu pembahasan pada bagian akhir akan menyimak pola relasi kuasa di desa serta mempengaruhi juga pola penanganan bencana alam dengan basis pelapisan social.

5.2.1.1 Lapisan Elit

Golongan elit biasanya dikenal sebagai kelompok penguasa politik atau pengambil keputusan publik di masyarakat. Di lereng Merapi golongan elit ini meliputi orang yang sangat berpengaruh sampai dengan para kepala desa dan pamong yang pengaruhnya berada di tingkat desanya masing-masing. Contoh tentang golongan elit ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Pertama adalah Maridjan, juru kunci yang menjadi korban erupsi 2010 merupakan golongan elit teratas. Nama Maridjan dikenal di seantero Merapi dan bahkan di Yogyakarta dan di Indonesia pada umumnya. Dengan menjadi juru kunci yang lugu, dan mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang dunia mistis Merapi (*linuwih*), ia dapat tampil sebagai elit karismatik. Anaknya pun mendapat ganjaran mewarisi jabatannya sebagai juru kunci tetapi sekalipun kemudian menjadi elit baru ia belum menandingi Mardjian. Di bawah Maridjan adalah Ponimin yang kemudian dikenal sebagai salah seorang tokoh yang selamat dari erupsi Merapi 2010 secara gaib. Akan tetapi ia baru dikenal sebagai orang terpendang di desa bukan sebagai elit karismatik seperti Mbah Maridjan.

Elit yang paling berpengaruh di setiap desa adalah para kepala desa, pamong dan termasuk kepala dusun. Dengan menyandang jabatan formal itu mereka otomatis dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin selama mereka tidak melakukan pelanggaran moral. Para elit ini mendapatkan kekuasaan melalui proses mobilitas sosial yang tipikal di Merapi. Pertama, mereka masih termasuk golongan keturunan pamong sehingga mereka dengan mudah akan

mendapatkan akses informasi untuk masuk menjadi pejabat desa melalui rekrutmen pengangkatan atau pemilihan langsung.

Kedua, mereka masih keturunan pamong atau kepala desa sehingga mudah mendapatkan legitimasi. Kalau orang biasa, maka susah dipercaya warga, tetapi kalau masih keturunan tinggal apakah yang bersangkutan itu baik atau tidak dalam lingkungan masyarakat. Ketiga, mereka itu memiliki status sosial ekonomi yang memadai untuk ukuran desa, misalnya pendidikannya di atas rata-rata warga, memiliki rumah yang relatif luas dan memiliki lahan atau penghasilan yang layak dan bahkan sebaiknya tergolong kaya. Kriteria itu bukan sebuah aturan main bagi seseorang untuk menjadi elit di desa melalui jabatan yang disandangnya, melainkan suatu kecenderungan empiris bahwa orang akan menjadi pejabat desa tidak bisa hanya bermodalkan pada harta semata melainkan memiliki pendidikan dan pekerjaan formal juga.

Di setiap desa, hampir semua kepala dusun merupakan keturunan pamong, dan mereka ini memiliki pendidikan yang memang lebih tinggi daripada pendidikan penduduk pada. Sekalipun kepala dusun dipilih secara langsung, biasanya yang menang adalah mereka yang masih memiliki latar belakang keturunan pamong. Hal ini karena mereka ibaratnya memiliki modal sosial yaitu kepercayaan warga dan memiliki ketrampilan untuk mencari dukungan politik sebagaimana dilakukan oleh orang tuanya atau kerabatnya.

Terbentuknya kelompok elit dengan adanya garis keturunan dapat ditemukan di Dusun Bendosari, Turgotegal, Sempu, Stabelan, dan Kujon. Para tokoh pemimpin dari dusun-dusun tersebut berasal dari keturunan para pemimpin generasi masa lalu. Masyarakat Bendosari lebih menghormati warga yang mempunyai garis keturunan dari pejabat desa atau dusun daripada warga biasa. Sementara Kepala Dukuh Sempu dipilih dan dihormati warganya karena tidak lepas dari keturunan dukuh sebelumnya yang dianggap sakti dan berjasa bagi warga Sempu. Warga Dusun Kujon juga menghormati kepala desanya karena ia adalah cucu Mbah Demang yang dikenal sakti sekali dan diyakini kesaktiannya itu diwariskan kepada keturunannya.

Orang yang tidak mempunyai jabatan formal di pemerintahan tetapi keturunan pamong, dan memiliki kekayaan yang cukup banyak untuk ukuran desa biasanya akan tampil sebagai elit desa pula. Di Kaligentong misalnya, ketua RW dikenal sebagai sesepuh desa karena semua urusan di desa kalau tidak ditangani kepala dusun selalu ditanganinya. Ketua RW itu ternyata adalah orang terpelajar pada jamannya yakni tamat SD, memiliki tanah yang luas dan banyak membantu warga dalam urusan ekonomi. Ia misalnya memiliki ternak puluhan ekor yang digaduh kepada tetangga dan bahkan petani dari dusun sebelah.

Orang kaya raya baru yang kekayaannya melimpah karena sukses bisnisnya bisa juga tampil sebagai elit yang diperhitungkan oleh kepala desa atau pemuda dan masyarakat. Hal ini karena mereka ini bisa menjadi hero atau patron. Salah satu contoh Suniyo dari Srumbung. Ia seorang pedagang kayu. Ia sering keliling dan keluar masuk desa-desa di kaki Merapi untuk membeli kayu sengon. Ketika ada masalah sosial misalnya ada orang hilang, sakit keras dan ketika warga harus mengungsi, ia menjadi tulang punggung warga. Ia menjadi tempat warga berkonsultasi atau meminta bantuan akomodasi.

Kaya menjadi penting pada masa kini untuk naik menjadi elit Kepala dusun Klakah dikenal sebagai orang kaya raya. Sebelum memiliki jabatan sebagai kepala dusun anak petani kaya dengan memiliki tanah sekitar satu hektar dan usaha dagang sayuran. Usahanya semakin maju sehingga dari usaha dagang itu ia bisa memiliki angkutan mobil dan mampu membangun rumah yang besar sekali.

Para elit di Merapi menjadi patron yang berpengaruh ketika masa erupsi dan rehabilitasi dan pemulihan. Mereka biasanya paling berkepentingan untuk ikut mengatur program mitigasi sampai pemulihan bencana karena berharap mendapatkan akses bantuan maupun menyelamatkan posisi dan bisnisnya. Salah satu contoh adalah setiap kali peneliti berkunjung ke desa, para pamong dan khususnya kadus selalu menyambut kehadiran kami dan menanyakan program apa yang dibawa. Mengajak agar program lebih menjawab kebutuhan warga desa dan selalu mengingatkan posisi dan kepentingan orang desa termasuk di dalamnya secara eksplisit atau implisit posisi dan kepentingannya. Kepala Dusun Cabe Lor II misalnya mengungkapkan kepentingannya dengan mengatakan bahwa

mengikuti sebuah seminar di UGM dan mendapatkan informasi bahwa dusunnya termasuk wilayah KRB III, dan ia sangat khawatir atas status itu karena berarti kelak dusunnya harus dikosongkan. Ia menegaskan bahwa kegiatan penelitian boleh dilakukan tetapi tidak untuk mendukung pengosongan dusunnya. Kalau pengosongan itu dilakukan maka ia akan “repot” karena harus menjadi corong pemerintah sementara itu ia berada di pihak warga.

Elit dusun tampil sebagai patron tetapi mereka kini juga memanfaatkan posisinya untuk mengakses sumber daya dari dalam atau dari luar sehingga akan mendapat keuntungan yang lebih besar daripada warganya. Salah satu contoh adalah Hardi, adik kandung kepala dusun yang berprofesi sebagai pengusaha angkot di desa. Ia banyak menolong tetangganya ketika mengungsi dari menyediakan angkutan untuk bolak-balik dari pengungsian ke kampung setiap akhirnya sampai dengan biaya konsumsi untuk beberapa janda miskin. Setelah erupsi berakhir, ia lalu mengorganisir penambangan pasir. Warga diwajibkan untuk membayar retribusi sebesar Rp 5.000,00 per rit pasir dan pembayaran retribusi itu disahkan oleh desa sebagai dana pembangunan dusun dan desa termasuk juga untuk biaya administrasi. Hardi yang mengurus administrasi retribusi sehingga ia bisa memperoleh pendapatan dari pekerjaan tersebut termasuk juga ia membuka warung makan di lokasi penambangan yang memberikan penghasilan tambahan yang besar. Jika penambang rata-rata memperoleh penghasilan Rp 50.000 per hari, maka Hardi akan memperoleh sekitar Rp 25.000,00 dari perannya sebagai pengatur retribusi, dan Rp 100.000,00 dari jualan makanan.

Golongan elit sadar atas posisinya yang kuat di desa berkat kekayaan dan pendidikan. Oleh karena itu mereka berusaha untuk menyekolahkan anaknya sampai minimum tamat SLTA. Di wilayah Sleman, kecenderungan golongan elit menyekolahkan ke perguruan tinggi atau bangku SLTA membuka peluang anak-anaknya bekerja di sektor pemerintahan dan swasta dan mereka ini kemudian pindah dari Merapi ke daerah lain sesuai tempat kerjanya.

5.2.1.2 Golongan Menengah

Di lereng Merapi golongan menengah terdiri atas petani menengah ke atas, pengusaha agribisnis, peternak skala menengah ke atas, pegawai negeri dan swasta. Petani kaya dengan tanah yang luas amat sulit ditemukan di lereng Merapi. Kebanyakan tinggal petani menengah saja, tetapi petani ini disebut kelas menengah di desa kalau tanahnya pun digunakan untuk agribisnis tanaman salak, buah, sayuran atau kayu seperti sengon. Khusus untuk wilayah Bendosari, petani tersebut kalau tidak mempunyai tanah luas akan mengembangkan bisnis jamur.

Pada kelompok masyarakat berbasis ekonomi pertanian salak, misalnya di Turi, Yogyakarta, suatu keluarga dikatakan termasuk kelompok menengah apabila memiliki lahan seluas lebih dari satu hektar. Adapun Kategori kelompok petani kecil pada komunitas petani salak di Turi adalah yang memiliki luas lahan 0,3-1 hektar, sedangkan yang tanahnya dibawah 0,3 hektar termasuk miskin.

Indikator berdasarkan luas lahan untuk mengkategorikan kelompok menengah, biasa, dan miskin juga digunakan oleh masyarakat berbasis ekonomi padi, jagung, sayur, dan tembakau. Kelompok petani menengah berbasis tanaman padi di Dusun Krajan adalah yang memiliki lahan paling tidak seluas 0.6 ha, sementara di Pakisaji, petani kaya adalah yang memiliki lahan seluas dua hektar. Sementara pada masyarakat petani dengan komoditas utama jagung seperti di Kujon, Sambungrejo, dan Babadan Bawah, cenderung mengkategorikan petani kaya adalah yang memiliki lahan seluas lebih dari satu hektar. Petani tembakau di Dusun Jamuran dan Panggang mengkategorikan petani kaya apabila tanahnya seluas paling tidak satu hektar, sementara petani tembakau di Dusun Segadung dan Malangsari yang kaya adalah yang mempunyai tanah seluas tiga hektar lebih.

Di beberapa dusun yang basis ekonominya peternakan, golongan menengah dapat diidentifikasi dari banyaknya ternak yang dimiliki. Di Turgo misalnya, orang dikatakan cukup kaya bila memiliki sapi perah sekitar 5-9 ekor per KK dan dikatakan kaya kalau memiliki 10 ekor sapi. Namun berbeda dengan di Kopeng, bahwa suatu keluarga dikatakan kaya apabila memiliki empat ekor sapi. Walaupun ada perbedaan tolak ukur tersebut, yang jelas di wilayah

dengan basis ekonomi ternak sapi, tanah tidak begitu penting karena usaha ternak dipandang lebih menjamin kesejahteraannya.

Pada masyarakat dengan berbasis ekonomi penambangan pasir seperti di Bronggang dan Kaligentong, luas lahan pertanian yang dimiliki suatu keluarga bukan menjadi basis pengelompokan antara kaya, biasa, dan miskin. Justru luas lahan yang digunakan untuk pertambangan pasir yang menjadi indikator kekayaan seseorang atau keluarga. Orang kaya di Kaligentong dan Bronggang adalah yang memiliki lahan penambangan pasir seluas lima hektar lebih.

Golongan menengah di Merapi meliputi juga mereka yang bekerja di sektor non farm seperti perdagangan dan sebagian lagi yang bekerja di pemerintahan dan swasta. Mereka ini jumlahnya tidak banyak. Di setiap dukuh, banyak warga yang bekerja sebagai pedagang kecil, tetapi hanya 2-4 yang bekerja sebagai pedagang menengah. Sementara itu, yang bekerja di PNS juga hanya 2-4 orang. Mereka ini juga masih kerabat dekat dengan para elit desa.

Apabila disimak lebih lanjut, orang kaya di lereng Merapi merupakan anak keturunan petani kaya, dan pamong. Kalau bukan keturunan mereka, maka merupakan orang muda yang kemudian bekerja keras dan berhasil usahanya di sektor pertanian salak, peternakan sapi, dan perdagangan. Tanpa kerja keras nampaknya keluarga kaya akan jatuh miskin karena tanah orang tua akan dibagi-bagikan ke anak-anaknya. Kerja keras itu adalah mencari terobosan agar kekayaannya tidak berkurang bahkan kalau bisa bertambah. Salah satu contohnya adalah Sukardi yang dulunya hanya kuli sekarang sudah menjadi salah satu petani salak asal Kaliurang Utara yang sukses. Sebelum salak menjadi komoditas utama di Kaliurang utara, ketela pohon, jambu, nanas, *gori*, *rebung* (tunas pohon bambu yang masih muda), pandan yang menjadi andalan masyarakat setempat. Saat masyarakat itu punya *lemi* yang kemudian dijual ke daerah Nglumut (sentra salak pondoh nglumut). Bahkan tidak jarang warga Kaliurang Utara melakukan barter antara satu rit *lemi* dengan 3-5 bibit salak pondoh. Pada awalnya Sukardi menanam 10 batang bibit salak. Kemudian dengan telaten dan kesabarannya dikembangkan dengan sistem cangkok. Ia belajar dan banyak bertanya pada petani dari Nglumut. Kondisi nyaris sama dialami oleh petani salak

di Gondoarum, Turi. Dari usaha salak ekonomi petani meningkat drastis karena peghasilan usaha salak pada dekade 1990an mencapai lima kali lipat daripada usaha tanaman padi.

Rumah menjadi indikator penting bagi kesejahteraan kelas menengah dan upaya kelas menengah untuk tampil sebagai orang yang terhormat di desa. Orang kaya di desa-desa di lereng Merapi dapat dikenal oleh publik dari rumahnya. Umumnya mereka menempati rumah permanen yang luas dan bergaya modern, bahkan banyaknya tiang penyangga rumah juga menjadi simbol rumah yang besar. Orang kaya tidak hanya memiliki satu rumah saja, tetapi bisa dua, tiga bahkan lebih. Rumah mereka dipakai sebagai tempat menyimpan hasil bumi, usaha ternak atau usaha dagangannya. Ketika mereka menjabat sebagai tokoh desa atau pamong, maka rumah mereka pun sering dipakai sebagai tempat pertemuan warga. Rumah yang luas pada orang kaya memang menjadi kebutuhan bagi mereka untuk kepentingan ekonomi maupun sosial di desa. Hal ini tersirat penuturan Wardi:

“Nggen kulo niku sekawan gede sedoyo, anggeh mung pondasine 8x12 kok, trus mburi ngoten niku onten pringgitane, ler niko maleh podo sing ngarep, trus mah wetan kandange we dowone 30 meter, pawone we 11x10 meter kok” Pak Wardi menjelaskan bahwa dirinya memiliki 4 rumah yang luas rata-rata 8x12 meter, bahkan dapurnya saja seluas 11x10 meter. Belum lagi kandang sapi yang dimilikinya sepanjang 30 meter.

Selain itu, banyak warga juga yang memiliki ruang tamu luas semacam aula. Bangunan ini digunakan untuk acara hajatan dan *slametan*. Misalkan ketika sunatan, banyak warga yang datang menyumbang sehingga memerlukan gedung yang cukup luas. Apabila orang tersebut memiliki aula semacam ini maka dia tidak perlu lagi menyewa tenda.

5.2.1.3 Golongan Bawah dan Miskin

Golongan bawah yang umumnya disebut *wong* biasa di Merapi adalah petani kecil atau buruh tani tetapi bukan termasuk orang miskin. Golongan ini memang relatif paling besar di Merapi. Mereka ini memiliki mengerjakan

tanah yang hanya bisa untuk menyambung hidup. Bahkan mereka ini juga harus bekerja ekstra sebagai buruh. Mereka bisa meniru golongan menengah misalnya menanam tanaman komoditas, dan beternak sapi, tetapi karena tanahnya sempit dan ternaknya masih menggaduh atau hanya memelihara *satus* (100) ekor, maka ekonominya pas-pasan meskipun tidak dikatakan miskin dalam ukuran orang desa.

Di berbagai dusun, muncul golongan bawah itu karena tanah warisan yang diterima relatif terus mengecil. Dengan kata lain seorang menjadi golongan bawah karena fragmentasi tanah warisan yang mengecil, bukan karena eksploitasi kelas menengah ke atas dengan memposisikan golongan bawah menjadi buruh dengan upah yang rendah.

Di beberapa dusun seperti di wilayah Desa Kemiren, hampir tidak ada warga yang termasuk golongan bawah karena tanah tersedia melimpah. Setiap warga masuk golongan menengah dengan menguasai sekitar satu hektar lahan tegalan. Hal itu terjadi karena hampir 70 persen penduduk ikut transmigrasi pada tahun 1970 sebagai akibat terjadinya erupsi Merapi yang besar. Dengan demikian, dusun yang aman dan tidak ada mobilitas keluar, maka dusun-dusun itu dihuni golongan bawah. Mereka yang masuk golongan menengah adalah dari keluarga yang keturunannya sedikit atau bisa menabung dan menambah luas tanahnya.

Meskipun hidup sebagai golongan bawah, orang Merapi memiliki upaya untuk meningkatkan standar hidupnya. Hal ini nampak dari usaha ekonominya bukan lagi menanam jagung tetapi pindah tanaman komoditas yang lebih menguntungkan. Di Ngablak, ekonomi warga misalnya terangkat berkat tanaman tembakau karena tanaman ini kadang sangat mahal harganya di pasar. Selain itu kemampuan ekonomi juga dari bangunan rumahnya.

Pada dusun berbasis ekonomi pertanian komoditas salak, seperti di Gondoarum, Turi biasanya warga yang termasuk kelompok ini hanya mengandalkan penghasilan dari salak saja. Di Dusun Jamburejo, pekerjaan dan tingkat sosial warga dusun ini satu sama lain hampir sama. Sama-sama menanam salak dan memelihara sapi atau kambing. Namun yang membedakan mereka adalah tingkat pendapatan. Luas tanah yang dimiliki tidak menjamin memberikan

pendapatan yang besar karena tergantung dari tanamannya. Berbeda lagi indikator yang digunakan di Kaliurang Utara bahwa kelompok biasa atau menengah adalah mereka yang memiliki pendapatan sekitar Rp 1.000.000,00/bulan. Keluarga petani salak di Cabe Lor termasuk ke dalam kelompok biasa bila memiliki rumpun salak sekitar 500-100 unit. Pasca erupsi, hampir semua keluarga baik yang kaya maupun yang miskin juga bekerja mencari pasir di Kali Putih karena penghasilan dari salak sudah tidak bisa diharapkan.

Di beberapa dusun, khususnya di Sleman, golongan bawah bahwa tidak mau ketinggalan dalam membangun kesejahteraan. Golongan bawah berusaha tidak ketinggalan dari golongan kaya. Jika golongan kaya ini memiliki rumah tembok dengan keramik, tetapi golongan bawah hanya menggunakan semen atau ubin. Di Boyolali, mayoritas rumah golongan miskin berdinding tembok dan hanya 10% saja yang berdinding bambu.

Selain berusaha meningkatkan kualitas bangunan rumah, lapisan bawah juga berusaha untuk memiliki kendaraan sepeda motor. Dengan bekerja keras, dan menabung mereka bisa membeli sepeda motor tangan kedua yang relatif murah harganya di pasar. Ketika bisa panen salak, cabe atau tembakau dengan harga bagus, keluarga akan menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk membeli sepeda motor dengan cara kredit atau kontan. Kini umumnya setiap keluarga memiliki satu unit sepeda motor dan di Palemsari sebelum erupsi 2010 setiap rumah tangga memiliki dua buah sepeda motor.

Di dusun, selalu ada keluarga miskin. Mereka ini tidak terdeskriminasi dalam berbagai kegiatan sosial ekonomi. Sepanjang ada pekerjaan di desa mereka bisa berperan sebagai buruh harian. Mereka juga bisa ikut melakukan kegiatan mencari pasir atau beternak. Di beberapa dusun golongan miskin ini juga diperhatikan oleh pamong untuk mendapat dana sosial dari pemerintah. Di Turgo, misalnya, dua orang warga miskin dapat bantuan pembangunan rumah sebesar Rp 5.000.000,00 dari dana PNPM Mandiri.

Orang miskin di desa lebih disebabkan karena masalah fragmentasi tanah yang akut sehingga keluarga itu lahir miskin dengan status petani kecil atau buruh tani dan anak-anak mereka pun potensial miskin. Selama tidak ada

pekerjaan non farm atau bekerja sebagai buruh tani, maka akan miskin selamanya. Namun demikian, selama 10 tahun terakhir ini orang miskin masih bisa memperoleh penghidupan di Merapi di luar tanah garapan yang sempit. Pertama, orang miskin bisa menggaduh sapi atau kambing dari petani menengah dan orang kaya. Akses untuk mendapatkan *gaduhan* sangat mudah. Kedua, mereka yang tinggal di pinggir sungai atau jurang mempunyai peluang untuk menambang pasir atau batu. Keempat, mereka dapat bekerja di pertanian yang intensif seperti salak, tembakau, sayuran dan bahkan jamur.

5.2.1.4 Konsekuensi Sosial dan Ekonomi Dalam Konteks Kebencanaan

Pandangan masyarakat Merapi terhadap orang elit dan menengah dapat dikatakan hampir selalu positif. Pertama, kelompok ini dinilai sebagai pekerja keras dan berhasil dalam mengembangkan ekonominya melalui usaha kebun salak, tembakau, peternakan, dan dagang. Hasil bumi dari kayu bakar, tanaman sayuran dan jagung tidak bisa mengangkat kesejahteraan petani, kecuali petani memiliki tanah dengan luas lebih dari tiga hektar. Kenyataannya adalah para petani tidak ada yang memiliki tanah seluas tiga hektar lebih. Oleh karena itu, hanya dari usaha dagang atau agribisnis saja keluarga bisa mengembangkan kekayaannya. Sebagai contoh kepala Dusun Njrakah bisa menjadi orang kaya di desa karena menjadi pedagang pengepul sayuran di desa. Mirip dengan kepala dusun Jrasah, kepala Dusun Jamburejo II, Desa Kemiren Magelang menjadi orang kaya karena dagang kayu. Setiap hari mereka jual kayu ke kota Magelang dan Yogyakarta dari hasil bumi warganya. Sementara itu, Kepala Dusun Bendosari Cangkringan, menjadi orang kaya berkat usaha agribisnis jamur, dan sekaligus menjadi pedagang pengepul yang menampung produksi para tetangganya.

Berpijak dari usaha tani komersial seperti tanaman tebu, tembakau, dan peternakan sapi perah, tampaknya kemunculan golongan orang kaya di Merapi lekat dengan masuknya ekonomi uang di sektor usaha tani tersebut. Dengan adanya komersialisasi, maka para keluarga bisa mengembangkan usaha tani yang lebih profitabel dan bisa menginvestasikan kekayaannya di sektor non farm. Pola

seperti itu sesungguhnya terjadi di pedesaan Jawa. Di Bantul, misalnya petani yang memperoleh keuntungan dari program revolusi hijau kemudian meninvestasikan surplus produksinya di sektor non farm sehingga mereka semakin kaya raya dibandingkan dengan petani kelas bawah (Jean L, 1986).

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, orang kaya ini dinilai berjasa bagi pengembangan ekonomi di kampung. Mereka ini yang memungkinkan hasil produksi di kampung bisa terjual ke luar. Mereka ini kemudian menjadi kelas menengah dan elit yang bersaing memperebutkan jabatan politik di desa. Di setiap dusun selalu ada dua sampai sepuluh golongan keluarga kaya. Sebagian masih memiliki ikatan kerabat dan sebagian lagi tidak memiliki ikatan sama sekali. Mereka sering bersaing memperebutkan jabatan penting di dusun dan di desanya.

Kehadiran kelas menengah memberikan kontribusi penting bagi pembangunan dan aktivitas komunitas dusun. Mereka ini menjadi donator pembangunan dusun. Tanpa keberadaan mereka pembangunan dusun masih berbasis pada tenaga gotong-royong, mereka memberikan sumbangan untuk pembangunan fisik dusun, seperti jalan, jembatan, penerangan listrik dan membiayai festival dusun. Kalau setiap KK menyumbang Rp 30.000,00 untuk biaya bersih dusun, misalnya mereka bisa menyumbang antara Rp 50.000,00 sampai dengan Rp 100.000,00.

Golongan menengah juga ikut mendorong ekonomi dusun tumbuh. Mereka ini mempunyai kemampuan untuk membangun rumah dengan ukuran besar dan menyelenggarakan hajatan keluarga dengan cara yang semarak sehingga membuka peluang bagi kegiatan ekonomi. Orang-orang bisa bekerja sebagai tukang ketika keluarga-keluarga kelas menengah di dusun terus menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas rumahnya.

Kehadiran kelas menengah juga sangat penting begitu tumbuhnya organisasi-organisasi kewargaan yang memperkuat kerjasama horizontal di komunitas. Umumnya orang-orang kelas menengah tampil sebagai organisator perkumpulan petani (seperti GAPOKTAN, LINMAS, SAR, penambang pasir, peternak sapi dan kambing, dan kesenian di dusunnya). Perkumpulan peternak sapi Turgo Ndeso, misalnya dipegang oleh Muji, seorang peternak kelas

menengah. Adapun tim SAR dipegang oleh Toro seorang mantan pedagang kayu yang beralih profesi sebagai pengelola taman wisata Makam Syeh Jumadil Kobro.

Hajatan juga menjadi cara untuk melihat tingkat kesejahteraan seseorang dan sekaligus menjadi kontrol sosial bagi peran orang kaya dalam kehidupan sosial. Hajatan menjadi ajang sosial bagi orang kaya. *Nek nanggap niku mung kemampuan, nek ra mampu yo mung cukup slametan*. Cara penyelenggaraan hajatan menunjukkan tingkat ekonomi pemilik acara. Orang kaya biasanya akan mengundang tetangga dan kerabat untuk membantu penyelenggaraan hajatan, sementara orang biasa atau miskin memilih cara yang tidak mengadakan pesta atau cukup dengan kenduren (kenduri).

Dalam menghadapi bencana, ada hubungan simbiotik antara lapisan dalam masyarakat. Dalam situasi darurat seperti bencana alam, orang kaya terpanggil untuk tampil membantu yang lemah. Di Klakah ada cerita bahwa seorang perempuan kaya setempat menyumbangkan uang Rp 2.500.000,00 untuk mendanai warganya dalam melakukan pengungsian swakarsa. Demikian juga salah satu keluarga di Kemiri Cilik juga terpanggil membantu tetangganya melakukan evakuasi dan juga ketika tinggal di pengungsian. Agus, misalnya membawa sebanyak 15 orang perempuan (tua atau muda atau anak-anak) diangkut dengan *colt pick up* miliknya menjauh dari bencana. Setelah itu ia terus membantu mereka untuk hidup di pengungsian.

Berkat adanya orang kaya di desa, keluarga di lereng Merapi sedikit diringankan bebannya. Umumnya orang kaya sadar untuk memberikan dana sosial dan pembangunan dengan jumlah yang lebih besar daripada warga pada umumnya. Ada sebutan orang kaya bisa bertindak sebagai bos. Pada dusun yang tidak terdampak langsung oleh erupsi, orang kaya setempat juga terpanggil untuk menjadi salah satu donatur atau penyumbang program rekonstruksi dan rehabilitasi.

Pada dusun yang tidak luluh lantah seperti di Pelemsari, Bronggang atau Kopeng di Sleman, hampir semua warga menyelenggarakan hajatan syukuran pasca erupsi. Hajatan ini diadakan di rumah kepala dusun, ketua RT atau

orang kaya setempat. Dengan mengadakan hajatan ini maka orang kaya akan memberikan kontribusi yang lebih besar. Di Turgo misalnya hajatan diselenggarakan secara besar-besaran dalam bentuk pentas wayang kulit pada bulan Januari 2011. Dalang pagelaran wayang kulit tersebut adalah Ki Timbul Hadiparyitno, dalang kodang di Indonesia. Hajatan ini diselenggarakan oleh lima dusun seperti Dusun Turgos Ngepring dan Kemiri Cilik. Sumbangan dari warga berkisar Rp 5.000,00 sampai dengan Rp 10.000,00. Beberapa orang kaya mengeluarkan sumbangan antara Rp 100.000,00 sampai dengan Rp 300.000,00.

Peran orang kaya dalam rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana sangat penting baik secara ekonomi maupun secara psikologis. Umumnya orang kaya sangat berkepentingan untuk segera kembali ke kampung pasca erupsi Merapi mereda. Mereka ingin bergegas pulang agar usahanya segera bangkit. Bahkan selama erupsi berlangsung mereka berusaha untuk bisa menjalankan usahanya. Hal ini nampak dari kegiatan kepala dusun Bendosari di Cangkringan. Ia nekat menunda untuk mengungsi karena harus menyediakan jamur untuk konsumennya di Bandung.

Pasca erupsi, orang kaya juga melakukan atraksi sosial dalam bentuk meyakinkan kepada warga bahwa kampungnya tetap aman. Orang kaya di Bendosari sangat terlihat atraksi sosialnya. Mereka mengajak kembali warganya untuk meneruskan tradisi bersih kampung setiap minggu sekali dan memugar rumah-rumah yang rusak. Orang kaya di Sambungrejo juga tidak ketinggalan, karena sebelum turun dana rekonstruksi dari pemerintah mereka telah memugar rumahnya agar nyaman ditempati. Kepala Dusun Klakah bahkan membangun rumah tingkat yang relatif mewah sebagai suatu ajakan kepada warga agar tetap kerasan tinggal di kampung halaman.

Para orang kaya memberikan sumbangan yang lebih daripada warga biasa untuk pembangunan jalan, saluran air bersih, rehabilitasi rumah warga. Walaupun tidak bergantung pada orang kaya, tetapi sikap orang kaya yang mau menjadi bos kecil menjadi bermakna bagi komunitas yang sedang menghadapi bencana. Orang yang kaya cenderung pengeluarannya besar termasuk untuk kegiatan sosial, seperti *nyumbang* tetangga yang hajatan.

Pasca erupsi, keluarga miskin paling terdampak oleh Merapi sehingga semakin sulit hidupnya. Bantuan yang diperoleh sifatnya hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, sementara keterjaminan hidup jangka panjang menjadi tidak menentu. Pada masyarakat peternak sapi yang tinggal di KRB III, kegiatan mencari rumput dapat menjadi salah satu sumber penghidupan bagi warga miskin. Namun ketika dusun tidak boleh dihuni kembali, dan sapi-sapi mati membuat mereka kehilangan pekerjaan merumput. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Darto saat mengingat dusunnya sebelum rata diterjang awan panas, *Gambarane nek teng nduwur niku jika terkena musibah, ora ndadak kedongsangan nibo nangi sing golek panguripan. Ono sing dijagakke.* (Gambarannya kalau di atas itu jika terkena musibah, tidak panik jatuh bangun mencari penghidupan. Ada yang diandalkan).

Dalam urusan bantuan pun di Grogol juga sifatnya umum, artinya membantu itu tidak memandang agama, golongan kaya atau miskin, tapi semua itu dilihat karena sama sama manusia yang sedang mengalami kesusahan dan sedang membutuhkan. Disinilah letak kerukunan yang masih terbina antar warga baik di dusun ini ataupun dusun lain.

Pemilihan siapa yang dibantu tersebut diprioritaskan kepada orang orang miskin, janda-janda, dan anak yang masih sekolah. Menurut Santo, seorang informan, pemilihan prioritas bantuan bukan berarti tidak mempunyai masalah (tantangan), dari para warga. Terkadang ada saja warga yang “*meri karo meri*” (iri dan iri), merasa belum mendapatkan bantuan, padahal sebenarnya ia sudah mendapatkan bantuan. Setiap orang mendadak mengklasifikasikan diri menjadi miskin, sehingga berhak mendapat bantuan. Bantuan yang datang ke dusun sendiri dinilai oleh pak Kadus Grogol sebagai bantuan yang paling “lumayan” daripada di dusun-dusun sekitarnya. Sehingga jika sebisa mungkin bantuan itu dibagikan merata ke seluruh warga, prioritas terhadap yang miskin tidak ada, semua disamakan karena pada situasi bencana tersebut semua orang juga mengalami posisi yang sama.

5.2.2 Golongan Tua dan Muda

Dalam budaya Jawa, terdapat pelapisan sosial yaitu golongan tua atau dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan istilah sebagai *wong tuwo*, *tiyang sepuh*, *sesepuh* dan golongan muda atau sering disebut sebagai *cah enom* atau *tiyang nem*. Adanya kategori ini pada dasarnya berbasis pada perbedaan usia dan generasi. Berdasarkan aspek usia, pada umumnya seseorang akan masuk ke dalam golongan tua jika sudah berusia paruh baya atau 50 tahun ke atas. Sementara untuk kategori golongan muda secara usia adalah berumur kurang dari 50 tahun. Sementara perbedaan generasi, misalnya generasi anak dengan orang tua, atau cucu dengan kakek/nenek juga menciptakan pelapisan sosial. Dalam konteks tertentu untuk pelapisan sosial antara tua dan muda juga muncul mengikuti status perkawinan seseorang, dan status hubungan kekerabatan. Misalnya seseorang akan menganggap dirinya tua apabila sudah menjadi nenek atau kakek alias sudah bercucu. Adanya pelapisan sosial antara tua dan muda berimplikasi pada pola relasi sosial dalam masyarakat. Berikut ini akan dipaparkan bagaimana golongan tua dan muda masyarakat lereng Merapi saling mendukung dan sekaligus berkompetisi dalam kehidupan sehari-hari.

5.2.2.1 Golongan Tua dan Muda dalam Kehidupan Sosial Budaya

Pelapisan sosial dalam konteks tua dan muda cenderung mencerminkan hubungan yang hirarkis dalam budaya Jawa. Sudah tidak bisa ditawar bahwa orang yang lebih tua harus dihormati atau *diajeni* oleh yang muda, tidak peduli jenis kelamin, status kekayaan, maupun latar belakang pendidikan. Dalam budaya Jawa, banyak cara untuk menghormati orang yang lebih tua, misalnya melalui bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi, memberikan kesempatan istimewa pada yang lebih tua, mengikuti perkataan/nasihat, dan berperilaku sopan terhadap yang tua. Penghormatan terhadap orang yang lebih tua bisa terlihat ketika terjadi komunikasi antara yang muda dan yang tua pada saat berbicara. Strata bahasa dalam bahasa Jawa yaitu *krama inggil*, *krama madya*, dan *ngoko* merefleksikan status atau lapisan sosial pendukung budayanya. *Krama inggil* yang merupakan tingkatan bahasa Jawa tertinggi dan terhalus lebih banyak

digunakan untuk berbicara pada orang tua selain sebagai bahasa pengantar pada acara hajatan.

Selain terefleksikan melalui bahasa, keberadaan golongan tua dan muda juga terlihat dalam pergaulan sehari-hari di dusun-dusun lereng Merapi. Salah satunya adalah yang muda menyapa yang tua terlebih dahulu ketika bertemu sebagai bentuk sopan santun dan penghormatan. Biasanya sapaan tersebut dengan bahasa *kromo* dan ada kalanya disertai dengan menundukkan kepala. Nilai-nilai sopan santun dalam pergaulan ini sudah diajarkan oleh orang tua kepada anaknya sejak kecil.

Selain itu, keberadaan golongan tua dan muda juga tampak secara nyata dalam kesempatan pertemuan publik seperti hajatan, rapat dusun, dan ritual komunal. Hajatan atau pertemuan yang menggunakan pola tempat duduk berbaris dari depan ke belakang, maka orang yang lebih tua biasanya didudukkan didepan bersama dengan tokoh yang dihormati. Secara khusus penghormatan terhadap orang tua di Dusun Gondoarum yaitu dengan menempatkan warga yang sudah tua di sebelah utara dan yang masih muda di sebelah selatan. Menurut dukuh setempat, posisi utara menandakan posisi atas dan selatan adalah posisi bawah, jadi sebagai penghormatan terhadap orang yang lebih tua ketika hajatan biasanya duduk di sebelah utara atau posisi atas. Sementara pada pola tempat duduk yang melingkar yang cenderung mencerminkan hubungan egaliter, tidak ada penempatan khusus bagi orang tua kecuali dipersilakan duduk tidak dekat dengan pintu masuk. Dalam musyawarah, golongan tua biasanya diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu. Dalam hajatan perkawinan juga tampak peran yang berbeda antara golongan tua dan muda. Sebagaimana adat perkawinan masyarakat desa yang melibatkan kerabat dan tetangga dalam pelaksanaannya, maka terdapat pembagian peran antara golongan tua dan muda. Beberapa warga golongan tua akan banyak berperan sebagai penerima tamu, dan kaum ibu-ibu membantu memasak sementara golongan muda sebagai *laden*.

Sudah bukan rahasia lagi ada perbedaan cara berpikir antara golongan tua dan muda. Hal ini terutama tampak dalam pilihan antara penghayatan terhadap kepercayaan dan agama samawi. Golongan tua biasanya masih memegang

teguh religi Jawa untuk diaplikasikan dalam kehidupan rohani sehari-hari. Sementara untuk golongan muda ada kecenderungan sudah tidak terlalu meyakini religi Jawa sebagaimana generasi di atasnya. Basis religiusitas lebih disandarkan pada agama Samawi (Islam). Hal ini tampak dalam pelaksanaan ritual khususnya *kenduren* yang selalu dihadirkan dalam setiap siklus kehidupan. *Sing generasi tuo doane singdiutamake jowone, trus nembe arabe (Yang generasi tua doanya yang diutamakan doa jawa, lantas kemudian baru doa arab)*, menurut penuturan salah seorang warga Pelemsari yang sudah berusia lebih dari 60 tahun. Lebih lanjut gap antara muda dan tua dalam konteks ini juga diungkapkan oleh mbah *nek tiyang sepuh mboten lepas saking niku petung ngoten-ngoten amrih saenipun ngoten (Kalau orang tua tidak pernah lepas dari perhitungan seperti itu supaya baik)*. Generasi muda sekarang dianggap tidak lagi memperhatikan *petung* untuk melaksanakan suatu ritual dalam rangka memperingati siklus hidup.

Lebih dari itu, generasi muda juga tidak lagi mampu menahan untuk tidak berbicara dan menghormati kepercayaan setempat. Warga Pelemsari percaya bahwa saat seseorang berada di wilayah Gunung Merapi harus berkata dan berpikir yang baik-baik atau positif. Apabila berpikir yang jelek atau negatif akan celaka. *Niku kadang cah enom bedo karo wong tuwo, nek wong enom kuwi apa adanya selalu dikatakan. Sakjane nek ten duwur mboten entuk ngoten niku. (Ter kadang pemikiran anak muda beda dengan orang tua, kalau anak muda itu apa adanya selalu dikatakan. Sebenarnya kalau di atas tidak boleh seperti itu)* Perbedaan cara berpikir dan berperilaku antara golongan tua dan muda seringkali dipolarisasi dengan istilah kolot dan modern. Akan tetapi perbedaan ini pada akhirnya seringkali dikompromikan dan bukan dipertentangkan.

Nilai penghormatan terhadap yang tua masih dikedepankan, dan sebaliknya generasi tua menempatkan diri untuk *momong* yang muda. Misalnya dalam hal pelaksanaan ritual *kenduren*. Bagi golongan muda tata cara pelaksanaan *kenduren* yang sudah diwariskan turun temurun dianggap cenderung tidak sederhana dan justru terkesan pemborosan.

Jane pingine generasi sak niki ora sah ngilangi kenduren ning digawe sing simpel. Sak niki urunan mengko dibeseki, mengke sing digowo mulih sing besekan niku. Tumpenge tetep enten sing dikepung teng mriku tapi mung sederhana, kiro-kiro nek sak piring, satu kali makan bias habis, dadi men mboten mubadzir, cetus salah seorang tokoh pemuda dari Pelemsari. Keinginan generasi muda secara bertahap terwujud sejak lima tahun terakhir ketika terjadi penyesuaian dalam pelaksanaan kenduren, dan semakin nyata ketika warga Pelemsari menghuni huntara. *Sing tuwo kari sethithik kok, yo manut. Sing penting kan mboten ninggalke naluri,* demikian penuturan salah seorang yang termasuk golongan muda mengomentari perubahan pelaksanaan *kenduren*. Dari penuturan ini tercermin bahwa terjadi kompetisi keyakinan yang didukung kuantitas anggota golongan tua dan muda. Ketika banyak golongan tua yang menjadi korban erupsi di Pelemsari, maka golongan muda yang akhirnya berperan sebagai pengambil keputusan dalam banyak hal, termasuk *kenduren*.

Walaupun terdapat perbedaan cara berpikir antara golongan tua dan muda, namun golongan tua masih dihormati sebagai *sesepuh* yang semestinya dimintai nasihat atau saran atas suatu perkara yang terjadi. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Mbah Marso yang dimintai nasehat dalam pelaksanaan *kenduren* untuk memperingati dan mendoakan korban erupsi apakah bersama-sama atau berbeda hari. *Soale nek sareng-sareng le ajeng ngecakke nggeh repot, kadang-kadang onten sing ngersakke tanggal 15 enten sing tanggal 14 ngoten. Mung sing tertentu. Niku miturut kemampuan kaleh keyakinan, niate mboten ajeng nyedekahi nggih mboten nopo-nopo. Ning nek coro kulo nggeh kulo niku dadi nek masalah ngeten-ngeten kaleh warga kolo mongso kulo niku ditareni ngoten lho dadi kulo ming sok ngomong ning mboten tombok. Mung kulo nek digugu yo monggo dene mboten kulo ming niku.* Peran golongan tua sebagai pihak yang lebih berpengalaman dalam hal tertentu membuat golongan muda merasa perlu untuk meminta nasihat atau saran kepada mereka selaku *sesepuh*. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu ketua kelompok KUBe di Pelemsari yang berusia sekitar 30 tahun mengatakan, *Saya di KUBe pun ngoten. KUBe nggeh iki apike piye anu-anu saya terutama taren sama sesepuh lah istilahe yang*

disepuhkan. (Saya di KUBe juga begitu, KUBe ya baiknya bagaimana terutama bertanya kepada sesepuh atau yang dituakan).

5.2.2.2 Golongan Tua dan Muda Dalam Kehidupan Ekonomi

Aktivitas ekonomi masyarakat lereng Merapi tidak didominasi oleh kelompok usia dan jenis kelamin tertentu saja. Hal ini tampak baik di desa berbasis ekonomi sapi perah, pertanian salak, sayur, tembakau, padi, jagung, maupun penambangan pasir. Basis tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi di pedesaan adalah rumah tangga. Dengan demikian, setiap anggota keluarga baik tua maupun muda serta lintas gender terlibat dalam usaha produksi rumah tangga.

Masyarakat dengan basis ekonomi sapi perah seperti di Pelemsari, Turgotegal, Kopeng, Kemiri Cilik, dan Bendosari melibatkan seluruh anggota rumah tangganya dalam aktivitas pemeliharaan dan perawatan sapi. Biasanya mencari rumput (*mugut*) adalah pekerjaan yang paling banyak menyita waktu dan tenaga. Baik tua maupun muda bersama-sama melakukan pekerjaan tersebut. Dengan demikian, meski lansia masih mereka mencari rumput. Namun ketika warga Pelemsari kehilangan pekerjaan sebagai peternak sapi perah akibat erupsi Merapi dan sebagian besar beralih sebagai penjual jasa di dusun lama yang dialih fungsikan sebagai tempat wisata, golongan tua kehilangan pekerjaan. *Repot niku wis tuwo. Nek enten papane nggene nggeh anggeh ngingah maleh. Lha pripun nek mboten ngingah lha mung cetontang cetantung. Lha nek sing nom-nom niku nggeh taseh kegitan nggeh. Nek saget ngepit niku, ngepit nggeh ngojek. Nggeh njagi* (Repot kalau sudah tua, kalau ada pekerjaan ya memelihara lagi. Lha bagaimana kalau tidak memelihara ya hanya nganggur. Kalau yang muda-muda masih kuat, kalau punya sepeda motor ya ngojek. Ya, menjaga), demikian penuturan Pak Pur.

Keterbatasan kemampuan golongan tua mengakses pekerjaan baru pasca erupsi, membuat golongan muda lebih aktif mencari nafkah bagi keluarganya. Namun demikian, ada kecenderungan bahwa golongan tua lebih resisten terhadap perubahan kegiatan produksi. Mereka kurang berani mencoba usaha yang baru tanpa melihat pengalaman dari tetangga atau kerabatnya. Hal ini seperti

yang diceritakan oleh Sukardi, petani salak dari Kaliurang Utara bahwa dulu jika orang yang mau spekulasi menanam salak itu sangat susah, karena tidak diperbolehkan oleh orang tua. Semua lahan ditanami padi, sehingga tidak ada lahan yang kosong untuk menanam salak. “Kamu mau makan dari apa jika tanahmu ditanami salak” begitu kata orang tua dulu. Akibatnya anak terpaksa mengambil cara dengan mencuri-curi kesempatan. Waktu itu ia akan menanam salak pun dilarang oleh orang tua, tetapi dia nekad, mengolah tanah ‘galuri’ terus ditanam bibit. “Besok mau makan apa” kata mereka. Menurutnya, orang dulu itu susah untuk diajak berargumen, bahkan ‘ora ilok’ apabila anak muda membantah kata orang tua.

Ada pula perbedaan budaya kerja antara petani tua dan muda seperti yang diungkapkan oleh Triyanto bahwa ada petani salak dari generasi sekarang tidak serajin dengan jaman orang tua, walaupun dalam hal perkembangan pengetahuan pertanian lebih dikuasai petani generasi sekarang. Petani generasi dulu telaten, sedangkan petani generasi sekarang hanya mengerjakan yang pokok saja, seperti pemangkasan, penyerbukan dan pengairan saja, tidak membersihkan tanaman sekitar.

5.2.3 Golongan Tua dan Muda dalam konteks Kebencanaan

Kesenjangan antara golongan tua dan golongan muda dalam konteks kebencanaan dapat dilihat dari sumber pengetahuan tentang Merapi sebagai bagian dari mitigasi. Ada kecenderungan bahwa golongan tua lebih mengandalkan mitigasi dengan peningkatan kepekaan batin dan melakukan ritual keagamaan, sementara golongan muda lebih memilih mitigasi dengan cara melakukan penataan tata ruang dan penerapan teknologi tepat, serta responsif terhadap dukungan stakeholder khususnya pihak pemerintah dan LSM. Sedangkan pada saat tanggap darurat tampak bahwa warga yang termasuk golongan muda bergerak secara aktif pada proses evakuasi dan menangani pengungsian. Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi terdapat pembagian peran antara golongan tua dan golongan muda. Warga yang termasuk golongan tua lebih banyak berperan

dalam perencanaan, sementara sebagai pelaksanaanya sebagian besar adalah golongan muda.

Masyarakat yang bermukim di dusun yang termasuk ke dalam KRB III di lereng Merapi cenderung mempunyai “naluri” yang lebih kuat dibandingkan dengan dusun di bawahnya. Hal ini bisa dilihat dari adat ritual seperti kenduren, sedekahan, atau selamatan yang tidak pernah lupa dilakukan warga yang bermukim di sana. “Naluri” ini pula yang dijadikan pegangan bagi beberapa warga, utamanya golongan tua, dalam upaya pengurangan resiko bencana berbasis pada kepercayaan tentang mitologi Merapi yang diwariskan secara turun menurun. Aktivitas gunung Merapi yang meningkat diyakini sebagai bentuk kegiatan yang sedang dilakukan oleh si penguasa atau penunggunya. Para orang tua yang bermukim di selatan lereng Merapi meyakini bahwa suara gemuruh atau gempludug, ada asap, dan kondisi gunung tertutup kabut adalah tanda bahwa *mbah buyut wis arep dandan-dandan*. Sementara warga di barat lereng Merapi menandainya bahwa Mbah Petruk akan mengadakan mantu ke arah selatan. “Aku arep mantu, tapi neng kidul”. Tanda itu muncul pada mimpi yang dialami oleh Mbah Sosro orang tua dari Babadan Bawah yang diyakini warga memiliki kekuatan supranatural. Lebih lanjut, melalui mimpinya, Mbah Petruk meminta agar disediakan sesajen, supaya warga bisa selamat.

Keyakinan akan adanya hubungan kekerabatan antara Gunung-gunung atau bukit-bukit di sekitar Merapi juga melandasi keyakinan akan aman tidaknya dusun di lereng Merapi. Sebagaimana yang diceritakan oleh orang-orang tua di Dusun Jamuran,

“Nah, niku gunung metu awune niku, gunung alit niku metu kacete mas, rerrr, kerrreeeeek, kerrrrreeekk. Miturut wong tuo kui dicegati kemben, dadi negak ngoten lho. Ampun nganti teng daerah ngarepan. Awune metu neng nduwur, terus saget ilang. Dadi miturut kandane wong tuo, [Merapi] boten kuat ngungguli mbokne bibi”.

Orang-orang tua dulu menganggap bukit itu sebagai kawasan yang disakralkan. Menurut mereka, bukit-bukit itu berumur lebih tua dari pada Gunung Merapi. Jika Merapi erupsi, maka materialnya tidak akan melompati gunung yang lebih tua (bukit kukusan dan kendil). Akibatnya ketika ada instruksi untuk mengungsi

dari pemerintah, para orang tua enggan untuk mengungsi. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu relawan dari Desa Umbulharjo,

“Kemarin itu sebenarnya kesadaran masyarakat cukup bagus, responnya cukup bagus cuma pengaruh tradisionalnya masih tinggi juga tokohnya masih tinggi. Pada saat itu beberapa orang mungkin berkepercayaan masih ke Jawa, masih ke simbah juga masih, dengan prinsip-prinsip nek arep ngguwang sampah mosok neng latar dan ketidakcepatan informasi dalam arti warga karena untuk alat komunikasi dulu tidak sebanyak sekarang. Misalkan kayak HT bahaya kudu turun kan tidak sebanyak sekarang”.

Kepercayaan tradisional semacam ini dan juga pengalaman erupsi Merapi yang selama ini pernah dialami para generasi tua juga membuat mereka yakin bahwa gejolak Merapi tahun 2010 tidak akan berdampak pada tempat tinggal mereka. Hal ini yang membuat orang-orang tua memiliki cara pandangan tentang ancaman yang berbeda dengan generasi muda.

Generasi yang lebih muda tidak lagi menggunakan pijakan “naluri” sebagaimana generasi tua dalam “memperhatikan” Merapi. Pengetahuan untuk pengurangan resiko bencana diperoleh melalui pelatihan dan penyuluhan atau sosialisasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga formal seperti universitas, LSM, dan pemerintah setempat. Kelompok pemuda yang tergabung dalam Tagana melakukan latihan rutin sebulan sekali misalnya pelatihan berupa masak, mendirikan tenda, dan pendataan truk *rescue* bela negara. Mereka adalah perwakilan dari dusun-dusun. Menurut Susilo (perangkat desa sekaligus relawan Tagana), pada saat status Merapi siaga di Desa Umbulharjo sudah sudah banyak program dan pelatihan-pelatihan dari berbagai elemen serta organisasi sosial seperti pasak, tagana, dan juga BPPTK. Bahkan menurutnya, seminggu sebelum erupsi melanda Pelemsari, pihak BPPTK bertemu dengan Mbah Maridjan dan juga warga setempat untuk sosialisasi masalah kerawanan di atas di mana indikasi letusan itu akan mengarah ke letusan yang besar. Namun pengalaman masyarakat yang tinggal di lereng Merapi hingga bergenerasi-generasi dalam menghadapi Merapi mengalahkan pengetahuan ilmiah. *Biasane nek Merapi lak seperti itu.* Masyarakat terlambat menyadari perilaku Merapi yang di luar kebiasaan.

Keyakinan akan “kebiasaan Merapi” membuat banyak orang tua yang menjadi kehilangan nyawa akibat erupsi yang mengarah Dusun Pelemsari. Dari 37 warga yang menjadi korban, separuh di antaranya sudah berusia lebih dari paruh baya dan termasuk para sesepuh dusun, seperti Mbah Maridjan, Pak Pujo, Pak Yamto, dan Pak Mringgo Di Dusun Jamuran. ada seorang mbah yang tidak mau dievakuasi karena kepercayaannya tentang bukit yang lebih tua, akibatnya ia tewas terbakar karena tidak mengikuti anjuran mengungsi.

Beberapa anak muda dari Pelemsari ada yang turut menjadi korban dan terluka karena mereka kembali ke atas untuk menjemput orang tua atau kerabat mereka yang masih tertinggal di atas saat awan panas mencapai Pelemsari. Para pemuda yang menjadi korban saat melakukan evakuasi hanya bermodalkan keberanian. Yang muda naik tanpa mempertimbangkan resiko tanpa membawa alat informasi, seperti HT.

Di samping berperan dalam proses evakuasi, para pemuda turut aktif pada masa pengungsian pada saat warga berada di pengungsian, para kaum laki-laki, terutama pemuda kebanyakan diposisikan untuk menjaga dusun masing-masing agar tidak dijajah ketika kosong. Sebagian lainnya membantu pendistribusian logistik dan juga di dapur umum.

Orang muda dianggap lebih lincah daripada orang tua, sehingga banyak peran yang golongan muda pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Di setiap dusun, ada beberapa tokoh pemuda yang dikenal warga sebagai aktivis tang berjasa dalam menggalang bantuan atau donatur Santo, pemuda dari Grogol dikenal oleh warga yang banyak “*mrono mrene*” mencarikan bantuan pada saat erupsi untuk warga. Demikian pula dengan Purnomo, yang dikenal “*ubet*” mencari bantuan bagi warga Pelemsari, tidak hanya setelah erupsi terjadi tapi juga jauh sebelum ada peristiwa erupsi 2010. Ia berhasil mencari bantuan untuk mengaspal beberapa ruas jalan di Pelemsari. Di samping itu, Badiman, ketua RT IV Pelemsari, berhasil dalam mengkoordinir warga dusun dalam “Paguyuban Kinahrejo” pasca erupsi 2010. Belum lagi ada nama Ngatimin atau Koplak yang terlibat dalam kegiatan mitigasi melalui keaktifannya dalam Pasag Merapi dan Paguyuban Kinahrejo berperan sebagai koordinator jasa antar jemput (ojeg).

Sementara orang muda seperti Danang, Yudi, dan Bambang membantu mengurus pengungsi dari Bronggang yang menetap sementara di Bunder. Bahkan para pemuda Bronggang juga berinisiatif mendirikan posko.

Program dan bantuan yang masuk ke dusun-dusun pasca erupsi Merapi mendapatkan respon yang beragam dari warga. Untuk kegiatan Padat Karya yang memberikan uang kepada warga desa yang terlibat belum kegiatan tersebut memerlukan persyaratan administrasi yang tidak mudah dan tidak dapat dipahami oleh warga. Akibatnya keluar keluhan dari perangkat dusun Babadan Bawah keluar, *Di dusun ini tergantung rembukan awalnya, soal antebane itu menjadi pokok. Kalau orang muda bisa untuk dirembuk, kalau orang tua ya agak susah sampai ada yang bilang "bayan e ra tanggung jawab barang"*. Tampak bahwa ada perbedaan kemudahan dalam hal menerima penjelasan antara golongan tua dan muda terkait dengan pengelolaan bantuan.

Dalam konteks pemulihan ekonomi, warga dusun yang terdampak langsung seperti di Pelemsari, Bronggang, Kopeng, dan Sambungrejo, tidak semuanya dapat beraktivitas sebagaimana sebelumnya. Para orang tua terpaksa hanya *gogok* di huntara, sementara anak-anak mereka yang bergerak mencari nafkah karena jarak antara lokasi tempat bekerja dengan lokasi tempat tinggal relatif jauh. Hal ini tampak nyata dalam keseharian pasca erupsi pada Dusun Pelemsari, ketika warga dari golongan tua tidak dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi yang baru yaitu pariwisata. Sebagaimana dikatakan oleh Darto bahwa dia sudah merasa tua, dan kalau bekerja sebagai tukang ojek sudah tidak mampu sehingga bisa menerima kenyataan kalau harus menganggur ketika menanggapi pertanyaan mengapa ia tidak aktif bekerja.

5.2.4 Kesimpulan

Struktur sosial orang Merapi dapat disimak dari segi pelapisan sosial berbasis pada kelas sosial ekonomi dan berbasis pada senioritas yang membagi masyarakat ke dalam golongan tua dan muda. Pelapisan sosial pertama menggambarkan bahwa keluarga-keluarga di lereng Merapi terbagi ke dalam golongan elit menengah, bawah dan miskin. Pelapisan sosial ini semakin

tesegregasi dan menjejala karena adanya fragmentasi pemilikan tanah, masuknya ekonomi uang dan korporitas negara dalam komunitas di lereng Merapi.

Sekalipun masyarakat tersegregasi ke dalam lapisan berbasis pada kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam, masyarakat Merapi memiliki kohesi sosial yang tinggi. Kearifan lokal yang menekan hidup berbagi dan kesejahteraan sosial tetap mewarnai relasi antar kelas. Oleh karena itu, lapisan menengah ke atas justru tidak dipahami sebagai predator atau eksploitor melainkan sebagai bagian dari komunitas yang memberikan kontribusi positif bagi pembangunan komunitas. Relasi ekonomi antara keluarga kaya dan menengah menengah dan bawah bukan hubungan produksi yang eksploitasi, dan persaingan kompetitif. Keluarga menjadi kaya karena menjadi agen perluasan ekonomi pasar daripada menguasai alat-alat produksi di desa. Orang menjadi miskin karena sempitnya aset usaha tani sehingga tidak bisa memanfaatkan pasar untuk meningkatkan pendapatan.

Orang Merapi juga mewarisi struktur sosial masyarakat berbagis pada senioritas umur. Seperti di berbagai belahan dunia modernisasi telah melunturkan sekat-sekat senioritas antar golongan tua dengan muda. Posisi mereka dalam komunitas sesungguhnya saling bergayung sambut. Golongan tua menjaga nilai-nilai moral dan mereproduksi budaya halus, sedangkan golongan muda lebih menampilkan aksi nyata bagi bekerjanya komunitas untuk melayani warganya. Karena itu, golongan muda lebih pragmatis dan mengurus kegiatan komunitas dan peran mereka menjadi sangat penting ketika menghadapi masa bencana. Pemuda tampil sebagai relawan dan aktif mengurus warganya mengurus warganya.

5.3 Kepemimpinan

Salah satu isu penting program penanggulangan bencana alam adalah tidak jelasnya sistem kepemimpinan yang berlaku dalam masyarakat yang dilanda bencana sehingga ada kesulitan untuk menemukan strategi mitigasi, evakuasi dan rehabilitasi. Ketika program salah mengidentifikasi dan menggunakan sistem kepemimpinan lokal, maka resikonya adalah program akan gagal. Bagian ini

dimaksudkan untuk memperkenalkan karakteristik kepemimpinan di lereng Merapi dan memberikan pemahaman tersendiri terhadap arti kepemimpinan lokal dalam komunitas yang berada dalam jangkauan letusan Merapi. Relasi komunitas setempat dengan keberadaan Gunung Merapi akan membentuk ikatan dan interaksi yang kurang lebih harmonis di antara mereka. Hubungan-hubungan sosial dilakukan atas dasar rasa kekeluargaan di antara mereka dan bahkan ketika terjadi pemilihan pemimpin yang baru seringkali proses pemilihannya dilakukan dengan jalan kekeluargaan. Peta pengetahuan setempat tentang kategori pemimpin akan menjadi “pintu masuk” dalam memahami karakter dan harapan terhadap sepak terjang pemimpin mereka agar interaksi antar sesama anggota komunitas maupun antara komunitas dengan lingkungannya dapat terkelola sesuai harapan.

Ada dua tipe pemimpin di lereng Merapi, yaitu pemimpin komunitas yang memegang jabatan formal sebagai kepala dusun, ketua RT, dan pemimpin sektoral misalnya pemimpin agama, pemimpin kelompok tani dsb. Setiap tipe pemimpin akan disimak lebih lanjut dalam tulisan ini, di samping disimak juga tentang peran pemimpin dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam. Posisi dan peran pemimpin dalam komunitas menjadi penting ketika pemimpin menjadi semacam “perantara” komunikasi antara pihak internal dan eksternal. Perubahan tatanan sosial yang ada dalam komunitas pun seringkali terkait erat dengan posisi dan peran para pemimpin lokal tersebut. Dengan demikian bagian ini juga akan membahas posisi dan peran para pemimpin lokal baik dalam komunitas maupun dengan pihak eksternal seperti pemerintah dan pihak-pihak luar, terutama ketika terjadi situasi kerentanan ataupun dalam penanggulangan bencana ketika Merapi meletus pada tahun 2010 yang lalu. Perpaduan antara perspektif lokal dan eksternal akan menjadi bahasan yang cukup menarik untuk dipaparkan, apakah ada sesuatu yang khas dalam kepemimpinan komunitas dusun lereng Merapi?

Meskipun secara geografis dusun-dusun di lereng Merapi relatif terpencil, namun sistem pemerintahan Indonesia modern tetap hadir di wilayah tersebut. Beberapa bangunan seperti kantor kecamatan, kantor polisi, markas militer, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan sekolah adalah landmark khas hadirnya kebijakan pemerintah di setiap sudut wilayah Indonesia (Anderson, 2001: 259).

Pemukiman penduduk relatif tertata sesuai dengan jalur-jalur jalan utama yang menuju ke arah wilayah-wilayah yang relatif dekat dengan puncak Merapi. Berbagai macam unit kesatuan, seperti desa, dusun, rumah, ladang, sawah ataupun penduduk harus ditata atau diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan mereka untuk diidentifikasi, diamati, dicatat, dihitung, agregat, dan dimonitor (lihat Scott, 1998: 183). Banyak upaya yang dilakukan sejak jaman kolonial untuk memasukkan masyarakat lokal ke dalam struktur administrasi negara "modern" dengan memanipulasi dan menata unit-unit kesatuan yang ada. Kepala kecamatan sebagai pejabat negara di wilayah tersebut, menerapkan kontrol pemerintah terhadap proses pembangunan dalam komunitas lokal dan membawahi pejabat- di tingkat yang lebih rendah seperti kepala desa dan kepala dusun atau bayan.

Apabila dilihat dari keberadaan kantor-kantor kecamatan yang membawahi desa-desa di lereng Merapi, maka kantor-kantor tersebut letaknya relatif jauh dari puncak Merapi. Kantor-kantor kecamatan tersebut justru tidak ada yang terletak di sekitar pemukiman penduduk yang berada di lereng tertinggi atau dengan kata lain dusun-dusun yang relatif berdekatan dengan puncak Merapi letaknya relatif jauh dengan pusat kecamatan. Realitas ini memberikan pemahaman bahwa para pemimpin di tingkat dusun seringkali harus mengelola dan mengembangkan pola-pola kepemimpinannya sendiri. Kendala jarak dari pusat pemerintahan kecamatan atau ketidakhadiran negara dalam konteks-konteks tertentu diharapkan dapat teratasi secara mandiri dan proses kehidupan sehari-hari para warga dusun tetap berlangsung secara baik. Begitu juga ketika Gunung Merapi sedang punya *gawe* (dalam konsepsi setempat) atau dalam masa erupsi (dalam konsepsi pemerintah).

Figur pemimpin di tingkat dusun lereng Merapi rata-rata didominasi oleh kepala dusun (sebutan di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta-DIY) atau bayan (sebutan di wilayah Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten), ketua RT (rukun tetangga), tokoh agama atau tokoh adat dan tokoh pemuda. Walaupun kepala dusun atau bayan merupakan pemimpin wilayah pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia, namun pemerintahan dusun di lereng Merapi relatif diselenggarakan secara lebih fleksibel

dan bersifat kekeluargaan dalam pelaksanaannya. Namun demikian, hampir segala bentuk aturan dari pemerintahan yang lebih tinggi juga dilaksanakan secara struktural, seperti informasi yang berasal dari kepala desa diberikan kepada bayan atau kepala dusun, kemudian diteruskan kepada ketua RT sebagai wakil warga, kemudian ketua RT menyampaikannya kepada warga setempat.

Ketika kepemimpinan dipahami sebagai kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama, maka prinsip-prinsip penentuan figur seseorang pemimpin sangat tergantung dari konteks kehidupan sosial masyarakat setempat. Beberapa dusun yang masih menjalankan tradisi yang terkait dengan keberadaan Merapi akan cenderung memilih figur pemimpin formal mereka (kepala dusun atau bayan) atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan di antara mereka sesuai dengan kebutuhan bersama komunitas mereka, walaupun model pemilihan figur pemimpin tersebut harus berkontestasi dengan model pemilihan secara demokrasi prosedural yang dominan dalam konteks Indonesia saat ini. Sedangkan beberapa wilayah yang lain tidak memberikan penekanan pada garis keturunan atau kekerabatan lagi ketika memilih figur pemimpin formal mereka dan lebih menekankan pada model pemilihan secara demokrasi prosedural. Sedang pemimpin-pemimpin non-formal yang berada di dusun-dusun lereng Merapi pada umumnya dipilih atas dasar garis keturunan atau kekerabatan terhadap figur pemimpin sebelumnya atau minimal dengan cara kekeluargaan. Modal simbolik adalah properti (segala bentuk modal baik secara fisik, ekonomi, sosial atau budaya) ketika hal tersebut dipersepsikan oleh agen sosial dengan kategori tertentu maka akan memberikan pengenalan dan pemahaman tertentu dalam memberikan nilai (Bourdieu, 1994: 8).

5.3.1 Pemimpin Komunitas

Pemimpin komunitas di tingkat dusun yang memegang jabatan formal pemerintahan adalah kepala dusun atau bayan. Sedang pemimpin komunitas lain yang memegang jabatan formal dalam satuan kecil adalah ketua RT (rukun tetangga) dan ketua RW (rukun warga). Pemerintah memperkenalkan RT/RW

pada tahun 1984 sebagai organisasi korporatis untuk mengorganisasi warga dalam mendukung program pembangunan yang dikelola oleh desa atau dusun. Dengan adanya RT ini maka posisi dan peran kepala dusun tidak hegemonik karena warga kemudian justru bisa menjadikan ketua RT sebagai wakil mereka juga bersama dengan kepala dusunnya.

Sama seperti kepala dusun atau bayan, ketua RT dan RW sama-sama dipilih langsung oleh warganya. Walaupun demikian regulasi pemerintahan desa masa lalu yaitu UU 5 tahun 1979 dan peraturan yang mengikutinya menetapkan kepala dusun diangkat oleh kepala desa atau pejabat di atasnya. Bedanya, kepala dusun menjadi bagian dari organisasi pemerintahan desa dan karena itu kepala dusun merupakan pejabat, sedangkan ketua RT lebih merepresentasikan ketua perkumpulan komunitas.

Kepala dusun dan ketua RT secara defakto merupakan organisator dari komunitas yang orientasinya adalah mewujudkan kehidupan bersama yang partisipatif, guyup rukun dan sejahtera bersama. Gagasan komunitas dusun seperti itu tampaknya merupakan ideologi yang berlaku di Jawa, dan beberapa studi misalnya Bambang Hidayana (2012) menunjukkan adanya kecenderungan seperti itu. Oleh karena itu, para pemimpin di dusun menjadi acuan penting bagi berlangsungnya komunitas, dan respon komunitas terhadap ancaman bencana alam.

Kepala dusun, dan ketua RT tersebut menjadi pemimpin formal di tingkat dusun. Mereka biasanya merupakan individu-individu yang mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kegiatan-kegiatan pengembangan bagi warga komunitas mereka. Beberapa kriteria yang digunakan untuk memilih pemimpin formal mereka adalah tokoh yang mempunyai posisi dan latar belakang sosial, seperti bisa *ngemong* warganya, mengedepankan musyawarah, mempunyai kemampuan sebagai pemimpin yang dilihat melalui aktivitas-aktivitas sebelumnya; mempunyai basis sosial ekonomi yang kuat, seperti orang terpandang dan orang kaya di tingkat dusun; atau mempunyai basis kekuasaan dalam kekerabatan di wilayah setempat, seperti keturunan langsung dari pamong desa atau dusun dan keturunan tidak langsung dengan mantan

pemimpin yang terdahulu. Di mata masyarakat, para pemimpin yang dianggap berhasil adalah pemimpin yang dapat menjalin hubungan baik dengan warganya, kehadirannya relatif dapat diterima oleh semua pihak, berlaku adil dan menjaga kepentingan bersama, dan mampu melakukan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin. Sedang pemimpin yang dianggap gagal di mata masyarakat adalah pemimpin yang tidak jujur, memaksakan kehendak, lebih mementingkan diri sendiri atau golongan tertentu, dan mudah putus asa. Dengan demikian para pemimpin di dusun-dusun lereng Merapi cenderung bertindak untuk dapat *ngemong* warganya dan dapat menjadi perantara atau penengah antara kepentingan beberapa pihak yang berbeda. Gaya kepemimpinannya pun cenderung akan lebih mengutamakan musyawarah bersama, fleksibel tetapi tegas, menjunjung tinggi keputusan bersama, dan mentaati aturan dan prosedur yang telah mereka sepakati.

Rapat dusun hampir selalu dipimpin oleh seorang kepala dusun atau bayan sebagai orang yang “dituakan” secara struktural pemerintahan (pemegang jabatan formal). Posisi kepala dusun atau bayan di dalam rapat cenderung sebagai pemandu jalannya rapat dalam menentukan atau memutuskan kesepakatan bersama dan kemudian berperan sebagai orang yang mengawal keberlangsungan hasil kesepakatan tersebut. Dengan posisi seperti ini, maka harapan masyarakat terhadap figur pemimpin formalnya lebih mengutamakan kesepakatan bersama dan menjaga agar kesepakatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan kehendak warga. Ketika Pak Hadi menjabat sebagai Bayan Dusun Grogol selama 32 tahun, maka karakternya dipandang oleh warga sesuai dengan harapan mereka. Karakter Pak Hadi sebagai bayan, dipandang merupakan orang yang demokratis, *nganut* (mengikuti) peraturan pemerintah, dan lebih mengutamakan musyawarah. Walaupun kondisi matanya kurang mendukung karena kurang bisa melihat secara jelas, namun hal ini tidak dianggap mengganggu aktivitasnya sebagai bayan. Hampir setiap sore sehabis Maghrib sampai Isya, Bayan Grogol ini menyempatkan diri jalan-jalan berkeliling dusun untuk bertemu warganya, memantau keadaan atau sekaligus menggunakan cara ini sebagai sarana dalam sosialisasi (program dan kegiatan yang berasal dari pemerintah atau kegiatan-

kegiatan yang telah disepakati oleh warga). Dalam menyelesaikan persilangan pendapat, ia dipandang selalu merujuk pada aturan pemerintah dan tradisi kekeluargaan yang berlaku di Dusun Grogol. Menurut beberapa warga, ada suatu hal yang patut mendapatkan apresiasi dari bayannya, yaitu kesabaran dan keuletannya dalam menanggapi berbagai perdebatan, perselisihan dan “omongan-omongan sinis atau kasar” baik di dalam rapat maupun dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati. “*Nek dudu Pak Hadi mesti ora kuat*” (kalau bukan Pak Hadi mesti tidak kuat), ujar beberapa warga.

Posisi seorang pemimpin formal yang bisa *ngemong* warganya dan menjalankan posisinya sebagai pejabat pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan kriteria pemimpin yang dapat memadukan kepentingan warga dan kepentingan pemerintah. Selain itu posisi kepala dusun atau bayan juga menjadi perantara pihak-pihak eksternal yang ingin masuk ke wilayah dusun dengan para warganya. Posisi sebagai seorang perantara ini sebenarnya merupakan posisi yang cukup strategis dan sekaligus menguntungkan. Dalam posisi seperti ini sebenarnya kepala dusun atau bayan diuji apakah akan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atau justru menjalankan posisinya sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah diputuskan bersama para warganya. Dalam kasus Pak Hadi di atas, bayan Grogol ini tidak dianggap mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri oleh warganya dan tetap menjalankan posisinya dalam ranah untuk mengedepankan kesepakatan warganya. Begitu juga dengan bayan Gowok Sabrang (Pak Cokroreja) yang digambarkan tipe orang yang sangat sederhana, “*ngemong*” dan “*nuwani*”. Ia sering kali bertindak sebagai bapak terhadap para warganya. Selain itu prinsip untuk mematuhi aturan dari pemerintah juga sangat kuat, seperti kata-kata yang sering diucapkannya: *nggih pokoke ndherek pemerintah lan mboten nglanggar aturaning pemerintah* (ya yang penting mematuhi pemerintah dan tidak melanggar aturan pemerintah). Menurut beberapa warganya, sosok bayan ini bisa menjadi teladan bagi warganya, karena sangat bertanggungjawab terhadap warga dusun.

Dalam konteks yang sedikit berbeda, kepemimpinan bayan Trono saat ini untuk periode awal dinilai pantas dan dianggap mampu untuk memimpin

warganya, karena selain pengetahuannya yang luas, kerabat dan kakeknya tercatat sebagai mantan bayan di dusun tersebut dalam periode sebelumnya (Pak Sunu dan Pak Suprih). Namun dalam periode selanjutnya, bayan yang baru menjabat satu tahun dan berumur sekitar 35 tahun ini sangat sibuk dengan kegiatan usaha dagang dan komunitas Bankom (Bantuan Komunikasi-Frekwensi Guruh Merapi). Kegiatan yang dilakukan oleh bayan Trono ini telah membawa akibat relatif sulitnya para warga untuk dapat bertemu dengan bayannya. Dengan demikian, sebagian warga merasa bahwa bayan yang mereka pilih kurang bisa dijangkau oleh warga setiap kali mereka membutuhkan. Beberapa warga juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena yang memilih bayan tersebut adalah mereka sendiri dan persoalan yang muncul saat ini bukan masalah yang menyimpang, seperti korupsi atau penyimpangan yang lain, tetapi hanya persoalan alokasi waktu di mana bayan tersebut baru bisa ditemui pada waktu malam hari. Dengan kondisi seperti ini banyak warga dusun yang memaklumi kesibukan bayan mereka saat ini walaupun ada juga yang kurang setuju dengan alokasi waktu tersebut. Selain kriteria yang terkait dengan kemampuan seseorang untuk dapat *ngemong* warganya dan mempunyai garis keturunan pamong di tingkat dusun, maka aktivitas yang dinilai bertanggung jawab, perhatian terhadap warga dusun semua dan sangat terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, seringkali menjadi kriteria figur di tingkat dusun yang dapat menjadi pamong atau pemimpin dusun mereka. Terpilihnya Bayan dusun Candipos setahun yang lalu tidak terlepas dari aktivitasnya ketika terjadi erupsi Merapi 2010 yang lalu. Bayan Candipos termasuk relatif muda usianya dan bukan merupakan keturunan langsung dari bayan-bayan sebelumnya. Memang ada kerabatnya yang pernah jadi bayan, namun pemilihan bayan muda ini lebih didasari oleh aktivitasnya sebagai sekretaris di FPRB (Forum Penanggulangan Rawan Bencana) yang mana pada masa erupsi Merapi ia memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hampir semua warga dusun (dengan setiap hari mengunjungi para pengungsi yang terpecah dalam beberapa titik) dan penilaian warga akan tanggung jawabnya yang tidak bisa disangsikan lagi.

Beberapa dusun di lereng Merapi, seperti Stabelan, Gowoksabrang, Trono, Grogol, Sempu, Jamuran, Malang Sari, Panggang, Klakah Tengah, dan Bronggang mempunyai kepala dusun yang mempunyai hubungan keturunan langsung atau minimal hubungan kerabat dengan mantan bayan atau kepala dusun sebelumnya. Sebagai contoh, Pak Jumar sebagai Kepala Dusun I (Dusun Panggang) merupakan anak dari kepala Dusun Panggang dalam periode sebelumnya. Sedangkan kepala dusun Jamuran saat ini, Pak Ridwan merupakan anak dari Bapak Sastro Kundori yang menjabat kepala dusun pada periode sebelumnya. Kakeknya pun, Guno Prayitno merupakan kepala dusun sebelum jabatan tersebut dipegang oleh orang tua kepala dusun yang sekarang. Begitu juga dengan Sri Jono, Kadus III (Dusun Jamuran), merupakan anak dari Ketua RT di Cangukrejo pada periode sebelumnya dan merupakan cucu dari seorang "*Komencho*" (atau semacam ketua RT) di jaman penjajahan Jepang. Orang tua Sri Jono bernama Bapak Sarwo merupakan salah seorang sesepuh desa yang terpandang dan mewakafkan tanahnya untuk masjid atau mushola desa Cangukrejo. Sri Jono menjadi Kadus III melalui pemungutan suara. Keluarga Bapak Sarwo (anak-anaknya) relatif memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dibandingkan tetangga mereka. Hal ini berarti bahwa warga di dusun-dusun tersebut masih memperhitungkan bahwa keturunan pamong di tingkat dusun merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk memimpin masyarakat secara baik. Musyawarah dan kesepakatan bersama dalam memilih pamong yang baru biasanya juga dilakukan secara kekeluargaan. Walaupun demikian mereka juga mengikuti ketentuan umum yang berlaku sesuai dengan sistem pemilihan yang biasa dilakukan dalam sistem demokrasi prosedural di Indonesia, yaitu dengan memilih pemimpin atas dasar suara terbanyak.

Selain figur kepala dusun atau bayan, ketua RT dan RW juga mempunyai posisi penting di tingkat dusun. Mereka dipilih dari orang-orang yang terpandang dan mempunyai pengaruh kuat dalam lingkungan setempat. Selain itu, mereka biasanya berasal dari keturunan pamong, tokoh informal atau masih mempunyai garis keturunan yang kuat dengan para elit dusun atau desa. Seperti halnya dengan Tarli, warga Klakah, ia adalah cucu seorang lurah desa. Sedangkan ayahnya

merupakan Kabag Pemerintahan Desa. Tarli diangkat menjadi Ketua RW tiga di kampungnya atas kehendak warga lingkungannya. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa seseorang akan mempunyai pengalaman memimpin yang luas ketika dia merupakan keturunan pamong. Walaupun Tarli bukan dari golongan orang kaya, namun ketika dia merupakan salah satu keturunan pamong maka dia lebih diterima daripada keturunan orang biasa.

5.3.2 Pemimpin Sektoral

5.3.2.1 Pemimpin Keagamaan

Pada umumnya pemimpin sektoral yang terkait dengan bidang keagamaan dipilih dari individu-individu yang mengetahui dan menguasai tata cara ritual atau upacara keagamaan masing-masing agama yang ada. Proses pemilihan pemimpin keagamaan ini sangat tergantung dari persyaratan dan pengorganisasian yang ada dalam masing-masing agama. Mereka biasanya orang-orang yang dapat memberikan nasehat dan tuntunan tentang kehidupan ini berdasarkan prinsip dalam agama masing-masing. Untuk agama-agama tertentu, seperti Katolik dan Protestan, proses pemilihan pemimpin agama ditentukan oleh organisasi dalam agama tersebut bukan dipilih atas dasar permintaan warga. Para pemimpin dalam agama-agama tersebut ditunjuk atau diangkat oleh masing-masing organisasi dalam agamanya dan mempunyai jabatan formal keagamaan, seperti pastur atau pendeta. Dalam konteks ini warga tidak terlibat dalam proses pemilihan para pemimpin agamanya dan biasanya para pemimpin agama tersebut berasal dari orang luar dusun. Sedang dalam agama Islam relatif agak fleksibel. Walaupun pemimpinnya dipilih dari individu-individu yang mengetahui dan menguasai tata cara ritual, namun proses pemilihan seringkali berdasarkan permintaan warga dan sangat memungkinkan dipilih dari kalangan warga sendiri. Ada juga pemimpin yang diangkat karena kemampuannya seperti Rois yang dipilih karena orang tersebut dianggap mempunyai pengetahuan ilmu agama Islam dan menguasai tatacara ritual/upacara yang ada di masyarakat.

Beberapa agama lokal atau dalam terminologi pemerintahan Indonesia disebut aliran kepercayaan, biasanya pemimpinnya dipilih dari figur yang

mengetahui pengetahuan yang lebih tentang relasi-relasi antara manusia dan alamnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Para pemimpinnya biasanya dipilih berdasarkan keturunan langsung pemimpin sebelumnya, karena biasanya pemimpin tersebut mewariskan ilmunya kepada keturunannya. Beberapa obrolan dengan para penganut agama lokal, memunculkan pemahaman terhadap makna *sakcukupe* (secukupnya) dalam mengeksploitasi alam, sehingga alam sekitar kita akan terus terjaga keseimbangannya. Antara manusia dan alam perlu ada hubungan yang saling menghormati, dijaga keselasannya, tidak ada eksploitasi yang membabi buta. Apabila mengambil sesuatu dari alam tidak boleh terlalu banyak atau serakah. Hal ini terkait dengan penambangan pasir dan batu di sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Apabila penambangan dilakukan secara terus-menerus dan tidak teratur, maka akan terjadi kerusakan lingkungan yang akan berdampak terhadap masyarakat sendiri (*sapa nandur, ya ngundhuh*—siapa menanam ya akan memetik hasilnya). Hal semacam inilah yang mendasari para pemimpin agama lokal untuk selalu berkomunikasi dengan alam melalui pemberian sesaji di beberapa tempat sebagai wujud terima kasih dan menjaga harmoni dengan alam. Apabila masyarakat masih mempunyai hubungan yang harmonis dengan alam atau Gunung Merapi, paling tidak masih ada komunikasi yang selalu dipelihara dengan baik, maka ketika Gunung Merapi sedang punya *gawe* pasti ada pertanda-pertanda yang diberikan kepada warga lereng Gunung Merapi.

Di tingkat dusun juga ada para pemimpin kelompok keagamaan yang lebih berperan pada pengorganisasian kegiatan keagamaan. Para pemimpin kelompok ini biasanya dipilih secara bergiliran dari figur-figur yang dianggap mempunyai kemampuan untuk menjalankan kegiatan keagamaan dan biasanya dari tokoh panutan yang kehidupannya dianggap dapat memberikan contoh bagi warga sekitarnya. Kasus di Dusun Grogol memberi gambaran bahwa para pemimpin kelompok keagamaan dipilih dari kalangan warga biasa yang dianggap bisa mengorganisasi kegiatan keagamaan yang dianutnya, seperti Nanang Supriyanto (petani): Aliran Kepercayaan-Kawruh Urip Sejati, Yatno (muat pasir): Aliran Kepercayaan-Ngudi Kasampurnan, Muhroni (muat pasir): Protestan-Kristus

Penebus, Nuryo Susilo (juru pijat): Protestan-Saksi Jehova, Karto Kadin (petani): Islam-NU, Suparno (petani): Islam-Muhammadiyah, Harmuji (guru): Katolik, dan Mugiyanto (petani) Protestan-Pantekosta.

Peran para pemimpin keagamaan dipandang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Mereka biasanya juga berposisi sebagai pemberi nasehat bagi persoalan-persoalan hidup warganya. Selain itu mereka juga berperan sebagai figur yang seringkali dimintai pendapat oleh kalangan pemerintah yang ingin melakukan kegiatan di wilayah setempat. Walaupun sebagian besar pimpinan keagamaan berasal dari luar, namun pertimbangan-pertimbangannya masih tetap berpengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat dusun. Pimpinan agama dipandang mempunyai pedoman yang kuat dalam kehidupan ini, baik melalui kemampuan yang terkait dengan tuntunan agama maupun kemampuan yang terkait dengan tata cara upacara keagamaan.

5.3.2.2 Pemimpin Selamatan

Pemimpin-pemimpin upacara selamatan di dusun lereng Merapi pada umumnya mempunyai hubungan darah dengan pemimpin upacara selamatan sebelumnya. Anak laki-laki tertua pemimpin upacara selamatan biasanya menjadi generasi penerus ketika ada suksesi kepemimpinan. Ketika pemimpin upacara selamatan sebelumnya tidak mempunyai anak laki-laki, maka biasanya penerusnya dipilih dari saudara laki-laki terdekat atau orang yang mampu melaksanakan tugas untuk memimpin upacara selamatan tersebut. Mbah Marso merupakan kaum di Dusun Pelemsari, Kinahrejo yang menduduki posisi sebagai seorang kaum. Salah satu tugas seorang kaum adalah memimpin doa ketika kenduri. Sebelum tahun 1990an tugas kaum adalah mengurus orang meninggal seperti mengkafani, dimandikan dan lain sebagainya. Namun setelah tahun 1990an mulai ada pembinaan dari ustadz, tugas mengurus orang meninggal ini kemudian diserahkan kepada para pemuda. Mbah Marso belajar menjadi kaum dari kakeknya. Kakeknya dahulu juga seorang kaum dan kemampuannya ini kemudian diturunkan kepada Mbah Marso. Pada awalnya Mbah Marso hanya membantu-bantu kakeknya, lama-kelamaan dia bisa melakukan tugas tersebut.

Setelah kakeknya meninggal kemudian dirinya ditunjuk oleh warga untuk menggantikan kakeknya sebagai kaum.

Pada umumnya mereka menekuni profesinya secara turun menurun, bahkan apabila tidak ada anak laki-laki dalam keluarganya, maka profesi itu cenderung diwariskan kepada anak mantunya. Figure ini sangat berperan aktif dalam memimpin upacara selamatan dan tradisi yang dilakukan oleh warga, baik keselamatan warga dusun terkait dengan keberadaan Gunung Merapi maupun keselamatan warga dusun secara umum. Dengan demikian figur ini mengenal dan memahami *uba rampe* (bahan-bahan yang harus disediakan dalam upacara selamatan) dan doa-doa yang harus diucapkan ketika memimpin upacara selamatan tersebut. Mereka biasanya menjalani profesi ini secara berkala sehingga mereka tetap mempunyai pekerjaan sehari-hari untuk menopang kehidupannya. Kasus di Dusun Grogol cukup menarik untuk dikemukakan. Keluarga Karto Kadin yang mempunyai enam orang anak (tiga laki laki dan tiga perempuan) secara turun temurun menjadi pemimpin selamatan di tingkat dusun. Namun persoalannya adalah ketiga anak laki-lakinya sekarang ini telah memeluk agama lain, bahkan kedua anak perempuan dan istrinya juga sudah memeluk agama lain. Karto Kadin sendiri yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani tetap memeluk agama Islam agar dapat menjalankan fungsinya sebagai pemimpin upacara selamatan di tingkat dusun. Dalam kondisi seperti ini, Karto Kadin merencanakan untuk mewariskan profesinya kepada anak menantunya yang beragama Islam. Pimpinan upacara selamatan dipandang mempunyai pedoman yang kuat dalam kehidupan ini, baik melalui kemampuan yang terkait dengan tata cara upacara selamatan maupun kemampuan yang terkait dengan tradisi yang harus dijalankan dalam berelasi dengan alam atau lingkungannya.

5.3.2.3 Pemimpin Kelompok Tani dan Kelompok Peternak

Terdapat figur lain yang mempunyai posisi penting dalam kepemimpinan di tingkat dusun, seperti pemimpin kelompok tani atau kelompok ternak. Para pemimpin kelompok ini dipilih dari anggotanya yang dianggap mampu menjalankan koordinasi dan musyawarah dalam kelompoknya. Peran pimpinan

kelompok ini sebenarnya lebih pada usaha pengembangan ekonomi, terutama pengembangan bidang pertanian atau bidang peternakan. Dengan demikian, peran mereka terbatas pada kegiatan pengelolaan bantuan yang berasal dari lembaga-lembaga luar atau LSM yang ingin membantu pengembangan kehidupan di dusun tersebut. Namun demikian mereka sebenarnya juga mempunyai kemampuan dalam mengatur jalannya musyawarah kelompok agar tidak terjadi perselisihan pendapat yang tajam di antara anggotanya. Selain itu bekal kejujuran juga sangat penting dalam pemilihan figur pemimpin dalam kelompok ini.

Beberapa persoalan sering muncul dalam mengkoordinir kelompok bidang pengembangan ekonomi ini. Ketika kelompok ternak terdiri dari beberapa keluarga yang saling bekerja sama dalam melakukan perawatan ternak yang hasilnya akan dibagi bersama, maka perawatan dan hasilnya sering kali kurang maksimal. Menurut salah seorang warga Dusun Grogol, adanya program ini memang sangat menguntungkan, namun karena dilaksanakan secara berkelompok, makanya hasilnya sering kurang maksimal. Keadaan ini sebagai akibat rasa kurang memiliki ternak tersebut dalam perawatan dan rasa kebersamaan yang tidak sama diantara keluarga-keluarga yang melakukan perawatan bersama. Kenyataannya memelihara ternak bersama dan ternak sendiri akan “berbeda rasanya”, sekurang-kurangnya perhatian pakan dan kesehatan ternak bersama cenderung kurang teratur dan terkontrol dibanding pemeliharaan ternak sendiri. Persoalan sederhana semacam ini sering muncul dalam pengelolaan kelompok ternak dan harus dipecahkan dalam musyawarah bersama anggotanya. Peran pemimpin kelompok sangat penting untuk memberikan kesadaran akan pentingnya kerja sama dan rasa gotong royong di antara mereka. Perawatan yang kurang maksimal dari salah satu anggota yang sedang mendapat giliran dalam merawat ternak bersama akan berdampak pada rasa iri keluarga yang lain.

5.3.2.4 Pemimpin Perkumpulan LINMAS dan SAR

Keberadaan Bankom (Bantuan Komunikasi) atau Rakom (Radio Komunikasi) di seputaran lereng Merapi jumlahnya melonjak sangat pesat ketika

terjadi dan pasca erupsi tahun 2010. Pada masa pra erupsi 2010 hanya terdapat beberapa rakom (tidak termasuk RAPI atau ORARI), seperti Balerante, Kompak Merapi, Peduli Merapi Srumbung, Komunitas Lingkar Merapi, Pasak Merapi, dan sebagainya. Saat ini, berkembang menjadi lebih banyak lagi. Melalui informan yang aktif di Rakom, bermula dari berdirinya Rakom Balerante sejak erupsi Merapi 1990an, dalam perjalanannya terjadi perselisihan pendapat di antara anggotanya, kemudian Rakom ini pecah menjadi berbagai rakom lokal seperti Turgo Asri, Turahan Awu, SKSB, dan sebagainya. Sedangkan Rakom Kompak Merapi juga pecah menjadi Guruh Merapi, Linang Sayang, dan sebagainya. Keberadaan Rakom ini sendiri terbentuk secara swadaya dan berkat dukungan dana atau fasilitas dari para donor. Anggota rakom ini juga semakin banyak pula, karena banyak bantuan HT dari berbagai LSM, seperti, Pasak Merapi, FPRB (Forum Penanggulangan Rawan Bencana). Biasanya yang diberi HT adalah yang dianggap sebagai aktifis pemantau gunung dan sungai. Menurut beberapa informan, munculnya Rakom-rakom ini merupakan sebuah alternatif komunikasi lewat HT, mengingat peran serta RAPI dan ORARI sebagai Rakom resmi pemerintah kurang maksimal. Bankom-bankom lokal ini lebih bersifat fleksibel terhadap partisipannya dan menggunakan bahasa yang bisa didengarkan oleh semua kalangan (tidak menggunakan bahasa sandi tertentu seperti ORARI, RAPI dan Kepolisian). Bahkan di lapangan pun anggota Rakom lokal lebih berperan daripada yang anggota RAPI atau ORARI yang dianggap resmi. Namun demikian yang berpartisipasi dan monitor Rakom lokal, selain anggota dan simpatisan rakom tersebut, juga terdapat para anggota RAPI, ORARI dan pihak kepolisian.

Kondisi ini membuka kesempatan bagi para pemuda di dusun-dusun lereng Merapi untuk mengambil peran aktif dalam kegiatan kemanusiaan, terutama ketika terjadi bencana alam Merapi. Para pemuda dusun di lereng Merapi melalui perwakilannya mengambil bagian di dalamnya. Walaupun para pimpinan Bankom lokal ini biasanya orang yang berperan aktif di dalam masyarakat dan merupakan tokoh panutan lokal, namun kepengurusan dan aktivitasnya selalu melibatkan peran pemuda dusun di dalamnya. Para pemuda dusun ikut terlibat aktif dan berlatih menjadi sukarelawan yang cukup berani

ketika terjadi bencana erupsi Merapi. Bakat kepemimpinan para pemuda dapat tersalurkan dan terlihat dalam kegiatan spontan Bankom-bankom ini ketika terjadi erupsi. Bahkan diantara pemuda yang dipandang cukup aktif dalam kegiatan ini dalam periode berikutnya dapat tampil dalam pencalonan pamong desa, kepala dusun atau bayan, atau bahkan kepengurusan desa yang lain.

Ketika FPRB didirikan 18 Juli 2010 oleh LSM Bina Swadaya beserta pemerintah desa, Bankom ini beranggotakan lima orang dari berbagai dusun dengan jumlah total 30 orang. Anggota ini dididik dan diberikan pengetahuan tentang penanggulangan bencana alam biasanya selama beberapa kali pelatihan (pelatihan rata-rata tiga hari). Struktur kepengurusannya adalah ketua: Pak Yarno, sekretaris: Pak Wawan (Candipos), bendahara: Pak Sungkono dan dilengkapi beberapa koordinator, yaitu bagian evakuasi, bagian dapur umum, bagian P3K, bagian pendataan, komunikasi dan manajemen barak. Kelompok-kelompok Penanggulangan Rawan Bencana (PRB) ini juga marak dibentuk oleh berbagai LSM di seputaran Merapi. Kelompok PRB yang menjangkau daerah relatif luas (yaitu beranggotakan orang-orang yang tinggal di area seputar lereng Merapi di empat kabupaten) antara lain adalah Komunitas Lingkar Merapi (KLM) dan Pasak Merapi. Setelah Gunung Merapi tidak bergejolak lagi ternyata 5 pemuda dari dusun Candipos dicalonkan dalam kepengurusan pamong desa karena aktivitasnya dianggap sangat baik ketika aktif dalam bakom-bakom lokal. Empat orang dari pemuda Candipos pada periode pasca letusan 2010 terpilih menjadi pamong di tingkat desa, sedangkan seorang lagi terpilih menjadi bayan Candipos. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan Bankom-bankom lokal telah melahirkan generasi baru kepemimpinan dusun yang dalam kasus Bayan Dusun Candipos tidak merupakan keturunan dari bayan sebelumnya.

5.3.3 Suksesi Kepemimpinan: Kontestasi Internal dan Eksternal

Suksesi kepemimpinan pamong dusun di beberapa wilayah lereng Merapi cukup menarik untuk dibahas dalam bagian ini. Beberapa dusun justru melakukan penunjukan langsung secara musyawarah dan kekeluargaan atas calon yang dikehendaki oleh para warga. Beberapa pengalaman para bayan atau kepala dusun

justru mengikuti pola penunjukan secara langsung oleh warga. Pengalaman Pak Hadi sebagai bayan Dusun Grogol memberi gambaran bahwa ia dipilih dan ditunjuk secara langsung oleh warga dusun melalui sebuah rapat. Ketika Harjo Susanto (ayah Pak Hadi) sakit-sakitan, Pak Hadi yang waktu itu masih sangat muda sering menggantikan atau mewakili tugas yang diemban oleh ayahnya dalam berbagai rapat dan acara di balai desa. Dengan demikian, setelah ayahnya meninggal dunia, Pak Hadi ditunjuk oleh warga dusun untuk melaksanakan tugas sebagai bayan. Hal semacam ini terjadi bukan semata-mata Pak Hadi sudah melakukan tugas sebagai bayan ketika ayahnya sakit-sakitan atau sudah dianggap paham tentang seluk beluk pemerintahan dusun, tetapi juga terkait erat dengan posisi Pak Hadi sebagai anak bayan sehingga dianggap “layak” untuk menggantikan posisi ayahnya.

Walaupun sudah ada penunjukan secara langsung melalui musyawarah warga di tingkat dusun, namun proses ini seringkali diikuti dengan usaha untuk mengakomodasi proses pemilihan secara langsung sesuai dengan demokrasi prosedural. Beberapa kasus di dusun lereng Merapi memberikan gambaran tentang proses akomodasi terhadap pemilihan langsung pamong dusun. Dalam proses pemilihann bayan Dusun Trono setahun yang lalu, pada awalnya calon bayan (Pak Sumini Adi) dipilih secara langsung oleh warganya dalam sebuah rapat dusun. Keputusan ini dilatarbelakangi karena pejabat bayan sebelumnya (Pak Sutras) sudah melewati usia 65 tahun dan sudah harus diganti. Selain itu calon bayan ini merupakan kerabat dekat dari bayan sebelumnya dan sekaligus cucu dari mantan bayan satu periode sebelumnya. Walaupun Pak Sumini Adi sudah dipilih oleh warga melalui musyawarah dusun, namun “coblosan” tetap diselenggarakan. Calon tunggal yang sudah dipilih secara musyawarah oleh warga tersebut kemudian harus melalui proses pemilihan suara secara langsung dengan lawan *Bumbung Kosong*. Hasil akhirnya adalah Pak Sumini menang suara 99,9% dan hanya sekitar 0,1 % (tiga suara) yang memilih *Bumbung Kosong*.

Hal senada juga terjadi di Dusun Candipos ketika terjadi pengisian jabatan bayan sekitar setahun yang lalu. Proses pemilihan bayan di dusun ini

cukup menarik, karena berdasarkan rapat dusun yang dilakukan para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat dan warga telah menghasilkan suara bulat bahwa semua warga sudah setuju untuk mengangkat Pak Wawan menjadi bayan dusun. Pada awalnya Pak Wawan masih merasa terlalu muda dan merasa tugas bayan sangat berat ketika harus mengatur warga Dusun candi Pos yang umurnya sebagian besar sudah jauh di atas umurnya. Dia waktu itu membayangkan akan terjadi kesulitan untuk memimpin warganya. Oleh karena itu, calon yang sudah ditunjuk melalui kesepakatan rapat warga ini kemudian mengajukan syarat untuk diadakan pemilihan suara warga dusun untuk melihat respon warga dan supaya lebih demokratis. Dalam tahap berikutnya, pemilihan dilakukan dengan menghadapkan calon tunggal ini dengan *Bumbung Kosong*. Hasilnya adalah mayoritas suara tetap mendukung Pak Wawan sebagai bayan dusun dan hanya 5 suara yang memilih bumbung kosong. Sempat terjadi suasana saling curiga di antara warga dusun terkait dengan lima suara yang diberikan pada *Bumbung Kosong* tersebut. Namun bayan terpilih justru meredamnya dengan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk peringatan supaya dalam masa kepemimpinannya haruslah tetap berhati-hati dan harus berpihak pada kepentingan warganya.

Apabila di dusun lain, para bayannya sebagian besar merupakan keturunan dari bayan sebelumnya, maka di Dusun Candipos justru menggambarkan fenomena yang agak berbeda. Bayan terpilih ini justru bukan keturunan langsung dari bayan sebelumnya. Dia merupakan aktivis FPRB tingkat dusun yang sangat berperan aktif sebagai relawan pada masa letusan Merapi tahun 2010. Peran besarnya dalam kegiatan kemanusiaan inilah yang menghantarkan dirinya dipilih sebagai bayan dalam musyawah dusun. Hal ini memberikan pengalaman sejarah yang berbeda dari kebiasaan pemilihan bayan pada periode sebelumnya. Pengalaman warga dengan bayan-bayan sebelumnya yang dipilih berdasarkan pertimbangan keturunan dari bayan sebelumnya seringkali justru perilakuan tidak sesuai dengan keinginan warga bahkan pada masa lalu sempat terjadi demo warga terhadap bayannya sendiri. Seperti pada masa bayan Surahmat (1995-1998), bayan ini didemo warga akibat ketidak transparanan informasi yang berasal

dari pemerintah terkait dengan permasalahan dana. Proses demonya bersamaan dengan demo-demo penurunan Suharto. Sesudah itu, posisi bayan digantikan oleh Pawiro Wiharjo sampai 2001, namun iapun harus mengundurkan diri dari kedudukannya karena dianggap tidak adil dan tidak transparan. Sesudah itu, posisi bayan digantikan oleh Pak Suranto sebagai pejabat sementara selama 2 tahun, namun karena banyak masalah dan ditekan oleh pihak luar maka ia juga mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Akhirnya posisi bayan selanjutnya digantikan oleh Pak Sanyoto (salah satu ketua RT saat itu) yang setelah menjabat sebagai bayan selama 10 tahun harus mengundurkan diri karena umurnya sudah melewati batas yang ditetapkan.

Beberapa dusun lain masih tetap mempertimbangkan faktor keturunan dalam memilih bayan atau kepala dusunnya. Bayan atau kepala dusun seringkali dijabat oleh seseorang yang berasal dari keturunan bayan atau pamong desa lainnya yang berpengaruh. Pak Cokroreja, bayan Dusun Gowok Sabrang, yang sekarang sudah berumur 60 tahun merupakan keturunan dari bayan sebelumnya. Begitu juga dengan jabatan bayan Dusun Stabelan yang berasal dari turunan keluarga bayan. Proses pemilihan untuk menjadi bayan di kedua dusun ini dilakukan dalam rapat dusun, setelah ayah mereka yang sebelumnya menjabat sebagai bayan sudah meninggal dunia. Nampaknya jabatan bayan merupakan jabatan yang turun menurun apabila tidak terjadi persoalan kepemimpinan pada periode sebelumnya. Jabatan ini nampaknya agak lekat dengan kemampuan keluarga dan keturunannya dalam melangsungkan tradisi dusun tersebut terkait dengan keberadaan Gunung Merapi. Para warga di beberapa dusun lereng Merapi seringkali memandang bahwa keluarga dan keturunan bayan mempunyai kemampuan dalam berelasi dengan lingkungan alam sekitarnya, termasuk dengan penguasa Gunung Merapi. Figure seorang bayan di wilayah yang relatif dekat dengan Merapi tidak hanya berperan sebagai pemimpin pemerintahan terendah, namun juga sebagai figur yang mempunyai pengetahuan terkait dengan keberadaan Merapi. Berbagai macam upacara dan penyelenggaraan tradisi dusun sebagai bentuk relasi yang harmonis antara warga dusun dan lingkungan yang ada di Gunung Merapi hampir selalu dimotori oleh para bayan di dusunnya masing-masing.

Walaupun melalui pemilihan suara secara langsung dan tidak melalui proses penunjukkan dalam musyawarah dusun, seringkali kepala dusun atau bayan yang terpilih merupakan kerabat dari kepala dusun atau bayan sebelumnya. Kasus suksesi kepemimpinan di Dusun Bronggang memberikan gambaran semacam itu. Dusun Bronggang baru mempunyai kepala dusun atau kepala dukuh sebanyak dua kali. Sebelumnya dusun ini adalah salah satu wilayah desa yang bernama Panggungsari yang dipimpin oleh lurah yang bernama Mbah Kami. Lalu pada tahun 1951 wilayah ini menjadi dusun yang masuk wilayah Desa Argomulyo dan diberi nama Dusun Bronggang. Dusun Bronggang pada waktu itu dipimpin oleh Ponco Diharjo dengan cara pemungutan suara. Pada tahun 1989 dia diberhentikan menjadi dukuh karena sudah tua dan sakit-sakitan. Pada waktu itu pengangkatan dukuh dilakukan dengan tes di kabupaten. Sukaji, cucu dari Mbah Kami menjadi salah satu calon yang mendaftar. Dengan mengeluarkan uang Rp 1.250.000,00 ikut tes, lolos ia diangkat menjadi dukuh di Bronggang menggantikan Ponco Diharjo.

Kasus suksesi kepemimpinan Dusun Klakah juga memberikan pemahaman bahwa walaupun melalui berbagai upaya yang terkait dengan sistem “coblosan” dalam demokrasi prosedural, namun akhirnya yang terpilih masih kerabat dari pamong desa. Kepala Dusun Klakah, Pak Slamet, sebenarnya merupakan keturunan petani kaya dengan luas kepemilikan tanah kurang lebih dua hektar. Tetapi kerabat Slamet merupakan pamong di tingkat desa. Biasanya kepala dusun di wilayah dusun tersebut masih keturunan kepala dusun sebelumnya. Namun Pak Slamet berhasil mendapatkan posisi tersebut dalam pemilihan walaupun dia bukan keturunan dari kepala dusun sebelumnya. Ia bisa menang berkat jaringan kerabat dan perannya sebagai pedagang sayur. Namun terpilihnya Slamet ini belum segaris dengan anggapan masyarakat bahwa keturunan pamong lebih diterima daripada orang biasa. Ada semacam pandangan apabila keturunan pamong yang memimpin maka keharmonisan yang sudah berjalan pada saat sebelumnya dapat dipertahankan dalam kepemimpinan selanjutnya. Selain itu keturunan pamong dipandang mempunyai kemampuan memimpin seperti pendahulunya.

Keturunan dari pamong dusun ataupun desa seringkali menjadi tumpuan harapan atas figur pemimpin pada masa berikutnya. Sebagian besar warga dusun yang ada di lereng Merapi masih mengacu pada peta pengetahuan bahwa keturunan dari pamong dusun atau desa dipandang relatif mampu untuk menjadi pemimpin mereka ketika terjadi suksesi kepemimpinan di wilayahnya. Suratno, Kadus I (Dusun Kemalang), mempunyai orang tua yang dahulu berposisi sebagai ketua RT di wilayah dusun tersebut. Selain itu kakeknya merupakan bayan di daerah tersebut. Sedang kakak Suratno ada yang pernah menjadi Kepala Desa Kendalsari, sebelum dijabat oleh Pak Zahri, lurah yang sekarang ini.

Masa jabatan sebagai kepala dusun yang dulunya berlaku seumur hidup kemudian dalam perkembangannya dibatasi menjadi sampai berumur 60 tahun. Kepala Dusun Sempu, Pak Ridwan yang saat menjabat pertama kali terpilih sebagai kepala dusun pada tahun 1999 masih berumur 24 tahun. Hal ini berarti bahwa kepala dusun ini apabila tidak terjadi apa-apa masih mempunyai kesempatan menjadi kepala dusun selama 23 tahun lagi. Proses pemilihan kepala dusun pada saat itu adalah melalui tes. Walaupun melalui tes, para tetua dusun meminta kepada pihak kepala desa agar Pak Ridwan (kepala dusun yang sekarang menjabat) yang terpilih menjadi kepala dusun karena dia merupakan keturunan dari pejabat kepala dusun sebelumnya (ayah dan kakeknya). Dengan adanya permintaan seperti itu, maka akhirnya Pak Ridwan lah yang lolos tes sebagai kepala dusun.

Beberapa kasus suksesi kepemimpinan di tingkat dusun terkadang juga tidak begitu mempertimbangkan faktor keturunan yang terkait langsung dengan pamong dusun atau pamong desa. Kepala Dusun Kaliurang Utara saat ini merupakan kepala dusun yang dipilih oleh masyarakat melalui pemungutan suara. Pada waktu itu dia adalah calon tunggal. Hasil pemungutan suara saat itu adalah dari sekitar 200an suara yang ada, terdapat 20 suara yang tidak memilih dia. Kepala dusun terpilih tersebut sebenarnya bukan lah keturunan kepala dusun yang terdahulu, tetapi merupakan salah satu orang terkaya di dusun itu. Sebenarnya adik iparnya, Sukardi, yang dicalonkan oleh masyarakat untuk menjadi lawannya tetapi dia menolak. Sukardi sempat mengisi kekosongan sebagai kadus dusun

Kaliurang Utara selama tiga tahun setelah kepala dusun sebelumnya, Pak Sahuri, pergi dari dusun tanpa alasan yang jelas. Menurut Pak Hadi, dulu posisi kepala dusun atau kadus berlaku seumur hidup, tetapi peraturan sekarang menyebutkan bahwa masa pensiun seorang kepala dusun ketika pejabat yang bersangkutan sudah berumur 60 tahun. Meskipun demikian, periode masa jabatan kepala dusun yang berlaku dalam masyarakat Kaliurang Utara adalah 20 tahun. Ketika seseorang terpilih sebagai kepala dusun sudah berumur 50 tahun, maka masa kepemimpinannya hanya 10 tahun atau hanya satu periode kepemimpinan saja karena yang bersangkutan kemudian sudah berumur 60 tahun sebagai batas pensiun sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru. Akan tetapi ketika seseorang terpilih sebagai kepala dusun baru berumur 30 tahun maka yang bersangkutan bisa menjabat selama dua periode kepemimpinan, yaitu 20 tahun pada periode kepemimpinan pertama dan 10 tahun pada periode kepemimpinan kedua karena yang bersangkutan sudah berumur 60 tahun.

Kasus kepemimpinan formal tingkat dusun yang juga tidak terkait dengan hubungan darah dengan kepala dusun sebelumnya adalah kepemimpinan di Dusun Kinahrejo. Dukuh Kinahrejo saat ini, Ramijo, ternyata tidak mempunyai hubungan darah dengan Pak Puji sebagai dukuh sebelumnya. Hubungan mereka hanya sebatas tetangga. Sebenarnya anak Pak Pudji akan dicalonkan untuk menjadi dukuh namun tidak mau. Padahal menurut seorang informan yang ditemui, Mbah Wignyo, anaknya Pak Pudji tersebut dianggap bisa memimpin dusunnya (*piyambakke pinter, tajam, lante*). Selain tidak mau menggantikan ayahnya sebagai kepala dukuh, saat bencana tahun 2010 yang lalu anak Pak Pudji tersebut ternyata menjadi salah satu korban yang meninggal. Gambaran tentang proses suksesi kepemimpinan di Dusun Kaliurang Utara terjadi melalui pemungutan suara tingkat dusun. Pada waktu itu calonnya hanya dua, yaitu Pak Ramijo dengan simbol *Arit* dan Pak Purnomo dengan simbol *Pacul*. Pemungutan suara dilaksanakan di Ngrangkah. Sedangkan calon dukuh semuanya diamankan di kantor kepala desa. Setelah *coblosan* selesai, kedua calon kepala dusun tersebut baru diperbolehkan pulang dan menunggu hasil perhitungan suara di rumah masing-masing. Panitia pemilihan terdiri dari warga Pelemsari, pihak kelurahan

dan kepolisian untuk menjaga keamanan saat pemungutan suara berlangsung. Setelah dilakukan perhitungan suara ternyata yang mendapatkan suara terbanyak adalah Pak Ramijo. Pak Ramijo lebih unggul 10 suara dari Pak Purnomo. Dengan demikian yang dinyatakan menang dan diangkat menjadi kepala dukuh adalah Pak Ramijo.

Sudianto sebagai Kadus III (Dusun Segadung), Desa Sidorejo merupakan contoh lain tentang seorang bayan yang tidak mempunyai hubungan keturunan dengan bayan atau pamong dusun sebelumnya. Walaupun Sudianto berasal dari orang tua petani biasa namun sejak kecil ia menjadi anak angkat Romo Tunggul, seorang yang kaya, berilmu tinggi, berwibawa, memiliki wawasan luas, dan juga merupakan keturunan dari seorang Senopati dari *trah* Mangkunegaran Solo. Sudianto kemudian memperistri keponakan dari Romo Tunggul ini. Dalam konteks ini, keberadaan Romo Tunggul di daerah tersebut dipandang mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat Dusun Segadung. Hidup di lereng Merapi seringkali membutuhkan seorang figur yang dapat mengayomi atau barangkali juga memberikan wawasan terkait dengan keberadaan Gunung Merapi. Dengan demikian Sudianto sebagai anak angkat Romo Tunggul dipandang mempunyai wawasan yang cukup luas juga terkait dengan relasi kehidupan masyarakat setempat dengan keberadaan Merapi. Hal-hal semacam ini memberikan pemahaman bahwa walaupun Sudianto bukan keturunan dari figur bayan atau pamong dusun sebelumnya, namun tetap dianggap mempunyai kemampuan untuk memimpin wilayah tersebut secara baik.

Kedekatan dengan tokoh yang dipandang mempunyai karakter yang dihormati juga dapat membawa seseorang untuk menjadi pemimpin formal di wilayahnya. Kepala Dusun Pakisaji yang sekarang bukanlah keturunan kepala dusun sebelumnya, bahkan kepala dusun yang sekarang bukan merupakan warga asli Pakisaji. Kepala dusun yang sekarang adalah seorang perempuan dan merupakan istri dari tokoh masyarakat Pakisaji, Supriyono. Dahulu, ayah dari Supriyono adalah pahlawan perang kemerdekaan. Dia sangat dihormati warga karena selain anak dari pahlawan pada masa perang kemerdekaan, dia juga aktif di berbagai organisasi semasa mudanya. Dalam kehidupan bermasyarakat, Supriyono

juga dipercaya warga untuk menjadi pembawa acara dalam segala kegiatan, seperti pembawa acara untuk upacara kematian atau upacara pernikahan. Menurut Supriono sendiri, tidak semua orang bisa menjadi pembawa acara terutama yang menggunakan bahasa Jawa. Jadi banyak warga yang menghormatinya karena kemampuannya ini. Di luar Dusun Pakisaji, Supriono terkenal dengan kemampuan supranaturalnya. Banyak warga dari berbagai daerah datang untuk meminta bantuannya seperti menyelesaikan masalah cinta atau masalah yang lain. Apabila melihat kepala dusun sebelumnya, maka kepala dusun tersebut merupakan keturunan dari kepala dusun sebelumnya dan masih mempunyai hubungan darah dengan kepala Desa Candibinangun. Namun karena kepala dusun ini meninggal sebelum masa jabatannya habis maka dipandang perlu diadakan pemilihan kepala dusun yang baru mengingat sudah terjadi kevakuman kepala dusun selama selama kurang lebih dua tahun. Secara ideal terdapat berbagai cara pemilihan pemimpin di Pakisaji, namun tidak menutup kemungkinan dasar pemilihan itu karena masih keturunan dengan pemimpin sebelumnya atau karena dipercaya warga dan dipandang memiliki kemampuan untuk mengelola warganya.

Untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan faktor kepercayaan saja, tetapi juga ditentukan oleh banyak faktor. Pemimpin yang berhasil memiliki beberapa kriteria bias atau dapat tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan, apakah itu kepribadian, ketrampilan, bakat, kemampuan, sifat-sifat, atau kewenangan yang dimiliki yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap cara-cara memimpin dan berinteraksi dengan warganya.

5.3.4 Peran Pemimpin dalam Penanggulangan Bencana Alam

Berbasis pada sistem kepemimpinan yang bersifat partisipatif di lereng Merapi, para kepala dusun atau bayan dan ketua RT seharusnya menjadi tokoh sentral dalam melakukan berbagai macam koordinasi dan usaha penanggulangan bencana Mereka diharapkan berperan sebagai tokoh panutan dalam masyarakatnya dan menjadi pengambil keputusan apakah warganya harus mengungsi atau tidak serta apabila harus mengungsi kapan waktu yang tepat

untuk mengungsi. Namun dalam pelaksanaannya, para kepala dusun memiliki kebijakan yang beragam sesuai dengan pola organisasi komunitas, dan karismanya, dan adanya tidaknya intervensi pemerintah. Sementara itu umumnya ketua RT lebih bertindak sebagai fasilitator yang menngorganisasari anggotanya secara lebih partisipatif dibandingkan dengan kepala dusunnya.

Dalam situasi yang mengundang kepanikan, peran kepala dusun nampaknya sangat menentukan keberhasilan evakuasi. Pertama, dalam tradisi penyelenggaraan organisasi komunitas kepala dusun bertindak sebagai pemimpin musyawarah dan karena itu ia bertindak sebagai fasilitator dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif. Kebanyakan kepala dusun menunjukkan peran seperti itu.

Dengan demikian, kepala dusun memfasilitasi warga dalam melakukan musyawarah untuk menentukan kapan harus mengungsi. Hampir semua kepala dusun melakukan peran ini. Para tokoh warga dan ketua RT serta perwakilan beberapa keluarga berkumpul di rumah kepala dusun, dan kepala dusun lebih bertindak sebagai fasilitator daripada mengambil keputusan. Di Turgo, kepala dusun tinggal di Sidumoro yang lokasinya termasuk wilayah aman, sehingga musyawarah untuk melakukan pengungsian dikoordinasi oleh Suwaji, mantan kepala dusun. Dengan adanya musyawarah tersebut, maka pengungsian bersama antar warga dapat terorganisir termasuk juga mengenai sarana angkutan. Karena bertindak sebagai fasilitator kepala dusun tidak berani menyuruh warga untuk mengungsi sekalipun kepala desa dan pejabat dari pemda maupun tim SAR dan relawan sudah mengajak mengungsi “sedaya keputusan terserah musyawarah warga” kata kepala Dusun Stabelan Boyolali.

Kedua, kepala dusun mengambil peran sebagai pengarah dan warga berharap kepala dusun memang memutuskan ketika mereka sulit menentukan apakah harus segera mengungsi atau tidak. Pola seperti terjadi di Dusun Kemiri Cilik. Ketua RT, tokoh warga dan sanak saudara kepala dusun berkumpul di rumah kepala dusun. Mereka melakukan muswarah untuk melakukan pengungsian. Kepala dusun akhirnya diminta pendapatnya guna dijadikan acuan. Kepala dusun akhirnya memutuskan segera mengungsi sebelum hari Kamis sore,

dan meyakinkan kepada warga yang masih enggan mengungsi agar seger amengungsi dengan memberikan jaminan kampungnya akan aman. Kepala dusun bersama enam warga lalu menjadi dusunnya dan menutup jalan menuju ke Kaliurang agar tidak ada kendaraan dari luar masuk ke kampungnya, kecuali dari Desa Purwobinangun tempat mereka mengungsi.

Ketiga, kepala dusun mengambil sikap yang terbuka kepada warga untuk mengungsi sesuai dengan pilihannya dan waktunya. Hal ini dilakukan kepala Dusun Grogol Sikap Kepala dusun ini sesuai dengan karakter masyarakatnya yang pluralistik dari segi agama dan jaringan sosialnya. Masing-masing kelompok warga berdasarkan ikatan agama, RT atau pertemanan lalu memilih tempat mengungsi yang sesuai dengan jaringan sosialnya. Akibatnya warga dusun tersebar dalam beberapa tempat pengungsian karena tidak ada yang mengkoordinir. Bayan dusun ini bahkan mengungsi lebih dahulu di Ngrambeanak (Borobudur) dibanding dengan warga dusun yang lain. Dalam situasi seperti ini, satu keluarga pun bisa terpecah menjadi tiga lokasi pengungsian, seperti Duren Jati (Sawangan), Ngrambeanak, dan Kota Mungkid. Situasi sangat kacau dan mencekam pada waktu itu, sehingga warga dusun bubar sendiri-sendiri (*bubar dewe*). Rata-rata warga yang sudah tua, wanita dan anak-anak mengungsi sekitar 4-6 minggu, namun para pemuda dan bapak-bapak seringkali pulang kembali ke rumahnya ketika siang dan ada beberapa yang menginap untuk berjaga-jaga di dusun masing-masing. Kasus di dusun Grogol ini memberikan gambaran bahwa para pemimpin di tingkat dusun justru kurang mengambil peran dalam situasi yang sebenarnya sangat membutuhkan peran serta pemimpinnya untuk melindungi warganya. Dalam situasi seperti ini justru peran pemerintah dan para relawan sangat menonjol. Keempat, kepala dusun yang karismatik dan mempunyai pengaruh yang kuat pada warga untuk mengikuti keputusannya. Kepala dusun ini misalnya Dusun Gowok Sabrang² yang mana bayannya (Pak

² Secara geografis Dusun Gowok Sabrang sangat rentan terhadap bahaya atau ancaman *wedhus gembel* (awan panas), namun aman terhadap ancaman lahar panas.

Cokroreju) dipandang sebagai tipe orang yang sangat sederhana, “*ngemong*” dan “*nuwani*”.

Ia sering kali bertindak sebagai bapak terhadap para warganya. Bayan dusun ini pada erupsi tahun 2010 yang lalu, justru tidak mau pergi dari dusunnya. Selama 42 hari ia bersama 10 orang yang lain tetap tinggal di dusunnya dan tidak mau ikut mengungsi bersama keluarganya dan warga yang lain. Prinsipnya yang kuat dalam menjaga dusunnya ternyata tidak terhalangi oleh semburan debu, pasir krikil dan getaran hebat dari Merapi. Bayan ini justru menolak instruksi dari pemerintah untuk meninggalkan dusunnya saat itu.

Keyakinannya yang kuat dalam membaca pertanda-pertanda dari Gunung Merapi yang mana bencana tidak akan mengarah ke dusunnya telah mendorong untuk sampai pada keputusan tetap tinggal di dusun tersebut dan membiarkan warga yang lain untuk mengungsi ke tempat pengungsian yang aman. Bahkan bayan ini menyempatkan menengok warganya yang berada di beberapa tempat pengungsian. Menurut bayan ini, keyakinan dan kemantapan hati adalah sumber keselamatan utama. Selain doa yang menjadi pegangan utama, ada beberapa ilmu titen yang wajib dijaga dan jangan dilanggar, seperti *aja gumunan* (jangan merasa heran) ketika Merapi sedang erupsi, *aja alok-alok* (jangan berkomentar) ketika ada kejadian yang luar biasa, dan jangan memukul kentongan “titir” sebagai tanda bahaya.

Ketika tahap pengungsian, kepala dusun memperlihatkan kepemimpinannya yang partisipatif dan kebabakan. Umumnya urusan mengungsi bersama diserahkan kepada para ketua RT dan pemuda. Kepala dusun yang kebanyakan lebih kaya dibandingkan dengan warganya terpanggil untuk menyumbangkan dana yang lebih besar daripada para warganya. Salah satu contoh adalah kepala dusun Kemiri Cilik, ia setiap hari selalu menyediakan angkutan milik pribadi untuk mengangkut warga yang akan menengok rumahnya.

Peran yang tidak kalah menarik adalah kepala dusun juga menjaga tertib sosial dan harmoni sosial dalam situasi gawat darurat. Umumnya dalam situasi darurat orang mudah stress dan berebut bantuan sosial dari para relawan atau dermawan. Kepala dusun Grogol misalnya pulang kembali ke rumah untuk

memastikan kampungnya aman, dan ia menampung bantuan sosial dari para dermawan yang berasal dari kalangan organisasi atau individual. Uang dan barang ia terima dan dibagikan ke warga, dan bahkan ia juga mengundang warganya agar menerima bantuan secara tertib, sopan dan jujur. Hal ini ia lakukan karena dalam kondisi tidak terorganisir bantuan bisa tidak merata dan warga bisa saling berebut tanpa antri dengan tertib. Ia menceritakan “suatu hari ada dermawan orang Cina masuk ke kampungnya. Ia mau membagi uang jutaan kepada warga korban. Ia lalu memanggil warganya untuk menerima bantuan tersebut secara langsung. Warga berbondong-bodong, semula antri secara tertib tetapi kemudian ada warga yang mendesak untuk mendapat bagian tanpa antri dan bahkan berusaha untuk dapat bantuan terus”. Akhirnya ia minta kepada dermawan tersebut untuk menyetop pemberian bantuan dan mengingatkan kepada warga agar kembali tertib dan sopan”. Akhirnya, warga mematuhi dan bantuan kemudian diedarkan kembali.

Ketika tahap rekonstruksi dan rehabilitasi peran kepala dusun dalam memenuhi kebutuhan warganya tidak bisa diabaikan. Akan tetapi pada tahap ini kepala dusun sering menghadapi dilema. Di satu sisi mereka harus menyuarakan kepentingan warga dan menjaga harmoni, tetapi di sisi lain mereka ini harus menjadi agen dari pemerintah yang berseberangan dengan aspirasi warga. Salah satu contoh adalah di Sambungrejo, di satu sisi kepala dusun harus mengajak warga untuk relokasi atau paling tidak menunda waktu pembangunan rumah kembali, tetapi di sisi lain ia harus mengikuti aspirasi warga yang berkehendak untuk segera melakukan pembangunan rumah, mengorganisir gotong-royong dan bahkan membiarkan warga memanipulasi bantuan dari bantuan jatah hidup menjadi untuk rekonstruksi rumah.

Dilema kepala dusun itu membuat posisi kepala dusun serba sulit. Mereka menjadi ambivalen. Warga sering melakukan kritik secara terbuka atau tertutup. Kepala dusun juga mengeluh atas posisinya yang dilematis, mereka menjadi kurang populer. Sementara itu dalam masa rekonstruksi kepala dusun hampir tidak pernah istirahat menerima tamu dan program pemerintah yang tidak selalu disertai dengan imbalan yang memadai.

Ketua RT satu Dusun Trono menuturkan beberapa pengalaman warga setempat terkait dengan patokan mitigasi pengetahuan lokal pada masa erupsi Merapi tahun 2010 yang lalu, yaitu Pertama, pertanda seperti bulan yang sangat terang yang mengelilingi lereng Merapi dari sisi Selatan ke Barat. Daerah yang dilewati lintasan sinar bulan tersebut dimaknai sebagai daerah titik bahaya. Dari ilmu *titennya*, awan panas atau *wedus gembel* tidak akan keluar melewati lintasan bulan tersebut. Kedua, pertanda seperti batu gunung besar yang berjalan di lereng gunung. Lintasan batu tersebut dimaknai sebagai batas wilayah bahaya, sedang di luar garis batu tersebut merupakan wilayah aman. Apabila ada longsor atau guguran lava biasanya akan berhenti apabila melewati garis batas batu tersebut. Ketiga, pertanda intensitas petir di seputaran Merapi menandakan gunung akan segera meletus dan lokasi petir tersebut adalah batas daerah yang berbahaya. Keempat, pertanda arah *thathit* (kilat). Arah kilat tersebut merupakan pertanda arah awan panas atau arah lava yang paling membahayakan. Arah kilat dalam letusan tahun 2010 yang lalu mengarah ke Selatan.

Walaupun relatif kecil jumlahnya, masih ada para pemimpin tingkat dusun yang masih mengacu pada tanda-tanda alam yang diberikan oleh Gunung Merapi. Pengetahuan lokal tentang pertanda-pertanda alam ini perlu dipadukan dengan pengetahuan modern tentang mitigasi bencana letusan gunung agar terjadinya bencana letusan tidak membuat warga lereng Merapi kurang tanggap dengan lingkungan lokalnya. Ketika terjadi bencana letusan Merapi justru para pemimpin tingkat dusun kurang berdaya atau justru ada yang melakukan “perlawanan” dengan tidak mau mengungsi akibat peran besar penanggulangan bencana diambil alih oleh pemerintah beserta para relawan yang pada umumnya datang dari luar.

5.4 Solidaritas Sosial

Dusun-dusun di lereng Merapi mempunyai kecenderungan yang kuat untuk mewujudkan komunitas yang kompak dalam menjalin kebersamaan dan solidaritas sosial. Berbagai aktivitas komunitas yang berfungsi penting dalam mewujudkan kebersamaan dan solidaritas komunitas adalah gotong royong, kerja

bakti, dan selamatan. Ketiga jenis aktivitas ini selalu melibatkan warga secara kolektif untuk berbagi dan menanggung beban dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi. Ketiga macam aktivitas kolektif itu sebenarnya hidup dalam masyarakat Jawa dan desa pada umumnya. Namun demikian, tulisan ini akan menggambarkan tentang berbagai aspek dari gotong royong, kerja bakti dan selamatan yang secara tipikal terdapat di lereng Merapi terkait dengan potensi kultural dan masalah ekologis, dan kebencanaan yang dihadapi warganya.

5.4.1 Gotong-royong

Ada tiga macam gotong royong yang menonjol di Lereng Merapi yaitu di bidang pembangunan rumah dan aktivitas pertanian yang di Jawa di kenal dengan sebutan *sambatan*. Di setiap dusun, warga sudah memiliki tradisi yang kuat pada pembangunan rumah dengan cara *sambatan*. Rumah-rumah yang terbuat dari gedek dan kayu pada masa silam selalu dibangun dengan menggunakan tenaga kerja keluarga, tetangga se RT atau pun bahkan sedusun.

Penggunaan tenaga kerja *sambatan* itu berlangsung sejak pemasangan fondasi sampai pemasangan atap rumah. Keluarga yang membangun rumahnya biasanya meminta bantuan tenaga *sambatan* dari sanak famili dan kemudian tetangga dengan cara datang ke rumahnya secara khusus. Setelah itu tetangganya biasanya tidak pernah menolak dan langsung menyanggupi. Bila sedang berhalangan maka halangan itu disampaikan misalnya akan melakukan kegiatan tani lebih dahulu atau ke luar kota. Pasti ajakan gotong-royong akan diterima sebagai suatu bentuk balas budi atau suatu tanggung jawab sosial dan *saving* agar kelak juga akan dibantu jika membutuhkan dana bantuan.

Biasanya keluarga akan minta tenaga gotong-royong dari tetangganya antara satu sampai dua minggu. Ada pula yang diminta bekerja sampai satu bulan penuh bahkan lebih sehingga bangunan rumah berdiri dan siap ditempati. Di semua dusun terjadi suatu pergeseran pengerahan tenaga kerja gotong royong. Dulu, namanya saja tenaga gotong-royong, maka tidak dibayar, Kini tenaga gotong-royong yang tidak dibayar biasanya adalah mereka yang membantu mengangkut barang material seperti pasir, kayu atau bambu, sedangkan tukang

yang mengolah kayu dan memasang batu-batu dibayar dengan harga miring maksudnya di bawah standar. Misalnya tukang seharusnya dibayar Rp 40.000.000,00 per hari kemudian hanya dibayar separuhnya. Dengan cara seperti itu, solidaritas sosial masih dipelihara tetapi tetap menghargai orang yang secara profesional mencari nafkah di sektor bangunan. Tetangga yang membantu mengangkut material dari jalan atau kebun ke lokasi pembangunan rumah tidak dibayar kecuali diberi makan, minum, rokok dan di beberapa dusun keluarga lelaki yang ikut gotong-royong itu *dipunjung* (diberi kiriman makanan) artinya keluarganya juga diberi makan sebagai bentuk pemberian atau upah secara tidak langsung.

Selama 20 tahun terakhir telah terjadi penurunan secara drastik penggunaan tenaga kerja gotong-royong dalam pembangunan rumah. Gejala itu sudah terjadi sejak tahun 1985. Data lapangan Michael R Dove di Turgo mengungkapkan gejala itu sudah tampak sejak tahun 1980an. Tenaga kerja yang membantu pembangunan rumah di Turgo dibayar sekalipun dengan upah miring. Hanya ketika mendirikan tiang dan memasang genting menggunakan tenaga kerja gotong-royong murni.

Masuknya ekonomi uang membuat gotong-royong menjadi memudahkan di dusun-dusun lereng Merapi. Orang harus mencari nafkah untuk mendapat uang guna memenuhi berbagai kebutuhan sehingga gotong-royong dikonversi dengan upah miring. Perempuan yang terlibat dalam gotong-royong pembangunan rumah juga berkurang. Maksudnya wanita yang diminta untuk menyiapkan hidangan makan juga dikurangi.

Walaupun tradisi gotong-royong merosot ada kesan kuat bahwa di dusun-dusun lereng Merapi bagian atas, khususnya yang berada di KRB III, tradisi gotong-royong masih kuat. Hal ini karena mereka relatif terisolir dan banyak juga aktivitas social ekonomi yang masih dilaksanakan dengan gotong-royong. Pengamatan di Babadan, Magelang misalnya terlihat bahwa hampir semua rumah dibangun dengan memakai tenaga gotong-royong. Tanpa gotong-royong kata seorang warga, maka tidak mungkin keluarga baru bisa memiliki rumah. Banyak hal ditinggalkan dengan adanya gotong-royong karena keluarga

pada dasarnya hanya mengeluarkan uang konsumsi, semen, paku, papan dan genting saja.

Kuatnya tradisi gotong-royong di Babatan terlihat dari banyaknya orang yang ikut datang dalam acara pembangunan rumah. Mereka datang tanpa harus diundang dan sering kali orang yang *glidig* (berburuh) di luar dusunnya kemudian balik dan berhenti untuk sementara demi bisa terlibat dalam kegiatan gotong-royong.

Gotong-royong sebagai sistem pengerahan kerja komunal di lereng Merapi telah membuahkan hasil, yaitu mempersatukan warga sekaligus juga memungkinkan pembangunan komunitas bisa berjalan lebih efektif dan berhasil guna. Tanpa adanya gotong-royong rumah-rumah mereka tidak mungkin dapat dibangun dengan biaya yang rendah. Umumnya rumah di Merapi dibangun dengan menggunakan batu daripada bata, dan batu pun sering dicari bersama-sama dengan kerabat dan tetangga terdekat. Oleh karena itu, modal utamanya hanyalah uang untuk konsumsi ditambah dengan bahan dari luar seperti semen, paku, kayu dan genting.

Di Dusun Kaligentong dan Sambungrejo, gotong-royong kelihatan semarak dilakukan warga guna menjalankan program rekonstruksi swadaya masyarakat. Orang yang bertetangga bersama-sama membuat jadwal kerja gotong-royong untuk menyelesaikan pemugaran rumah-rumah mereka masing-masing. Dulu sebelum erupsi pada 2010 sudah ada kebiasaan para tukang dibayar, dan warga yang bekerja sehari-hari juga diberi upah sekalipun upahnya rendah seperti dalam proyek padat karya. Namun demikian, khusus untuk rekonstruksi erupsi Merapi secara swadaya, warga lebih mengedepankan solidaritas kewargaan daripada memikirkan keuntungan ekonomis dari proyek pembangunan rumah.

Berbeda dengan gotong-royong di bidang pembangunan rumah di bidang pertanian gotong-royong ini lebih cepat meluntur walaupun masih berlaku di beberapa dusun. Umumnya gotong-royong berlaku pada masa panen saja, yaitu pengangkutan hasil bumi jagung dari kebun ke rumah. Lambat laun ketika jagung ditinggalkan maka gotong-royong pun ditinggalkan. Bercocok tanam tanaman komoditas seperti salak, sayuran, tembakau dan rumput dikerjakan secara

komersial sehingga petani kecil pun enggan bekerja secara gotong-royong. Justru dengan adanya tanaman komersial ini petani kecil bisa menikmati dengan menjadi buruh khususnya untuk pengolahan tanah yang memakan tenaga kerja yang besar. Kepala Dusun Grogol misalnya menceritakan bahwa ia tidak mungkin gotong-royong untuk penyiapan tanaman sayuran. Lahan miliknya pun diolah dengan memakai tenaga upahan agar pekerjaan itu menjadi ringan, dan cepat diolah untuk segera ditanami.

Walaupun gotong-royong di pertanian memudar tetapi jejak semangat gotong-royong dalam aktivitas pertanian masih ada. Misalnya, dalam kontrak kerja, petani biasanya akan memberikan upah miring kepada tetangganya. Pekerjaan yang dilakukan itu misalnya mengambil hasil panen atau mengangkut pupuk kandang ke kebun. Para tetangga biasanya menyukai adanya ajakan bekerja di kebun sekalipun upahnya rendah.

5.4.2 Sumbang Menyumbang dalam Hajatan dan Musibah

Orang Lereng Merapi juga masih mempertahankan tradisi sumbang-menyumbang dalam penyelenggaraan hajatan seperti kelahiran perkawinan dan menghadapi musibah seperti sakit, sampai dengan meninggal. Studi ini tidak menyimak secara kuantitatif atas besar kecilnya sumbang-menyumbang di hajatan dan musibah keluar. Studi ini melihat bahwa tradisi sumbang-menyumbang di Merapi merupakan wujud dari solidaritas horisontal yang tetap penting di tengah masyarakat yang semakin individualistik.

Ketika seorang ibu melahirkan, maka biasanya tetangga dan sanak saudara memberikan ucapan selamat dengan memberikan sumbangan. Besar kecilnya sumbangan bervariasi antar komunitas dusun, dan ikatan keluarga serta status sosial dalam masyarakat. Namun ada cara bahwa sumbangan untuk hajatan ini bisa besar nilainya sampai Rp 50.000,00. Sebaliknya keluarga yang merayakan kelahiran anaknya menyelenggarakan serangkaian upacara selamatan. Mereka biasanya mengundang kawan dan tetangga untuk melakukan *lek-lekan bayen*, yaitu bersilaturahmi sambil bermain dan mendoakan si anak agar selamat sentosa di kemudian hari. Dalam acara ini keluarga menyajikan

hidangan. Pada waktu berusia bayi lahir sampai selapan hari apabila sudah dipastikan namanya maka diadakan lagi selamatan *puputan* dengan mengundang sanak famili untuk berdoa bersama dengan diakhiri memberikan besek yang berisi makanan yang telah didoakan.

Acara upacara selamatan kelahiran bayi ini masih rutin dijalankan di desa-desa lereng Merapi. Orang mempertahankan tradisi ini karena adanya ikatan sumbang-menyumbang yang tidak bisa diputus begitu saja, tetapi juga karena adanya ikatan kekerabatan yang kuat dalam masyarakat Merapi.

Ketika ada warga yang sakit, keluarga biasanya berusaha untuk menengok, dan mereka juga memberikan sumbangan. Perkumpulan sosial di beberapa dusun juga menyediakan dana ini misalnya perkumpulan petani peternak sapi perah di Turgo, Kemiricilik dengan menyediakan dana Rp 50.000,00 sampai Rp 100.000,00 bagi anggotanya yang sakit keras. Anggaran ini diambilkan dari dana kelompok yang asalnya adalah dari potongan penerimaan penjualan susu perah. Setiap anggota terpotong Rp 20,00 per liter dan dana ini dipakai untuk dana kemanusiaan di dusun, khususnya ditujukan kepada anggota kelompok.

Ketika warga meninggal dunia, keluarga-keluarga juga memberikan sumbangan dan bantuan sosial dari urusan menerima tamu sampai dengan mengubur jenazah. Besarnya sumbangan per keluarga berkisar antara Rp 5000,00 atau setara dengan harga satu kilogram gula, dan beberapa bungkus teh. Keluarga secara individu juga masih memberikan sumbangan bila mempunyai hubungan personal atau kerabat dan tinggal berdekatan dengan rumahnya. Simpati juga ditampilkan oleh warga dengan menghadiri upacara selamatan dari satu hari sampai tujuh hari berturut-turut, kemudian selamatan 40 hari, seratus hari, setahun (*mendak*) sampai dengan 1000 hari.

Upacara daur hidup itu memang sering dinilai memberatkan ekonomi, tetapi menjadi arena bagi warga untuk dikatakan lumrah (wajar) hidup bermasyarakat. Keluarga akan berjuang agar bisa menyelenggarakan upacara tersebut dengan menjual kambing, sapi atau harta benda lainnya. Sementara itu dengan bisa menyelenggarakan upacara selamatan, maka ada rasa membalas budi dan membebaskan beban agama bagi arwah dan keturunannya.

Meskipun sering dikatakan boros, tetapi ada pula yang melihat sisi positifnya yaitu meringankan keluarga korban. Ketika tidak memiliki harta yang memadai, maka sumbangan menjadi bermakna penting untuk memastikan urusan yang berat menjadi ringan. Sumbangan uang dan barang terbukti digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam penyelenggaraan hajatan. Hal tersebut bisa dipahami sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Wardi:

“nggeh pun gowo duit pun mbeto gawan nek ten ler riyen, nek sakniki nggeh mung nggeh nek uwos dinei gulo teh, nopo nek beras tempe nggeh bakmi, arto nggeh onten nek sederek kaleh yotro kaleh gawane niku, mangkeh berase apese ngge sederek nggeh 12 kg, mangkeh gulane 4 kg nopo 5kg duite nggeh apese seketip 100 ribu nek sederek, nek mboten nggeh nggowo beras 8 kg gulo the setitik-setitik mawon, yatrane 50 ribu nopo kirang seko 50 ribu ngoten”

“Kalau dulu di bagian utara, yang sudah membawa uang juga membawa barang, sedangkan sekarang hanya membawa beras diberi gula teh, atau beras tempe atau bakmi, juga ada uang kalau masih saudara. Jadi, ya dua-duanya uang dan barang. Nanti, sejelek jeleknya untuk beras bagi saudara 12 kg, gulanya 4 kg atau 5 kg, uangnya seketip 100ribu. Kalau bukan saudara membawa beras 8 kg gula dan teh sedikit saja, uangnya 50 ribu atau kurang dari 50 ribu,”

Dalam masyarakat Jawa adanya sumbang-menyumbang sering menjadi wacana yang negatif, yaitu menilai bahwa tradisi itu menjadi beban rumah tangga. Meskipun nampaknya berat namun warga tidak menganggapnya sebagai beban. Dalam menjalin hubungan sosial antar warga, hal semacam ini pertama bisa berfungsi untuk menjaga keharmonisan pergaulan antar tetangga. Kedua warga berfikir bahwa suatu saat warga juga akan dibantu ketika mengadakan hajatan yang serupa. Sehingga nampak bahwa prinsip dasar dari aktivitas tolong menolong adalah adanya hubungan timbal balik (resiprositas). Bahkan Pak Marso mengatakan bahwa pernikahan itu:

“Bathi sanak sedulur bathi pangan. Jenenge bathi sanak sedulur sing waune diundangi dadi moro niku rak dadi sedulur jenenge ngrakit paseduluran nggeh ngoteniku. Misale tiyang tebih-tebih nek diundangi ngoten niku jenenge ngraketke paseduluran, kan tetembungane umpomo gampangane wes mantu wes supitan mboten ngulemi niku tegese jenenge mboten ngrakette paseduluran, kan sing ajeng ngraketke masalah paseduluran ngoten niku”

“Untung sanak saudara untung pangan. Namanya untung sanak saudara yang tadinya diundang jadi datang itu, kan jadi sedulur namanya ngrakit persaudaraan ya kayak gitu. Misalnya orang jauh jauh didatangi seperti itu namanya mendekatkan persaudaraan, kan omongannya seumpama gampangannya pernah menikahkan persaudaraan, kan omongannya seperti pernah menikahkan anaknya sudah mengkhitankan anaknya tidak mengundang itu tegasnya namanya bukan mendekatkan persaudaraan, kan yang akan merekatkan masalah persaudaraan itu,”

Tradisi sumbang-menyumbang di lereng Merapi nampaknya memiliki makna yang penting bukan sekedar untuk memperoleh bantuan material tetapi justru untuk memelihara hubungan sosial. Setiap hajatan selalu melibatkan komunitas, dan aktivitas komunitas bukan sumbang menyumbang tetapi silaturahmi, berkumpul bertegur sapa dan ada unsur pesta sehingga menyenangkan semua orang. Oleh karena itu orang Merapi ada yang mengatakan bahwa selain mendapatkan hasil sumbangan berupa uang maupun bahan makanan, mereka juga dikatakan *bathi* (untung) dalam persaudaraan. Kerabat jauh yang datang dalam acara tersebut dapat mengeratkan hubungan persaudaraan. Sedangkan bagi mereka yang memilih hajatan tidak mengundang sanak kerabat malah akan dianggap tidak ingin mengeratkan hubungan persaudaraan.

Pada dasarnya prinsip pemberian bantuan berupa tenaga atau rewang membantu memasak tidak hanya sebatas kerabat dekat saja namun juga tetangga-tetangga sekitar. Namun tidak semua warga yang ada ikut terlibat, hanya warga yang mendapat “jawilan” yang ikut membantu. Jadi tetangga yang tidak mendapat “jawilan” atau tidak dimintai tolong tidak akan datang membantu.

5.4.3 Kerja Bakti

Kerja bakti sering disebut warga dengan istilah gotong-royong tetapi dalam bagian ini dipahami sebagai kerja bakti merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh warga khususnya untuk mengerjakan pekerjaan fisik yang merupakan fasilitas publik seperti jalan, penerangan, sarana MCK dan lainnya.

Kerja bakti merupakan kegiatan komunitas sehingga aktifitas ini bisa mempererat solidaritas komunitas yang bersifat organik. Warga bisa merasakan adanya tali persaudaraan yang kuat ketika mereka saling bertanggungjawab untuk membangun kampungnya. Dengan hadir dalam acara kerja bakti maka warga dianggap sudah memiliki tanggung jawab sosial dan itu yang sering disyaratkan oleh komunitas-komunitas lereng Merapi. Mereka tahu adanya kesibukan setiap orang tetapi harus bersedia untuk kerja bakti demi berbakti untuk kampung halamannya.

Kerja bakti menjadi suatu kegiatan rutin di komunitas yang ujungnya tidak hanya kegiatan yang memerlukan pengerahan tenaga kerja yang besar tetapi yang sederhana karena semangatnya adalah menumbuhkan tanggungjawab sosial. Hal ini nampak di Dusun Bendosari Sleman. Setiap hari Jumat sore ibu-ibu mengadakan arisan kampung dan setelah itu dilanjutkan dengan menyapu dan memberikan jalan yang ada di kampungnya. Kerja bakti menjadi arena menumbuhkan tanggung jawab sosial, hal ini nampak dari adanya sangsi. Orang yang tidak aktif kerja bakti akan dikenai sangsi sosial seperti dipergunjingkan dan dipertanyakan tentang loyalitasnya terhadap komunitas. Mereka tidak diajak untuk kegiatan-kegiatan sosial dan pelibatan dalam program-program pemberdayaan di komunitas perempuan seperti belajar pembuat batik tulis dan mendapatkan akses kredit dari perkumpulan PKK dusun.

Kerja bakti juga sering dipakai sebagai kekuatan bersama warga Merapi untuk menunjukkan kekompakan dan kepedulian sosialnya terhadap pembangunan dan keamanan di daerahnya. Mereka misalnya menerima program pembangunan fisik sekalipun pelaksanaan pembangunan infrastruktur mensyaratkan dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja bakti yang relatif berat. Hal itu mereka lakukan agar kampungnya segera memiliki fasilitas yang memadai sekaligus unjuk gigi keluar bahwa mereka bisa kompak. Hal ini misalnya dilakukan oleh orang Jamuran, di Klaten Jamburejo II, di Magelang, Trono dan Njrakah di Boyolali, dan orang Turgo di Sleman. Orang Jamburejo misalnya tidak memiliki air bersih pasca erupsi, dan mereka kemudian mendapat dana dari JRF. Akan tetapi JRF hanya menyediakan pipa, tetapi warga

justru mendesak agar bantuan segera turun. Warga lalu dengan antusias melakukan program pibanisasi sekalipun harus bekerja setiap hari Minggu dengan memobilisasi seluruh kaum lelaki di dusun.

Di hampir semua dusun, warga juga menunjukkan adanya kerja bakti sebagai kekuatan bersama untuk meunjukkan bahwa mereka hebat daripada pemerintah atau polisi dalam mengatasi masalah misalnya kerusakan jalan, dan kebakaran hutan. Dulu Merapi pernah terbakar sekitar tahun 2000, dan sampai lebih tiga hari api tidak pernah padam. Pemerintah tidak berhasil memadamkan api, tapi hanya mengerahkan tenaga polisi hutan. Akhirnya warga di hampir semua dusun di wilayah KRB turun tangan dan mereka secara kompak melakukan aksi pemandaman api yang berhasil tuntas.

5.4.4 Kegiatan Selamatan Kampung dan Kenduri Keluarga

Hampir setiap dusun mempunyai tradisi menyelenggarakan selamatan seperti bersih dusun yang dikenal juga dengan nama *Rejeban*, selamatan menghormati arwah leluhur (*Sadranan*) dan selamatan memperingati hari besar agama Islam khususnya Maulid Nabi dan selamatan untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia (Agustusan). Selain itu mereka memiliki tradisi selamatan untuk mengantisipasi dan syukuran terkait dengan erupsi Merapi .

Selamatan itu relatif dijaga keberlanjutannya dalam komunitas. Orang Merapi percaya bahwa selamatan sebagai sesuatu yang memiliki kebenaran. Namun dari pelaksanaan selamatan tersebut terkandung upaya warga memelihara solidaritas sosial, kerukunan dan membangun kohesi sosial ketika menghadapi ancaman keretakan sosial.

Bersih dusun umumnya masih dilakukan oleh penduduk di lereng Merapi atas. Acara bersih dusun adalah kenduri bersama di rumah kepala dusun diikuti dengan membersihkan tempat-tempat keramat, sumber mata air. Puncak bersih dusun diisi dengan acara pagelaran wayang kulit. Beberapa dusun yang aktif melakukan acara pagelaran wayang kulit adalah dusun di Boyolali seperti di Dusun Jrasah, Boyolali, Babadan, Magelang dan Kemiricilik, Sleman. Dengan adanya pagelaran ini maka banyak tamu yang datang dari luar dusun dan dusun

menjadi ramai. Untuk memeriahkan acara itu maka warga bahu-membahu memastikan tidak ada masalah. Mereka membentuk kepanitiaan dan menyediakan anggaran. Setiap keluarga memberikan kontribusi. Di Jarakah misalnya setiap keluarga wajib menyediakan dana Rp 30.000,00 yang dipakai untuk menyewa seperangkat gamelan, membayar penabuh gamelan dan dalang serta untuk hidangan konsumsi.

Dalam acara Sadranan, warga juga bekerjasama untuk menjamin acara ini bisa terlaksana dengan hikmat. Acara biasanya dilaksanakan dengan kenduri, setiap keluarga membawa *berkat* tetapi juga ada *ingkung* dan tumpeng yang dibagikan. Keluarga menyediakan dana bersama untuk membeli bahan *tumpeng* dan *ingkung* tersebut.

Acara Sadranan ini menjadi arena yang memepertemukan sanak saduara dan handai taulan. Di beberapa dusun acara dipusatkan di kuburan karena salah satu acara adalah membersihkan makam leluhur dan sanak saudara yang meninggal. Perbedaan agama antar warga bukan menjadi halangan diadakan upacara *Sadranan*. Upacara *Sadranan* umumnya dipimpin modin artinya menggunakan ritual agama Islam Jawa (Koenjaraningrat, 1985). Para pemeluk agama lain bisa hadir dengan membaca doa menurut keyakinannya. Sementara itu di beberapa dusun yang pluralistik, ritual antara pemeluk Islam, katolik atau yang lain bisa dilakukan terpisah, tetapi terorganisir secara kompak. Hal ini terjadi misalnya di Grogol. Setiap kelompok dan kalangan sendiri dan masing-masing berdo'a dengan memakai agama dan keyakinannya. Ada toleransi di antara mereka misalnya tidak berdo'a keras-keras sehingga mengganggu kenyamanan pihak lain dalam melakukan ritual.

Selain sadranan, peringatan Maulid Nabi juga dilakukan oleh warga di tingkat dusun. Ada yang menyelenggarakan dengan memusatkan kegiatan di masjid dan mengundang kyai. Namun, umumnya komunitas dusun menyelenggarakan di kampung dalam bentuk kenduri. Umumnya setiap keluarga membawa *berkat* untuk diberkati dalam doa bersama dan kemudian dibawa pulang untuk dibagi kepada keluarga.

Acara komunitas yang tidak kalah menarik adalah peringatan hari kemerdekaan. Beberapa dusun menyelenggarakan upacara ini. Bahkan ketika penelitian berlangsung, Dusun Grogol malah mengadakan lomba pembuatan tumpeng tujuh belasan sehingga selamat ini lebih nampak sebagai festival daripada ritual keamaan yang khusus.

Selain acara peringatan syukuran kemerdekaan orang Merapi sudah terbiasa mengadakan selamat yang berkaitan dengan erupsi Merapi. Orang Turgo misalnya terus aktif melakukan peringatan erupsi Merapi 24 November 1994 yang menewaskan tidak kurang 60 jiwa. Beberapa keluarga di Stabelan bersama dengan komunitas juga sering mengadakan selamat untuk merespon *wisik* atau tanda-tanda tentang adanya kemungkinan Merapi meletus dan menimpa kampungnya. Menurut cerita lokal, beberapa orang sering mimpi atau mendapat wisik harus mengadakan selamat atas perintah penguasa gaib Merapi. Dari mimpi dan *wisik* itu kemudian diteruskan ke komunitas dan komunitas meresponnya dengan mengadakan selamat.

Pasca erupsi warga juga aktif melakukan syukuran. Semua dusun di lereng Merapi pasca erupsi 2010 mengadakan syukuran. Ada beberapa dusun yang cukup mengadakan syukuran dalam bentuk kenduri bersama dan ada pula yang sampai mengadakan hajatan pagelaran wayang kulit seperti yang dilakukan oleh orang Dusun Turgo dan tetangganya sebagaimana telah diungkapkan di muka.

Semua aktivitas selamat komunitas di atas mengungkapkan betapa pentingnya aktivitas itu untuk memperteguh kebersamaan, kesamaan nasib di lereng Merapi. Simbol nenek moyang, leluhur, gunung Merapi dan berbagai peristiwa gaib yang dialami menjadi arena bagi orang Merapi untuk saling bersatu padu dan tolong menolong.

Selain melalui selamat di tingkat komunitas, sodidaritas antar warga juga dibangun melalui selamat di tingkat keluarga. Kenduri di tingkat keluarga merupakan kegiatan yang tidak bisa dilepaskan dari warga Merapi pada umumnya. Di Kinahrejo, misalnya kenduri ini dilaksanakan dalam berbagai upacara, diantaranya upacara yang berkaitan dengan daur hidup mulai dari kelahiran, masa kanak-kanak, dewasa hingga meninggal dunia. Salah satu contoh

kegiatan kenduri yang dilakukan masyarakat adalah kenduri dalam upacara kematian. Kematian ini akan terus diperingati mulai dari satu hari, tiga hari, tujuh hari, 40 hari, 100 hari hingga 1000 hari. Setiap peringatan kematian biasanya disertai dengan rangkaian kegiatan kenduri dan tahlilan.

Berbeda dengan yang ada saat ini, dahulu tahlilan dan kenduri dilaksanakan bergantian namun saat ini untuk mempersingkat waktu, masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok. Golongan muda biasanya mengikuti kegiatan tahlilan sedangkan golongan tua mengikuti kenduri. Sehingga rangkaian acara tahlilan dan kenduri yang tadinya selesai dalam waktu satu jam lebih, kini bisa selesai dalam waktu 30 menit saja.

Cara penyajian menu dalam upacara ini juga nampaknya lebih sederhana dibandingkan ketika masih di atas, mereka memasak untuk *besek* dan sesajian sedangkan makanan yang akan disantap oleh orang yang akan hadir dalam upacara tersebut dipesankan dari katering.

Selain dilaksanakan pada upacara yang berkaitan dengan daur hidup, kenduri juga dilaksanakan dalam rangka sebagai ungkapan rasa syukur dan juga permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya warga dijauhkan dari mara bahaya. Hal tersebut terwujud dalam tradisi bersih sungai (*dadan kali*) yang dilaksanakan satu tahun sekali, tradisi bersih dusun, peringatan hari Suro, Ruwahan, Lebaran, 17 Agustus.

Biasanya masing-masing warga akan memasak untuk acara yang sifatnya komunal ini. Makanan berupa nasi lauk-pauk, jajanan pasar beserta *ubo rampenya* akan dibawa ke tempat yang telah disepakati bersama seperti balai dusun. Namun karena warga Pelemsari belum memiliki balai dusun maka kenduri ini dilaksanakan di rumah pak RT dan pak RW.

Tidak dapat dipungkiri pembiayaan kegiatan kenduri ini memang cukup besar, masing-masing keluarga harus mengeluarkan biaya hingga ratusan ribu untuk membuat *ubo rampe* kenduri ini. Namun pola ini berubah ketika mereka berada di *shelter*, setiap rumah tangga tidak lagi memasak untuk kegiatan kenduri ini namun mereka memasak bersama-sama. Pembiayaannya tidak lagi secara pribadi namun dilakukan dengan iuran. Masing-masing KK iuran

sekitar Rp 15.000,00-Rp 25.0000,00 sesuai dengan kebutuhan. Uang yang terkumpul tersebut kemudian di belanjakan untuk membeli kebutuhan kenduri. Biasanya warga memasak di *shelter* milik ketua RT setempat. Pola baru semacam ini nampaknya memang lebih menghemat pembiayaan dan juga waktu.

5.4.5 Harmoni dan Konflik Sosial

Kuatnya solidaritas komunitas sebagai elemen penting dalam mewujudkan keberhasilan beradaptasi dengan lingkungan ekologi dan ekonomi mendorong masyarakat memahami konflik sebagai ancaman yang harus ditekan. Dalam kenyataannya orang Merapi tidak bisa selalu menekan adanya konflik. Tampak upaya menjaga keharmonisan dan keselarasan hidup bermasyarakat, sehingga seringkali konflik dikemas secara tertutup. Hal ini sejalan dengan ungkapan “rukun agawe santosa, crah agawe bubrah” yang mencerminkan bahwa *crah* atau konflik adalah hal yang tidak baik. Untuk itu nilai “tepa selira” atau menghargai perasaan orang lain yang juga menjadi bagian dari sistem nilai pada budaya Jawa dikedepankan dalam mengelola konflik yang terjadi.

Pembahasan tentang konflik sosial pada masyarakat yang bermukim di lereng Merapi akan dimulai dengan identifikasi tema konflik. Di sini isu-isu yang dapat menimbulkan konflik sosial yang cukup kuat, seperti perebutan sumber daya (ekonomi), politik, dan persoalan-persoalan sosial yang lain akan dipaparkan. Hal lain yang cukup penting dibahas dalam bagian ini adalah aktor atau siapa yang terlibat dalam konflik yang terjadi. Selanjutnya adalah bagaimana komunitas tersebut melakukan pengelolaan terhadap potensi konflik yang ada dan upaya untuk mengatasi konflik yang terjadi.

Uraian berikut ini merupakan berbagai konflik di tingkat keluarga dan masyarakat dan menegaskan bahwa konflik terkait dengan adanya ancaman luntarnya solidaritas horisontal yang bersifat komunalistik.

Pertama adalah konflik terjadi di tingkat keluarga atau rumah tangga. Isu konflik yang sering mencuat adalah seputar pembagian, baik berupa warisan maupun pekerjaan antara anggota keluarga. Warisan lazimnya dibagikan setelah orang tua meninggal. Tetapi hal ini ternyata tidak dilakukan oleh orang Merapi

karena dianggap berpotensi konflik. Sebagai contoh adalah terjadinya konflik pada sebuah keluarga di Dusun Jamuran. Sebelum orang tua meninggal, ternyata status lokasi, batas, dan besaran tanah waris belum dibicarakan, akibatnya anak-anak bersitegang dalam pembagian waris tersebut. Konflik yang berakar dari masalah waris juga ditemukan di Dusun Kaligentong dan Dusun Grinting yaitu dalam bentuk perusakan tanaman pertanian dan memindahkan pagar di lahan. Perselisihan ini memerlukan pihak ketiga dalam mencari upaya penyelesaiannya. Bayan bahkan Kepolisian turut terlibat untuk mendamaikannya

Sementara konflik tertutup yang terjadi dalam keluarga adalah antara anak menantu dengan mertua seperti yang dialami oleh Sur terhadap ibu mertuanya. Sejak suaminya meninggal, ia tinggal dengan ibu mertuanya. Menurut Sur, ibu mertuanya malas, tidak mau membersihkan rumah. Sementara Sur mendengar dari tetangganya bahwa Sur dicurigai membawa pulang beras jatah bantuan ke kampung halamannya yang terletak di luar kabupaten. Sur tidak suka apabila mertuanya sering membicarakan dirinya di depan tetangga-tetangganya. Padahal dia berharap ketika ada masalah lebih baik dibicarakan secara langsung dari pada dibicarakan di belakang. Namun, sikap demikian merupakan karakteristik masyarakat Jawa, ketika terjadi pertentangan orang tersebut tidak akan menyatakan secara langsung. Akan tetapi lebih baik dipendam dalam hati atau membicarakan di belakang. Hal ini meskipun dilakukan dalam rangka menjaga keharmonisan dengan orang yang bersangkutan, namun dengan membicarakan di belakang justru menimbulkan konflik baru.

Konflik dalam rumah tangga juga berkaitan dengan ketidakseimbangan beban kerja antara suami dengan istri. Dalam rumah tangga petani di Merapi, sudah lazim suami istri berkerja keras sepanjang hari, sehingga kalau ada yang malas-malas akan dipergunjingkan.

Pemicu terjadinya konflik dalam komunitas adalah masalah bantuan. Hal ini dirasakan betul oleh Kadus Grogol. Bencana erupsi telah menimbulkan bencana sosial akibat datangnya bantuan yang melimpah. Pada awalnya bantuan seperti sembako memang sangat dibutuhkan, terutama pada saat berada dipengungsian. Dengan banyaknya bantuan itu, ternyata juga mempunyai dampak

yang tidak baik terhadap mental warga. Semuanya menjadi berbeda, lebih egois dan “mental ngarep bantuan”. Pada saat itu semua menjadi saling mencurigai, misalnya ada orang yang tak dikenal atau ada mobil memakai plat luar kota masuk, para warga langsung berfikir bahwa ada bantuan masuk. Belum lagi kalau ada bantuan yang jumlahnya sedikit dan tidak merata, hal itu memancing kecemburuan antar warga “nggonku kok sithik, nggonku kok ra entuk... lak nggih ngisin isini to mas” (punyaku sedikit, punyaku tidak dapat -bantuan...memalukan to mas). “*Nek masalah keagamaan kui rapati masalah, ning nek dadi masalah nek ada kelompok kelompok ekonomi*” (kalau masalah agama itu tidak ada masalah, tapi masalah ada kalau ada kelompok kelompok ekonomi). Pada masa erupsi kemarin, Pak Mangku memandang kalau bantuan banguan yang ada malah memicu permasalahan, sifat manusia menjadi berubah “*kabeh pengen di haki dhewe*” (semua ingin dimiliki sendiri), *gampang serik karo liyan* (gampang iri terhadap orang lain). Bahkan sampai dalam musyawarahpun sudah “ngelompok- ngelompok sendiri”, hal itu disebabkan komunikasi yang tidak baik. Seperti contoh adanya bantuan dari pemerintah ataupun yang lain hanya dimiliki oleh jaringan kelompok tertentu, namun tidak diumumkan kepada keseluruhan warga, “mungkin ben bantuane dipek dhewe” (biar bantuannya dimiliki sendiri).

Namun demikian, pada dasarnya warga terutama pada aparat desa atau dusun dan juga panitia pendistribusi bantuan menyadari bahwa bantuan berpotensi konflik. Tidak seimbangannya jumlah bantuan dan jumlah warga yang akan dibantu membuat para kadus dan juga warga berstrategi agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Kalau ada bantuan untuk orang Merapi, maka warga selalu berharap bantuan itu diberikan secara merata tidak membedakan agama, kelas sosial dan jaringannya. Orang Merapi enggan bantuan yang masuk kemudian memecah belah keluarga karena ada keluarga Islam dan Katholik yang serumah atau sekerabat sementara bantuan sering diwarnai dengan identitas keagamaan. Konflik dalam keluarga dan bantuan kemanusiaan pada masa erupsi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menghendaki adanya kesetaraan dalam menjalankan kehidupan bersama dalam keluarga, dan menerima bantuan. Konflik

itu menunjukkan juga bahwa orang Merapi sebenarnya masih kuat ikatan komunalistiknya sehingga tidak dibenarkan adanya individu yang mendapatkan keuntungan secara sepihak. Pergunjungan menjadi awal indikator terjadinya konflik. Pada suatu saat konflik tertutup ini berpotensi menjadi konflik terbuka. Hal ini tampak pada kasus di Bronggang, ketika kadus setempat dicurigai menggelapkan dana bantuan karena adanya perubahan gaya hidup pasca erupsi Merapi, Masyarakat hanya mampu bergunjing atas perbuatan kadusnya. Puncak dari konflik terjadi ketika diadakannya pertemuan dusun yang mendesak kepala dusun untuk turun, selain itu dari pihak pemerintah desa dan kecamatan juga mendesak kepala dusun untuk segera membuat surat pengunduran diri. Surat itu diserahkan di kantor desa dua hari setelah diadakannya pertemuan dusun. Sejak saat itu kepala dusun tidak mau tahu dengan segala tanggung jawab sebagai kepala dusun sebagai ungkapan ‘ini balasan dari sikap tidak tahu terima kasih kalian’.

Kuatnya ikatan komunalistik dapat dilihat dari adanya konflik antar warga. Konflik tidak pernah terlepas dari suatu masyarakat, yang membedakan adalah bahwa konflik dalam masyarakat Jawa merupakan konflik yang bersifat laten. Tidak pernah muncul kepermukaan, hal ini dilakukan demi menjaga keharmonisan antar warga. Salah satu bentuk konflik terkait dengan pemerataan bantuan juga tersirat dari penuturan salah seorang warga Pelemsari mengenai penggunaan sepeda motor jenis trail yang seharusnya dipakai untuk urusan komunitas tetapi kemudian untuk urusan pribadi terutama pihak yang mengurus sepeda motor tersebut. Warga kecewa tetapi kekecewaannya tidak dilampiaskan secara terbuka di forum atau kepada orang yang mengurus sepeda motor tersebut

Konflik bantuan itu terjadi karena motor *trail* merupakan bantuan yang digunakan untuk kepentingan bersama namun nampaknya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga seharusnya manfaatnya bisa diterima oleh semua orang, ini hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu saja. Tidak hanya itu, permasalahan juga muncul terhadap bantuan yang lain seperti bantuan KUBe, bantuan anak, kambing, dan uang. Meskipun mereka mengatakan bantuan tersebut diberikan secara merata namun kenyataannya hanya beberapa orang tertentu saja

yang mendapatkan. Bahkan ada indikasi bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan bantuan tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kecemburuan antar warga.

Bentuk pemicu konflik orang Merapi lainnya terkait dengan persoalan akses terhadap sumber daya alam. Sebelum erupsi, masalah rencana penambangan pasir di kadus II Kujon memanas. Pihak pengembang *bego*-an sudah mendapat ijin dari pemilik tanah, tapi ijin ditingkat desa dan kecamatan tidak turun karena sebagian besar warga Desa Wonodoyo menolak. Meskipun sudah mengantongi ijin dari kabupaten dan ESDM, pihak pengembang belum mendapatkan ijin dari kecamatan dan desa, agar memperlancar usahanya mereka sebenarnya sudah berusaha menyuap kepala desa dan camat tapi tidak berhasil. Sebagai usaha tandingan, pihak dusun dan desa melakukan permohonan ke kabupaten dan ESDM agar ijin penambangan itu dicabut. Marsono dan enam orang lainnya yang didelegasikan untuk kegiatan itu. *“Inggih niku mas marai kaitane sanese niku, inggih bener niku neng ndek e warga, ndek e pribadi, inggih mboten ganggu tapi nek dipikir masalah fasilitase dalan lek dadi mganggu le gawe rusak. Sanese niku khan mriki niku lak sikile gunung dientekke, diduduk jeru niku inggih sumber resapane wong ngisor-ngisor. Nek mriki diilangi, wong ngisor bade mangan gampangane banyu mawon soko ngendi? dadi wong mriki mboten mikir masyarakate kene tapi wong ngisor barang. Wong daerah Cepogo (dan) Musuk yo melu dukung sak kulo sak konco niku”* (iya itu mas, membuat berkaitan satu sama lain. Iya benar, itu milik warga, milik pribadi, yang tidak mengganggu tapi kalau dipikir masalah fasilitas jalan kalau jadi ya mengganggu. Selain itu di sini merupakan kaki gunung dihabiskan, digali dalam, itu ya sumber resapan orang-orang di bawah, kalau di sini dihilangkan, orang bawah mau makan misalnya air saja darimana? Jadi orang di sini tidak berpikiran hanya masyarakat kami tetapi juga masyarakat di bawah. Orang daerah Cepogo dan Musuk ikut mendukung saya dan teman-teman). Keputusan akhir dari masalah ini adalah penambangan pasir dengan *bego* dicabut dan dibatalkan.

Persoalan terkait dengan penambangan pasir juga dialami di Bronggang. Pembukaan depo *bego* di dusun ini juga membawa perselisihan. Truk-truk harus

melewati jalan dusun untuk menuju depo *bego* yang dikelola oleh kepala dusun setempat. Akibatnya jalan dusun di sebelah timur rusak berat. Tidak hanya itu, para warga yang tinggal di sepanjang jalan itu merasa resah karena gangguan bising akibat suara truk, ancaman truk menabrak rumah atau pagarnya dan debu. Puncak keresahan itu ditandai dengan memindahkan batu yang berada di pinggir jalan untuk membatasi pekarangan dan jalan, lebih ke tengah jalan. Hal ini membuat geram orang yang menjaga portal pasir karena mendapat keluhan dari para sopir. Penjaga portal itu mendatangi orang yang memindahkan batu dan terjadi *cekcok*. Orang yang bekerja di Kali Gendol, baik pencari pasir atau pedagang makanan di kali, mendukung tindakan si penjaga portal karena tindakan ‘memindahkan batu’ itu dianggap menghalangi mereka untuk mencari uang. Pendapat berbeda dilontarkan oleh mereka yang tidak bekerja di Kali Gendol, truk-truk yang masuk ke dusun mereka hanya membawa kerusakan jalan, merusak paralon air, membawa debu dan bising. Meskipun ada janji dari pengurus dusun untuk segera memperbaiki jalan itu, dengan uang pungutan di portal sebesar Rp 5.000/truk, tetapi realisasinya tidak juga berjalan padahal aspal sudah benar-benar hancur.

Sebelum erupsi masyarakat sebenarnya juga sudah memiliki kecurigaan terhadap program pemerintah karena konflik dengan orang luar diikuti dengan konflik internal yang memecah belah solidaritas komunitasnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya konflik di Kaliurang Utara seperti yang diceritakan oleh Hadiyanto dan Sukardi. Konflik ini diawali dari adanya ketidaksetujuan warga atas pembangunan subdam di Kali Bebeng oleh pemerintah sebelum erupsi 2010. Masyarakat khawatir apabila pembangunan sub dam yang menggunakan gerigi akan menyebabkan luapan yang mengarah ke pemukiman warga karena gerigi tersebut akan menahan material berupa batu besar. “*Warga kene ki nganti demo bola-bali mas, bukane arep rusuh tapi wedine banjire neng omahe warga*”, kata Sukardi. Untungnya sekarang sudah ada penyelesaian dari konflik tersebut yaitu, pembangunan sabo dam oleh kontraktor dari WIKA tanpa gerigi. Selain masalah masalah sabo dam, Bu Hadiyanto bercerita kalau bekas Desa Brubuhan juga sempat dipermasalahkan. Oleh pihak dusun tanah itu dijual tetapi

beberapa warga sini menentangnya. Mereka yang tidak setuju tanah itu dijual berpendapat kalau alangkah baiknya apabila tanah itu dijadikan hutan dan warga desa ini bisa mengambil apa saja yang tumbuh di situ tanpa menebang pohonnya.

Orang Merapi bahkan kurang percaya terhadap sejumlah wartawan dari beberapa media. Mereka aktif meliput tentang perkembangan erupsi dan pengungsian tetapi kurang sesuai dengan fakta. Ketika mereka diwawacarai, warga sudah memberikan informasi sebaik mungkin tetapi berita yang dikeluarkan tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan. Suwaji warga Turgo misalnya enggan diwawancarai lagi oleh wartawan soal keengganan warga direlokasi pada tahun 1994. Ia sudah sering mengatakan bahwa kebanyakan warga punya berbagai alasan enggan direlokasi, tetapi berita yang menonjol justru program pemerintah melakukan relokasi dan transmigrasi. Pada erupsi 2010 warga juga sering kurang suka dengan datangnya pendatang yang terkesan menjadi agen pemerintah atau para pihak yang ujungnya mereka diminta untuk pindah, transmigrasi atau mengikuti program pemerintah tanpa mendengarkan aspirasinya. Hal ini menunjukkan bahwa kecurigaan warga begitu tinggi terhadap orang-orang luar yang diduga mengancam keberadaan mereka di Merapi.

5.4.6 Rangkuman

Orang Merapi memiliki solidaritas komunitas yang relatif tinggi. Secara empirik solidaritas yang tinggi ini muncul sebagai konsekuensi dari adanya kebutuhan bersama antar warganya dalam mewujudkan komunitas yang adaptif dengan tekno lingkungannya. Adapun teknologi untuk adaptasi sistem pertanian multikropping, sehingga memerlukan kerjasama yang kompak antar masyarakat agar kegiatan pertanian yang intensif tersebut bisa berjalan.

Ikatan sosial yang semakin penting manakala mereka menghadapi ancaman-ancaman erupsi yang bisa memecah belah dan menghancurkan entitas mereka sebagai suatu komunitas. Oleh karena itu mereka selalu merasa terancam oleh adanya konflik sosial yang melawan semangat kebersamaan antar warga dalam menjalin hubungan kesetaraan dan kekompakan.

Mengingat pentingnya makna kebersamaan dalam komunitas maka dalam penanggulangan bencana nampaknya orang Merapi lebih memilih suatu mekanisme pengorganisasian masyarakat yang mengedepankan solidaritas horisontal daripada suatu intervensi program yang bias elit, kelas dan gender. Dengan menggunakan solidaritas horisontal maka penanggulangan bencana tetap memelihara komunitas sehingga akan direspon positif oleh paraarganya.

5.5 Relasi Gender

Relasi gender merupakan bahasan yang tidak kalah penting untuk memahami tentang karakteristik komunitas di lereng Merapi. Bahasan di muka sudah menunjukkan bahwa komunitas di lereng Merapi memiliki keunikan, seperti relatif egaliter, struktur sosial tidak terstratifikasi dan segregasi tajam berdasarkan kelas sosial ekonomi, dan solidaritas horisontalarganya relatif tinggi. Bahasan berikut juga akan memperlihatkan bahwa pada dasarnya relasi gender relatif setara. Pola kesetaraan tersebut akan diperlihatkan dalam bahasan di sini dengan menyimak tentang kehidupan perempuan dalam rumah tangga dan komunitas.

Sekalipun relatif setara, deskripsi di bawah ini juga memperlihatkan dinamika aspek gender terkait dengan keberagaman sumber nafkah rumah tangga dan perempuan. Tulisan sub bab berikut difokuskan pada (a) pola relasi gender dalam rumah tangga; (b) alokasi kerja dan (c) pola relasi gender dalam masyarakat, serta peran perempuan dalam agenda penanggulangan bencana.

5.5.1 Relasi Gender dalam Rumah Tangga

Aspek ketergantungan ekonomi dan posisi tawar terhadap pasangan merupakan faktor penting yang mempengaruhi dinamika keluarga (Heckert, Nowak, dan Synder, 1998:702). Hal yang sama diungkapkan oleh Jurgen (2004:2). Kehidupan rumah tangga merupakan kehidupan sosial primer yang menentukan kesetaraan posisi dan peran perempuan. Walaupun demikian, pola produksi yang berpusat pada rumah tangga juga bisa menentukan

posisi dan peran lelaki atau pun perempuan. Pola produksi di lereng Merapi yang berbasis pada ekonomi primer membuka ruang bagi lelaki dan perempuan untuk menempati posisi dan peran yang relatif setara. Hal ini karena pola produksi itu lebih mengandalkan pada kekuatan fisik daripada modal dan mengandalkan pada kerjasama dan partisipasi yang tinggi untuk mencapai kesejahteraan daripada saling menguasai. Hal tersebut tampak dalam studi ini pada dusun-dusun di lereng atas yang ekonominya berbasis pada pengelolaan sumberdaya alam, terutama tanah, dan ternak yang merupakan aset penting yang dicari dan dibutuhkan keluarga agar bisa *survive* dan berkembang ekonominya. Oleh karena itu, dalam menyimak tentang posisi dan peran perempuan dalam rumah tangga, studi ini memperhatikan pola penguasaan sumber daya dan pendapatan keluarga, alokasi kerja sebagai pijakan awal untuk memahami aspek kesetaraan gender. Baru pada bahasan berikutnya, tulisan ini akan menyimak tentang berapa aspek dari otonomi perempuan (Jejeebhoy, 1995). Aspek yang terakhir sebenarnya juga menunjukkan tentang pola penguasaan sumber daya, tetapi yang ditegaskan dalam bahasan di sini adalah pada sistem kepemilikan pewarisan dan pemanfaatan kekayaan.

5.5.2 Penguasaan Aset dan Pendapatan

Sama seperti keluarga di Jawa, orang Merapi mengakui kekayaan perempuan. Dalam keluarga Jawa dikenal harta waris untuk perempuan. Ada pandangan perempuan dan lelaki mendapat waris sepikul segendongan artinya perempuan hanya mendapat jatah separohnya. Namun demikian di Lereng Merapi, sekalipun tidak dilakukan survai, secara kualitatif tidak ada standar baku bahwa lelaki memperoleh bagian dua kali lipat dibandingkan perempuan. Bahkan terdapat bukti bahwa perempuan pun mempunyai peran yang sama dengan lelaki dalam tugas-tugas bercocoktanam dan memelihara ternak sapi dan dengan adanya tugas ini lelaki dan perempuan menjadi tidak dibedakan secara kaku dalam mendapatkan hak waris sebagai aset penting bagi keluarga dan kehidupan keluarga di masyarakat.

Akses perempuan mendapatkan hak waris yang relatif sebanding dan tidak dibedakan dengan lelaki memungkinkan perempuan mempunyai tanah dan rumah dan adat menetap setelah kawin adalah bersifat uxori-lokal, artinya lelaki tinggal di rumah istri. Di Turgo adat itu dapat dijumpai. Misalnya keluarga Torejo, Darmo, Sumi, dan Sudirjo. Keluarga ini mempraktikkan uxori-lokal karena istrilah yang memiliki tanah luas terutama pekarangan untuk tempat tinggal.

Ketika keluarga Torejo, Dasmu, Sumi dan Sudirejo itu mempunyai anak, maka mereka mempunyai tindakan yang beragam dalam menempatkan. Anak Torejo satu orang yaitu Ngatirah, dan suami Ngatirah ikut Ngatirah di hari tuanya. Darmo memiliki anak Dasri (lelaki), tetapi Dasri ikut istrinya sekalipun Dasri anak tunggal. Adapun anak Sumi ada dua orang lelaki dan dua orang perempuan, dan rumah diberikan kepada anak lelakinya, sedangkan anak perempuannya diberi pekarangan. Sumiati anak perempuan Sumi lalu mengajak suaminya membangun rumah di pekarangannya. Adapun anak Sudirjo semuanya lelaki dan karena kaya maka menantunya dibawa anaknya dengan membangun rumah baru di pekarangannya.

Cerita tentang adat uxori-lokal tersebut memberi makna bahwa perempuan bisa lebih mempunyai otoritas dalam rumah tangga karena mereka ini tinggal di rumahnya. Istilah Jawa bisa *nundung* (mengusir) bila suaminya itu tidak sepaham dengan dirinya, kawin lagi atau melakukan perbuatan tercela dengan dirinya dan orang tuanya. Dengan memiliki warisan rumah dan tempat tinggal ia bisa tetap berada di lingkungan kerabatnya sehingga suaminya lebih dekat dengan jaringan kerabatnya. Oleh karena itu tepat apa yang ditemukan Hilderd Geertz bahwa ciri keluarga Jawa adalah matriloal dan ciri tersebut dalam studi ini kiranya berkaitan dengan adanya kuasa perempuan atas warisan tanah dan pekarangan.

Posisi yang kuat atas aset rumah dan pekarangan diikuti dengan adanya kuasa untuk memegang hak atas harta pencarian keluarga (gono-gini) dan memiliki hak atas ternak yang dipelihara. Di Merapi hak ini diberikan orang tua kepada anak lelaki atau perempuan yang sering mencurahkan tenaganya untuk mencarikan rumput. Anak akan diberi bagian mirip dengan orang lain yang

menggaduh ternak. Anak kadang bisa menawar “*pak atau ibu sapi itu saya pelihara ya*”, dan permintaan itu artinya anak akan mengurus penuh dan bisa diberi bagian atas keuntungan yang diperoleh.

Karena menguasai aset tanah, rumah dan ternak menjadi tren di lereng Merapi sehingga mereka bisa menjadi sangat kuat posisinya dalam rumah tangga. Data etnografi di beberapa dusun menunjukkan bahwa dalam situasi normal, peran dan tanggungjawab kaum laki-laki dan perempuan dewasa dalam rumah tangga juga tidak jauh berbeda. Lelaki mencangkul sampai dengan memanen dan mengangkat hasil bumi ke rumah, perempuan juga melakukan pekerjaan serupa. Hanya dalam kasus membajak perempuan tidak dilibatkan dalam pekerjaan ini, dan mencangkul cenderung dilakukan pria, tetapi secara umum pekerjaan tani tetap melibatkan perempuan.

Aktivitas kehidupan keseharian antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan keseharian dan rumah tangga dilakukan secara bersama tanpa menunjukkan adanya sekat-sekat yang membedakan derajat tanggungjawab. Peneliti mencatat bahwa pekerjaan harian seperti mencangkul lahan pertanian, membersihkan harian seperti mencangkul lahan pertanian, membersihkan lahan, mencari rumput untuk pakan ternak, membersihkan kandang ternak, dan pemerah susu sapi selalu dilakukan bersama-sama antara suami istri, laki-laki dan perempuan. Dalam hal pengambilan keputusan, baru muncul adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, perempuan juga berperanan dalam pengambilan keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebutuhan harian keluarganya. Deskripsi ini memperkuat pola umum sebagaimana dijelaskan dalam bagan.

Dalam alokasi pendapatan keluarga di sektor pertanian, peternakan, perdagangan dan jasa pada umumnya perempuan berhak untuk menentukan alokasi pendapatan keluarga tersebut untuk kepentingan *saving*, pendidikan, investasi dan keperluan rekreatif. Namun pengambilan keputusan ini tetap dalam koridor kontrol pasangan. Hanya dalam hal yang berkaitan dengan masalah hubungan kemasyarakatan yakni yang berkaitan dengan kegiatan administrasi, kegiatan anak-anak (seperti posyandu, PKK dan pendidikan PAUD) dan kegiatan

protokol atau seremonial di dalam masyarakat perempuan memiliki kebebasan pengambilan keputusan.

Apabila mencermati pola-pola pengelolaan perekonomian dalam rumah tangga di dusun-dusun sasaran penelitian, pada dasarnya terdapat variasi yang cukup tinggi. Sebagai contoh adalah apa yang terjadi pada masyarakat Dusun Kaliurang Utara. Posisi dan peran perempuan dalam kehidupan rumah tangga bisa dikatakan sebagai *pedaringan* atau tempat menyimpan uang. Contoh kasus adalah keluarga Sukardi. Keluarga ini mengambil strategi pengelolaan segala pendapatan dari suami diserahkan kepada istri untuk dikelola untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti untuk makan, pendidikan, sosial dan sebagainya. Meskipun demikian untuk memutuskan bentuk investasi, tabungan dan konsumsi yang bernilai besar suami yang memegang peranan utama. Misalnya keputusan untuk membeli tanah, suami yang memutuskan mulai dari lokasi yang dipilih hingga yang melakukan transaksi jual beli. Begitu pula untuk urusan jual dan beli sapi, suami yang memutuskan kapan sapi-sapi itu bisa dijual, dan kapan sapi dewasa ditukar dengan sapi anakan. Tetapi untuk kegiatan perawatan dilakukan secara bergantian, suami dan istri bersama-sama atau bergantian mencari rumput dan membersihkan kandang sapi. Terkait dengan kegiatan ekonomi salak, perempuan lebih banyak memiliki peran sebagai tukang *unduh* atau panen, melakukan *paketan* atau menata salak dalam krat-krat dan penjualan salak yang dihimpun dalam Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Sedangkan untuk *natahi* atau membuang anakan pohon salak, memilih dan membeli bunga jantan di pasar dilakukan oleh suami.

Dalam sebagai besar rumahtangga di Kaliurang Utara, posisi dan peran perempuan dalam rumah tangga adalah sebagai pihak yang menyimpan uang. Segala pendapatan dari suami setiap hari diserahkan kepada istri lalu istri menggunakannya untuk kebutuhan makan, pendidikan, sosial dan sebagainya. Sedangkan suami hanya membawa sejumlah uang untuk membeli rokok dan bensin. Seperti yang dituturkan oleh pak Sukardi, “*wingi kulo nyade sapi duite songo yuta kulo serahne teng bojo mas, nyoh bu iki arep mbok nggo opo wae terserah (Kemarin saya menjual sapi uangnya Sembilan juta saya serahkan ke istri*

saya, nih bu, ini mau kamu pakai untuk apa terserah)". Meskipun pihak istri yang memegang uang tetapi untuk urusan yang bersifat vital seperti masalah investasi dan konsumsi yang bernilai besar suami yang memutuskan dan menentukan kapan sapi mereka dijual, kapan ikut arisan motor, bank mana yang dipilih untuk menabung dan sekolah mana yang dipilih untuk anak mereka. "*Jadi istri di rumah tidak ubahnya sebagai 'pedaringan', tempat menghimpun uang yang didapat oleh suami*", kata Pak Hadiyanto.

Di Dusun Turgo, terlalu sulit untuk menentukan siapa pengambil keputusan dalam alokasi pendapatan sebab antara laki laki dengan perempuan mempunyai fungsi dan peran yang sama dalam pengambilan keputusan dalam alokasi dan pendapatan. Untuk pendapatan yang berasal dari hasil ternak sapi perah, khususnya sapi yang dijual secara rutin harian melalui pengurus kelompok sapi, dan hasilnya mereka terima secara bulanan maka pemanfaatan atau pengelolaan pendapatan biasanya akan diserahkan pada kaum perempuan. Sementara itu, untuk pendapatan dari hasil sayur mayur skala kecil yang biasanya dijual oleh kaum perempuan juga akan dikelola oleh kaum perempuan. Untuk pendapatan yang berasal dari hasil menjual ternak atau pepohonan, alokasi pendapatan biasanya dikelola bersama, walaupun transaksi jual beli ternak atau pepohonan yang akan ditebang biasanya dipercayakan pada kaum laki-laki. Peran laki-laki nampak lebih dominan dibandingkan dengan perempuan terutama dalam bidang kemasyarakatan. Seperti yang diungkapkan bu Siti dari Kinahrejo berikut:

Nggeh, tergantung mereka yang laki-laki. Nek sing perempuan kan nek diceluk iki ayo ngene yo ayo, kalau ga kan nggak mungkin kan mbak kita menyodorkan diri nggak mungkin to. Nek misale TPA kadang-kadang kulo. Dadi onten bantuan buku napa-napa nggeh peralatan masjid, peralatan TPA niku memang diterjungan ke saya ngoten. Mangkeh kerjasama kaleh pak dukuh, mangkeh nek pak dukuh bahas iki, oo nggeh baru. Kalau saya sendiri pribadi ga berani tapi nek dipanggil baru, tapi kalu ga saya ga berani. Tapi kan ga mudah to mbak urusan seperti itu. Kita terjun ya kalau kita diterima sama mereka-mereka, kalu nggak mending ngurusi yang lain to.

Dari kasus yang terjadi di Dusun Kaliurang Utara, tampak bahwa pilihan komoditas mempengaruhi pola segregasi sosial dalam masyarakat, khususnya

terkait dengan posisi perempuan dalam pengelolaan perekonomian rumahtangga dan usaha. Dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga pertanian salak di Dusun Kaliurang Utara, dalam kegiatan produksi perempuan lebih banyak memiliki peran sebagai tukang *unduh* atau panen, *paketan* atau menata salak dalam krat-krat dan penjualan salak yang dihimpun dalam GAPOKTAN sehingga pemasukan keluarga dari salak lewat perempuan. “*kulo mboten retos mas, soale niku seng ngurusi tiyang setri*” begitu kata Pak Sukardi waktu ditanya tentang penghasilan salak miliknya dan pengelolaan kelompok tani. Sedangkan untuk *natahi* atau membuang anakan pohon salak, memilih dan membeli bunga jantan di pasar dilakukan oleh suami.

Pendapatan salak keluarga Sukardi biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk kebutuhan pendidikan, sosial dan untuk ditabung. Untuk kebutuhan makan dan transportasi sehari-hari ditutup dari pendapatan Pak Sukardi dari menjaga portal pasir di depan gapura dusun sebesar Rp 50.000,00 per hari dan hasil dari mencari pasir sehari Rp 50.000,00 per hari (dengan catatan, ketika dia tidak merasa malas bekerja). Pendapatan Rp 100.000,00 per hari itu cukup untuk membeli lauk, membeli bensin dan untuk uang jajan anak. Pendapatan dari salak minimal sebesar Rp 1.000.000,00 per bulan digunakan untuk arisan motor sebesar Rp 350.000,00 per bulan, untuk dana sosial (*nyumbang* nikahan, supitan dan kematian, dan untuk iuran perkumpulan) dan sisanya untuk ditabung di Bank BRI dan Bank Ayu. Tetapi setelah erupsi, pendapatan dari salak sudah tidak bisa diandalkan. Jadi keluarga itu harus menggantungkan pendapatan dari menjaga portal dan mencari pasir. Selain itu keluarga tersebut juga mengganti pohon salak dengan tanaman cabe di salah satu petak tanah miliknya yang paling parah kerusakan pohon salaknya karena terkena erupsi kemarin.

Tidak jauh berbeda dengan perekonomian salak, Di Kinahrejo yang berbasis perekonomian sapi perah dan pasir, hasil penjualan susu biasanya dipegang oleh istri. Seperti yang terjadi dalam rumah tangga Bu Darmi. Bu Darmi mengatakan bahwa selama perekonomian mereka tertumpu pada sapi uang dari penjualan susu sapi semuanya dipegang oleh Bu Darmi. Suami sama sekali tidak

mau memegang uang dari sapi. Uang tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk masak, uang jajan anak, dan kalau tersisa akan disimpan dalam bentuk tabungan. Sementara itu, uang hasil “*ngopek pasir*” merupakan uang bersama yang dikumpulkan dan diletakkan ditempat tertentu sehingga ketika masing-masing membutuhkan uang bisa mengambilnya di tempat tersebut. Hal itu juga karena bu Darmi dan suami secara bersama mengambil pasir.

Setelah erupsi Merapi tahun 2010 yang lalu, sumber-sumber pendapatan keluarga baik keluarga di Kaliurang Utara maupun Kinahrejo hilang. Khususnya warga Kinahrejo, sapi mereka mati terkena awan panas, sementara pasir pun sampai sekarang belum bisa diambil sehingga mata pencaharian mereka berubah total dari yang tadinya peternak menjadi tukang ojek dan pedagang. Dengan perubahan pola pendapatan ini, terjadi perubahan pola kontrol atas pendapatan rumah tangga. Uang hasil ojek saat ini sepenuhnya dipegang oleh suami, sementara para istri hanya diberi alakadarnya. Sedangkan uang hasil dagang, yang dikelola oleh para istri, dipegang oleh perempuan untuk keperluan dapur dan untuk kulakan dagangan. Sementara itu, bagi sebagian rumahtangga di Kaliurang Utara, pendapatan dari salak yang menurun dan tergantikan oleh pendapatan dari retribusi pasir dan pekerjaan menggali pasir sepenuhnya dalam pengelolaan perempuan.

Kontrol atas pendapatan tidak secara otomatis berhubungan secara positif dengan akses, tanggung jawab kontribusi tenaga kerja dan penguasaan atas aset. Dalam pengembangan usaha keluarga di bidang peternakan sapi perah dan sapi potong misalnya, akan dilakukan bersama-sama antara perempuan dan laki-laki. Beberapa pekerjaan yang dilakukan secara bersama adalah pekerjaan untuk mencari dan mengangkut rumput, memandikan sapi, dan memerah sapi menjadi tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan.

Kegiatan yang secara umum dilakukan bersama adalah kegiatan untuk hal-hal yang berkaitan dengan keputusan menjual hasil ternak maupun susu sapi juga akan dibahas dan diputuskan bersama-sama antara laki-laki dengan perempuan, sedangkan untuk pembelian sapi baru dan pencarian dan penetapan lokasi

penjualan ternak biasanya diputuskan oleh laki-laki yang dianggap lebih menguasai hal ini dibandingkan perempuan. Hal-hal yang berkaitan dengan penjualan pohon yang ditebang dan pemasaran sepenuhnya akan diserahkan kepada laki-laki untuk memutuskan lokasi pemasaran dan waktu penebangan pohon. Sedangkan alokasi pendapatan dari hasil penjualan pohon ini akan dibahas dan ditentukan bersama-sama antara laki-laki dan perempuan.

Oleh karena perempuan mempunyai aset dan terlibat dalam kegiatan ekonomi serta memegang hasil kerja rumah tangganya, maka perempuan dilibatkan pula dalam proses pengambilan keputusan di bidang pembuatan rumah, sekolah, tabungan dalam rumah tangga ditentukan oleh kepala rumah tangga atau suami. Untuk urusan pembuatan rumah, karena istri ikut tinggal bersama keluarga suami atau di lingkungan keluarga suami, maka istri tidak ikut banyak ambil andil mengenai pengambilan keputusan atau saran. Seperti yang dikatakan oleh bu Hadi *“masalah omah arep digawe koyo piye kui keputusane bapak mbak, aku neng kene cuma mantu ya mosok arep ngrusuhi tinggalane mertua”*. Sebaliknya ketika suami ikut istri, maka suami cenderung mengikuti keputusan istrinya. Hal ini terlihat dalam kasus keluarga Atemo di Kemiricilik. Atemo yang numpang istrinya sudah siap membangun rumah ketika memiliki empat ekor sapi pada tahun 1998, tetapi istrinya menolak karena lebih fokus pada upaya merawat anaknya yang cacat dan menyekolahkanya.

Kemudian terkait dengan masalah pendidikan, suami merupakan pihak yang memutuskan tempat sekolah anak-anak. Sebagai contoh adalah Pak Sukardi. Meskipun di Desa Kaliurang Utara terdapat sekolah dasar negeri yang bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 10 menit tetapi dia lebih memilih memasukkan anaknya di SD Muhammadiyah Balerante yang jaraknya lebih jauh. *“niki sekolahe teng Balerante, sekolahe sae. Ben dinten dadose inggih antar jemput”*. Selain itu terkait dengan tabungan, suami yang menentukan bank tempat menabung. Pak Sukardi misalnya mempercayakan uangnya disimpan di bank BRI dan Bank Ayu. Meskipun di dusun ini sudah ada bank-bank swasta yang menggunakan sistem jemput bola, mengirim pegawainya ke daerah-daerah untuk melayani penabung atau peminjam, tapi dia tidak ikut memanfaatkannya.

Walaupun secara umum warga dusun lebih banyak yang menggunakan jasa bank jemput bola ini.

Dalam hal investasi rumah tangga, suami memegang peranan penting dalam menentukan pilihan. Investasi yang biasa dipilih oleh warga adalah tanah dan sapi. Lokasi di dalam dusun atau di sekitar dusun menjadi favorit para petani salak di Dusun Kaliurang Utara. Sebagai contoh adalah Pak Sukardi. Walaupun saat ini harga tanah di dusun tersebut mencapai Rp 20.000-Rp 60.000 per m², yang dalam pandangannya sudah cukup mahal, Pak sukardi tetap membeli tanah di dusun sebelah dengan dengan harga Rp 17.000.000,00 seluas 700 m² termasuk untuk biaya SPPT. Begitu pula dengan sapi, suami yang memutuskan kapan waktunya membeli, menukar atau menjual. Biasanya satu keluarga memelihara sapi 1-2 ekor, mereka akan menjualnya ketika bertambah menjadi tiga ekor.

Dalam hal ini menjadi jelas bahwa kendali pengambilan keputusan dalam hal pembuatan rumah, pendidikan, dan bentuk investasi sebagian besar ada ditangan kaum laki-laki. Dalam hal pembuatan dan renovasi rumah, faktor pola bertempat tinggal pasca menikah menentukan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Karena sebagian besar perempuan yang menikah kemudian ikut ke keluarga suami, maka perempuan mengambil posisi tidak terlalu terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan rumah. Dalam hal penentuan pendidikan anak, inisiatif bisa muncul dari perempuan namun keputusan akhir merupakan keputusan bersama dan terkadang laki-laki lebih dominan. Dalam hal menabung, relasi antara suami dan istri cukup longgar. Di beberapa rumah tangga, pengambilan keputusan ada ditangan suami, namun di beberapa yang lain keputusan akhir ada di istri. Dalam hal inisiatif, inisiatif bisa muncul dari perempuan dan keputusan akhir bisa juga tetap ditangan perempuan.

Dalam kegiatan atau aktivitas seremonial religi, biasanya perempuan diposisikan sebagai personal yang menyiapkan segala perlengkapan ritual seperti bunga, sesaji dan kenduri atau selamatan. Dalam aktivitas pemerintahan di dusun, perempuan lebih diposisikan didalam aktivitas sebagai tenaga pendukung administrasi kegiatan warga, karena mereka dipandang memiliki ketelitian dan kecermatan yang tinggi dan tidak terlalu mementingkan dengan imbalan dari hasil

pekerjaannya. Dalam kegiatan sosial perempuan biasanya mengambil posisi di “Dapur Umum” dan penarik iuran/kontribusi warga. Tampak bahwa peran-peran perempuan masih bersifat “domestik” dan urusan internal.

5.5.3 Alokasi Waktu Perempuan dan Laki-laki

Isu penting yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah masalah alokasi waktu. Memang benar bahwa dalam literatur antropologi, aspek alokasi waktu merupakan kajian yang cukup klasik (Beserub, 1980). Namun demikian, dalam konteks kajian tentang bencana alam, khususnya apabila dikaitkan dengan kemungkinan pengembangan program, pemahaman alokasi waktu warga masyarakat menjadi penting. Penting, karena curahan waktu mencerminkan tingkat produktivitas dan penggambaran kemungkinan adanya waktu yang dapat disisihkan untuk kegiatan produktif yang baru. Dalam konteks masyarakat perdesaan, waktu merupakan elemen penting dalam bingkai makna kerja dan ritme kehidupan ekonomi dan sosial.

Mencermati rutinitas kehidupan di dusun penelitian, tampak bahwa geliat kehidupan dimulai pada pagi hari. Aktivitas domestik dimulai oleh para perempuan dan juga laki-laki. Pagi-pagi kebanyakan ibu-ibu mencuci baju. Laki-laki di dusun yang memiliki pola ekonomi peternakan sapi tampak memanggul ember berisi dedak panas dan dibawa ke kandang-kandang sapi. Setelah memberi pakan sapi, kebanyakan langsung berangkat ke ladang. Di Stabelan, perempuan juga memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Beberapa wanita terlihat memotong-motong daun tembakau kering. Peran penting perempuan juga tampak di Dusun Kaliurang Utara khususnya terkait dengan ekonomi salak. Mereka merupakan sosok yang mengelola hasil kebun salak yakni memanen dan menjual ke GAPOKTAN atau pedagang pengepul lainnya.

Pada tataran kehidupan rumahtangga, variasi peran laki-laki dan perempuan lebih tampak. Peran ekonomi rumah tangga dilakukan secara simultan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Sebagai contoh adalah kehidupan keluarga pak Heru di Bronggang. Sehari-hari ia bekerja bekerja di sawah, yang saat ini sedang ditanami terong dan cabai, dan di antara kesibukan bertani dia juga bekerja

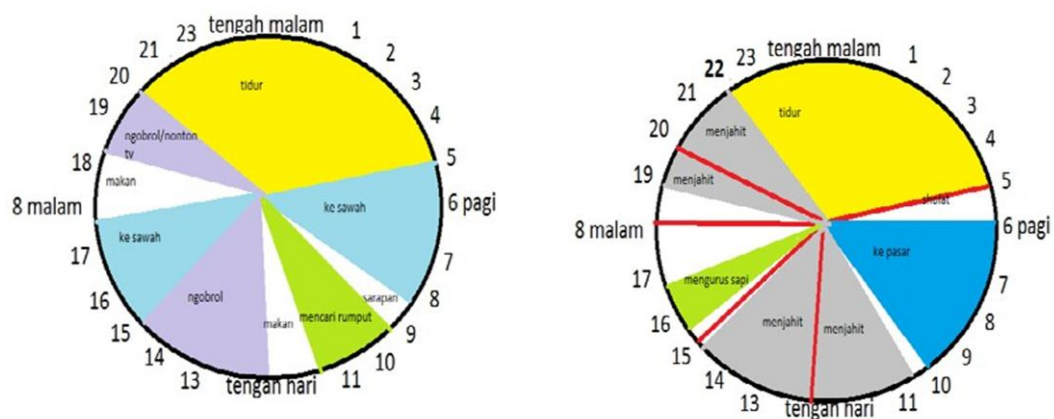
menambang pasir di tanah pelungguhan seorang elite dusun. Kegiatan menambang pasir dimulai pukul sembilan pagi hingga tengah hari, dan setelah sholat duhur kegiatan menambang pasir dilanjutkan kembali. Dalam sehari rata-rata dia bisa mendapat uang Rp 50.000,00. Dia termasuk dalam satu kelompok penambang pasir yang beranggotakan lima orang. Dalam sehari mereka maksimal bisa menjual pasir sebanyak lima kali. Uang yang didapat dari menambang pasir itu menurut pengakuannya semua diserahkan kepada istri. Biasanya digunakan untuk sugu sekolah anaknya, Diana. Anaknya yang sudah menginjak kelas 2 SMA setiap hari harus diberi uang sugu dan uang bensin, uang SPP dan biaya yang lain. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya uang dari menambang pasir memang tidak seberapa, namun uang itu bisa menambah pendapatan selain dari hasil bertani.

Dari gambaran kisah keluarga Heru tersebut, tampak betapa kehidupan masyarakat pasca erupsi Merapi cukup berat. Istrinya memiliki tugas berat untuk mengelola uang hasil menambang pasir secara hati-hati untuk memenuhi beragam kebutuhan. Sementara itu, pascaerupsi Merapi, tampaknya pola kehidupan masyarakat dusun belum sepenuhnya pulih. Tampaknya sebagian besar warga masih berusaha dengan segala macam cara agar dapat bangkit kembali. Segregasi gender dalam kegiatan perekonomian tidak sepenuhnya tampak. Hal ini tampak pada perekonomian penambangan pasir. Kegiatan ini tidak melulu dilakukan oleh laki-laki. Perempuan pun terlibat secara intensif. Walaupun untuk menjalankan kegiatan ini, kaum perempuan terpaksa membagi waktu untuk beragam tuntutan peran.

Dapat dipahami bahwa kegiatan menambang pasir bukan monopoli laki-laki. Jumiati, seorang perempuan di Bronggang, juga melakukan hal yang sama. Sambil mengasuh anak bungsu perempuan dan membantu suaminya bertani, menambang pasir di halaman rumah, ia masih menisakan waktu untuk membersihkan rumah dari pasir. Dengan posisi rumah yang sangat dekat dengan tanggul kali gendol dan lahar dingin hampir mengubur halamannya setinggi satu meter, ia dengan mudah dapat melakukan semua kegiatan. Terlebih lahar panas hanya mengenai kandang ayam mereka, sedangkan rumah sama sekali tidak apa-

apa. Mengerjakan penambangan pasir di bulan puasa di sekitar rumah sekaligus merupakan upaya membersihkan rumah. Upaya ini ia lakukan dengan bantuan tetangga. Walaupun kegiatan ini mengandung nilai ekonomi, namun ia tidak memperhitungkan secara ketat. Pasir yang terkumpul dijual kepada salah seorang kenalannya dengan cara dibayar dibelakang tanpa tahu akan dihargai berapa pasir itu nantinya. Menurutnya masih syukur masih ada yang mau membeli pasir itu, karena dia hanya ingin pasir-pasir disekitar rumahnya berkurang.

Gambar 5.1. Pola alokasi waktu suami **Gambar 5.2. Pola alokasi waktu istri**



Untuk kegiatan di sawah, Jumiati bertanggung jawab memanen dan menjualnya ke tengkulak. Sedangkan untuk masa mengolah tanah dan tanam, suaminya yang lebih banyak bekerja hingga menentukan jenis tanaman. Untuk tanam terong dan cabai kali ini saja dia membutuhkan modal sekitar Rp 2.000.000,00. Uang untuk tanam itu separuhnya dia pinjam dari simpan pinjam RT tempatnya. Menurutnya, dia dan suaminya harus bekerja keras begitu kembali ke dusun ini. Dia dan keluarga untuk sementara akan tinggal di rumah, karena dekat dengan Sungai Gendol dan sawah. Selain itu mereka juga perlu “ngrumati” rumahnya setelah ditinggal lama. Shelter hanya akan dihuni apabila musim penghujan datang. Berbeda dengan Heru dan Jumiati, Pak Sukar di Bronggang menjadi pemegang kekuasaan di rumahnya, baik itu menentukan kapan panen, kapan tander dan berhubungan dengan buruh. Dia juga yang menentukan jenis tanaman apa yang akan ditanam di sawah. Meskipun demikian, yang memegang kendali pemasukan dan pengeluaran adalah anak perempuannya.

Jadi untuk tandur misalnya, dia akan berkoordinasi dengan anaknya tentang masalah pengeluaran.

Pola yang berbeda adalah keluarga Sukar. Aktivitas harian dimulai setiap pagi sekitar jam setengah enam pagi dia pergi ke sawah yang tidak terlalu jauh dari rumahnya lalu pulang sekitar jam setengah sembilan. Setelah sarapan dia kembali ke sawah untuk mencari rumput untuk sapi kelompok. Siang sekitar jam setengah 12 siang dia kembali ke rumah untuk makan siang dan beristirahat. Dia tidak biasa tidur siang, hanya duduk di teras dan biasanya tetangga datang untuk mengobrol dan menggosip. Pada pukul setengah tiga dia kembali ke sawah untuk meneruskan pekerjaannya di sawah atau mencari rumput. Pulang menjelang magrib, makan malam dan menonton TV hingga pukul delapan malam kalau tidak ada acara, lalu berangkat tidur. Pak sukar tidak tidur di dalam kamar tetapi lebih memiih untuk tidur di kursi depan TV. Berikut siklus penggunaan waktu dalam satu hari yang dimiliki pak sukar dan dibandingkan dengan siklus yang dimiliki oleh istrinya.

Bu Sukar berusia sekitar 60an tahun, siklus hariannya di mulai lebih awal dibandingkan seluruh penghuni rumah. Dia bangun paling pagi setiap hari. Subuh dia sholat lalu sibuk di dapur, memasak makanan di tungku sambil menyapu halaman. Memasak nasi di tungku lalu di masukkan ke *magic jar*, memasak sayur dan menggoreng lauk. Sayur yang biasa dia masak di antaranya sayur gori, sayur bobor daun singkong, sayur lodeh terong dan oseng-oseng pare.

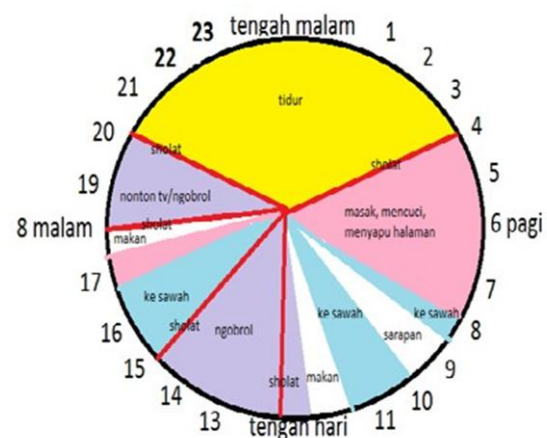
Kalau lauknya dia sering membuat tempe goreng dan gereh (teri diberi tepug lalu digoreng). Setelah selesai masak dan mencuci dia menyusul suaminya di sawah apabila di sawah sedang panen. Lalu dia pulang bersama suaminya untuk “menyiapkan” sarapan. Setelah itu dia ikut suaminya ke sawah lagi sampai jam setengah 12 untuk makan siang. Saat makan Pak Sukar di depan TV Bu Sukar mengambilkan nasi, lauk dan sayur di piring tersendiri dan membawanya di depan TV. Namun, sebelum makan untu diri sendiri, ia akan menyiapkan untuk suaminya. Bu Sukar akan kelihatan sibuk keluar masuk dapur dan ruang tamu untuk menyiapkan makan Pak Sukar. Pak Sukar dimanja sekali karena untuk makan saja dipersiapkan khusus oleh Bu Sukar, Bu Sukar menyediakan

semangkuk sayur, satu piring gorengan, satu piring penuh nasi, dan satu ekor ikan gurami. Begitu selesai makan, dia akan mengambil peralatan kotor dan membawanya ke dapur.

Sementara itu, selesai makan Pak Sukar cukup duduk manis di depan TV dan Bu Bukar kembali sibuk membawa alat makan bekas yang dipakai Pak Sukar ke belakang. Setelah itu biasanya dia sholat dan bergabung dengan suaminya di depan untuk mengobrol. Sore, setelah Sholat Ashar apabila dia tidak ke sawah untuk mengambil sayur untuk masak keesokan harinya, dia menghangatkan sayur dan memenuhi air kamar mandi dengan menimba. Magrib dia pergi sholat di masjid suruh. Pulang dan makan malam, biasanya setelah makan dia menyiapkan makanan untuk suaminya. Nasi, sayur dan lauk dalam piring terpisah di bawa di meja depan TV. Setelah Sholat Isya biasanya dia sudah tidur di dipan dekat kursi suaminya di ruang tamu.

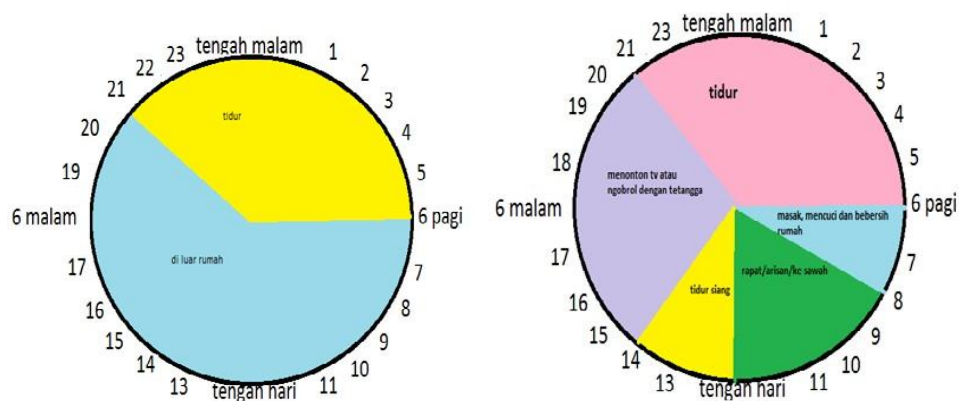
Untuk kegiatan di sawah, Bu Sukar hanya ikut repot pada masa-masa tertentu. Misalnya pada masa tandur dia akan sibuk memasak dan membuat *nyamikan*. Lalu pada masa matun dan masa panen dia baru turun lagi ke sawah. Apabila tidak ikut mengurus sawah dia biasanya membuat sapu lidi, membuat makanan kecil

dari singkong, atau mengurus kebun belakang rumah yang ditanami bayam, cabe, dan sayuran yang lain. Selain sepasang suami istri dan satu anak bungsu, di rumah ini juga tinggal anak perempuan yang sudah menjanda. Setelah menjanda, ia kembali ke rumah orang tua dan memegang kendali perekonomian rumahtangga. Sehari-hari kesibukannya adalah menjahit sarung tangan. Dia bertugas menjual hasil panen sayuran di pasar butuh atau di tengkulak di dekat Pasar Banjarejo pagi buta atau sore hari. Selain itu setiap satu bulan sekali setiap



hari Kamis ia “muter” untuk menagih bunga piutang. Bisa dibayangkan, Nur adalah rentenir. Biasanya dia meminjamkan uang kepada para pedagang di pasar Butuh dan Prambanan. Selain itu dia juga yang mengurus sapi kelompok di *shelter*, mulai dari mengantarkan rumput yang sudah disabit Pak Sukar ke kandang *shelter*, memberikan makan hingga *ngombor*. Karena Mbak Nur memegang penerimaan dan pengeluaran dalam keluarga, mbak Nur juga yang biasanya mengambil bantuan.

Berbeda dengan kehidupan masyarakat biasa, kegiatan kelompok elit dusun tidak terlalu bervariasi namun memiliki nilai ekonomi yang besar. Seperti yang dimiliki oleh Pak Kaji, Dukuh Bronggang. Kegiatan sehari-hari Kaji saat ini, selain menjadi dukuh dia juga menjadi salah satu kontraktor yang menggarap pembangunan relokasi kantor-kantor di kecamatan Cangkringan yang berada di dusun Geblok. Kegiatan itu dibuat alasan oleh Pak Kaji untuk tidak pernah tinggal lama di rumah. Dalam sehari dia hanya berada di rumah pada malam hari saja, sekitar jam sembilan dia pulang ke rumah dan pada pagi buta dia sudah pergi dengan mobil avansa tanpa sarapan atau mandi dulu. Dia pamit ke istrinya untuk pergi ke proyek.



Sementara itu, Suparmi memiliki siklus yang berbeda dibandingkan perempuan dusun lainnya. Sebagai bu dukuh dia banyak disibukkan dengan kegiatan perempuan di dusun itu, mulai dari posyandu, arisan, rapat di balai desa, hingga mengurus hal-hal yang berkaitan dengan bantuan di dusun itu. Bahkan

kata Mbak Kus, salah satu kader perempuan di dusun itu, apabila ada pendataan begitu dia “ngendoki” sendiri kerjaan itu tidak dibagi dengan kader yang lain, hal ini membuatnya keteteran apalagi bu dukuh itu orangnya ceroboh dan pelupa. Selain itu dia juga ikut aktif dalam kegiatan Aisyah. Tetapi setelah erupsi dia sudah tidak aktif lagi karena disibukkan oleh kegiatan mengorganisir bantuan. Untuk masalah bantuan di *shelter*, dia bekerja sama dengan Pak Dukuh Bakalan, sedangkan untuk bantuan di Dusun Bronggang dia bekerja sama dengan pak Sukar. Pak dukuh sendiri tidak banyak ikut campur dalam pendistribusian bantuan, tetapi dibalik peran bu dukuh kemungkinan pengaruh pak dukuh juga kuat. Kuatnya pak dukuh ini terbukti dikemudian hari yakni ketika muncul upaya pelengseran terhadapnya akibat diterpa isu penyelewengan bantuan.

Setiap hari Bu dukuh memulai aktifitasnya dengan bangun sekitar jam enam pagi, dia akan mencuci dan *bebersih* rumah. Siang dia pergi ke sebuah acara untuk rapat, arisan, atau ke sawah untuk matun. Meskipun demikian dia jarang sekali ke sawah, kalau tidak terpaksa. Kalaupun dia ke sawah pulang dia akan segera luluran karena takut kulitnya terlihat menghitam. Setelah makan siang dia tidur siang, dan malamnya dia menonton sinetron di rumah. Dia jarang sekali masak, kalaupun masak hanya masak nasi sedangkan lauknya dia lebih banyak beli di luar.

Pola relasi berbeda ditemukan pada keluarga yang salah satu pasangannya difable. Seperti dalam keluarga Sarjinem. Akibat penglihatan Bu Sarjinem yang kurang, suaminya sebelum berangkat bekerja memasak makanan untuknya dan setiap seminggu dua kali suaminya berbelanja di pasar membelikan keperluan rumah tangga, “*dadi bapake rong minggu peng pindo mbak neng pasar, aku seng ngomong bapake seng nyatet misale tuku brambang tuku lonchang, tuku terong, engko bapake tukune sisan akeh*”. Begitu juga untuk kegiatan mencuci dan membersihkan rumah semua dilakukan oleh suaminya. Menurutnya pada awal pernikahan dia dimanja oleh kerabat suaminya sehingga untuk mencuci baju pun dicucikan oleh mereka.

Perempuan dalam rumah tangga, apabila diumpamakan dengan sebuah badan organisasi, adalah seorang sekretaris dan bendahara. Perempuan hanya

mempunyai kekuasaan dalam ranah domestik, yang berkaitan dengan kegiatan di rumah. Besarnya pengeluaran untuk konsumsi, tabungan dan pendidikan tergantung pada pengelolaan istri. Selain itu perempuan mempunyai tugas menjaga kestabilan relasi antar rumah tangga di tingkat dusun sehingga perempuan lebih banyak hadir dalam kegiatan kemasyarakatan di tingkat dusun. Laki-laki dalam sebuah keluarga sebagai seorang pemimpin yang memutuskan hal-hal penting, berkaitan dengan investasi dan kegiatan produksi. Laki-laki yang memutuskan waktu dan tempat untuk membeli tanah, sapi atau rumah. Dia juga yang memutuskan jenis bibit, jumlah buruh yang dipekerjakan dan waktu untuk memulai kegiatan menanam di sawah.

Secara umum peran perempuan dalam rumah tangga adalah melakukan kegiatan domestik seperti memasak, kebersihan rumah, dan mengasuh anak. Perempuan tidak harus bekerja karena itu sudah menjadi tugas suami setiap pulang kerja membawa uang untuk istri. Walaupun istri mendapatkan penghasilan sendiri, tidak masalah apabila digunakan kesenangan sendiri. *“tapi yo ora terusterus ngono mbak, jenenge wes keluarga ya, hasil le jahit ngene iki yo dienggo nambahi opo-opo seng ora iso dipenuhi karo bapake. Dadi yo ora iso kanggo kesenengane dewe terus”* kata Kusminah.

Dengan demikian, sudah menjadi tugas dan wewenang istri untuk mengelola keuangan rumah tangga. Besarnya anggaran untuk sandang dan pangan, sosial dan tabungan ditentukan oleh istri. *“koyo Menik kae mbak, utange akeh. Neng nggone tanggane, neng bank. Soale gaya karo pemasukane ki ampuh gayane, mesakke bojone nek koyo ngono”*. Keluarga Kusminah sendiri mendapatkan pendapatan dari kegiatan suaminya di sawah menanam cabe, terung, tomat dan kadang melon. Sekali panen dia mendapatkan uang sekitar Rp 400.000,00-Rp 700.000,00 sekali panen. Padahal rentang waktu penanaman hingga panen pertama 60-65 hari, panen berikutnya hingga 2-3 kali. Lalu dari kegiatannya menjahit sarung tangan selama sebulan tergantung jahitan yang diambil, tetapi rata-rata pendapatan Rp 500.000,00/bulan dibayar setiap tiga bulan sekali. Meskipun seluruh pendapatan dikelola oleh istri, tetapi besarnya anggaran untuk *tandur* (seperti memilih jenis bibit, jumlah bibit, dan buruh)

ditentukan oleh laki-laki. Biasanya anggaran untuk tandur diambil dari biaya panen terakhir atau kalau tidak begitu mengambil pinjaman di RT, balita atau kelompok tani.

5.5.4 Perempuan dalam Kegiatan Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat peran kaum perempuan dan laki-laki tidak dapat dipahami secara dikotomis. Terlebih dalam masyarakat Jawa pedesaan yang memiliki pola hubungan dalam keluarga yang dibentuk dari pola keluarga inti (Schweizer, 1988: 944). Setelah menikah, keluarga baru dalam masyarakat Jawa cenderung hidup membentuk keluarga baru di tempat yang terpisah dengan orang tua/anggota keluarga luas. Absennya peran keluarga luas dalam keluarga Jawa pada umumnya tersebut merupakan hal yang cukup mudah ditemukan di lokasi penelitian.

Schweizer (1989a) mencatat bahwa pada kehidupan di dusun, sebuah rumah tangga terintegrasi dalam kehidupan pertetangga, suatu tempat mereka saling tukar informasi dan mendapatkan dukungan-dukungan sosial. Kerja sama antartetangga dan kekerabatan luas masih terjadi, namun saat ini terutama dilakukan pada kegiatan ritual dan pembiayaan untuk kegiatan pesta komunal. Pada umumnya laki-laki dan perempuan memiliki peran dalam suatu kegiatan masyarakat. Namun peran sosial keduanya ketika berpartisipasi di dalam kegiatan, sering dikaitkan dengan norma-norma dan keyakinan tentang peran sosial laki-laki dan peran sosial perempuan. Dalam kehidupan masyarakat, laki-laki sering digambarkan lebih dominan dalam mengambil inisiatif dan berpartisipasi dalam peran-peran sosial masyarakat yang lebih luas (berorganisasi, dalam kegiatan kerja bakti, rapat desa, atau aksi sosial) dibandingkan dengan perempuan. Sementara itu, penggambaran secara timpang peran sosial yang secara tidak langsung mendistorsi kemampuan perempuan dengan mudah sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aktivitas berorganisasi yang membutuhkan kepemimpinan, misalnya dalam rapat anggota tahunan koperasi atau rapat karang taruna. Dalam struktur

organisasi, perempuan sering ditempatkan pada posisi-posisi yang secara stereotipe dianggap milik perempuan (sekretaris atau bendahara).

Penelitian di dusun-dusun sekitar Merapi memberikan gambaran yang tidak jauh berbeda dengan kesimpulan penelitian sebelumnya tersebut. Berbicara mengenai peran perempuan dalam kegiatan kemasyarakatan, perempuan hanya ditempatkan dalam posisi-posisi domestik. Dari beberapa kegiatan di dusun tersebut seperti Jatilan, pengajian, Mujahadan, LKKMD (kumpulan kepengurusan dusun), arisan dan kumpulan RT, perempuan hanya ditempatkan sebagai pihak yang bertanggungjawab di masalah konsumsi. Perempuan hanya mempunyai peranan penting dalam perkumpulan khusus perempuan misalnya arisan dan kumpulan perempuan tiap senin wage di tingkat dusun dan pertemuan ibu-ibu tingkat RT dalam rentang waktu *selapan* hari atau yang disebut selapanan. Kegiatan perempuan ini pun di bawah binaan kepala dusun dan kepala RT yang notabene seorang laki-laki.

Dalam kegiatan padat karya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama. Pada suatu kegiatan padat karya yang diikuti kurang lebih 26 orang. Jumlah laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Semua sedang memperbaiki jalanan yang longsor, membuat jembatan penghubung ke arah makam dan membersihkan pinggir jalan. Di Stabelan, perempuan memiliki peran penting dalam kegiatan kemasyarakatan khususnya gotong-royong. Pada saat observasi, terdapat lima orang ibu-ibu sibuk mempersiapkan makanan untuk para pekerja yang akan membuat rumah bantuan Habitat. Kegiatan kemasyarakatan di dusun Kaliurang Utara diantaranya pengajian yang diadakan setiap minggu kliwon, kumpulan kepengurusan dusun (KKLKMD) setiap rabu legi, kumpulan dusun setiap senin legi, mujahadahan setiap malam senin legi, pertemuan laki-laki tingkat dusun setiap senin legi, pertemuan ibu-ibu tingkat dusun setiap senin wage, selapanan laki-laki tingkat RT dan selapanan perempuan tingkat RT. Dalam kegiatan pengajian, KKKMD dan mujadahan peran perempuan tidak jauh dari ranah kegiatan sehari-hari, seperti memegang seksi konsumsi. Perempuan memegang peranan sentral dalam kegiatan yang dilakukan dalam kelompoknya misalnya dalam pertemuan ibu-ibu tingkat dusun dan selapanan tingkat RT.

Adapun kegiatan perkumpulan perempuan ini meliputi kegiatan tabulin (tabungan ibu hamil), yaitu tabungan untuk mempersiapkan biaya kelahiran. Selain itu balitaan yaitu kegiatan posyandu dan arisan.

Kegiatan kemasyarakatan di dusun Kaliurang Utara diantaranya pengajian yang diadakan setiap Minggu Kliwon, kumpulan kepengurusan dusun (KKLKMD) setiap rabu legi, kumpulan dusun setiap Senin Legi, mujahadahan setiap malam Senin Legi, pertemuan laki-laki tingkat dusun setiap Senin Legi, pertemuan ibu-ibu tingkat dusun setiap Senin Wage, *selapanan* laki-laki tingkat RT dan *selapanan* perempuan tingkat RT. Dalam kegiatan pengajian, KKKLMD dan mujadahan peran perempuan tidak jauh dari ranah kegiatan sehari-hari, seperti memegang seksi konsumsi. Perempuan memegang peranan sentral dalam kegiatan yang dilakukan dalam kelompoknya misalnya dalam pertemuan ibu-ibu tingkat dusun dan *selapanan* tingkat RT. Adapun kegiatan perkumpulan perempuan ini meliputi kegiatan tabulin (tabungan ibu hamil), yaitu tabungan untuk mempersiapkan biaya kelahiran. Selain itu balitaan yaitu kegiatan posyandu dan arisan. Pengajian Yasinan setiap Kamis pukul empat sore, anggotanya sekitar 20an orang. Tempat di masjid Al amin *shelter* plosokerep. Kegiatan lain adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang meliputi usaha simpan pinjam, tabungan, dan usaha bersama. Dilaksanakan tanggal 28 setiap bulannya terdapat 3 kelompok KUBE masing-masing terdiri dari 10 orang anggota. Dilaksana di masing-masing RT. RT 2 ditempat bu Siti, RT 3 ditempat bu Pur, RT 4 di shelter RT 4.

Peran dalam kehidupan keagamaan menunjukkan hal yang sedikit berbeda dibandingkan dengan kesederungan dalam kehidupan kemasyarakatan/gotong-royong. Catatan etnografi dari Dusun Trono, Stabelan dan Pugeran berikut ini dapat memberikan gambaran peran perempuan dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat sekitar Merapi, khususnya di wilayah yang atas, lebih menonjol dibandingkan laki-laki. Terkesan bahwa urusan kehidupan keagamaan adalah urusan remaja putri dan ibu-ibu. Kesimpulannya adalah perempuan tampaknya lebih aktif dibandingkan laki-laki. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa semua pengajar mengaji adalah wanita. Kecenderungan yang sama terjadi

di Dusun Stabelan. Pada bulan puasa, pada pukul 4.30 di bulan puasa anak-anak sudah berkumpul di Masjid mengikuti TPA. Ada sekitar 65-an anak, laki-laki dan perempuan dari dusun Trono dan Pugeran. Senin dan Kamis TPA diadakan di dusun Trono, Rabu di dusun Pugeran. Lima remaja perempuan memimpin TPA dan mengajar. Anak-anak diabsen. Tiga anak perempuan mencatat nama-nama teman mereka yang datang TPA. Model mengaji, lima remaja duduk di depan dan anak-anak bergiliran membaca Iqra atau Al-Qur'an secara bergilir, maju satu persatu. Setelah semua mendapat giliran membaca semua mendengar satu guru yang ditunjuk untuk mengajarkan Shalat Duha. Anak-anak menulis persis semua yang ditulis di papan: kapan waktu Shalat Duha dan niatnya. Selesai mencatat, TPA diakhiri dengan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Lembar tulisan Asmaul Husna dibagikan tapi kembali dikumpulkan. Setelah TPA selesai, anak-anak menunggu buka bersama. Tiga orang ibu-ibu datang membawa nasi bungkus, kerupuk dan teh manis yang plastik bening. Semua anak mendapat bagian. Selesai melakukan aktivitas, anak-anak pulang dan kemudian giliran kegiatan ibu-ibu yang mendapat giliran membuat makanan membersihkan cecceran makan dan menyapu teras masjid.

Sekalipun perempuan aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas dan memperlihatkan posisi yang relatif setara, tetapi seperti di Jawa pada umumnya, perempuan lebih rendah akses dan kontrolnya dalam ranah politik dan pekerjaan formal. Hal ini semakin nampak pada komunitas di lereng Merapi yang heterogin ekonominya. Di Bronggang, misalnya, posisi-posisi jabatan publik lebih banyak ditempati kaum laki-laki. Akibat kondisi ini, masalah penanganan bencana pun sangat bersifat patriarkis. Kaum laki-laki memiliki porsi lebih banyak dalam menerima informasi tentang bencana. Pada sisi ini, laki-laki cenderung melihat perempuan sebagai kelompok yang cukup menerima kebijakan yang datang dari pihak lain.

Walaupun rendah posisi perempuan dalam ranah politik tetapi perempuan masih miliki ruang untuk mempengaruhi suami atau lelakinya dalam dunia politik dan kemasyarakatan. Ngatinah, istri Suwaji misalnya mempengaruhi keputusan Suwaji untuk keluar sebagai kadus dan fokus sebagai guru.

Suwarni, misalnya mempengaruhi suaminya untuk segera melakukan evakuasi warganya. Sementara itu Warti, istri kadus Bakalan, memimpin warga rapat di rumahnya untuk memutuskan evakuasi dan dia yang memimpin ketika suaminya sibuk mengikuti rapat di desa.

5.5.5 Relevansi Kesetaraan Gender dalam Penanggulangan Bencana

Diskusi di muka menggambarkan bahwa komunitas Merapi yang relatif egalitarian tercermin juga dalam relasi gender. Dapat diduga bahwa relasi yang setara antar lelaki dan perempuan terjadi karena adanya mode produksi yang membutuhkan intensitas kerja yang tinggi antar lelaki dengan perempuan dan adanya struktur dan kultur matrifokal dan adanya akses perempuan untuk mengurus sumberdaya produktif di desa.

Berpijak dari fakta bahwa perempuan mempunyai posisi dan peran yang kuat dalam rumah tangga, alokasi kerja yang tinggi dalam mengelola rumah tangga dan memiliki posisi yang juga penting dalam masyarakat, maka hal tersebut mempunyai implikasi yang serius pada agenda penanggulangan bencana. Uraian lebih lanjut terkait dengan posisi perempuan dalam penanganan erupsi Merapi dijelaskan lebih lanjut dalam laporan tersendiri.

Pertama, dalam proses mitigasi sampai dengan rehabilitasi harus melibatkan perempuan, karena perempuan mempunyai asset, power dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Kedua, perempuan mempunyai pengetahuan yang memadai untuk mengelola keluarga, bisnis dan komunitas. Ketika, perempuan bisa menjadi partner lelaki sekalipun secara formal dan umumnya lelaki mengausai sektor publik dan politik..

Berbagai masalah bias gender dan program yang hadir dalam mitigasi sampai rekonstruksi akan dibahas di belakang. Bahasan itu akan mengajak agar program perlu memiliki basis studi entografi yang kuat sehingga gender mainstreaming dapat dipromosikan dalam agenda pemberdayaan pasca erupsi Merapi 2010.

BAB VI

SISTEM KEPERCAYAAN DAN RITUAL WARGA MERAPI

6.1 Pendahuluan

Bencana bukan sekedar peristiwa semata. Setiap bencana terekam dan dimaknai manusia melalui penggambaran-penggambaran mengenai asal-usul mereka, malapetaka, keselamatan dan bahaya, dan mitos lokal tentang sejarah bencana di masa lalu. Pada saat yang sama, bencana juga mengandaikan masa depan dengan munculnya sistem ekonomi baru pascabencana, ekonomi keselamatan, penyediaan rasa aman, sampai kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi bencana. Bencana adalah peristiwa liminal (Turner. 1967) yang membuka beragam aspek kehidupan sosial yang biasanya tak terlihat, seperti organisasi sosial atau sistem kepercayaan (termasuk mitos asal usul), jaringan kekerabatan, kemampuan adaptasi sampai kapasitas bertahan hidup sebuah masyarakat. Hal ini tampak antara lain pada saat warga Merapi mencari tanda-tanda dan berusaha mencegah bahaya Merapi, mengungsi ke rumah kerabat, sampai strategi memperbaiki tanaman pertanian pascaerupsi.

Sistem kepercayaan dan ritual yang disajikan dalam tulisan ini bukan bermaksud membedah agama-agama warga Merapi. Secara umum, warga Merapi beragama Abrahamik, dan proporsi terbesar di antaranya menganut agama Islam, disusul Katolik dan Protestan, serta aliran kepercayaan. Mereka yang beragama Islam memiliki afiliasi dengan organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Namun, sekalipun penduduk menjalankan agamanya, mereka juga memiliki sistem kepercayaan tradisional yang terpelihara. Bagian ini menyajikan deskripsi mengenai keragaman kepercayaan dan ritual masyarakat Merapi dan kaitannya dengan adaptasi warga Merapi terhadap bencana alam yang muncul sebagai akibat erupsi dan banjir lahar dingin. Lucas Sasongko Triyogo (2011) telah menggambarkan keunikan sistem kepercayaan dan ritual warga Merapi. Namun demikian, bahan kajiannya terpusat di wilayah Yogyakarta, dan bersumber hanya pada studi yang dilakukannya pada tahun 1985. Walaupun

demikian, studi Triyogo memberikan petunjuk yang kuat bahwa warga Merapi memiliki sistem kepercayaan yang tipikal yaitu sistem kepercayaan yang terbangun dan terpelihara melalui adaptasi terhadap gunung berapi aktif yang berpotensi menimbulkan bencana. Sementara, studi ini sebaliknya memberikan deskripsi tentang sistem kepercayaan dan ritual warga Merapi di empat wilayah kabupaten yaitu Sleman, Magelang, Klaten, dan Boyolali, dan mendeskripsikan gejala yang terjadi pada masa pasca erupsi 2010 sampai bulan awal tahun 2012.

Triyoga (2011) juga memberikan gambaran mengenai karakteristik khusus dari kepercayaan warga Merapi yaitu adanya keterkaitan yang erat antara letak geografis dengan kepercayaan warga Merapi akan adanya penguasa gaib yang menempati tempat-tempat *wingit* ini. Studi LAURA UGM di lereng Merapi juga menemukan kekhususan sistem kepercayaan warga Merapi yang menghubungkan beragam aktivitas spiritual dengan daur hidup pertanian dan peternakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Julian Steward (1935) yang menyatakan bahwa aspek-aspek kebudayaan sangat terkait dengan lingkungan. Strategi-strategi subsistensi terikat kuat pada inti kebudayaan yang terkait dengan alam sehingga sistem kepercayaan yang dibangun oleh warga Merapi memiliki orientasi pada ritus-ritus produksi agrikultur. Pengertian subsisten di sini tidak hanya sistem tata kelola pertanian dan peternakan yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan sendiri, seperti tanaman jagung, sistem tumpang sari dan ternak ayam, akan tetapi juga sistem tata kelola yang responsif terhadap resiko-resiko kegagalan akibat bencana Merapi.

Bagian ini pertama-tama akan memberikan gambaran mengenai sistem kepercayaan warga Merapi dan komunitas dusun dengan berbagai ritual yang diselenggarakan oleh warga. Aspek penting dalam sistem kepercayaan adalah (1) Mitos tentang penguasa gaib di lereng Merapi, seperti Kyai Sapu Jagad, *Mbah Petruk*, dan tokoh-tokoh suci, pahlawan budaya, leluhur dusun, dan yang lainnya yang tersebar di lereng Merapi, (2) pengaruhnya bagi kehidupan manusia, dan (3) tempat-tempat keramat seperti tempat-tempat *wingit* (hutan, bukit, jurang, petilasan, makam. Adapun sistem ritual meliputi (1) ritual daur hidup, (2) ritual pertanian, dan (3) ritual terkait bencana alam.

Seperti yang disebutkan pada paragraf pengantar di atas, fokus pemaparan pada bab ini akan mengungkapkan pentingnya ritual dalam menjembatani kedekatan manusia dan lingkungan dan juga menjadi petunjuk bagi pengamat luar mengenai rasa hormat warga Merapi terhadap lingkungannya. Selanjutnya bab ini ingin menarik sebuah pelajaran penting mengenai mitigasi dan pemahaman mengenai bencana lokal Merapi dan penggunaan pengetahuan lokal ini dalam penanganan bencana dan rekonstruksi bencana.

6.2 Bentang Kepercayaan Lokal Merapi

Bagaimana masyarakat memahami dan merespon bencana erupsi seringkali diungkapkan dalam berbahasa dan tercermin dalam berbagai aktivitas ritual. Ritual akan menjadi titik masuk untuk memahami keberagaman kepercayaan warga Merapi untuk kemudian menyusun argumen bahwa ritual merupakan sarana positif untuk mitigasi. Selain itu, ritual juga dapat dipakai untuk melihat sistem kepercayaan warga Merapi sebagai suatu kompleks adaptasi yang mendukung bentuk-bentuk kerjasama, komunikasi dan koordinasi yang berlaku dalam kehidupan di daerah rawan. Namun, pertama-tama kita akan membahas sistem kepercayaan yang menjadi inspirasi dan narasi warga Merapi dalam memahami ekologi manusia.

6.2.1 Mitos Lokal Mengenai Empu Permadi dan Empu Rama

Meski secara statistik masyarakat Merapi menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, sebagian besar anggota masyarakat memiliki kepercayaan yang sama mengenai *Mbah* Permadi, Empu Rama dan Kyai Sapu Jagad. Mengenai asal-usul Merapi, Triyoga (2011) menulis bahwa pada waktu Pulau Jawa diciptakan, keadaannya tidak seimbang karena terbebani Gunung Jamurdipo di bagian barat Jawa. Oleh karena itu, Dewa Krincingwesi menginginkan Gunung Jamurdipa dipindahkan ke tengah supaya imbang. Pada saat itu, di tengah Pulau Jawa ada dua empu yang bersaudara, Empu Rama dan Permadi. Karena para dewa ingin memindahkan Gunung Jamurdipa ke tempat kedua empu membuat pusaka tanah Jawa, para dewa memperingatkan kedua

empu untuk memindahkan kegiatannya, tetapi keduanya bersikeras menetap. Mereka tetap membuat pusaka di tengah Pulau Jawa. Maka, Dewa Krincingwesi murka dan mengangkat dan menjatuhkan gunung Jamurdipa tepat di mana kedua empu itu membuat keris pusaka. Kedua empu akhirnya meninggal. Sebagai pengingat, Gunung Jamurdipo kemudian diubah namanya menjadi Gunung Merapi untuk menandai perapian Empu Rama dan Permadi. Roh kedua empu itu kemudian menjadi raja dari segala makhluk halus *pepunden* Merapi.

Cerita mengenai terciptanya Gunung Merapi juga ditemukan dalam versi lain. Menurut mitos, *Mbah* Permadi dan Empu Rama adalah dua penguasa keraton Merapi yang juga empu sakti. Pada kehidupan sebelum manusia, bumi masih timpang sehingga Batara Guru meminta Empu Permadi dan Empu Rama membuat keris pusaka Jawa agar dunia menjadi mapan. Empu Permadi menyanggupi dan mulai menempa keris. Tetapi para dewa tidak sabar dan ingin memindahkan Gunung Jamurdipa sebagai pasak bumi. Para utusan dewa meminta Empu Permadi dan Empu Rama memindahkan tempat penempatan keris. Empu Permadi menolak dengan alasan apa yang sudah dikatakan menjadi satu dengan perbuatan (*Sabda Pendhita Ratu*). Akibatnya para dewa marah. Batara Guru memerintahkan Batara Bayu menghukum ke dua empu tersebut. Batara Bayu meniup Gunung Jamurdipa dari Pantai Selatan ke tengah Pulau Jawa, tempat Empu Permadi dan Empu Rama membuat keris. Oleh karena kesaktiannya Empu Permadi dan Empu Rama tetap hidup dan menjelma menjadi makhluk gaib yang menjadi penguasa Merapi. Sesudah peristiwa itu, Barata Narada diutus Batara Guru memeriksa keadaan Gunung Merapi. Ternyata di Merapi ada seekor ular naga yang belum menghadap para dewa karena terhalang air mata gunung yang bernama Cupumanik. Narada kemudian membawa Cupumanik menghadap para dewa. Cupumanik yang menyebabkan keterlambatan naga, akhirnya dihukum mati. Akan tetapi Cupumanik menggunakan kesaktiannya sehingga hukuman mati itu tak membawa hasil. Karena murka, Batara Guru membanting tubuh Cupumanik ke tanduk lembu Andini, tunggangan Batara Guru. Tubuh Cupumanik hancur lebur, berantakan dan dari tubuhnya muncul seorang putri cantik. Namanya Dewi Luhwati. Akibat bantingan yang luar biasa itu, salah satu

tanduk Andini patah menjadi dua. Sedang kecantikan Dewi Luhwati membuat Batara Guru terpesona dan jatuh cinta. Dewi Luhwati ini pada mitos lain adalah sumber kesuburan dan pelindung tanaman padi.

Mitos *Mbah* Permadi bisa ditemui di wilayah Sleman, Magelang, Klaten juga di wilayah Boyolali. Di Kecamatan Cepogo, *Mbah* Permadi sering diasosiasikan dengan juru kunci Kyai Handoko Kusumo, seorang penyebar agama Islam di wilayah ini. Kyai Kusumo menurut warga adalah murid Sunan Kalijaga dan seorang keturunan Arab. Oleh karena tubuhnya yang bungkuk dan berhidung mancung seperti Petruk, warga menjuluki Kyai Handoko dengan nama *Mbah* Petruk. Juru Kunci pada masa *Mbah* Petruk ini bernama Kyai Rohmadi dan pengucapan sedikit berubah sehingga ia dikenal sebagai *Mbah* Permadi. Meski cerita mengenai *Mbah* Permadi dalam mitos asal usul ini bisa berbeda, tetapi bahwa *Mbah* Permadi yang diyakini sebagai tokoh gaib gunung Merapi bisa ditemui di seluruh lereng Merapi.

6.2.2 Mitos Lokal Mengenai *Mbah* Petruk

Keberagaman narasi mengenai tokoh gaib Merapi juga terjadi pada mitos mengenai *Mbah* Petruk. Mitos ini menjadi menonjol pada saat erupsi Merapi 2010 setelah sebuah foto asap sulfatara atau awan di atas puncak Merapi yang dianggap mirip siluet Punakawan Petruk dipasang di berbagai media. Foto yang diambil oleh Suswanto, seorang warga Srumbung, Magelang tak lama setelah erupsi Oktober 2010 memicu perbincangan tidak hanya warga seputar Merapi tapi juga menarik perhatian media massa nasional. Foto tersebut kemudian dikaitkan dengan mitos mengenai *Mbah* Petruk.

Foto 6.1
Mbah Petruk.



Sumber foto: vivanews.com

Dari hasil wawancara dengan warga Dusun Stabelan, warga Merapi bagian utara memandang Merapi sebagai *pepunden* yang memiliki penunggu yang bernama *Mbah* Petruk. Namun tidak ada yang mengetahui secara pasti siapa sejatinya *Mbah* Petruk ini. Warga Stabelan hanya *titi luri*, *meneruskan* secara turun temurun adat istiadat dari orang tua atau nenek moyang mereka.

Berbeda dengan mitos *Mbah* Petruk di sisi selatan Merapi (wilayah Yogyakarta) sebagaimana yang telah ditulis di atas, *Mbah* Petruk menurut warga Stabelan dahulu adalah seorang anak yang *kerjaannya* hanya membuat dan bermain *kitiran* (baling-baling) hingga membuat orang tuanya marah karena “anak kok gaweane mung kitiraan wae” (anak kok pekerjaan hanya bermain baling-baling). Pada suatu hari sang anak kecil itu bermain *kitiran* dan tidak kembali. Warga kemudian mempercayai anak kecil itu sebagai *Mbah* Petruk. Diyakini bahwa *Mbah* Petruk adalah keturunan Mentawiji. Menurut penduduk lereng selatan Merapi, Roh *Mbah* Petruk bertugas menjaga gerbang utara Keraton Merapi (Triyoga, 2010:51). Dalam studinya, Triyoga menulis mengenai asal-usul *Mbah* Petruk:

“*Dikisahkan*, ketika usia Petruk menginjak akil balik dua abad

yang lalu, dia harus diislamkan. Sejak kanak-kanak Petruk dianggap mempunyai kesaktian karena keanehannya; tidak pernah mandi dan membiarkan rambutnya terurai panjang. Sebelum diislamkan Petruk diwajibkan untuk dimandikan. Ia mau dimandikan dengan syarat semua sanak saudaranya hadir di rumahnya. Di saat Petruk diarak untuk dimandikan di sungai oleh para sanak saudaranya, ia melepaskan diri dari rombongan dan melarikan diri menuju Gunung Bibi. Terjadilah kejar mengejar antara Petruk dengan para pengaraknya tadi. Karena kesaktiannya, apabila Petruk hampir tertangkap, tiba-tiba ia menghilang dan muncul kembali di belakang para pengejanya. Begitu seterusnya. Selama seminggu Petruk tidak diketemukan. Bahkan ia dinyatakan hilang musnah. Empat puluh hari sejak peristiwa itu, Petruk menampakkan diri kepada kedua orang tuanya dan sanak dan saudaranya. Ia meminta agar orang tuanya dan sanak saudaranya tidak usah mengharapakan dirinya kembali karena ia telah diangkat sebagai Bupati dengan gelar Handokokusuma oleh Eyang Merapi. Selanjutnya Petruk menjelaskan, dirinya menjaga Gunung Bibi dan akan selalu melindungi penduduk Wukir Sari.”

Pada versi cerita yang lain, *Mbah* Petruk adalah pengikut *natra* Sabda Palon, atau anak Sabda Palon. Sabda Palon sendiri adalah tokoh yang unik. Dalam kitab Dharmogandhul, serat Sabdo Palon Noyo Genggong bercerita mengenai pertemuan Prabu Brawijaya dan abadinya Sabdo Palon. Dalam serat dikisahkan Sabdo Palon telah meninggalkan Majapahit. Prabu Brawijaya yang telah memeluk agama Islam meminta Sabda Palon kembali ke kerajaan akan tetapi sang abdi menolak. Sabda Palon pada akhirnya moksa dan menjadi penguasa Merapi.

6.2.3 Mitos Lokal Mengenai Kyai Sapu Jagad

Lain halnya dengan mitos mengenai Kyai Sapu Jagad. Mitos mengenai Kyai Sapu Jagad ini terkait erat dengan upacara Labuhan Merapi di Dusun Kinahrejo. Mitos mengenai Kyai Sapu Jagad dikenal di wilayah Sleman. Pemberitaan media yang gencar mengenai upacara Labuhan menjadikan mitos mengenai Kyai Sapu Jagad lebih populer. Sebuah sumber menyatakan:

“Dalam *cerita* dikatakan bagaimana Senopati, Sultan pertama dari kerajaan Mataram, suatu hari melakukan semedi dengan khusuk sehingga Gunung Merapi bergetar dan menjulurkan lidah-lidah api, lalu laut pun bergelora dan ribuan makhluk halus berguling-guling di tanah dan dipukuli sampai pingsan oleh kekuatan semedi itu. Roro Kidul akhirnya keluar dari lautan dan menampakkan diri di depan Sultan. Sang Ratu pun

langsung jatuh cinta dan mengucapkan sumpah di hadapan Senopati untuk menjadi kekasih selamanya, bahkan untuk sultan-sultan berikutnya asalkan Senopati bersedia makan *telur dunia* yang diberikannya.

Namun, *karena* merasa telur itu akan mengubahnya menjadi jiwa tanpa raga, Sultan lalu memberikannya pada tukang kebun istana yang berkorban untuk rajanya dengan memakan benda tersebut. Ia pun langsung berubah menjadi roh yang menyeramkan karena buruk rupa. Karena malu, dia lari bersembunyi di kedalaman perut Gunung Merapi dan kemudian dikenal sebagai Kyai Sapu Jagat, penjaga kerajaan Mataram.” (Inandiak. 2010)

Mitos mengenai Kyai Sapu Jagad juga beragam. Ada yang menyebut Kyai Sapu Jagad sebagai hadiah dari Sang Kuasa karena laku *semedhi* raja Jawa pertama untuk menjamin kesejahteraan tanah Jawa. Ada pula cerita yang menyebut Kyai Sapu Jagad sebagai pengikut putra Sabda Palon, bersama Kyai Petruk. Mitos mengenai Kyai Sapu Jagad ini yang berhubungan dengan adanya upacara Labuhan yang diselenggarakan dalam rangka *Tingalan Jumeneng Dalem Nata* Sultan Hamengkubuwono.

6.2.4 Mitos lokal mengenai Nyai Gadung Melati

Nyai Gadung Melati dikenal warga Merapi sebagai ratu penjaga Merapi yang bertugas menjaga kesuburan tanah dan tamanan. Nyai Gadung Melati adalah sosok yang menjaga kelestarian Merapi sehingga warga dan Keraton Yogyakarta menghormati Nyai Gadung Melati dengan cara memberikan kain khusus Gadung Melati dalam Labuhan Merapi.

Cerita lain yang berbeda mengenai Nyai Gadung Melati adalah bahwa Nyai Gadung Melati adalah pengikut Sabda Palon dari Kerajaan Majapahit yang menyepi ke Gunung Merapi. Ia tinggal di Merapi bersama pengikut Sabda Palon lainnya yaitu Kyai Sapujagad, Kyai Antaboga, dan Kyai Mentaraga. Mereka memiliki tugas masing-masing dalam menjaga Merapi. Nyai Gadung Melati bertugas untuk menjaga kelestarian alam dan penduduk sekitar. Sedangkan Kyai Mentaraga adalah penjaga angin dan udara di sekitar Gunung Merapi. Kyai Sapujagad bertugas menjaga keselamatan penduduk sekitar Gunung Merapi, dan

Kyai Antaboga bertugas mengelilingi kaki Gunung Merapi dan menjaganya agar tetap seimbang dan tak turun ke dasar bumi.

Warga lereng utara Merapi menganggap Nyai Gadung Melati sebagai istri Ki Tunggul Wulung yang menyingkir dari Kerajaan Majapahit dan tinggal di Merapi. Pasangan ini moksa dan menjadi *pepunden* Merapi. Mitos Kyai Tunggul Wulung sering ditarikan oleh kelompok kesenian *Topeng Ireng* dalam berbagai acara bersih desa/dusun di lereng Merapi dalam berbagai acara, termasuk acara Suran di Kecamatan Selo Boyolali dan kegiatan rutin *Tlatah Bocah* yang didukung oleh yayasan Rumah Pelangi yang dilakukan berkeliling di lereng Merapi Merbabu.

6.2.5 Mitos Juru Kunci Merapi: Mbah Maridjan dan Labuhan

Tokoh-tokoh gaib Kiai Sapujagad dan *Mbah* Petruk menggurat dalam pergumulan warga dengan Gunung Merapi. Namun cerita yang paling menggugah adalah cerita seorang manusia bernama *Mbah* Maridjan yaitu juru kunci Merapi. Maridjan menjadi sebuah nama yang tak bisa lepas dari cerita mengenai erupsi Merapi. *Mbah* Maridjan menjadi dikenal masyarakat luar sejak ia diberitakan menolak undangan Gubernur DIY pada saat Merapi bergolak tahun 2006. Pada erupsi yang terjadi pada 27 Oktober 2010, *Mbah* Maridjan atau Mas Penewu Suraksohargo meninggal akibat awan panas yang melanda Dusun Kinahrejo.

Pada saat erupsi 2006 *Mbah* Maridjan menolak evakuasi namun tetap selamat sehingga masyarakat Merapi menjunjung beliau sebagai simbol perlawanan—secara halus—terhadap paksaan pihak-pihak luar dan negara, juga terhadap keangkuhan pengetahuan modern. *Mbah* Maridjan percaya bahwa Merapi tidak akan mencelakakan warga Merapi. Apabila akan meletus, menurutnya, Merapi akan memberikan pertanda. Apabila warga bertindak menurut naluri yang berdasarkan *niteni* (memperhatikan dan memperkirakan) maka mereka tidak akan celaka.

Sebagai juru kunci, *Mbah* Maridjan bertugas memimpin *caosan agung* dalam ritual Labuhan di puncak Merapi. Labuhan Merapi menjadi ritual terbesar masyarakat lereng selatan Merapi. Dengan gencarnya pemberitaan media

mengenai Merapi dan *Mbah Maridjan*, ritual Labuhan yang diselenggarakan setiap tahun kini lebih banyak menarik perhatian tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat luas.

Dusun Kinahrejo yang menjadi lokasi Labuhan Merapi mendapat tempat yang istimewa bagi warga Merapi. Di utara Kinahrejo ada gapura Gunung Wutoh yang diyakini sebagai gerbang utama untuk memasuki istana Merapi. Gerbang ini dipercaya oleh warga lereng selatan Merapi dijaga oleh Nyai Gadung Melati. Selain itu tidak jauh dari Kinahrejo ada makam keramat yang diyakini sebagai makam gajah kuno milik Kyai Krincing Wesi.

Sesaji (*caosan*) yang dihaturkan di puncak Merapi dalam Labuhan ditujukan kepada para penunggu atau makhluk-makhluk gaib Gunung Merapi. *Uba rampe* (persembahan) berisi dua buah *apem mustoko* yang ditutup kain putih. *Uba rampe* dimasukkan ke dalam sebuah kotak kayu yang berisi sesaji uang (*yatri tindih*), *lisan konyo* (minyak wangi), 10 batang rokok liting (*seswangen*) dan beragam kain serta pakaian: kain *sinjang cangkkring*, kain *sinjang kawung*, baju *dhestar dara muluk*, *semekan gadung mlati*, *semekan bangun tulak*, *kampuh poleng ciut* dan *peningset udagara*. Termasuk dalam sesajen adalah sembilan nasi tumpeng dengan lauk ceke dan kepala ayam, serta bunga setaman. Semua *uba rampe* dibungkus kain berwarna hijau.

Menurut penuturan seorang *abdi dalem* perempuan asal Kinahrejo, ada perbedaan prosesi Labuhan pascaerupsi yang melanda Turgo dan Kinahrejo. Pertama dalam hal *uba rampe* dan kedua dalam hal lokasi pelaksanaannya.

“Nek niku pas agek ten nduwur nggeh nopo-nopo ken munggah mendet lirang nggeh. Gek dereng enten nopo-nopo niko. Saben ajeng Labuhan niko ken mendet lirang. Bar Labuhan ken mendet gondopura kaleh suket sulonjono. werno 3. mendet niku nggeh mendet.... enten bedane. Lha sak niki mboten saget mendet lirang. Mung ngaturke opo anane mung ngoten. Nek riyan kan pas minggah mbeto syarat kagem kraton. Lirang kaleh gondopura.... niko pun wiwit gek enten riyan kiyambak bencana Turgo, sak bare niko pun mboten wonten munggah. Bar niko pun mboten saget minggah maleh. Lha pripun ajeng minggah lha mergine pun dados jurang niko (Dulu saat masih di atas, bagaimana pun akan naik mengambil belerang. Setelah Labuhan diminta mengambil Gandapura dan rumput Sulonjono, tiga macam. Mengambil itu ya mengambil...ada bedanya. Lah sekarang tidak bisa mengambil belerang.

Cuma menghatukan apa adanya saja. Kalau dulu kalau naik membawa syarat untuk kraton [Merapi]. Belerang dan gandapuro...itu sudah ada sejak bencana Turgo, setelahnya sudah tidak boleh naik. Lah bagaimana mau naik, jalannya sudah menjadi jurang”).

Selain itu, dalam pelaksanaannya, terjadi perubahan lokasi. Sebelum erupsi 2010 lokasi Labuhan untuk warga lereng selatan Merapi adalah di Puncak Sri Manganti. Namun pada tahun 2011, Sri Manganti rusak akibat erupsi sehingga Labuhan dipindahkan di Alas Bedengan yang lokasinya terletak lebih bawah dibandingkan lokasi sebelumnya.

Labuhan dilakukan pada tanggal 30 bulan Rajab. Pada upacara Labuhan tahun 2012 diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012. Sehari sebelumnya, Keraton Yogyakarta Hadiningrat menyerahkan sesaji Labuhan kepada juru kunci Mas Lurah Ki Surakso Sihono (Mbah Asih) di Pendopo Kecamatan Cangkringan. Seluruh perlengkapan Labuhan disemayamkan di Huntara Plosokerep Umbulharjo yang ditempati oleh warga Kinahrejo. Malam hari warga Kinahrejo melakukan *uyon-uyon* baik di Huntara maupun di Kinahrejo. Pada pukul enam pagi para *abdi dalem* dan *keparak* (*abdi dalem* perempuan) sudah bersiap dan berangkat menuju Kinahrejo.

Labuhan sebelum erupsi 2010 dilakukan di Puncak Sri Manganti dan berpusat di kediaman Mbah Maridjan. Setelah erupsi, prosesi Labuhan dimulai dengan berziarah di petilasan Mbah Maridjan. Petilasan ini telah dipagari bambu yang mengelilingi bekas rumah Mbah Maridjan. Ada cungkup dan semacam batu nisan yang menjadi penanda di mana Mbah Maridjan wafat. Nisan ditaburi bunga setaman sebelum doa dipanjatkan. Hanya warga Kinahrejo yang memakai beskap dan kain *sinjang* yang boleh masuk. Seperti tahun-tahun sebelumnya, peristiwa ini banyak diliput oleh media dan fotografer. Doa dipimpin oleh putra Mbah Maridjan, Mbah Asih dan ditutup dengan mengheningkan cipta selama beberapa saat. Tidak seperti tahun 2011, Labuhan Merapi Rajab 1445 ini lebih sepi.

Pada pukul tujuh, rombongan peserta Labuhan bertolak dari pertigaan Ngrakah, Kinahrejo Cangkringan. Tidak semua warga Kinahrejo turut naik. Sebagian menunggu warung-warung makanan dan cinderamata atau menunggu parkir. Alas Bedengan terletak 30 menit berjalan kaki. Rute awal relatif nyaman

sampai ke pertigaan Ngrakah di mana tanjakan terjal dimulai. Ratusan warga mengekor para abdi dalem yang memikul sesajen. Meski tidak seramai tahun lalu, tetap ada warga luar Cangkringan yang selalu ikut. Sebagian besar peserta berharap mendapat berkah *lorotan* sesajen, nasi uduk dan urap kelapa. Menurut Ibu Mujiah dari Bantul, nasi berkat yang dibungkus plastik kecil ini akan dibawa pulang dan akan dikeringkan atau dicampur dengan nasi supaya berkah bisa dibagikan ke seluruh keluarga. Mereka yang percaya menganggap bahwa *lorotan* Labuhan ini akan memperlancar urusan, meringankan jodoh (bunga kanthil), dan memberikan kesejahteraan.

Upacara Labuhan dimulai dengan ucapan pengantar dari abdi dalem yang menunjukkan semua *ubo rampe* ke para peserta. Setelah itu semua perlengkapan *diujubi*, sebagian ditujukan kepada Kyai Sapu Jagad, Eyang Merapi, Nyai Gadung Melati, dan Kyai Krincing Wesi. Doa permohonan keselamatan juga dilakukan dengan doa berbahasa Arab seperti yang sering dibaca kaum Nadhlatul Ulama umumnya. Nasi yang dibawa para *keparak* kemudian dibagi-bagi dalam bungkusan kecil dan dibagi diakhir prosesi pada saat peserta akan turun.

Apabila dimaknai lebih lanjut, ritual Labuhan yang dilakukan di Kinahrejo menunjukkan adanya hubungan negara dan masyarakat yang tampak jelas di mana Keraton Yogyakarta sebagai pusat kosmologi Jawa sekaligus menyimbolkan pusat pemerintahan daerah. Negara, secara tradisional hadir di lereng bagian selatan Merapi sejak dulu kala. Ini berbeda dengan ritual Labuhan yang dilakukan di bagian barat dan utara Merapi, seperti di Boyolali dan Magelang. Di Kabupaten Boyolali, khususnya di daerah Kecamatan Selo, ada dua ritual besar terkait dengan Merapi yang dilakukan pada 1 Suro, yaitu upacara Labuhan Segi Gunung dan upacara Labuhan Keraton Kasunan Surakarta. Labuhan Segi Gunung rutin dilakukan tiap tahun sejak puluhan tahun lalu. Sementara Labuhan Keraton Kasunan Surakarta baru diadakan tahun 2005 di Plawangan, Merapi dan didukung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Boyolali. Konon, Labuhan Selamatan Merapi dari Kasunan Surakarta dihentikan pada masa Pakubuwono IX pada tahun 1939 karena alasan biaya.

Ada beberapa perubahan yang bisa kita catat mengenai ritual Labuhan Merapi dan Selamatan Segu Gunung pasca erupsi 2010 yang sangat mengguncang tatanan kosmologi warga Merapi. Tidak hanya dalam skala erupsi dan korban yang sangat besar, erupsi tahun 2010 ini juga mengubah cara pandang warga Merapi terhadap erupsi.

Ada dua cerita dengan dua alur yang berbeda tentang ritual Labuhan Merapi dan Selamatan Segu Gunung di lereng utara dan selatan Merapi. Satu cerita dari Desa Jrah dan Lencoh, Kecamatan Selo, Boyolali yang merupakan salah satu desa terdekat puncak Merapi. Pada 1 Suro 1433 yang jatuh pada Desember 2010, Pemda Boyolali melarang warga melakukan upacara Selamatan Segu Gunung karena status Merapi yang masih membahayakan, namun dua warga desa tetap melakukan selamatan karena khawatir jika melanggar tradisi yang dilaksanakan tiap tahun ini bencana akan melanda desa mereka.

Pada tahun 2011, ritual 1 Suro di Kecamatan Selo dilakukan dua kali yaitu yang dilaksanakan oleh warga desa dan satu lagi diadakan oleh pemerintah daerah setempat. Di Desa Lencoh dan Jrah ritual ini diadakan pada malam satu Suro sesuai penanggalan Jawa (Minggu malam, 27 November 2011). Sementara, Pemerintah Daerah Boyolali dan Keraton Solo melakukan selamatan Segu Gunung pada satu Suro siang hari (Senin 28 November 2011).

Labuhan Merapi dilakukan tiap tahun untuk memperingati Jumenengan Dalem Hamengkubuwono X yang jatuh tiap 30 Rajab. Labuhan Merapi merupakan bagian dari Labuhan Alit di Parangkusumo, Labuhan Lawu dan Labuhan di Dlepih Menoreh Wonogiri yang menandai empat *axis mundi* Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Labuhan setelah erupsi 2010 berlangsung pada tanggal 27 Juli 2011 lalu. Juru kunci Merapi sudah diganti Mas Lurah Suraksosihino yang merupakan putra *Mbah* Maridjan. Labuhan dan juru kunci Merapi 2011 berbeda karena sebelum pemilihan juru kunci, komite pemilihan Keraton Yogyakarta menemui Kepala Kantor Vulkanologi untuk memutuskan siapa juru kunci Merapi berikutnya. Pengumuman juru kunci baru dilakukan oleh GBPH Joyokusumo, GBPH Yudoningrat dan Kepala BPPTK Daerah Istimewa Yogyakarta Soebandrio pada tanggal 3 April 2011. Juru kunci baru Merapi, menurut juru bicara Keraton

untuk pertama kalinya adalah juga “*Pangirit* koordinator” yang bisa menyatu dalam komunikasi dan koordinasi bersama pemerintah kabupaten, kantor Vulkanologi Teknologi Kegunungpian dan juga abdi dalem juru kunci Merapi lainnya (Tempo Interaktif SUMBER). Berbeda dengan selamatan Desa Lencoh dan Jrasah yang sepenuhnya dilakukan secara swadaya karena pemda melakukan ritual terpisah, Labuhan Merapi mendapat dukungan penuh dari Pemda dan Dinas Pariwisata.

Perubahan tidak hanya terjadi pada ritual Labuhan. Ada ritual yang hilang bersama pengetahuan dan mitos yang menyertainya misalnya ritual Bhairawa Tantra di Candi Lumbung Dusun Tlatar, Desa Krogowan-Sawangan Magelang. Oleh karena ancaman lahar dingin, Candi Lumbung direlokasi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala 500 meter menjauhi Sungai Pabelan. Ada ritual baru yang muncul, atau berubah pasca erupsi Merapi, misalnya ritual *merti* dusun di berbagai tempat dilakukan dengan membuat sesaji khusus berupa kepala lembu atau kerbau.

Upacara Merti Jiwo merupakan ritual baru yang diselenggarakan di Dusun Stabelan pada tanggal 4-5 Juli 2011. Ritual ini diselenggarakan oleh penduduk Stabelan dan didukung oleh sebuah kelompok masyarakat sipil “Rumah Pelangi”. Dalam acara ini diadakan tirakatan dan selamatan. Selain tirakatan dan selamatan, acara juga diisi tarian Jathilan Wetan dan Kulon gunung. Ritual Merti Jiwo ini bukan satu-satunya ritual baru. Setelah erupsi Merapi banyak sekali ritual baru atau ritual lama yang kembali dilakukan setelah sebelumnya ditinggalkan. Ritual pascaerupsi lain adalah Caosan Sakala Madala yang dilakukan di Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Magelang. Begitu juga dengan adanya ritual bersih sumber dan pemberkatan sumber air (misa Tani) di Tuk Kali Kolah, Dusun Sebrang, Argomulyo.

6.3 *Pepundhen, Petilasan dan Tempat-Tempat Wingit*

Wilayah lereng Merapi memiliki banyak sekali *petilasan*, *pepundhen*, candi dan juga tempat *wingit* yang dihormati warga Merapi. *Petilasan* merupakan tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh peninggalan tokoh-tokoh penting

atau suci. Sementara *pepundhen* berupa makam leluhur. Baik petilasan maupun *pepundhen* masih sering didatangi warga yang *ngalap berkah* atau berziarah. Sementara, tempat-tempat *wingit* lain biasanya merupakan tempat yang terkait dengan mitos pahlawan suci atau tokoh gaib. Tempat-tempat yang *wingit* ini disebut juga sebagai wilayah larangan karena pada saat berada di wilayah ini ada pantangan yang tidak boleh dilakukan antara lain larangan untuk berbicara kotor, kencing dan buang air besar, menebang pohon, merumput, memindahkan atau mengambil benda-benda (ranting, batu), dan mengotori tempat-tempat tersebut. Pelanggaran terhadap larangan oleh warga sering dikaitkan dengan kesurupan, gagal panen, sakit tanpa sebab, atau bahkan kematian mendadak.

Contoh petilasan dan makam yang paling terkenal di Merapi adalah *Mbah Maridjan* di Srunen Glagaharjo Cangkringan, Panembahan Rama di Desa Kajoran Wedi Sleman, Kyai Permadi dan Syeh Jumadil Kubro, Dusun Turgo, Sleman, Kyai Mloyopati Kemalang Klaten, Kyai Rohmadi di Selo-Boyolali, Tumenggung Wiradigdo di Salam Magelang serta makam-makam leluhur desa atau dusun. Makam-makam ini sering diziarahi pada malam Selasa atau Jumat Kliwon. Seperti warga Yogyakarta dan Jawa Tengah pada umumnya, mereka memilih Jumat Kliwon karena memiliki sifat Sri Kombang (kemahsyuran), sementara *neptu* Selasa Kliwon juga memiliki karakteristik yang baik, Sri Rahayu yang juga melambangkan kemuliaan. Hampir tiap desa bahkan dusun di lereng teratas Merapi memiliki makam leluhur, seperti makam *Mbah Bagor* di Dusun Stabelan, makam *Mbah Puger* di Dusun Pugeran, dan Kyai di Wukir Desa Wukirsari Sleman, dan masih banyak lagi.

Makam leluhur sering disebut *pepunden* oleh warga Merapi. Tiap acara selamatan daur hidup, daur peternakan, atau ritual dusun apa pun akan dimulai dengan membersihkan makam dan ziarah kubur untuk meminta restu. Selain itu, warga Merapi yang memiliki hajat atau keinginan biasanya menjalani *laku* tirakat di makam, pepunden, atau petilasan. *Laku* tirakat bisa berupa ziarah, membakar kemenyan, membuat sesaji, dan biasanya disertai *semedhi*. Bentuk laku bisa juga berupa *tapa jejeg*, yaitu tidak duduk selama lebih dari 12 jam, *kungkum* atau berendam di *tempuran* (pertemuan dua atau lebih) sungai atau telaga. *Kungkum*

biasanya dilakukan selama tujuh hari tujuh malam. *Laku* yang juga dikenal masyarakat adalah *ngalong* yaitu tapa dengan kepala di bawah. *Laku* ini dilakukan biasanya untuk mendapatkan kemampuan penglihatan gaib.

Puasa merupakan salah satu bentuk *laku* yang umum dilakukan oleh penduduk setempat. Puasa dilakukan apabila seseorang akan mengadakan hajat. Sebelum puasa, penduduk akan mengawalinya dengan ziarah. Ada berbagai jenis puasa yang dilakukan orang Jawa:

- Puasa *Patigeni*: puasa makan, minum, dan melihat unsur api atau sumber cahaya, tinggal di kegelapan,
- Puasa *Ngeruh*: puasa hanya makan sayur dan buah,
- Puasa *Ngebleng* puasa makan, minum, tidak boleh melihat terang hari dan harus tinggal dalam rumah, dan menghentikan kegiatan sehari-hari,
- Puasa *Nglowong*, puasa makan, minum, tapi boleh melihat terang hari, hanya boleh tidur selama tiga jam.
- Puasa *Mutih*, puasa segala makanan kecuali nasi dan air putih, tidak boleh digarami atau diberi gula.
- Puasa *Nganyep*, makan hanya makanan yang tidak memiliki rasa.
- Puasa *Ngidang*, makan hanya makanan daun-daunan dan air putih.
- Puasa *Ngrowot*, hanya makan umbi-umbian dan buah, tidak boleh makan nasi, daging dan telur. Buah atau umbi boleh lebih dari satu tapi hanya satu jenis saja. Misal, satu jenis pisang tetapi dua buah jumlahnya.
- Puasa *Ngepel*, makan hanya sekepal makanan saja. Misal nasi satu kepal tangan.
- Puasa *Ngasrep*, puasa hanya boleh minum air putih tiga kali saja.
- Puasa *Wungon*, puasa pamungkas dan pelaku tidak boleh tidur sehari penuh.

Warga Dusun Stabelan biasanya mengawali puasa dengan ziarah ke makam ke *Mbah Bagor*. Kemudian si empunya hajat membaca niat di luar rumah sambil menghadap ke timur Dusun Stabelan atau menghadap Merapi. Pada malam hari si empunya hajat tidur di depan pintu. Puasa dilakukan menjelang ujian, hajatan, atau saat-saat genting daur hidup dan daur peternakan.

Selain *pepunden* tokoh sakti dan gaib di atas, *pepunden* dusun juga penting dalam kompleks ritual warga. Misalnya, penghormatan terhadap *Mbah Bagor* bersifat lokal, Dusun yang berbeda tidak mengakui bahkan tidak mengetahui mengenai kekeramatan makam dusun tetangga. Akan tetapi ada contoh di mana makam di Dusun Pugeran diakui oleh warga Dusun Trono karena menurut kekerabatan antar dusun, Dusun Pugeran lebih tua daripada Dusun Trono. Tiap dusun di seputar Merapi biasanya memiliki makam dusun. Di Dusun Trono, figur lokal bernama Sunan Pugeran. Di Dusun Kinahrejo ada makam Jumadil Kubro, sementara di Dusun Watu Bolong terdapat makam *Mbah Permadi*. Makam-makam ini menjadi awal sebuah cerita mengenai asal-usul dusun, kekerabatan penduduk dan juga kosmologi warga.

Selain makam dan *pepundhen*, ada juga petilasan dan candi yang masih dianggap *wingit*. Ada sebuah petilasan yang terkait dengan keraton Solo yaitu Pesanggrahan Pracimoharjo yang merupakan petilasan Sri Susuhunan Paku Buwono X di Boyolali. Selain itu ada Gua Raja yang menjadi petilasan Pangeran Diponegoro dan Kyai Mojo (Samiran, Selo Boyolali), dan Candi Asu di Candi Pos Magelang.

Tempat-tempat yang juga mendapatkan penghormatan warga Merapi adalah tempat-tempat *wingit* berupa hutan, bukit, sumber air, padang rumput, air terjun, batu, pohon besar, pertemuan (*tempuran*) dua sungai, dan jurang. Contoh tempat-tempat ini adalah Hutan Patuk Alap-Alap, Bukit Turgo, Geger Boyong, Gunung Bibi, Telaga Putri, Umbul Temanten, Ringin (Beringin) Putih, Watu Gajah, Watu Nganten, Kedung Kayang, Pasar Bubrah, Gunung Wutoh, dan lain-lain. Penghormatan terhadap tempat-tempat *wingit* ini menjadi gambaran nyata penghormatan warga Merapi terhadap lingkungan.

6.4 Selamatan: Stabelan Sebuah Titik Masuk

Sistem kepercayaan warga Merapi mempertimbangkan aspek lingkungan Gunung Merapi sebagai konteks kebudayaan warga pendukung. Pada bagian ini, sistem kepercayaan dan ritual Merapi akan dilihat dari ciri-ciri adaptif termasuk di antaranya aspek pengetahuan, emosi, tingkah laku, dan elemen pendukung

lainnya. Ritual akan dipilih sebagai fokus untuk memeriksa bagaimana aspek-aspek adaptif warga Merapi menjadi landasan bagi sistem kepercayaan dan ritual Merapi. Di samping itu juga untuk melihat bagaimana sistem kepercayaan berfungsi.

Secara umum ritual warga Merapi terbagi menjadi empat: (1) Ritual dusun, (2) Ritual gunung, (3) Ritual daur hidup, dan (4) Ritual daur hidup petani/peternak. Ritual-ritual ini bisa berwujud ritual *Labuhan*, *sega gunung*, *memetri kali*, selamatan Selasa dan Jumat Kliwon, selamatan *brokohan*, selamatan *miwiti*, selamatan mencari korban hilang, selamatan mengambil jenazah, ziarah *pepundhen*, perkawinan, dan lain sebagainya. Sebelum membahas ritual-ritual warga Merapi, pada paragraf-paragraf selanjutnya akan dibahas terlebih dahulu mengenai Dusun Stabelan sebagai studi kasus.

Alasan pemilihan Dusun Stabelan sebagai lokasi penelitian mendalam adalah karena Dusun Stabelan tidak hanya berjarak 3,5 kilometer dari puncak Merapi. Namun juga karena penduduk masih menghayati dan melakukan beragam tradisi yang ada sejak dulu misalnya selamatan *sego gunung*, upacara *miwiti* panen, dan ziarah makam *Mbah Bagor* yang sangat dihormati. Selain itu, penduduk Stabelan juga masih mempertahankan ritual komunal mereka dengan setia. Berbagai jenis selamatan dusun dilakukan dengan setia dan diikuti hampir semua penduduk dusun. Sampai tahun 2010, hampir semua rumah mengirimkan tumpeng mereka dalam ritual dusun seperti selamatan Rajaban dan selamatan Jumat Pon.

Di beberapa dusun sekitar Merapi khususnya Stabelan, keragaman sistem kepercayaan dusun Merapi tidak hanya pada aspek kepercayaan dan ritual lokal, tetapi juga dalam pengamalan dan penghayatan agama Islam atau Katolik. Hari raya besar agama Islam seperti Idul Adha dan Idul Fitri kalah gaung dengan ritual Rajaban atau Saparan. Silaturahmi Lebaran yang biasanya menjadi ajang kekeluargaan paling besar telah didahului oleh *Nyadran* yang juga mengutamakan silaturahmi. Sementara upacara kurban sering dilakukan dengan syukuran *ingkung*, karena warga Stabelan justru menyembelih sapi pada saat Saparan atau Rajaban. Akan tetapi, dengan makin banyaknya organisasi kemasyarakatan Islam

yang masuk, kebutuhan untuk memenuhi tuntutan *ortopraksi* umat Muslim makin kuat.

Kosmologi tradisional menyangkut Merapi memberikan wadah yang relatif luas bagi semua warga Merapi untuk bisa berelasi secara batin tanpa mengurangi keimanan agama yang dianut. Penganut Katolik, melakukan misa Natal Merapi dan misa sumber air secara simultan dan penganut Hindu berpartisipasi pada upacara Labuhan dan selamatan dusun lainnya. Kerukunan antar umat beragama di Merapi akan tampak pada ritual-ritual yang bersifat komunal.

Selamatan menjadi titik masuk studi mengenai keberagaman lokal masyarakat Dusun Stabelan karena dari selamatan cerita mengenai asal usul dusun dan hubungan kekerabatan antar dusun terangkai. Dari selamatan pula kita bisa melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap Merapi, predisposisi mereka terhadap agama Islam yang dianut sebagian besar penduduk, dan bagaimana masyarakat memahami lingkup hidup mereka. Melalui rangkaian selamatan juga kita bisa memperoleh pengamalan cara pandang masyarakat Stabelan menyangkut erupsi Merapi. Studi ini tidak hanya memperhatikan detail *praktik ritual*, tapi juga pada penjelasan-penjelasan masyarakat Stabelan sendiri mengenai lingkungan, pengetahuan, makna, dan tradisi setempat terutama mengenai erupsi Merapi. Selamatan menurut Geertz merupakan ritual komunal kaum *abangan* untuk mengatasi situasi yang dianggap mengancam (1976:355). Hasil studi lain (Hefner 1999a; Bowen 1993; Woodward 1988) mendukung anggapan bahwa ritual selamatan setidaknya dilakukan sebagian besar orang Jawa, bahkan oleh suku-suku bangsa lain, misalnya Sasak (Hay, 2004). Apa yang terjadi di Stabelan secara langsung mengonfirmasi pernyataan Geertz bahwa selamatan adalah ritual khas abangan.

Prinsip yang sangat penting dalam berbagai selamatan di seluruh tanah Jawa adalah perhitungan hari baik. Orang Jawa memiliki kalender tersendiri mengikuti kalender yang dibuat oleh Sultan Agung (1625) yang memodifikasi penanggalan Saka dengan penanggalan Islam. Kalender Jawa memiliki siklus sepekan (*pancawara*) yang terdiri dari lima hari pasaran. Kalender Jawa mengenal

juga *mangsa*, *naga dina*, sistem bulan dan juga siklus windu. Hari baik bagi orang Jawa yang modern mungkin lebih menitikberatkan kesesuaian dengan jadwal kerja, tetapi bagi masyarakat Merapi, hari baik dicari dengan perhitungan *neptu* pasaran.

Jumlah dari masing masing hari pasaran Jawa yaitu:

- Pon bernilai 7
- Wage bernilai 4
- Kliwon bernilai 8
- Legi bernilai 5
- Paing bernilai 9

Perhitungan Jawa ini juga berlaku di dusun-dusun Merapi. Untuk menghitung hari baik, masing masing dari hari pasaran Jawa ini akan dipadukan dengan hari menurut penanggalan Masehi di mana tiap-tiap hari memiliki jumlah tersendiri. Untuk menentukan *neptu* hari dan pasaran, ditentukan dulu *neptu* harinya, yaitu:

- Minggu/Ahad bernilai 5
- Senin bernilai 4
- Selasa bernilai 3
- Rabu bernilai 7
- Kamis bernilai 8
- Jumat bernilai 6 dan
- Sabtu bernilai 9

Setelah jumlah ketemu *neptu* hari dan pasaran, hari baik hajatan atau *laku* adalah *dina 3 neptu 40* secara berturut-turut, misalnya Kamis Wage (*neptu* 12), Jumat Kliwon (*neptu* 14) dan Sabtu Legi (*neptu* 14), bisa juga Jumat Pahing (15), Sabtu Pon (16), dan Minggu Wage (9), atau Rabu Pon (14), Kamis Wage (12), dan Jumat Kliwon (14).

Contoh perhitungan *neptu* Jawa adalah menghitung perjodohan pengantin. Cara menghitungnya adalah dengan menghitung hari dan pasaran dari kelahiran dua calon pengantin, masing-masing dijumlahkan dahulu, kemudian masing-masing dikurangi 9 (sifat perjodohan lihat lampiran). Nilai akhir perhitungan ini

akan menentukan apakah pasangan ini berjodoh baik atau tidak. Sementara itu, kehidupan perkawinan juga bisa diramal dengan menghitung jumlah *neptu* hari dan pasaran perjodohan. Supaya baik, penentuan hari pernikahan menghitung nilai jodoh dan nilai baik hari pernikahan. Jumlah perhitungan *neptu* hari dan pasaran dari kelahiran calon mempelai laki-laki dan perempuan ditambah *neptu* pasaran hari perkawinan dan tanggal (bulan Jawa) semuanya dijumlahkan kemudian dikurangi masing-masing 3. Apabila hasil perhitungan masih sisa 1 berarti tidak baik, cepat berpisah hidup atau mati. Apabila bersisa 2, berarti baik, hidup rukun, sentosa dan dihormati. Sedang apabila bersisa 3 berarti tidak baik, rumah tangganya hancur berantakan dan keduanya bisa mati. Perhitungan ini bisa diteruskan dengan pengurangan empat dan lima, masing-masing dengan nilai yang berbeda artinya.

Selain untuk hajatan, hitungan hari baik juga dipakai untuk menentukan kapan melakukan *laku*. Apabila mampu, si empunya hajat bisa melakukan *laku* selama tujuh sampai empat puluh hari.

Untuk menentukan hari baik kenduri atau puasa, bisa menyesuaikan dengan *wahananing dina* atau sifat hari:

- Jumat ibarat *dewa*, bersifat baik (*becik*),
- Sabtu ibarat *sato*, bersifat buruk (*ala*),
- Minggu ibarat *janma*, bersifat *sedang* (pas-pasan),
- Senen ibarat *pandhito*, bersifat baik,
- Selasa ibarat *kala*, bersifat buruk,
- Rabu ibarat *sadana*, bersifat *sedang*,
- Kamis ibarat *pujangga*, bersifat baik.

Dalam membangun rumah atau kandang ternak selain mempertimbangkan hari juga arah hadap rumah tersebut. Menurut Pak Parto, warga Stabelan meyakini bahwa masing-masing lokasi memiliki nama tersendiri, jika berada di lokasi utara maka pasarannya adalah Wage, jika di selatan pasarannya Paing dan jika berada di sisi barat dusun bernama perumahan Pon serta jika berada di sisi timur dusun bernama perumahan Legi, dan perumahan yang berada di tengah kampung

bernama perumahan Kliwon. Masing-masing lokasi ini juga memiliki perhitungan sesuai dengan *naga dina* atau naga hari:

- Naga ada di timur laut: pada hari Kamis Legi, Rabu Paing, Kamis Kliwon, Senin Paing, Kamis Kliwon, Jumat Pon, Sabtu Wage, Minggu Kliwon, Senin legi, Rabu Pon, Jumat Kliwon, Sabtu Legi, Minggu Paing, Senin Pon, dan Selasa Wage.
- Naga ada di barat daya jatuh pada Jumat Paing, Sabtu Pon, Minggu Wage, Selasa Legi, Kamis Pon, Jumat Wage, Sabtu Kliwon, Minggu Legi, Senin Wage, Rabu Legi, Kamis Paing, dan Rabu Kliwon.
- Naga ada di utara pada hari Senin Kliwon,
- Naga ada di tenggara pada hari Selasa Pon, Rabu Wage, Jumat Legi, Rabu Wage, Jumat Legi, Sabtu Paing dan Senin Kliwon.
- Naga ada di barat laut pada hari Minggu Pon, Selasa Paing, dan Kamis Wage. Perhitungan *neptu* dan pasaran hari akan digabung dengan *neptu* naga hari untuk menghitung hari baik memasukkan sapi ke dalam kandang atau membangun rumah.

Selain perhitungan hari dan pasaran serta lokasi juga diperhitungkan pula jumlah hari dari *mangsa* (bulan), dimana jumlah hari *mangsa* hitungan Jawa tidak sesuai dengan hari pada bulan Masehi atau Hijriah. Perhitungan *mangsa* dibuat semasa pemerintahan Pakubuwana VII (1855) dengan menyesuaikan nama bulan Jawa asli dengan kelender Masehi supaya bisa dijadikan patokan untuk para petani. Perhitungan *mangsa* pada masyarakat Jawa adalah.

- Mangsa ke-1 (*Kasa*) bernilai 41 hari
- Mangsa ke-2 (*Karo*) bernilai 23 hari
- Mangsa ke-3 (*Katiga*) bernilai 24 hari
- Mangsa ke-4 (*Kapat*) bernilai 25hari
- Mangsa ke-5 (*Kalima*) bernilai 27 hari
- Mangsa ke-6 (*Kanem*) bernilai 45 hari
- Mangsa ke-7 (*Kapitu*) bernilai 43 harai
- Mangsa ke-8 (*Kawolu*) bernilai 26 hari
- Mangsa ke-9 (*Kasanga*) bernilai 29 hari

- Mangsa ke-10 (*Kadasa*) bernilai 23 hari
- Mangsa ke-11 (*Dhesta*) bernilai 23 hari
- Mangsa ke-12 (*Sadha*) bernilai 41 hari

Mangsa ini digunakan untuk menghitung hari baik dan naas seseorang yang akan menunaikan hajat selamatan. Selain perhitungan Jawa yang digunakan untuk melaksanakan hajatan baik selamatan daur hidup seperti *mitoni*, kelahiran (*brokohan*), khitanan, akikah, perkawinan dan kematian (mulai dari *surtanah*, selamatan 7 hari, *sepasaran*-35 hari, *nyatus*-100 hari, sampai seribu hari), juga daur hidup pertanian seperti memasukkan sapi, atau *wiwiti* dan memanen tembakau serta membangun rumah. Selain perhitungan hari baik, warga Stabelan juga meminta restu kepada Sunan Bagor yang diyakini sebagai sesepuh dan cikal bakal dari penduduk Stabelan.

6.4.1 Selamatan Gunung

Warga menyebut selamatan erupsi ini dengan selamatan gunung. Selamatan gunung dilakukan ketika gunung Merapi sudah menunjukkan tanda-tanda menjelang erupsi. Tanda-tanda ini antara lain hewan-hewan turun dan masuk kampung, suhu udara tinggi, angin berhembus tidak seperti biasa, dan rumpun bambu bergemeretak. Dulu pertanda paling jelas akan datangnya erupsi adalah api diam yang terlihat di puncak Merapi. Akan tetapi untuk erupsi terakhir ini, titik api tidak terlihat warga sehingga warga banyak yang menganggap erupsi tidak akan terjadi.

Warga percaya, saat Eyang Merapi punya *gawe*, *Mbah* Bagor akan melindungi warga dari rasa takut. Di wilayah Stabelan, apabila *Mbah* Petruk punya hajat, *Mbah* Bagor menutup kawah Merapi dengan tirai awan sehingga gumpalan awan dan letupan lahar sama sekali tidak terlihat dari Dusun Stabelan. Warga percaya bahwa *Mbah* Petruk sedang melakukan perbaikan menjelang hajatan saat kawah Merapi mengeluarkan bunyi gelegar kuat. Di wilayah Srumbung, Magelang, warga menandai bahwa erupsi akan terjadi jika Merapi “nyeblak kemben” tiga kali. Kemben yang dikibas tiga kali ini maksudnya adalah guntur yang terdengar tiga kali. Erupsi 2010 juga terjadi setelah pertanda ini.

Pada saat selamatan gunung, dibuat dan disajikan *sego gunung*, rokok klobot, dan rokok *penthung* “Ojo Lali” yang ditujukan untuk *Eyang* Sunan Bagor. Menurut keyakinan mereka, baik *Eyang* Sunan Bagor atau pun *Eyang* Merapi akan melindungi mereka dari letusan gunung dan banjir lahar dingin. Menurut cerita salah seorang tetua di Stabelan, Pak Purnomo, pada saat hari Selasa sebelum letusan, *Mbah* Petruk sedang bertemu dengan Nyi Roro Kidul untuk “nakokke” (menanyakan) hajat yang akan dilakukan oleh pihak Merapi yang akan melibatkan pihak Laut Kidul (Laut Selatan). Pada hari Jumat, pihak *pepundhen* Merapi melaksanakan acara “tukon jajan pasar”, sementara hari Sabtu adalah hari di mana mereka melaksanakan hajat. Menurut Pak Purnomo, erupsi setelah hari Sabtu dan lahar dingin adalah kegiatan pihak Merapi membersihkan dan membuang sampah yang ada.

Menurut warga Stabelan, biasanya sebelum erupsi terjadi, warga Stabelan juga mendapat tanda berupa *impen* (mimpi) dari Sunan Bagor atau dari *Mbah* Petruk sendiri. Orang yang mendapat *impen* adalah mereka yang dianggap tidak memiliki kepentingan dan tidak pula bisa menambahkan dan juga mengurangi setiap pesan yang disampaikan oleh pihak *pepundhen*. Pada peristiwa erupsi tahun 2010, orang yang mendapat mimpi adalah Juminah (nama samaran). Menurut Pak Purnomo, Juminah diminta untuk membuat *sego gunung* dan juga diberitahu jika Merapi akan mempunyai hajatan (*gawe*) namun tidak diberikan informasi kapan tepatnya. Selain itu ada beberapa warga yang mengaku di “impeni” *pepundhen* *Eyang* Sunan Bagor agar bersiap-siap karena Merapi akan punya *gawe*, seperti Pak Martono (nama samaran) yang mengaku juga di-*impeni* oleh *Mbah* Sunan Bagor. Di dalam mimpi tersebut, ia diminta oleh *Mbah* Sunan Bagor untuk tetap tinggal di desa jika nanti Merapi punya *gawe* sebab ia adalah orang yang dipercaya sebagai pemegang obor yang mengamankan desa dari amukan lahar panas Merapi. Ia juga dititipi pesan untuk warga Stabelan bahwa akan tidak nyaman di rumah. Namun demikian, Dusun Stabelan tidak boleh dikosongkan karena apabila dusun sampai dikosongkan maka tidak ada yang menyediakan makan dan minum untuk *Mbah* Sunan Bagor. Padahal sebagai anak cucu *Mbah* Bagor, warga Stabelan musti berbakti dan tidak meninggalkan *Mbahnya*

sendirian. Apabila semua anak cucu pergi, maka *Mbah* Sunan Bagor akan murka dan akan meratakan Stabelan dengan tanah.

Atas keyakinan tersebut maka pada erupsi 2010 sekitar 15 orang warga tetap bertahan di Stabelan. Seperti Pak Windu, yang menceritakan pada saat erupsi ia sempat bertahan di dalam rumah, namun melihat gelegar Merapi yang begitu besar maka ia memutuskan untuk mengungsi menyusul anggota keluarga dan tetangga lainnya. Sebagian besar warga akhirnya mengungsi setelah pada detik-detik terakhir, warga mengadakan selamatan gunung. Menurut Bu Kadus Stabelan, sebelum erupsi hari Sabtu, beliau sudah turun mengungsi beserta keluarga dan warga. Akan tetapi, beberapa pria tetap tinggal di dusun. Karena khawatir dengan keselamatan warga, tim SAR dan tentara naik ke dusun dan menjemput warga supaya turun. Setelah diadakan perundingan, warga bersedia turun setelah diadakan Selamatan Gunung. Akhirnya Bu Kadus dijemput dari pengungsian di Magelang dengan pesan bahwa *Mbah* Bagor menginginkan *sego gunung*. Bu kadus selanjutnya membuat sesajen sederhana berupa *sego gunung*, dilengkapi dengan dua batang rokok “Jo Lali” dan rokok pentung, bunga-bunga, serta kopi dan teh. Semua sesajen ini dibawa Pak Kadus dan Bu Kadus ke makam *Mbah* Sunan Bagor. Setelah selesai berdoa, semua warga yang tinggal turun mengungsi.

Dua minggu setelah erupsi, warga kembali mengadakan selamatan gunung untuk berterima kasih kepada *Mbah* Sunan karena tidak ada warga yang menjadi korban jiwa. Dusun Stabelan hanya mengalami kerugian kerusakan rumah dan kandang, serta tanaman karena tumpukan abu tebal. Selain menyatakan rasa syukur, warga Stabelan juga mengajukan permintaan maaf karena pada akhirnya semua warga turun mengungsi dan mengosongkan dusun.

6.4.2 Selamatan Dusun

Selamatan komunal adalah selamatan yang dilakukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Selamatan komunal antara lain adalah selamatan dusun yang akan dibahas tersendiri di bagian berikut. Selamatan komunal lain adalah selamatan air, *merti* desa, *merti* jiwa, selamatan Merapi, dan selamatan besar

dusun seperti Suran, Saparan serta Rajaban. Selain itu ada selamatan *weton* dusun, misalnya Jumat Pon di Dusun Stabelan. Selamatan Jumat Pon dilakukan tiap *selapanan*, satu siklus pasaran Jawa. Pada selamatan dusun dalam artian ini tiap warga akan membuat *tumpeng wajaran* seadanya namun semua syarat terpenuhi.

Foto 6.2
Sesajen Wajaran.



Sumber foto: Sita Hidayah

6.4.2.1 Suran, Saparan, Mulud (Sekaten) Rajaban, Ruwahan (Nyadran)

Selamatan dusun ditemui hampir di semua dusun teratas Merapi. Selamatan yang melibatkan seluruh warga biasanya adalah ritual Saparan, Rajaban, dan Ruwahan yang diadakan menurut nama bulan dalam kalender Jawa. Kalender Jawa memakai sistem bulan yang dipakai dalam sistem kalender Saka dan sistem kalender Islam, akan tetapi sistem hari memakai sistem Masehi dan *pancawara* (pasaran). Dalam kalender Jawa, beberapa nama bulan memakai nama bulan Islam, juga Jawa. Nama-nama bulan Jawa tersebut adalah:

1. Sura (30 hari)
2. Sapar (29 hari)
3. Mulud (30 hari)
4. Bakda Mulud (29 hari)
5. Jumadil Awal (30 hari)
6. Jumadil Akhir (29 hari)
7. Rejeb (30 hari)
8. Ruwah/Saban/Sadran (29 hari)

9. Pasa /Puasa (30 hari)
10. Sawal (29 hari)
11. Sela/Dulkangidah, Apit (30 hari)
12. Besar (29 hari)

Bagi orang Jawa, satu Suro adalah Tahun Baru Jawa dan juga tahun Baru Hijriah. Berbeda dengan tahun baru Masehi yang dirayakan dengan meriah, tahun baru Jawa dan Islam biasanya diisi dengan bebersih diri dan mandi (*kungkum*) serta *lek-lekan* (berjaga sepanjang malam untuk merenung). Dusun-dusun Merapi juga merayakan satu Suro dengan selamat *kenduren sego gunung* dan pertunjukan wayang. Suran terbesar selama penelitian berlangsung di Dusun Lencoh, Selo Boyolali dan Dusun Tutup Ngisor, Dukun, Magelang. Suran di Selo ini kadang-kadang disebut juga Labuhan karena warga Selo menanam kepala kerbau di Pasar Bubrah puncak Merapi. Bulan Suro adalah bulan yang “angker” atau “pantangan” bagi masyarakat Jawa sehingga pada bulan tersebut tidak dilakukan hajatan. Hanya keluarga keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunan Surakarta yang boleh melakukan hajatan pada Bulan Suro.

Foto 6.3
Suran Dusun Lencoh Boyolali



Sumber Foto: Mochtar

Ritual dusun selain berupa selamat kadang-kadang juga ditujukan untuk syukuran yang bersifat menghibur. Termasuk dalam ritual ini adalah Sekatenan seperti yang dilakukan di Dusun Tutup Ngisor, Desa Sumber, Magelang. Warga Dusun Tutup Ngisor sudah melakukan tradisi Sekaten untuk merayakan Maulid

Nabi sejak tahun 1933 dengan melagukan *uyon-uyon* Sekaten. Selain gamelan, warga juga mengadakan pertunjukan wayang orang pada bulan Suro, Idul Fitri atau HUT Kemerdekaan RI.

Ritual dusun yang paling umum ditemukan di dusun-dusun sekitar Merapi adalah Saparan dan Rajaban. Saparan dilakukan sesuai dengan nama bulan Sapar. Saparan biasanya diisi dengan *memerti desa* (bersih desa) atau *memerti tuk/kali* (bersih sumber air/sungai). Dalam Saparan seperti yang dilakukan di Dusun Trono, Magelang, atau Desa Wonokerto di Turi, Sleman, Saparan dimulai dengan berziarah dan membersihkan makam *pepundhen* dusun/desa, kemudian warga membuat tumpeng untuk dibawa ke rumah kepala dusun untuk *diurupi/diujuhi* (didoakan). Tumpeng yang dibuat warga disebut tumpeng *rasul* (tumpeng nasi uduk), *ulam* lembaran, ayam *ingkung*, buah-buahan, bunga dan jajan pasar. Tumpeng warga akan dibawa pulang, sementara tumpeng *jangka* yang merupakan *sesajen* utama setelah didoakan akan dibagikan kepada warga.

Saparan di Desa Candirejo, Sleman juga seperti di dusun lain dengan membuat *sesajen uluwetu* yaitu *sesajen* yang berupa buah-buahan dan sayuran serta *nanggap* wayang. *Sesajen* ini ditujukan kepada Dewi Sri dan dilarung di *tempuran* (pertemuan) sungai Sileng, Sungai Progo, dan Pabelan. Warga mengungkapkan rasa syukur sekaligus memohon panen dan kehidupan yang baik. Saparan juga dilakukan oleh warga Desa Kembang Kuning di Kecamatan Cepogo, Boyolali yang dikenal sebagai desa kerajinan logam, khususnya tembaga. Warga Desa Kembang Kuning membuat *tenongan* (*sesajen* dan tumpeng yang dimasukkan ke dalam *tenong*, yakni wadah bulat dari bambu). Sebelum Saparan dimulai, warga membersihkan makam dan berziarah ke *pepunden* Nyai Sekar Kuning dan Empu Kriya. Semua *sesajen*, termasuk nasi *rasul* dan *ingkung*, didoakan dan kemudian dibawa pulang.

Upacara *Nyadran* merupakan upacara komunal karena terjadi kedekatan hubungan kekerabatan masyarakat tingkat dusun. Pada dasarnya ritual *Nyadran* ini dalam bentuk ziarah kubur pada bulan Ruwah sebelum bulan *Pasa* tiba. Semua orang yang memiliki waris kubur wajib melakukan ziarah dan merawat makam orang tua, kerabat, dan juga pendahulu mereka. Sementara, selamatan *Nyadran*

bisa dilakukan secara komunal atau sendiri-sendiri di tingkat rumah tangga. Hal ini tergantung oleh ada tidaknya yang meng-*ujup*-kan *sesajen* yang sudah dibuat. Apabila dalam rumah tangga tidak ada yang bisa meng-*ujup*-kan maka sesajen akan dikumpulkan di rumah Pak Bayan Stabelan. Selanjutnya *sesajen-sesajen* tersebut *diujubkan* bersama-sama oleh orang yang dianggap mampu “menghantarkan” pesan pada leluhur. Selanjutnya *sesajen* berupa tumpeng nasi dan lauk pauk seadanya (*wajaran*) ini akan dibawa pulang kembali.

Dusun Stabelan menyelenggarakan upacara Rajaban pada hari Selasa Kliwon tanggal 15 Rajab atau 5 Juni 2012. Rajaban sudah menjadi tradisi warga Stabelan sejak lama. Akan tetapi tradisi wayangan yang mengikutinya baru dimulai tiga tahun yang lalu. Seorang dalang dari Magelang diundang pada suatu hajatan. Sang dalang menawarkan untuk tampil pada malam Rajaban Dusun Takeran, Dusun Stabelan, Desa Tlogolele dengan harapan keselamatan dan semoga dengan pertunjukkan wayang Mbah Bagor terhibur dan dalam pandangan sebagian warga setelah pertunjukkan wayang diselenggarakan, warga dusun makin makmur. Warga tidak keberatan dengan pertunjukan ini sekalipun mereka harus mengumpulkan iuran sebesar Rp100.000,- yang dipakai untuk membeli kerbau kecil. Kerbau disembelih Selasa pagi. Daging dimasak dan dibagi ke penduduk. Sementara, bagian-bagian tubuh seperti tanduk, kuku, telinga, disisihkan untuk sebelas buah sesajen yang akan diletakkan di tiap persimpangan jalan, sungai, dan juga sumber air.

Rumah Pak Kadus sudah sibuk sejak pagi. Ibu Kadus mempersiapkan makanan untuk hidangan para rombongan wayang yang akan datang sore harinya. Di tiap ruang tamu warga Stabelan, warga menyiapkan jajanan dan kue-kue untuk para tamu yang akan datang berkunjung. Sebagian besar rumah membuat wajik dan tape. Selain jajanan, warga juga menyediakan makan malam. Setelah matahari lengser, warga mulai berdatangan ke rumah Pak Kadus dengan membawa nasi uduk, lauk, dan kerupuk. Masing-masing rumah satu sesajen yang sebagian besar diantar anak-anak dan remaja. Setelah semua sesajen warga dusun terkumpul, *kenduren* dimulai dengan *diujubi* Pak Kaum yang didampingi Pak Kadus. Setelah sesajen *diujubi*, warga makan tumpeng yang disediakan keluarga Pak Kadus dan

semua sesajen dibawa pulang kembali. Sore hari rombongan wayang tiba dan mulai membangun panggung dan menata gamelan serta wayang di halaman depan rumah Pak Kadus. Dusun Stabelan harus menunggu panggung yang masih dipakai pengajian Rajaban Dusun Takeran yang berada di bawah Dusun Stabelan. Malam sebelumnya pertunjukan wayang diadakan di dusun Takeran. Wayang berlangsung sampai dini hari menjelang subuh.

6.4.2.2 *Memerti Kali dan Tuk*

Kelurahan Kepuharjo, Cangkringan, Sleman mengenal selamatan *becekan* yaitu ritual komunal untuk meminta hujan, mencegah banjir lahar, dan juga memperbaiki sungai (*dandan kali*). Upacara *becekan* juga disebut selamatan *memerti kali*. Upacara serupa juga ditemukan di dusun-dusun lain di lereng Merapi. Sebagai gambaran, upacara *becekan* di Kepuharjo ini diikuti oleh warga Dusun Pagerjurang, Dusun Kepuh, dan Dusun Manggong Kelurahan Kepuharjo.

Upacara *becekan* yang diadakan pada mangsa Kapat pada hari Jumat Kliwon dimulai dengan *memerti* sumur di Dusun Kepuh, kemudian upacara berlanjut ke tengah sungai Gendol, serta upacara berakhir di masing-masing dusun. Hal yang menarik dari ritual ini adalah tidak diikutkannya perempuan dalam proses ritual, termasuk dalam persiapan sesajen. Gulai daging kambing jantan dan sesajen tidak boleh tersentuh wanita. Bahkan upacara ini hanya boleh diikuti kaum laki-laki.

Contoh upacara *merti tuk* dilakukan oleh warga Dusun Kuncen Mas, Desa Samiran, Selo, Boyolali. Biasanya *memerti tuk* (sumber air) dilakukan di *tuk* Dadap Er, *Tuk* Setren, Pampung, dan *Tuk* Tampah. Akibat erupsi 2010, *tuk* rusak sehingga warga melakukan selamatan sebelum memperbaiki dan membersihkan *tuk*. Upacara *memerti tuk* ini biasanya dilakukan pada bulan Sadran atau tepatnya tanggal 20 Ruwah, sehingga disebut Nyadran. Biasanya ritual Sadranan dimulai dengan kenduri, membersihkan makam, dan secara serentak warga membuat tumpeng nasi kuning dan nasi asin di rumah masing-masing. Selanjutnya Selamatan dilakukan di dua tempat yaitu di rumah Kadus Kuncen Mas dan di pelataran dekat dengan keempat sumber air. Ada dua syukuran, yang pertama

adalah syukuran perempuan dimana *sesajen* yang *diurupi* adalah nasi rasul, kembang rasul yang terdiri dari mawar, kantil dan kenanga, sementara syukuran kaum laki-laki memakai *sesajen* ayam *ingkung* jago dan nasi *golong*, pisang, jajan pasar, dan aneka jenang.

Memetri kali juga dilakukan oleh warga Stabelan. Pada Selasa 4 Oktober 2011 Kadus Stabelan mengadakan *slametan kali*. Keluarga kadus merasa perlu mengadakan selamatan karena setelah tiga hari pompa air tidak bekerja, akhirnya air bisa mengalir. Kadus bernadzar seandainya air mengalir lagi, beliau akan melakukan selamatan. Selama tiga hari air tidak mengalir, penduduk Stabelan membeli air di Dusun Takeran seharga Rp 1000 per jerigen kecil. Kadus mengambil air dengan motor, begitu juga penduduk Stabelan lainnya.

Slamatan kali yang dilakukan oleh beberapa dusun di Merapi bukanlah selamatan *larung sesajen* di sebuah sungai (kali), melainkan di bak penampungan air. Sedangkan aliran air di Dusun Stabelan disebut jurang. Sesajen yang dipakai dalam selamatan ini disebut sesajen *wajaran*, yaitu: “Seadanya yang penting lengkap.” Selamatan paling lengkap adalah *Nyadran* di mana penduduk Stabelan akan menyembelih sapi dan menggunakan kepala sapi untuk *sesajen*.

Kadus berbelanja tempe, tahu, kapur sirih pinang, jenang, ketan, mie bihun, bunga mawar, jajanan anak-anak baik tradisional maupun kemasan, rokok *penthung*, rokok klobot, dan kemenyan di pasar di Muntilan Magelang. *Sesajen* lain disiapkan kadus yang terdiri dari umbi-umbian yang dikumpulkan dari ladang: ubi jalar, ubi kayu, *ganyong*, talas, pisang ambon dan pisang kecil yang direbus. Selain itu ada tambahan ubi kayu yang dibakar. Jenang merah dan ketan juga dibakar. Cara membakar bahan-bahan ini tidak boleh terkena api, dan tidak boleh ditiup. Menurut warga, apabila bahan *sesajen* ini ditiup, si peniup mengalami mimisan. Namun ada warga yang mengatakan bahwa larangan meniup sesajen sebenarnya adalah sikap hati-hati supaya ketidaksengajaan meludah ke sesajen tidak terjadi.

Selain merebus dan membakar bahan *sajen*, kadus juga menanak nasi jagung, nasi beras biasa dan nasi rasulan. Nasi rasulan adalah beras yang dimasak dengan parutan kelapa. Semua jenis nasi ini dibuat tumpeng kecil. Satu tumpeng

nasi biasa dibuat besar untuk kenduri. Tuan rumah juga menggoreng kerupuk rengginang, kerupuk udang dan *peyek* dari tepung jagung untuk tambahan *sesajen*. Selain itu tuan rumah juga menyediakan ubi parut goreng (*emplang*) sebagai makanan kecil.

Ada dua *sesajen* yang disiapkan. Satu *sajen* rumah, dan satu lagi di sumber air. Semua bahan-bahan yang disebut di atas ditata, ditambah dengan segelas kopi dan segelas teh juga dian (lampu minyak tanah) yang akan menyala sepanjang malam. Untuk kelengkapan *sesajen* berupa *ingkung*, seorang warga pertama-tama menyembelih ayam di luar rumah dengan cara membelah ayam dari pangkal bawah sampai dada ayam. Lalu mengeluarkan semua isi perut ayam ke lembaran plastik. Telur (uritan) dan darah disisihkan di sebuah piring. Sebelum darah ditampung, setetes minyak goreng dituang ke dalam piring. Hal ini dilakukan supaya darah tidak sepenuhnya mengental dan lengket.

Semua usus, tembolok, dan hati serta ayam dibersihkan lalu dicuci. Ayam yang masih berbulu ditaruh ke dalam ember lalu disiram dengan air panas, dan kemudia bulunya dicabut. Kaki ayam lalu dilipat ke dalam menjadi *ingkung*. Dengan bumbu mirip opor, ayam dimasukkan ke dalam panci dan direbus sampai matang. Lalu *sesajen* mulai ditata. Sebuah kardus bekas air minum kemasan dipakai sebagai wadah *sesajen*. Semua umbi-umbian dan tumpeng *sego* jagung dan *sego* biasa dimasukkan. Begitu pula pecel dan bihun rebus. Kapur sirih, air bunga, teh, kopi, krupuk dan peyek, jenang dan ketan bakar, ubi kayu bakar, dan jajan-jajanan ditata. Semua jajanan dibuka kemasannya. Lalu, kulit ceker ayam, jengger, dan darah ayam dimasukkan ke dalam *pincukan* daun dan semua sesajen ditambahkan. Beberapa pria berdatangan dan duduk-duduk di dapur.

Setelah semua sesajen siap, Pak Kaum didaulat membakar kemenyan untuk kedua sesajen. Pak Atmo merapal doa-doa yang intinya meminta maaf apabila ada kesalahan selama pengerjaan perbaikan pompa dan saluran air, memohon selamat dan kesejahteraan, serta mengucapkan terima kasih kepada arwah *Mbah* Bagor. Setelah selesai, sesajen dibawa dua pemuda ke bak penampungan air.

Jam 6.30 selepas Magrib acara kenduri *memetri kali* dimulai. Sekali lagi Pak Kaum memimpin acara. Sebelum doa Al-Fatihah dibacakan, kemenyan dibakar sambil diiringi rapalan doa yang sama dengan doa yang dibacakan pada saat menyiapkan sesajen. Untuk kenduri ini, tumpeng yang dipakai adalah tumpeng rasulan dan berukuran besar, juga tumpeng *golong*. Tumpeng juga dilengkapi *ingkung* yang kemudian dibagi-bagikan kepada warga yang berdoa dengan dipimpin seorang ustad.

Keseluruhan ritual yang melibatkan seluruh warga dusun ini bertujuan menjaga harmoni dengan alam dan sesama warga. Ritual bersih desa dan bersih sumber air menunjukkan kesadaran lingkungan yang tinggi, dan berfungsi untuk mempersatukan warga. Nasi golong, dua tumpeng bulat melambangkan “golong gumilik dadi siji” yang menyatukan warga dalam satu kesatuan.

6.4.3 Selamatan Daur Hidup

Selamatan daur hidup adalah semua selamatan yang dilakukan terkait daur hidup, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Penelitian ini menunjukkan bahwa ritual daur hidup di Stabelan mirip dengan ritual pada masyarakat Jawa lainnya.

Pernikahan merupakan selamatan daur hidup yang paling besar dalam siklus hidup orang Jawa. Dalam menentukan hari pernikahan, perhitungan hari baik yang digunakan lebih rumit dibandingkan untuk membangun rumah atau kandang. Selain menghitung jumlah dari hari kelahiran orang tua calon mempelai perempuan juga dihitung pula jumlah kelahiran dari calon mempelai perempuan. Di samping itu akan dihitung hari kelahiran sang kakek dan nenek yang masih hidup dari kedua calon mempelai. Namun jika sudah meninggal, baik keduanya ataupun salah satu, maka yang dihitung adalah hari kematian dari kakek atau nenek. Perhitungan kakek dan nenek ini hanya berlaku pada calon pengantin perempuan saja. Selain perhitungan hari, beberapa persyaratan juga harus dipenuhi oleh orang yang akan punya hajjat, di antaranya sesajen yang harus dipenuhi berupa:

1. *pendeman* berupa gereh pethek, kemiri, telur ayam, yang kesemuanya dikubur di depan rumah,
2. *buwangan* berupa kemiri, gereh *pethek*, telur ayam, jenang merah dan putih, serta uang receh, yang diletakkan di pojokan rumah, perempatan dekat rumah, serta dapur rumah
3. *pisang sak jodho* yang diletakkan di tempat pengantin bertemu,
4. *beras* yang nantinya akan diberikan dari pengantin laki laki kepada pengantin perempuan saat *penganten temu*; setelahnya beras disimpan oleh pengantin dengan harapan akan *enteng* rejeki.

Ada beberapa pengecualian misalnya mengenai hari baik untuk melakukan *mitoni*. Di Stabelan hari baik untuk melakukan *mitoni* adalah Sabtu Pon. Sementara di dusun wilayah Sleman hari baik jatuh pada hari Jumat.

6.4.4 Selamatan Daur Pertanian dan Peternakan

Selamatan pribadi dilakukan perseorangan atau dalam tingkat rumah tangga. Biasanya selamatan ini terkait dengan kepentingan pribadi, seperti selamatan motor, selamatan sapi, dan *miwiti* (upacara panen). Upacara selamatan motor masih dilakukan oleh warga masyarakat terdekat Merapi tidak hanya di Dusun Stabelan-Boyolali, tetapi juga Trono, Dusun Babatan di Magelang. Selain itu sebagian besar warga lereng Merapi yang memiliki sapi juga melakukan selamatan sapi (*brokohan* sapi) pada saat pertama kali memasukkan sapi dalam kandang. Upacara selamatan motor dan sapi dilakukan menurut hitungan hari baik/*weton* sang pemilik. Untuk Stabelan, hari selamatan sapi dan motor tidak hanya ditentukan oleh *weton* pemilik, tapi juga tempat tinggal sang pemilik.

Bagi warga lereng Merapi yang bekerja sebagai petani melakukan selamatan seperti *Miwiti*, *Ngurup*, dan *Ngangsak*. Selamatan membuka lahan baru dan selamatan *miwiti* (panen) adalah selamatan pertanian yang masih dilakukan di Stabelan dan juga dusun-dusun terdekat dari puncak Merapi. Selamatan *miwiti* biasanya dilakukan pada saat panen jagung dan panen besar lainnya, misalnya panen tembakau. Upacara *miwiti* dilakukan setelah melakukan perhitungan kapan tepatnya kegiatan itu dilaksanakan. Perangkat *wiwitan* ini sendiri berupa tumpeng

cilik. Tumpeng *cilik* ini adalah tumpeng nasi yang diberi *bumbon* dari *kambil*, dan garam serta dilengkapi daging ayam *pucuk*-an. Tiap pucuk dari daging ayam itu diambil untuk nantinya diletakkan di tengah-tengah areal ladang jagung. Selain itu juga ada berupa *bothok*, *tukon* pasar dan *pelas ares* (jantung pisang). Mantra yang diucapkan adalah “*aku arep due gawe, jin setan mryangan tak suwun ngaleh soko panggonan kene ojo ngganggu pagaweanku*” sambil membakar kemenyan di tengah areal ladang serta mengikat beberapa pucuk jagung sebagai pertanda jika jagung siap untuk dipanen.

Ngurup seringkali dikaitkan juga dengan panen padi. *Ngurup* biasanya berupa kegiatan membeli jajanan di sawah yang ditukar dengan sejumlah padi hasil panen. Jajanan bisa berupa dawet, gorengan, atau rokok. Sementara *ngangsak* adalah kegiatan memungut padi sisa panen. Upacara terkait dengan pertanian padi lebih dikenal di lereng Merapi bagian barat (Magelang) dan selatan (Sleman).

Sesaji selamat pribadi dilakukan di rumah. Sesaji yang dipersiapkan adalah sesajen *wajaran*, yang artinya semua ada meski apa adanya. Rokok linting, rokok klobot, dan rokok *pentung* Jo Lali, serta kopi yang terbuat dari daun kopi yang disangrai hangus, teh, kemenyan, sirih, dan bunga. Apabila rokok tidak lengkap, sesaji ditambah uang seratus rupiah. Rokok *pentung* Jo Lali dipakai di Stabelan saja, sementara di wilayah lain ada yang memakai rokok *pentung* cap Jeruk atau cap Semar. Tiap selamat biasanya disertai ziarah ke makam *Mbah* Sunan Bagor baik yang dilakukan sendiri atau secara bersama.

Ritual dusun terkait sumber air lain adalah upacara selamat sumber air seperti yang dilakukan warga Desa Tumang dan warga Desa Bali Kecamatan Cepogo, Boyolali. Warga menanam kepala kambing jantan di bantaran Sungai Gandul dekat sumber air Wonopedut. Sesajen yang dibuat hampir sama dengan sesajen selamat kali Dusun Stabelan.

6.5 Potensi Mitigasi Melalui Ritual

Pada bagian ini, kami ingin mengajukan sebuah argumen yang diajukan oleh Richard Sosis (2009) yang menyatakan bahwa sistem kepercayaan Merapi

adalah sebuah “kompleks adaptasi yang berfungsi sebagai penyangga berbagai bentuk kerjasama, koordinasi, dan kehidupan sosial manusia.” Singkatnya, sistem kepercayaan ini dilihat sebagai sebuah sistem komunikasi, kooperasi dan koordinasi yang kompleks. Melalui berbagai contoh di atas, kita bisa melihat bahwa ritual warga Merapi berfungsi dalam keseluruhan proses mitigasi, evakuasi dan rekonstruksi pasca erupsi Merapi. Fungsi-fungsi komunikasi, kooperasi dan koordinasi ini akan dijelaskan kembali sebagai sumbangan pengetahuan praktis untuk strategi mitigasi dan penanganan bencana.

Pertama, dari segi komunikasi bahasa ritual. Bahasa yang dipakai dalam ritual adalah bahasa yang dipahami secara kolektif. Dalam berbagai sistem penamaan dan struktur bahasa terangkum pengetahuan dan pemahaman mengenai alam sekitar, hubungan antar manusia dan lingkungan, perasaan serta budaya materi setempat. Bahasa yang disepakati bersama ini menyantukan warga dalam kebersamaan komunal yang memupuk solidaritas bersama. Bahasa ritual adalah bahasa yang dipakai dan dipahami oleh warga setempat, termasuk pemahaman mengenai bahaya. Pemuka warga menyampaikan persoalan paling eksistensial, misalnya mengenai keselamatan warga, dalam ritual komunal. Pemahaman mengenai “bahaya” seringkali berbeda antara pemerintah dan warga, sehingga kesamaan bahasa antara pemerintah dan warga menjadi penting.

Yang *kedua* adalah aspek koordinasi. Ritual dilakukan berulang-ulang. Pengulangan memberi waktu bagi warga Merapi untuk memahami dan menjaga kewaspadaan terhadap ancaman erupsi. Dusun-dusun terdekat puncak Merapi sering melakukan selamatan. Dalam selamatan seringkali diingatkan mengenai pentingnya *eling* dan waspada. Dalam selamatan, yang diutamakan adalah harmoni dan kerukunan antar warga. Doa-doa biasanya diawali dengan permintaan maaf terhadap sesepuh desa dan penghuni semesta, juga warga yang berfungsi untuk memulihkan ketidakharmonisan. Seperti yang diamati di berbagai ritual dusun yang diselenggarakan di lereng Merapi, masyarakat berpartisipasi penuh dalam ritual sehingga kekompakan masyarakat terjaga dan koordinasi evakuasi akan lebih efektif.

Hal penting dari pemahaman mengenai ritual ini adalah penerimaan warga. Sarjana Antropologi Roy A. Rappaport menulis bahwa ritual tidak hanya menciptakan suasana kebersamaan dan kesepahaman, tapi juga mengkondisikan penerimaan (*acceptance*) warga (1979:193). Penerimaan warga akan wacana mengenai seluk-beluk Merapi secara tradisional diwujudkan dalam peran serta aktif warga dalam berbagai ritual selamat.

Ketiga, ritual berfungsi sebagai pendukung berbagai bentuk kerjasama sosial. Ritual memungkinkan warga untuk mempersiapkan diri dengan situasi liminal atau antara, yakni berupa erupsi. Hal ini penting untuk memberi ruang bersama warga agar hati-hati mengungkapkan keresahan dan berbagi beban dengan sesama warga baik beban moral maupun psikologis. Semangat komunitas yang dibangun melalui ritual komunal tidak hanya berguna untuk membangun solidaritas, “mengalami bersama” dalam duka tapi juga dalam menerima bantuan. Kebanyakan penduduk yang terpapar erupsi Merapi memiliki prinsip “bagito” (bantuan dibagi rata, tanpa kecuali). Apabila kesamarataan tidak bisa dicapai, penduduk cenderung menolak bantuan atau menjual bantuan untuk mengumpulkan dana bersama. Kesungguhan warga Merapi untuk melakukan ritual pemulihan dengan segera adalah juga semangat bersama untuk segera bangkit dan kembali menjalani hidup.

Selamatan penangkal bahaya Merapi paling umum adalah Selamatan Merapi. Selamatan Merapi dilakukan setiap ada penduduk yang mendapat mimpi atau *wisik* (bisikan) di Sleman atau Magelang. Seperti yang terjadi pada menjelang pertengahan bulan Oktober 2011 di Dusun Stabelan, seorang penduduk mendapat mimpi bahwa hari Jumat Kliwon (Jumat 14 Oktober 2011) akan turun hujan besar sehingga kemungkinan akan terjadi banjir lahar.

Rumah Kadus Stabelan adalah titik temu ritual dusun yang dilakukan tiap Jumat Pon. Selamatan ini diikuti oleh semua warga dusun. Tiap rumah akan membawa tumpeng mereka masing-masing untuk didoakan di rumah Kepala Dusun untuk kemudian saling ditukar. Sepanjang ingatan penduduk, belum pernah terjadi ada penduduk yang tidak terlibat dalam ritual dusun ini.

Ritual juga bisa dipandang sebagai strategi mitigasi bencana. Penduduk memanfaatkan pengetahuan lokal dan akal mereka untuk menyusun strategi penanganan bencana atau dalam bahasa lokal “*naluri* berdasar *niteni*.” Hampir semua warga dusun teratas Merapi menyinggung mimpi sebagai salah satu cara mitigasi paling umum. Untuk wilayah sisi selatan, *impen* (mimpi) didapatkan oleh tokoh religius lokal dusun atau yang paling diterima warga sisi selatan adalah juru kunci Merapi. Sementara di wilayah Jawa Tengah, siapa saja bisa mendapatkan *impen* yang mengingatkan warga untuk waspada, meski yang paling sering mendapat *impen* adalah pemuka desa. Mereka yang mendapat mimpi adalah orang yang dianggap “polos”, lugu dan tidak punya kepentingan apa-apa. *Niteni* dalam pengertian ini tidak hanya memperhatikan, tapi juga memperhitungkan tanda-tanda alam. Bahkan *Mbah* Maridjan tidak hanya *niteni*, tapi juga mencatat mimpi yang pernah dia dapatkan sejak tahun 1975.

Upacara penangkal lain bisa ditemui di Dusun Tambakan, Sindumartani, Cangkringan dan juga Desa Keniran, Srumbung, Magelang. Akan tetapi, selamatan banjir lahar dingin yang paling besar dilakukan oleh warga Desa Jumoyo Kecamatan Salam Magelang. Warga Desa Jumoyo adalah warga yang paling sering menjadi korban banjir lahar dingin sungai Kali Putih. Sesajen berupa tumpeng dan buah-buahan dibawa ke bantaran sungai kemudian diarak mengelilingi dusun Gempol yang mengalami kerusakan terparah akibat banjir lahar. Karena berkali-kali terkena lahar dingin, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012, selain tumpengan dan sesajen buah, warga juga menanam dua kepala kerbau di bantaran sungai Kali Putih.

6.6 Penutup: Ritual untuk Warga Merapi

Peristiwa erupsi gunung berapi bukan sekedar suatu gejala alam. Dalam sebuah peristiwa yang memiliki dampak luar biasa seperti letusan gunung api, mereka yang mengalami memberi makna pada gejala yang dari sudut pandang yang berbeda bersifat alamiah semata. Pada tataran ini, bahasa keseharian tidak memadai untuk melukiskan makna dan perasaan yang mereka alami. Eerupsi

tidak hanya mengenai saat letusan terjadi, tapi juga antisipasi warga terhadap ancaman bencana, tindakan dan pilihan, serta proses pemulihan pasca bencana.

Studi yang dilakukan oleh Tim Laboratorium Antropologi untuk Riset dan Aksi (LAURA) berusaha memahami cara pandang warga terhadap ruang hidup dan lingkungan yang rawan terhadap ancaman bahaya erupsi Merapi. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi (lihat Lampiran ???) di wilayah gunung paling aktif di dunia memberi petunjuk mengenai kemampuan warga beradaptasi dengan lingkungan yang rentan bencana ini. Lebih jauh, studi LAURA mencoba menggali pengetahuan lokal yang memberi kemampuan warga bertahan hidup dan mengetahui kondisi-kondisi yang mendorong partisipasi warga dalam tata kelola kebencanaan.

Triyoga (2011) telah melakukan studi etnografi di wilayah lereng Merapi pada tahun 1986 dan memberikan gambaran yang cukup mendalam mengenai sistem kepercayaan warga menyangkut Merapi. Bagi warga, gunung Merapi secara inheren adalah sakral dan segala peristiwa yang melingkupinya adalah religius. Menurut mereka, peristiwa erupsi adalah sebuah ritual daur kehidupan, sebuah *gawe*. Aktivitas Merapi dianalogikan seperti aktivitas keseharian warga Merapi sehari-hari (Dove. 2010) dan studi ini dibangun mengikuti model ini, bahwa erupsi Merapi dipahami dalam bahasa ritual daur hidup. Seperti yang dicatat baik para sejarawan dan antropolog, erupsi Merapi dipandang memiliki dampak langsung pada kehidupan manusia, khususnya dalam ranah budaya dan politik (Schlehe. 2008, Dove. 2008). Peristiwa erupsi sering dipakai sebagai model dari *jagad gede* mengenai pergantian penguasa, revolusi kebudayaan atau kehancuran masyarakat secara umum. Erupsi 2010 juga tidak jauh dari wacana tradisional ini.

Dalam perspektif akademis, erupsi Merapi bisa dikaitkan dengan aspek budaya, politik, atau ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Judith Schlehe (1996 dan 2006) meletakkan bencana erupsi pada tataran sosial politik warga Merapi dan menyimpulkan bahwa peristiwa erupsi merupakan arena pertarungan wacana modernitas dan politik. Berdasarkan studi yang dilakukan setelah erupsi 1994, munculnya penjelasan-penjelasan tradisional dalam pemaknaan bencana ini tidak

hanya berhubungan dengan menguatnya kepercayaan terhadap kosmologi Jawa mengenai *manunggaling kawula gusti* atau moral tradisional mengenai hubungan langsung antara *jagad gedhe* dan *jagad cilik* tapi juga penggunaan penjelasan-penjelasan tradisional untuk mendukung klaim-klaim politik, baik oleh pemerintah mau pun warga setempat, terutama yang dikaitkan dengan ikatan emosional warga dengan tanah (Schlehe. 2006: 292).

Dua wacana dominan mengenai erupsi Merapi adalah wacana modern yang didukung pemerintah dan wacana tradisional yang masih dipegang warga. Konstruksi yang dibangun warga biasanya sejalan dengan aspirasi warga mengenai klaim kepemilikan tanah. Dusun-dusun seputar Merapi memakai mitos mengenai pepundhen nenek moyang untuk mendukung klaim mereka atas tanah. Sementara pemerintah perlu melakukan tata kelola kebencanaan untuk mencegah terjadi kerugian dan korban jiwa akibat erupsi.

“Dalam rentang sejarah penduduk yang panjang, warga Merapi adalah orang merdeka. Lereng-lereng Merapi, salah satu gunung api paling *aktif* di dunia, dulunya selalu menjadi tempat pengungsian untuk semua orang yang tak mau tunduk. Pada abad ke-15, mereka adalah warga kerajaan Hindu-Budha Majapahit yang menjauhi penyebaran agama Islam di daerah dataran rendah Jawa. Di abad ke-19, mereka adalah para petani yang menolak bergabung pada *Cultuurstelsel*, sistem kerja paksa yang diberlakukan di daerah perkebunan oleh kaum penjajah Belanda. Dan tahun 60’an, mereka adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diancam hukuman mati oleh pemerintah Soeharto. Para penduduk Merapi itu dikenal gigih dan eras, bahkan tak satu pun letusan yang mampu mengusir mereka dari daerah itu...” (Inandiak, 2010:58).

Berbagai mitos di lereng Merapi menjiwai kemerdekaan warga Merapi. Mitos mengenai *Mbah Permadi* yang menolak perintah Batara Guru sealur dengan cerita mengenai Nyai Petruk yang bertemu Raja Brawijaya. Menurut cerita Sabdo Palon Noyo Genggong dari Kitab Darmogandul, *Mbah Petruk* dan Kyai Petruk akan menagih janji kepada penguasa yang tidak adil. Apabila *Mbah Petruk* menagih janjinya, maka akan terjadi letusan Gunung Merapi. Mitos warga Boyolali mengenai *Mbah Petruk* yang menolak diislamkan juga memiliki alur yang mirip.

Dari studi LAURA di lereng Merapi, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, warga Merapi bukanlah entitas tunggal yang seragam.

Keragaman warga ini bisa terlihat dari ragam ritual dan mitos yang bersifat sangat lokal. Kepercayaan terhadap *danyang* dusun berbeda antara satu dusun dengan dusun lainnya. Keragaman ini juga terlihat dari cerita yang beragam mengenai *Mbah Petruk*. Meski *Mbah Petruk* sering dianggap warga Merapi di semua lereng sebagai penguasa gunung Merapi, asal usul dan cerita mengenai tokoh ini bermacam-macam.

Pada masa krisis, mitos menjadi sangat relevan. Mitos dan praktek sehari-hari seringkali tidak berkesesuaian. Hanya pada saat krisis, dua horizon ini bersatu (Ortner, 2010) dan menjadi masuk akal. Krisis ini tidak saja pada saat erupsi berlangsung, tapi juga pada masa-masa ketika warga Merapi harus melakukan evakuasi, menyintas, dan pada masa peralihan sampai saat warga pulang atau menjalani kehidupan normal. Mitos mengenai *Mbah Petruk* sering diabaikan pada saat situasi berjalan wajar dan tenang. Akan tetapi, pada saat krisis seperti pada saat erupsi, warga menghadirkan kembali mitos *Mbah Petruk* melalui berbagai ritual yang dijalankan.

Penelitian LAURA UGM melihat adanya pergeseran pola pikir masyarakat mengenai bencana. Pemerintah telah cukup berhasil menyebarluaskan pengetahuan mengenai bencana dan bagaimana membuat respon yang tepat mengenai ancaman bahaya. Penelitian LAURA ini membawa pada pemahaman mengenai pentingnya sistem kepercayaan setempat yang mempengaruhi perilaku tanggap bencana. Sistem kepercayaan yang mungkin tidak terlalu tampak di permukaan akan menjadi jelas pada saat warga Merapi menyelenggarakan ritual. Pemahaman yang fungsional ini sengaja dipakai untuk tujuan yang sangat pragmatis. Ritual juga bisa dipandang sebagai strategi mitigasi bencana. Penduduk memanfaatkan pengetahuan lokal dan akal mereka untuk menyusun strategi penanganan bencana atau dalam bahasa lokal "*naluri berdasar niteni.*"

Dengan perspektif yang sedikit mengejutkan, Michael R. Dove (2010) mengaplikasikan konsep Foucault (1991) mengenai *panopticon* dalam memahami

budaya mawas dan mawas diri warga Merapi.¹ Foucault membahas sistem pengawasan pemerintah dan pembentukan subyek melalui konsep ini. Dove menulis bahwa kepercayaan terhadap para roh-roh Merapi menyediakan model bagi warga sistem pemerintahan, pengawasan dan juga untuk mawas diri. Ritual menjadi penting untuk memahami pandangan warga Merapi terhadap bencana dan bagaimana warga Merapi merespon bencana ini. Mitos mengenai *Mbah* Petruk dan *Mbah* Merapi mengandaikan erupsi Merapi sebagai suatu ritual daur hidup. Sebuah daur yang berulang, tapi terus berputar. Sebuah ritual yang genting tapi wajar *Mbah* Merapi sedang punya hajat. Pada saat erupsi, kita bisa melihat bagaimana mitos ini bekerja sebagai wacana.

Ritual dusun seringkali menjadi ajang pemersatu paling utama dan satu-satunya. Tanpa memandang perbedaan sosial dan agama, selamatan dusun akan selalu menjadi ajang pemersatu. Selamatan ini “merayakan” semangat dusun seperti yang ditulis Durkheim (SUMBER). Semua yang berarti mengenai dusun mereka: sanak saudara, tanah pertanian, rumah, makam leluhur, dan hewan peliharaan terangkum dalam ritual dusun dan mitos yang melatarinya. Pada saat krisis, sistem kepercayaan lokal mewakili sentimen warga yang paling mendalam. Penolakan warga untuk mengungsi dan relokasi seringkali berdasarkan alasan pragmatis dan realistis: lokasi baru tidak memungkinkan untuk memelihara sapi (tidak tersedia lahan untuk merumput) dan bercocok tanam atau tanah di lokasi baru tidak cukup untuk *nghemahi* dan *ngomahi* atau mewariskan tanah dan menyediakan rumah untuk anak cucu. Namun, di balik dua alasan ini, ritual dusun menggambarkan sebuah kampung halaman beserta semua kehidupan yang mendarah daging serta sejarah dan jaringan kekerabatan yang menyatu di dalamnya.

¹ Dalam *Discipline and Punishment* (Foucault 1991)), panopticon disebutkan sebagai sebuah konsep unik yang dibangun berdasarkan desain bangunan penjara karya Jeremy Bentham, dimana konstruksi bangunan yang melingkar memungkinkan penjaga mengawasi seluruh sel tahanan dari tengah ruangan. Panopticon adalah suatu mode untuk menanamkan kuasa atas pikiran para tahanan yang karena sifat panoptik yang mampu melihat-segala membuat para tahanan merasa terus diawasi dan karenanya patuh.

Sebagian penduduk dapat mempertanyakan mengapa erupsi terjadi. Akan tetapi sebagian besar warga Merapi menyikapi bencana tidak dengan cara pandang yang buruk. Mereka melakukan apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan rohani dan sosial. Melalui ritual, semua daur pertanian dan peternakan dengan segera diharapkan akan mengembalikan kesuburan tanah, keseharian hidup kembali berjalan wajar, dan penyimpangan-penyimpangan dimaafkan. Ritual menjadi awal dari sebuah pemulihan. Ritual pemulihan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya kepercayaan tulus bahwa kehidupan bisa kembali pulih.

Semangat untuk membangun kembali juga tampak dari ritual daur kehidupan petani dan peternak. Ritual-ritual ini berfokus pada urusan produksi yang tidak hanya menghasilkan tapi juga menopang kesejahteraan warga. Urusan produksi ini melibatkan keluarga karena pertanian dan peternakan melibatkan semua anggota keluarga dan tetangga bahkan dalam urusan penyediaan tenaga kerja.

Asumsi awal yang dibangun adalah bahwa agama menjadi penanda paling umum dalam distribusi bantuan, mobilisasi masa dan sarana perjuangan. Masjid dibangun pertama kali di wilayah-wilayah di mana penduduk seharusnya direlokasi. Dari Kinahrejo dan Kepuharjo yang seharusnya direlokasi, bantuan pemerintah diberikan hanya di hunian sementara (HUNTARA). Sementara bantuan swasta dan masyarakat sipil dilarang. Akan tetapi yang terjadi adalah organisasi Muslim utamanya Bank Muamalat dan dompet Dhuafa memberikan bantuan rekonstruksi di wilayah-wilayah yang seharusnya dikosongkan. Masjid tidak hanya diperbaiki, tapi diperbesar. Untuk banyak kasus di wilayah-wilayah Sleman, ritual menjadi ajang kontestasi kepentingan warga lokal dan bukan lokal dan juga klaim kepemilikan sumber daya alam, khususnya sumber air. Banyak sumber air yang rusak sehingga kadangkala warga harus bergabung menggunakan sumber air dusun/desa tetangga. Ritual bisa menjadi sarana komunikasi di mana warga yang datang dan ikut *ngujubi/urupi sesajen* berarti boleh menggunakan air dari sumber yang dibersihkan. Dalam kasus relokasi, bagaimana Labuhan Merapi

menjadi ajang kampanye penolakan relokasi melalui spanduk-spanduk yang digelar warga di Dusun Kinahrejo.

BAB VII

PARTISIPASI WARGA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ERUPSI MERAPI 2010

7.1 Mitigasi Bencana Alam

Mitigasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan penanggulangan bencana alam yang berlangsung dalam kondisi pra bencana. Kegiatan mitigasi itu meliputi pencegahan dan pengurangan resiko bencana, baik yang bersifat kultural maupun yang bersifat teknis. Dalam kehidupan sehari-hari di lereng Gunung Merapi, tanpa melakukan observasi dan kontak intensif dengan warga, maka akan sulit dijumpai berbagai bentuk mitigasi. Hal ini karena kegiatan mitigasi dapat dikatakan melebur dan menjadi satu satuan kegiatan hidup sehari-hari di sektor pertanian, peternakan, pembangunan rumah dan sarana fisik, serta ritual keagamaan. Mitigasi yang sering nampak secara eksplisit berlangsung pada masa tahap siaga dan awas Merapi yang meliputi kegiatan sosialisasi bencana, dan penyiapan sarana evakuasi. Dalam kenyataannya, penduduk di lereng Merapi, seperti masyarakat Jawa pada umumnya sangat berkepentingan mencapai keselamatan (*slamet*) dalam menjalani kehidupannya di manapun berada. Oleh karena itu, mereka mengembangkan berbagai strategi agar keselamatan itu diraihinya, melalui serangkaian kegiatan yang disebut di sini sebagai mitigasi.

Pengurangan resiko bencana melalui kegiatan mitigasi tergambar dalam bagan 1. Tampak bahwa pada dasarnya orang Merapi menggunakan empat elemen mitigasi, yaitu (1) peningkatan kepekaan batin, (2) melakukan ritual keagamaan, (3) melakukan penataan tata ruang dan penerapan teknologi tepat, serta (4) responsif terhadap dukungan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) khususnya pihak pemerintah dan LSM. Keempat elemen itu menggambarkan pola mitigasi yang berbasis pada kekuatan budaya, sosial, dan teknokrasi dengan melibatkan peran masyarakat dan pemerintah.

7.1.1 Peningkatan Kepekaan Batin (*Eling lan Waspada*)

Kegiatan yang penting dalam melakukan mitigasi di lereng Merapi sebagaimana diajarkan dalam konsep Jawa adalah menjalankan “*tansah eling lan waspada*”. Konsep ini mengajarkan kepada manusia agar selalu (*tansah*) ingat (*eling*) kepada Tuhan sebagai makhluk yang menjadi sesembahan, karena Dia lah yang menciptakan, memelihara, dan mengayomi makhluk ciptaanNya. *Eling* itu berarti manusia harus melakukan kontak denganNya seperti mengingat kebaikan dan berdoa memohon ampunan dan kebaikan. Pula termasuk di dalamnya memohon keselamatan. Adapun *waspada* artinya manusia harus memahami bahwa yang dalam hidup manusia dapat mengalami selamat atau celaka sehingga jalan ke luar yang harus dilakukan bukan hanya memohon keselamatan dari kekuatan supranatural, melainkan juga meningkatkan kepekaan terhadap tekno-lingkungannya.

Dengan konsep *eling*, warga Merapi melakukan ritual keagamaan atau setidak-tidaknya berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan dan sekalian makhluk yang dipercaya memiliki kekuatan gaib karena kuasanyaNya. Hal tersebut bisa dibaca dari ungkapan warga Kepuharjo pada waktu menjelang erupsi 2001 sekalipun. Ponimin misalnya mengatakan “sebagai makhluk beragama, tentunya yang bisa kami lakukan saat ini hanya memohon perlindungan kepada yang Maha Kuasa agar tidak terjadi bencana apa-apa”. Dalam kasus menjelang bencana 2001, semua warga melihat adanya tanda-tanda erupsi Merapi meningkat sebagaimana dikemukakan Dr. Surono (di BPPTK), sehingga warga hanya bisa memohon kepada Tuhan bahwa sekalipun Merapi erupsi dan mengeluarkan awan panas, tetapi warga berharap diberi keselamatan.

Adapun dengan konsep *waspada*, orang Merapi meningkatkan ketajaman batin dan kalbu, dan mengembangkan tekno-lingkungan yang dipandang mampu untuk mengurangi resiko bencana. Warga Merapi percaya bahwa jalan ke luar mencapai keselamatan terbaik adalah selalu meningkatkan kewaspadaan. Kewaspadaan bisa dimiliki oleh siapa saja asal mau mengasahnya. Modal untuk mengasahnya adalah menjalankan *laku pihatin*, *tirakat* (aneka macam puasa dalam kepercayaan orang Jawa), dan menjalankan kehidupan yang bersahaja,

bersih dari perbuatan memuja angkara murka serta selalu dekat dengan alam. Dengan *laku* prihatin tersebut orang akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan ketika menghadapi marabahaya. Kalau *laku* itu dijalankan, maka niscaya orang tersebut bisa menjadi orang yang *waskita*, yaitu memiliki kepekaan untuk mengetahui suatu peristiwa sebelum peristiwa itu terjadi (*ngerti sakdurunge winarah*). Ia bukan harus disebut sebagai peramal atau paranormal, tetapi ia memiliki kepekaan yang tinggi melalui mimpi, dan mengalami peristiwa aneh tetapi nyata. KR 14 Februari 2001 juga pernah mengekspos warga Merapi yang memiliki kawaskitan tersebut, seperti misalnya Mbah Gin yang bekerja di Pos {Pemantauan Merapi di Babatan}. Beberapa detik setelah Merapi meletus dengan mengeluarkan awan panas dan semua orang berlarian, Mbah Gino segera berucap pada hari Sabtu 13 Februari 2001 pada Eko seorang wartawan, “*ampun wedi, wedhus gembel mboten mriki* (jangan takut wedus gembel tidak ke sini)”. Mbah Gino dikenal sebagai orang yang sangat lugu dan sederhana serta dikenal dekat dengan alam Merapi.

Warga Merapi mengatakan bahwa banyak warga dari generasi tua yang kini telah meninggal memiliki *kawaskitan* karena mereka termasuk golongan orang yang suka beramal dan membersihkan diri dari perbuatan dosa serta tidak materialistik. Kini sangat sedikit warga yang memiliki *kawaskitan*. Di setiap desa kini hanya terdapat antara satu sampai dua orang saja. Walaupun amat sedikit, orang *waskita* pada masa kini tetap saja menjadi sumber referensi bagi masyarakat setempat untuk membangun kewaspadaan. Di Jamburejo, misalnya, kepala dusun dan warganya mengakui Sumpeno sebagai orang yang memiliki kepekaan batin. Sumpeno adalah orang biasa tetapi karena sering melakukan laku prihatin maka ia dapat memiliki kekuatan *linuwih* (sakti). Ia sering mendapat bisikan gaib saat akan ada marabahaya dari Merapi. Abdulmajid, mantan kepala dusun Jamburejo, sekalipun bukan termasuk *linuwih*, diakui sebagai sesepuh dusun dan memiliki kemampuan istimewa. Menjelang erupsi 2010, Abdulmajid bermimpi bahwa tiba-tiba muncul kabut tebal dari arah puncak Merapi yang turun sampai menuju kampungnya. Ia kemudian pergi menghindari kabut. Namun, tidak lama kemudian kabut tersebut menghilang dan munculah air jernih. Ia percaya bahwa itu *sasmita*

(perlambang) dari penguasa Merapi bahwa erupsi akan muncul, dan kemudian setelah itu desanya tenang kembali seperti digambarkan munculnya air yang jernih.

Bagan 7.1
Strategi Mitigasi Orang Lereng Merapi terhadap Ancaman Bencana



Orang pintar, *linuwih* atau *kasepuhan* bisa menjadi kawan bagi warga Merapi untuk mengantisipasi munculnya bencana dengan melakukan doa atau mendekati diri dengan Tuhan, orang suci, atau leluhur mereka. Di Stabelan, misalnya warga percaya terhadap nasehat orang pintar yang mengatakan bahwa desanya akan aman kalau warganya juga mau memelihara *pepundhen* (tempat suci leluhur atau tempat bersemayamnya leluhur), yang lokasinya berada di hutan yang ada pohon beringinnya. Di dalam masyarakat Jawa, istilah *pepundhen* menunjuk pada makam keramat atau tokoh keramat yang memiliki peran penting dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1994:326). Oleh karena itu warga di Lereng Merapi berusaha untuk mencari tempat *pepundhen*, dan setelah ditemukan warga menjaga tempat *pepundhen* tersebut. Dengan melakukan kontak kepada leluhur di

pepunden tersebut, maka warga Jamburejo percaya bahwa leluhur akan cepat menangkap pesannya, dan akan melindungi ketika warga Jamburejo menghadapi marabahaya.

Berdasarkan informasi dari dusun ke dusun, kadang orang sakti tidak berasal dari dalam dusun setempat tetapi dari luar. Dalam pandangan warga Merapi, orang sakti tersebut memang memiliki misi untuk menyampaikan perkembangan aktivitas Merapi kepada masyarakat luas agar diindahkan. Warga Stabelan, misalnya, suatu ketika kedatangan orang pintar dari daerah Magelang pada tahun tahun 1980an. Orang pintar ini kata kepala dusun lalu mengatakan bahwa sebaiknya makam Mbah Bagor dipelihara agar warga Stabelan tenteram dan aman tinggal di lereng Merapi.

Mbah Bagor merupakan salah seorang leluhur atau *pepundhen* yang dekat dengan *eyang* Merapi. Warga Stabelan pun menghormatinya dan pada tahun 1990 mereka membangun *cungkup* (bangunan makam) permanen. Tidak sampai satu tahun *cungkup* tersebut terbakar tanpa sebab yang jelas. Warga pun menemui orang pintar itu, dan diterangkan bahwa terbakarnya *cungkup* makam itu pertanda kalau Mbah Bagor tidak suka dibuatkan *cungkup* permanen karena identik dengan simbol kemewahan. Mbah Bagor mau dibuatkan *cungkup* permanen jika warga Stabelan sudah makmur. Belakangan setelah semua warga memiliki bangunan rumah permanen, maka pembangunan *cungkup* permanen itu dilanjutkan. Selain itu dalam acara bersih dusun, warga secara rutin mengirimkan doa kubur yaitu suatu pengormatan kepada leluhur agar leluhur tetap menjadi pelindungnya.

Kepercayaan warga Merapi terhadap tokoh sakti mengingatkan almarhum Mbah Marijan, juru Kunci Keraton Ngayogyakarta. Ia menjadi sumber panutan penduduk di lereng Merapi dan bahkan dari luar daerah sekalipun. Sekalipun Mbah Marijan diterjang awan panas dalam erupsi 2010, sebelumnya ia dianggap sakti dan paling tidak diberi tahu oleh roh Merapi kalau suatu ketika Merapi akan erupsi. Praktik mencari orang sakti ketika Merapi meningkat erupsinya terjadi pada erupsi bulan Oktober-November 2010. Beberapa warga Merapi menemui orang pintar di berbagai daerah yang dipercayai doa dan ramalannya mengenai perkembangan intensitas erupsi dan dampaknya. Bahkan warga sampai

mendapatkan petunjuk tentang ke mana harus mengungsi, misalnya harus menjauh sampai lebih dari 20 KM agar pasti selamat.

Pesan dari orang pintar menjadi bahan pertimbangan warga dalam melakukan mitigasi. Ada kecenderungan bahwa warga Merapi selalu mencari orang pintar agar kampungnya aman dari ancaman erupsi. Salah satu nasehat yang sering disampaikan orang pintar adalah orang Merapi harus menjaga keutuhan dan meluhurkan makam atau petilasan leluhur, orang sakti atau tokoh suci yang berada di kampungnya. Di Stabelan misalnya warga kemudian meluhurkan makam Mbah Bagor yang dianggap sebagai salah seorang prajurit Diponegoro, di Turgo warga memelihara makam Sheik Jumadilkubro yang dianggap sebagai penyiar agama Islam, dan di Jamburejo warga memelihara petilasan ringin putih yang dianggap tempat bersemayamnya orang suci dan leluhurnya.

Nasehat orang pintar baik di wilayah Merapi atau luar juga sering merujuk pada keharusan warga yang tinggal di lereng Merapi agar menjaga kampung halaman mereka tetap suci dan jauh dari kehidupan maksiat. Menurut Suwito, adik kepala Dusun Kemiri Cilik, warga percaya bahwa gunung merupakan tempat suci, sehingga jangan dinodai, kalau sampai ternoda maka roh Merapi akan marah. Di sini terlihat bahwa bencana juga dipakai sebagai arena untuk menegaskan otoritas rejim moral tertentu. Peristiwa erupsi yang mengarah ke wilayah Mbah Marijan dianggap sebagai akibat daerah tersebut tidak lagi suci, seperti dipakai untuk berzina. Warga Kemiri percaya bahwa kelak kalau Turgo tidak lagi suci, maka Turgo akan terkena dampaknya. Kampung menjadi tidak suci kalau dipakai untuk perbuatan maksiat seperti merubah fungsi rumah untuk *homestay* wisata, sehingga secara tidak langsung untuk pelacuran. Semakin ke atas, maka sebaiknya tidak ada rumah yang dipakai untuk *homestay*.

Deskripsi tentang mitigasi berbasis pada ritual dan kepercayaan lokal di atas memberikan petunjuk, bahwa sesungguhnya warga Merapi mempunyai kebutuhan untuk menyelamatkan diri dari ancaman erupsi. Mereka bukan bertindak fatalistik dan paranoid. Sebaliknya mereka berusaha membangun rasa tenteram dan nyaman tinggal di dalam ekologi Merapi yang rawan bencana. Pendekatan yang mereka lakukan adalah bukan berserah diri melainkan

membangun kewaspadaan melalui peningkatan kepekaan batin, menjaga konsep keselarasan dengan alam, dan menjaga komunitas kampungnya tetap kompak sebagai satu keluarga besar. Diyakini bahwa sebagai keluarga besar, mereka memiliki leluhur yang mereka hormati dan dipercaya akan membantu mengamankan mereka dari marabahaya.

7.1.2 Ritual Keagamaan

Ada tiga macam ritual keagamaan yang dilakukan oleh warga Merapi dalam konteks melakukan kegiatan mitigasi. Pertama, berdoa dengan menggunakan agama dan kepercayaannya agar dalam hidupnya senantiasa mendapat petunjuk untuk selamat dari berbagai ancaman. Erupsi Merapi dipahami sebagai ancaman, tetapi warga Merapi bukan berdoa untuk lari dan meninggalkan Merapi. Mereka memahami bahwa erupsi Merapi merupakan suatu gejala yang pasti dan harus terjadi karena itu merupakan kehendak Tuhan. Dengan kuasaNya Tuhan juga memberikan amanah kepada roh Merapi atau makhluk yang menjaganya untuk mengatur aktivitas erupsi tersebut, sehingga doa mereka bukan melawan keberadaan Merapi sebagai gunung yang aktif melainkan meraih keselamatan ketika sedang erupsi (*kalissekabebaya*).

Pola ritual berdoa dilakukan oleh hampir semua warga di lereng Merapi, dan dilaksanakan oleh individu manakala mereka merasa tidak tenang batinnya atau mengetahui Merapi sedang erupsi. Pola ritual doa ini menggunakan tuntunan agama samawi yang mereka anut. Menurut mereka, agama samawi menyajikan berbagai doa keselamatan, dan doa itu dihafalkan menurut siklus sholat atau sembahyang sehari-hari, misalnya pagi, siang, sore, dan malam.

Pola ritual doa dilakukan oleh warga Merapi secara individual di dalam rumah, masjid, mushola atau kapel, atau tempat yang dianggap suci seperti makam leluhur, dan *petilasan* orang sakti. Dalam keheningan, beberapa orang sering mendapatkan jawaban dan petunjuk dari Tuhan atas doa yang disampaikannya. Juru Kunci Candi Pos Magelang, misalnya, ketika melakukan doa rutin pasca sholat pada bulan Oktober 2010, secara tidak terduga hidungnya mencium bau belerang. Ia tahu bahwa tidak semestinya ada belerang di rumahnya,

sehingga percaya bahwa Tuhan telah merestui “Mbah Petruk” menyampaikan pesan agar ia bersikap waspada karena tidak lama lagi Merapi akan melakukan aktivitasnya dengan mengeluarkan lahar (belerang). Ia lalu bersyukur bahwa dirinya terpilih untuk dipercaya dan akan diselamatkan. Ia lalu semakin khusuk dalam menjalankan doa memohon keselamatan bagi diri pribadi, keluarga, dan seluruh warga kampungnya.

Pola ritual kedua adalah menyelenggarakan selamatan secara rutin. Selamatan lebih tinggi tingkatannya dari pada berdo'a, karena selamatan dilakukan secara kolektif dan melibatkan komunitas, pemimpin pengaturan tempat, waktu upacara, dan jalannya upacara. Di lereng Merapi, beberapa komunitas secara rutin melakukan selamatan yang terkait dengan urusan daur hidup (kelahiran, sunatan, perkawinan, dan kematian), serta kegiatan pertanian (khususnya panen dan tanam). Selamatan itu berisi penyampaian doa kepada Tuhan, sesaji, dan memohon restu terhadap penghuni alam Merapi agar memberikan keselamatan dan keberhasilan dalam melaksanakan hajatan tersebut. Di beberapa dusun yang masih kuat kepercayaan tradisionalnya, warga bukan hanya berdo'a, tetapi juga menyajikan sesaji sebagai suatu bentuk tindakan resiprositas kepada penguasa Merapi yang disebut-sebut dan dihormati dalam prosesi doa selamatan.

Pelaksanaan selamatan daur hidup dan upacara bercocok tanam atau pembangunan rumah biasanya mengundang *modin* atau pemimpin doa dan warga tetangga terdekat. Upacara meliputi kegiatan berdo'a, dan menyucikan makanan khususnya tumpeng dengan melantunkan doa, serta kegiatan menyantap makanan atau membawa makanan ke rumah untuk disantap anggota keluarganya. Dalam prosesi ritual, *modin* biasanya merapal doa yang ditujukan kepada Tuhan, dan sekalian menyampaikan ucapan salam dan hormat kepada para nabi dan diteruskan kepada para penguasa Merapi, *danyang* (mahluk halus), dan leluhur mereka. Mereka berharap bahwa doa, salam sejahtera, makanan ataupun sesaji yang mereka haturkan atau yang akan mereka santap sebagai hidangan makan bagi mereka dan keluarganya, akan membawa warga pada jalan keselamatan.

Upacara selamatan tidak selayaknya dilihat sebagai kegiatan magis guna memohon keselamatan kepada penguasa Merapi. Ia merupakan bentuk rekayasa

sosial untuk membangun kesadaran kolektif mengenai keberadaan Merapi yang dianggap bisa memberikan berkah atau petaka. Dengan ritual itu, warga sesungguhnya menjalin ikatan sosial guna bersama-sama menghadapi masalah bersama, yaitu tinggal di daerah rawan bencana, tetapi sekaligus sebagai daerah yang memberikan kehidupan dan kesejahteraan. Melalui ritual komunitas, para warga diajak memecahkan dilema tersebut. Dengan demikian jalan ke luarnya adalah berdoa, menjalin kewaspadaan, dan kerjasama guna mengantisipasi resiko-resiko dari Merapi yang bisa memasuki kampung mereka.

Ritual komunitas sebagai suatu mitigasi terhadap erupsi Merapi bisa dimengerti dengan melihat kenyataan bahwa ritual ini nampak lebih hidup di wilayah Merapi lereng atas daripada bawah, karena warga di lereng atas lebih merasakan adanya resiko erupsi. Hampir setiap ritual kelahiran sampai kematian, panen jagung, atau pembangunan rumah, selalu merapalkan salam dan doa bukan hanya kepada para nabi atau orang suci tetapi juga penguasa Merapi. Rapal doa semacam ini menegaskan bahwa warga menyadari pentingnya selalu mengingat kekuasaan Merapi dan dampaknya, sehingga mereka bisa lebih arif dalam mendayagunakan sumberdaya dan waspada saat terjadi erupsi.

Bentuk ritual ketiga adalah ritual tahunan komunitas yang diselenggarakan dalam rangka bersih dusun, *sadranan*, atau peringatan hari besar agama samawi. Ritual ini melibatkan seluruh anggota komunitas. Bahkan di Dusun Grogol para warga yang berlainan agama (Islam, Katholik, Protestan, dan kepercayaan) bisa mengadakan acara selamatan *sadranan* di dekat makam leluhur. Masing-masing warga saling menghormati kepercayaannya dengan cara mengatur ruang dan upacara secara terpisah di lokasi makam tersebut.

Dalam ritual *sadranan* dan bersih dusun, kenduri menjadi bagian penting dalam ritual yang melibatkan seluruh warga. Dalam kenduri itu, disajikan hidangan dalam bentuk tumpeng yang berisi nasi gunungan dan lauk-pauk berupa masakan ayam utuh. Semua hidangan makan itu disucikan melalui prosesi pembacaan doa oleh *modin* atau orang pintar. Setelah prosesi doa usai, hidangan disantap bersama para jemaah kenduri dan sebagian dibawa pulang untuk dimakan anggota keluarga. Dengan bersih dusun dan kenduri, acara ritual, selain

makan bersama, juga membersihkan makam, tempat suci, sumber air bersih, kandang, dan diikuti dengan perbaikan infrastruktur dusun seperti jalan dan jembatan. Ritual ini jelas menyatukan warga dan membangun solidaritas horizontal bahwa mereka hidup dalam satu komunitas, satu leluhur, dan memiliki kedekatan dengan leluhur Merapi.

Ritual terakhir adalah selamat tanggap cepat (*rapid response*) dalam rangka membangun kesiapsiagaan penyelamatan masyarakat dan kampung halaman. Ritual ini dimaksudkan juga sebagai respon atas pesan-pesan simbolik (*wisik*) dari “Eyang” Merapi atau sebagai respon atas adanya tanda-tanda Merapi akan aktif kembali. *Wisik* itu sering datang lewat mimpi, suara gaib, bau aneh, atau tanda-tanda alam yang secara implisit menyampaikan pesan simbolik. Dengan adanya pesan tersebut, maka penerima pesan akan menyampaikan ke tetangga, ketua RT, orang pintar, kepala dusun, dan pesan itu dijawab dengan mengadakan upacara sebagaimana lazimnya.

Di Stabelan, warga sering mengadakan upacara tanggap cepat menyikapi perkembangan Merapi baik yang nampak secara visual dalam bentuk meningkatnya erupsi Merapi, munculnya *wisik*, mimpi, ataupun tanda-tanda alam yang aneh. Seorang warga biasanya selalu segera mungkin meminta orang pintar untuk memimpin upacara. Jika *wisik* menyangkut permintaan agar seluruh warga dusun mengadakan upacara, maka warga tersebut akan menghadap kepala dusun. Kepala dusun kemudian mengajak warganya untuk mengadakan upacara dengan sesaji dan hidangan makan berupa nasi gunung. Adapun sesaji lainnya adalah dalam bentuk sayuran asli gunung, minuman teh atau kopi, dan rokok tertentu termasuk bisa memakai rokok jeruk.

Upacara tanggap cepat menjadi penting dalam rangkaian mitigasi, karena dengan adanya upacara ini secara tidak langsung para warga dikumpulkan dan diajak untuk bersikap waspada, termasuk siap melakukan pengungsian ketika erupsi Merapi. Di Stabelan, misalnya, upacara ini dapat membangun kesadaran kolektif untuk memonitor perkembangan erupsi melalui partisipasi warga dalam upacara pengiriman sesaji nasi gunung untuk Eyang Merapi. Sesaji itu sebagai bingkisan kepada Eyang Merapi, yang sedang mengadakan hajatan. Pengiriman

sesaji ibaratnya sumbangan dalam penyelenggaraan hajatan tersebut.

7.1.3 Pengaturan Tata Ruang dan Penerapan Teknologi Tepat Guna

Warga Merapi melakukan pengurangan resiko bencana bukan hanya dengan cara melakukan ritual dan pengasah kepekaan batin, melainkan juga dengan melakukan pembangunan fisik seperti pengaturan tata ruang, *basecamp* dan penginderaan.

7.1.3.1 Tata ruang

Ada dua macam tata ruang yang menonjol pada dusun-dusun di lereng Merapi. Pertama, tata ruang dengan rumah-rumah yang memencar di lahan milik setiap rumah tangga petani. Kedua, tata ruang dengan rumah-rumah mengelompok ke dalam satu pemukiman yang rapat. Tata ruang pada pola pertama adalah dusun-dusun di desa wilayah DIY, sedangkan yang kedua di wilayah Jawa Tengah. Umumnya letak rumah-rumah dalam pola pertama terpencar-pencar menempati tanah pekarangan dan kebun yang relatif cukup luas. Dengan pola seperti ini, maka keluarga petani bisa dengan cepat menuju ke lahan pertaniannya. Ketika dalam kondisi darurat, mereka bisa dengan cepat kembali ke rumah karena mereka ibaratnya hanya bekerja di sekitar rumah tempat tinggalnya.

Pada pola tata ruang kedua, rumah-rumah mengelompok tetapi dengan konsekuensi lahan pertanian menjadi agak jauh dari pemukiman. Akibatnya, individu petani tidak bisa secepatnya menuju ke lahan pertaniannya. Walaupun demikian, pemukiman yang mengelompok tersebut menghasilkan komunitas yang kuat solidaritas sosialnya dalam mengatasi bencana alam. Ketika terjadi erupsi, komunitas tersebut seperti pada warga Stabelan, Babatan, dan Trono menggunakan solidaritas komunitasnya untuk melakukan evakuasi dan pengungsian.

Warga Merapi juga mempunyai pengaturan tata ruang lagi yang lebih responsif terhadap ancaman erupsi. Pertama, setiap unit pemukiman dalam dusun diletakkan di bagian bawah, sedangkan bagian atas yang dekat dengan puncak dipakai sebagai lahan pertanian, dan hutan. Tata ruang ini memungkinkan warga

dapat lebih cepat untuk ke luar dari dusun ketika mereka melakukan evakuasi ke luar dusunnya. Kedua, setiap pemukiman berada di areal yang jauh dari jurang, sehingga relatif terhindar dari resiko erupsi karena jurang merupakan jalur peluncuran lahar dari puncak ke bawah. Ketiga, hampir setiap rumah memiliki akses ke jalan kampung yang dapat dilalui kendaraan baik sepeda motor maupun mobil, sehingga memudahkan warga melakukan evakuasi.

Tiga pengaturan tata ruang tersebut hidup dalam kesadaran warga Merapi. Namun demikian, di beberapa dusun ketentuan tentang tata ruang yang responsif terhadap resiko erupsi diabaikan. Pertama hal itu terjadi karena adanya tekanan penduduk atas tanah. Petani yang lahannya sempit dan dekat jurang kemudian tidak ada pilihan lain kecuali menggunakan lahannya untuk lokasi bangunan rumah. Akibatnya, ketika terjadi erupsi tahun 2010 rumah mereka terkena awan panas, misalnya di Kampung Kinahrejo DIY dan Sambungrejo Klaten. Kejadian serupa dialami penduduk Turgo tahun 1994. Mereka yang terkena erupsi adalah penduduk di RT teratas yang lokasinya paling dekat dengan jurang.

Kedua, tidak dipertahankan sistem tata ruang yang responsif terhadap resiko bencana karena pengaruh pariwisata yang tidak sensitif terhadap resiko bencana. Pariwisata di wilayah Sleman telah memberikan akses peningkatan kesejahteraan penduduk melalui penyewaan rumah (*homestay*) kepada para wisatawan. Rumah-rumah penduduk di wilayah Kinahrejo, misalnya, semakin padat dan semakin menghiraukan aspek tata ruang. Penduduk semakin berani membangun rumah di bagian atas wilayah dusunnya. Padahal dalam sejarahnya dengan adanya erupsi-erupsi pada masa silam, warga Merapi justru memutuskan sendiri turun gunung dengan membangun rumah di bagian bawah. Salah satu contoh adalah penduduk Turgo. Dulu pemukiman Turgo di bagian atas bukit tetapi karena ancaman erupsi terus menerus, maka mereka memindahkan pemukiman ke tanah tegalan yang kemudian bernama Kampung Turgo Tegal.

7.1.3.2 Pembangunan *Basecamp* dan Gardu Pandang

Warga Merapi khawatir jika dalam kondisi darurat mereka harus lari bergegas untuk menyelamatkan diri dari awan panas. Mereka tidak akan selamat

jika nekat menyelamatkan diri seperti itu dan langkah yang paling aman untuk sementara justru menyelip ke *basecamp*. Sebelum pemerintah membangun *basecamp* di wilayah Kinahrejo yang kemudian terkena awan panas pada tahun 2006, warga Turgo sudah membangun *basecamp* pasca erupsi 1994. Suwaji mantan Kepala Dusun Turgo merupakan salah seorang warga yang memprakarsai pembangunan *basecamp*. *Basecamp* didirikan dalam tanah sehingga bentuknya semacam gua kecil yang ditutup dengan memakai kayu kering karena sesuai dengan pengalaman erupsi 1994. Hal ini karena kayu atau bambu kering tidak mudah terbakar, sedangkan bangunan yang terbuat dari semen dan bahan basah mudah terbakar dan menyebabkan kematian.

Basecamp Suwaji tidak menggugah para warganya untuk membangun sendiri di pekarangan masing-masing. Walaupun demikian, selama 15 tahun terakhir ini ada tiga orang di dusun yang mengikuti Suwaji, dengan harapan bila tidak ada lagi kesempatan melarikan diri maka mereka cukup masuk ke *basecamp*.

Di Turgo atau beberapa dusun lainnya, warga lebih suka membangun gardu penginderaan. Gardu pandang sekaligus dipakai sebagai pos ronda atau tempat bermain antar pemuda di kampung. Gardu menjadi sangat ramai dikunjungi warga ketika erupsi Merapi meningkat dan status Merapi berubah menjadi normal ke waspada atau awas. Beberapa warga dusun di lereng Merapi membangun gardu pandang dengan cara swadaya. Setelah gardu pandang dibangun kemudian mendapat simpati dari kalangan CSO dan donor sehingga ada beberapa gardu pandang itu berubah menjadi bangunan permanen. Salah satu contoh adalah gardu milik warga Turgo di Kampung Tritis. Semua gardu ini dibuat semi permanen, tetapi kemudian diubah menjadi bangunan permanen. Pemerintah setempat kemudian ikut merenovasi dan meningkatkan ketinggian gardu ronda termasuk peralatan untuk pengindraan.

Melalui gardu pandang, warga Merapi melakukan pengamatan secara bergiliran. Gardu pandang juga dipakai sebagai sarana untuk berkumpul dan membahas perkembangan erupsi kepada warga. Oleh karena itu, gardu pandang menjadi arena yang menarik daripada *basecamp*. Gardu pandang itu juga sangat

bermanfaat bagi warga dalam melakukan evakuasi tahun 2001, 2006, dan khususnya tahun 2010. Dalam merespon erupsi 2010, misalnya, warga Turgo bersama anggota SAR dan Limas berkumpul di gardu sepanjang siang dan malam secara bergiliran. Mereka bisa mengamati perkembangan Merapi per menit dan hasilnya disampaikan kepada setiap warga. Mereka bisa melihat turunnya lahar panas pada sore hari yang kemudian meluluhlantahkan Dusun Kinahrejo. Mereka dapat memprediksi berdasarkan pengalaman masa silam bahwa erupsi dalam skala besar akan muncul, karena guguran lava telah terjadi berkali-kali dan mengarah ke selatan. Oleh karena itu, dengan berbekal prediksi itu, tim SAR desa dan warga Turgo lalu memutuskan untuk melakukan pengungsian sesegera mungkin secara swakarsa.

Di luar aktivitas pemantauan Merapi, warga juga berperan penting dalam mengantisipasi banjir lahar dingin. Antisipasi ini dilakukan secara tidak langsung, karena kegiatan yang nampak adalah penggalian pasir di sepanjang sungai-sungai yang pernah dipakai sebagai jalur material vulkanik. Setiap habis erupsi, biasanya warga lereng Merapi berupaya untuk mendapatkan akses atas material vulkanik yang melewati sungai di wilayahnya. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka material tidak menumpuk dan bisa berbahaya ketika hujan turun karena akan menimbulkan banjir lahar dingin. Oleh karena itu, walau tujuan utamanya adalah mencari penghasilan tambahan, aktivitas warga menambang pasir berfungsi positif terhadap keselamatan penduduk di sekitarnya. Hal ini karena jika terjadi erupsi lagi, pasir hasil erupsi lama telah habis, sehingga volume pasir baru tidak meluber, merusak tebing, dan bahkan jembatan di sekitarnya. Fakta menunjukkan bahwa ketika erupsi 2011, beberapa jembatan di Sungai Boyong relatif selamat karena pasir di dalam cekdam telah habis ditambang penduduk.

7.1.4 Respon Warga terhadap Mitra: Program Pemerintah dan LSM

7.1.4.1 Program pemerintah

Pemerintah dan LSM mempunyai kepedulian khusus untuk menyelamatkan warga untuk meminimaliasi jumlah korban bila Merapi aktif. Dengan alasan yang terkadang mengesankan demi eksistensi lembaga atau

organisasi, program seperti mitigasi bencana yang dijalankan Pemerintah dan LSM telah melibatkan warga seperti dalam pembangunan sabo, cekdam, pembentukan dan aktivitas tim Satkorlak yang sekarang melebur menjadi tim SAR dan pelatihan evakuasi.

Pembangunan sabo di wilayah Kecamatan Srumbung Magelang dilakukan pemerintah sejak tahun 1980an. Sabo dibangun tanpa melibatkan masyarakat dalam sosialisasi. Ketika sabo terbangun, masyarakat terbelah antara pro dan kontra. Masyarakat lereng Merapi di bagian bawah kurang suka dengan adanya sabo, dan berharap sabo bukan menampung, tetapi memperlancar arus material dari puncak gunung ke sungai. Pandangan warga masuk akal karena kalau sabo jebol, maka pembangunan sabo berpotensi membahayakan warga di bagian kaki gunung. Jebolnya sabo terjadi karena material vulkanik dalam sabo meluber, dan ketika jebol, volume materialnya besar dan dengan cepat turun serta langsung meluluhlantahkan kawasan di kaki gunung. Masyarakat lereng atas bisa menerima keberadaan sabo, namun belakangan mereka cemas ketika melihat konstruksi sabo dipandang tidak baik. Mereka cemas kalau sabo kemudian jebol. Kecemasan terhadap bangunan sabo pernah disampaikan warga di wilayah Desa Kemiren dan Desa Kaliurang. Mereka mengamati bahwa kanal pembuangan air dan pasir dari waduk sabo amat kecil, sehingga dipastikan akan ambruk. Warga telah mengingatkan pihak kontraktor mengenai resiko jebolnya dam jika kanal terlalu sempit. Kontraktor akhirnya memperlebar kanal tersebut. Warga kemudian mengapresiasi pembangunan sabo di wilayahnya.

Berbeda dengan sabo, pembangunan cekdam di setiap dusun di sepanjang Sungai Woro, Putih, Kuning, Boyong, atau yang lain diapresiasi warga. Cekdam menjadikan tebing tanah tidak mudah longsor, dan pasir erupsi Merapi bisa tertahan di areal cekdam. Dengan demikian warga dapat memiliki akses atas pasir tersebut. Hal tersebut terlihat di Klakah Atas, Turgo, dan Kemiri Cilik. Dengan demikian, warga bisa melakukan penggalian pasir dan menambah penghasilan mereka khususnya ketika masa pemulihan. Bahkan agar bisa mengakses secara maksimal, warga Turgo mengeluarkan anggaran sendiri secara swadaya guna membiayai pembangunan jalan menuju cekdam seperti pada masa erupsi 1994.

Warga beriuran sebesar Rp 50.000,00 per KK guna membangun jalan dari kampung Turgo menuju jurang Boyong sepanjang sekitar 500 m dengan lebar tiga meter.

Program yang tidak kalah penting di lereng Merapi adalah pembentukan tim SAR yang menggantikan tim Satkorlak warisan pemerintah pada masa Orde Baru. Tim SAR dibentuk di setiap desa, dan dalam susunan tim SAR terdapat wakil-wakil dari dusun sebanyak empat sampai delapan orang. Tim SAR ini di setiap dusun berkoordinasi dengan kepala dusun dan Limas yaitu perkumpulan warga yang bertugas untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat sekitarnya. SAR bersama Limas melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana upaya melakukan evakuasi dan menyampaikan perkembangan Merapi ketika berada dalam situasi waspada sampai dengan awas dan evakuasi.

Keberadaan SAR dan efektivitasnya dalam menjalankan tugas tergambar pada diri Toro, seorang tokoh di Dusun Turgo, Desa Purwobinangun, yang menjabat sebagai anggota SAR Desa. Di Purwobinangun, kepala desa membentuk SAR dan Limas. Ia menjadi penanggungjawab ketua lembaga itu sejak tahun 2002. Ketika ada kegiatan sosialisasi bencana alam pada tahun 2010, maka SAR dan Limas dijadikan sebagai kelompok sasaran. Sementara ketika diadakan sosialisasi di setiap dusun, SAR dan Limas dusun dilibatkan untuk mengawal program itu sampai ke warga. Di Turgo, Toro menjadi ketua SAR, dan ia bekerja untuk melakukan mitigasi dalam rangka menghadapi erupsi 2010 bersama dengan Limas. Toro membentuk kepengurusan dengan melibatkan semua ketua RT, Karang Taruna, dan para pengurus peternakan sebagai anggotanya. Ketika ada sosialisasi bencana alam, Toro bersama Suwaji mengundang para anggota dan warga untuk hadir. Sebagai ketua, ia memegang pesawat HT guna mengkomunikasikan informasi dari desa dan pihak BPPTK ke anggota SAR. Salah satu contoh ketika erupsi 2010, ia terus menghidupkan HT dan mendengarkan arahan dari pihak desa tentang keharusan melakukan sosialisasi ke warga agar siap sedia melakukan evakuasi. Toro pun menjalankan peran tersebut. Ia rapat bersama Suwaji dan para ketua RT untuk segera melakukan evakuasi ketika erupsi Merapi terus meningkat.

Turgo merupakan salah satu dusun yang memiliki tim SAR dan Limas yang responsif dan mampu bekerja untuk memobilisasi warga melakukan evakuasi. Dusun lainnya aktif mengikuti sosialisasi, tetapi mereka tidak memiliki Tim SAR dan Limas yang mampu bekerja mandiri. Hal tersebut nampaknya berkaitan dengan pengalaman Turgo yang pernah dilanda bencana 1994. Dengan pelajaran dari bencana yang menewaskan 60 orang tersebut dan memaksa mereka mengungsi, warga merasa terpanggil ke luar dari dusun pada erupsi 2010 tanpa harus menyusahkan pemerintah, PEMDA, pemerintah desa, dan masyarakat luas.

Sama seperti Toro, para ketua SAR bersama dengan para wakil warga di setiap dusun lereng Merapi cenderung melakukan sosialisasi bahaya Merapi ketika aktivitas masuk ke tahap SIAGA, kemudian naik menjadi AWAS dan EVAKUASI (Lihat Bagan 2). Sosialisasi yang dilakukan tim SAR selalu melibatkan para ketua RT, Karang Taruna, dan anggota LIMAS. Sosialisasi selalu mengajak warga untuk siap mengungsi karena adanya ajakan dari pemerintah desa, pengamat Gunung Merapi, dan hasil observasi tim Linmas bersama para warga sendiri.

Skema 7.2 Peran Tim SAR Dusun dalam Persiapan dan Evakuasi



Dengan hadirnya peran SAR Dusun dalam persiapan dan penyelamatan warga khususnya di wilayah DIY, maka sesungguhnya masyarakat lereng Merapi relatif sudah siap untuk memahami dan mengantisipasi erupsi Merapi secara terorganisir dan terkoordinasi dengan pemerintah. TIM SAR itu memang dibentuk pemerintah, tetapi dalam praktiknya menjadi institusi desa dan

komunitas. Dengan adanya tim SAR, maka penanganan bencana lebih terorganisir dibandingkan dengan bencana tahun 1994 dan 2006.

Tim SAR yang mampu bekerja secara partisipatif menyebabkan pola pengungsian di Merapi tidak lagi dilakukan secara tradisional. Dewasa ini, paling tidak ada tiga pola pengungsian. Pertama, adalah pola komunalistik dengan menggunakan ikatan persaudaraan dan pertemanan. Pola ini misalnya ada di wilayah Klakah. Keputusan mengungsi diatur oleh masing-masing warga Klakah, bukan diatur organisasi atau bahkan pemimpinnya. Akibatnya, warga melakukan pengungsian secara bertahap dan tersegmentasi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kedua, pola mitigasi penyelamatan korban dengan mendasarkan pada peran insitusi dan kepemimpinan tradisional. Di Stabelan, misalnya, warga juga masih menggantungkan sekali pada institusi tradisional sekalipun bersifat partisipatif. Warga mengungsi secara bersama tetapi masih mendasarkan keputusan seluruh warga atau kolektif daripada kepala dusun semata, karena tidak adanya suatu organisasi yang dipercaya untuk menjadi representasi mereka. Ketiga, pola mitigasi dengan menggunakan tim SAR dan berbagai perkumpulan warga secara partisipatif. Pola ini terdapat di Turgo, Kemiri Cilik, Bendosari, dan beberapa dusun di Sleman. Keputusan mengungsi adalah hasil sosialisasi tim SAR yang diterima warga sebagai representasi mereka. Tim SAR bekerja secara terorganisasi dan profesional. Warga menaruh kepercayaan pada SAR karena tim ini bekerja dengan mengkombinasikan hasil keputusan desa, pihak pengamat Gunung Merapi, dan hasil pengamatan mereka sendiri.

Selain mencanangkan program pendirian SAR di setiap desa, dengan cabangnya di setiap dusun, pemerintah daerah juga menyelenggarakan pelatihan evakuasi sebagai bagian dari program mitigasi. Pelatihan evakuasi dicanangkan sejak erupsi Merapi 2006. Di Yogyakarta, misalnya, pelatihan dipusatkan di Kecamatan Cangkringan, Ngemplak, dan Pakem. Latihan yang dilakukan pada 13 Juli 2006 memperagakan adegan bahwa bencana banjir lahir dingin menerjang penduduk di sekitar bantaran sungai. Banjir ini terjadi karena sedimen pasir vulkanik turun dan menerjang kampung, sehingga sebanyak 3.150 jiwa harus mengungsi, dua orang meninggal, dan 157 orang luka-luka. Dalam pelatihan itu

dikerahkan Tim SAR, SatLak Kab. Sleman, Polsek Cangkringan, dan pamong desa (KR, 15 September 2006).

Sejak munculnya UU bencana alam, beberapa PEMDA di Jawa Tengah di sekitar Merapi juga menyelenggarakan latihan. Di Magelang, misalnya, PEMDA bersama dengan jajarannya mengadakan pelatihan dadakan di Dusun Gemer, Desa Ngargomulyo Kecamatan Dukun.

Dalam pelatihan evakuasi, secara mendadak, tim SAR membunyikan sirine yang menandai adanya bahaya dari Gunung Merapi dan warga harus segera mengungsi. Sirine tersebut dibunyikan oleh petugas Satuan Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) setempat, karena melihat aktivitas Gunung Merapi meningkat ditandai keluarnya asap sulvatar dan turunnya awan panas (wedhus gembel) yang cukup tebal yang mengarah ke dusun tersebut. Warga yang tengah bekerja pun, lari tunggang langgang mencari tempat aman untuk menyelamatkan diri. Mereka tidak berpikir lagi tentang harta benda. Yang terpenting bagi warga adalah nyawa mereka untuk dapat selamat dari bencana tersebut. Beruntung, petugas Satlak PBP dibantu Tim Siaga Pasak Merapi dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan petugas Limas Desa Ngargomulyo segera bertindak cepat. Dengan menggunakan sejumlah mobil bak terbuka, ambulans dan truk kepolisian dari Polres Magelang dan Kodim 0705 Magelang, beberapa warga terutama para orang tua (jompo), anak-anak, perempuan, cacat (defable) dan ibu hamil serta warga yang tengah sakit segera dievakuasi ke Tempat Pengungsian Sementara (TPS). Selanjutnya, mereka dibawa ke Tempat Pengungsian Akhir (TPA) di Lapangan Dukun, Kecamatan Dukun. Sekitar 2 kilometer dari Dusun Gemer.

Pelatihan seperti Di Dusun Gemer itu jarang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait dan FPRB sehingga kurang membentuk perilaku masyarakat dalam merespon bencana. Bahkan pelatihan tersebut baru mendorong warga mengungsi ketika awan panas menyembur ke atas. Dalam konteks program mitigasi, warga nampaknya lebih terpengaruh dengan program LSM yang lebih partisipatif dalam merespon resiko bencana.

7.1.4.2 Program LSM

Sebelum bencana erupsi 2010, beberapa LSM ternyata telah memberikan kontribusi yang cukup penting dalam sosialisasi penanggulangan bencana. Selama tahun 2009 dan 2010, beberapa LSM terutama Pasak Merapi, dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) telah menyelenggarakan pelatihan di

berbagai dusun di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Pasca erupsi, Pasak Merapi, dan lingkaran Merapi terus tampil sebagai LSM yang mengakar karena programnya adalah membentuk relawan di setiap desa bersama-sama dengan LSM lainnya (Kompas, 12 Maret 2012). Oleh karena LSM hadir di dusun penelitian, maka kegiatan mitigasi tidak bisa dipahami sebagai prakarsa warga semata, melainkan lebih tepat hasil dari keterbukaan warga terhadap pemangku kepentingan baik LSM maupun pemerintah.

Dari 30 dusun sampel penelitian ini, tercatat ada 27 dusun yang pernah menerima program LSM tentang pelatihan penanggulangan bencana. Kebanyakan LSM tersebut adalah Pasak Merapi (lihat tabel 7.1). Ada perbedaan antara pelatihan mitigasi yang diselenggarakan pemerintah daerah dengan LSM. Pada pelatihan ini pemerintah lebih fokus pada pembelajaran mengenai prosedur evakuasi, sedangkan LSM pada partisipasi masyarakat. Secara umum pelatihan itu dinilai positif oleh warga tetapi dalam situasi erupsi yang amat besar sebagaimana terjadi 2010, warga masih harus memiliki pengorganisasian yang matang sehingga mereka bisa melakukan pengungsian secara terencana, tertib dan lancar (Lihat bahasan tentang evakuasi dan pengungsian).

LSM selaku Penyelenggara Pelatihan Penanggulangan Bencana Merapi di Dusun Pelatihan yang diselenggarakan LSM juga lebih partisipatif. LSM menyelenggarakan pelatihan di level dusun, dan kegiatan pelatihan biasanya dipusatkan di rumah kepala dusun selama satu hari. Warga yang dilatih adalah generasi muda, laki-laki dan perempuan, dan usai latihan, mereka menjadi relawan. Pelatihan tersebut direspon positif oleh warga, khususnya generasi muda. Mereka haus pengetahuan dan ketrampilan tentang kebencanaan.

Respon para pemuda yaitu mengikuti latihan hanya satu kali—frekuensi yang masih jauh dari cukup untuk menciptakan pembiasaan—dan kemudian menunjukkan minatnya untuk bergabung menjadi relawan pasak bumi. Pada pelatihan, para relawan mendapat materi tentang bagaimana melakukan evakuasi dan penyelamatan korban terutama perempuan dan anak-anak. Pada waktu Merapi meletus 2010 sebagian dari mereka tampil sebagai relawan, tetapi ketika desanya terkena bencana mereka juga ikut mengungsi.

Tabel 7.1
Nama LSM Penyelenggara Pelatihan Penanggulangan Bencana Erupsi Merapi 2009-2010

NAMA DUSUN PER KLASTER AGROEKOLOGI	Nama LSM
PETERNAKAN SAPI	
1. Kopeng, Cangkringan Sleman	PMG, SKKB
2. Kinarejo, Cangkringan Sleman	Oxfam, Pasak Merapi
3. Bendosari, Cangkringan, Sleman	-
4. Turgotegal, Pakem Sleman	Sibat, Pasak Merapi, Tagana
5. Kemiricilik, Pakem Sleman	Tagana
TANAMAN KOMODITAS SALAK	
1. Gondoarum Turi, Sleman	Pasak Merapi
2. Sempu Turi, Sleman	Pasak Merapi
3. Kaliurang Utara Srumbung, Magelang	Pasak Merapi
4. Cabe Lor Srumbung, Magelang	Pasak Merapi
5. Jamburejo Dua, Srumbung Magelang	Bumi Lestari
TANAMAN KOMODITAS SAYURAN	
1. Stabelan Selo, Boyolali	Tlatah Bocah
2. Karang Sari, Cepogo, Boyolali	-
3. Klakah Tengah, Selo Boyolali	Tlatah Bocah
4. Ngablak, Selo Boyolali	-
5. Candipos, Dukun Magelang	FPRB, Pasak Merapi
6. Gowoksabrang, Dukun Magelang	FPRB, Pasak Merapi
7. Grogol, Dukun, Magelang	FPRB
8. Trono, Magelang	FPRB
TANAMAN KOMODITAS TEMBAKAU	
1. Jamuran, Kemalang Klaten	Sibat, Pasak Merapi
2. Malangsari, Kemalang Klaten	-
3. Panggang, Kemalang Klaten	Pasak Merapi
4. Segadung, Kemalang Klaten	-
TANAMAN PANGAN PADI	
1. Krajan, Cangkringan Sleman	Pasak Merapi
2. Pakisaji, Pakem Sleman	-
TANAMAN SUBSISTEN JAGUNG	
1. Kujon Cepogo Boyolali	-

NAMA DUSUN PER KLASTER AGROEKOLOGI	Nama LSM
2. Babadan Bawah Dukun Magelang	Pasak Merapi
3. Sambungrejo Kemalang Klaten	-
PENAMBANGAN	
1. Kaligentong Kemalang Magelang	-
2. Candi Morangan Ngemplak Sleman	-
3. Bronggang Cangkringan Sleman	-

Sumber : Data Primer 2011

Walaupun program LSM berhasil dalam membangun kesadaran dan keberadaan relawan di tingkat dusun, tetapi ketika erupsi berlangsung, aktivitas mitigasi sangat ditentukan oleh institusi lokal dan SAR yang dibentuk oleh desa. Dengan adanya peristiwa bencana 2010, warga bahkan kemudian berpendapat bahwa guru yang paling penting justru peristiwa erupsi 2010. Warga Kemiren, misalnya, kemudian sadar untuk menyiapkan evakuasi secara lebih terorganisasi. Salah satu program adalah menyediakan dana kelompok untuk pembangunan kampung dan bantuan sosial.

Sementara itu, warga Bendosari, mengantisipasi bencana dengan cara semakin memperkuat tali persaudaran dengan warga Melati Sleman sebagai mitra dalam melakukan evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Memang ketika bencana 2010, warga Bendosari memilih mengungsi ke rumah-rumah warga di Melati dan warga Mlati menerima dengan senang hati sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap korban bencana Merapi. Oleh karena itu sebagai balas budi dan kegiatan mitigasi yang dilakukan oleh warga di dua komunitas tersebut adalah saling kunjung, silaturahmi, dan kerjasama dalam melakukan pembangunan fisik.

7.1.5 Rangkuman

Warga lereng Merapi sesungguhnya memiliki sistem mitigasi yang dapat berfungsi bagi mereka dalam menghadapi kondisi kerentanan. Sistem mitigasi itu mereka bangun berdasarkan pengalaman dan penghayatan hidup di Merapi yang ambivalen, yaitu di satu sisi Merapi menampilkan ancaman tetapi di sisi lain keberkahan. Ambivalensi itu menyebabkan warga Merapi enggan meninggalkan

kampung, tetapi lebih mengutamakan hidup harmonis dengan Merapi dengan mengembangkan strategi mitigasi yang adaptif.

Dengan strategi adaptif, warga Merapi membangun konsep selamat dari bahaya. Dengan konsep ini berarti warga Merapi melakukan tindakan mawas diri, dan menjalani ritual keagamaan. Selanjutnya, agenda aksinya adalah melakukan pengaturan tata ruang dan penerapan teknologi tepat guna dan menjalin kemitraan dengan pemerintah dan LSM. Berbagai upaya itu memperkaya kepekaan mereka memahami perkembangan alam Merapi dan memperkuat kohesi sosial warga untuk hidup selaras dan adaptif dengan dinamika Merapi. Mitigasi yang menjaga harmoni yang bersifat kultural dan lokal bisa ditransformasikan ke dalam sistem mitigasi modern melalui kerjasama kemitraan dengan pemerintah dan LSM, sehingga menghasilkan sistem mitigasi yang lebih berhasil guna. Pemerintah dan LSM bisa menjadi mitra pemberdayaan masyarakat daripada hanya mengeluarkan regulasi dan pelatihan evakuasi semata. Mitra pemberdayaan artinya memberdayakan masyarakat Merapi dengan berbasis pada pengurangan resiko bencana, sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya baik moral maupun material.

7.2 Evakuasi

Erupsi Merapi yang berlangsung secara berulang-ulang—ada erupsi yang menelan korban, menyebabkan kerugian harta benda, ada yang skalanya kecil, dan ada pula yang skalanya besar—telah membentuk perilaku yang khas pada warga Merapi dalam melakukan evakuasi. Kekhasan evakuasi terlihat pada pola-pola evakuasi.

7.2.1 Pola Pengungsian Masa Lalu dan Masa Kini

Pada masa dahulu ketika belum dikenal sistem peringatan dini dalam bentuk sirine yang dibunyikan oleh petugas guna menyatakan kondisi gawat darurat dan penyampaian berita dari pemerintah kepada warga dengan memakai pesawat HT, evakuasi lebih dilakukan warga dengan mendasarkan pada suara batin baik melalui perlambang, wisik, atau mimpi, banyaknya binatang liar yang

masuk kampung, volume hujan abu, banjir lahar dingin, dan adanya tanda-tanda akan turunnya awan panas. Semua suara batin dan tanda alam itu dicerna oleh warga dan menjadi acuan bagi kepala dusun atau pun orang pintar untuk memutuskan apakah warga harus mengungsi atau tidak. Dalam pola lama itu, warga mengungsi secara kolektif atau sendiri-sendiri per keluarga. Warga Kemiren menceritakan bahwa ketika erupsi 1969, mereka turun dan menginap di rumah-rumah warga di kawasan yang aman. Mereka baru kembali selang beberapa bulan setelah aman. Kepala Dusun Jamburejo menceritakan bahwa ketika itu tidak ada yang namanya relawan ataupun petugas pemerintah. Warga turun dengan sendirinya dan tetangga desa siap membantu. Setelah bencana mereda warga kembali tanpa dicegah siapapun dan tanpa diberitakan media.

Pada erupsi tahun 2000 warga lereng Merapi di empat penjuru mata angin juga melakukan pengungsian. Warga Turgo misalnya mengungsi ketika suara gemuruh begitu keras dirasakan dan telah mendapat perintah dari petugas pemantau Merapi. Warga Babadan mengungsi setelah dusunnya gelap tertutup kabut. Warga Jraakah Boyolali mengungsi setelah mengikuti perkembangan erupsi yang terus meningkat, dan warga di Sambungrejo Klaten melakukan hal serupa setelah ada kabar awan panas akan turun.

Dalam kasus erupsi tahun 2006, warga Merapi juga melakukan evakuasi setelah erupsi meningkat, walau beberapa komunitas Merapi terutama yang mengikuti pemikiran Mbah Marijan enggan melakukan pengungsian. Mereka yang enggak mengungsikan yakin bahwa erupsi tidak akan berlangsung lama dan tidak terlalu berbahaya. Resistensi Mbah Marijan terhadap ajakan pemerintah dan khususnya Sultan HB X untuk mengungsi menjadikan isu pengungsian menjadi konsumsi media yang menarik perhatian publik. Ada pro dan kontra antar para pihak apakah warga Merapi harus segera mengungsi atau tidak, dan menolak atau tidak ajakan pemerintah. Sesuai dengan UU Bencana Alam, sesungguhnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memaksa warga mengungsi dan mengosongkan kampungnya jika dinyatakan bahwa kondisinya sudah berbahaya. Berkat ekspo media 2006 tentang evakuasi warga Merapi, muncul kesan bahwa seolah-olah warga Merapi enggan mengungsi dan percaya bahwa kampungnya

akan aman. Padahal kesan itu belum tentu benar. Hal ini karena warga Turgo yang tidak terekspose dalam media justru melakukan pengungsian lebih dini tanpa mendapat tekanan dari pemerintah.

Pada erupsi tahun 2010, nampak bahwa prosesi pengungsian sarat dengan pemberitaan media massa. Pemberitaan ini memberi kesan bahwa warga Merapi enggan untuk mengungsi. Melalui wawancara dengan para pengungsi dari berbagai dusun, dapat ditemukan adanya pola pengungsian mandiri dan pengungsian atas dasar bimbingan pihak luar. Dalam pengungsian mandiri ini ada yang berupa pengungsian individual, keluarga, dan komunitas. Adapun pengungsian dengan fasilitasi pihak luar ada yang dikerjakan oleh relawan, pemerintah, dan militer.

Dalam semua jenis evakuasi mandiri atau mobilisasi pihak luar, peran CSO (Civil Society Organization) selanjutnya disebut organisasi masyarakat sipil (OMS) seperti LSM, dan media, dan lembaga pendidikan sudah barang tentu hadir. Namun, dalam konteks pengungsian mandiri, mereka bukan menjadi motor penggerak, tetapi lebih berfungsi sebagai mobilisator dan fasilitator yang hadir khususnya pada waktu penyelamatan korban di lokasi pengungsian. Adapun dalam evakuasi atas fasilitasi pihak luar, maka kehadiran mereka sangat penting dan menjadi pihak yang “menyelamatkan” warga.

7.2.2 Evakuasi Mandiri

Evakuasi mandiri dalam praktiknya memiliki beragam bentuk. Dimulai dari model evakuasi berbasis individual, evakuasi berbasis rumah tangga dan keluarga, evakuasi berbasis satuan komunitas-komunitas di dalam dusun seperti RW, dan evakuasi berbasis dusun. Salah satu prinsip yang harus dipahami bersama adalah bahwa evakuasi mandiri harus dimaknai sebagai proses yang muncul atas inisiatif, pembiayaan, dan perencanaan serta pelaksanaan yang terlepas dari campur tangan dan keterlibatan pemerintah. Pola ini tentu saja merupakan model partisipatif dalam menghadapi bencana erupsi dan mengurangi beban pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya ketika erupsi terjadi. Apabila dicermati, model partisipatif ini dapat muncul akibat keberadaan modal

sosial, ekonomi, kultural, bersinergi secara baik dalam kehidupan masyarakat perdesaan.

Prinsip-prinsip, dan model evakuasi mandiri merupakan hal yang cukup selaras dengan pandangan pemerintah yakni tanggung jawab keselamatan diri dan keluarga pada dasarnya menjadi tanggungjawab masing-masing warga. Setidaknya hal cukup akurat apabila merujuk pada pernyataan Bupati Sleman yang menyatakan bahwa yang diutamakan saat ini adalah bagaimana setiap warga siap melakukan evakuasi mandiri (Kompas 26 Oktober 2010). Evakuasi mandiri adalah dilakukan oleh warga yang tidak rentan atau sehat, dan secara perorangan mampu menjangkau lokasi-lokasi pengungsian atau menuju kendaraan-kendaraan yang akan mengangkut warga ke tempat pengungsian.

Namun demikian, hal yang tidak pernah terpikirkan oleh para pemangku kepentingan adalah bahwa proses evakuasi mandiri harusnya tidak dimaknai lepasnya tanggung jawab pemerintah atas keselamatan warga. Tingkat tanggung jawab para pemangku kepentingan atas keberhasilan proses evakuasi mandiri inilah yang belum tampak dalam peristiwa bencana erupsi Merapi. Beberapa indikator yang menunjukkan hal ini antara lain *pertama*, observasi di beberapa wilayah penelitian menunjukkan bahwa jalur evakuasi yang ditetapkan untuk menghindari bencana Merapi tidak seluruhnya dalam kondisi siap. Cukup banyak ditemukan jalan dan jalur evakuasi yang rusak sehingga justru menjadi penghambat proses evakuasi. Pasca erupsi Merapi, pemerintah baru sadar akan kondisi ini sehingga di beberapa dusun dan desa dilakukan perbaikan dan pengaspalan jalan. *Kedua*, kegagalan pemerintah menyiapkan infrastruktur evakuasi akibat pemahaman yang kurang pas atas identifikasi kemungkinan daerah terdampak erupsi Merapi. Konsep KRB kurang dapat dicerna oleh masyarakat akibat kurangnya sosialisasi. *Ketiga*, proses evakuasi mandiri tidak disertai dengan adanya petunjuk arah atau jalur evakuasi, khususnya di dusun-dusun KRB II dan I. Fakta menunjukkan bahwa salah satu alasan kegagalan evakuasi mandiri adalah tidak adanya petunjuk arah atau jalur yang harus diikuti warga ketika akan melakukan evakuasi ke daerah aman. Kondisi ini tampaknya akibat pemahaman *Merapicentris* yakni memandang daerah yang dianggap tidak

aman dan akan berdampak luas ketika erupsi hanyalah dusun-dusun di wilayah yang secara orbitasi dekat dengan puncak Merapi (kurang lebih 5 km). Hal ini tampak pada kenyataan bahwa di desa dan dusun pada orbitasi tersebut, petunjuk arah, dan jalur evakuasi, dan titik kumpul bagi warga sudah tersedia. Namun desa dan dusun yang jaraknya semakin jauh dari puncak Merapi, sentuhan program terkait dengan proses evakuasi mandiri tidak tampak. Dapat dimaklumi apabila kemudian di desa dan dusun tersebut, proses evakuasi mandiri lebih tampak sebagai sebuah proses penyelamatan diri yang *semrawut*, kocar-kacir, dan tidak tentu arah serta tujuan. Kasus yang ditemukan kemudian adalah adanya penduduk yang berusaha lari menyelamatkan diri namun justru ke arah mendekati *wedhus gembel*. *Keempat*, warga tidak pernah mendapat informasi terkait dengan wilayah-wilayah aman di sekitar tempat tinggalnya, kecuali hanya berbasis pengetahuan lokal yang sepotong-sepotong dan hanya dimiliki oleh segelintir warga manula. Pengetahuan tersebut tidak dapat tersebarluaskan, karena teralienasinya kelompok tersebut dari kehidupan sosial akibat segregasi sosial-ekonomi. *Kelima*, di tingkat dusun, terdapat beberapa dusun yang belum memiliki sistim pengaturan evakuasi mandiri (tidak jelas siapa yang memberi komando dan arahan, sementara aparat dukuh tidak berfungsi maksimal). Kondisi tersebut cukup berbeda bila dibandingkan dengan kondisi dusun-dusun yang berhasil dalam melakukan evakuasi mandiri. *Keenam*, keberhasilan pola evakuasi mandiri yang dilakukan warga dusun sekitar Merapi dipengaruhi oleh keberhasilan masyarakat setempat dalam melakukan mitigasi bencana secara mandiri. *Ketujuh*, proses evakuasi mandiri tidak disertai dengan adanya EWS (Early Warning System) yang memadai. *Ketujuh* aspek tersebut akan dijelaskan secara lebih terinci dalam uraian berikut.

Terdapat dusun-dusun yang berhasil melakukan evakuasi warga, karena mereka telah menyiapkan mekanisme evakuasi dengan baik jauh hari sebelum bencana benar-benar terjadi. Hal ini seperti yang dilakukan warga Dusun Kaliurang Utara, Kinahrejo, Kujon, Turgo. Bagi dusun-dusun yang memiliki sistem peringatan dini yang baik, proses evakuasi dapat terlaksana dengan lancar sehingga erupsi tidak membawa korban jiwa. Sementara itu, dusun yang tidak

menyiapkan proses evakuasi seperti Dusun Bronggang Desa Argomulyo, jumlah korban jiwa cukup banyak (49 jiwa). Uraian berikut merujuk pada proses dan model evakuasi individual, keluarga dan rumah tangga, komunitas dusun dan evakuasi oleh kepanitiaan di tingkat dusun.

7.2.2.1 Evakuasi Mandiri secara Individual

Evakuasi mandiri secara individual artinya setiap warga memutuskan untuk mengungsi atas dasar kesadaran dan kebebasan mereka menuju ke lokasi pengungsian secara sendiri-sendiri tanpa diorganisasi oleh keluarga atau pun komunitas. Evakuasi ini ada yang dilakukan seminggu sebelum erupsi besar pada tanggal 25 November 2010 atau beberapa hari sebelumnya. Keputusan melakukan pengungsian karena perasaan panik dan tidak adanya informasi yang akurat bahwa Merapi aman. Apa yang mereka terima adalah Merapi akan meletus. Sikap itu misalnya dilakukan oleh sebagian warga Turgo. Ada beberapa warga yang memilih mengungsi secepatnya. Oleh karena itu, evakuasi mandiri secara individual sebelum erupsi besar merupakan suatu tindakan penyelamatan yang berhasil guna. Evakuasi ini kurang terekspos media tetapi ternyata banyak dilakukan oleh individu-individu di lereng Merapi terutama kaum perempuan.

Evakuasi secara mandiri ada yang kurang berhasil ketika dilakukan saat Merapi kemudian dinyatakan berbahaya dan warga dalam radius 20 km dari puncak harus mengungsi dan daerah tersebut harus dikosongkan. Dalam situasi panik banyak sekali warga lari ke luar rumah membawa sepeda motor atau lari bergegas menumpang apa saja. Dapat dimengerti apabila dalam evakuasi pada tanggal 25 November 2010 itu muncul banyak korban di jalan karena panik. Dalam peristiwa naas 25 November 2010, evakuasi secara individual merupakan evakuasi yang menggambarkan ketidaksiapan masyarakat. Evakuasi seperti ini justru dialami oleh masyarakat yang merasa dusunnya akan aman, tetapi kemudian dilanda awan panas. Ketika sebagian besar warga masyarakat berlari menyelamatkan dirinya masing-masing, tanpa ada koordinasi dan tanpa tujuan, beberapa warga memilih untuk tetap di rumah karena secara fisik memang tidak memungkinkan untuk berlari. Sebagian lagi berusaha menghindari terjangan awan

panas dengan mengikuti naluri dan pertimbangan pemahaman individu tentang daerah yang dirasakan paling aman.

Budiharjo (seorang manula berusia 75 th) bersembunyi di gubuk semalaman di persawahan sebelah barat dusun untuk menghindari kejaran wedhus gembel. Manula ini ditemukan oleh relawan dalam kondisi lemas keesokan harinya. Demikian juga, Siswodiharjo (83 th) yang telah ditinggal lari oleh keluarga karena saat wedhus gembel menerjang, wedhus gembel telah membakar rumah tetangga dan seisinya. Manula ini hanya bisa mendengar suara jeritan orang minta tolong tanpa bisa berlari karena kakinya lumpuh sejak dua tahun yang lalu. Hanya keberuntungan yang menyebabkannya tidak menjadi korban mengingat rumah yang dia tinggali tidak terterjang wedhus gembel. Setelah wedhus gembel mereda dia bisa dievakuasi dalam kondisi selamat oleh relawan. Pengalaman yang sama dialami Muh Basir (86 th) yang terpisah dari keluarganya selama sebulan. Penyandang tuna wicara dan cacat fisik bawaan lahir ini hilang terbawa arus pengungsi dari dusun lain. Pada malam erupsi, tuna wicara ini ditemukan oleh relawan dalam kondisi sendirian bingung di sekitar dusun yang telah kosong karena semua penghuni telah mengungsi. Hal yang sama juga dialami oleh Ngadikem (45 th), perempuan tanpa sanak saudara ini berlari menyelamatkan diri sendirian. Warga yang telah tertinggal di dusun terselamatkan oleh mobil tentara, sementara warga lain yang mempunyai kendaraan sudah pergi terlebih dahulu ke arah selatan, kearah kota Yogyakarta.

Peristiwa erupsi Merapi dan proses evakuasi warga Dusun Bronggang merupakan contoh betapa beberapa warga di wilayah dusun sekitar Merapi tidak memiliki kesadaran umum terkait dengan bencana Merapi dan ketidaksiapan infrastruktur pendukung. Bagi warga Dusun Bronggang, jalur evakuasi ke titik aman tidak diketahui secara pasti. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya sistem mitigasi sehingga menjadi faktor utama ketidaksiapan warga dalam menghadapi peristiwa erupsi Merapi. Hal itu juga menjadi penyebab tidak munculnya kesadaran warga atas kemungkinan munculnya bahaya akibat erupsi Merapi. Bagi masyarakat tersebut, tidak ada dalam pemahaman mereka bahwa erupsi Merapi akan berdampak bagi kehidupan dusun mereka, yang jaraknya sekitar 15 km dari puncak Merapi. Pemahaman warga dusun masih terpancang pada ingatan yang sebenarnya juga masih sangat terbatas, bahwa dusun mereka belum pernah sekalipun terkena dampak langsung erupsi Merapi. Walaupun mereka juga tidak terlalu yakin karena menurut beberapa manula, orang tua mereka pernah bercerita

bahwa Dusun Bronggang, khususnya Bronggang Suruh, pernah tenggelam oleh lahar dingin.

Tidak adanya pengetahuan komunal yang memadai menyebabkan respon warga atas kemungkinan dampak erupsi Merapi cukup beragam. Hal tersebut yang menyebabkan antar warga masyarakat terdapat pemahaman yang sangat beragam atas peristiwa erupsi ini. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa infrastruktur sosial berupa kelembagaan SAR desa dan relawan tidak terbentuk pada masa pra erupsi. Pada situasi ketika Merapi mulai disinyalir akan erupsi besar, pihak pemerintah dan aparat desa memang kemudian menginisiasi adanya SAR desa dan memunculkan adanya relawan. Namun masyarakat masih memahami sebagai hal yang mengada-ada, terlebih bila dikaitkan dengan kemungkinan akan adanya bencana akibat erupsi Merapi, *mung podho gawe kisruh*". Pernyataan ini mengindikasikan bahwa warga masih menganggap bahwa pengetahuan yang mereka milikilah yang lebih akurat dibanding yang dimiliki oleh pemerintah.

Dapat dimengerti apabila kemudian muncul fakta bahwa evakuasi mandiri yang dilakukan warga Dusun Bronggang benar-benar mandiri dalam pengertian tidak terkoordinasi pada tataran dusun dan desa. Ketika sebagian besar kondisi dusun, kantor desa, dan jalan-jalan sekitar perumahan telah sepi karena warga telah mengungsi secara mandiri, masih saja ditemukan warga dusun yang tertinggal karena tidak mempunyai kendaraan untuk pergi. Mereka yang tidak mau evakuasi atau tidak memperhatikan peringatan tetangga, akhirnya meninggal sia-sia diterjang awan panas. Kondisi ini benar-benar merupakan mimpi buruk bagi warga masyarakat Bronggang dan para manula. Bagi para manula, hanya karena pertolongan relawan yang menyebabkan kelompok rentan tidak menjadi korban erupsi. Pengalaman ini tentu saja sangat membekas di benak mereka. Sebagaimana dituturkan seorang manula.

"Kula lan warga sanes ingkang ketilar teng dusun namun kelingan rencang padhos pasir ingkang sampun ngungsi teng Kalasan. Kalih relawan kula dipun kirim teng mriko, dipun bantu Kepala Dukuh Bakalan. Sak sampunipun setunggal dalu setunggal malem, kula dipun pindah maleh woten daerah Duri, lajeng pindah malih wnten sekolah penerbangan. Kula boten ngertos sinten ingkang mbeta. inggih nyuwun

sewu mbak, sinten-sinten seng ngrumati kulo, kulo mboten weruh. La ora iso moco. Kula naming pasrah kalih Dukuh Bakalan amargi sampun kepisah saking wargo Bronggang sanese. Kula tumut ngungsi. kulo malah sareng kalih pak Eko dukuh Bakalan mbak, malah boten sareng kalih dukuh mriki. Nopo-nopo kulo seng ngurusi pak Eko. Malah pak Eko ngendikan 'nek karo aku ora boso ora opo-opo' maksude ben koyo keluargane dewe. Kulo teng Duri kalih wulan, tapi inggih boten dipuruki nopo dieruhke kalih dukuh mriki”.

7.2.2.2 Evakuasi Mandiri Berbasis Keluarga

Evakuasi mandiri berbasis keluarga merupakan pola yang relatif umum bersanding dengan pola evakuasi berbasis komunitas. Keluarga sebagai unit organisasi sosial yang berbasis pada ikatan keturunan dan darah menjadi sangat penting dalam agenda penanggulangan bencana. Keluarga berusaha menjaga keutuhan anggotanya dan karena itu mereka memiliki kebutuhan untuk bisa menyelamatkan anggotanya sebagai prioritas dalam evakuasi.

Ketika erupsi terus meningkat dan menelan korban Mbah Marijan, sebenarnya ratusan keluarga kemudian memutuskan turun dan tinggal di sanak kerabatnya di dusun-dusun di bagian bawah. Fakta itu tidak terungkap di media. Banyak yang menyaksikan di mana keluarga berperan sebagai penampung pengungsi yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun di kawasan Merapi. Warga Kinahrejo, misalnya mulai menginap di rumah kerabatnya di Bendosari, warga Kaliurang Utara ke desa-desa di Kecamatan Turi, dan warga Jamburejo ke desa-desa di wilayah Salam.

Sekalipun pergi bersama anggota sekeluarga, warga Merapi cenderung hanya memindahkan anak dan istrinya ke luar dusunnya. Warga Turgo misalnya, memindahkan istri dan anak ke Sidomoro dan sebagian ke gedung sekolah di Hargobinangun, sedangkan mereka tetap menjaga rumahnya. Baru ketika erupsi semakin membesar seperti terjadi pada erupsi tanggal 25 November 2010, mereka memilih tidur di pengungsian daripada di rumah. Dalam pengungsian berbasis keluarga, ada kekompakan antara suami dan istri untuk saling mendengarkan saran dan pendapat. Mereka juga mengikuti perkembangan pengungsian di desanya melalui berita TV, radio, hasil pengamatan, dan telepon, atau SMS dari kerabat dekatnya.

Keluarga Pujo (60 tahun), misalnya, memutuskan untuk mengungsi saat melihat pengungsi yang ada di balai desa (yang kebetulan jaraknya kurang dari 20 meter dari rumahnya) telah mulai diungsikan ke tempat yang lebih aman. Ia berbicara dengan anggota keluarga lain, *“Kalau pengungsi dari dusun lain, yang mengungsi di tempat kita saja sudah dipindahkan, berarti dusun kita tidak aman lagi. Tapi mengapa kita tidak diminta pindah juga? Kula langsung mutusaken keluarga ini semua harus mengungsi ke Klaten atau kota Yogyakarta”*. Dorongan lain adalah kabar dari menantu yang bekerja sebagai Polisi yang pada saat itu sedang bertugas mengawasi kemungkinan erupsi Merapi dari Desa Kepuharjo. Dengan bahan pertimbangan dari dua sumber ini, keluarga Pujo memutuskan segera mengungsi. Dia mengungsi pukul 15.00 yakni 8 jam sebelum erupsi besar Merapi pada pukul 11.00 WIB. Saat mengungsi keluarga ini telah berusaha mengajak tetangga untuk mengungsi bersama, namun para tetangga malah mencibir. *“Mengko lak yo lewat dalane dewe-dewe, nek mati yo mengko mati bareng-bareng”*. Ada juga yang menjawab, *“Kene wae dadi panggon ngungsi, mosok awake dewe do ngungsi”*.

Pola evakuasi secara mandiri berbasis keluarga dilakukan oleh beberapa warga di Dusun Bronggang. Pengungsian mandiri berbasis keluarga nampaknya bisa bergayung-sambut dengan pengungsian mandiri berbasis komunitas. Pengungsian seperti itu tampak pada kasus warga Bendosari, Umbulharjo Cangkringan Sleman. Warga Bendosari pada awalnya mengungsi secara individual ke arah bawah, tetapi kemudian berkembang menjadi pengungsian secara keluarga terutama sebelum Mbah Marijan tewas. Menjelang Mbah Marijan tewas, mereka kemudian mengungsi ke Balai Desa Wukirsari. Namun demikian di tempat tersebut mereka merasa kurang nyaman karena tidak bisa memperoleh jatah makan secara memadai. Akhirnya ada beberapa orang yang kemudian mengungsi ke sanak saudara dan sahabatnya

Foto 7.1
Korban Erupsi Merapi



Sumber: VOA, Sabtu 13 Nov 2010

di Mlati, Sleman. Setelah dua hari mengungsi di Mlati, mereka mengajak kawan-kawannya agar membawa keluarganya masing-masing untuk mengungsi di keluarga-keluarga Mlati yang menyambut kehadiran warga Bendosari bak tamu agung. Mereka diberi satu sampai dua rumah di rumah-rumah warga Mlati, diberi makan minum layaknya keluarga. Pihak Lurah Mlati lalu mengorganisir kegiatan penyantunan pengungsi. Lurah mencari sumbangan dari berbagai pihak dan setiap malam Minggu, para pengungsi disuguhi pagelaran musik organ tunggal. Para pengungsi juga diberi kesibukan dari mengurus ternaknya sampai melakukan kegiatan memasak dan kegiatan produktif lainnya. Setelah erupsi berakhir mereka kembali ke Bendosari dan diantar dengan kendaraan.

Kejelasan di atas menggambarkan keberhasilan dari pola pengungsian keluarga. Pola pengungsian ini menjadi terorganisir dan didukung oleh masyarakat sipil dan warga secara partisipatif. Dalam kenyataannya pengungsian keluarga ini ada di berbagai kampung Sleman, Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Para pengungsi mengapresiasi pola pengungsian ini karena dianggap lebih manusiawi dan akhirnya membuahkkan tali persaudaraan.

7.2.2.3 Evakuasi Mandiri Berbasis Komunitas Dusun

Pola evakuasi mandiri berbasis komunitas dilakukan warga secara kolektif dan diorganisasi oleh kepala dusun atau tokoh-tokoh yang terpercaya di komunitas. Pengungsian ini umumnya dilakukan menjelang erupsi dan tempat yang dituju adalah barak pengungsian berupa gedung balai desa, sekolah, gedung olah raga misalnya GOR, masjid, gereja, dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sleman.

Pola evakuasi mandiri berbasis komunitas ternyata berlangsung di hampir semua dusun. Walaupun umumnya dilakukan menjelang erupsi, pola evakuasi ini menjadi penting dalam agenda penanggulangan bencana karena umumnya warga di lereng Merapi bagian atas memanfaatkan modal sosial-budaya komunitasnya. Beberapa dusun yang dapat diangkat sebagai contoh adalah Dusun Bakalan, Kujon, Kinahrejo, Kaliurang Utara, dan Turgo. Dusun-dusun ini telah memiliki organisasi yang relatif efektif untuk menyelenggarakan evakuasi mandiri secara

partisipatif. Pertama, mereka memiliki Linmas dan khususnya SAR yang salah satu tugasnya adalah melakukan penyelamatan warga dari ancaman bencana. Tim SAR bahkan telah berfungsi dengan memfasilitasi pemerintah atau LSM untuk menyelenggarakan pelatihan dan desiminasi penanggulangan bencana alam. Kedua, dusun-dusun tersebut memiliki tradisi *self-governing community* yakni suatu pengelolaan komunitas secara terorganisasi dan partisipatif. Oleh karena itu, ketika menghadapi bencana warga melakukan respon secara kolektif. Dengan demikian mereka membuat keputusan-keputusan yang dipercaya oleh warganya karena digodok secara partisipatif. Sebagai ilustrasi adalah di Stabelan. Di dusun ini warga melakukan rapat di rumah kepala dusun guna memutuskan akan mengungsi, bagaimana cara dan ke mana akan mengungsi. Di Turgo, warga melakukan rapat koordinasi antara pihak SAR, Linmas, wakil-wakil RT setempat dan para pemuda, serta keputusan pun diambil seperti melakukan evakuasi secara serempak sebelum pukul 17.00.

Dalam mengatur proses evakuasi, di samping diawali dengan rapat, langkah pertama yang mereka lakukan adalah menentukan titik kumpul. Biasanya titik kumpul di dalam dusun atau di pinggir dusun agar mereka bisa berangkat bersama dengan saling tolong dan dapat dengan mudah memeriksa warga yang tertinggal. Evakuasi juga menentukan tentang kendaraan yang dipakai. Misalnya memakai sepeda motor, truk, atau mencari kendaraan dari luar agar bisa menampung semua penduduk. Seperti di Dusun Bakalan, atas inisiatif warga dan kepala dusun, warga diungsikan dengan dua bus sewaan dan beberapa kendaraan pribadi pada siang hari sekitar jam 15.00 (sembilan jam sebelum kejadian erupsi 2010).

Dalam rapat dan pelaksanaan evakuasi, warga menentukan lokasi pengungsian yang mereka tuju. Warga Jrasah Boyolali misalnya memilih mengungsi ke Kecamatan Sawangan di wilayah Magelang, karena jaraknya relatif dekat dan menjauh dari gunung serta sudah sejak lama lokasi ini menjadi tujuan. Di Sawangan, pemerintah dan masyarakat sudah bisa menerima pengungsi dari berbagai wilayah Boyolali. Sementara itu, warga Jrasah Boyolali pun sudah biasa memberikan empatinya dengan mengirimkan produk hasil bumi seperti jagung

dan sayuran kepada warga di wilayah Magelang yang diterjang lahar dingin. Dengan adanya kebiasaan berbagi itu, maka orang Jarakah merasa tidak sungkan untuk melakukan pengungsian ke arah Magelang.

Kesiapsiagaan yang tinggi warga dan pemerintah Dusun Bakalan menjadi penentu keberhasilan warga menghindari diri dari dampak erupsi terhadap jiwa mereka. Berbeda dengan apa yang terjadi di Dusun Bronggang, akibat tidak siap dan kurang tanggapnya aparat dusun terhadap situasi Merapi dalam menginstruksikan warganya untuk mengungsi maka *wedhus gembel* sudah melahap dusun mereka. Akhirnya warga kocar-kacir melarikan diri dari kejaran *wedhus gembel*. Beberapa di antaranya berlari ke arah yang salah, yakni menyongsong datangnya *wedhus gembel*. Hal ini disebabkan di Dusun Bronggang tidak terdapat rute evakuasi maupun pengalaman latihan evakuasi. Alhasil warga Dusun Bronggang yang menjadi korban mencapai 49 jiwa meninggal, tiga jiwa menderita cacat permanen, dan 16 menderita luka ringan. Selain puluhan jiwa yang menjadi korban, ternak juga ikut menjadi korban karena tidak ada upaya untuk proses evakuasi. Ada 21 ekor sapi mati terkena *wedhus gembel* terdiri dari tujuh sapi untuk Idul Raya Kurban, dan sisanya milik pribadi. Selain itu ada sekitar puluhan kambing dan unggas mati. Evakuasi ternak dilakukan setelah *wedhus gembel* memorakporandakan dusun. Evakuasi dilakukan dengan dibantu oleh tentara dan relawan yang membawa ternak ke daerah Prambanan. Harta benda lain yang ikut hancur adalah rumah beserta isinya dan kendaraan. Ada 34 rumah rusak ringan hingga roboh, satu mobil dan dua motor yang terbakar.

Dalam situasi panik, sebenarnya warga bisa melakukan pengungsian mandiri berbasis pada solidaritas komunitas. Hal ini nampak di Dusun Kujon, Boyolali, Kaliurang Utara, dan Kecamatan Srumbung Magelang. Dusun-dusun tersebut memang lokasinya sangat dekat dengan puncak Merapi sehingga wajar bila warganya harus membangun kesiapsiagaan secara kompak. Warga yang dituakan dan tokoh masyarakat mampu memberikan isyarat tentang adanya tanda bahaya dengan mencermati atas munculnya kondisi Merapi yang bergemuruh dan mengeluarkan lava pijar terus-menerus. Kepala dusun lalu merespon kekhawatiran mereka dengan mengambil inisiatif untuk menyiapkan proses evakuasi secara

partisipatif. Ia bersama dengan para warga lalu segera menentukan titik kumpul di beberapa persimpangan jalan dusun, menentukan arah dan tujuan evakuasi, dan menyiapkan mobil pengangkut. Ia mengatakan, “*Saya menyerahkan satu mobil untuk proses evakuasi mas... sementara saya menggunakan satu mobil yang lain untuk kerabat dekat*”, demikian Pak Bayan menyampaikan. Pak Bayan memastikan bahwa upaya yang dia lakukan bersama warga secara spontan, tetapi dengan cermat mengantisipasi adanya resiko bencana yang bisa muncul di desanya. Meskipun dilakukan secara cemat, tetapi langkah evakuasinya memberikan jaminan keamanan bagi warganya yang lemah. Bagi Pak Bayan, prioritas evakuasi adalah warga manula, anak-anak dan perempuan, yang sudah dievakuasi satu minggu sebelum erupsi besar muncul. Sebelum Merapi erupsi besar, warga sudah mengungsi ke daerah Bawukan. Pada hari Senin legi, warga sudah dikumpulkan di rumah Pak Bayan, terutama para lansia dan balita. Dalam pertemuan tersebut, Pak Bayan menjelaskan bahwa kondisi Merapi semakin mengkhawatirkan sehingga maka warga harus siap segera mengungsi. Walaupun setelah pertemuan warga belum ada yang mengungsi, mereka sudah menyiapkan segala bekal seandainya sewaktu-waktu segera evakuasi. Satu hari setelah pertemuan di rumah kepala dusun, hari Selasa Pahing, Merapi mengeluarkan suara gemuruh lebih hebat. Pada saat itulah, petugas pemerintah memberikan instruksi pada warga untuk mengungsi.

Dalam pengungsian berbasis komunitas secara mandiri, peran tokoh juga penting khususnya yang dianggap terpercaya. Hal ini nampak dalam kasus evakuasi warga di Sambungrejo. Pada awalnya warga RT Sambungrejo tetap bersikeras tidak bersedia mengungsi. Sikap itu menghalangi adanya pengungsian secara partisipatif. Namun demikian, Pak RT sebagai orang yang dituakan berfikir positif bahwa mengungsi lebih baik daripada tidak mengungsi demi menghindari korban. Namun karena tradisi musyawarah kuat, ia tidak berhasil membujuk warganya untuk mengikuti evakuasi seperti warga Dusun Kujon pada umumnya. Namun, kondisi para warga berbalik setelah secara nyata muncul guguran lava dan beberapa guguran batu dari Merapi. Pada pukul 18.00 warga sudah banyak berkumpul di rumah ketua RT dan armada truk sudah disiapkan di dekat gardu.

Setelah warga naik truk, truk berjalan dan sempat berhenti di daerah Ngipiksari. Sementara itu warga Ngipiksari sudah siap dengan armada truknya dan menunggu armada truk dari Sambungrejo untuk mengungsi bersama. Sikap warga Ngipiksari itu menunjukkan bahwa pengungsian mandiri berbasis pada komunitas itu bersandar pada jejaring sosial. Warga Sambungrejo mengatakan, “*Kek wong kene durung medun, do urung medun.*” Demikianlah paparan seorang tokoh tentang solidaritas warga Ngipiksari. Solidaritas warga menjadi kunci keberhasilan evakuasi mandiri di Dusun Kujon, Ngipiksari, Kaliurang utara, dan dusun-dusun lain. Proses evakuasi mandiri memiliki pola yang hampir sama.

7.2.3 Pengungsian Berbasis Mobilisasi Pihak Luar

Pengungsian atas mobilisasi pihak luar maksudnya warga baru mau mengungsi ketika dibujuk, ditekan atau dipaksa oleh pihak luar. Dalam kasus erupsi 2010, Mbah Marijan dibujuk mengungsi oleh pihak luar seperti tim SAR, media, TNI, dan lainnya, tetapi ia bersikeras untuk tidak meninggalkan tugasnya. Dalam banyak kasus, media sering menggambarkan adanya keengganan warga untuk mengungsi. Misalnya seorang nenek tua dikabarkan meronta-ronta diboyong beberapa TNI seolah ia begitu kuat dengan sikapnya yang menolak diungsikan.

Kesan bahwa warga Merapi enggan mengungsi menjadi kabur ketika faktanya mereka melakukan pengungsian secara mandiri. Namun media telah memberikan citra yang kuat bahwa warga Merapi enggan diungsikan. Sementara itu, memang tidak bisa dipungkiri bahwa segelintir orang di setiap dusun kadang enggan diungsikan ketika orang luar sudah menyatakan Merapi dalam kondisi awas dan berbahaya. Beberapa hasil FGD dan pengamatan atas proses evakuasi korban erupsi mengungkapkan bahwa salah satu sebab warga enggan mengungsi, karena mereka yakin bahwa Merapi tidak akan mengeluarkan awan panas yang menerjang dusunnya atau hujan abu tidak akan pekat sehingga mengancam keselamatan jiwa. Mereka yakin bahwa dusunnya akan aman. Mereka menganggap bahwa mengungsi justru akan merepotkan diri sendiri dan banyak pihak lainnya.. Mereka juga khawatir jika meninggalkan dusun maka rumah

mereka akan dijarah pencuri. Cerita keengganan warga mengungsi salah satunya adalah ketakutan bahwa sapi atau kambingnya akan dicuri orang. Memang ditemukan kejadian pencurian terhadap beberapa ekor kambing di Kinaharjo. Pencurian ini dipergoki tentara yang melakukan patroli.

Pihak luar yang berperan dalam proses evakuasi adalah terutama pihak TNI dan para relawan Merapi. TNI berhasil membantu warga yang enggan mengungsi karena ternak mereka tidak ikut diungsikan. Pihak TNI memberikan bantuan dalam bentuk penyediaan truk sedangkan warga menaikkan dan menurunkan ternak. Selain itu, TNI juga menyisir warga yang enggan mengungsi atau terjebak tidak bisa mengungsi karena tidak memiliki kendaraan atau tersasar karena desa yang menjadi gelap gulita. Para relawan juga berjasa besar dalam melakukan mobilisasi evakuasi. Kasus selamatnya Pak Poniman yang dikabarkan sakti dengan mukenanya adalah berkat keberanian para relawan Merapi. Mereka masuk ke kampung-kampung untuk membantu warga melakukan pengungsian anggota keluarganya atau ternaknya. Sekalipun relawan memberikan sumbangan yang berarti bagi penyelamatan korban, mereka dapat dikatakan bermain pada waktu situasi darurat saja dan belum tentu bekerja secara terorganisasi. Dalam lokakarya peran media dalam penanggulangan bencana diingatkan bahwa pihak media dan relawan acuh terhadap warga Sambungrejo karena fokus mereka di Kinahrejo. Nyatanya warga Sambungrejo bisa selamat tanpa bantuan pihak luar. Sementara itu Kadus Bendosari sangsi terhadap kinerja pihak luar. Banyak bantuan berlimpah ditujukan pada warga, namun akibat tidak diurus dengan baik oleh pihak luar maka bantuan tersebut segera raib dalam sekejap, Sikap sangsi itu tidak ada sama sekali pada diri kepala dusun dan tokoh masyarakat ketika berbicara pengungsian di keluarga. Bantuan tidak banyak tetapi tidak akan hilang dan terbagi merata.

7.2.4 Rangkuman

Konsep *eling* dan *waspada* masih relevan sebagai kekuatan penting pada warga Merapi dalam melakukan evakuasi. Masalahnya adalah skala erupsi tahun 2012 sangat besar sehingga membuat semua pihak panik, tidak terkecuali warga

Merapi sendiri. Namun, sekalipun panik warga nampaknya sudah mempunyai peta jalan bagaimana seharusnya melakukan evakuasi yang berbasis pada pengetahuan lokal.

Pertama, warga Merapi melakukan pengungsian secara bertahap dari menyingkir sementara kemudian meninggalkan kampung untuk beberapa malam, Namun mereka tetap kembali ke rumah untuk mengawasi dan mengurus harta benda, sementara mereka mengungsi bersama keluarganya. Dengan demikian warga Merapi sebenarnya tidak memiliki ketakutan yang berlebihan. Mereka lebih cermat dalam mengambil keputusan agar bisa tetap mempunyai akses terhadap kampung halaman beserta sumber daya yang ada.

Kedua, evakuasi mandiri yang dilakukan warga menunjukkan adanya solidaritas horizontal antar komunitas Merapi dengan komunitas di luarnya. Solidaritas semacam ini memungkinkan masa darurat bisa ditangani warga daripada harus mengandalkan sepenuhnya dari negara.

Ketiga, evakuasi menjadi drama penanggulangan bencana yang menegangkan karena diskenariokan penuh ketidakpastian dan ancaman, Warga Merapi umumnya menjadi panik akibat skenario media yang ditujukan untuk menarik perhatian publik dan pemerintah. Akibatnya berbagai bentuk evakuasi mandiri tidak terekspos sebagai prakarsa masyarakat. Media dan negara telah membawa cerita bahwa pengungsian lebih banyak digerakkan oleh kekuatan negara dan relawan sehingga berbagai bentuk pengungsian mandiri tenggelam dalam wacana penanggulangan bencana.

Keempat, pemberitaan media, namun demikian, menguntungkan pengungsi karena mereka kemudian mendapat santunan yang luar biasa dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. Dompot kemanusiaan mengalir ke media dan sebagian disalurkan kepada korban. Tidak terkecuali nasi bungkus yang disiapkan oleh komunitas-komunitas warga di Yogyakarta yang terus mengalir di pengungsian. Keadaan ini memberikan kepastian bahwa pengungsi tersantuni di tengah kondisi Negara yang agak lamban dalam menyediakan bantuan dalam masa darurat.

7.3 Pengungsian

Dalam pelaksanaan pengungsian korban akibat erupsi, pemerintah, media, komunitas, serta masyarakat sipil terlibat sangat kuat pada penyelamatan korban yang kebanyakan adalah penduduk di wilayah KRB III dan II. Peran para pemangku kepentingan itu sangat penting untuk dicermati dalam program pengulangan bencana alam pada tahap pengungsian. Walaupun demikian, bab ini lebih fokus pada sikap dan perilaku korban dalam memilih lokasi pengungsian, dan upaya mereka kembali ke kampung daripada mendapatkan pelayanan di pengungsian. Bagian ini akan mendeskripsikan strategi pengungsi secara lebih kontekstual dan prosedural.

Pertama adalah mengenai jumlah dan lokasi pengungsian. Dengan menyimak bahasan ini akan diketahui bahwa erupsi Merapi yang besar memaksa warga melakukan pengungsian secara masif yang merupakan drama yang dapat membawa kepanikan. Namun demikian, terlihat bahwa sesungguhnya warga memiliki peta berfikir tentang lokasi pengungsian yang mereka pertimbangkan lebih adaptif. Kedua, adalah mengenai peran media dalam peliputan pengungsian dan berbagai dampaknya. Paparan ini akan memperlihatkan adanya respon komunitas dan warga yang besar untuk ikut meringankan beban pengungsi. Ketiga adalah respon para pemangku kepentingan dalam penanganan pengungsian. Keempat adalah refleksi tentang masalah dan solusi mengenai pengungsian warga korban ke depan.

7.3.1 Jumlah Pengungsi dan Lokasi Pengungsian

Jumlah pengungsi erupsi Merapi tahun 2010, khususnya pada pasca letusan tanggal 25 Oktober 2010 mencapai lebih dari 300.000 jiwa (Kompas, 26 Oktober 2010). Pengungsi ini meliputi penduduk yang tinggal di lereng Merapi dalam radius 20 km ke arah puncak gunung. Pada tanggal 25 Oktober 2010, penduduk di dalam radius 20 km dari puncak dimobilisasi pemerintah untuk mengungsi. Sejak pagi sampai khususnya petang dan malam hari, mereka mengungsi untuk menghindari ancaman gempa, guguran lava, dan awan panas yang dikhawatirkan akan menelan korban lebih banyak. Ada yang lari ke rumah-

rumah sanak saudara, penginapan komersial, dan menuju ke lokasi pengungsian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau yang sengaja dipilih oleh warga. Bahasan ini menyimak pengungsi yang berasal dari wilayah KRB III dan II yaitu yang tinggal di wilayah kurang lebih 10 km dari puncak Merapi, kecuali beberapa dusun yang lokasinya jauh dari puncak tetapi berada di pinggir jurang atau sungai-sungai yang dialiri lahar panas.

Ada empat tipe lokasi pengungsian yang dituju oleh warga lereng Merapi bagian atas, yaitu: (1) barak pengungsian permanen, (2) gedung milik pemerintah, sekolah atau milik publik (3) rumah warga atau sanak saudara. Pengungsi yang ketiga ini tidak dibahas di sini karena sudah dibahas pada bagian mengenai evakuasi sebelumnya.

a. Lokasi Barak Pengungsian Permanen

Sebelum erupsi Merapi yang amat besar pada tanggal 25 Oktober 2010, lokasi pengungsian warga umumnya ditetapkan di gedung-gedung balai desa atau gedung-gedung sekolah. Pemerintah daerah tidak mempunyai barak pengungsian yang memadai. Pemda Sleman, misalnya, hanya memiliki satu unit bangunan di Dusun Purwobinangun yang sudah biasa dipakai oleh pengungsi warga Turgo. Akan tetapi kondisi barak itu amat buruk, rusak, serta fasilitas sanitasi yang tidak memadai. Oleh karena itu, ketika warga Turgo mengungsi barak itu malah tidak dipakai dan hanya untuk menampung perbekalan atau kendaraan sepeda motor. Adapun pengungsi warga Turgo kemudian tinggal di bangunan SD Purwobinangun atau di tempat sanak saudara mereka di luar dusun.

b. Gedung Pemerintah, Balai Desa Sekolah dan Univeristas

Karena tidak mempunyai barak pengungsi permanen yang memadai, maka Pemda Sleman kemudian mengambil kebijakan untuk menggunakan sekolah sebagai bangunan untuk mengungsi beberapa tempat. Sementara itu, warga secara spontan biasanya melakukan pengungsian ke lokasi-lokasi yang dulu pernah mereka tempati atau yang kemudian direkomendasikan untuk ditempati. Lokasi tersebut biasanya sekolah karena bangunan balai desa sudah tidak memadai lagi.

Salah satu contoh adalah Balai Desa Wukirsari, Sleman, Yogyakarta. Pada waktu erupsi yang menewaskan Mbah Marijan, warga dari lereng atas sudah turun dan menempati balai desa. Karena tidak mampu menampung seluruh pengungsi, maka sebagian kemudian masuk ke gedung sekolah setempat. Dengan mudah warga langsung menggunakan bangunan sekolah karena para siswanya telah diliburkan. Di lokasi itu kemudian pihak pengungsi dilayani oleh pihak pemerintah desa, pemda, relawan, dan para dermawan yang datang membagikan bantuan.

Contoh lainnya adalah penduduk Kinahrejo, Pelemsari dan sekitarnya yang kampungnya sudah terkena erupsi sebelum erupsi 25 Oktober 2010. Mereka ini langsung diungsikan juga oleh pihak relawan dan pemda setempat ke desa-desa lain yang aman. Sementara, di Desa Sariharjo, Ngaglik Sleman, pengungsi ditempatkan di balai desa dan bangunan kantor desa. Mereka mendapat bantuan dari Pemerintah Desa Sariharjo, relawan, dan Pemda Sleman.

Di wilayah Magelang dan Boyolali, warga juga melakukan pengungsian ke desa-desa yang lokasinya sekitar 10-20 km dari puncak gunung. Mereka ini menjadi pengungsi yang kurang mendapat dukungan sarana untuk evakuasi, karena kurangnya jumlah relawan atau dukungan sarana dari pemerintah desa maupun pemda. Sekalipun berada di bangunan pemerintah, seperti balai desa dan sekolah, banyak pengungsi yang belum mendapatkan bantuan dari pemda ketika mereka sampai lokasi dan tinggal selama satu sampai dua hari. Walaupun demikian, mereka ini umumnya secara personal mendapat bantuan logistik dari warga setempat.

Pada waktu pemerintah menetapkan agar kawasan dalam radius 20 km harus dikosongkan, warga pengungsi yang masih bertahan lalu mengungsi ke luar kawasan ke wilayah yang dianggap aman. Selain itu, muncul pengungsi baru dari warga dusun-dusun yang berada di radius sekitar 6-10 km dari puncak Merapi. Pengungsi ini misalnya warga Dusun Kemiri Cilik Sleman, Kaliurang Utara, dan Jamburejo II Magelang. Tidak ketinggalan juga warga yang tinggal sekitar 3-6 km dari puncak yang sebelumnya menolak mengungsi seperti penduduk di

Sambungrejo dan Kaligentong Klaten yang kemudian melakukan evakuasi secara spontan.

Pengungsi erupsi 26 November menuju lokasi pengungsian yang amat beragam. Mereka pindah dari lokasi pengungsian lama yang berjarak sekitar 10-15 km dari puncak gunung menuju ke lokasi yang berjarak lebih dari 20 km dari puncak gunung. Pemda memanfaatkan gedung besar misalnya gelanggang olahraga (GOR) yang meliputi GOR milik Kabupaten Sleman, dan GOR milik Kabupaten Klaten. Beberapa pihak CSO juga menyediakan tempat luas seperti gedung GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan gedung pertemuan Universitas Pembangunan Nasioanl (UPN). Di Universitas Gadjah Mada (UGM), pos pengungsian terdapat di Gelanggang Mahasiswa, Pusat Kebudayaan Prof. Koesnadi (Purna Budaya), dan Tenis Indoor. Warga dari lokasi pengungsian dipindah oleh pemerintah daerah dan pihak TNI. Kepanikan melanda para pengungsi dan bahkan relawan serta TNI karena evakuasi berlangsung di tengah gemuruhnya erupsi, kegelapan, serta hujan abu dan pasir sepanjang hari. Mereka diungsikan ke tempat-tempat tersebut dengan perasaan ketakutan dan ketidakpastian akan keselamatan.

Di Kabupaten Sleman, diperkirakan jumlah pengungsi yang memenuhi GOR Sleman lebih dari 17.000 orang. Pengungsi tersebut berasal dari Kecamatan Cangkringan, Pakem, dan Turi. Para pengungsi terutama dari berbagai barak pengungsian yang semula berjarak 7-10 km dari puncak Merapi bergeser ke kawasan dalam jarak lebih dari 20 kilometer.¹ Di GOR ini pengungsi terkelompok berdasarkan asal dusunnya, dan dalam setiap dusun terbagi ke dalam satuan RT dan sanak familinya.

Di Kabupaten Magelang, barak pengungsian berada di enam kecamatan, yakni Srumbung, Dukun, Mungkid, Muntilan, Sawangan, dan Salam. Barak pengungsian menggunakan bangunan pos pengungsian permanen di Tanjung, dan

¹ Liputan6.com, "Nasib Tragis Pengungsi Merapi", 05/11/2010, (<http://berita.liputan6.com/read/304954/nasib-tragis-pengungsi-Merapi>).

sejumlah balai desa, dan gedung SD.² Mereka ini berasal dari 19 desa yang termasuk KRB III karena terletak di lereng Merapi. Sama seperti di GOR, pada dasarnya pengungsi mengelompok menurut asal dusun dan dalam satu unit dusun terbagi-bagi ke dalam asal RT-nya.

Di Kabupaten Magelang, terdapat 48 lokasi pengungsian dengan jumlah pengungsi 33.839 jiwa. Sementara itu, pengungsi di Gedung Darul Arqam Muhammadiyah Muntilan Magelang jumlahnya tidak teridentifikasi.³ Pengungsi di Balai Desa Tirto, Kecamatan Salam Magelang sebanyak 750 warga dipindah ke Balai Desa Tirto, Kecamatan Salam. Pengungsi tersebut berasal dari Dusun Duwet Desa Mantingan, dan Dusun Gempol Desa Jumoyo⁴.

Di Klaten, barak pengungsian ditempatkan di GOR Klaten dan Kecamatan Kemalang seperti di Desa Dompok sebanyak 2.245 orang, Bawukan 1.745 jiwa, dan Keputran 3.653 jiwa. Lokasi pengungsian di kecamatan itu bertambah menjadi sembilan tempat akibat letusan lanjutan berskala besar. Jumlah pengungsi yang tercatat di Posko Pengungsi Merapi di Kecamatan Karangnongko, di Desa Jiwa 295 orang, Gemampir 133 jiwa, Sumokaton 324 jiwa, Kadilajo 182 jiwa, Kepurun 1.300 orang, Kebonalas 200 orang, Ngemplak Seneng 368 orang, Tangkil 124 orang, dan MTs Ma'arif Karangnongko.⁵ Di Kabupaten Klaten, khususnya di Kecamatan Kemalang, erupsi hebat yang terjadi pada 3-4 November 2012 berdampak pada penumpukan pengungsi di Kecamatan Kemalang, Klaten. Dari tiga pos utama di Desa Bawukan, Dompok, dan Keputran yang sebelumnya

² VivaNews.com, "Lahar Merapi Mengancam Kali Gendol", 23 Oktober 2010, <http://nasional.vivanews.com/news/read/184328-magelang-siapkan-52-barak-pengungsi-Merapi>).

³ Sumber: "Susun Prediksi dan Rekomendasi Penanganan. Pantau Merapi Presiden Bentuk TimPakar", 18 November 2010. (Koleksi Kliping Gunung MerapiKedaulatan Rakyat Rentang waktu Oktober 2010 hingga Juli 2011)

⁴ Sumber:Sejumlah Jembatan Rusak Akses Jalan Putus, Kedaulatan Rakyat 25 November 2010 (Koleksi Kliping Gunung MerapiKedaulatan Rakyat Rentang waktu Oktober 2010 hingga Juli 2011

⁵ (MEDIAINONESIA.com, "Lokasi Pengungsian Merapi di Klaten Bertambah", 04 November 2010, <http://www.mediainonesia.com/read/2010/11/11/179655/274/101/Lokasi-Pengungsian-Merapi-di-Klaten-Bertambah>).

berjumlah 5.214 orang melonjak hingga 12.178 orang pengungsi. Mereka sebelumnya tersebar di 12 titik di empat kecamatan dan mayoritas berasal dari KRB II.⁶

Sementara itu, untuk wilayah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan 94 titik kumpul bagi warganya guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir lahar yang mengancam sekitar 13 ribu penduduk yang tinggal di bantaran sungai.⁷ Adapun di Boyolali, pengungsi ditempatkan di lapangan Desa Samiran, Kecamatan Selo. Akan tetapi jumlah pengungsi meningkat sehingga ditempatkan juga di pendopo kabupaten⁸.

Bila disimak lebih lanjut dapat diketahui bahwa umumnya pengungsi tinggal di bangunan sekolah. Dengan demikian, sekalipun sudah dikonsentrasikan di GOR, secara kuantitatif bangunan sekolah sangat berjasa bagi pengungsian. Hal itu beralasan karena berdasarkan informasi bahwa sebanyak 80 unit sekolah, mulai taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas yang berada di empat kabupaten/kota di Jawa Tengah menjadi lokasi pengungsian korban letusan atau erupsi Gunung Merapi. Dari 80 gedung sekolah itu diketahui bahwa tiga gedung sekolah di Kota Magelang, 33 sekolah di Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten sebanyak 17 sekolah, dan 27 sekolah di Kabupaten Boyolali menjadi tempat pengungsian.⁹

⁶ Sumber: "Luncuran Awan Panas Mencapai 11,5 Km" Kedaulatan Rakyat 5 November 2010, (Koleksi Kliping Gunung Merapi Harian Kedaulatan Rakyat Rentang waktu Oktober 2010 hingga Juli 2011).

⁷ Sumber: "Hindari Dampak Berat, Material Lava Harus Dikosongkan," Kedaulatan Rakyat 27 November 2010, (Koleksi Kliping Gunung Merapi Harian Kedaulatan Rakyat Rentang waktu Oktober 2010 hingga Juli 2011).

⁸ Sumber: Letusan Susulan Cukup Dahsyat, Mengerikan, 31 Oktober 2010 Kedaulatan Rakyat (Koleksi Kliping Gunung Merapi Harian Kedaulatan Rakyat Rentang waktu Oktober 2010 hingga Juli 2011).

7.3.2 Pemberitaan Media tentang Pengungsian

Berita pengungsian yang disajikan media menjadi drama yang menarik perhatian publik. Setiap hari berita mengalir dari media cetak atau pun tulis. Beberapa berita menggambarkan kondisi pengungsi yang memprihatinkan. Kondisi ini terjadi pada waktu pengungsi masih berada di etape pertama pengungsian yaitu ketika mereka meninggalkan kampung atau dusunnya sebelum tanggal 26 Oktober 2010. Beberapa berita mengungkapkan, misalnya menurut data petugas, lebih dari 200 orang telah menempati lokasi pengungsian di Desa Kepuharjo. Sebagian besar pengungsi adalah para warga lanjut usia dan anak-anak. Untuk mengantisipasi membludaknya pengungsi, tim relawan juga menyiapkan tenda di lapangan yang ada di samping gedung¹⁰.

Media massa juga menceritakan adanya masalah kekeringan sarana dan kebutuhan bagi pengungsi. Sebagai contoh di barak Hargobinangun, pengungsi membutuhkan minyak tanah, kompor gas, air bersih, bak sampah, kebutuhan pokok, makanan bayi dan susu. Di barak Umbulharjo yang diperlukan adalah WC portabel, dan air bersih. Di Glagaharjo yang diperlukan adalah pasokan air bersih, air mineral, selimut tikar, kasur, sembako, makanan bayi, susu bayi, susu balita, dan susu lansia.¹¹ Di barak-barak pengungsian di wilayah Umbulharjo, Kepuharjo, maupun Pakem Sleman Yogyakarta, banyak balita maupun manula kondisinya memprihatinkan¹².

Ketika menyatakan Merapi dalam kondisi awas pada erupsi 2010, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengungsian yang persuasif. Melalui peran Dr. Surono dari ESDM, pemerintah memberitakan tentang skenario pengungsian yang harus dilakukan oleh masyarakat. Dengan memakai bahasa yang menarik “Merapi tidak pernah ingkar janji”. Dr. Surono mendesak warga agar siap segera

¹⁰ Liputan6.com, “Pengungsi Merapi Mendapat Bantuan Selimut”, 25/10/2010, <http://berita.liputan6.com/read/303200/pengungsi-Merapi-mendapat-bantuan-selimut>).

¹¹ KabarIndonesia, “Paska Letusan Gunung Merapi, Pengungsi Minim Logistik”, 27-Okt-2010 <http://www.kabarindonesia.com/>

¹² POSKOTA, “Pengungsi Merapi Banyak Stres”, Minggu, 31 Oktober 2010. <http://www.poskota.co.id/>

melakukan pengungsian terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2010 karena erupsi terus meningkat. Warga pun mengikuti ajakan pemerintah sehingga mereka melakukan eksodus dari radius 10-20 km dari puncak Merapi ke lokasi di luarnya.

Media massa dan cetak menyajikan berita tentang kepanikan dan situasi yang amat mencekam karena masih ada kepastian bahwa Merapi akan meletus. Walaupun demikian, media juga menyajikan peta pengungsian yang berguna bagi masyarakat sipil untuk melakukan aksi kemanusiaan kepada para korban. Berikut ini salah satu contoh berita dalam KR yang memetakan lokasi pengungsian (Tabel 7.2).

Tabel 7.2
Tempat Pengungsian yang Terdata dari Media

Lokasi Pengungsian	Jumlah Pengungsi	Sumber data
a. Tiga desa di pinggir kota Boyolali b. Kantor Bupati	28.809 orang	Kedaulatan Rakyat, 29 Oktober 2010 Kedaulatan Rakyat, Jumat 29 Oktober 2010.
a. Desa Srumbung, b. Desa Tanjung Kecamatan Muntilan		Kedaulatan Rakyat, 26 Oktober 2010, KR Selasa 26 Oktober 2010,
a. 48 lokasi pengungsian di Kabupaten Magelang	33.839 jiwa	Kedaulatan Rakyat, 31 Oktober 2010 Kedaulatan Rakyat, 31 Oktober 2010
a. SMPN 3 Pakem b. UII		Kedaulatan Rakyat 4 November 2010
Kecamatan Kemalang	12.178 orang	Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2001: Kedaulatan Rakyat, 22 Februari 2001,
a. Balai Desa Tirto, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang	750 orang	Kedaulatan Rakyat 25 November 2010 Kedaulatan Rakyat 25 November 2010

Sumber: Koleksi Kliping Gunung Merapi Harian Kedaulatan Rakyat Rentang Waktu Oktober 2010 hingga Juli 2011

Dengan adanya peta lokasi korban, publik bisa memperoleh gambaran tentang kondisi korban dan upaya untuk memberikan kepedulian sosial. Misalnya, warga bisa melakukan aksi memberikan nasi bungkus untuk para korban yang

memang tidak memiliki kesiapan membawa perbekalan makanan karena pengungsian berlangsung mendadak.

7.3.3 Perilaku Pengungsi di Lokasi Pengungsian

Berbagai berita media masa membangun opini publik tentang keadaan dan perilaku korban di pengungsian. Opini publik itu misalnya menggambarkan kepanikan korban, kurangnya sarana dan prasarana untuk tinggal sementara di pengungsian, tidak adanya bilik cinta yang mengganggu hasrat biologis dan psikologis korban, serta adanya warga korban yang membutuhkan terapi pemulihan dari trauma. Semua wacana itu tidak akan disimak di sini karena itu merupakan wacana yang dibangun media. Bahkan beberapa wacana yang dikonstruksi oleh media terkesan gagal membangun sebuah opini publik bahwa korban hidup dalam trauma atau tekanan berat. Hal ini karena media sepertinya hanya membangun mitos. Fakta sebenarnya adalah warga tidak begitu tertekan namun dipersepsikan sebaliknya. Warga dikesankan mengalami kekecewaan berat atas hilangnya harta benda, tetapi ternyata bencana justru dianggap warga sebagai cobaan yang tidak penting untuk ditangisi (Zamzam, 2012).

Studi etnografi ini lebih tertarik menyimak mengenai apa yang dilakukan korban dalam situasi darurat di pengungsian dan upaya mereka membangun kembali komunitasnya. Pertama, studi ini menangkap bahwa umumnya warga terus memonitor dan berusaha untuk menjaga keamanan desanya. Sekalipun tentara ataupun pihak keamanan telah menjaga agar desanya dikosongkan, tetapi dalam praktiknya warga selalu berusaha untuk kembali di siang hari. Istri tetap di pengungsian tetapi suami dan anak lelaki dewasa dikerahkan oleh komunitas atau secara sendiri-sendiri melakukan ulang-alik setiap harinya.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam suasana darurat di kampungnya. Pertama adalah yang berkaitan dengan keamanan desa. Pertama, mereka mengawasi ternaknya yang tertinggal sambil memberikan pakan. Kedua, mereka mengawasi rumahnya jangan sampai rumahnya kemudian disatroni pencuri. Ketiga, mereka menjalankan tugas semacam ronda bergiliran untuk mengawasi seluruh kampung. Ada kepercayaan di desa bahwa tidak boleh

kampung dikosongkan sama sekali, sehingga harus ada yang menjaga. Kampung yang kosong dianggap identik dengan rumah yang tidak berpenghuni sehingga akan dihuni oleh mahluk halus.

Kedua, mereka mencermati perkembangan Merapi apakah akan terus meningkat erupsinya atau menurun. Mereka membutuhkan suatu keyakinan dengan mengamati secara langsung sehingga tidak mudah dimakan berita yang simpang siur dan silih berganti. Toro, komandan SAR di Turgo bahkan setiap hari masuk ke rumah-rumah dan mengecek kampungnya sambil mengamati perkembangan erupsi Merapi apakah masih berbahaya atau tidak. Ia berkeyakinan bahwa Merapi akan reda setelah mengamati erupsi yang terus surut.

Ketiga, mereka berusaha untuk mencari hal-hal yang harus diurus untuk dijual atau dibawa ke pengungsian. Warga misalnya menangkap ayam, mengambil kambing atau sapinya untuk dijual mengingat kondisi ternak tersebut semakin kurus dan tidak sehat. Beberapa warga juga mengambil kekayaan yang mereka simpan di bawah tanah.

Keempat, beberapa warga enggan melihat banyaknya sisa makanan di pengungsian terutama nasi bungkus di malam hari. Pagi hari mereka kemudian bergegas ke kampung dengan membawa sisa makanan dan diberikan kepada ternaknya terutama ayam dan itik. Mereka bergerak dari pos pengungsian GOR Maguwoharjo, misalnya pada pagi hari sekali ketika para petugas keamanan kurang waspada. Mereka lalu melewati jalan tikus atau jalan sempit dan bergerak masuk Desa Kemalang, Balerante, atau Kinahrejo dan lainnya untuk membawa sisa-sisa makanan demi menjamin ternaknya juga bisa makan.

Melihat perilaku para korban yang masih kuat harapannya untuk kembali ke kampung maka masuk akal bahwa di pengungsian pun mereka lebih suka melakukan aktivitas ekonomi yang terkait dengan kehidupannya di kampung. Selama di pengungsian, kegiatan yang sering dilakukan oleh para lelaki dewasa adalah memelihara sapinya. Mereka setiap hari mencari rumput. Beberapa keluarga di dekat lokasi pengungsian bahkan merelakan tanahnya untuk para pengungsi.

Sementara para lelaki dewasa mengurus ternak dan meninjau kampungnya, para ibu mengurus anak-anak, memasak, dan mengikuti berbagai aktivitas yang dilakukan oleh relawan dalam rangka mengurangi kebosanan hidup di pengungsian yang serba darurat. Akan tetapi, lama kelamaan kebosanan dialami ibu-ibu sehingga mereka berharap dapat segera pulang membangun kembali kehidupannya.

Ketika ditanya apa yang diharapkan di pengungsian, warga lereng Merapi memang lebih suka membayangkan bisa kembali ke rumah dan membangun kembali kehidupannya. Sikap warga yang lebih kerap kembali semakin mengemuka ketika erupsi mulai mereda dan mereka sudah melewati waktu lebih dari 15 hari. Rasa bosan di pengungsian selalu mereka rasakan dan kehidupan di pengungsian dianggap sebagai beban karena memboroskan. Hampir semua warga mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah dan dermawan memang mengalir. Nasi bungkus pun bisa mereka dapatkan. Namun demikian pengeluaran tambahan selalu datang silih berganti. Setiap hari harus menyediakan bahan bakar kendaraan untuk hilir mudik dari rumah ke pengungsian. Mereka juga harus menyediakan bekal tambahan untuk konsumsi keluarga serta menyediakan uang jajan untuk anak. Laporan dari lapangan mengemukakan setiap keluarga paling tidak mengeluarkan uang tidak kurang dari Rp. 1-4 juta per bulan selama tinggal di pengungsian. Para informan sering mengatakan bahwa hidup di pengungsian itu boros, karena anak kecil mudah tergoda untuk membeli makan jajanan seperti bakso dan mie.

Kembali hidup normal dengan kegiatan ekonomi seperti rutin yang dilakukan merupakan harapan dari para pengungsi. Oleh karena itu mereka ingin segera bergegas membangun kembali dusun, infrastruktur, lahan salak, tanaman rumput, dan mengurus ternaknya. Harapan itu tidak bergayung sambut dengan pikiran dari pejabat pemerintah, NGO, atau pun donor. Pemerintah, sebaliknya lebih khawatir akan keselamatan pengungsi dan berharap pengungsi mau tinggal lama di pengungsian. Pemerintah, donor, dan LSM, bahkan berharap pengungsi sebaiknya mau bersabar untuk tinggal di huntara.

Akhirnya setelah pemerintah menurunkan status bahaya, warga pun secara kompak kembali ke kampung. Mereka meninggalkan pengungsian dengan menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Mereka sepakat akan mengungsi kalau Merapi aktif lagi tanpa harus merepotkan pemerintah atau relawan. Sikap itu misalnya nampak ditampilkan oleh warga Kemiri Cilik. Seminggu setelah kembali, hujan dan banjir lahar dingin masuk ke Sungai Boyong di kampungnya. Warga lalu berkumpul di rumah kepala dusun untuk memutuskan apakah akan mengungsi kembali atau tidak. Akhirnya keputusan tetap tinggal di kampung dipertahankan karena banjir lahar dingin dianggap tidak akan masuk ke kampungnya mengingat volumenya yang relatif kecil.

7.3.4 Respon Pemangku Kepentingan Terhadap Pengungsi dan Pengungsian

Ada beberapa respon masyarakat sipil terhadap pengungsian. Masyarakat sipil yang dimaksud meliputi organisasi LSM dengan relawannya, media, komunitas yang menampung korban, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang membentuk tim untuk melakukan investigasi pemenuhan hak-hak para pengungsi korban letusan Gunung Merapi oleh pemerintah. Sejak tahun 2006 masyarakat sipil memperlihatkan respon yang tinggi dalam menghadapi bencana erupsi Merapi, khususnya pada waktu tahap darurat, terutama dalam penanganan pengungsian. Puluhan LSM di Yogyakarta terjun menjalankan agenda aksi mendampingi korban dari membantu proses evakuasi, menyediakan peralatan hidup di pengungsian, memfasilitasi keluarga korban ditemukan, melakukan penyembuhan trauma, mencarikan sembako, dan memberdayakan korban di lokasi pengungsian. Kerja mereka tidak jarang dapat berbenturan dengan pemda yang melakukan aktivitas yang sebagian besar sama.

Masyarakat sipil di Yogyakarta juga relatif terampil dalam merespon bencana. Hal ini nampak dari hadirnya tim media dari universitas yang diperlukan warga. Hal ini bisa disimak dari munculnya relawan yang bekerja sangat responsif di lapangan.

Data media menunjukkan peran tim relawan dalam menyiapkan

tenda untuk pengungsi cukup besar. Di pengungsian Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta¹³. Relawan memberdayakan pengungsi dengan terapi kerja, seperti mengumpulkan pasir yang berada di sekitar pengungsian menjadi “galangan” pasir yang siap untuk dijual kepada pengepul pasir. Tim Psikolog Fakultas Psikologi UGM yang memfasilitasi sejumlah pengungsi yang kesehariannya bekerja sebagai perajin batu dari Dusun Sambisari, Umbulharjo, untuk mengambil batu dan perlengkapan kerja dari desanya, sehingga mereka dapat bekerja kembali di tempat pengungsian. Aktivitas ini sederhana namun tujuannya membantu pengungsi beraktivitas dan beradaptasi dengan kehidupan sosial di pengungsian, sehingga mengurangi tekanan psikologis akibat merasa bosan.

Peran CSO yang lain yakni Tim Medis Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI). Tim ini membuka posko kesehatan di posko pengungsian Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta di Balai Desa Caturharjo, SD Jetisharjo, Sanggrahan, dan Masjid Agung Sleman. BSMI juga melakukan *mobile clinic* di delapan titik posko pengungsian setiap harinya.¹⁴

Peran media massa juga tidak bedanya dengan LSM. Puluhan media massa cetak dan tulis melakukan aksinya dengan memberitakan terus menerus kondisi dan perkembangan erupsi Merapi. Media menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh para korban, dan sekaligus melakukan program pengumpulan sumbangan kemanusiaan serta menyalurkan sebagian sumbangan itu kepada korban melalui pihak kedua seperti pemda, LSM, atau langsung pada penerima.

Komunitas warga di berbagai kampung, kelompok profesi, dan lembaga pendidikan tidak henti-hentinya memberikan empati kepada korban. Setiap hari setiap lokasi pengungsian mendapat semacam jatah tidak terduga dari kelompok-kelompok komunitas itu dalam bentuk nasi bungkus. Pihak keraton pun tidak ketinggalan dengan menghimbau agar warga masyarakat di wilayah Yogyakarta bersedia menyediakan nasi bungkus. Akibatnya nasi bungkus yang terdistribusi ke lokasi pengungsian *membludak*, khususnya di GOR Maguwo. Banyak nasi

¹³ Sumber: Liputan6.com, “Pengungsi Merapi Mendapat Bantuan Selimut”, 25/10/2010, <http://berita.liputan6.com/read/303200/pengungsi-Merapi-mendapat-bantuan-selimut>).

¹⁴ detikNews, “Pengungsi Merapi Mulai Alami Beban Psikologis”, Selasa, 09/11/2010, <http://www.detiknews.com/read/2010/11/09/062248/1489847/10/pengungsi-Merapi-mulai-alami-beban-psikologis>).

bungkus yang kemudian tidak terpakai sehingga harus didistribusikan ke lokasi lain yang membutuhkan.

Media bermain berebut pengaruh dalam melakukan aksinya yang dapat mempengaruhi pola distribusi bantuan ke korban. Media lebih sering mengekspos masalah pengungsian di wilayah Sleman, sehingga masalah pengungsian di wilayah Klaten dan Magelang kurang dikenal oleh publik. Bantuan kemanusiaan pun cenderung lari ke Yogyakarta. Media juga mengekspos kondisi korban yang cenderung didramatisasi kesengsaraannya. Media misalnya menggambarkan kurangnya kenyamanan lokasi pengungsian, tidak adanya bantuan yang memadai, ancaman kesehatan yang memburuk di lokasi sampai dengan munculnya trauma dan kesedihan yang mendalam atas hilangnya harta benda para korban.

Buruknya pemberitaan mengenai kondisi korban menggugah semua pihak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sesungguhnya publik terkecoh oleh media karena di beberapa komunitas justru ditemukan adanya dukungan sosial yang amat memuaskan. Di barak Desa Sariharjo, misalnya, pihak Desa Sariharjo mengelola pengungsian untuk sekitar 200 orang yang berasal dari Dusun Glalgah. Pemerintah desa bersama dengan seluruh kelompok warga yang mendukung berhasil menyediakan sarana tinggal di bilik-bilik kantor dan gudang secara lebih memadai dan manusiawi. Bantuan mengalir ke barak dikelola secara adil dan transparan sehingga pengungsi merasa nyaman.

Walaupun ada yang menikmati keadilan dan kenyamanan, pemberitaan media yang menggambarkan kepanikan dan trauma para korban menyebabkan para pihak menaruh perhatian. KOMNASHAM, misalnya, melakukan peninjauan dengan mencermati sejauh mana pemerintah telah memenuhi hak-hak para pengungsi yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Hak dasar tersebut antara lain makanan, tempat tinggal, air bersih, dan sanitasi serta kesehatan.¹⁵ Terjunnya KOMNASHAM ke lapangan memberikan pengaruh yang baik dalam penanganan korban. Hal ini misalnya bisa ikut mendorong Pemerintah Kabupaten Magelang

¹⁵ (Voice Of America (VOA), "Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi Pengungsi Merapi", Sabtu, 13 November 2010, <http://www.voanews.com/indonesian/news/Komnas-HAM-Bentuk-Tim-Investigasi-Pengungsi-Merapi-107683839.html>).

langsung menyiapkan 52 unit barak pengungsian atau Tempat Pengungsian Akhir (TPA). Barak pengungsian itu tersebar di enam kecamatan, yakni Srumbung, Dukun, Mungkid, Muntilan, Sawangan, dan Salam.¹⁶ Pemda memang merasakan beban yang berat ketika menghadapi erupsi Merapi yang besar karena erupsi pada tahun-tahun silam tidak perlu direspon dengan menyediakan lokasi pengungsian yang banyak dan tersebar di berbagai kecamatan.¹⁷

Penanganan pengungsi kemudian mendapat perhatian dari pemerintah melalui peran dari BNPB yang memonitor dan memfasilitasi korban secara langsung. Secara simbolik, presiden menunjukkan dukungan kepada korban melalui kunjungannya ke lokasi pengungsian. Presiden mengunjungi pengungsi di barak seperti di Desa Tanjung, Muntilan. Kepada para pengungsi, Presiden meminta mereka bersabar, karena tempat penampungan sementara tidak seperti keadaan di rumah. Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan menyediakan bantuan makanan, obat-obatan, dan bahan makanan seperti beras dalam jumlah ratusan ton beras dan bantuan lainnya.

Pemerintah lalu mencanangkan program pembagian beras dan kebutuhan hidup sehingga ketika bantuan itu turun, maka pengungsi pun mendapatkan sekalipun relatif terlambat. Para pengungsi lebih banyak menerima bantuan kemanusiaan dari kelompok masyarakat sipil yang difasilitasi media atau diberikan secara langsung ketika mereka mengunjungi para korban. Persediaan beras sebanyak 460 ton sewaktu-waktu bisa ditambah dari Perum Bulog. Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Yogyakarta juga menyediakan cadangan 100 ton beras. Sebelumnya Bulog Yogyakarta sudah menyalurkan 100 ton beras untuk Pemkab Sleman selama masa tanggap bencana. Kepala Perum Bulog Divre Yogyakarta Murino Mudjono mengatakan, total beras yang disalurkan Bulog

¹⁶ VivaNews.com, “Lahar Merapi Mengancam Kali Gendol”, 23 Oktober 2010, <http://nasional.vivanews.com/news/read/184328-magelang-siapkan-52-barak-pengungsi-Merapi>).

¹⁷ (MEDIAINONESIA.com, “Lokasi Pengungsian Merapi di Klaten Bertambah”, 04 November 2010, <http://www.mediainonesia.com/read/2010/11/11/179655/274/101/Lokasi-Pengungsian-Merapi-di-Klaten-Bertambah>).

untuk tanggap bencana sebanyak 700 ton beras, masing-masing kabupaten/kota mendapatkan 100 ton beras.

Selama tahap pengungsian, pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten merancang agenda rekonstruksi dan rehabilitasi. Hasil kerja mereka menetapkan bahwa perlu dilakukan suatu penetapan kawasan rawan bencana di lereng Merapi, dan daerah yang dinyatakan paling rawan harus disterilkan dari pemukiman. Kebijakan itu akhirnya membagi kawasan Merapi menjadi tiga klaster yaitu Kawasan Rencana Bahaya III yang lokasinya sekitar 3-6 km dari kampung yang letaknya dekat dengan jalur pergerakan material erupsi termasuk awan panas, KRB II yang berada di lereng dengan radius sekitar 6-10 Km, dan kawasan yang berada antara 10-15 km dari puncak Merapi. Pemerintah juga mencanangkan program huntara bagi warga yang kampungnya hancur akibat erupsi Merapi yang mengakibatkan luncuran awan panas dan material vulkanik seperti di Kinaherjo, Bronggang, dan beberapa dusun yang terkena lahar dingin di wilayah Magelang. Dengan adanya kebijakan dan program huntara, maka dalam kasus penanganan korban bencana Merapi, program rehabilitasi dan rekonstruksi tertunda satu tahun, kecuali untuk dusun yang masuk KRB II.

7.3.5 Rangkuman

Wacana pengungsian menggambarkan tentang kemauan warga untuk hidup normal dan bergegas membangun kehidupan kembali, atau menyiapkan agenda rekonstruksi dan rehabilitasi. Namun demikian pengungsian massal di dalam kendali pemerintah atau relawan lebih menampakkan upaya untuk menciptakan sub-kultur kepanikan. Akibatnya, berbagai bentuk partisipasi warga dalam kehidupan pada masa pengungsian tidak nampak. Fakta membuktikan bahwa warga memang menghadapi kerugian dan kesedihan karena telah menjadi korban. Namun, mereka nampaknya berusaha untuk segera bangkit kembali.

Pengungsian menjadi arena untuk menyiapkan masa depan korban. Namun, pemerintah, media, atau pun masyarakat serta perguruan tinggi nampaknya lebih fokus pada aspirasinya sendiri daripada memfasilitasi aspirasi warga. Setidaknya, upaya dari kelompok eksternal dapat membuka ruang bagi

warga untuk menyuarakan kepentingannya. Ketiadaan peluang ini mengakibatkan pengungsian lebih menggambarkan peristiwa responsifitas para pemangku kepentingan non-warga daripada menggambarkan sub-kultur pengungsian yang ada di benak dan tindakan warga.

7.4 Huntara (Hunian Sementara)

7.4.1 Pendahuluan

Bencana alam seringkali membawa korban jiwa dan memusnahkan harta benda. Erupsi 2010 telah menyebabkan banyak warga dari berbagai dusun baik di Kabupaten Sleman, Klaten, maupun Magelang, kehilangan rumah tinggal akibat diterjang awan panas atau lahar dingin. Kebutuhan akan tempat tinggal bagi korban bencana yang rumahnya rusak dan tidak dapat dihuni mutlak diperlukan. Barak pengungsian yang disediakan oleh pemerintah bukan satu-satunya pilihan untuk mengatasi persoalan tempat tinggal darurat pasca bencana.¹⁸ Rumah saudara atau teman, penginapan, universitas, pondok pesantren, gereja merupakan beberapa tempat yang digunakan oleh warga untuk mengungsi. Yang penting menjauh dan menghindari Merapi yang pada saat itu bergolak hebat. Setelah Merapi mereda, tidak semua warga yang mengungsi dapat kembali ke rumah, karena kondisi tempat tinggalnya rusak dan tidak layak huni. Banyak warga yang terpaksa bertahan di tempat mengungsi. Bahkan ada yang berpindah-pindah lokasi mengungsi hingga pada akhirnya menempati huntara atau hunian antara. Huntara menjadi tempat tinggal sementara selama hunian tetap untuk relokasi warga disiapkan.

¹⁸ Menurut Quarentelli (Peacock, 2007), setidaknya ada empat tipe tempat tinggal atau proses permukiman dalam konteks bencana yaitu tempat tinggal darurat (*emergency sheltering*), tempat tinggal sementara (*temporary sheltering*), hunian sementara (*temporary housing*), dan hunian tetap (*permanent housing*). Shelter darurat mengacu pada usaha korban mencari tempat tinggal permanen di luar rumah mereka untuk ditempati dalam jangka waktu pendek, misalnya hanya beberapa jam atau semalam saja. Sementara tempat tinggal sementara lebih mengacu pada perpindahan tempat dengan harapan hanya tinggal dalam waktu singkat. Untuk hunian sementara, tidak sekedar sebagai tempat tinggal secara fisik tetapi juga ada upaya mengembalikan sebisa mungkin aktivitas rumah tangga, sosial kultural, dan juga tanggung jawab warganya. Hunian tetap melibatkan korban bencana untuk membangun kembali rumah yang akan ditinggali secara permanen dan dilengkapi fasilitas publik. Tahapan tersebut tidak selalu ditemui pada kelompok masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya akibat bencana.

Sebagai rumah sementara, keberadaan huntara bukan sekedar sebagai tempat tinggal, tetapi juga memberikan ruang bagi warga untuk beraktivitas rutin sambil menunggu hunian tetap selesai dibangun dan siap ditinggali. Dibangunnya huntara merupakan bagian dari proses *recovery* atau pemulihan pasca bencana. Sebagai proses pemulihan permukiman, keberadaan huntara tidak hanya infrastruktur rumah serta pendukungnya seperti jalan, listrik, air, dan pembuangan limbah, namun juga kondisi ekonomi, dan sosial budaya komunitas. Dengan adanya hunian antara tersebut diharapkan masyarakat korban bencana dapat memulai aktivitas rumah tangga kembali dan merencanakan masa depan mereka.

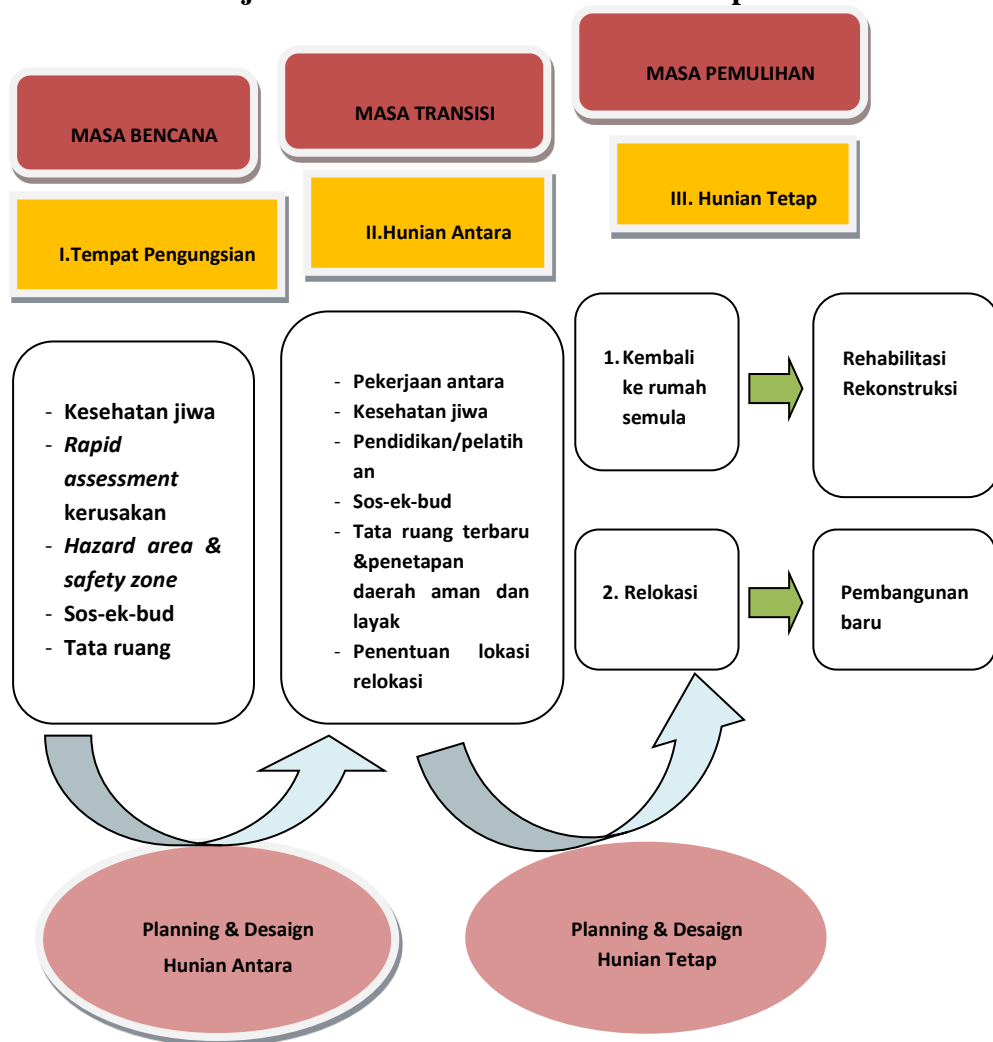
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana kehidupan ekonomi, sosial, dan kultural warga lereng Merapi selama tinggal di huntara. Di sini akan ditunjukkan bagaimana proses pengalaman hidup di dusun lama bertemu dengan realita kondisi di huntara. Singkatnya bagian ini secara khusus menggambarkan sejauh mana negosiasi pengalaman hidup tersebut mempengaruhi keseharian masyarakat yang sudah mapan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perencanaan masa depan.

Dua kasus huntara atau *shelter* yaitu *Shelter* Plosokerep atau dikenal sebagai *Shelter* Jenggala yang dihuni oleh warga Dusun Pelemsari, dan *Shelter* Kuwang yang dihuni oleh warga Dusun Bronggang akan diulas di sini. Kedua lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar korban meninggal berasal dari dua dusun ini. Selain itu kondisi kerusakan permukiman yang dialami kedua dusun ini berbeda walaupun sama-sama berada dalam wilayah administratif Kecamatan Cangkringan. Kondisi kerusakan di Dusun Pelemsari total, sedangkan kerusakan permukiman di Dusun Bronggang hanya sebagian saja.

7.4.2 Konsep Huntara¹⁹

Hunian sementara (Huntara) merupakan program penanganan pengungsi pasca bencana atau pasca tanggap darurat erupsi Merapi 2010 yang digagas oleh BNPB.

Skema 7.3
Menuju Proses Pemulihan Bencana Merapi



Pengadaan huntara merupakan bagian dari tahap pemulihan pasca bencana. Unit-unit rumah dibangun untuk menggantikan barak-barak pengungsian yang ditempati oleh penduduk. Walaupun hunian tersebut bersifat sementara,

¹⁹Persiapan Hunian Sementara Paska Tanggap Darurat Merapi Untuk Wilayah Kabupaten Sleman http://www.bnpb.go.id/irw/file/pengumuman/Persiapan_Hunian_Sementara_20_Nov.pdf

namun dirancang agar para penghuninya dapat beraktivitas menuju masa pemulihan. Bentuk kegiatan yang diharapkan dapat terlaksana antara lain terwujudnya pekerjaan antara, terpenuhinya kesehatan jiwa, adanya pendidikan/pelatihan, tata ruang terbaru, serta penetapan daerah aman dan layak, serta penentuan dan persiapan lokasi relokasi. Dengan demikian hunian menjadi rumah sementara hingga rumah permanen selesai dibangun.

Dalam pembangunan hunian, terdapat beberapa konsep mendasar yang melandasinya yaitu hunian untuk tempat tinggal sementara masyarakat yang rumahnya rusak berat dan tidak bisa ditinggali. Dalam membangun hunian berbasis desa atau kecamatan maka prinsip yang berlaku adalah menggunakan *sultangrond* atau tanah kas desa. Selain itu, lokasi ini tidak berada dalam kawasan rawan bencana. Unit rumah dirancang secara merumahkan individu keluarga dalam kelompok dusun dengan menggunakan bahan lokal dan mengutamakan budaya lokal (gotong-royong). Di hunian ada fasilitas sarana untuk kegiatan usaha ekonomi dan sosial (seperti balai dusun, kandang ternak bersama, kolam ikan, dan kebun). Rumah hunian sementara mampu ditinggali paling tidak satu tahun.

Berbasis pada hasil inventarisasi kerusakan rumah (rusak berat) akibat erupsi Merapi 2010, pemerintah membangun hunian yang tersebar di empat kabupaten yaitu Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten. Tercatat 2.636 unit rumah rusak berat dan tidak layak huni, 156 rumah rusak sedang, dan 632 rumah rusak ringan, sehingga secara keseluruhan 3.424 rumah di wilayah Provinsi DIY, yang mengalami kerusakan dampak erupsi Gunung Merapi. Sementara di wilayah Provinsi Jawa Tengah, tercatat total 3.705 rumah yang mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Merapi, dengan sebaran 551 rumah rusak berat, 950 rumah rusak sedang, dan 2.204 rumah rusak ringan.²⁰ Dari semua lokasi penelitian LAURA, kerusakan paling parah dialami oleh Dusun Kinahrejo dan Kopeng. Sebagian besar rumah roboh rata dengan tanah. Sementara kerusakan yang

²⁰ Renaksi Pasca bencana Erupsi Merapi Tahun 2011-2013
<http://bencana.bappenas.go.id/imdff/renaksi-merapi>

dialami oleh Dusun Sambungrejo dan Bronggang akibat erupsi Merapi masih menyisakan sedikit rumah warga.

Pemerintah Kabupaten Sleman bersama pemerintah provinsi DIY dan para donatur telah membangun hunian sementara (huntara) sebanyak 2.682 unit yang tersebar di 10 lokasi yaitu, Huntara Plosokerep sebanyak 312 unit, Huntara Gondang 1 sebanyak 405 unit, huntara Gondang 2 sebanyak 273 unit, huntara Gondang 3 sebanyak 94 unit dan huntara Gondang luar sebanyak 146 unit, Huntara Banjarsari sebanyak 567 unit dan huntara Jetis Sumur sebanyak 358 unit, Huntara Dongkelsari sebanyak 194 unit, Huntara Kuwang sebanyak 297 unit bagi warga asal desa Argomulyo, dan Huntara Kethingan sebanyak 36 unit.²¹ Lebih lanjut, Pemkab Sleman menetapkan 9 padukuhan di 3 desa di wilayah Kecamatan Cangkringan, menjadi kawasan yang harus bebas dari hunian yaitu: Padukuhan Pelemsari dan Pangukrejo di Desa Umbulharjo, Padukuhan Kaliadem, Petung, Jambu, dan Kopeng di Desa Kepuharjo, Padukuhan Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, dan Srunen di Desa Glagaharjo.

Pada bulan November 2010, program Huntara disosialisasikan oleh BNPB melalui kepala daerah kabupaten masing-masing sebagai bagian dari langkah pemulihan pasca Erupsi Merapi 2010. Oleh karena gagasan huntara ini merupakan gagasan baru untuk konteks bencana erupsi Merapi, maka dibuat pilot project yaitu di Dusun Plosokerep, Desa Umbulharjo yang menampung warga Dusun Pelemsari dan Pangukrejo. Lahan yang digunakan adalah tanah kas desa yang disewa selama dua tahun oleh Posko Kemanusiaan Jenggala. Lembaga yang berkantor pusat di Jakarta ini mengambil peran sebagai penyandang dana pembangunan huntara tersebut. Selanjutnya huntara ini diberi nama *Shelter* Jenggala. Sementara, Huntara Kuwang, yang terletak di Dusun Kuwang, Desa Argomulyo, didirikan oleh DERU-LPPM-UGM dan Badan Amil Zakat Nasional. Huntara Kuwang menampung warga dari Dusun Bronggang dan Bakalan.

²¹ <http://www.slemankab.go.id/2554/dpd-ri-lakukan-penyerapan-aspirasi-terkait-huntara-dan-huntap.slm>

Baik shelter Jenggala maupun Kuwang dihuni oleh beberapa warga dari dusun yang berbeda. Warga dari dusun yang sama tinggal mengelompok dalam huntara. *Shelter* Jenggala yang dihuni oleh warga Kinahrejo berada di selatan, sementara yang dihuni warga Pangukrejo berada di sisi utara. *Shelter* Kuwang sebagian besar dihuni oleh warga berasal dari Dusun Bronggang dan *Shelter* Gondang didominasi warga yang berasal dari Desa Kepuharjo.

Secara umum, pola hunian di *Shelter* Kuwang mirip dengan di Plosokerep. Unit rumah tinggal berjajar rapat saling berhadapan seperti perumahan di daerah perkotaan. Jarak antar samping rumah sangat dekat hanya 2-3 meter saja. Rumah langsung berhadapan dengan jalan selebar dua meter. Jadi bisa dikatakan tidak ada halaman rumah yang memadai dalam lingkungan *shelter*. Oleh karena yang membangun huntara Kuwang tidak berasal dari satu sumber dana sebagaimana di Plosokerep maka dapat dijumpai beberapa bentuk dan material yang berbeda pada unit-unit bangunan huntara. Unit rumah yang dibangun di huntara Kuwang ada yang bermaterial kombinasi bambu dan batako, sementara di *shelter* Jenggala semua rumah seragam baik bentuk dan materialnya. Namun demikian luas bangunan rumah tinggal di kedua huntara tersebut sama-sama seluas 6 x 6 meter yang terbagi menjadi satu ruang tamu, dua ruang tidur, satu dapur, dan satu kamar mandi. Terbatasnya hunian membuat sebagian warga merenovasi *shelter* sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bentuk pengembangan *shelter* antara lain menggabungkan dua rumah menjadi satu, menambah teras rumah atau *emplek-emplek*.

Huntara sudah dilengkapi dengan aliran listrik, walaupun baru menyala beberapa hari setelah dihuni. Setiap unit rumah dipasang tiga titik lampu masing-masing 11 watt. Pemda Sleman memberikan fasilitas listrik dengan sistem pra bayar sejumlah Rp 200.000,00 dengan asumsi penggunaan hanya untuk lampu dan televisi tanpa alat elektronik tambahan. Apabila daya sudah habis, maka warga harus membayarnya sendiri. Fasilitas pendukung lainnya berupa seperangkat tempat duduk, alat masak, alat pertanian.

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih dan sanitasi di huntara, dibangun sumur jetpump. Airnya ditampung di beberapa titik lokasi

tandon air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga. Air mengalir ke dalam setiap rumah melalui pipa dan kran air yang sudah tersedia. Ketersediaan air bersih di *shelter* Jenggala relatif lancar, sedangkan di *shelter* Kuwang airnya sering macet. Selain menghadapi persoalan air, *shelter* Kuwang juga mempunyai persoalan sanitasi. Padahal persoalan sanitasi sangat vital untuk menjamin hidup bersih dan sehat. Dalam setiap unit rumah tinggal di huntara dibangun satu buah kamar mandi dilengkapi dengan jamban dengan pembuangan ditampung dalam *septic tank*. Persoalan timbul ketika *septic tank* luber dan menimbulkan bau. Selain terjadi di *Shelter* Kuwang, persoalan ini juga ditemui di *Shelter* Mancasan, Magelang yang memiliki 106 unit huntara dan dihuni oleh 355 jiwa korban banjir lahar dingin Gunung Merapi dari Desa Sirahan, Kecamatan Salam. Sebanyak 12 *septic tank* yang jebol di huntara tersebut, baru dua buah yang diperbaiki oleh penghuni secara swadaya²².

Padatnya penduduk dalam wilayah huntara paling tidak memerlukan sarana sanitasi dasar yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah, dan limbah rumah tangga. Sementara untuk pengelolaan sampah rumah tangga sebagian dibakar oleh warga di belakang rumah dan sebagian lainnya dikumpulkan untuk kemudian diambil oleh truk pengangkut sampah yang datang sekali dalam dua hari.

Di samping unit-unit bangunan rumah tinggal, di huntara juga dapat ditemui bangunan fasilitas publik. Di *Shelter* Jenggala dibangun masjid, perpustakaan, PAUD, rumah untuk kegiatan kesenian, kandang sapi, rumah untuk bengkel kerja (*workshop*), dan pos pengamanan. Sementara itu di Huntara Kuwang juga dibangun balai dusun, pendopo, kantor dusun, los pasar, dan balai kesehatan. Sebagian besar fasilitas publik yang dibangun di huntara malah tidak ada ketika warga masih menghuni dusun lama.

Di huntara Plosokerep terdapat satu masjid yang diberi nama Al Amin. Nama yang sama dengan masjid di dusun lama. Bangunan masjid ini menggunakan jenis material yang sama dengan bangunan rumah tinggal di

²² Kerusakan Fasilitas Huntara Belum DitanganiRabu, 02 Nov 2011 15:54:24 WIB.
<http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=53832>

shelter, yaitu sebagian semen sebagian bambu dan beratapkan seng. Masjid ini dilengkapi dengan tempat wudlu dan dua kamar mandi. Selain sebagai tempat beribadah, TPA, dan pengajian yasinan, masjid ini juga difungsikan sebagai tempat pertemuan warga, misalnya untuk pertemuan warga dengan JRF untuk mempersiapkan relokasi. Bangunan masjid di *Shelter* Kuwang diberi nama Al-Ikhlash. Masjid ini lebih banyak digunakan oleh warga Dusun Bakalan yang juga menghuni *Shelter* Kuwang. Sementara warga Bronggang dalam melakukan aktivitas keagamaan masih di Masjid Al-Mujahidin dan Mushola Al-Taqwa di dusun lama.

Fasilitas pendidikan yang dibangun di *Shelter* Plosokerep maupun Kuwang lebih ditujukan untuk anak-anak usia pra sekolah yaitu berupa PAUD atau Taman Kanak-kanak (TK). Jumlah murid TK yang baru diresmikan di *Shelter* Plosokerep pada bulan Maret 2011 sebanyak 25 anak. Ketika di dusun lama, TK ini berada di Ngrangkah atau RT IV, dan sekarang letak TK di huntara juga berada di RT IV. Sementara, Dusun Bronggang sebelum erupsi justru tidak memiliki fasilitas pendidikan untuk PAUD dan TK, melainkan SD. Fasilitas ini kurang diakses oleh warga setempat.

Untuk menunjang pendidikan, kedua *shelter* juga dilengkapi dengan perpustakaan. Pada awalnya perpustakaan banyak dikunjungi anak-anak, namun lambat laun semakin jarang yang berkunjung. Bahkan gedung perpustakaan di *Shelter* Plosokerep tidak jarang digunakan untuk pertemuan warga misalnya untuk pelaksanaan posyandu dan kenduri. Apalagi sejak *shelter* dihuni, ada perpustakaan keliling yang dikelola sebuah LSM yang secara berkala singgah di sana. Untuk menunjang keamanan, di *Shelter* Plosokerep dibangun pos keamanan yang merupakan bantuan dari Dinas Kesbanglinmas DIY. Ada tiga bangunan di huntara yaitu di RT I, RT III, dan RT IV. Walaupun tertulis sebagai pos keamanan, namun dalam prakteknya bangunan ini difungsikan untuk kegiatan lain seperti untuk menampung pakan lele dan tempat santai warga.

7.4.4 Respon Masyarakat Terhadap Huntara

7.4.4.1 Menempati Hunian

Ketika huntara mulai dipersiapkan oleh donatur, warga yang masih berada di penampungan juga mempersiapkan sistem pengaturan hunian bagi warganya. Hal ini dilakukan oleh warga Dusun Pelemsari. Pembagian atau pengaturan siapa menempati mana mengikuti sistem pembagian wilayah ketika di dusun lama. Dusun Pelemsari terbagi ke dalam 4 RT, maka di huntara Plosokerep warga RT I (Kinahrejo) menghuni bagian yang paling utara sebagaimana ketika di dusun lama. Kemudian semakin ke selatan dihuni oleh warga RT 2 (Pelemsari), RT 3 (Ngrangkah), dan paling selatan RT 4 (Ngrangkah). Demikian juga dengan pembagian rumah tinggal yang diatur sedemikian rupa agar menyerupai pola permukiman di dusun lama. Pengaturan tempat tinggal tersebut yang tampak adalah berbasiskan kekerabatan, dalam arti ada kecenderungan beberapa keluarga yang masih memiliki hubungan kerabat ditempatkan berdekatan. Warga lansia yang berstatus sebagai kepala keluarga juga mendapatkan jatah rumah walaupun sudah berstatus janda atau duda. Dengan pertimbangan untuk menjaga orang tua yang sudah lansia, maka anak-anak minta rumah mereka ditempatkan berdekatan.

Sebaran rumah di dusun lama berbasis pada pola pewarisan tanah. Pada umumnya dalam satu pekarangan terdapat dua sampai tiga rumah yang penghuninya masih memiliki hubungan kekerabatan. Walaupun di huntara persoalan pembagian hunian masih serupa tapi tidak berdasarkan pewarisan, melainkan hanya kedekatan hubungan kerabat. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Samijo, ”*Sing jelas hubungan persaudaraan luweh gampang to mbak istilahe. nek niki kan sak jejer iki kan anake pak kulo, kulo, simbok. mung keselan niki, mbah Sipur, mbah Kariyo, ngandap kulo riyen, wetan kulo kan pak lek kulo, sak keluarga, sing jelas kan nek koyo kulo simbok lete adoh misale eneng opo arep ngurusi kan adoh nek cerak kan lebih enak mbak. Sing masak endi sing mateng kan.*” Para lansia memang tinggal dalam *shelter* yang sudah menjadi jatahnya, tetapi makan dan kebutuhan sehari-hari disediakan oleh anaknya yang menghuni *shelter* di sebelahnya. Sementara, penghuni *shelter* yang memiliki anak kecil dapat meminta tolong kerabat yang tinggal di dekatnya untuk mengasuh

anaknyanya sementara ia harus pergi. Dengan didekatkannya rumah di hunian antara sebagaimana di dusun lama, memudahkan para penghuninya untuk bekerja sama dalam mengatasi persoalan yang mungkin timbul dalam keseharian mereka. Menurut Pak Wignyo, lokasi rumah di dekat jalan utama atau masuk tidak dipersoalkan warga. Bagi warga yang terpenting adalah, *”Tidak saling iri, walaupun di pinggir jalan maupun di tengah tidak masalah, wong hanya tempat tinggal.”*

Kondisi serupa juga ditemui di Dusun Bronggang, di mana warganya tinggal mengelompok dengan membangun rumah di sekitar rumah tinggal orang tua atau masih dalam satu pekarangan. Ketika erupsi terjadi, tidak semua rumah warga hancur sehingga hanya sebagian yang menghuni *shelter*. Namun ada juga rumah warga yang hancur tetapi tidak mendapatkan *shelter*. Bahkan Ibu Kadus Bronggang mengatakan, *”Wong Bronggang khan ora kabeh entuk shelter tapi wong Suruh sebagian besar entuk. Tapi ngono ya dadi masalah. Padahal bapake wes ngusahake seng ora entuk shelter neng kuwang entuk shelter neng gondang 1. Tapi akeh seng emoh entuk shelter soale ono seng ngomong sing neng shelter Gondang ki seng bangun oposisine pemerintah.”* Entah mengapa ada rumor semacam itu, namun yang jelas pembagian *shelter* di Huntara Kuwang ditentukan oleh kadus setempat. Menurut penuturan beberapa warga, Kadus Bronggang cenderung pilih kasih dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan dan menempati *shelter*. Jadi peta hunian lama tidak tercermin dari *Shelter* Kuwang yang khususnya ditempati oleh warga Bronggang.

Para penghuni huntara benar-benar sadar bahwa huntara hanya tempat tinggal sementara sebelum mereka menempati hunian tetap. *“Njeng nek pun gadhah griyo kiyambak ayem nggeh, nek niki kan mung sementara, ayemo niko nek mung omah cilik anggeh nek mung semen niko, antah nek duwe omah gedegede.”* Rumah di dusun lama yang pernah ditinggali umumnya merupakan bangunan permanen. Berdinding tembok, berlantai semen atau keramik, beratap genteng adalah gambaran rumah-rumah di Pelemsari sebelum tertimbun material Merapi. Suasana rumah yang hangat dan tenang tidak dapat dirasakan oleh para penghuni *shelter*. Untuk mewujudkan kenyamanan, setiap warga melakukan

bermacam-macam renovasi *shelter*. Dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu menyebabkan angin mudah masuk ke dalam rumah yang hanya seluas 6x6 meter. Tritisan yang pendek tidak mampu meredam pantulan air hujan ke dinding rumah. Oleh karena itu, warga penghuni huntara melapisi dinding rumahnya dengan terpal untuk menahan angin dan air masuk ke dalam rumah. Terpal yang diperoleh dari donatur tersebut juga digunakan untuk melapisi dinding kamar mandi agar kegiatan di kamar mandi lebih pribadi. Namun mereka tidak mampu meredam gemerisik hujan yang jatuh di atap seng. Walaupun sudah setahun menghuni *shelter*, anak-anak masih duduk terdiam di dalam rumah sambil menutup telinga ketika hujan. Sulit untuk berbicara di dalam *shelter* ketika hujan turun.

Kecilnya *shelter* dibandingkan dengan rumah di dusun lama menyebabkan beberapa warga berinisiatif membuat ruang tambahan yang terbuka di belakang rumah. Indikator kenyamanan ketika di dusun lama masih menjadi acuan dalam mempertimbangkan renovasi *shelter*. Seperti yang dikemukakan oleh Bu Mringgo, penghuni *shelter* Jenggala : *"Kulo wes biasane teng ndhuwur seneng emplek-emplek. opo keluarga saya kan korban semua jadi rasane wes kadung loro ati aerepo, nekad gawe emplek-emplek dewe ngoten niku."* Janda yang hidup sendiri karena keluarganya menjadi korban erupsi merapi menggunakan jasa tukang untuk membuat *emplek-emplek* tersebut. Hal serupa juga dilakukan oleh warga penghuni *Shelter* Kuwang. Walaupun *shelter* di sana sudah menggunakan material batako dan anyaman bambu, namun masih dirasa belum memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Ada yang melapisi dinding anyaman bambu dengan triplek dan terpal. *"Biyen pas isih gedhek yo adem mbak, angin itu kayak lewat-lewat kalau sedang tidur. Terus gedhek itu khan bolong-bolong, rasanya kayak ada orang yang mengawasi,"* cetus Bu Wid.

Bentuk renovasi lainnya yaitu dengan menggabungkan dua *shelter* yang saling membelakangi. Atap seng dipasang untuk menghubungkan dua *shelter* tersebut. Biasanya penghuni dua *shelter* yang dijadikan satu masih memiliki hubungan kerabat dekat. Keuntungan yang diperoleh selain mendapatkan ruang

tambahan, juga tidak kehujaan dan becek apabila para penghuninya akan saling berkunjung.

7.4.4.2 Aktivitas ekonomi

“Warga di sini luar biasa semangatnya untuk bangkit terutama dalam hal ekonomi,” demikian pujian yang dilontarkan pendamping PNPM Mandiri terhadap warga Pelemsari. Fase tinggal di hunian sementara adalah fase di mana warga penghuninya tinggal di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu dengan melakukan aktivitas untuk menunjang kelangsungan hidup mereka dan sekaligus mempersiapkan tempat tinggal yang permanen. Di samping itu, warga huntara juga dipersiapkan untuk mengembangkan usaha atau aktivitas ekonomi untuk kelangsungan hidup mereka.

Kesenjangan dalam mencari penghidupan di dusun lama dan di huntara sangat dirasakan oleh warga. Menurut penuturan Pak Darto, warga Pelemsari, “*Perekonomian niku nek enten nginggil, sanajan paribasan opek kayu mawon niku wis dadi duit, tegese opo yo seneng di dol opo yo.*” Sumber daya alam di sekitar Dusun Pelemsari mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga untuk kelangsungan hidup. Ketika dusun lama tidak boleh dihuni kembali, warga menempati huntara yang terletak cukup jauh dari dusun lama. Hal ini menyebabkan para lansia dan perempuan tidak bisa bekerja. Sementara, kebutuhan hidup tetap berjalan dan biaya jajan anak semakin meningkat. Hal serupa juga dialami oleh warga Bronggang yang tinggal di huntara. Sawah sebagai basis kehidupan mereka berada di dusun lama sehingga untuk menuju sawah perlu kendaraan. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa warga yang mendapatkan jatah *shelter* di Kuwang memilih tinggal di dusun lama dengan memperbaiki rumahnya agar dekat dengan sawah tempat mereka bekerja sehari-hari. Ada juga yang berangkat ke sawah pada pagi hari dan kembali ke *shelter* pada sore hari.

Ada beberapa ragam bentuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang dilakukan oleh para penghuni huntara. Pertama, kegiatan ekonomi yang masih sama dengan kegiatan ekonomi sebelum erupsi; kedua, kegiatan ekonomi yang

sama sekali berbeda dengan kegiatan ekonomi sebelum erupsi; dan ketiga, kegiatan ekonomi yang sebagian masih sama dan sebagian berbeda dengan kegiatan ekonomi sebelum erupsi. Namun, ada juga warga yang kehilangan akses terhadap kegiatan ekonomi, khususnya para lansia.

Pada umumnya bentuk aktivitas ekonomi yang masih sama baik di huntara maupun di dusun lama adalah usaha dagang di warung. Sebagian besar warga yang mempunyai usaha dagang saat di dusun lama, membuka usaha yang sama saat berada di huntara. Dana ganti rugi menjadi modal untuk membuka usaha dagang. Namun, pengalaman Ibu Kadus Kopeng yang warungnya dijarah saat erupsi menyebabkan trauma untuk membuka usaha serupa di Huntara Gondang. Sementara kegiatan ekonomi yang berbeda saat di dusun lama dan di huntara adalah usaha sapi perah. Hal ini dialami oleh warga Pelemsari. Hanya tiga ekor sapi yang bertahan hidup dari bencana Merapi. Walaupun para pemilik sapi perah sudah mendapatkan ganti rugi, namun uang hasil ganti rugi tidak digunakan untuk membeli sapi kembali. Ada yang membelanjakan uang ganti rugi sapi untuk modal membuka warung, membeli motor, dan membeli tanah. Keputusan untuk menanggihkan kegiatan ekonomi sapi perah lebih berdasarkan alasan tidak adanya tempat yang memadai untuk dijadikan kandang sapi di *shelter*. Di samping itu lokasi mencari rumput di dusun lama yang cukup jauh juga menjadi alasan warga Pelemsari untuk menanggihkan usaha sapi perah kembali seperti halnya pada masa pra erupsi. Untuk itu, warga Pelemsari mengalihkan kegiatan ekonominya pada jasa pendukung pariwisata di dusun lama yaitu jasa antar (ojek), warung makanan, dan berjualan souvenir. Sebagian penghuni *shelter* berusia produktif, terutama laki-laki yang lebih banyak yang terlibat dalam kegiatan di tempat pariwisata, yaitu bekerja sebagai tukang ojek. Kegiatan ekonomi yang dilakukan penghuni huntara juga ada yang masih berbasiskan kegiatan ekonomi di dusun lama dan sekaligus mengembangkan usaha baru. Misalnya Bu Darto, warga Pelemsari yang sebelumnya memelihara sapi perah memutuskan membeli sebidang pekarangan di Plosokerep dari hasil ganti rugi sapi dan mencoba usaha warung di TPR. Kegiatan ekonomi baru yang berkembang di huntara merupakan

hasil pengembangan pendampingan atau program bantuan yang diperuntukkan bagi korban erupsi, antara lain melalui KUBe.

Hal yang menarik dengan membandingkan kegiatan ekonomi saat di dusun lama dan di dusun baru, adalah kegiatan ekonomi pasca erupsi yang cenderung mengandalkan kerja komunal antar kerabat. Hal ini tidak ditemui pada masa pra erupsi. Salah satu contoh yang menonjol adalah Paguyuban Kinahrejo yang digagas oleh warga Pelemsari untuk mewadahi dan mengelola aktivitas ekonomi warganya di dusun lama yang dijadikan sebagai tempat pariwisata. Hasil dari warung, resto, dan jasa antar (ojek), sebagian disisihkan untuk kas dusun. Pada masa pra erupsi organisasi ekonomi warga Pelemsari lebih mengandalkan relasi kekerabatan, namun pasca erupsi sistem organisasi ekonomi melintasi relasi kekerabatan. Kondisi semacam itu tidak ditemui di dusun lain di lereng Merapi.

7.4.4.3 Aktivitas Sosial Kultural

Selama tinggal di huntara, warga melakukan penyesuaian atas aktivitas sosial kultural yang biasanya mereka lakukan di dusun lama. Bentuk aktivitas sosial kultural antara lain gotong royong, ritual (*kenduren*), *nyumbang*, dan kesenian. Gotong royong sering dikenal juga dengan istilah kerja bakti dan *sambatan*. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, istilah *sambatan* biasanya digunakan untuk kegiatan membangun atau memperbaiki rumah dan fasilitas umum. Di samping itu, istilah ini juga digunakan pada situasi saat seseorang sedang mengadakan hajatan perkawinan atau ada kematian. Untuk membedakan istilah *sambatan* biasanya dilawankan dengan istilah *glidhig* yang artinya sudah menggunakan jasa tukang.

Pada masa pra erupsi, warga di dusun lama masih banyak yang melaksanakan gotong royong untuk kegiatan seperti membangun rumah, membangun fasilitas umum, dan pelaksanaan suatu hajatan. Pada masa pasca erupsi, ketika warga tinggal di huntara, semangat gotong royong tampak melemah. Hal ini terindikasi dari digunakannya jasa tukang untuk merenovasi *shelter* atas inisiatif penghuninya. Gerakan kebersihan lingkungan *shelter* pernah didanai oleh program padat karya PNPM, di mana warga dibayar untuk

membersihkan lingkungannya sendiri. Melemahnya semangat gotong royong sudah dirasakan oleh Ketua RT I Pelemsari. Dia mengatakan, ”*Gotong royongnya sudah berkurang beda dengan dulu, orang kesibukan itu lebih. kalau kegiatan dikoordinasi dengan benar. Sekarang sudah mencari rejeki sendiri-sendiri, dan jalannya masing-masing.*”

Kondisi serupa juga tampak pada saat pelaksanaan hajatan perkawinan di *shelter*. Sudah menjadi tradisi bahwa dalam pelaksanaan hajatan, si empunya hajatan akan mengundang tetangga dan kerabat untuk membantunya. Bu Darto selama tinggal di *shelter* Plosokerep sudah dua kali mengadakan hajatan pernikahan anaknya. Dulu ketika dia pernah mengadakan hajatan pernikahan untuk anaknya di dusun lama, ia menerima *sumbangan*. Atau dengan kata lain mengundang tetangga satu RT untuk membantu memasak. Namun ketika ia harus mengadakan hajatan pernikahan anak-anaknya di *shelter*, ia memilih untuk tidak menerima *sumbangan*. Untuk itu ia menggunakan jasa *catering*. Pertimbangan terbatasnya dana dan lokasi tidak memungkinkan sistem *sambatan* dilakukan. Sambatan memerlukan dana besar, karena si empunya hajatan memiliki tanggungjawab untuk memberikan tanda terima kasih berupa sembako atau makanan kepada para tetangga dan kerabat yang telah turut dalam sambatan.

Sebagai masyarakat Jawa, warga yang tinggal di lereng Merapi tidak lepas dari ritual baik terkait dengan alam maupun siklus hidup. ”*Nalurine tiyang sepuh jaman biyen,*” menurut penuturan warga. Pada masa sebelum erupsi, warga menjalankan ritual sebagaimana yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun setelah erupsi 2010, ketika sebagian warga terpaksa tinggal di huntara, menyebabkan pelaksanaan ritual disesuaikan dengan kondisi. Misalnya *kenduren* yang biasanya dilakukan selama tiga jam menjadi lebih singkat hanya satu jam, karena dua acara dilakukan secara paralel atau bersamaan di tempat terpisah yang tidak jauh yaitu satu kelompok berdoa secara Islam, sementara kelompok lainnya berdoa dalam bahasa Jawa. Hal ini dilakukan untuk menyiasati keterbatasan tempat. Di samping itu juga dalam pengadaan makanan untuk *kenduren*. Seorang informan mengatakan, ”*Riyin modele, nggowo dewe masak dewe teng omah, mangkih disukani sekul, diiseni sayuran, tempe, peyek, dibungkus taplak, dibeto*

teng kenduren, mangkih jumlahe pinten wadah, dipendet pinten misale 20 KK dijupuk 10, disisihke, mengke nek wayahe wangsul digawakke bali.” Biasanya setiap KK membuat satu makanan untuk kemudian dikumpulkan dan dimakan bersama-sama. Namun setelah erupsi, sebagian makanan untuk kenduren dipesankan ke *catering*. Untuk kenduren bersih dusun, warga Pelemsari sudah menggunakan sisten *tarikan* atau iuran sejumlah Rp 20.000,00 per KK.

Kegiatan kesenian pada pra erupsi kurang mendapat perhatian warga Pelemsari. Namun setelah erupsi ketika Paguyuban Kinahrejo dibentuk dan Dusun Pelemsari menjadi lokasi pariwisata, kegiatan kesenian menggeliat bangkit. Bukan hanya karawitan tetapi juga jathilan. Kegiatan semacam ini tidak berkembang di Huntara Kuwang.

7.4.5 Partisipasi Komunitas dan Warga Dalam Mengelola Hunian Sementara

Walaupun hanya bersifat sementara, namun warga yang tinggal di huntara Plosokerep mengelola lingkungan tinggalnya dengan kesadaran bahwa mereka hanya tinggal sementara saja di sana. Mereka lebih memfokuskan pada pengelolaan TPR sebagai sumber penghasilan selama di huntara. Sementara kehidupan di huntara dikelola sebagaimana pengelolaan di dusun lama. Pada dasarnya, sistem koordinasi warga masih mengadopsi cara di dusun lama yaitu melalui jalur pemerintahan tingkat dusun. Peran ketua RT sangat penting dalam pengorganisasian warga. *”Dawuh nopo-nopo saking pak dukuh niku lewat RT sing ngumpulke nek enten acara nopo,”* demikian penuturan Pak Pur, Ketua RT III Dusun Pelemsari. Jadi jalur koordinasi di tingkat dusun adalah dari pak dukuh melalui pak RT, kemudian disampaikan pada warga.

Koordinasi untuk bersih desa, pengadaan kenduri, undangan rapat warga, penyaluran bantuan, bahkan undangan hajatan melalui jalur RT. Dalam pelaksanaan kegiatan seperti bersih dusun, tidak serempak dilakukan semua warga dari setiap RT, melainkan bergiliran. Misalnya RT 1 melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan pada hari Selasa minggu pertama, RT 2 minggu berikutnya dan seterusnya. Demikian juga dalam pelaksanaan ritual *dandan kali* yang dilakukan

di tingkat RT. Ritual yang dilakukan setiap sekali setahun ini dilakukan dalam waktu berbeda antar RT di Dusun Pelemsari. RT 1 biasanya melakukan ritual ini pada bulan besar, sementara RT 3 pada bulan Dhulkangidah. Dengan demikian kegiatan sosiokultural diorganisasi di tingkat RT. Termasuk di antaranya adalah arisan tingkat RT yang dilakukan setiap 35 hari atau *selapan*. Demikian juga dengan pengadaan pengajian yang dilakukan secara bergiliran di tingkat RT dan baru diadakan di Masjid setiap *selapan dinoan* (35 hari).

Di samping pengelolaan komunitas berbasis RT dalam menjalankan aktivitas sosial sehari-hari, pengelolaan bantuan juga ditangani dan dikelola oleh beberapa tokoh dusun setempat khususnya kadus dan para ketua RT, serta tokoh pemuda. Sementara pengelolaan komunitas untuk aktivitas ekonomi berada di bawah Paguyuban Kinahrejo. Sementara untuk persiapan hunian tetap melalui relokasi mandiri dilakukan terutama oleh para lelaki dewasa. Sebagaimana ketentuan dari JRF bahwa perlu adanya panitia relokasi, maka para tokoh setempat dan perwakilan dari RT dipilih sebagai panitia.

Tidak banyak warga perempuan yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas di Huntara Plosokerep. Hal ini tampak dari dilibatkannya beberapa perempuan yang sama dalam pelaksanaan program atau pelatihan. Hal ini tidak lepas dari kesibukan perempuan-perempuan yang menjaga warung atau di resto TPR. Di samping itu para perempuan yang tidak beraktivitas di TPR banyak yang mempunyai anak balita. Kemudahan menghubungi beberapa warga perempuan tertentu untuk dilibatkan pada suatu kegiatan menjadi latarbelakang mengapa hanya beberapa perempuan tertentu saja yang selalu tampil.

Bentuk pengelolaan huntara salah satunya adalah pengelolaan bantuan. Beragam bentuk bantuan yang diterima oleh warga *shelter*. Bantuan tersebut ada yang bersifat material dan non material. Bentuk bantuan yang dianggap donaturnya sebagai penunjang aktivitas ekonomi adalah seperti program budidaya lele, peternakan ayam, dan penanaman sayur. Dalam prakteknya, program budidaya lele dan peternakan ayam justru menyulitkan warga penghuni *shelter*. Persoalan pakan merupakan persoalan utama. Pada awal program, warga mendapatkan bantuan untuk pelatihan, infrastruktur, juga bibit serta pakannya

untuk beberapa waktu. Menurut pengalaman warga, apabila lele dipelihara sudah melebihi usia siap panen, maka beban pakannya menjadi mahal. Bahkan menurut beberapa keluarga yang mengikuti budidaya lele, hasil yang diperoleh dari panen lele hanya untuk menutup biaya pakan. Demikian juga dengan pembagian anak ayam di mana setiap KK mendapatkan jatah 20 anak ayam broiler berikut dengan perlengkapan kandang seperti kabel, lampu, tempat makan, dan juga pakannya. Namun pada akhirnya keluhan pakan muncul seperti halnya budidaya lele. Bahkan ayam menjadi sumber konflik ketika ayam yang sudah besar tidak di masukkan dalam kandang dan makan sayuran tetangga yang ditanam di samping-samping rumah. Budidaya sayuran ini juga merupakan salah satu bentuk bantuan dari luar. Warga disediakan media berupa pralon untuk menanam sayur yang diletakkan di samping rumah dan juga bibit tanaman seperti tomat, cabai, sawi, dan terong. Pada gilirannya tidak semua warga bisa memeliharanya dengan baik.

Bentuk bantuan lainnya adalah bengkel kerja menjahit. Keberadaan program ini tidak lepas dari bantuan empat buah mesin jahit yang diberi oleh Yayasan Jenggala. Selanjutnya ada program pelatihan menjahit yang difasilitasi oleh UGM. Pelatihan ini berjalan selama empat bulan dan diikuti oleh 20 orang ibu-ibu. Namun peserta yang lain mengundurkan diri sehingga hanya tinggal tiga orang saja selama pelatihan berlangsung. Selain pelatihan, diberikan juga mesin jahit sebanyak empat buah, mesin obras, dan meja potong. Dari delapan mesin jahit yang ada, empat buah digunakan oleh warga di rumah, sedangkan yang lainnya diletakkan di bengkel kerja. Pelatihan ini pada akhirnya hanya dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan bagi dua orang ibu saja yang memang pada saat di dusun lama sudah berprofesi sebagai tukang jahit. Bahkan setelah pelatihan selesai, mereka diberi pekerjaan untuk menjahit 20 surjan dan sampai sekarang menerima pesanan jahitan dari warga sekitar.

Singkatnya, warga *shelter* merasa bahwa memang banyak bantuan tetapi banyak juga yang tidak tepat sasaran, tidak tepat teknologi, serta tidak tepat jenis produksinya. Misalnya di *Shelter* Kuwang, ada program pembuatan batako tahan gempa, produksi tempe, dan pembuatan abon lele, yang kesemuanya macet tidak lama setelah pelatihan dan pendampingannya selesai. Dalam pembuatan abon lele,

teknologi tidak tepat, karena memerlukan listrik yang besar sementara ketersediaan listrik di *shelter* terbatas.

Di samping itu dalam memberikan bantuan, kondisi dan kebutuhan warga *shelter* tidak diperhatikan oleh para donatur, termasuk pemerintah. Badiman, Ketua RT IV Dusun Pelemsari mengatakan bahwa ia belum pernah diajak oleh pemerintah untuk membicarakan kebutuhan warga di huntara. Selain itu, program-program ini tidak menyediakan tenaga pendamping. Akibatnya banyak program yang masuk, tapi tidak bisa jalan mulus.

7.4.6 Keputusan Untuk Tetap Tinggal Di Hunian Sementara Atau Kembali Ke Kampung

Walaupun penghuni *shelter* berpeluang secara leluasa untuk merenovasi *shelter*, namun tidak semua warga yang berhak atas *shelter* memilih tinggal di sana. Sempitnya *shelter* dan trauma terhadap erupsi Merapi menyebabkan beberapa warga memutuskan tidak tinggal di huntara. Keluarga Mbah Maridjan memilih untuk tidak tinggal di *shelter*. Mereka tinggal sekitar dua km arah selatan Plosokerep. *Shelter* untuk istri dan anak-anak Mbah Maridjan yang letaknya berdekatan kemudian dijadikan satu. Hampir setiap sore Pak Asih, anak Mbah Maridjan, yang menjabat sebagai Ketua RT I dan takmir Masjid menengok ke *shelternya*. Karena *shelter* Pak Asih tidak dihuni maka *shelternya* sering digunakan sebagai tempat pertemuan warga. Misalnya pada waktu acara kenduri memperingati satu tahun meninggalnya korban di RT I Pelemsari, *shelter* Pak Asih yang sudah digabung dengan *shelter* ibunya digunakan sebagai tempat kenduri.

Ada juga *shelter* yang kosong karena penghuninya sudah tua. Ketika di dusun lama, ada dua KK yang tinggal dalam satu rumah. Setelah dibangun *shelter* dua KK tersebut masing-masing mendapatkan satu *shelter*. Akan tetapi karena yang satu KK adalah janda tua, maka dia tetap tinggal jadi satu dengan anaknya sebagaimana di dusun lama. Jumlah rumah tidak sama dengan jumlah KK ketika di dusun lama. Masih ada dua KK yang tinggal dalam satu rumah. Terutama KK yang sudah tua baik janda maupun duda. Namun berdasarkan

pendataan untuk pembangunan *shelter*, maka jumlah KK yang terdaftar dalam catatan desa dijadikan acuan untuk menghitung berapa unit *shelter* yang akan dibangun. Warga Pelemsari yang menghuni *shelter* sejumlah 85 keluarga. Sementara di dusun awal, sebelum erupsi jumlah KK sekitar 90 KK dan setelah erupsi tinggal 83 KK. Setelah pindah ke *shelter* jumlah KK menjadi 85 KK. Tambahan dua KK berasal dari keturunan warga setempat yang kembali dari rantau sebelum huntara jadi. Dengan pertimbangan masih keturunan dari KK setempat dan akan menunggu orang tuanya yang sudah tua, maka ia juga mendapatkan *shelter*. Sementara yang satu lagi menempati jatah *shelter* orang tuanya yang meninggal sebelum *shelter* jadi. Mereka diperbolehkan menempati *shelter* dengan syarat mengganti KTP menjadi penduduk setempat. Sebagai tanda pengenalan siapa penghuni *shelter*, maka di atas pintu depan *shelter* dipasang papan bertuliskan nomor dan nama KK penghuninya.

Kondisi serupa juga tampak di *Shelter* Kuwang. Tidak semua *shelter* dihuni. Dari 143 KK yang semula tinggal di dusun lama (Bronggang), kini tinggal 135 KK. Sementara jumlah *shelter* yang tersedia untuk dihuni warga Bronggang hanya untuk 65 KK yang kebanyakan berasal dari RT 4 dan RT 3. KK yang lain masih tinggal di dusun lama karena rumahnya masih bisa dihuni. Namun demikian, ada warga yang mendapatkan jatah huntara sementara rumahnya di dusun lama masih bisa dihuni. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Wid, bahwa dia betah tinggal di *shelter* daripada tinggal di rumahnya di dusun lama. Walaupun rumahnya di dusun lama tidak rusak, tapi semakin berisik dan banyak debu. Apalagi lagi siang dan malam banyak truk dan kendaraan lewat untuk mengambil pasir di Sungai Gendol yang tidak jauh dari rumahnya. Menurutnya, di *shelter* Kuwang suasananya lebih tenang dan nyaman. Sebaliknya ada juga *shelter* yang kosong karena penghuninya memilih tinggal di dusun lama. Misalnya Ibu Sarbini yang merasa tidak aman, karena *shelternya* bersebelahan dengan *shelter* yang salah satu penghuninya stress dan pernah merusak barang miliknya. Demikian juga dengan rumah Pak Sukar yang tidak terkena awan panas, jadi meskipun mendapat jatah *shelter* tetapi keluarganya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Hanya beberapa kali dalam seminggu Pak Sukar dan anak perempuannya

bergantian tidur di *shelter*. Tidak ditempatinya *shelter* oleh para penghuninya seringkali menimbulkan masalah pada saat datang bantuan. Apalagi sebagian warga Bronggang masih tinggal di dusun lama. Oleh karena itu, kadus sering menghimbau walaupun *shelter* tidak dihuni, tetapi setidaknya dibuat untuk menginap barang selama satu dua hari. Komentar yang sama dilontarkan oleh beberapa warga di *Shelter* Plosokerep. Mereka tidak bisa mengerjakan apa-apa sebagaimana di dusun lama. Seperti yang dikemukakan Pak Wignyo, *"Kegiatan warga berkurang drastis dibandingkan waktu ada di atas, bahkan tidak ada kegiatan. Kegiatan yang sering dilakukan adalah kumpul bersama. Kalau yang muda-muda malah banyak kegiatan yang menyangkut kegiatan ekonomi yang ada hasilnya saat ini, kalau untuk yang pemuda itu wisata erupsi. Kalau untuk yang lansia lele (makani lele), nek ibu-ibu sayuran, ayam. Sayuran di sekitar shelter saja tapi kadang-kadang bapak-bapak ya di atas, bersih-bersih kebon, singkong."* Namun warga Pelemsari tidak kembali menghuni dusun lama karena selain tidak ada rumah hunian di dusun lama juga. Menurut Badiman, *"Pertimbangannya kita sadar, alam itu tidak bisa ditentang, tapi bagaimana menyiasati. Trus nik awak dhewe balik bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap keturunan kita. Nik misale sudah seko 0 mencapai 60 uripe wis rada kepenak, trus nol lagi apa arep dibaleni maneh anak putune."* Akhirnya warga memutuskan untuk tinggal di lokasi baru. Dusun lama difungsikan menjadi tempat mencari uang dengan bungkus pariwisata.

Demikian pula yang dilakukan oleh warga Sambungrejo yang mendapatkan jatah *shelter* di Kepurun. Mereka tidak betah tinggal di *shelter* karena tidak bisa bekerja. Seseorang mengatakan, *"Mulo niku sing teng shelter nek isuk do munggah kabeh, do kerjo teng mriki niku. Teng niko [shelter] mung nunggu bantuan tok mas. Nek mboten dibantu teng riko mawon nggih ngelih mas,"*

Reaksi penolakan diberikan oleh sebagian pengungsi dari Kabupaten Boyolali, Klaten, dan Magelang, karena mereka menghendaki pengalihan peruntukan pembangunan hunian sementara ini untuk perbaikan rumah. Menanggapi reaksi tersebut pemerintah Kabupaten Jawa Tengah mengajukan

permohonan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengalihkan pemanfaatan dana pembangunan hunian sementara warga lereng Gunung Merapi untuk perbaikan tempat tinggal warga yang rusak akibat erupsi.²³

7.5 Rehabilitasi dan Rekontruksi

Dalam naskah Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Erupsi Merapi di Wilayah Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013, yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dan BNPB disebutkan bahwa ‘ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi didasarkan pada pendekatan relokasi pemukiman’ yang akan dilaksanakan secara bertahap dari mulai tahun 2011 sampai 2013. Tahapan tersebut meliputi (BNPB dan Bappenas, 2011:iii):

- a) pemulihan perumahan dan permukiman dengan memperhatikan kebijakan relokasi yang aman bagi permukiman berdasarkan penataan ruang penataan ruang dan desain yang berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana;
- b) pemulihan infrastruktur publik yang mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian wilayah, termasuk infrastruktur vital untuk kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c) pemulihan kehidupan sosial masyarakat;
- d) pemulihan ekonomi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat;
- e) pemulihan pemerintahan, lingkungan hidup, dan sekaligus pengurangan resiko bencana.

7.5.1 Rekontruksi Sektor Perumahan dan Pemukiman

Dalam perhitungan kerugian di sektor perumahan, seperti termuat dalam Renaksi Rehab-Rekon Pasca Bencana Erupsi Merapi, tercatat bahwa sekitar 2.636 unit rumah rusak berat dan tidak layak huni, 156 unit rumah rusak sedang, sedangkan rumah rusak ringan tercatat sejumlah 632 unit, sehingga total mencapai

²³Warga Merapi Tolak Hunian Sementara. 12 Apr 2011 Nasional Suara Karya via <http://bataviase.co.id/node/636397>

3.424 unit rumah. Rumah yang dikategorikan sebagai ‘rusak berat’ dicanangkan untuk direlokasi dengan bantuan Rekompak (Ditjen Cipta Karya) (Bappenas dan BNPB, 2011: 28). Rumah dalam kategori rusak berat/hancur hanya terjadi di wilayah Kecamatan Cangkringan, sedangkan di kecamatan lain tingkat kerusakannya termasuk sedang dan ringan.

Berdasarkan naskah Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Erupsi Merapi di Wilayah Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013 yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dan BNPB, disebutkan bahwa strategi rehabilitasi dan rekonstruksi untuk perumahan dan pemukiman:

*“..dilaksanakan melalui skema **relokasi** dari wilayah KRB III yang tidak layak huni berdasarkan peta rekomendasi Badan Geologi Kementerian ESDM. Terkait dengan relokasi, karena terbatasnya lahan maka pendekatan yang digunakan adalah: (a) pemadatan desa, (b) relokasi ke dusun lain, (c) transmigrasi dan (d) relokasi mandiri” (2011:81)*

Strategi relokasi ini terdiri dari: strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Strategi jangka pendek adalah: “Relokasi perumahan bagi masyarakat yang terdampak langsung erupsi Merapi”, sedangkan strategi jangka menengah adalah: relokasi perumahan bagi masyarakat yang bertempat tinggal pada KRB III” (BAPPENAS dan BNPB, 2011: 83).

Tabel 7.3
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Perumahan dalam Rupiah

Jenis	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Kerusakan dan Kerugian
Rusak berat/total	402.584.910.000		402.584.910.000
Rusak sedang	14.420.952.000		14.420.952.000
Rusak ringan	29.211.672.000		29.211.672.000
Pembersihan Rumah		17.528.396.000	17.528.396.000
Pembuatan Shelter		18.552.300.000	18.552.300.000
Jalan Lingkungan	98.522.310.000		98.522.310.000
Jumlah	544,739,844,000	36,080,696,000	

Sumber: Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi, Bappenas dan BNPB, 2011

Untuk relokasi perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak langsung erupsi Merapi, pemerintah mendapatkan bantuan melalui program Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) yang bersumber dari hibah Java Reconstruction Fund (JRF) sebesar 3,5 juta USD dan hibah PNPM Support Facility (PSF) sebesar 11.5 Juta USD.

7.5.2 Relokasi

Bencana Merapi 2010 yang berdampak pada hancurnya dusun di Kinahrejo, Bronggang, dan daerah lain di sepanjang aliran Sungai Gendol, mendorong pemerintah melalui BNPB dan instansi terkait mencanangkan program rekonstruksi melalui skema relokasi. Akan tetapi umumnya warga korban erupsi yang rumahnya rusak sedang dan ringan meski di wilayah KRB III dan area terdampak langsung serta wilayah dusun mereka tidak terkubur lahar, sehingga masih bisa dikenali batas-batas rumah dan kepemilikan lahan cenderung menolak relokasi. Sementara warga yang rumahnya termasuk ke dalam kategori rusak berat/total dan berada di wilayah yang benar-benar terkubur dan tidak bisa dikenali lagi, seperti Kinahrejo (Cangkringan, Sleman), cenderung menerima relokasi. Fakta menunjukkan bahwa warga pun tidak *kerasan* tinggal lama di pengungsian atau huntara. Keengganan mereka direlokasi itu dapat disimak dari beberapa kasus kebijakan dan implementasi relokasi di beberapa dusun, khususnya di Dusun Kaliurang Utara, Magelang, dan Dusun I Desa Balerante (baca Dusun Sambungrejo), Klaten. Sikap warga menolak relokasi diikuti juga dengan sikap keengganan mengikuti skema rekonstruksi yang diemban pemerintah. Sikap warga tersebut menunjukkan adanya kepentingan yang kuat warga untuk kembali ke dusun asal guna melakukan pembangunan komunitas pasca berakhirnya masa darurat di pengungsian.

Dari 30 dusun yang menjadi lokasi penelitian dan berdasarkan survey baseline data yang dilakukan melalui penelitian ini, tercatat empat dusun yang rumah warganya mengalami kerusakan, yaitu:

Tabel 7.4
Tingkat Kerusakan Rumah Warga Tertinggi Dari 30 Dusun Dari Lokasi Penelitian

Nama Dusun	Roboh	Rusak Berat	Rusak Ringan
1. Kopeng, Cangkringan Sleman	62	27	30
2. Kinahrejo, Cangkringan Sleman	84	NA	NA
3. Sambungrejo Kemalang Klaten	57	24	39
4. Bronggang Cangkringan Sleman	13	14	7

Sumber : Data Primer 2011

Dari keempat dusun tersebut, Kinahrejo, Kopeng, dan Sambungrejo (Dusun I, Desa Balerante) adalah dusun-dusun yang dicanangkan untuk direlokasi. Seperti yang disebut di atas, warga Kinahrejo menerima program relokasi, sementara Kopeng sebagian menolak relokasi, dan Dusun I, Desa Balerante, Klaten, sebagian besar menolak relokasi.

Untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses rekontruksi/relokasi yang dilakukan atau dibantu oleh pemerintah, swasta/NGO, dan warga sendiri, penelitian ini memfokuskan diri di Dusun I yang selanjutnya cukup disebut Dusun Sambungrejo.

Desa Balerante dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi masuk ke dalam usulan daerah potensi relokasi. Jumlah dusun yang berpotensi untuk direlokasi terdiri dari 12 dusun, dengan lima di antaranya termasuk dalam KRB III. Jumlah potensi KK sebanyak 171, dengan ketersediaan lahan relokasi seluas 70.000 meter persegi di atas lahan yang berstatus sebagai kas desa. Setiap KK dicanangkan akan mendapatkan kapling 200 meter persegi, dan lokasinya dicanangkan di Dusun Bendosari dan Kaligombyong (Sumber: JRF-Rekompak, Ditjen Ciptakarya, Kementerian PU).

Di Dusun Sambungrejo (473 (139 KK)/L: 98,9 ha), erupsi Merapi telah mengakibatkan 57 rumah roboh, 24 rumah rusak berat, 39 rusak ringan akibat terjangan awan panas, abu, dan material Merapi lainnya. Hanya 15 rumah yang tidak mengalami kerusakan berarti. Wilayah dusun ini juga dimasukkan ke dalam

KRB III, yang dalam ruang lingkup Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana erupsi Merapi yang didekati, tidak hanya dengan pendekatan relokasi, tetapi juga *zero growth*, dengan cara mengosongkan wilayah tersebut dan dijadikan wilayah hutan lindung.

7.5.2.1 Dilema dan Ketidakjelasan Proses Relokasi dan Rekonstruksi

Kebijakan pengosongan itu nampak tidak berhasil. Warga cenderung kembali ke kampung dan berusaha memperbaiki rumahnya. Beberapa warga yang ditemui di Dusun I Balerante menggambarkan bahwa pemerintah memberikan bantuan dana untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak karena erupsi Merapi dengan rincian sebagai berikut: Rp 7.500.000,00 untuk rumah yang roboh, dan Rp 5.000.000,00 untuk rumah yang rusak berat. Warga menganggap bantuan ini masih belum mencukupi dibandingkan dengan besaran bantuan bagi korban gempa Bantul yang mencapai Rp 15.000.000,00 untuk rumah roboh, Rp 10.000.000,00 untuk rusak berat, dan Rp 4.000.000,00 untuk rusak ringan.

Bantuan untuk membangun dan perbaikan rumah ini tentu saja memberi isyarat bahwa mereka bisa tetap tinggal di wilayah dusun mereka saat ini. Seperti yang diungkap oleh Pak Zainu, Kepala Dusun Sambungrejo dan Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Desa Balerante, menirukan perkataan ketua BNPB pusat Syamsul Maa'rif:

“Pak Syamsul waktu bertemu saya pernah berkata: kalau masyarakat tidak mau direlokasi tidak apa-apa, pemerintah tetap tidak bisa membangun rumah warga yang rusak. Pemerintah hanya bisa membangun infrastruktur jalan. Terutama jalur evakuasi”. Warga mau memberikan tanahnya untuk pelebaran jalur evakuasi? Iya pak. Tidak akan minta ganti rugi? Tidak Pak. Siap untuk pelebaran jalan!”

Namun, di kemudian hari, menurut Pak Zainu, BPBD Provinsi dan Kabupaten, juga Bappeda berkata lain. Mereka menyatakan bahwa di daerah KRB III, bukan hanya tidak boleh dibangun rumah kembali, tetapi juga tidak boleh membangun dan memperbaiki infrastruktur.

“Pembangunan Rekompak yang tadinya direncanakan di KRB III. Sudah lolos perifikasi, ternyata ditolak. Sekarang diturunkan lagi di bawah. Apakah Pak Syamsul Maarif ketika bilang mau dibangun infrastruktur itu hanya spontan bilang gitu, ternyata aturannya tidak boleh. Saya tidak

tahu. Memang ini cuma 'sekedar omong', surat keputusan tertulisnya belum ada". Ungkap Pak Zainu.

Soal tidak adanya 'surat resmi' soal relokasi larangan pembangunan rumah dan infrastruktur di Dusun Sambungrejo, juga dikeluhkan oleh Kepala Desa Balerante. *"Biar saya juga enak dengan warga. Jangan sampai orang menyangka karena Pak Lurah manggon neng ngisor (tinggal di bawah), makanya warga harus tinggal di bawah."* demikian menurut Kepala Desa Balerante pada saat diskusi bersama warga. Selain itu, tambah Pak Zainu, dana sebesar Rp 4.900.000.000,00 rupiah untuk membangun rumah warga di lokasi relokasi sebenarnya sudah disiapkan, asal warga mau direlokasi. "Mereka memberi batas waktu sampai Juni 2012, Kalau sampai bulan itu masyarakat tidak mau relokasi, dananya tidak terpakai.

Kondisi ini disebut sebagai 'ironi' oleh Pak Zainu, karena menurut dia dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi melalui skema JRF-Rekompak itu ada karena bencana Merapi. Tetapi, ia melanjutkan, *"Desa Balerante yang terkena dampak bencana malah tidak dapat, terutama dusun saya yang masuk KRB III, yang dapat malah desa lain seperti Kepurun, Panggang, mereka malah dapat Rp 250.000.000,00 atau berapa gitu...sebetulnya banyak dana yang bisa diserap jika warga mau direlokasi"*.

Mengenai rekonstruksi infrastruktur, pihak Desa Balerante tetap berupaya untuk mendapatkan bantuan perbaikan infrastruktur dengan menyurati pemerintah Kabupaten dan Propinsi. Sejauh ini belum ada perbaikan infrastruktur yang berarti di wilayah ini. Prasarana listrik yang rusak dan ambruk saat ini belum dipasang. Warga 'mencantolkan' sendiri aliran listrik ke daerah Balerante untuk menerangi rumah mereka. Selama satu tahun (2011) mereka dibebaskan dari beban biaya listrik, sementara yang meteran listriknya rusak, diganti meteran dengan sistem pulsa. Jalan umum hanya dibersihkan dari rerumputan dan membersihkan saluran air yang tersumbat melalui program padat karya. Warga yang terlibat dalam program ini diberi insentif sebesar Rp 30.000,00 untuk pekerjaan mereka selama kurang lebih enam jam. Program ini nampaknya hanya formalitas, karena warga yang terlibat lebih banyak santai, berbincang, bercengkrama, daripada bekerja.

Ketidakjelasan akibat kesimpangsiuran bantuan untuk pembangunan rumah dan infrastruktur, tidak adanya ‘surat resmi’ yang menyatakan status wilayah mereka, dan terutama posisi para ‘pejabat lokal’ seperti Pak Zainu yang di satu sisi adalah wakil pemerintah, dan di sisi lain warga yang hidup di Dusun I, Balerante, menyebabkan posisinya dilematis. Seperti yang dikatakan oleh Pak Zainu:

“Kita pinginnya hidup di Merapi, hidup sejahtera dan aman meskipun di bawah ancaman Merapi. Yah..harapannya pemerintah tetap memperhatikan kita. Dilemanya saya sebagai kepala dusun di sana, jadi sebagai bagian dari pemerintah saya juga harus mengikuti peraturan. Tetapi ketika masyarakat menolak (relokasi) saya harus bagaimana? Jadi saya harus ikut juga menandatangani pernyataan menolak relokasi..”

Kondisi yang dilematis seperti yang dialami Pak Zainu, tidak terjadi di sebagian besar warga Dusun I, Balerante. Mereka menolak rencana rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pendekatan dan strategi relokasi.

7.5.2.2 Respon Warga Terhadap Program Relokasi dari Pemerintah

Ada dua pola respon ketidakpercayaan warga terhadap skema relokasi yang dicanangkan pemerintah. Pertama warga tidak percaya bahwa pemerintah akan memberikan ganti rugi yang adil dan menjamin bekas dusunnya dijaga fungsinya untuk taman nasional. Ketidakpercayaan warga itu dapat disimak dari keterangan para informan.

“Waktu itu ada sosialisasi dari BPBD propinsi Jawa Tengah, sosialisasi Renaksi (rencana aksi) tentang relokasi, bahwa di wilayah KRB (III) akan dijadikan hutan lindung. Kemudian akan dibeli seharga Rp 37.500,00/meter persegi, itu yang memicu warga tidak mau lagi diajak rebugan (musyawarah) soal relokasi. ...Masyarakat mau relokasi dengan syarat tanah yang di atas tetap menjadi hak milik mereka, tetapi kalau itu dikabulkan, masyarakat sekarang ini sepertinya tetap tidak percaya ..iki mung politik..(ini cuma politik)..iki carane pemerintah..sesok nek direlokasi..tanah kuwi ..dijaluk (ini cuma cara pemerintah, nanti kalau sudah direlokasi, tanah itu akan diminta)”(Pak Zainu, Kepala Dusun I Balerante, dan...)

“Kalau pemerintah cuma menukar 200 m² lha gimana? Padahal di sini banyak yang punya lahan 3 hektar bahkan lebih. Nggih bener, pemerintah mboten ajeng njaluk (mungkin benar, pemerintah tidak akan meminta..) tapi lama-lama kelamaan karena tanah orang sini dekat dengan

*kehutanan dan dijadikan taman nasional, kalau tanah di sini sudah ditinggal, dan tanah di sini tidak diminta pajak oleh pemerintah. Warga kan tidak punya hak..jadi iso **dijaluk** kalian pemerintah (jadi bisa **diminta sama pemerintah**)” (Pak Nur, Warga Dusun I Balerante).*

Dua pernyataan di atas menunjukkan salah satu alasan mengapa warga Dusun Sambungrejo Desa Balerante menolak relokasi. Selain itu, perkataan yang dilontarkan oleh dua orang dalam posisi berbeda (perangkat desa/kadus dan warga) dan di waktu yang berbeda (wawancara dilakukan di waktu dan tempat yang berbeda) mengungkap bagaimana program rekontruksi dengan pendekatan relokasi difahami, dan bagaimana posisi pihak pemerintah serta warga dalam pemahaman tersebut.

Program relokasi dari pemerintah dimaknai oleh warga sebagai permintaan. Permintaan terhadap miliknya yaitu warga. Tanah dan rumah itu akan ditukar dengan ‘tanah’ tempat relokasi yang nilainya tidak sepadan. Bahkan walaupun pemerintah memenuhi tuntutan warga yang dianggap sepadan yaitu, tanah bekas tempat tinggal dan lahan pertaniannya tetap mereka miliki. Sementara warga juga mendapatkan rumah dan tanah di lokasi relokasi, warga tetap curiga, karena pemerintah akan meminta tanah yang mereka tinggalkan. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka curiga wilayah mereka setelah dikosongkan sebagai tempat pemukiman maka akan dijadikan hutan lindung dan dari hutan lindung ini suatu saat berubah fungsi menjadi kawasan wisata dengan villa-villa elit dan penginapan, sehingga warga hanya menjadi penonton.

Dalam hal ini, rencana relokasi melibatkan dua unsur penting dalam kehidupan berkomunitas yaitu; pertukaran dan kepercayaan. Program rekontruksi dengan pendekatan relokasi seperti diungkap di rencana aksi di atas dianggap bukan sebagai ‘pertukaran’ yang sepadan, tetapi lebih sebagai ‘permintaan’ dan ‘politik’ (akal-akalan) pemerintah untuk tetap ‘meminta’ lebih. Ganti rugi rumah sebesar Rp 30.000.000,00 per keluarga dan 37.500/meter persegi untuk lahan pada awalnya disetujui oleh sebagian warga dengan syarat tambahan yaitu: pemerintah bersedia menyediakan lahan tanah permukiman dan tanah siap garap di wilayah yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka saat ini. Pemerintah hanya akan menyediakan lahan 200 m per keluarga, padahal banyak warga yang memiliki

lahan sampai 3 ha bahkan lebih. Tanah ganti rugi tersebut juga harus berupa lahan produktif dengan luas lahan yang sama dengan tanah yang mereka miliki sebelumnya. Mereka tidak menerima uang tunai sebagai ganti rugi. Pemerintah tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut. Akhirnya, warga berubah fikiran untuk konsisten menolak ‘permintaan’ relokasi.

Problem kebijakan relokasi kedua adalah pada ketidakpahaman dan kemampuan pemerintah mengakomodasi konsep lokal tentang keluarga dan pekarangan. Warga Merapi membangun rumah di tanah pekarangan yang luas, dan kelak sebagian dari tanah pekarangan akan dibangun rumah-rumah baru untuk anak cucu mereka. Akan tetapi kalau mereka mengikuti skema relokasi dengan lahan yang sempit, maka mereka tidak akan dapat lagi menyediakan pemukiman bagi anak cucu. Hal ini dapat dijelaskan dengan menyimak keterangan seorang informan di desa.

*“Sebenarnya pemerintah itu baik, masyarakat yang tinggal di zona merah (KRB III), dipindahkan dan diberi lahan berapa meter persegi, keberatannya cuma satu kalau direlokasi dan mendapatkan tanah 200 meter persegi, misalkan keluarga yang mempunyai anak, mau ditempatkan di mana mereka? Misalkan punya anak laki-laki sampai 4, padahal tradisi di sini, kalau anak laki-laki nanti kalau menikah si perempuan yang ikut laki-laki. Nanti orang tuanya yang bangun rumahnya, Masyarakat sini tidak mau direlokasi, kalau yang punya anak lebih dari satu bagaimana nanti **memapankan** anaknya” (Pak Nur, Warga Dusun I, Balerante)*

Penolakan warga terhadap rencana relokasi tidak semata-mata karena ‘pertukaran yang tidak seimbang’ dan ‘permintaan’ yang ‘politis (akal-akalan)’ untuk meminta lebih. Proses relokasi bukan semata-mata pemindahan rumah, lahan, dan manusia, melainkan seperti yang diungkap Pak Nur di atas menyangkut bagaimana ‘memapankan’ keluarga. “Papan” (rumah dalam bahasa Jawa) bukan semata-mata tempat tinggal, tetapi juga tempat ‘memapankan’ atau ‘menempatkan’ manusia beserta relasi sosialnya. Bagi Pak Nur, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang kayu dan ikut membangun kembali rumah-rumah warga yang rusak terkena dampak erupsi Merapi, relokasi dan rekonstruksi bukan semata-mata proses memindah rumah dan ‘membangunnya kembali’ di tempat lain, tetapi

juga harus memperhatikan bagaimana cara ‘menempatkan’ relasi sosial, terutama dalam relasi keluarga dan perkawinan.

Terdapat pula problem ketidakberkaitan dengan adanya *adaptibilitas* warga Merapi yang sudah biasa hidup di daerah rawan, tetapi nyatanya bisa mendapat kesejahteraan ekonomi. Dengan kata lain mereka mengatakan “Sudah Lama Ditinggali, dan Masih Bisa Ditinggali Berdampingan dengan Merapi”. Oleh karena itu relokasi berarti hidup dengan pola baru yang relatif asing dan belum tentu *adaptif*. Alasan lain yang digunakan warga Dusun I, Balerante untuk menolak relokasi adalah bahwa mereka sudah lama tinggal di dusun mereka. “*Pokoke nunggoni utah darah ngoten (pokoknya menunggui tumpah darahnya),*” kata Pak Diro, Ketua RT 1, Sambungrejo, Dusun I, Balerante. Mereka merasa biasa dan bisa hidup berdampingan dengan Merapi, kenal, dan hafal dengan ‘sifat-sifat’ Merapi.

Saat ini, meski wilayah mereka termasuk ke dalam wilayah yang terkena dampak langsung erupsi Merapi, namun menurut mereka masih bisa ditinggali. Seperti yang diutarakan Pak Nur, dengan memandingkan kondisi dusun mereka dengan Kinahrejo (Sleman) dan Glagahharjo (Sleman) yang hancur dan terkubur material Merapi.

“Kalau tempatnya Mbah Marijan (Kinahrejo) itu terkubur material, kalau mau dihuni kembali itu namanya ‘khayalan’, materialnya juga sangat tinggi, seperti juga Glagahharjo, itu sulit kalau mau membangun rumah kembali. Materialnya harus disingkirkan dulu. Daerah sini (dusun I) kan hanya terbakar saja dan tidak tertutup material”

Pernyataan ini ditambahi oleh perkataan warga lain yang percaya bahwa dusun mereka relatif aman dari erupsi Merapi, dan bila terjadi lagi karena banyaknya perbukitan yang dianggap mampu menahan laju awan panas dan debu vulkanik. Selain itu keberadaan Sungai Gendol dan Sungai Woro yang mereka anggap cukup dalam diperkirakan masih mampu menampung material Merapi di saat lahar panas datang atau banjir lahar dingin.

Namun, warga seperti Pak Nur juga sadar bahwa sewaktu-waktu Merapi bisa juga ‘membunuh’ mereka:

“Memang benar nanti kalau meletus lagi akan membunuh orang, apalagi kalau besar, kemarin saja sudah membunuh orang. Tapi besok pasti ada

tanda-tanda, warga sini belum tahu secara pasti seperti apa tanda-tanda itu. Tapi pasti nanti kami akan mengerti. Itu pun kalau tidak 'dipanggil sama yang kuasa'. Dan kalau 'dipanggil oleh yang kuasa' pas lagi tidur, yah nggak apa-apa''.

Warga lain juga menyatakan hal yang hampir sama, bahwa mereka telah dilahirkan di bumi Merapi dan jika memang mereka ditakdirkan mati di tempat mereka bisa menerima.

Pandangan yang nampak fatalistik ini, sebenarnya juga didukung oleh keyakinan bahwa mereka telah secara konsisten memperhatikan keselamatan, petunjuk, dan himbauan pemerintah dalam menghadapi ancaman erupsi Merapi. Mereka merasa bahwa mereka sudah cukup tanggap dan siaga menghadapi ancaman bencana Merapi dan bisa mengurangi resiko bencana Merapi. Mereka telah memperlengkapi diri dengan peralatan komunikasi sebagai bagian dari sistem peringatan dini (HT, menara pengawas/pemantau), alat transportasi berupa sepeda motor dan angkutan roda empat, posko-posko ronda pemantauan Merapi, jalur evakuasi, dan titik kumpul yang diharapkan mampu meminimalisasi terjadinya korban apabila setiap saat terjadi bencana erupsi seperti tahun 2010.

7.5.2.3 Hidup dan Penghidupan

Wilayah dan tanah warga Dusun I, Balerante, bukan semata-mata tempat mereka hidup, tetapi juga tempat mereka mencari penghidupan. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai petani, peternak, penambang pasir, dan bentuk-bentuk penghidupan yang 'terikat' dengan lingkungan mereka. Dengan demikian proses relokasi bisa menjauhkan mereka dari penghidupan mereka.

Alasan seperti ini juga diungkap oleh Pak Zainu, Kepala Dusun I yang merangkap Kepala Urusan (kaur) Pembangunan Desa Balerante. Sebagai perangkat pemerintah, ia sendiri meragukan apakah relokasi bisa dijalankan dengan hanya memindah pemukiman dan lahan pertanian (dengan luas yang jauh lebih sedikit):

"Itu kan (relokasi) sama saja dengan pemerintah itu membunuh masyarakat. Masyarakat nggak punya keahlian, mereka bisa bertani dan beternak, tetapi kan 200 meter persegi yang diberikan untuk relokasi itu bisa apa? Apa bisa beternak? Apakah bisa bertani? Saya juga sudah pernah sampaikan kalau tanah di atas itu dijadikan hutan lindung, dibeli

pemerintah, sebelumnya mereka hidup dari bertani dan beternak, apakah pemerintah sanggup memberikan pekerjaan bagi mereka? Nggak sanggup” (Pak Zainu, Kadus I, Kaur Pembangunan Desa Balerante).

7.5.2.4 Program Rekontruksi Dari LSM dan Swasta

Program rekontruksi dari LSM bekerja sama dengan swasta yang cukup menonjol di Dusun I, Balerante adalah program pembangunan rumah semi permanen untuk warga yang rumahnya tidak bisa ditempati sama sekali (robok). Program ini berasal dari Yayasan Klaten Peduli Umat (YKPU) dengan donatur CIMB Niaga dan Al-Azhar Jakarta. Muhammadiyah ikut serta dalam pembangunan sebagian rumah semi permanen tersebut. Bangunan semi permanen tersebut dibangun oleh relawan-relawan YKPU bekerja sama dengan pemuda dusun yang ingin belajar dan berlatih pertukangan. Selain itu, ada rencana dari Kompas untuk membantu membangun kembali rumah warga. Namun, hingga saat ini rencana itu tidak pernah terlaksana, karena Kompas mengikuti kebijakan pemerintah yang menetapkan Dusun I, Balerante sebagai KRB III dan tidak boleh ada rekontruksi rumah atau perbaikan infra struktur.

Sementara itu, SCTV dan XL hanya membantu memberikan 25 bibit tanaman kepada setiap KK untuk ditanam di sekitar lahan mereka, yang pohon-pohonnya telah rusak diterjang awan panas. Jenis tanaman yang diberikan bermacam-macam, seperti cengkeh, mangga, durian. Bibit pohon itu diberi bandrol bertuliskan SCTV dan XL yang tidak boleh diperjualbelikan. Selain mereka juga membagikan 50 buah cangkul berlogo SCTV dan XL untuk RT, warga pun dibayar sebesar Rp 25.000,00 untuk menanam di kebunnya. Karena hanya sedikit, maka tidak dibagikan ke warga. Saat acara peresmian, SCTV juga mengadakan acara di daerah Banjarsari (RT 5) dengan mengundang Syahrini. Di samping itu para pejabat seperti bupati, kapolres, dan perangkat pemerintah ikut menanam pohon yang diberi bandrol logo XL dan SCTV. Pohon-pohon kecil itu saat ini nampak merana, kering, dan kurang perawatan.

Salah satu kebutuhan yang cukup mendasar bagi warga Dusun I adalah ketersediaan air bersih. Erupsi Merapi tahun 2010 telah menutup sumber mata air warga yang berasal dari Kali Bebeng. Pipa-pipa air untuk mengalirkan air dari mata air itu juga rusak. Material Merapi yang menutup mata air tersebut tingginya

sampai enam meter. Adalah Dian Desa, sebuah LSM dari Yogyakarta yang kemudian membantu warga untuk mengangkat material yang menutup mata air tersebut dengan bantuan alat berat. Selama mata air tersebut tidak berfungsi, warga Dusun I memenuhi kebutuhan akan air bersih dengan membeli dan menampungnya dalam tangki-tangki, yang sebagian juga bantuan dari perusahaan, seperti perusahaan penyedia layanan telekomunikasi Simpati. LSM lain, seperti Lestari, memberikan bantuan yang tidak terlalu berhubungan dengan proses rekonstruksi. Mereka memberi bantuan berupa peralatan olahraga badminton: empat buah raket, satu net, satu set bola bulutangkis, dan perlengkapan tenis meja. Namun tidak banyak warga yang bisa bermain tenis meja. Bantuan ini menurut warga adalah bagian dari program pemulihan *psiko-sosial*.

7.5.2.5 Gotong Royong dan Rekonstruksi Mandiri Warga

Warga Dusun Sambungrejo rupanya tidak perlu menunggu bantuan pemerintah, LSM, atau swasta dan tidak perlu kepastian apakah wilayah mereka boleh dihuni atau tidak. Hal ini karena sejak sekitar bulan Agustus 2011, mereka mulai membangun kembali rumah-rumah mereka yang roboh atau rusak berat dengan mengusahakan dana sendiri dan bergotong-royong.

“Relawan mriki sami maju (relawan warga sini sama-sama maju), saya tidak mengeluarkan uang sendirian untuk membangun rumah saya ini. Pasang batako bawah 6 hari jadi. Itu sudah sama pasang kayu. Di RT ini dan RT 2 (Gondang) bukan hanya pemuda yang ikut bekerja, sehari bisa datang 15 orang atau 12 orang ikut membantu membangun rumah ini. Saya sampai bingung, material belum siap, tenaganya sudah datang dan banyak. Padahal saya tidak menyuruh. Pemuda dan orang sini sore-sore sering ngumpul di depan masjid, jadi di sini gampang, tinggal bilang terus mereka bergerak. Material sudah saya siapkan, tetapi papan-papan buat ngecor saya tidak punya, harus nyari pinjaman. Material dikumpulkannya juga mendadak, semuanya tenaga gotong-royong. Di sini buat rumah seperti saya, punya uang 10 juta sudah cukup, tapi seperti ini tidak ‘dilepo’, tapi di bawah sana punya uang 20 belum bisa. Fondasi sudah ada, bekas dulu. Cuma beli batakonya. Dan beli buat cor”

Sampai saat ini, kurang lebih sudah 40 rumah lebih dibangun kembali atas prakarsa warga sendiri dan sebagian besar dana dari warga sendiri. Pak Nur sendiri bekerja sebagai tukang kayu dalam proses pembangunan rumah-rumah tersebut. Dia mendapatkan bayaran untuk itu, tetapi dia mengaku tidak mengambil

semua upahnya : *”Kadang lima hari kerja saya dibayar Rp 250.000,00 saya kembalikan Rp 100.000,00 atau Rp 50.000,00,”* ujarnya.

Sebagian warga ada yang menggunakan bantuan dana dari pemerintah sebesar Rp 7.500.000,00 untuk rumah yang roboh dan Rp 5.000.000,00 untuk rusak berat untuk menambah biaya pembangunan rumah mereka. Peruntukan dana tersebut sepertinya juga tidak terlalu jelas. Ada warga yang diberi tahu bahwa dana tersebut bukan untuk pembangunan atau perbaikan rumah, melainkan untuk pemulihan ekonomi. Sementara Pak Nur memiliki pengalamannya sendiri dengan mengatakan, *”Saya ..menggunakan bantuan 7.5 juta dari pemerintah itu untuk beli sapi..ha..ha..ha dan sekarang masih ada.”*

Gambaran lain, bagaimana warga membangun rumah mereka sendiri, hal ini dapat dicermati dari cerita Ibu Sido:

Saat masuk pekarangan rumah Ibu Sido, saya bisa melihat dua gundukan batu-batu kali, yang merupakan sisa dinding rumah yang diterjang awan panas. Kemudian saya melihat beberapa tumpuk balok kayu. Rumah ibu yang dibangun dengan biaya sendiri ini berbahan dasar batako. Pembangunan rumah ini dibantu oleh para keponakan Ibu Sido (Ibu menyamakan mereka dengan relawan). Bagian rumah ibu yang masih tersisa hanya fondasi dasar dan bak penampungan air. Ibu mengatakan dulu saat membangun rumah yang lama, bahan dasar berupa batu kali diambil dari Kali Woro. Warga yang membangun rumah bebas mengambil batu yang ada di Kali untuk membangun rumah. Mereka hanya membayar biaya angkut dari kali ke lokasi rumah. Batu itu pun dipecah oleh keluarga yang bersangkutan. Untuk bahan bangunan, ibu membeli Batako seharga Rp 1.700,00 dan genting seharga Rp 2.200,00. Pintu depan rumahnya dibuatkan oleh bapak mertua. Dua anak mertuanya yang laki-laki (termasuk suaminya) juga pandai di pertukangan, katanya jendela rumah yang dulu juga dibuat oleh suaminya.

Pembangunan kembali dan perbaikan rumah warga secara mandiri oleh warga Dusun 1 Balerante dengan menggunakan taktik tersendiri ketika harus berhadapan dengan otoritas pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Zainu, terlepas dari ambiguitas posisinya. Taktik itu bisa tergambar dalam cerita pertemuan Pak Nur dan Pak Zainu ketika Pak Nur hendak memulai membangun rumahnya kembali:

Saya waktu itu masih diminta menjaga rumah Pak Zainu. Siang-siang saya menurunkan pasir dan meminjam batako. Saya capek kan, nurunkan

pasir dapat dua rit ngangkat batako juga dapat dua rit. Waktu saya pulang ke tempat pak Zainu saya ditanya:

“Yah ngene lagi mulih seko endi, Mas? Tas ngarit po piye?”

“Ora, tas langsir pasir karo batako..”

“Lha..arep dienggo opo?”

“Arep gawe eplek-elek.... arep genepi kayu..wis ra duwe omah..mengko kayu sing bekas omah biyen ..ra iso digawe opo-opo nek kerendengan bosok..eman-eman..sesok nek arep gawe omah ora duwek kayu”

“Lha arep gawe omah opo kandang?”

“Arep gawe omah”

“Ojo sik!!!”Mboten entuk karepe. “Batakone ojo ta pasang sik..le gawe omah sapenake..soale daftare (bantun dari pemerintah) wis kebacut mlebu”.

“Ora dikei soko pemerintah ya ora opo-opo, wong sing butuh omah ora ming aku, sing liyane okeh..engko ditibake sijine. Sijine sing butuhke omah okeh. Wargane.” Kulo ngoten.

“Ya ora..kuwi daftare kebacut mlebu” ...

“Ngoten..terus piyambake kesah..”

“Ngepit..buanter ngidul..mboten eneng lima menit pun balik ngalor”

“Mas batakone ora dibenahke sek..sesok ora dikei pemerintah..”

“Ora dikei ora opo-opo..kulo ngaten”

“Ora ojo tak benahi sik..nek ora digawe pemerintah..engko nak nyalahke pemerintah”

“Lho kapan aku nyalahke pemerintah? Koyo-koyo aku didawuhi opo wae aku yo mangkat. Aku dikon jadi KPPS pirang taun wae aku yo gelem. Neng opo kok aku nyalahke pemerintah? Wong cilik kok iso nyalahke pemerintah..kulo ngeten mawon..Aku rakyat! Kulo ngoten mawon..wah kulo rosone,,ngatiku..nek kulo gagas negen: umpomo sing ra duwe omah ki Pak Zainu..terus dingonoke ki rasane kepiye?...gandeng kulo kalian Pak Zainu ku dulur.. keponakan.. jadi kulo piker santai.. pikir coro tuwo..mboten grusa grusu..ning sak penake..mendang kira-kira pun siap..kulo meneng mawon..terus nambahi fondasi mriki..awan kunco kulo pun teko..ngewangi..sesok saokehe sing teko..ngaten iku pak..”

Cerita pertemuan dan perbincangan antara Pak Nur dengan Pak Zainu di atas dengan baik bisa menunjukkan bagaimana posisi antara Negara dengan warga dalam melakukan program rekonstruksi. Posisi yang melibatkan strategi Negara dan taktik warga, seperti yang akan diungkap di sub bab berikut ini.

7.5.2.6 Relokasi: Strategi, Syarat, dan Taktik

Relokasi warga dari wilayah terdampak dan KRB III dipandang dan dirancang oleh Negara sebagai ”strategi rehabilitasi dan rekonstruksi”. Sebagai strategi ia seolah dirancang dengan penuh perhitungan rasional, dan salah satunya

adalah bahwa pemindahan warga dari lokasi terdampak erupsi Merapi dan KRB III dapat mengurangi resiko dan ancaman Merapi.

Namun, warga mempunyai perhitungan rasional yang berbeda. Mereka menganggap ‘strategi relokasi’ sebagai ‘permintaan’ (*njaluk*); negara ‘meminta’ rumah, tanah, dan lahan mereka. Permintaan ini dijadikan “prasyarat” untuk proses rekonstruksi; pembangunan dan perbaikan rumah, serta pemberian lahan. Permintaan ini dianggap tidak rasional dan sepadan karena harga ganti tanah dan luas lahan di lokasi relokasi tidak sepadan dengan apa yang dimiliki warga saat ini. Lebih jauh dari itu, relokasi tidak bisa menggantikan kehidupan sosial (relasi sosial, perkawinan, kekerabatan, dan sebagainya) dan terutama mengancam penghidupan mereka yang ditopang oleh lingkungan di mana mereka tinggal saat ini (pertanian, peternakan, dan penambangan pasir). Ketika warga mengajukan prasyarat yang lain yang menurut mereka lebih rasional dan sepadan, Negara tidak bisa memenuhinya.

Selain itu, Negara juga tidak ‘tunggal’ karena terdapat banyak posisi yang terlibat di dalamnya. Sosok Pak Zainu, misalnya, adalah perangkat pemerintah yang sekaligus menjadi warga yang bertempat tinggal di wilayah yang harus direlokasi. Ia berada pada posisi dilematis sehingga dia kerap bersikap mendua. Antara menolak relokasi, namun juga ‘meminta’ warga untuk tidak segera membangun kembali rumah mereka dan menggunakan wacana bantuan agar warga menunda pembangunan rumah mereka. Atau, paling tidak, di lain kesempatan ia menganjurkan warga kalau memang mau tetap membangun kembali rumah mereka, paling tidak jangan membangun rumah mereka menjadi lebih bagus agar memungkinkan untuk ditinggalkan sesekali bila erupsi terjadi.

Namun, warga, seperti Pak Nur, memasang taktik dengan ‘menolak’ tawaran bantuan tersebut dan berargumen bahwa tindakannya tidak ‘melawan pemerintah’. Ia dan warga lainnya tetap tidak menerima strategi dan syarat relokasi dan tetap membangun kembali rumah mereka secara mandiri dan gotong-royong. Bagi Pak Nur tindakannya bukan upaya ‘melawan pemerintah’ karena dia hanya membangun kembali rumah dan lingkungan mereka di tanah milik mereka sendiri.

Sementara, di sisi lain, pihak swasta dan NGO, dalam proses rekonstruksi lebih banyak sejalan dengan rencana pemerintah dengan menunda atau membatalkan bantuan rumah. Selain itu mereka juga memberikan bantuan yang tidak berhubungan dengan proses rekonstruksi, seperti bantuan alat olahraga atau penghijauan dengan mengundang pejabat dan artis.

7.6 Rekonstruksi Sektor Infrastruktur

Dari berbagai sektor infrastruktur, komponen yang dianggap vital untuk diperbaiki agar ekonomi masyarakat cepat pulih adalah: “perbaiki jalan, jembatan putus, dan air bersih”. Dari penelusuran *base-line* data di 30 dusun lokasi penelitian mengenai program rekonstruksi jalan dusun, terungkap sebagian besar warga tidak bisa ‘menilai’ besaran dana yang digunakan. Mereka hanya memperkirakan jumlahnya, atau menilai ‘besar’ atau ‘kecilnya’. Penilaian ini juga didasari oleh minimnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai jalan dusun yang dibangun melalui proyek dari inisiatif pihak luar seperti PNPM. Rendahnya partisipasi tersebut karena jalan tersebut tidak dirancang dari komunitas. Hal ini nampak pada kasus jalan di Dusun, Jamuran. Jalan tersebut dibangun dengan dana dari PNPM sepanjang dua km jarang sekali digunakan oleh masyarakat untuk memperlancar mobilitas dan penunjang pemulihan ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena jalan ini bukan jalan utama bagi warga dan letaknya berada di pinggir jurang. Menurut keterangan Kepala Dusun (Pak Bayan) Jamuran, jalan tersebut memang lebih diperuntukkan untuk jalur evakuasi dan bukan untuk menunjang aktivitas sehari-hari warga. Meski jalan tersebut berada di pinggir jurang, namun ia lebih lebar dari pada jalan dusun, sehingga bisa dilalui mobil.

Sementara itu, nilai kerusakan di sektor air bersih karena erupsi Merapi, berdasarkan naskah Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Merapi, mencapai Rp 14.300.000.000,00 yang terdiri dari sumber air bersih, sistem dan jaringannya. Selain itu juga menimbulkan kerugian sebesar Rp 300.000.000,00 di mana sekarang masyarakat tidak dapat memanfaatkannya lagi. Oleh karena itu warga

harus mengambil air dari sumber yang lain, yang jaraknya lebih jauh atau bahkan mereka harus membeli (Bappenas dan BNPB, 2011: 31).

Salah satu program air bersih yang dilaksanakan adalah “Program Air Minum Berbasis Masyarakat” (PAMSIMAS) yang sudah dimulai sejak tahun 2009. Ketika terjadi erupsi, program ini dihidupkan kembali untuk memperbaiki fasilitas yang ada. Berikut adalah salah satu penduduk Dusun Babadan Bawah mengenai program ini:

Kemudian saya menanyakan tentang bak penampungan berwarna di tengah pemukiman yang saya lihat kemarin. Bak penampungan itu merupakan bantuan dari PAMSIMAS. Bangunan itu didirikan pada tahun 2009. Saat saya menanyakan singkatan dari PAMSIMAS kepada Pak Bambang, dia kelihatan sedikit bingung. Namun akhirnya dia bisa mengingat singkatannya, yaitu “Program Air Minum Berbasis Masyarakat”. Namun, saat ini air tidak mengalir ke dalam bak pembagi tersebut karena bak penampung dan pipa-pipa yang ada di Kali Tlising rusak total. Belum ada perbaikan yang dilakukan warga.

Soal air, saluran air diatur per kelompok. Pralon ukuran sedang kalau pralon besar, berisiko tidak merata. Kelompok sepralon berdasarkan kedekatan rumah. Air dari Tlingsing dan saluran utamanya adalah mata air. Tiap lingkungan (kelompok) membuat sendiri saluran air hingga ke rumah. Diameter pralonnya 0,5 Dim. Dari dusun ke sumber air jaraknya kira-kira 2,5 km. Jadi biaya pipa tinggal dibagi per kelompok. Pemeliharaan juga diatur oleh kelompok. Misalnya ada yang rusak dan ada yang berkala memeriksa keadaan pipa secara bergilir. Tahun 2008 pengadaannya menghabiskan Rp 400.000,00 per keluarga dengan jumlah anggota kelompok: 30 KK. Tidak ada bantuan dari pemerintah dalam pengadaan air ini. Tandon yang ada dari Yayasan Djarum sekarang menjadi tandon air dari mata air. Memang karena erupsi, pipa banyak rusak dan penanganan sumber air dibuat dalam bentuk darurat. Djarum membuat 40 bak sebagai PAH (Penadah Air Hujan). Setiap bak untuk 5-6 KK.

Bak penadah hujan dari PT. Djarum yang disalurkan lewat Lembaga Swadaya Masyarakat LPTP-Insist dibangun bulan Februari 2011. PT. Djarum menyerahkan bantuan berupa material dan uang kepada warga. Material yang diberikan adalah besi, semen, dan batubata. Djarum juga memberikan uang sebesar Rp 400.000,00 kepada kelompok warga. Warga diminta secara swadaya menyediakan pasir dan batu, yang pembeliannya berasal dari uang bantuan tersebut. Warga membeli pasir dan batu di kawasan Bandung, Desa Ngampel.

Untuk membangun satu penampungan berkapasitas 5000 liter ini, warga membutuhkan waktu sekitar 10 hari. Lamanya pembangunan ini karena warga memiliki pekerjaan lain di tegalan.

Karena air di penampungan ini berasal dari air hujan, maka saat musim kering penampungan menjadi kering. Kemudian bantuan pipa air yang berasal dari seorang romo Katholik (di daerah Sumber), yang sempat diberikan sebelum erupsi, digunakan untuk menyalurkan air dari Tuk Tlising. Pak M dan istrinya sempat mengatakan, walaupun bantuan tersebut dari pihak Agama Katholik, mereka tetap menerimanya. Menurut mereka, setiap agama memang memiliki jalan yang berbeda-beda, namun mempunyai tujuan yang sama.

7.7 Rehabilitasi (Pemulihan)

7.7.1 Pemulihan Sosial

7.7.1.1 Ekonomi Produksi

Bencana Merapi menyebabkan kerugian yang luar biasa bagi warga yang terdampak. Salah satu bentuk kerugian adalah hilangnya sumber penghidupan yang selama ini menjadi tumpuan hidup. Dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap alam, terutama untuk sektor agraris dan primer lainnya, perubahan ekologi Gunung Merapi akibat erupsi memberikan dampak yang penting bagi kehidupan ekonomi warga. Pemulihan ekonomi pasca erupsi dilakukan oleh warga baik secara pribadi maupun melalui bantuan dari berbagai pihak. Mereka yang sebelumnya berprofesi sebagai petani, peternak sapi perah, dan penambang pasir, harus mampu beradaptasi dengan bentuk-bentuk pengorganisasian baru dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi dengan perubahan ekologi ini.

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gunung Merapi DIY dan Jawa Tengah oleh Bappenas dan BNPB menaksir nilai kerusakan dan kerugian sektor ekonomi per Desember 2010 adalah Rp 803.550.000.000 atau mencapai sekitar 14,96% dari total kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh erupsi Merapi. Penilaian terhadap kerusakan dan kerugian pada sektor ekonomi merupakan penilaian yang diambil dari kumpulan aktivitas sektor pertanian

tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, kehutanan, perkebunan, industri kecil rumah tangga dan koperasi, pasar, dan pariwisata.

7.7.1.1.1 Pertanian dan Perkebunan :

“Nek saking pemerintah niku, mriki niku mboten tau onten saking pemerintah.”

Pengetahuan mengenai budidaya tembakau diusahakan secara mandiri oleh warga di Jamuran (Kemalang, Klaten). Pemerintah sangat jarang, kalau tidak boleh dibilang tidak pernah, memberikan penyuluhan pada warga petani. Warga bahkan menganggap pemerintah tidak banyak berbuat bagi pertanian mereka. ‘[L]embaga’, demikian warga selalu menyebut pihak luar, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), justru pernah memberikan penyuluhan pertanian. Warga beranggapan jika berhubungan dengan pemerintah itu rumit dan prosesnya lama.

“Mriki niku nek saking Dinas Pertanian saking pemerintah niku malah mboten onten kok mba. Nggih kerjasama kalih lembaga-lembaga sanese niku. Pendamping ngoten. Nek saking pemerintah niku, kula gih malah jare arep ana penyuluhan saking Dinas Pertanian barang, tapi kok durung ngalami penyuluhan-penyuluhan teng masyarakat. Carane pertanian, dibudidayakan, peningkatan niku nek saking pemerintah mboten onten. Saking lembaga.”

Lembaga yang disebut warga pernah memberikan penyuluhan pertanian tembakau adalah seperti YEU dan CD Bethesda.

“Nek saking pemerintah niku malah mboten. Kula niku mboten ngritisi pemerintah tapi nek danane malah angel. Ngajuk’ke teng pemerintah niku nganti nyebahi. Mboten onten tindak lanjut. Padahal saking pemerintah pusat niku lak onten penganggaran. Dana niku onten.”

Warga merasa memiliki kemudahan berurusan dengan LSM karena prosedur yang ditempuh hanya mengajukan proposal permohonan penyuluhan pertanian di wilayah mereka. Beberapa perwakilan warga kemudian diundang untuk diberi pembekalan oleh LSM selama satu hingga tiga hari. Selama pembekalan, warga juga mendapatkan uang ganti sebesar tarif kerja/tarif *glidik* per hari. Penyuluhan yang dilakukan LSM biasanya hanya diberikan pada perwakilan warga untuk kemudian disampaikan dan disebarakan kepada petani-

petani lain. Pihak LSM membentuk kader-kader pertanian untuk menularkan ilmu yang telah didapat dari penyuluhan kepada para petani yang lain.

Selain dalam bentuk penyuluhan kader, bantuan juga berbentuk pengguliran dana untuk menopang aktivitas pertanian dan peternakan. Dompot Dhuafa melalui Pertanian Sehat Indonesia adalah salah satu organisasi yang memperdayakan petani dalam kegiatan sektor pertanian hortikultura (misalnya: cabai, tomat, *enthik*, selada) dan budidaya jamur di wilayah Umbulharjo (Cangkringan, Sleman) (<http://pertaniansehat.com>, 19/4/2012). Program ini melibatkan 80 mitra dari warga setempat yang terdampak erupsi Merapi. Mereka terbagi dalam lima kelompok tani hortikultura yang tergabung di Induk kelompok Tani (Inpoktan) Mitra Tani dan tiga kelompok tani jamur yang tergabung dalam Inpoktan Trio Manunggal. Dana yang digulirkan sebesar Rp 99.100.000,00 untuk Inpoktan Mitra Tani dan Rp 127.250.000,00 untuk Inpoktan Trio Manunggal. Dana ini dikelola secara berkelompok dan menjadi aset bergulir di masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Bantuan teknis juga diberikan oleh pihak universitas seperti yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan memberikan pelatihan pembuatan kompos padat maupun cair kepada penduduk Desa Keteb, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang (<http://www.umy.ac.id>, 17/12/2010). Bantuan ini diberikan dengan pertimbangan untuk membantu memulihkan tanaman sayur warga yang sempat rusak akibat erupsi Merapi. Sementara sebagian kecil tanaman rusak digunakan untuk pakan ternak, dan bagian terbesar lainnya bersama dengan sampah organik rumah tangga menjadi bahan pembuatan kompos. Dengan siklus tanaman sayuran yang relatif pendek, warga akan memperoleh pemasukan untuk biaya hidup sehari-hari di tengah kesulitan pasca erupsi Merapi.

7.7.1.2 Usaha Kecil dan Menengah

“Kula dereng dangu nika nggih rekane buka warung, tapi terus mboten payu nggih kula males. Barang-barange kula deleh shelter. Untunge niku dimodali saking Dian Desa. Wong warung kula ingkang riyin kan tasih, ning pas dibuka kaliyan adi kula, barang-barange sampun telas. Terus kula dihubungke kaliyan Dian dana. Angsal modal kula nggih damel warung. Ning nggih mboten payu. Hlawong masyarakat tesih mungghah

medhun, shelter. Dados nggih dereng stabil. Untung modal mboten harus dikembalikan, menawi mboten nggih rugi kula. Setelah niku kula pun mboten dodol malih. Kula milih golek kayu ngewangi bapak ne, daripada nglangut.” (Sumirah warga Kopeng, Cangkringan, Sleman)

Dian Desa merupakan organisasi bukan-pemerintah yang sudah lama melakukan banyak kegiatan sosial di wilayah lereng Merapi, terutama Cangkringan. Anton Sudjarwo sebagai tokoh yang sangat dekat dan dikenal oleh warga Cangkringan adalah salah satu aktivis Dian Desa. Lewat Dian Desa, Anton Sudjarwo memberikan bantuan modal kepada para ibu di Kopeng.

Organisasi Integrated Community Shelter (ICS) membantu masyarakat di Dusun Gondang Legi, Padukuhan Pandan Purwo, Hargo Bunangun (Pakem, Sleman) dengan mengembangkan usaha dalam budidaya burung kenari, jamur, usaha perdagangan, dan hortikultura. Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha pada warga yang tinggal di Hunian Nyaman Terpadu/ICS sebesar Rp 1.000.000,00-Rp 2.000.000,00 kepada setiap kepala keluarga (KK) sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terdapat 27 KK yang saat ini didampingi oleh organisasi ini. Beberapa warga dengan usaha sama membentuk kelompok beranggota lima KK. Bantuan ini mampu menjadi kekuatan pemulihan bagi warga yang kehilangan hampir seluruh aktivitasnya akibat bencana Merapi. Berbagai kegiatan untuk memulihkan sektor ekonomi juga difasilitasi oleh Dompot Dhuafa melalui Program Masyarakat Mandiri dengan menggulirkan pembiayaan usaha sebesar Rp 225.000.000,00 (<http://www.masyarakatmandiri.org>, 14 April 2012). Program ini digagas untuk menjangkau 114 KK dari Desa Umbul Harjo (Cangkringan, Sleman). Mitra yang digandeng dalam program ini adalah kelompok pengrajin batu, pengrajin makanan ringan, pengrajin logam, dan pengelola warung wisata. Warga yang menerima dampingan dari bantuan ini bergabung dalam lembaga lokal bernama Ikhtiar Swadaya Mitra (ISM).

7.7.1.3 Dinas Sosial : Kredit Usaha Bersama (KUBE)

Peran negara dalam pemulihan ekonomi umumnya dilakukan melalui kantor kementerian dan kantor dinas. Bentuk kegiatan dalam pemulihan ekonomi

berupa program dan bantuan secara langsung. Di antaranya adalah Kredit Usaha Bersama (KUBE) yang ditemukan di Kinahrejo, Sleman.

Tabel 7.5
Peran Negara Dalam Pemulihan Ekonomi di Kinahrejo, Cangkringan, Sleman

Lembaga Pemerintah	Bentuk Program/Bantuan	Jumlah Warga Yang Dilibatkan
Dinas Peternakan DIY	Lele, sayur, ayam	
Kredit Usaha Bersama (KUBE) untuk Dagang	Penyediaan dana untuk fasilitas simpan pinjam; tabungan.	Untuk tiga kelompok (@10 orang)
Kredit Usaha Bersama (KUBE) untuk Peternakan Sapi		Untuk sepuluh orang

Sumber: Data Kualitatif LAURA

KUBE Dagang di Kinahrejo (Cangkringan, Sleman) digerakkan oleh Bu Siti. Kriteria penerima KUBE Dagang ditentukan melalui, dan diberi pada anggota, forum *yasinan*. Terdapat tiga kelompok yang masing-masing beranggota sepuluh orang dan setiap kelompok diberi kepercayaan mengelola dana sebesar Rp 20.000.000,00. Uang tersebut dikelola untuk kegiatan arisan dan simpan-pinjam. Jika seseorang menerima pinjaman sebesar Rp 100.000 maka peminjam dikenakan bunga sebesar Rp 1.000,00 (1 per sen). Dengan dana sebesar Rp 20.000.000,00 setiap kelompoknya, anggota menyisihkan Rp 6.000.000,00 di BMT. Simpanan ini dimaksudkan untuk simpanan bersama sebagai antisipasi jika skema perputaran uang tidak berjalan sesuai rencana. Menurut Bu Siti, KUBE yang dikelola warga merupakan dana hibah. Dengan demikian, dengan mengutip pendamping, tidak ada kewajiban warga untuk mengembalikan pada pemberi dana. Jika KUBE gagal, maka kelompok dibubarkan dan sisa uang dibagikan pada para anggota kelompok. Sekalipun demikian, Bu Siti sebagai koordinator berpendapat bahwa jika terjadi kegagalan, lebih baik dana yang tersisa tetap dikelola bersama agar produktif. Pengalaman yang ada selama ini telah menunjukkan bahwa warga Kinahrejo memiliki sistem pembukuan yang cukup baik dalam mengelola KUBE. Saat ini, siklus perputaran uang telah memasuki gelombang kedua.

KUBe juga diberikan untuk budidaya peternakan sapi, seperti misalnya di Turgotegal (Pakem, Sleman). Selain memudahkan pengembangbiakan ternak, bantuan kredit ini juga memiliki dampak berantai (*multiplier effect*) pada sektor pertanian. Di Turgotegal, selain beternak, warga juga membudidayakan lombok atau cabai dengan pertimbangan harga komoditi ini yang cukup baik sehingga layak menjadi andalan pertanian dusun. Salah satu dari mereka adalah keluarga Suwaji yang memiliki lahan pertanian seluas 3000 m², yang selain lombok rawit (*Capsicum frutescens*) dan lombok kriting (*Capsicum annum L*), juga ditanami pelbagai tanaman sayur seperti terung (*Solanum melongena L*), ketela pohon (*Manihot esculenta Crantz*), dan tomat (*Solanum lycopersicum*). Pada tahun 2011 harga cabai pasca erupsi di tempat lain sebenarnya cukup baik, yakni di atas Rp 15.000,00 per kilogram untuk lombok rawit dan Rp 25.000,00-Rp 30.000,00 per kilogram untuk lombok kriting.

Pada akhir tahun 2011 keluarga Suwaji menanam cabai kriting dan rawit dengan harapan pada awal tahun 2012 harga akan naik. Prediksi tersebut terbukti benar dengan harga cabai rawit per 1 Maret 2012 telah mencapai harga Rp 30.000,00 per kilogram dan harga lombok kriting mencapai Rp 25.000,00 per kilogram. Namun curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan kerusakan pada tanaman di mana daunnya layu dan kering, sehingga ia menderita kerugian yang cukup besar. Pada awal musim kemarau 2012, keluarga ini berkeinginan untuk kembali menanam lombok rawit dan lombok kriting ini dengan harapan pada Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2012 yang jatuh pada Bulan Juli dan Bulan Agustus harga produksi tanamannya dapat menjangkau harga tertinggi. Dengan demikian, kerugian pada kegagalan panen sebelumnya dapat tertutupi. Keluarga Suwaji mengaku senang bertani di sini karena kebutuhan pupuk kandang dapat terpenuhi dari para tetangga yang memiliki hubungan kerabat.

7.7.1.1.4 Kerajinan

7.7.1.1.4.1 Pembuatan Jamu Cepat-Saji di Jamuran, Kemalang, Klaten

ORA Merapi adalah Organisasi Rakyat Merapi yang pegiatnya adalah masyarakat lereng Merapi di wilayah Klaten. Awalnya ORA Merapi dibentuk di Deles, Desa Sidorejo yang berdekatan dengan Jamuran di Desa Tegalmulyo. ORA Merapi telah mempunyai hubungan kerja sama dengan CD-Bethesda sejak erupsi Merapi tahun 2006. Keterlibatan ORA Merapi dengan CD-Bethesda kemudian berkembang dengan pemberian pelatihan pembuatan jamu instan. Dengan konsep pemberdayaan, CD-Bethesda memberikan pelatihan kepada kader-kader. Salah satu kader dari Jamuran yang mendapatkan pelatihan adalah Pak Mul Srikoyo. Bersama kelompoknya yang mayoritas ibu-ibu di Jamuran, Pak Mul Srikoyo kemudian menularkan ilmunya. Dalam kelompok ini, mereka mencoba membuat industri kecil jamu cepat saji dengan nama “Sumber Waras“. Walaupun pemasaran jamu cepat saji ini belum maksimal, namun telah mampu meningkatkan pendapatan. Ibu-ibu bersemangat dalam memproduksi jamu instan ini.

Gambar 7.2
Jamu Instan Produksi Warga Jamuran



7.7.1.5 Perikanan

Budidaya ikan banyak dikembangkan pasca erupsi Merapi. Kegiatan pemulihan ekonomi ini merupakan program dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi DIY. Program paket bantuan budidaya lele dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi DIY bagi warga yang tinggal di *Shelter* Merapi merupakan

bagian dari upaya pemulihan ekonomi pasca erupsi. Dengan bantuan tersebut, diharapkan sektor perikanan dapat menjadi sektor penggerak pemulihan.

Hampir semua kepala keluarga (KK) korban erupsi Merapi yang mengungsi mendapatkan bantuan fasilitas budidaya ikan ini. Mereka dapat melakukan budidaya di lingkungan tempat tinggal mereka (jika masih mungkin) atau di lingkungan *shelter*. Bantuan untuk setiap KK ini berupa sebuah kolam terpal 4 x 6 m², 2400 ekor benih lele ukuran 30 seharga Rp 500,00/ekor, dan 144 kg pakan. Pihak Dinas memberikan satu pompa air untuk kolam kepada setiap 20 KK. Di *Shelter* Jenggala yang menampung warga Kinahrejo dan sekitarnya, hampir semua KK membuat kolam ikan di lingkungan *shelter* mereka. Warga Kopeng yang juga mengungsi di *Shelter* Gondang II, Kepuharjo, pun membudidayakan ikan lele di *shelter* mereka dan beberapa lainnya justru membudidayakan ikan di lingkungan tempat tinggal awal mereka. Jajaran kolam terpal lele warna biru akan terlihat di samping barisan rumah-rumah *gedhek* (anyaman bambu) berukuran 6x6 m² yang berjajar rapi di kawasan *Shelter* Jenggala. Kolam terpal ini milik warga Kinahrejo yang sudah tidak mungkin kembali ke tempat asal mereka. Selain di kawasan ini, hunian serupa juga didirikan di enam lokasi lainnya di sekitar kawasan bencana Merapi, yang keseluruhannya mencapai jumlah 2613 rumah.

Pemerintah berkeyakinan bahwa warga yang tinggal di *shelter* harus segera diberi kemampuan berproduksi agar dapat menciptakan sumber pendapatan bagi mereka sendiri. Seperti pernah disampaikan Sri Sultan Hamengku Buwono X saat melakukan kunjungan di *shelter* ini: “*Di shelter selain ada kandang sapi dan ayam, harus ada kolam lele. Sebab lele merupakan komoditas yang cepat menghasilkan, mudah teknologinya, dan tidak rewel soal air,*” (http://www.trobos.com/show_article.php?rid=15&aid=2798). Disampaikan juga oleh Bupati Kabupaten Sleman, Sri Purnomo, bahwa paket bantuan budidaya lele dari Pemerintah Propinsi DIY ini sangat sesuai dengan program tanggap bencana pemulihan ekonomi Merapi melalui penumbuhan UKM (Usaha Kecil Menengah) baru yang dicanangkan PEMDA.

7.7.1.1.6 Pariwisata :

7.7.1.1.6.1 “Wisata Bencana”

Bencana Merapi selain menghancurkan sarana dan prasarana fisik, juga membuka peluang usaha alternatif yaitu kesempatan pada pelancong atau wisatawan untuk meninjau lokasi bencana erupsi beserta masyarakatnya. Peluang ini kerap dikenal dengan istilah “wisata bencana”. Warga terdampak bekerja sama mengelola lokasi bencana menjadi tujuan pelancong atau wisatawan. Banyak yang bisa dihasilkan dari kegiatan ekonomi wisata ini. Wisata yang menyajikan romantisme Mbah Maridjan di Kinahrejo misalnya, dikelola warga secara bersama. Setelah erupsi, masyarakat mendirikan dua gardu pandang baru di Kinahrejo untuk mengamati Gunung Merapi yang dijadikan sumber keuangan warga setempat. Pengunjung yang mengakses fasilitas ini diwajibkan membayar uang retribusi. Di sekitar fasilitas ini, warga terdampak memanfaatkan kedatangan para pengunjung untuk berjualan sekedar makanan dan minuman kecil. Dengan demikian warga dapat memperoleh pendapatan alternatif sebagai akibat hilangnya lahan produktif akibat erupsi.

Sementara, di Kopeng, Cangkringan, Sleman, dengan membanjirnya pengunjung dengan berbagai tujuan ke desa mereka, warga menyediakan jasa pengantaran dengan sepeda motor (ojek) atau menjadi pemandu bagi pengunjung. Dengan berbekal motor dan kemampuan berbicara mengenai pengalaman mereka menghadapi bencana erupsi 2010, mereka dengan tegar menjelaskan peristiwa bencana secara runtut yang telah merenggut nyawa saudara mereka dan telah meratakan rumah-rumah mereka. Pemulihan ekonomi ini lebih bersifat mandiri. Mereka yang terdampak melihat peluang bahwa daerah mereka dapat dijadikan “lokasi wisata” yang dapat mendatangkan penghasilan bagi mereka.

Inisiatif untuk menggerakkan pariwisata juga didukung oleh organisasi masyarakat sipil, seperti dari Recovery Merapi Dompot Dhuafa (DMC-DD) pada 20 warga korban erupsi dari Dusun Pengkurejo, Yogyakarta. Bantuan tersebut berupa warung wisata yang disebut “warung ijo DD” berukuran 1,5mx1,5m dengan tinggi dua meter. Penerima juga mendapat stimulasi modal usaha sebesar Rp 1.000.000,00 yang memungkinkan mereka berjualan makanan dan minuman

ringan. Dengan usaha warung pariwisata ini warga dapat menghidupi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Sementara, peran pemerintah di sektor pariwisata terlihat dari komitmen Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk menganggarkan dana sebesar Rp 700.000.000,00 untuk perbaikan fasilitas pariwisata yang rusak di Kecamatan Selo.

7.7.1.2 Sektor Sosial

Erupsi Gunung Merapi telah menghancurkan serta melumpuhkan beberapa fasilitas sosial, termasuk puskesmas, tempat ibadah, sekolah, gedung pertemuan serta lembaga sosial budaya lainnya. Hancurnya sarana dan prasarana sosial ini menyebabkan terhentinya aktivitas masyarakat. Penilaian kerusakan dilakukan terhadap fasilitas sosial yang mengalami kerusakan baik berat maupun ringan sampai fasilitas tersebut kembali dapat digunakan seperti semula. Adapun penilaian kerugian dilakukan terhadap fasilitas sosial yang mengalami kerusakan sehingga potensi pendapatan atau pemasukkan retribusi dari fasilitas sosial tersebut terhenti. Taksiran yang dibuat oleh Bappenas dan BNPB untuk kerusakan sektor sosial adalah Rp 38.920.000.000,00, sedangkan kerugian sebesar Rp 22.320.000.000,00. Dengan demikian total nilai kerusakan dan kerugian adalah Rp 61.240.000.000,00. Di samping kerusakan sarana publik, beberapa kegiatan termasuk pula dalam pemulihan sektor sosial.

7.7.2 Pemulihan Psikologis

Pondok Pesantren Al Qodir turut aktif memberikan pendampingan pemulihan psikologis kepada korban erupsi Gunung Merapi di Cangkringan, Sleman, dengan memberikan ceramah keagamaan. Peran pendampingan sosial yang dilaksanakan organisasi keagamaan ini difasilitasi oleh seorang dermawan yang bernama Agus Choliq. Jauh sebelum erupsi Merapi 26 Oktober 2010 terjadi, PP Al Qodir telah memiliki jalinan kerjasama dan kedekatan dengan warga masyarakat di sekitar lereng Merapi khususnya di Kecamatan Cangkringan.

Pada saat erupsi terjadi PP Al Qodir yang diketuai oleh K.H Masyrul memutuskan untuk mendampingi warga yang berada di desa-desa di Kecamatan

Cangkringan yang menjadi korban terdampak erupsi Merapi. Pendampingan sosial dilakukan mulai dari tanggap darurat, pemulihan dini, hingga masuk pada fase pemulihan pasca bencana. Mekanisme pendampingan sosial yang dilakukan adalah dengan menempatkan tokoh-tokoh berpengaruh yang merupakan santri sebagai fasilitator yang masing-masing terfokus di lima desa. Dalam pelaksanaan di lapangan masing-masing pendamping melakukan pendampingan sosial dengan strategi dan teknik yang berbeda-beda (dalam: *Pendampingan sosial pada pelaksanaan pemulihan pasca Bencana erupsi gunungapi merapi*, Tri Suharti Matowani, Sst).

Sementara, warga Trono (Magelang) yang mayoritas beragama Islam melakukan pemulihan melalui kegiatan pengajian untuk mengembalikan semangat dan memperkuat akidah. Kegiatan pengajian untuk ibu-ibu dilakukan setiap Sabtu sedangkan untuk masyarakat umum dilakukan sekali sebulan. Kegiatan ini difasilitasi oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gelombang yang mendatangkan para ustad dan ustadzah. Warga sendiri sebenarnya sudah sering melakukan pengajian, namun bantuan sukarela dari para rohaniwan ini memberikan motivasi lebih pada warga untuk berperan serta. Apalagi kegiatan seperti pengajian dianggap sebagai kegiatan yang cukup baik dan bisa menjadi sarana belajar warga masyarakat mengenai agama. Sampai saat ini kegiatan semacam pengajian tetap dilakukan dan sesekali masih dihadiri oleh para sukarelawan dari LSM Gelombang. Warga sendiri sudah menganggap inisiatif dari LSM ini sebagai sesuatu yang positif (sumber: LAURA).

Selain itu, pemulihan psikologi khusus untuk anak-anak dilakukan oleh Rumah Pelangi di Dusun Stabelan (Selo, Boyolali). Pendampingan terhadap anak-anak juga dilakukan di Dusun Jamuran (Kemalang, Klaten) oleh Plan Indonesia yang bekerja sama dengan Yayasan Lestari Indonesia. Plan Indonesia mengajak pemuda setempat yang tergabung dalam Pemuda Sapu Angin membuat film dokumenter tentang anak-anak yang menceritakan kehidupan sehari-hari mereka yang sudah bersahabat dengan Merapi.

7.7.2.1 Pendidikan

Sebuah organisasi kepemudaan dari Jakarta yang bernama Gen A pada 18 Desember 2010 memberikan bantuan untuk memperkuat pemulihan di sektor pendidikan di Kelurahan Umbulharjo, Cangkringan, Sleman (<http://www.rakyatmerdekaonline.com.29/12/2010>). Organisasi ini menyumbangkan dua unit motor pintar yang masing-masing berisi 750 buku dengan beragam variasi judul. Motor pintar ini juga dilengkapi dengan satu unit komputer dan DVD sebagai sarana penunjang. Sumbangan ini ditujukan pada anak-anak putus sekolah akibat erupsi Merapi. Gen A juga menyebar anggotanya untuk memantau secara langsung program pendidikan yang dapat mereka jalankan selama masa pemulihan. Organisasi ini juga turut menyediakan layanan air bersih berupa 10 tangki air dengan kapasitas masing-masing 350 liter yang dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat.

7.7.2.2 Kesehatan

Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) adalah salah satu organisasi masyarakat sipil yang mengkhususkan diri pada pemberian bantuan di bidang medis. Program-program yang ditawarkan berkaitan dengan pemulihan masyarakat di sekitar lereng Gunung Merapi mencakup pembangunan sanitasi (MCK dan saluran air) dan program kesehatan (<http://www.mer-c.org>, diakses pada 15/5/2012). Pada tanggal 2 Januari 2011 MER-C mengadakan khitanan massal atas 44 anak di Puskesmas Kecamatan Turi. Program ini adalah salah satu kegiatan yang banyak diminta oleh warga berkaitan dengan pelayanan kesehatan, selain operasi bibir sumbing gratis, operasi katarak gratis, dan pembagian kaca mata alat bantu refraksi gratis. Bantuan lain yang diberikan MER-C adalah klinik bergerak (*mobile clinic*) ke beberapa titik pengungsian di daerah yang terimbas bencana erupsi Merapi dan *shelter* yang baru dibangun (<http://www.mer-c.org>, diakses pada 15/5/2012). Bantuan ini meneruskan layanan siap siaga 24 jam di beberapa pengungsian di Sleman, Yogyakarta, pada masa tanggap darurat. Beberapa tempat yang pernah didatangi oleh layanan klinik bergerak ini adalah daerah Plosorejo, Gondhang Legi, *Shelter* Punthuk dan Dukun. Bantuan ini

merupakan pendukung terhadap layanan puskesmas yang sudah ada selama ini namun kewalahan dalam menangani permasalahan kesehatan warga setempat.

BAB VIII

PEMBAHASAN: MENUJU PENANGGULANGAN BENCANA ALAM SECARA PARTISIPATIF DAN PERAN KONSTRUKTIF NEGARA

Studi ini telah menggambarkan adaptasi orang Merapi terhadap lingkungan fisik dan sosial, serta relevansinya dengan isu, masalah dan solusi penanggulangan bencana alam erupsi Merapi. Diharapkan deskripsi adaptasi dan relevansinya itu akan memberikan penjelasan enam hal, yaitu:

1. Pola penanggulangan bencana alam erupsi Merapi dalam sistem adaptasi masyarakat lokal.
2. Pola penggunaan sumber daya sosial-kultural masyarakat lokal dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi bencana alam erupsi Merapi
3. Pola responsivitas pemangku kepentingan (pemerintah pusat dan daerah dan masyarakat sipil) dalam melakukan aktivitas penanggulangan bencana alam bersama masyarakat lokal.
4. Strategi penanggulangan bencana alam erupsi Merapi dengan menggunakan kekuatan sosial-budaya masyarakat lokal.
5. Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana alam berbasis pada kekuatan ekonomi dan sosial budaya dan partisipasi masyarakat lokal.
6. Posisi dan peran masyarakat sipil dalam penanganan bencana alam berbasis pada kekuatan sosial-budaya dan partisipasi.

Bahasan pertama sampai ke tiga merujuk pada pemikiran dan refleksi tentang temuan studi ini sebagaimana diuraikan pada bab di muka. Sementara, nomor empat dan enam merujuk pada upaya menyajikan pemikiran alternatif agar studi ini menghasilkan konsep dan kerangka aksi dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia khususnya penanganan bencana erupsi Merapi. Keenam bahasan itu disajikan dalam tiga tema besar yaitu: (a) penanggulangan bencana alam erupsi Merapi dalam sistem adaptasi masyarakat lokal, (b) partisipasi masyarakat dalam penanggulungan bencana erupsi Merapi, dan (c) konsep serta

relevansi peran negara dalam penanggulangan bencana berbasis partisipasi masyarakat.

Bab ini akan menjelaskan keenam pokok bahasan dengan terlebih dahulu menyimak beberapa butir temuan yang secara eksplisit atau implisit nampak dalam deskripsi dalam semua bab di muka yang mengungkapkan pola adaptasi masyarakat lokal Merapi. Dengan cara seperti itu maka akan lebih jelas dan mudah untuk memahami benang merah studi ini dan memudahkan dalam menyampaikan analisis pada setiap pokok bahasan.

8.1 Butir-Butir Temuan Studi

Seluruh deskripsi etnografi di muka memberikan bukti empiris bahwa masyarakat Merapi yang tersebar ke dalam komunitas-komunitas kecil setingkat pedusunan merupakan entitas masyarakat yang memiliki dua kepentingan.

Pertama adalah kepentingan masyarakat sendiri sebagai suatu kelompok yang berusaha untuk menjaga kesatuan, integrasi, dan keutuhannya melalui berbagai bentuk pengaturan sosial dan praksis kehidupan sehari-hari, Upaya-upaya tersebut adalah demi menjalin solidaritas dan kerukunan sosial, serta kekuatan bersama untuk dapat bertahan di dalam lingkungan Merapi. Semua bab di muka juga secara implisit dan eksplisit menggambarkan adanya upaya dan tindakan nyata yang telah dilakukan orang Merapi untuk membangun solidaritas sosial di komunitasnya.

Nampak nyata bahwa orang Merapi memiliki integrasi dan solidaritas komunitas yang tinggi sebagaimana tercermin dalam urusan pembangunan komunitas, pembangunan rumah, penyelenggaraan ritual keagamaan dan pesta dusun, bercocoktanam tanaman pangan hingga dengan urusan menyelamatkan warga dari erupsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari bisa muncul konflik dan ketegangan sosial. Namun secara umum masyarakat Merapi sangat kuat kepentingannya dalam mewujudkan integrasi dan solidaritas sosial dalam komunitasnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat gejala dan kecenderungan memudarnya integrasi dan solidaritas sosial. Namun kecenderungan ini muncul

dalam masyarakat Jawa pada umumnya sebagai imbas dari modernisasi dan komersialisasi ekonomi. Namun demikian, orang Merapi masih memperlihatkan solidaritas sosial yang tinggi sehingga orang Merapi tidak mudah mengalami perpecahan dalam urusan ekonomi dan kebencanaalaman. Solidaritas ini bahkan nampak lebih kuat pada orang mereka yang berada di bagian atas misalnya di dusun-dusun yang termasuk dalam KRB III.

Solidaritas sosial orang merapi yang tinggi itu bukan karena mereka secara geografis relatif terisolasi. Apa yang akan dijelaskan nanti adalah membuktikan bahwa orang Merapi memiliki upaya untuk menguatkan integrasi dan solidaritas sosial yang tinggi sebagai suatu adaptasi sosial yang terkait dengan sejarah, ekonomi, politik dan khususnya kebencanaan. Oleh karena itu, sangatlah beralasan apabila penanggulangan bencana di lereng Merapi memiliki pertalian kuat dengan sistem adaptasi yang ada.

Kedua adalah kepentingan seluruh atau sebagian dari anggota masyarakat untuk menguasai sumberdaya yang ada di dalam wilayah Merapi. Sumberdaya ini bisa berupa tanah, air dan iklimnya yang sejuk, atau material yang dihasilkan oleh Merapi seperti keindahan panoramanya atau material vulkanik yang dihasilkan erupsi. Erupsi bukan hanya menimbulkan dampak negatif tetapi mengeluarkan material batu dan pasir, serta mengendalikan ekosistem, misalnya memberi dampak positif pada tersedianya pakan ternak pasca erupsi.

Dengan mengacu pada adanya kepentingan ekonomi politik atas sumberdaya Merapi, maka karakter komunitas pun nampak jelas selalu bersaing dengan para pihak yang berupaya untuk menguasai sumberdaya yang ada di lereng Merapi. Akibatnya orang merapi pun mempunyai sikap enggan mengungsi, melakukan relokasi, pindah ke daerah yang lebih aman, atau ikut program transmigrasi. Sebaliknya, mereka memperlihatkan ikatan yang kuat dengan kampung halaman beserta seluruh isi dan kehidupan sosial-kulturalnya. Merapi bukan sekedar aset, tetapi penghidupan, kehidupan dan identitas yang bernilai sehingga menjadi tidak mudah bagi orang Merapi untuk meninggalkan sumberdaya tersebut hanya karena aktivitas erupsi vulkanik.

Apa yang justru terjadi adalah orang Merapi berupaya untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang rentan menimbulkan bencana. Adaptasi tersebut memperlihatkan adanya strategi produksi yang memanfaatkan ekosistem Merapi yang justru dikondisikan oleh keberadaan Merapi, kuatnya integrasi dan solidaritas sosial, dan berbagai mitigasi, evakuasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi yang diharapkan mampu menanggulangi bencana dalam jangka panjang.

Dengan adanya dua kepentingan, yaitu kepentingan menjaga keutuhan komunitas dan ekonomi politik, maka adaptasi orang Merapi dapat dijabarkan sebagai upaya usaha menjawab empat hal, yaitu Merapi sebagai aset, penghidupan, kehidupan, dan identitas sosial.

Pertama-tama merujuk pada aset. Setiap komunitas menempatkan daerah-daerah Merapi yang berada dalam teritorialnya sebagai aset yang berarti harta benda yang dapat dipakai sebagai modal usaha secara individual ataupun kolektif. Aset itu mereka peroleh sejak mulai membangun komunitas. Kampung yang mereka bangun dengan kerja keras dan gotong royong merupakan aset yang bernilai penting untuk meniti kehidupan di lereng Merapi. Ketika kampungnya tidak aman maka upaya yang dilakukan warga adalah menggeser, pindah ke tempat yang lebih aman di lereng Merapi, atau melakukan berbagai ritual keagamaan agar diperoleh rasa aman.

Selain kampung, tanah pertanian, pasir, padang rumput juga menjadi aset penting untuk menjamin kelangsungan hidup. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat membuat aset itu semakin bernilai bagi setiap keluarga untuk menjamin keturunannya. Bahkan setiap kali Merapi erupsi maka akan menghasilkan aset baru berupa pasir dan batu yang dapat dipakai sebagai sumber penghidupan.

Dalam istilah Jawa *sedumuk bathuk senyari bumi* kiranya berlaku dalam pandangan hidup orang Merapi karena istilah ini menggambarkan adanya ancaman bagi orang Merapi atas aset yang mereka miliki dan kuasai. Setiap kali Merapi erupsi maka mereka akan terancam kehilangan aset, baik kampung, pekarangan, ladang atau kebun, maupun pasirnya. Pemerintah, penguasha, atau

bahkan preman berkepentingan untuk menguasai pasir dan batu yang menjadi komoditas penting di sektor bangunan.

Diskusi di muka sudah mengungkapkan bahwa orang Merapi dihinggapi oleh ketakutan atas hilangnya aset karena hadirnya negara. Ketakutan itu tampak dari adanya lambang-lambang dalam alam pikiran mistisnya mengenai adanya para penunggang kuda yang mengakuisisi tanah padang rumput di lereng atas yang menjadi milik mereka untuk menghidupi ternaknya. Selain itu, muncul program transmigrasi dengan kelompok sasaran orang Merapi. Program ini ujungnya memindahkan penduduk dan membuka peluang bagi munculnya pelepasan tanah milik penduduk untuk kemudian dikuasai negara, swasta atau masyarakat luar. Pengalaman menunjukkan bahwa orang Turgo enggan ditransmigrasikan karena diketahui adanya upaya pihak swasta untuk menjadikan Turgo sebagai kawasan wisata pasca erupsi 1994.

Mempertahankan aset menjadi modus pada orang Merapi dalam menilai program relokasi. Mereka khawatir dengan upaya pemindahan keluar kawasan KRB III ke KRB II atau I, yang akan berdampak pada kondisi kehilangan kontrol atas aset yang dimiliki. Negara bisa baik terhadap warga tetapi negara tidak bisa dijamin tetap konsisten mengamankan aset orang Merapi yang bernilai penting dalam kehidupan mereka. Kalau pilihannya pada mempertahankan aset, maka orang Merapi tidak serta-merta mau dipindahkan hanya karena ada ancaman erupsi, karena pilihan mengungsi sementara bisa menjadi jawaban yang paling rasional dalam sistem adaptasi mereka.

Kecenderungan orang Merapi menempatkan Merapi sebagai aset menyebabkan mereka menjaga kampungnya walaupun dalam situasi sedang terjadi bencana. Tradisi yang muncul adalah adanya kepercayaan bahwa kampung tidak boleh kosong sama sekali ketika semua orang harus mengungsi. Ini karena menurut kepercayaan lokal kampung harus dijaga agar jangan sampai kedatangan pencuri, maupun mahluk jahat. Selama mereka mengungsi, kampung juga selalu diamati dan secara bergantian warga akan melakukan aktivitas ekonomi sebisa mungkin. Dalam kasus erupsi 2010, misalnya pengungsi di Stadion Maguwo

secara begiliran pulang ke kampungnya pada pagi hari untuk memberi pakan ternaknya dari sisa-sisa makanan mereka pada malam hari di pengungsian.

Kedua, Merapi sebagai sumber penghidupan sehingga walaupun tidak memiliki aset secara kuantitatif, orang Merapi bisa hidup dari sumberdaya yang ada. Dengan menggaduh ternak warga bisa mencari pakan gratis yang disediakan oleh ekosistem Merapi karena erupsi justru mematikan vegetasi tanaman kayu-kayuan dan menyuburkan rumput liar. Orang juga bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah setiap kali erupsi. Bencana Turgo 1994, misalnya, terbukti bisa memberikan penghidupan bagi orang Turgo selama 15 tahun terakhir ini. Demikian juga, erupsi Merapi tahun 1950, misalnya memuntahkan pasir yang memberikan penghidupan bagi orang Klakah selama 20 tahun terakhir ini setelah terlebih dahulu warga melakukan kerja bakti membangun jalan menuju jurang tempat deposit pasir tersimpan.

Penghidupan orang Merapi bukan hanya dari pasir. Ekologi Merapi telah memberi peluang bagi para petani untuk mengembangkan berbagai komoditas yang ramah terhadap pasar, seperti komoditas salak, susu perah, tembakau dan sayuran serta buah-buahan. Pola pertanian yang intensif dapat dikembangkan di Merapi berkat adanya dukungan peternakan sapi yang didukung oleh ekosistem erupsi Merapi.

Merapi juga memberikan penghidupan yang layak. Berbagai komoditas unggulan itu telah memberikan kemajuan ekonomi sehingga warga bisa mengikis kemiskinan dan keterbelakangan. Nilai aset orang Merapi juga meningkat karena adanya kemakmuran seperti aset dalam bentuk sarana dan prasarana pemukiman sampai dengan harta benda yang dimiliki secara perseorangan.

Skenario untuk mereklokasi orang Merapi keluar dari pemukimannya pasti akan menghilangkan aset dan penghidupannya. Oleh karena itu, masuk akal kalau orang Merapi kemudian bersikap skeptis dan menolak program-program relokasi dan *livelihood* yang mereduksi akses mereka atas sumberdaya alam setempat. Skenario yang bisa dikembangkan adalah mendorong terbangunnya pola penghidupan ganda pada orang Merapi sehingga mereka tidak terkonsentrasi berada di Merapi atas tetapi kemudian bisa hidup di bawah juga.

Selain penghidupan, Merapi juga memberikan suatu kehidupan yaitu komunitas yang memiliki kemampuan untuk mengelola hubungan sosial dan kerjasama warga guna mewujudkan komunitas yang partisipatif dan sejahtera bersama. Oleh karena itu, Merapi sangat bermakna bagi warganya karena telah menjadi habitat sosial yang mendidik, membesarkan dan membuat para warga saling membutuhkan serta mempunyai jagat pandang yang sama. Oleh karena itu pula, maka dalam situasi terancam oleh adanya erupsi, orang Merapi justru membangun solidaritas sosial yang tinggi guna meningkatkan kemandirian komunitas dan para warganya dalam menghadapi resiko kebencanaan. Kerjasama komunitas sangat kuat sekali guna mewujudkan pembangunan komunitas dan jaring pengaman sosial.

Dengan adanya komunitas yang mandiri dan partisipatif, maka warga tidak serta-merta akan terbawa arus program penanggulangan bencana yang dapat mengancam integrasi sosial. Kemandirian masyarakat itu disertai juga dengan adanya peta pengetahuan dan ritual keagamaan yang memperkuat keyakinan atas keberadaan Merapi bukan lagi sebagai petaka tetapi juga pahala, dan bukan sebagai ancaman yang absolut tetapi bisa dinegosiasikan. Dengan demikian, maka tinggal di Merapi bukan suatu tindakan irasional, dan ritual sebagai ilusi, melainkan suatu tindakan adaptif serta ritual sebagai mekanisme mitigasi dan komunikasi antar warga guna menggalang sikap *eling* dan waspada. Sikap ini diperlukan guna menjadi modal dalam melakukan evakuasi dan pengungsian sementara.

Benang merah yang tidak kalah penting tentang karakteristik komunitas lereng Merapi adalah adanya sikap yang kuat pada warga untuk memiliki sejarah dan identitas komunitas. Sejarah bukan dipahami sebagai kumpulan cerita tentang nenek moyang atau kisah masa lalu, Orang Merapi membangun sejarah untuk membangun identitas guna memperteguh eksistensi mereka di lereng Merapi sekalipun daerahnya itu rawan bencana. Sejarah dibangun dengan mengungkapkan bahwa para nenek moyang, leluhur, atau orang saktilah yang mengawali pembangunan komunitas-komunitas di lereng Merapi. Oleh karena itu,

mereka merasa sah untuk tinggal di komunitasnya dan bahkan wajib melestarikan warisan tersebut.

Membangun keabsahan simbolik melalui mitologisasi bahwa mereka hidup dari tanah yang ditempati para leluhur yang suci, heroik, dan melindunginya di tanah yang rawan bencana. Selain itu, di jaman dulu sampai kini mereka berusaha membuka masuknya berbagai atribut keagamaan dari luar seperti mitos tentang Sheik Jumadil Kubro, dan masuknya masjid modern. Dengan demikian mereka mendapat legitimasi dari rezim agama dan pihak lain atas keberadaan kampungnya sekalipun berada di wilayah yang rawan bencana. Oleh karena itu, maka tidak mengherankan pula bahwa orang Merapi menerima keberagaman agama dan kepercayaan karena keberagaman identitas kultural ini akan memberikan peluang bagi mereka memiliki jejaring sosial yang luas.

Dalam tataran praktis, orang Merapi akan mencari kawan sebanyak mungkin dari luar dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, toleransi, dan saling berbagi. Hal ini nampak dalam banyak kasus bahwa orang Merapi menjadi orang yang amat ramah dengan pendatang yang mengunjungi dusunnya, membagi pengalaman dalam menghadapi Merapi, dan menolong mereka yang tertimpa bencana Merapi.

Konstruksi komunitas di lereng Merapi di atas menunjukkan bahwa orang Merapi sesungguhnya memiliki pendekatan kultural dalam melakukan manuver ekonomi politiknya. Mereka mengelola produksi, dan sumberdaya alam dalam bingkai etno-ekologi, organisasi komunitas, dan ritual keagamaan sedemikian rupa. Pada intinya mereka berusaha mempertahankan aset dan penghidupannya sehingga mereka memilih tetap bisa bertahan di kampungnya. Erupsi Merapi yang selalu berlangsung secara siklis direspon orang Merapi dengan mengembangkan beragam strategi mitigasi, evakuasi, dan pengungsian sesuai dengan sistem adaptasinya pada tingkat ekologi-ekonomi organisasi sosial, dan ritual keagamaan.

8.2 Penanggulangan Bencana Erupsi Merapi dalam Sistem Adaptasi Masyarakat Lokal.

Upaya memahami konsep penanggulangan bencana dalam kerangka adaptasi masyarakat lokal selalu dihadapkan pada tidak adanya konsep yang menjadi acuan untuk menjelaskannya. Studi ini meminjam kerangka konsep ekologi budaya Julian Steward tentang sistem adaptasi. Ia memandang bahwa kebudayaan terdiri dari dua elemen, yaitu elemen inti yang berguna untuk adaptasi dan bukan inti yang tidak terkait dengan adaptasi. Adaptasi dimulai dari adanya lingkungan fisik yang direspon oleh masyarakat dengan mengembangkan tekno-lingkungan, dan dari tekno-lingkungan dikembangkan organisasi sosial guna memperkuat bekerjanya tekno-lingkungan tersebut. Dari situ kemudian dikembangkan ideologi atau lebih tepat nilai-nilai yang menjadi acuan dan penguatan keberadaan organisasi sosial tersebut. Ambil contoh adalah orang Jawa yang hidup dalam ekosistem gunung dan daratan. Dari ekosistem ini mereka membuat sawah sebagai tekno-lingkungan. Hidup dengan ekosistem sawah menghendaki kerja ekstra dan pengerahan tenaga kerja yang tinggi. Dengan itu maka munculah organisasi sosial yang menekankan gotong royong dan berbagai pranata sosial gotong royong ini melahirkan ideologi egalitarian sehingga pranata sosial itu bisa terlembaga dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks kajian ini, lingkungan Merapi bisa dipahami sebagai ekosistem gunung vulkanik. Karena menjadi bagian dari aset, penghidupan, kehidupan, dan identitas, maka lahirlah strategi-strategi tekno-lingkungan yang selaras dengan Merapi dengan segala potensinya. Apa yang dilakukan komunitas di lereng Merapi adalah membangun sistem usaha tani pangan, tembakau, salak, sayuran, peternakan sapi yang intensif, dan penggalian pasir yang menggunakan potensi Merapi tanpa merusaknya. Mereka mengandalkan sistem pertanian organik dengan memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk, dan memanfaatkan sumberdaya rumput yang keberadaannya diatur oleh erupsi Merapi seperti juga keberadaan pasir dan batu yang melimpah pasca erupsi.

Keputusan hidup dengan pertanian intensif dan pertambangan merupakan pilihan orang Merapi yang sangat strategis karena membuat mereka bisa sejahtera sekalipun hidup di daerah rawan bencana. Akan tetapi, pilihan itu memaksa mereka harus mengembangkan suatu kerangka usaha tani yang aman dari erupsi,

dan penggalian pasir yang adaptif tanpa merusak lingkungan. Selain itu harus mendayagunakan sistem sosialnya agar bisa memberikan kontribusi bagi penanggulangan bencana bila muncul di daerahnya.

Studi ini membuktikan bahwa komunitas-komunitas di lereng Merapi telah mengembangkan sistem adaptasi dalam kerangka penanggulangan bencana. Ini nampak dalam sistem mitigasi, evakuasi, rekonstruksi dan rehabilitasinya.

8.2.1 Mitigasi

Dalam konteks mitigasi orang Merapi membangun suatu komunitas yang responsif terhadap adanya resiko bencana dengan mengembangkan konsep dan pengorganisasian masyarakat yang relevan. Konsep ini menunjukkan bahwa mereka memiliki semacam pengetahuan lokal. Ada keragaman pengetahuan lokal tetapi pada intinya mengajarkan tentang kearifan lokal.

Pertama, mereka mengkonstruksi gunung itu suci. orang Merapi memiliki konsep gunung sebagai jagad hidup yang sakral sehingga pendekatan dalam menangani erupsi harus mengindahkan konsep tersebut dan tidak hanya menggunakan konsep yang memprofankan Merapi. Konsep Merapi sebagai gunung yang sakral nampak dalam ajaran Hindu. Di Jawa, konsepsi Merapi sebagai agen yang suci dan bertugas untuk mengawal agar jagad manusia itu bersih dari keborokan dipercaya oleh orang Jawa. Erupsi Merapi sering dipakai sebagai tanda tentang perubahan politik karena sistem politik lama dianggap sudah tidak amanah lagi (Dove, 2010).

Dalam konteks kepercayaan lokal, Merapi dihuni oleh eyang Merapi, Mbah Petruk atau Kyai Sapujagad dan tokoh lainnya yang memberikan perlindungan kepada seluruh penghuni di lereng Merapi. Kepercayaan ini juga menghendaki agar Merapi dijaga kesuciannya. Erupsi yang melanda suatu kawasan di lereng Merapi sering dikaitkan dengan melunturnya kemampuan lokal dalam masyarakat yang menjaga kampungnya dari perbuatan maksiat. Dengan konsep suci itu pula, maka ada alasan mengapa warga enggan adanya penggalian pasir dengan memakai *backhoe* yang merusak lingkungan dan menolak wisata seks. Mereka lebih memilih wisata alam dan religius. Mereka

juga mengadakan berbagai upacara tradisional untuk menjaga harmoni dengan alam Merapi.

Pandangan bahwa Merapi sebagai gunung yang suci amat relevan untuk kepentingan mitigasi. Setiap kali Merapi erupsi warga didorong untuk introspeksi diri dan memulihkan kehidupan sosial agar normal kembali sesuai dengan kearifan lokal. Kehidupan yang normal ini perlu untuk memudahkan masyarakat melakukan pemantauan dan tindakan pengungsian. Dalam kondisi abnormal masyarakat sering terlena. Beberapa kasus bencana yang menelan korban jiwa justru terjadi ketika masyarakat terlena seperti melakukan aktivitas pesta dan kegiatan lainnya yang dianggap kurang relevan untuk menghadapi masa erupsi.

Dekat dengan konsep gunung itu suci, orang Merapi mempunyai ritual untuk selalu *eling*, artinya mengingat atas Tuhannya sebagai juru selamat, dan waspada, yang artinya selalu mencermati berbagai dinamika di lingkungannya guna menangkal dan menghindari petaka. Konsep itu sungguh berguna bagi orang Merapi dalam melakukan mitigasi guna melakukan pengurangan resiko bencana. Konsep itu membuat orang Merapi memilih mendekati diri kepada sang pengusaha (dengan *eling*) dengan hidup sederhana, membaca tanda-tanda alam dan gaib, melakukan selamatan dan menghindari larangan Tuhannya.

Dengan menggunakan konsep *eling* dan *waspada* mereka sadar bahwa mereka itu hidup di daerah rawan bencana. Mereka bukan nekat di tempat rawan tetapi yakin bahwa kerawanan hanyalah masalah ruang dan waktu. Selama mereka bisa keluar dari ruang dan waktu yang dianggap berbahaya, mereka bisa selamat. Sebaliknya bila mengabaikannya, maka sekalipun sudah merasa aman karena sudah dilindungi dengan teknologi, maka akan akan celaka karena melawan arus yang dikonstruksi dalam sistem *neton* (*neptu*).

Selain konsep *eling* dan *waspada* orang Merapi senantiasa membina modal sosialnya guna menggalang solidaritas sosial antar warganya. Solidaritas sosial ini melahirkan suatu komunitas yang partisipatif sehingga keputusan untuk mengungsi bukan berada di tangan pemimpin saja tetapi pada forum warga. Melalui forum ini seluruh masalah pun harus dipecahkan secara bersama bukan oleh individu tertentu yang berpengaruh di dusun. Hal ini nampak dilakukan oleh

orang Stabelan ketika akan memutuskan akan mengungsi atau tidak ke Magelang. Mereka mengadakan musyawarah guna memutuskan perkara tersebut. Di situ kepala dusun bukan menjadi penentu keputusan melainkan hanyalah sebagai fasilitator saja.

8.2.2 Evakuasi dan Pengungsian

Orang Merapi juga memiliki orientasi nilai budaya dan pengorganisasian masyarakat yang mempunyai kontribusi terhadap sistem evakuasi dan pengungsian. Beberapa deskripsi di muka menunjukkan bahwa secara riil orang Merapi agak panik ketika terjadi erupsi 2010, tetapi secara kualitatif dapat dikatakan bahwa orang Merapi relatif tegar, tidak tunggang langgang sehingga mengalami tekanan berat. Hanya segelintir orang Merapi yang dapat dikatakan menjadi korban yaitu sekitar 250 orang meninggal. Jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan bencana gempa tektonik di Yogyakarta tahun 2006 yang menelan korban 5.000 jiwa dan ribuan luka ketika mereka lari karena takut adanya isu tsunami meski sebenarnya hanya isu semata. Memang tidak bisa disamakan, tetapi paling tidak orang Merapi mempunyai modal budaya dan sosial sehingga tidak harus lari terbirit-birit, kecuali pada malam 25 November 2010 ketika ledakan erupsi sangat besar dan berlangsung cukup lama. Sikap ini wajar dilakukan ketika bahaya ibaratnya di depan mata.

Dengan memiliki konsep *eling* dan *waspada*, resiko, *guyuprukun* dan tolong menolong, persaudaraan antar kampung, dan menerima atas cobaaan menjadi sarana bagi mereka untuk melakukan evakuasi dan pengungsian berbasis pada kekuatan budayanya. *Eling* dan *waspada* dicanangkan betul oleh komunitas-komunitas Merapi di lereng atas KRB III. Mereka tidak henti-hentinya mengontak kekuatan gaib agar diberi kepastian untuk mencari jalan menuju keselamatan. Ritual selamat dilakukan pada tingkat individu dan komunitas. Ritual ini dianggap bisa membangkitkan sensitivitas mereka terhadap perkembangan erupsi Merapi. Mereka bisa saling berbagi informasi dan melakukan aksi kolektif misalnya memutuskan kapan harus evakuasi dan ke mana mereka akan menyelamatkan diri.

Dengan dilandasi sikap tolong-menolong maka evakuasi dilakukan secara bersama dan terorganisasi. Prinsip tolong-menolong ini memberikan jaminan bagi keluarga yang lemah dan golongan manula untuk mendapatkan dukungan dari komunitas. Hal ini misalnya nampak jelas pada warga Dusun Kemiri Cilik yang memberikan perhatian kepada kaum lemah dengan cara menyediakan angkutan bagi mereka.

Dengan *guyup* dan *rukun*, orang Merapi menyadari pentingnya konsep ini pada saat mengungsi. Dengan konsep *guyup*, akrab, setiap warga saling bertegur sapa, bertoleransi, dan membina persahabatan. Rukun artinya tanpa perselisihan, berupaya untuk menghindari konflik, dan mudah menyalahkan orang lain. Salah satu bentuk *guyup rukun* yang menonjol adalah saling membantu antar warga dalam melakukan evakuasi, termasuk evakuasi ternak, dan berbagai perbekalan sampai dengan membantu mereka yang lemah. Ada kebanggaan bagi warga bila bisa tampil sebagai penolong misalnya duduk sebagai anggota tim SAR yang menyelamatkan warga dan ternaknya.

Persaudaraan antar komunitas juga menjadi elemen penting dalam tradisi pengungsian di Merapi. Sebelum negara begitu besar berperan dan bertanggungjawab terhadap nasib pengungsi, warga Merapi terbiasa melakukan pengungsian ke warga yang kampungnya relatif aman dari erupsi. Ada ikatan moral untuk menyelamatkan tetangga yang kesusahan atau mengalami musibah. Sebaliknya tetangga tersebut akan memberikan imbalan dalam bentuk barang atau jasa dan penghargaan sosial ketika mereka bisa kembali dengan selamat. Tradisi itu nampaknya hidup di lereng Merapi ketika negara belum hadir dalam sistem penanggulangan bencana secara maksimal. Berbagai kasus erupsi yang merusak kampung disikapi warga dengan cara *nyingir*, artinya mengungsi untuk sementara waktu saja. Pengungsian dihentikan ketika warga sudah yakin bahwa Merapi tidak akan erupsi lagi, dan selama mengungsi itu mereka mendapat santunan penuh dan bisa bekerja membantu keluarga yang menjadi tempat mereka mengungsi.

Persaudaraan antar komunitas itu tetap hidup hingga sekarang tetapi tidak terbaca dengan baik oleh media ketika mereka meliput pengungsian pada erupsi 2010. Dengan tradisi itu, warga Merapi dapat dengan cepat memperoleh apa yang

disebut di sini adalah santunan sosial seperti jatah hidup, barak pengungsian, dan sebagainya. Orang Merapi mengembangkan konsep yang namanya *village sister*, adanya semacam *village engagement*. Dalam kasus erupsi 2010, konsep ini dikembangkan oleh orang Bendosari yang menjadi korban erupsi dengan orang Jombor sehingga erupsi ibaratnya mendatangkan kawan baru.

Bencana yang sering berlangsung di lereng atas Merapi membuat sebagian orang Merapi mengeluh tetapi secara umum budaya setempat mengajarkan orang harus bisa menerima cobaan itu dengan penuh kesabaran. Orang Merapi bisa mengatakan kekecewaan atas hilangnya harta benda. Akan tetapi, bila mereka bisa mengungkapkan lebih mendalam mereka bisa merelakan dan melupakannya. Mereka juga tidak akan menjawab mengalami tekanan kalau ditanya apakah mengalaminya dengan adanya erupsi yang memaksa mengungsi. Jawaban masuk akal adalah mereka harus pasrah dan bersyukur bahwa mereka masih bisa selamat.

Sikap menerima nasib dengan kesabaran menjadi modal warga untuk keluar dari penderitaan yang menjadikan mereka sebagai objek program penanggulangan bencana. Dengan menerima nasib itu, maka orang Merapi juga tidak gampang diajak berlama-lama di pengungsian. Selama mereka bisa kembali ke kampung maka mereka akan melakukannya.

8.2.3 Rekonstruksi dan Rehabilitasi

Orang Merapi yang sudah terbiasa menghadapi erupsi memiliki kebiasaan untuk merekonstruksi dan rehabilitasi kehidupannya dengan mencanangkan kegiatan atau program yang partisipatif, serta semarak dengan kerja keswadayaan dan kemandirian. Dengan demikian, maka sesungguhnya warga dapat cepat bangkit pasca erupsi sepanjang mereka mempunyai ruang dan waktu untuk mendayagunakan kekuatannya tersebut. Masalahnya adalah pemerintah memiliki skema program yang sering tidak selaras dengan program yang dianggakan masyarakat. Beberapa poin yang menonjol dalam agenda rekonstruksi dan rehabilitasi versi masyarakat adalah sebagai berikut:

Pertama: masyarakat mengandalkan pada kemandirian dengan melakukan program gotong-royong untuk perbaikan infrastruktur publik, seperti jalan,

sumber mata air, dan rumah tempat tinggal. Pembangunan fisik ini bisa berjalan tanpa harus menunggu bantuan. Ketika menghadapi kerusakan yang fatal, warga bisa mencari terobosan. Dana sosial dari pemerintah atau masyarakat sipil dihemat dan dipindahkan dari untuk keperluan makan dan jatah hidup sehari-hari menjadi untuk pembangunan fisik.

Kedua, masyarakat mempunyai konsep lebih baik bekerja daripada menunggu bantuan. Konsep ini menggambarkan adanya semangat kemandirian tetapi sekaligus menunjukkan bahwa orang Merapi memiliki etos kerja yang tinggi sehingga mereka dapat cepat bangkit. Kerja yang disukai orang Merapi adalah merehabilitasi sumberdaya ekonominya dengan mulai menanam apa saja yang bisa mendatangkan harapan untuk menatap masa depan lebih baik. Oleh karena itu sekalipun pemerintah enggan mengeluarkan program di wilayah KRB III dengan alasan daerah tersebut tidak aman dan harus dikosongkan, masyarakat justru menunjukkan etos kerja yang tinggi untuk memulihkan kehidupan pasca erupsi.

Ketiga, orang Merapi mempunyai konsep egalitarian dan kemandirian sebagai konsep untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang berkeadilan sosial, *gender mainstreaming*, dan berswadaya. Frekuensi erupsi yang tinggi, sementara tinggal di Merapi menjadi pilihannya, maka ketika bencana melanda warga tidak meratapi nasib buruknya dengan menyalahkan orang lain. Ada suatu kecenderungan bahwa mereka berusaha bangkit dengan secepatnya kembali ke kampung halaman guna memulihkan kehidupan ekonomi. Upaya bangkit pun berbasis pada semangat egalitarian dan kesetaraan. Para warga bergayung sambut melakukan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan lelaki dan perempuan, serta mengedepankan keswadayaan daripada bantuan. Memang untuk daerah yang terkena erupsi parah sekali bantuan menjadi penting. Namun demikian, banyak bukti yang menggambarkan para anggota keluarga baik lelaki maupun perempuan bersatu padu membangun ekonominya kembali.

Keempat, orang Merapi mempunyai prinsip tidak melawan atau bertentangan dengan penguasa, melainkan bergayung sambut dengan penguasa untuk mewujudkan keelamatan. Sikap itu menunjukkan bahwa mereka

sebenarnya tidak mau pemerintah terlalu banyak mengatur karena kalau dilakukan berarti akan menggagalkan upaya mereka beradaptasi dengan Merapi. Kalau sampai terjadi pertentangan maka mereka tidak melawan frontal melainkan selalu menegosiasikan kepentingannya sehingga pemerintah tidak bisa juga melakukan tindakan sepihak. Hal ini terlihat dalam kasus bencana 1994 dan 2010. Ketika warga Turgo akan ditransmigrasikan menyusul bencana 1994 mereka cenderung menolak. Jikapun diterima, ini dilakukan dengan menerimanya dalam konteks strategi orang Turgo untuk memperluas aset atas perubahan kondisi ekologis lama (Dusun Turgo) yang makin padat di lereng Merapi. Sementara itu, orang Turgo tetap bersikukuh mempertahankan dusunnya. Pada sisi lain, orang Cangkringan enggan direlokasi karena akan mengurangi akses mereka atas tanah yang dimiliki di dusunnya. Negosiasi demi negosiasi terus mereka lakukan sehingga kebijakan pemerintah tidak bisa memaksa warga untuk direlokasi dalam radius yang jauh dari tempat tinggal, maupun menggunakan bekas dusunnya untuk kepentingan pemerintah seperti untuk Taman Nasional.

Kesembilan, orang Merapi mengedepankan prinsip kepercayaan dalam menjalin kerjasama sehingga yang dikedepankan adalah bukan pada bagaimana mereka memperoleh bantuan sebanyak mungkin tetapi lebih pada bagaimana kepercayaan bisa dipelihara bersama. Saling percaya menjadi filosofi dan strategi warga dalam melakukan kerjasama dengan para mitra, misalnya pemerintah dan LSM. Selama prinsip kepercayaan dipegang maka mereka akan menjalankan program kerjasama. Dengan prinsip ini pula orang Merapi cenderung mau untuk berkorban dalam melakukan pembangunan komunitas dan rehabilitasi pasca erupsi karena hal itu merupakan tanggungjawabnya. Akan tetapi, ketika mereka menjadi kritis ketika niat baiknya diperdaya pihak lain maka mereka berbalik melakukan resistensi. Bentuk-bentuk resistensi muncul mulai dari yang paling ringan berupa mengeluh sampai dengan menolaknya secara halus, dan bahkan sampai pada ekspresi penolakan secara kasar.

8.3 Penanggulangan Bencana Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal

Studi ini telah menemukan bukti nyata bahwa masyarakat Merapi memiliki sumberdaya sosio-kultural yang relevan untuk agenda penanggulangan bencana. Sumberdaya sosio-kultural itu bisa disimak sebagai modal sosial-budaya. Dalam kerangka konsep Robert Putnam (1993), modal sosial ini dilihat dari sisi positifnya bagi pembangunan sosial dan dalam studi ini mempunyai fungsi untuk melakukan program mitigasi, evakuasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi. Dikatakan memiliki fungsi positif karena modal sosial itu menjadi kekuatan bagi warga untuk melakukan program-program tersebut baik yang digerakkan oleh masyarakat lokal, pemerintah, ataupun swasta. Dengan mempelajari modal sosial, maka studi ini diharapkan dapat mendisain pola-pola pengelolaan dan peta jalan (*road map*) untuk menjamin keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi pasca-bencana erupsi. Beberapa modal sosial yang akan disimak di sini adalah peran keluarga batih dan jaringan kekerabatan, organisasi dan solidaritas komunitas, kepemimpinan, dan kesetaraan gender.

8.3.1 Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana menggunakan institusi yang ada dalam komunitas. Berikut ini disajikan institusi dengan perannya yang relevan.

8.3.1.1 Keluarga Batih dan Jaringan Kekerabatan

Penanggulangan bencana erupsi Merapi harus dimulai dari level keluarga dan jaringan kekerabatannya. Studi ini memperlihatkan bahwa keluarga inti merupakan basis pengorganisasian warga masyarakat yang otonom. Setiap keluarga mempunyai kepentingan untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam menafkahi anak keturanan, menjaga keutuhan dan keselamatannya pada masa erupsi, serta membangun kembali kehidupan pasca erupsi.

Walaupun keluarga inti menjadi elemen sentral dalam kehidupan di dusun, ikatan-ikatan luas juga sangat penting dalam adaptasi melalui pembentukan

pemukiman yang berbasis pada hubungan kelahiran dan perkawinan. Akibatnya, kehidupan dalam komunitas sangat dipengaruhi oleh kuat tidaknya jaringan kekerabatan. Semakin kuat, maka kampung ibaratnya kumpulan orang-orang yang sekerabat sehingga solidaritas kekerabatan lebih menonjol daripada solidaritas komunitas semata.

Ketika evakuasi, keluarga cenderung berkoordinasi dengan anggotanya untuk memutuskan apakah mereka akan mengungsi secara serempak atau secara bertahap dengan memberikan tugas kepada lelaki untuk mengungsi terakhir. Keluarga-keluarga juga akan berkoordinasi untuk memutuskan ke mana mereka akan mengungsi. Misalnya apakah akan mengungsi ikut pemerintah atau mandiri. Penelitian ini juga menemukan bahwa keluarga memiliki sistem pengungsian dengan sistem mandiri. Hal ini dilakukan bila mereka memiliki jaringan kerabat di luar. Sistem ini dipandang paling efektif walaupun dalam prakteknya kurang mendapat bantuan sosial dari publik.

Penanggulangan bencana berbasis keluarga memaksa setiap keluarga aktif dalam melakukan program. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa keluarga memiliki delegasi dalam hal ini kepala rumah tangga atau suami untuk hadir dalam rapat-rapat di dusun. Di Stabelan dan Turgo misalnya keluarga-keluarga hadir dalam rapat tersebut untuk memutuskan tujuan dan mekanisme mengungsi. Sementara itu, jaringan kekerabatan sangat penting guna menjamin keluarga mendapat bantuan sebelum bantuan dari luar datang. Hal ini karena kerabat dekat seperti saudara kandung, sepupu dan kerabat satu ikatan trah bisa memberikan kepedulian dan bantuan dengan mudah dan langsung. Kecenderungan warga untuk memilih tinggal dalam satu RT asal dalam lokasi pengungsian menunjukkan bahwa mereka memfungsikan jaringan kekerabatan karena biasanya kerabat mereka tinggal dalam satu RT yang sama.

8.3.1.2 Organisasi Komunitas Dusun

Studi ini telah menunjukkan bahwa organisasi komunitas dusun sangat partisipatif dalam berbagai program pembangunan fisik dan sosial yang didorong oleh pihak dusun atau desa. Secara umum dusun berfungsi sebagai *self governing*

community yang memenuhi berbagai kebutuhan warganya. Dalam konteks menghadapi bencana, dusun terbukti bisa menjadi arena pendidikan kebencanaan, dan organisasi yang secara aktif memfasilitasi warga melakukan evakuasi, tinggal di pengungsian, sampai dengan melakukan program rekonstruksi dan rehabilitasi.

Kemampuan menjalankan fungsi *self-governing community* merupakan hal yang diasah oleh dusun melalui warganya yang aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Ketika bencana erupsi muncul, beberapa dusun ada yang siap menjalankan fungsi fasilitasi terhadap korban dan ada yang kurang siap. Perbedaan ini terletak pada kuat tidaknya organisasi dusun sebagai modal sosial masyarakat setempat. Dusun-dusun yang sering mengalami erupsi semakin terasah untuk memfungsikan organisasinya untuk mengantisipasi bencana, seperti misalnya Dusun Turgo dan Dusun Stabelan. Oleh karena itu, agenda penanggulangan bencana ke depan adalah bagaimana warga dusun bisa semakin aktif dan partisipatif dalam menyelenggarakan program penanggulangan bencana.

Dusun dapat dipercaya sebagai organisasi yang partisipatif karena para warganya memiliki ikatan historis, ekonomi, dan jaringan kekerabatan yang relatif kuat. Kondisi ini diperkuat oleh kenyataan bahwa komunitas Merapi membangun pola pemukimannya berbasis pertalian kekerabatan yang secara nyata bekerja efektif untuk memenuhi fungsi sosial dan ekonomi. Hubungan genealogis menjadi tali pengikat dalam kehidupan masyarakat.

Modal sosial dusun yang lain adalah adanya suatu ikatan sehingga sekat perbedaaan latar belakang kelas tidak menjadi ancaman bagi perempuan atau mereka yang lemah dalam masa darurat bencana alam. Beberapa bukti ditunjukkan dalam studi ini bahwa perempuan mempunyai kuasa untuk terlibat dalam urusan pengungsian, dan kelas menengah ke atas mempunyai tanggungjawab moral untuk menjadi patron yang baik dan populer di dusunnya. Oleh karena itu agenda penanggulangan bencana harus mengindahkan peran para patron dan kelas menengah ke atas.

Modal sosial yang lain adalah pembagian peran positif antara golongan tua dan muda dalam komunitas. Pembagian peran ini berbasis pandangan luhur bahwa golongan tua masyarakat menjaga nilai-nilai moral dan mereproduksi

budaya halus, sedangkan golongan muda lebih menampilkan aksi nyata bagi bekerjanya komunitas untuk melayani warganya. Karena itu golongan muda lebih pragmatis dan mengurus kegiatan komunitas. Peran mereka menjadi sangat penting ketika menghadapi masa bencana. Pemuda tampil sebagai relawan yang aktif mengurus warganya. Pada sisi inilah modal sosial menunjukkan efektifitasnya. Masyarakat golongan tua menjaga tradisi dan mereproduksi budaya bagi kepentingan mitigasi bencana sehingga masyarakat memperoleh rasa nyaman, aman, sejahtera tanpa perasaan was-was dan ketakutan untuk hidup di sekitar Merapi. Kesejahteraan lahir dan batin tercipta oleh sistem sosial ini. Sementara itu, dalam situasi gawat darurat, pemuda tampil menjadi pahlawan untuk menyelamatkan warga, bertindak secara rasional dan terukur sehingga terjadi kombinasi yang harmonis antara tradisionalitas dan modernitas dalam merespon erupsi. Pada tahapan evakuasi, orang kaya dusun menjadi basis material utama karena mereka menjadi penyedia alat transportasi dan jaringan sosial untuk tujuan evakuasi. Dalam situasi pasca erupsi Merapi, yakni pada tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi, kaum elit dan orang kaya menjadi mitra bagi komunitas dalam melakukan pembangunan sosial termasuk program rekonstruksi dan rehabilitasi

8.3.1.3 Kepemimpinan

Umumnya penanggulangan bencana alam sangat bias elit karena menganggap pemimpin lokal sangat kredibel tetapi kenyataannya justru menjadi predator bagi masyarakatnya. Studi ini mencatat bahwa peran kepemimpinan lokal sangat menentukan keberhasilan program bencana alam. Pemimpin yang dimaksud adalah yang kredibel yang masih bisa dimiliki oleh masyarakat lokal.

Tokoh penting dalam kepemimpinan di komunitas-komunitas Merapi adalah kepala dusun yang salah satu tugasnya adalah menjalankan *self-governing community* di dusunnya. Tokoh tersebut menjadi tumpuan dan acuan warga dalam merespon erupsi Merapi. Pada sisi inilah modal sosial kepemimpinan ini diuji efektifitasnya. Terbukti bahwa terdapat variasi keberhasilan proses evakuasi dan penanganan dampak erupsi Merapi sebagian besar ditentukan oleh kualitas

kepemimpinan lokal. Keberhasilan melakukan evakuasi sebagian besar disebabkan kemampuan kepala dusun menempatkan diri sebagai seorang penyelenggara organisasi komunitas. Ia bertindak sebagai pemimpin musyawarah, yang bertindak sebagai fasilitator dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif, dan pengambil keputusan dalam situasi darurat. Kegagalan melakukan peran tersebut terbukti telah membawa bencana bagi warga.

Pola peran sentral lain yang ditemukan adalah kepala dusun yang mengambil peran sebagai pengarah. Warga tetap berharap kepala dusun yang memutuskan ketika mereka sulit menentukan apakah harus segera mengungsi atau tidak. Warga biasanya menyerahkan keputusan mengungsi atau tidak pada kepala dusun. Pada sisi inilah kepemimpinan kepala dusun diuji. Kepala dusun juga diuji ketokohnya untuk mampu mempengaruhi dan meyakinkan warga yang masih enggan mengungsi agar segera mengungsi dengan memberikan jaminan kampungnya akan aman. Kepala dusun menjadi tokoh sentral dalam menjaga kepercayaan warga atas keselamatan warga dan harta bendanya. Pola ketiga adalah kepala dusun mengambil sikap yang terbuka kepada warga untuk mengungsi sesuai dengan pilihan dan waktunya. Kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi ini ternyata dipengaruhi oleh sifat pluralistik warga. Dengan strategi ini, kepala dusun telah memberikan kebebasan warga untuk memilih lokasi mengungsi sesuai dengan jaringan sosial yang dimiliki.

Pola pengungsian tersebar tersebut haruslah tidak dilihat sebagai kelemahan kepemimpinan kepala dusun. Dalam konteks modal sosial, pilihan memberikan kebebasan memilih cara dan tujuan evakuasi sesuai dengan minat masing-masing merupakan pilihan cerdas untuk mengoptimalkan modal sosial berupa jaringan kekerabatan dan keagamaan yang ada di dusun. Dilihat dari sudut pandang manajemen bencana, situasi yang tidak terkontrol menunjukkan kacau balaunya penanganan pada tingkatan dusun. Kasus yang terjadi di Dusun Grogol memberikan gambaran bahwa para pemimpin di tingkat dusun dapat dilihat kurang mengambil peran dalam situasi yang sebenarnya sangat membutuhkan peran serta pemimpinnya untuk melindungi warganya. Dalam situasi seperti ini justru peran pemerintah dan para relawan sangat menonjol.

Selain fasilitator, kepala dusun yang kredibel juga difungsikan untuk menjadi panutan sehingga mereka ini memiliki semacam karisma. Beberapa dusun di sekitar Merapi memiliki kepala dusun yang berkarisma bagi penduduknya. Kepala dusun mempunyai pengaruh yang kuat pada warga untuk mengikuti keputusannya. Kepala dusun ini misalnya dari Dusun Gowok Sabrang¹ yang dipandang sebagai tipe orang yang sangat sederhana, “*ngemong*” dan “*nuwani*”. Ia sering kali bertindak sebagai bapak terhadap para warganya. Karisma ini muncul karena sifat-sifat pribadi yang dapat menjadi tauladan anggota masyarakat lainnya. Rela berkorban, mau menjaga dusun sementara warga mengungsi, kerelaan untuk menengok warga yang mengungsi di berbagai tempat, telah mengantarkannya menjadi tumpuan warga dalam penanganan dampak erupsi Merapi. Nilai lokal berupa kemantapan hati, doa, ilmu *titen* seperti *aja gumunan* (jangan merasa heran) ketika Merapi sedang erupsi, *aja alok-alok* (jangan berkomentar) ketika ada kejadian yang luar biasa, dan jangan memukul kentongan “titir” sebagai tanda bahaya, menjadi sumber kekuatannya. Modal kultural lain adalah kepemimpinan yang partisipatif, kebakakan dan rela berkorban harta benda. Sebagaimana ditunjukkan Kepala Dusun Kemiri Cilik. Ia selalu menyediakan angkutan milik pribadi untuk mengangkut warga yang akan menengok rumahnya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa peran yang tidak kalah penting adalah kepala dusun yang juga menjaga tertib sosial dan harmoni sosial dalam situasi gawat darurat. Umumnya dalam situasi darurat orang mudah tertekan dan berebut bantuan sosial dari para relawan atau dermawan. Kepala Dusun Grogol misalnya pulang kembali ke rumah untuk memastikan kampungnya aman, dan ia menampung bantuan sosial dari para dermawan yang berasal dari kalangan organisasi atau individual. Uang dan barang ia terima dibagikan ke warga, dan bahkan ia juga mengundang warganya agar menerima bantuan secara tertib, sopan dan jujur.

¹ Secara geografis Dusun Gowok Sabrang sangat rentan terhadap bahaya atau ancaman *wedhus gembel* (awan panas), namun aman terhadap ancaman lahar panas.

8.3.1.4 Solidaritas horizontal

Modal sosial yang tidak kalah penting dalam program penanggulangan bencana adalah solidaritas horisontal antar warga yang membuahkan semangat keswadayaan dan kemandirian. Studi ini memperlihatkan bahwa modal sosial ini menjadi pilihan secara sadar dan selalu direproduksi oleh warga. Sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa sub bab terdahulu, ekspresi atas pilihan ini muncul dalam bentuk keengganan untuk menerima suatu intervensi program yang bias elit, kelas dan gender. Dengan menggunakan solidaritas horisontal maka penanggulangan bencana tetap memelihara keutuhan komunitas. Dengan mengedepankan model ini, sebenarnya program-program pemangku kepentingan akan direspon secara positif oleh orang Merapi. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa berdasarkan kajian ini, komunitas Merapi merupakan komunitas yang relatif egalitarian dalam relasi gender.

Relasi yang setara antar lelaki dan perempuan itu terjadi karena adanya mode produksi yang membutuhkan intensitas kerja yang tinggi antar lelaki dengan perempuan. Termasuk juga adanya struktur dan kultur matrifokal, dan adanya akses perempuan untuk mengurus sumberdaya produktif di desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunitas Merapi memiliki sistim nilai yang menempatkan perempuan pada posisi penting dan strategis dalam rumah tangga. Alokasi kerja perempuan yang tinggi dalam mengelola rumah tangga dan memiliki posisi yang juga penting dalam masyarakat juga memberikan kontribusi pada peningkatan posisi perempuan. Kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh bagi strategi penanggulangan bencana.

8.3.1.5 Kesetaraan Gender

Masalah utama yang muncul dalam program bencana alam adalah bias gender dan peran perempuan yang semakin terpinggirkan ketika program dicanangkan. Munculnya bias gender tersebut karena pemerintah, LSM, atau para pemangku kepentingan sudah mempunyai praduga bahwa masalah bencana adalah masalah lelaki dan perempuan tidak akan efektif menjawab masalah yang muncul bahkan perempuan dianggap sebagai bagian dari masalah itu sendiri.

Dalam kenyataannya, kasus Merapi menunjukkan tingginya peran perempuan pada berbagai proses penanggulangan. Pada tahap mitigasi misalnya, perempuan tidak kalah dengan pria. Dalam tradisi ritual, perempuan berperan dalam penyiapan konsumsi sampai dengan sesaji. Perempuan mengetahui tentang sesaji yang ini berarti bahwa mereka mempunyai peran penting dalam mitigasi dan evakuasi karena lewat sesaji itu mereka mengetahui watak Merapi secara simbolik dan empirik.

Di Merapi, perempuan secara kultural memang memiliki posisi yang relatif setara sehingga seluruh program penanggulangan bencana selalu melibatkan perempuan. Peran itu kemudian sering terkendala karena adanya program yang bias gender atau adanya kecenderungan bahwa program penanggulangan bencana fokus pada urusan evakuasi dan rehabilitasi. Program ini memang lebih mengarah pada pembangunan fisik. Namun demikian, di balik itu sesungguhnya perempuan bisa berperan maksimal karena kalau program dicanangkan secara partisipatif dengan menggerakkan tenaga kerja lokal, maka urusan konsumsi menjadi tanggungjawab perempuan.

8.3.2 Pengembangan Konsep Partisipasi Masyarakat

Berbagai donor dan kalangan aktivis sedang mempromosikan satu program penanggulangan bencana dengan memakai pendekatan partisipasi. Dalam agenda penanggulangan bencana alam, konsep partisipasi merujuk pada konsep yang sering dipakai dalam agenda pemberdayaan masyarakat yaitu *voice* (aspirasi), *access* (akses) dan *control* (kontrol) terhadap keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan dan program-program politik sosial dan ekonomi yang dapat mengangkat atau menurunkan kesejahteraan dan kemandirian ekonominya. Adapun dalam studi ini, partisipasi merujuk pada berbagai modal sosial yang dimiliki orang Merapi sebagai suatu kekuatan warga secara kolektif untuk menegosiasikan kepentingannya, termasuk dalam kaitannya dengan program penanggulangan bencana alam. Putnam memberikan pengertian modal sosial organisasi, atau jaringan sosial yang mempunyai kekuatan untuk menghasilkan pengaruh dan dukungan sosial. Dalam pandangan Putnam (1993:

167) warga yang memiliki modal sosial kuat adalah mereka yang saling percaya untuk menjunjung nilai kesetaraan, resiprositas, dan kemitraan (Hudayana, 2011:9).

“People with high levels of social capital see each other as political equals, ‘bound together by horizontal relations of reciprocity and cooperation, not by vertical relations of authority and dependency.’” (Putnam 1993:167).

Menurut Tandon dan Mohanty, warga yang memiliki modal sosial kuat ditandai dengan perkumpulan atau jaringan yang terpercaya bagi para anggotanya untuk memperjuangkan kepentingan bersama (*common interest*) (Hudayana, 2012: 8). Perkumpulan itu terpercaya sebagai mitra pihak luar karena dapat menjalin kerja sama dan menyampaikan aspirasi secara partisipatif (Edwards, 2004:18; Halpern, 2005:36), mendorong para anggotanya aktif sebagai warga negara (Rice, 2003:3), dan melakukan resistensi terhadap kebijakan yang merugikan dan menelan korban (Fayong, 2005).²

Berpijak dari konsep modal sosial tersebut, maka keberadaan keluarga dan komunitas dalam masyarakat Merapi bukan dipandang sebagai objek sasaran proyek. Sebaliknya warga seyogyanya diperlakukan sebagai institusi sosial yang akan menjalankan program sehingga mereka diberi ruang untuk berpartisipasi.

Pertama, partisipasi harus bertumpu pada basis sosial yang dianggap paling kuat menjadi representasi para korban. Basis sosial yang nampak kuat di lereng Merapi adalah keluarga, rukun tetangga dan dusun. Ketiga unit sosial ini memiliki tanggungjawab sosial yang besar untuk melayani warganya dan mempunyai orientasi nilai luhur untuk melindungi anggotanya dengan azas kekeluargaan, kesetaraan, dan keadilan sosial serta kesejahteraan bersama. Oleh karena itu partisipasi dikembangkan dengan memberikan peluang kepada warga

² Lihat juga Fukuyama (2002:33) yang menganggap bahwa modal sosial yang kuat dapat mendorong munculnya relasi kuasa yang berbasis pada kepercayaan. Adapun Edward (2004: Bab 2-3) memahami bahwa modal sosial sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat yang terorganisasi (*civil society as the associational life*), bermartabat (*civil society as the good society*), dan partisipasi yang inklusif dalam mengelola ruang publik (*civil society as the public sphere*).

untuk menyampaikan aspirasi, mengakses dan mengontrol program penanggulangan bencana alam.

Kedua, program memperkuat peran dusun dalam menjalankan fungsi *self-governing community* sehingga urusan bencana tidak dikuasai dan ditangani langsung oleh agen-agen dari luar yang merepresentasikan negara atau organisasi masyarakat sipil dari luar. Mereka tetap berperan menangani bencana tetapi fungsinya tidak mendistorsi fungsi dari komunitas dusun sebagai *self-governing community*.

Ketiga, program lebih memperkuat kapasitas keluarga, rukun tetangga atau dusun dalam menjalankan kepemimpinan yang partisipatif, sehingga akan melahirkan program-program riil yang populis dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Keempat, program memperkuat inisiatif lokal untuk bangkit dari ketidakberdayaan dengan mendukung program yang berbasis pada keswadayaan dan kemandirian. Program semacam ini akan membuat masyarakat tidak bergantung pada bantuan dan dukungan dari luar untuk keluar dari jerat ketidakberdayaan. Hal yang sering muncul dalam program adalah masyarakat memiliki ketergantungan pada bantuan dari luar.

Kelima, program memperkuat kembali berbagai institusi lokal dan budaya lokal agar lebih responsif menyelenggarakan kegiatan atau program yang secara langsung atau tidak langsung mendukung agenda penanggulangan bencana alam. Oleh karena itu, maka ritual-ritual komunitas, misalnya, bisa didorong tetap hidup dan bahkan berkembang. Aktivitas ini secara nyata dapat menjadi arena bagi warga membangun solidaritas dan kerjasama untuk menanggulangi masalah kebencanaan.

Penguatan institusi dan budaya lokal sangat relevan untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Hal ini karena masyarakat Merapi merupakan tipe masyarakat yang mandiri, tidak bergantung pada peran negara dalam menjawab berbagai masalah sosial dan ekonomi di komunitasnya. Insitusi dan budaya lokal menjadi tumpuan bagi mereka untuk mengekspresikan aspirasi, akses, dan kontrolnya terhadap sumberdaya yang mereka hadapi. Sebagai contoh, kalau

institusi dan budaya lokal memahami pasir sebagai barang publik, dan pasir menjadi berkah bagi komunitas maka sudah barang tentu konsep ini harus dihormati dan bisa menjadi jalan bagi warga untuk mengatasi beban erupsi dengan mendayagunakan konsep itu untuk tujuan pemulihan dan kemanusiaan.

BAB IX

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

9.1 Kesimpulan

Studi ini telah memetakan pola adaptasi komunitas di lereng Merapi. Kesimpulan studi ini akan menyoroti pola kesamaan adaptasi tetapi sekaligus keragamannya mengenai tema budaya adaptasi orang Merapi. Kesimpulan studi ini memberikan perhatian pada tema budaya adaptasi orang Merapi sehingga mereka dapat hidup berdampingan dengan ekologi yang rawan mengeluarkan bencana tetapi juga memberikan kemakmuran.

Studi ini menemukan bahwa sebenarnya tema budaya adaptasi orang Merapi adalah menuju harmoni dan sejahtera. Harmoni artinya orang Merapi membangun komunitas untuk mencapai kehidupan yang selaras antara warga dengan alam dan sesamanya sehingga terwujud suatu kehidupan dalam kebersamaan. Adapun sejahtera artinya orang Merapi selalu berusaha untuk meraih kesejahteraan ekonomi dari sumberdaya yang ada di dalamnya. Dengan demikian mereka mengembangkan berbagai bentuk dan aktivitas budaya yang ujungnya adalah meningkatkan akses, kontrol atas sumberdaya yang ada di wilayahnya.

Tema budaya adaptasi orang Merapi menuju harmoni dan sejahtera mengingatkan wacana yang berkembang di UGM ketika Merapi erupsi 2010. Diskursus itu berisi gagasan bahwa sebaiknya korban tidak harus meninggalkan Merapi tetapi mampu hidup secara harmonis dengan Merapi yang aktif mengeluarkan erupsi. Adapun kesejahteraan mengingatkan juga tema seminar kerjasama PSAP dan LAURA tentang esensi dari adaptasi orang Merapi. Seminar menggarisbawahi bahwa Merapi telah memberikan kesejahteraan bagi komunitas di dalamnya sehingga dalam melihat komunitas harus dari perspektif ekonomi politik. Semua tema diskursus tentang Merapi itu justru menemukan fakta empirisnya pada studi ini.

Pertama-tama adalah tema harmoni. Studi ini tidak menggali apa makna harmoni dalam alam pikiran orang Merapi sebagai suatu teks yang tersusun runtut dan detail. Sebaliknya kajian ini bertujuan melihat bagaimana mereka menata kehidupannya di berbagai sektor, dan dari penataan ini dapat ditemukan konstruksi harmoni yang menjadi landasan dari kehidupannya. Secara tematis, tema harmoni dalam kehidupan orang Merapi merujuk pada adanya keselarasan hubungan antara manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia. Pada hubungan antara manusia dengan alam, orang Merapi mengenal adanya bahaya dari erupsi Merapi dan bahaya itu bisa menyimpannya. Bahaya itu tidak dihayati sebagai ancaman akan terjadinya bencana yang harus mereka hindari seterusnya. Merapi juga memberikan aset, penghidupan, kehidupan dan jati diri sehingga jalan keluarnya adalah menjadi bagian dari komunitas dalam wilayah Merapi seadaptif mungkin. Tindakan seadaptif mungkin dilakukan dengan membentuk komunitas kecil yang menempati lokasi yang relatif aman, di luar jalur erupsi, dan komunitas kecil ini dipelihara tetap kecil agar lebih mampu menghindari erupsi Merapi yang bisa membesar dan melanda kampungnya. Kedua, memastikan bahwa komunitas bisa hidup tenteram, nyaman dan tenteram di tengah adanya ancaman erupsi yang berlangsung secara berkala dan biasa berubah-ubah arah dan volumenya. Keempat, membangun keswadayaan dan kemandirian sehingga keputusan tinggal di lereng Merapi adalah keputusan yang bebas dan tidak diatur oleh pihak lain yang sering mencemaskan atas keberadaan Merapi yang bisa menimbulkan bencana di tanah Jawa. Dengan membangun keswadayaan dan kemandirian, maka seluruh sumberdaya infrastruktur dan kekayaan komunitas menjadi aset dan penghidupan mereka masing-masing, dan bukan milik orang asing. Kelima, meningkatkan kedekatan dengan alam gaib dan kepekaan terhadap alam sehingga bisa lebih mapan dalam menghadapi erupsi Merapi. Keenam, mengembangkan kepercayaan dan ritual untuk memenuhi dorongan psikologis dan membentuk kesadaran kolektif mengenai pentingnya mengendalikan dan mewaspadaikan dinamika erupsi Merapi. Ketujuh mengembangkan komunitas yang memiliki solidaritas sosial yang tinggi dan berjejaring dengan pihak luar guna

menghadapi situasi darurat di samping modal sosial itu diwujudkan untuk membangun komunitas yang humanistik.

Penyesuaian-penyesuaian dalam rangka mewujudkan suatu kehidupan yang harmonis di atas sebenarnya merupakan kesimpulan dari fakta empiris yang terbaca dalam deskripsi etnografi pada bab-bab di muka. Dengan demikian deskripsi-deskrip tersebut bukan sebuah pernyataan tekstual, melainkan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari orang Merapi. Dalam dataran yang lebih empirik sesuai dengan fakta etnografi di Merapi maka dapat digambarkan bahwa dusun-dusun di lereng Merapi memang ukurannya kecil. Dengan tinggal di dusun yang kecil ini mereka bisa menempati ruang-ruang di lereng Merapi yang aman dari erupsi, membentuk organisasi sosial yang kohesif, kompak, dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi.. Kondisi ini membentuk kesadaran yang kuat mengenai Merapi sebagai wilayah yang berbahaya tetapi memberikan rasa aman dan kesejahteraan. sehingga mereka mampu bersama-sama untuk melakukan ritual mitigasi bencana, mendekatkan diri kepada yang menguasai lingkungannya, menjaga kelestarian lingkungan, dan menghindari marabahaya dengan menggunakan teknologi yang tepat guna, menjalin hubungan sosial yang mengedepankan solidaritas dan kebersamaan antar warga dalam suka dan duka. Semua perilaku sosial tersebut menjadikan orang Merapi tidak paranoid dalam menghadapi Merapi dan meninggalkan kampungnya. Sebaliknya, mereka mencoba menjadi selaras dengan alam Merapi dan membuat warga dalam komunitas Merapi juga selaras dengan komunitasnya.

Dengan selaras berarti orang Merapi berusaha akrab dan mengenal baik watak Merapi. Setiap komunitas mengetahui watak Merapi yang bisa mereka amati dari segi dampaknya ketika erupsi. Pengetahuan ini termasuk tentang watak Merapi dan bagaimana mengantisipasi dengan menggunakan berbagai ritual yang menjaga ketenangan batin. Keyakinan bahwa Merapi tidak akan menghancurkan menjadi semacam modal penting bagi orang Merapi untuk hidup dalam ekologi ini tanpa ketakutan, dan kedaruratan.

Konsep keharmonisan nampak dari konsepsi orang Merapi tentang Merapi sebagai sosok yang suci dan adanya penguasa Merapi yang memberikan hak bagi

manusia untuk menempati dan saling menjaga eksistensinya. Oleh karena itu, orang Merapi membiarkan Merapi aktif karena sesuai dengan kodratnya dan kuasa para penghuninya di alam gaib. Untuk menjalin hubungan yang baik mereka juga menyelenggarakan ritual sebagai bentuk komunikasi dan pertukaran resiprositas.

Secara horizontal keselarasan juga tercermin pada hubungan antara manusia dengan manusia. Orang Merapi hidup dalam komunitas dusun yang menjadi habitat bagi mereka untuk membangun kehidupan yang berasakan harmoni seperti mengedepankan konsep *guyup*, rukun, tolong-menolong, membangun kesejahteraan bersama dan berkawan dengan berbagai macam golongan dalam masyarakat yang lebih luas. Dengan cara seperti itu, orang Merapi merasakan adanya suatu hubungan kekeluargaan yang menjadikan hidup lebih harmonis daripada dalam persaingan dan kekerasan.

Selaras dilengkapi dengan sejahtera. Merapi sebagai gunung telah dimaknai orang Jawa sebagai sumber kesuburan dan karena itu juga menjadi sumber kesejahteraan. Merapi telah membuktikan mampu menjadi sumber penghidupan dan kehidupan masyarakatnya karena telah menjalankan fungsi alami tersebut. Merapi telah menyediakan ekosistem yang stabil untuk peternakan sapi, pertanian salak, sayuran, jagung, dan tembakau. Dengan kecerdasannya warga memiliki kemampuan membangun sistem pertanian multikropping dan peternakan sapi sebagai penyedia pupuk kandang guna menjaga kesuburan tanah yang terus menerus ditanami tanaman sepanjang tahun. Dalam jangka panjang penduduk terus meningkat. Namun hingga kini dengan adanya kelangkaan tanah dan tekanan penduduk atas tanah, orang Merapi masih bisa bertahan. Dengan demikian mereka enggan meninggalkan kampung halamannya hanya karena alasan daerahnya rawan bencana.

Konstruksi bahwa orang Merapi hidup dalam kemiskinan dan kekurangan sesungguhnya bisa dibenarkan ketika orang berbicara tentang tingkat penghasilan dan kepemilikan tanah dan harta benda. Namun dari segi adaptibilitas, orang Merapi mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonominya sepanjang sejarahnya, terutama sejak 20 tahun terakhir ini. Mereka bisa

mengembangkan ekonomi komersial dan komoditas unggulan di Jawa Tengah dan Yogyakarta di tengah keterbatasan sumberdaya seperti tanah dan modal. Eksosistem Merapi memberikan andil kepada warga untuk mengembangkan inovasi usaha tani dengan komoditas unggulan yang cukup khas dari Merapi, seperti salak pondoh, sayuran, tembakau, dan ternak sapi.

Harmoni dan sejahtera menjadi tema hidup orang Merapi. Tema itu memasukkan keberadaan Merapi yang aktif mengeluarkan erupsi, bisa menghancurkan dusun, dan mematikan manusia dan hewan serta tumbuhan yang diterjangnya. Namun demikian, orang bisa hidup di Merapi dengan bertumpu pada tema kehidupan itu sebagaimana dilakukan orang Merapi pada umumnya.

Ketika Merapi meletus dan memaksa penduduk harus waspada, siaga sampai dengan mengungsi, mereka memegang konsep harmoni untuk melakukan evakuasi sampai dengan memulihkan kembali pasca pengungsian. Dengan konsep harmoni orang Merapi tetap menolak adanya relokasi, transmigrasi atau pengungsian yang menjauhkan mereka dari Merapi sebagai ekosistem dan habitat sosialnya. Dengan harmoni mereka bisa secara bersama-sama menanggung beban sosial dan ekonomi untuk memulihkan kehidupan pasca erupsi.

Sejahtera juga menjadi tema penting dalam kehidupan Merapi sekalipun erupsi menerjang kampung halaman. Orang bisa berharap bahwa ekonomi bisa dipulihkan dan bahkan pasir serta batu limbah erupsi bisa menyambung ekonomi yang stagnan akibat adanya erupsi yang besar di Merapi. Bahkan etos kerja orang Merapi yang tinggi seolah bergayung sambut dengan sumberdaya di Merapi yang dapat didayagunakan untuk menghasilkan produksi yang dapat dipasarkan dan dapat membawa kesejahteraan.

Dalam ekosistem Merapi yang tidak stabil, orang Merapi justru meningkatkan kehidupan sosialnya yang diwarnai oleh konsep harmoni dan semangat untuk hidup sejahtera. Hal ini karena harmoni menjadi alat untuk memecahkan masalah atas ketidakstabilan Merapi itu. Setiap kali erupsi maka harmoni seperti *guyup* rukun, tolong menolong dan gotong royong menjadi jalan keluar untuk menjawab masalah erupsi seperti melakukan pengungsian, rekonstruksi, dan rehabilitasi. Erupsi juga memberikan peluang bagi warga untuk

mencari rejeki baru dari limpahan pasir dan material yang dikeluarkan Merapi. Dalam jangka panjang, ekonomi dan kehidupan di lereng Merapi bisa pulih kembali sehingga melahirkan kesejahteraan. Erupsi merupakan siklus yang harus dilewati warga untuk membayar seluruh biaya dan kenikmatan yang telah mereka nikmati.

9.2 Rekomendasi

Dinamika erupsi Merapi yang melahirkan masyarakat Merapi kemudian hidup dengan budaya harmoni dan mengejar kesejahteraan membawa implikasi serius pada sistem penanggulangan bencana alam. Selama ini konsep yang sangat menawan adalah mengedepankan peran negara (*state-driven*) yang dengan lain kata adalah memasrahkan dan menyerahkan tanggungjawab terbesar dalam menangani bencana alam kepada negara. Rakyat diibaratkan telah mengontrak negara untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Mandat pada negara adalah bahwa bencana alam harus diantisipasi. Jika terjadi bencana maka korban harus dihindari sebisa mungkin atau korban yang ada disantuni. Konsep ini mengharuskan pemerintah memiliki kekuatan dan sumberdaya yang memadai untuk mampu melakukan program penanggulangan bencana yang efektif. Saat kekuatan dan sumber daya yang dibutuhkan lemah atau absen maka negara akan dianggap gagal menjalankan misinya. Pemerintah akan sering disalahkan.

Berbagai bencana di Indonesia dan terutama bencana erupsi Merapi yang rutin terjadi dalam kalender multitalahun akan membuat negara kedodoran jika masyarakatnya enggan diungsikan, direlokasi, dan ditransmigrasikan. Akibatnya, ketika banyak korban maka pemerintah tetap disalahkan. Keengganan masyarakat meninggalkan komunitas dusun terjawab dalam studi ini. Mereka pada intinya telah beradaptasi dengan ekosistem Merapi dengan membentuk komunitas yang menjaga harmoni demi membangun kesejahteraan melalui skema keswadayaan dan kemandirian. Oleh karena itu, pula mereka mengembangkan komunitas yang mampu merespon ancaman erupsi Merapi. Memang ketika terjadi erupsi dengan skala yang besar, akan muncul korban. Hal itu bisa terjadi dalam masyarakat modern sekalipun seperti bencana tsunami di Jepang belakangan ini. Akan tetapi,

orang Merapi mempunyai strategi adaptasi terhadap bencana yang patut diapresiasi karena mereka ini bisa bertahan mengandalkan pada kekuatan budaya dan partisipasi.

Skenario yang masuk akal dan bisa mendorong pembaharuan sistem penanggulangan ke depan adalah mempromosikan penanggulangan bencana berbasis pada kekuatan budaya dan partisipasi. Pada skenario pertama, negara adalah memanfaatkan budaya lokal sebagai alat adaptasi masyarakat guna mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berperspektif budaya. Pengetahuan lokal mengenai tata ruang dusun dan perumahan yang aman, kepercayaan dan ritual mitigasi, syukuran pasca erupsi, dan berbagai kultur dan kehidupan sosial yang harmoni dan berorientasi pada kesejahteraan melalui keswadayaan dan kemandirian justru menjadi ekayaan sosial-budaya masyarakat lokal yang patut dilestarikan dan difasilitasi keberadaannya. Skenario ini mengajak pemerintah bisa mendorong masyarakat lokal semakin terampil dalam mengembangkan strategi adaptasi termasuk konsep harmoninya sehingga mereka bisa lebih mandiri dan efektif dalam menghadapi resiko bencana.

Adapun skenario kedua adalah masyarakat didorong lebih memiliki kemampuan untuk mengorganisasi diri dalam mengenali peta masalah, menganalisis perkembangan Merapi, dan melakukan evakuasi sampai dengan pemulihan. Masyarakat juga didorong untuk mampu menyampaikan aspirasinya, mengakses, dan mengontrol program penanggulangan bencana. Strategi itu berarti mendorong terbangunnya suatu penanggulangan bencana secara partisipatif.

Pendekatan partisipatif menjadi pendekatan alternatif untuk mengurangi peran negara yang tidak perlu dalam menangani bencana. Pendekatan ini sekaligus bisa mendorong negara lebih berperan sebagai fasilitator daripada regulator. Menjadi fasilitator mutlak diperlukan bagi masyarakat lokal guna memperkuat berbagai elemen-elemen budaya mereka bisa yang dilestarikan, didiseminasikan dari generasi ke generasi.

Agar pendekatan budaya dan partisipasi bisa bergayung sambut dan memiliki efek yang nyata pada pengurangan resiko bencana, diperlukan adanya suatu pendekatan yang mendorong masyarakat lokal untuk melakukan

rasionalisasi. Rasionalisasi ini artinya masyarakat diajak untuk mengembangkan praktik budaya baru yang lebih realistis dan mampu menangkal adanya bencana. Rasionalisasi juga berarti masyarakat lokal mampu mengembangkan manajemen yang lebih aktif. Di Merapi, masyarakat pada dasarnya sadar akan pentingnya rasionalisasi. Hal itu telah dilakukan oleh masyarakat, misalnya masyarakat Turgo yang menerima komunitas ganda, satu berada di Sidumoro dan satu di dusun lama, satu lebih aman dan satu berada di KRB III. Rasionalisasi yang belakangan muncul adalah mendorong generasi muda Merapi menikah dengan orang luar di daerah bawah. Dengan cara seperti itu maka orang Merapi akan turun atau ketika mengungsi mereka bisa tinggal di sanak saudaranya.

Masalah utama dalam mengembangkan pendekatan budaya dan partisipasi adalah bagaimana agar peran komunitas itu tidak menggantikan peran negara dan masyarakat sipil termasuk di dalamnya media. Studi ini mencatat bahwa peran negara, masyarakat sipil dan bahkan swasta sangat diperlukan sekali dalam menghadapi erupsi yang besar sehingga memerlukan kerjasama kemitraan dan peran yang tepat antar semua pihak tersebut dengan komunitas.

Peran pemerintah adalah lebih sebagai regulator dan pelayanan publik. Peran ini diharapkan tidak meniadakan sistem pengetahuan lokal dan partisipasi masyarakat tetapi lebih berperan dalam memperkuat keberadaan pengetahuan lokal dan partisipasi masyarakat. Adapun CSO berperan mendorong tumbuhnya gerakan penanggulangan bencana berbasis pada budaya dan partisipasi masyarakat, serta solidiaritas horizontal inklusif. Adapun media dengan program CSR-nya bisa mensponsori dan memperkuat program binaan di komunitas-komunitas yang menjadi dampungannya.

Kerjasama kemitraan dapat dilakukan dalam berbagai tahapan proses penanggulangan bencana. Beberapa rekomendasi adalah sebagai berikut:

Tahap Pra Bencana

1. Program penguatan tanggap bencana di setiap dusun
2. Program penguatan budaya dan institusi lokal yang responsif dengan masalah kebencanaan.

3. Program penataan ulang tata ruang dusun dalam rangka pengurangan risiko bencana
4. Program penguatan masyarakat melakukan pengungsian swakarsa mandiri.
5. Program sosialisasi penanggulangan bencana berbasis pada pengetahuan lokal dan partisipasi masyarakat.

Tahap Bencana

1. Fasilitasi upaya masyarakat melakukan pemantauan perkembangan bencana
2. Fasilitasi masyarakat melakukan pengungsian swakarsa mandiri
3. Fasilitasi masyarakat melakukan pengungsian dengan memakai model *village sister*
4. Fasilitasi masyarakat mengembangkan perencanaan pembangunan pasca erupsi secara partisipatif

Tahap Pasca Bencana

1. Pendampingan masyarakat lokal dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan menggunakan sumberdaya lokal dan dukungan dana kemanusiaan
2. Memfasilitasi lembaga kemanusiaan untuk menjadi mitra masyarakat lokal dalam mengembangkan program kemandirian ekonomi
3. Meningkatkan kerjasama ekonomi antar masyarakat lokal dan swasta dalam rangka pemberdayaan masyarakat kecil di lereng Merapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R.O’G. 2001. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang* (Terjemahan). Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar.
- Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta. 2007. *Pusaka Aksara Yogyakarta. Alih Aksara dan Alih Bahasa Prasasti Koleksi Balai Pelestarian Yogyakarta*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta.
- Bappenas dan BNPB. 2011. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Merapi di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013.
- Bourdieu, Pierre. 1994. “Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic Field.” *Sociology Theory* 12 (1)(March 1994): 1-18.
- Bowen, John R. 1993. *Muslim People Through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society*. New Jersey: Princeton University Press.
- Bronto, Sutikno, Dwi Sri Sayudi dan Gendoet Hartono. 2003. “Variasi Luncuran Awan Panas Gunung Merapi dan Bahayanya”. Dalam: Agus Hendratno (ed.). *Gunung Merapi: Sejarah Letusan. Bahaya dan Manfaatnya*. Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Pengurus daerah Jogjakarta-Jawa Tengah.
- Dove, Michael R. 2010. "The Panoptic Gaze in Non-Western Setting: Self-Surveillance on Merapi Volcano, Central Java" dalam *Religion* 40 (2010)
- Geertz, Clifford. 1976. *Religion of Java*. London: University of Chicago Press.
- Hay, M. Cameron. 2000. *Remembering to Live: Illness at the Intersection of Anxiety and Knowledge in Rural Indonesia*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

- Heckert, Alex; Nowak, Thomas C.; Snyder, Kay A. 1998. "The Impact of Husbands' and Wives' Relative Earnings on Marital Disruption", *Journal of Marriage and the Family*, Vol. 60, No. 3 (Aug., 1998), pp. 690-703 Published by: National Council on Family Relations Stable
- Hefner, Robert. 1999. *Civil Islam: Muslims and Democratization In Indonesia*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hudayana, Bambang, 1994. *Adaptasi Masyarakat terhadap Bencana Alam*. Studi Kasus Bencana Alam Merapi. Yogyakarta: fakultas Sastra UGM
- Inandiak, Elizabeth E. 2010. *Merapi Omahku*. Yogyakarta: Yayasan Loka-Loka.
- Jaringan Informasi Lingkar Merapi. 2009. *Simulasi Pengurangan Resiko Bencana (Latihan Evakuasi Bencana)*. 9 Maret 2009.
- Judith Schlehe. "Cultural Politics of Natural Disaster: Discourse on Volcanic Eruptions in Indonesia" dalam Casimir Michael J. (Ed.). 2008. *Culture and the Changing Environment*. Oxford: Berhahn Books.
- Koentjaraningrat. 1989. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Gramedia
- Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Laksono, P.M., 1988, *Persepsi Setempat dan Nasional Mengenai Bencana Alam: Sebuah Desa di Gunung Merapi*.
- Lapian, A.B., 1987. "Bencana Alam dan Penulisan Sejarah (Krakatau 1883 dan Cilegon 1888)". dalam: T. Ibrahim Alfian, H.J. Koesoemanto, Dharmono Hardjowidjono, dan Djoko Suryo. eds. *Dari Babad dan hikayat sampai Sejarah Kritis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nastiti, Titi Surti , Dyah Wijaya Dewi, Richardiana Kartakusuma. 1982. *Tiga Prasasti dari Masa Balitung*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Depertemen P & K.

- Oliver-Smith in Benjamin Loh. 2005. *Disaster Risk Management in Southeast Asia: A Developmental*
- Peacock, Walter Gillis. Nicole Dash, dan Yan Zhang. 2007. *Sheltering and Housing Recovery Following Disaster dalam Handbook of Disaster. (Ed).*
- Ratdomopurbo, A dan Supriyati D. Andreastuti. t.t. *Karakteristik Gunung Merapi*. Yogyakarta: Balai Penyelidikan dan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian. Direktorat Vulkanologi.
- Ratdomopurbo, A., Subandriyo, Y. Sulistiyo, dan Suharna (eds.). 2006. *Prekursor Erupsi Gunung Merapi*. Diterbitkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Badan Geologi. Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral.
- Schelehe. 1996. "Reinterpretation of Mystical Traditions: Explanations of a Volcanic Eruption in Java" dalam *Anthropos*. 91. 1996
- Scott, James C. 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven dan London: Yale University Press.
- Steward, Julian H. 1935. *Theory of Cultural Change*.
- Suwarso Alip Nugroho, 2000, *Pengaruh Letusan Gunung Merapi terhadap Candi Sambisari, Candi kedulan, dan Candi Morangan*. Skripsi. Jurusan Arkeologi, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Triyoga, Lucas Sasongko. 2011. *Manusia Jawa dan Gunung Merapi: Persepsi dan Kepercayaannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Turner, Victor. 1967. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Chicago: Aldine.

Woodward, Mark. 1989. *Islam in Java: Normative Piety, and Mysticism in Javanese Sultanate Yogyakarta*. Tuscon: Arizona University Press.

Jurnal dan Media Cetak

Andreastuti, Supriati Dwi, Chris Newhall, dan Joko Dwiyanto. 2006. *Menelusuri Kebenaran Letusan Gunung Merapi 1006*. Jurnal Geologi Indonesia. Vol. 1 No. 4 Desember 2006: 201-207

Approach, ASEAN Economic Bulletin, Vol.22, No.2 (August 2005) pp. 229-239. Insititute of Southeast Asian Studies (ISEAS)

Bemmelen, R.W. van. 1949. *The Geology of Indonesia*. vol. IA. General Geology. Government Printing Office. The Hague. 732 h.

Camus, A.,G., Gourgaud, P.C. Mossand-Berthommier, P.M. Vincent. 2000. "Merapi (Central Java, Indonesia): An outline of the structural and magmatological evolution, with a special emphasis to the major pyroclastic events". *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 100 (2000) 139–163.

Dove, Michael R. 2008. "Perception of volcanic eruption as agent of change on Merapi volcano, Central Java" in: *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 172 (2008) 329–337.

Jaringan Informasi Lingkar Merapi. 2009. *Simulasi Pengurangan Resiko Bencana (Latihan Evakuasi Bencana)*. 9 Maret 2009.

Kompas. 2010. *Instalasi Air di Plunyon Keterjang Lahar Dingin*, KOMPAS, Jumat, 5 November 2010.

Kompas. 2010. *Merapi Peras Air Mata*, KOMPAS, Sabtu, 6 November 2010.

Kompas. 2012. *Komunitas Relawan Intensif Menyiapkan Anggota*. 12 Maret 2012.

Kedaulatan Rakyat. 2001. *Ampun Wedus Gembel Mboten Mriki*. 14 Februari 2001

-----, 2006. *Dalam Latihan Bencana, Lahar Dingin Datang, Ribuan Warga Diungsikan*. 15 September 2006.

- Kuswijayanti, Elisabeth Repelita, Arya Hadi Dharmawan, Hariadi Kartodihardjo. 2007. Krisis-Krisis Socio-Politico-Ecology di Kawasan Konservasi: Studi Kasus Ekologi Politik di Taman Nasional Gunung Merapi. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. April 2007. Hlm. 41-66.
- Newhall. C., Bronto. S., Alloway, B.V., Banks, N.G., Bahar. I., Del Marmol, M.A., Hadisantono, R.D., Holcomb, R.T., McGeehin. J., Miksic, J.N., Rubin, M., Sayudi, S.D., Sukhyar, R., Andreastuti, S.D., Tilling, R.I., Torley, R., Trimble, D., and Wirakusumah, A.D., 2000. "10.000 Years of Explosive Eruptions of Merapi Volcano. Central Java: Archaeological and Modern Implications". *Journal Volcanology and Geothermal Research*. 100. h. 9-50.
- Ratdomopurbo, A dan Supriyati D. Andreastuti. t.t. *Karakteristik Gunung Merapi*. Yogyakarta: Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian. Direktorat Vulkanologi.
- Schlehe, Judith. 2010. *Anthropology of religion: Disasters and the representations of tradition, Elsevier, Science Direct*.
- Thouret, J.-C., F. Lavigne, K. Kelfoun, S. Bronto. 2000. Toward a Revised Hazard Assessment at Merapi Volcano, Central Java. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 100 (2000) 479–502.
- Voight, B., E.K. Constantine, S. Siswamidjono, dan R. Torley. 2000. "Historical Eruptions of Merapi Volcano, Central Java, Indonesia. 1768–1998". *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 100 (2000) 69–138.
- Wilson, T., Kaye, G., Stewart, C, and Cole, J. 2007. "Impacts of the 2006 Eruption of Merapi Volcano. Indonesia. on Agriculture and Infrastructure". GNS Science Report 2007/07.

- Winarko, Wijang. 2010. "*Peluang Dan Tantangan Partisipasi Masyarakat Di Dalam Mitigasi Bencana (Pengalaman Rekompak Merapi)*". Yogyakarta: Rekompak National Management Consultant Rekompak Merapi.
- Ortner, Sheri B. 2010. "*Theory of Anthropology since the Sixties*" in *Comparatives Studies in Society and History*. Vol. 26, No.1.
- Rappaport, Roy. 1979. "*Ritual Regulation of Environmental Relations among a Papua New Guinea People*" in *Ethnologie*. Vol. VI, No.1.
- Sosis, Richard. 2009. "*The Adaptionist-Byproduct Debate on the Evolution of Religion*" in *Journal of Cognition and Culture*, No.9.

Sumber Internet

Kartikaningtyas, S.T., 2009. Menguak Fenomena Letusan Merapi pada Terkuburnya Candi-Candi Sekitarnya. http://www.purbakala.jawatengah.go.id/detail_berita.php?act=view&idku=55. Diakses pada tanggal 25 Februari 2012.

http://www.merapi.bgl.esdm.go.id/informasi_merapi.php?page=informasimerapi&subpage=sejarah. Diakses pada tanggal 26 Februari 2012.

http://www.merapi.bgl.esdm.go.id/informasi_merapi.php?page=informasimerapi&subpage=sejarah. Diakses pada tanggal 26 Februari 2012.

Petrasawacana, 2010. Kajian Ekologis Dan Fenomena Letusan Gunung Merapi Terhadap Peradaban Mataram Kuno Masa Hindu – Budha. <http://petrasawacana.wordpress.com/>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2012.

<http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=53832>. Diakses pada 5 Maret 2012.

Persiapan Hunian Sementara Paska Tanggap Darurat Merapi Untuk Wilayah Kabupaten Sleman http://www.bnpb.go.id/irw/file/pengumuman/Persiapan_Hunian_Sementara_20_Nov.pdf. Diakses pada 5 Maret 2012.

Renaksi Pascabencana Erupsi Merapi Tahun 2011-2013 <http://bencana.bappenas.go.id/imdff/renaksi-merapi>. Diakses pada 5 Maret 2012.

Rovicky. 2006. Candi Kedulan: Menguak Potensi Geohazard Jogja dan Sekitarnya. Dogeng Geologi. <http://rovicky.wordpress.com/2006/08/18/candi-kedulan/>. Diakses pada 5 Maret 2012.

Warga Merapi Tolak Hunian Sementara. 12 Apr 2011 Nasional Suara Karya via <http://bataviase.co.id/node/636397>. Diakses pada 5 Maret 2012.

Kerusakan Fasilitas Huntara Belum Ditangani Rabu, 02 Nov 2011 15:54:24 WIB. Diakses pada 23 Maret 2012.

http://jogjaprov.go.id/infomerapi/?Berita:Presiden_SBY_Keluarkan_Lima_Instruksi. Diakses pada tanggal 5 April 2012.

http://jogjaprov.go.id/infomerapi/?Berita:Presiden_SBY_Keluarkan_Lima_Instruksi. Diakses pada tanggal 4 Mei 2012.

http://regional.kompas.com/read/2010/11/19/13225985/Tembang_Merapi.Masa.Lalu. Diakses pada tanggal 4 Mei 2012.

http://dinhut.jatengprov.go.id/www/mod.php?mod=userpage&menu=904&page_id=12. Diakses pada tanggal 7 Mei 2012.